



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025 – 2029





BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
15. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya Pembangunan Daerah secara utuh.
16. Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah.
17. Kerangka Pendanaan, adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Program Pembangunan Daerah adalah Program Strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
30. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci
31. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci
32. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
34. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
35. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
36. Musyawarah perencanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah.
37. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan
Memuat latar belakang, dasar hukum, keterkaitan antardokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah
Memuat gambaran umum daerah, gambaran kondisi keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Memuat visi dan misi pembangunan daerah, tujuan dan sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Memuat program Perangkat Daerah yang dilengkapi dengan indikator program, target dan pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. BAB V : Penutup
Memuat Kesimpulan dan saran.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.”

BAB V PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati dan Wakil Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada target kinerja RPJMD 2021-2026 yang belum tercapai, sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD menjadi dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR 8 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT: (10/123/2025).

LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2024–2029 dapat diselesaikan. Dokumen ini merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Karawang periode 2023–2028, sekaligus komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

RPJMD ini disusun berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang. Proses penyusunan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, SKPD, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat, guna memastikan program-program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan riil dan aspirasi daerah.

Kami menyadari bahwa RPJMD bukanlah akhir dari proses perencanaan, melainkan awal dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Karawang yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. Dokumen ini akan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra), serta menjadi dasar evaluasi kinerja secara periodik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RPJMD ini. Semoga upaya kita bersama membawa Kabupaten Karawang menjadi daerah yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.



Daftar Isi

Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	xv
BAB I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.1.1. Penyusunan RPJMD Karawang 2025 – 2029 sebagai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah	I-1
1.1.2. Proses Penyusunan RPJMD Karawang 2025 – 2029.....	I-5
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-9
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-12
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional	I-13
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD, dan Renja-PD	I-13
1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RTRW Kabupaten Karawang.....	I-14
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karawang	I-14
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Dokumen Perencanaan Sektor Lain.....	I-15
1.4. Maksud, Tujuan, dan Sasaran	I-16
1.4.1. Maksud.....	I-16
1.4.2. Tujuan	I-16
1.4.3. Sasaran.....	I-17
1.5. Sistematika Penulisan	I-17
BAB II Gambaran Umum Daerah	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-73
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	II-124
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-150

2.1.5	Standar Pelayanan Minimal	II-167
2.1.6	Kerjasama Daerah	II-175
2.1.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur	II-175
2.2	Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik.....	II-190
2.2.1	Kebutuhan Hunian	II-190
2.2.2	Kebutuhan Air Bersih	II-194
2.2.3	Kebutuhan Energi/Kelistrikan	II-196
2.2.4	Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	II-197
2.2.5	Kebutuhan Pengelolaan Limbah	II-198
2.2.6	Kebutuhan Internet.....	II-199
2.2.7	Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan	II-199
2.2.8	Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan	II-200
2.3	Kondisi Keuangan Daerah	II-201
2.3.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	II-201
2.3.2	Neraca Daerah	II-223
2.3.3	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	II-232
2.3.4	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	II-235
2.3.5	Analisis Pembiayaan.....	II-241
2.3.6	Proyeksi Keuangan Daerah	II-243
2.3.7	Kebutuhan Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah	II-257
2.4	Permasalahan dan Isu Strategis	II-260
2.4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-260
2.4.2	Identifikasi Isu Strategis	II-264
2.4.3	Rumusan Isu Strategis	II-289
2.5	Isu Strategis Kabupaten Karawang.....	II-301
2.6	Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021 – 2026	II-313
2.6.1	Indikator Makro	II-313
2.6.2	Capaian Indikator RPJMD 2021 – 2026.....	II-315

BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-1

3.1	Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	III-1

3.1.1	Kerangka Acuan Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	III-1
3.1.2	Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	III-3
3.1.3	Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	III-4
3.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029	III-12
3.2.1	Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	III-12
3.2.2	Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	III-14
3.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan	III-22
3.3.1	Konsep Pengembangan Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah	III-22
3.3.2	Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Karawang.....	III-25
3.3.3	Pentahapan Pembangunan Kabupaten Karawang.....	III-33
3.3.4	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-52
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah.....	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-55
4.2.1	Indikator Makro	IV-55
4.2.2	Indikator Kinerja Utama.....	IV-57
4.2.3	Indikator Kinerja Daerah	IV-59
BAB V Penutup		V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Pedoman Transisi	V-2



Daftar Tabel

Tabel I-1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang berdasarkan RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045.....	I-4
Tabel I-2 Isu Strategis dan TPB Terkait Kabupaten Karawang	I-15
Tabel II-1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan	II-2
Tabel II-2 Produksi Tanaman Buah Buahan di Kabupaten Karawang (Dalam Kuintal).....	II-7
Tabel II-3 Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Karawang	II-9
Tabel II-4 Produksi Tanaman Sayur Sayuran di Kabupaten Karawang (Dalam Kw)	II-9
Tabel II-5 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi di Kabupaten Karawang.....	II-16
Tabel II-6 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya.....	II-17
Tabel II-7 Jenis Wisata yang Terdapat di Kabupaten Karawang.....	II-19
Tabel II-8 Desa Wisata yang Ditetapkan Pada SK No. 100.3.3.2/Kep.160-Huk/2025	II-21
Tabel II-9 Kondisi Topografi di Kabupaten Karawang	II-21
Tabel II-10 Luas Wilayah Berdasar Daerah Aliran Sungai (DAS)	II-23
Tabel II-11 Luas Wilayah Berdasar Jenis Tanah.....	II-24
Tabel II-12 Luas Wilayah Berdasar Tutupan Lahan	II-27
Tabel II-13 Distribusi Air Bersih Berdasarkan Cabang di Kabupaten Karawang 2024	II-33
Tabel II-14 Konversi Perhitungan Rumus Lama ke Rumus Baru Perhitungan IKLH	II-41
Tabel II-15 Kondisi Eksisting Penyebab Pencemaran Pada Kualitas Lingkungan Hidup	II-41
Tabel II-16 Timbulan dan Volume Sampah per Tempat Pengolahan	II-43
Tabel II-17 Proyeksi Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	II-43
Tabel II-18 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020..	II-48

Tabel II-19 Potensi Timbulan Sampah.....	II-49
Tabel II-20 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak 2022-2024	II-50
Tabel II-21 Capaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2024	II-60
Tabel II-22 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota 2020 – 2024 (Ribu Jiwa).....	II-63
Tabel II-23 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karawang per Kecamatan	II-64
Tabel II-24 Tabulasi Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kab/Kota 2021-2024 (Dalam Persen).....	II-65
Tabel II-25 Struktur Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Karawang Tahun 2024 (Dalam Ribu Jiwa).....	II-67
Tabel II-26 Komponen Hasil Proyeksi Kependudukan Kabupaten Karawang 2025 - 2045	II-71
Tabel II-27 Hasil Proyeksi Kependudukan Kabupaten Karawang berdasarkan Struktur Umur 2025 - 2029.....	II-72
Tabel II-28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional	II-74
Tabel II-29 PDRB ADHK Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)	II-74
Tabel II-30 Pertumbuhan PDRB ADHK 2020 – 2024	II-76
Tabel II-31 PDRB ADHB Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)	II-77
Tabel II-32 Pertumbuhan PDRB ADHB 2020 – 2024.....	II-80
Tabel II-33 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2019 - 2024.....	II-83
Tabel II-34 Tabulasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Jawa Barat, dan Karawang.....	II-85
Tabel II-35 Tabulasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Per Gender.....	II-88
Tabel II-36 Tabulasi Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Per Gender 2024.....	II-89
Tabel II-37 Jumlah Guru dan Murid Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023	II-91
Tabel II-38 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Makanan dan non Makanan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat (2020 – 2024)	II-94
Tabel II-39 Jumlah Masyarakat Miskin.....	II-96

Tabel II-40 Tabulasi Rata-rata Pengeluaran per Kapita/Bulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan 2020 – 2024 (Rupiah).....	II-98
Tabel II-41 Angkatan Kerja Kab/Kota Jawa Barat 2020-2024.....	II-100
Tabel II-42 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Jawa Barat 2020-2024..	II-102
Tabel II-43 Hasil Analisis Tabel Input dan Output terhadap Multiplier Effect di Kabupaten Karawang	II-104
Tabel II-44 Jumlah Eksisting dan Ideal Puskesmas di Kabupaten Karawang ...	II-110
Tabel II-45 Tabulasi Indeks Literasi Numerasi SD - SMP	II-114
Tabel II-46 Jenis Program Perlindungan Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2023	II-115
Tabel II-47 Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial Tahun 2023	II-115
Tabel II-48 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 2020 - 2024.....	II-115
Tabel II-49 Jumlah Tempat Beribadah 2020 - 2024	II-115
Tabel II-50 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 2019-2023	II-116
Tabel II-51 Jumlah Situs Sejarah dan Cagar Budaya Tahun 2019 - 2023	II-116
Tabel II-52 Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan Tahun 2020-2024	II-117
Tabel II-53 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2019-2023	II-117
Tabel II-54 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2020 - 2023	II-118
Tabel II-55 Indeks Ketimpangan Gender	II-118
Tabel II-56 Indeks Pembangunan Gender	II-119
Tabel II-57 Indeks Pemberdayaan Gender	II-119
Tabel II-58 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender	II-119
Tabel II-59 Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Kategorinya Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2024.....	II-125
Tabel II-60 Kelompok Usia Penduduk Kabupaten Karawang 2020 - 2024	II-127
Tabel II-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karawang 2022-2024.....	II-131
Tabel II-62 Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama Selama Seminggu yang Lalu 2020 - 2024	II-131

Tabel II-63 Capaian Indeks Pembangunan TIK Nasional 2022-2023	II-135
Tabel II-64 Indikator Indeks Pembangunan TIK	II-135
Tabel II-65 Jenis, Berat (kg), dan Nilai Ekspor (USD)	II-136
Tabel II-66 Jenis, Berat (kg), dan Nilai Impor (USD)	II-138
Tabel II-67 Nilai Ekspor (USD) dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Karawang	II-141
Tabel II-68 Tabulasi Jumlah Investasi Kabupaten Karawang 2020-2024	II-143
Tabel II-69 Tabulasi PDRB ADHK Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ..	II-147
Tabel II-70 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota Terhadap provinsi Jawa Barat 2020-2024	II-148
Tabel II-71 Indeks Reformasi Birokrasi	II-150
Tabel II-72 Indeks Kepuasan Masyarakat	II-152
Tabel II-73 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	II-152
Tabel II-74 Nilai Dimensi Kebijakan dan Tata Kelola	II-153
Tabel II-75 Indeks Demokrasi Indonesia	II-153
Tabel II-76 Indeks Daya Saing Daerah	II-155
Tabel II-77 Capaian IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 2021 – 2024	II-156
Tabel II-78 Rencana Pembangunan Transportasi Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2042	II-177
Tabel II-79 Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Kabupaten Karawang 2011 - 2031	II-179
Tabel II-80 Ringkasan Rencana Pola dan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031	II-182
Tabel II-81 Kawasan Strategis Kabupaten Karawang dan Penangannya	II-190
Tabel II-82 Proyeksi Kebutuhan Hunian Vertikal	II-191
Tabel II-83 Rencana Pengembangan Rusunawa Bagi MBR	II-193
Tabel II-84 Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik di Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	II-195
Tabel II-85 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2030	II-196

Tabel II-86 Proyeksi Daya Terpasang, Produksi , dan Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada UP3 PLN Menurut Unit Layanan Pelanggan/ULP di Kabupaten Karawang	II-196
Tabel II-87 Kebutuhan Energi/Kelistrikan di Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2030	II-196
Tabel II-88 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan	II-198
Tabel II-89 Proyeksi Timbulan Limpasan Limbah	II-199
Tabel II-90 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur di Kabupaten Karawang.....	II-200
Tabel II-91 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang..	II-200
Tabel II-92 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Karawang.	II-201
Tabel II-93 Realisasi APBD Kab Karawang Tahun 2020 - 2024	II-202
Tabel II-94 Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024	II-207
Tabel II-95 Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024	II-215
Tabel II-96 Rincian Perkembangan Pembiayaan Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024	II-220
Tabel II-97 Rasio Kemandirian.....	II-221
Tabel II-98 Klasifikasi Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	II-223
Tabel II-99 Rincian Perkembangan Neraca Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024	II-224
Tabel II-100 Rincian Ekuitas (Dalam Jutaan Rupiah) Kabupaten Karawang	II-229
Tabel II-101 Rasio Lancar Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah).....	II-230
Tabel II-102 Rasio Cepat Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah).....	II-231
Tabel II-103 Rasio Solvabilitas Kabupaten Karawang periode 2020 - 2024.....	II-231
Tabel II-104 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 (Dalam Persen).....	II-236
Tabel II-105 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang Tahun 2020-2023	II-238
Tabel II-106 Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	II-239

Tabel II-107 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama II-240	
Tabel II-108 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah).....	II-242
Tabel II-109 Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah).....	II-242
Tabel II-110 Rincian Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026 - 2030	II-245
Tabel II-111 Rincian Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026 - 2030	II-248
Tabel II-112 Rincian Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	II-251
Tabel II-113 Rincian Hasil Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029.....	II-254
Tabel II-114 Rincian Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029	II-256
Tabel II-115 Tahapan Transformasi Berdasarkan Misi (Agenda Pembangunan)	II-276
Tabel II-116 Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa	II-277
Tabel II-117 Capaian Indikator TPB Kabupaten Karawang	II-279
Tabel II-118 Kertas Kerja Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Karawang	II-289
Tabel II-119 Kertas Kerja Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Karawang Per Kelompok Bidang.....	II-293
Tabel II-120 Potensi dan Masalah Aspek Pembangunan Manusia.....	II-301
Tabel II-121 Potensi dan Masalah Aspek Ekonomi	II-304
Tabel II-122 Potensi dan Masalah Aspek Tata Kelola Pemerintahan	II-305
Tabel II-123 Potensi dan Masalah Aspek Pembangunan Kewilayah dan Infrastruktur	II-306
Tabel II-124 Identifikasi Permasalahan dalam Isu Strategis.....	II-307
Tabel II-125 Realisasi IPM Kabupaten Karawang 2021 - 2024.....	II-313
Tabel II-126 Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Karawang 2021 - 2024 ..	II-313



Tabel II-127 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang 2021 – 2024...	II-314
Tabel II-128 Realisasi IKLH Kabupaten Karawang 2021 - 2024	II-314
Tabel II-129 Realisasi PDRB Sektor Infrastruktur Kabupaten Karawang 2021 - 2024.....	II-314
Tabel II-130 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karawang 2021 - 2024.....	II-315
Tabel II-131 Capaian Indikator RPJMD 2021 - 2026	II-316
Tabel III-1 Unsur Pembentuk Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-3
Tabel III-2 Keterkaitan Misi Pembangunan Daerah dan Isu Strategis.....	III-9
Tabel III-4 Kerangka Penjabaran Misi 1 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-14
Tabel III-5 Kerangka Penjabaran Misi 2 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-15
Tabel III-6 Kerangka Penjabaran Misi 3 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-15
Tabel III-7 Kerangka Penjabaran Misi 4 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-16
Tabel III-8 Kerangka Penjabaran Misi 5 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-17
Tabel III-9 Kerangka Pencapaian Misi Pembangunan Kabupaten Karawang ...	III-18
Tabel III-10 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-20
Tabel III-11 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029	III-26
Tabel III-12 Penahapan Pembangunan Kabupaten Karawang	III-34
Tabel III-13 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang.....	III-35
Tabel III-14 Konsep Penjabaran Program Prioritas Bupati Karawang	III-52
Tabel III-15 Proyek Prioritas Kabupaten Karawang	III-56
Tabel III-16 Bentuk Dukungan terhadap Program Unggulan Nasional	III-57



Tabel III-17 Rumusan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang 2025-2029.....	III-60
Tabel IV-1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 2025 – 2030.....	IV-11
Tabel IV-2 Target Indikator Makro Tahun 2025 - 2030.....	IV-56
Tabel IV-3 Target Indikator Kinerja Utama 2025 - 2030	IV-58
Tabel IV-4 Target Indikator Kinerja Daerah 2025 – 2030	IV-60

Daftar Gambar

Gambar I-1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	I-6
Gambar I-2 Tahap dan Jadwal Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	I-8
Gambar I-3 Alur Perencanaan dan Penganggaran.....	I-13
Gambar II-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat.....	II-1
Gambar II-2 Peta Administrasi Kabupaten Karawang.....	II-3
Gambar II-3 Kawasan Industri Strategis di Karawang.....	II-4
Gambar II-4 Konektivitas Transportasi dalam Mendukung Mobilitas Orang dan Barang di Kab Karawang	II-4
Gambar II-5 Infrastruktur Energi di Kabupaten Karawang.....	II-5
Gambar II-6 Luas Area Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ha).....	II-6
Gambar II-7 Produksi Tanaman Padi Kab Karawang Periode 2020 – 2024 (Ton GKG).....	II-6
Gambar II-8 Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Kw/Ha)	II-7
Gambar II-9 Total Produksi Tanaman Buah Buahan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Kuintal)	II-8
Gambar II-10 Total Produksi Tanaman Sayur Sayuran di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Kuintal)	II-10
Gambar II-11 Total Luas Areal Lahan Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Ha)	II-11
Gambar II-12 Total Produksi Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Ton).....	II-11
Gambar II-13 Total Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Ton/Ha)	II-12
Gambar II-14 Luas Lahan Areal Kehutanan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ha).....	II-12

Gambar II-15 Total Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ha).....	II-13
Gambar II-16 Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ekor)	II-14
Gambar II-17 Populasi Hewan Unggas di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ekor)	II-14
Gambar II-18 Produksi Daging Ternak di Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Kg) ..	II-15
Gambar II-19 Produksi Daging Unggas di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Kg).....	II-16
Gambar II-20 Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-17
Gambar II-21 Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang 2020 - 2024.....	II-18
Gambar II-22 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Akomodasi di Kabupaten Karawang 2019 - 2024	II-18
Gambar II-23 Peta Topografi Kabupaten Karawang.....	II-22
Gambar II-24 Peta DAS Kabupaten Karawang	II-23
Gambar II-25 Peta Jenis Tanah Kabupaten Karawang	II-25
Gambar II-26 Tren Rata-Rata Curah Hujan Tiap Bulan Kabupaten Karawang..	II-26
Gambar II-27 Peta Curah Hujan Kabupaten Karawang	II-26
Gambar II-28 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Karawang	II-27
Gambar II-29 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Karawang Tahun 2029.....	II-28
Gambar II-30 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2029	II-29
Gambar II-31 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Karawang Per Kecamatan Tahun 2029.....	II-29
Gambar II-32 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-30
Gambar II-33 Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Karawang 2024.....	II-31

Gambar II-34 Konsumsi Listrik Per kapita di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (kWh).....	II-31
Gambar II-35 Perkembangan dan Target Bauran Energi Nasional	II-32
Gambar II-36 Akses Air Minum Layak Rumah Tangga di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (%).....	II-34
Gambar II-37 Skor Kualitas Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024 (%).....	II-35
Gambar II-38 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Karawang	II-36
Gambar II-39 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	II-36
Gambar II-40 Prevalance Of Undernourishment (POU) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (%).....	II-37
Gambar II-41 Prevalance Of Undernourishment (POU) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (%).....	II-38
Gambar II-42 Perbandingan Target dan Capaian IKLH di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-39
Gambar II-43 Capaian Indikator Kinerja Komponen IKLH Kabupaten Karawang 2020 - 2024.....	II-40
Gambar II-44 Capaian Indikator Timbulan Sampah di Perkotaan Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024	II-42
Gambar II-45 Peta Lokasi TPA dan TPST Kabupaten Karawang	II-44
Gambar II-46 Peta Sebaran TPS3R Kabupaten Karawang	II-44
Gambar II-47 Peta Bahaya Banjir Kabupaten Karawang	II-51
Gambar II-48 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Karawang	II-52
Gambar II-49 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Karawang.....	II-53
Gambar II-50 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karawang	II-54
Gambar II-51 Peta Bahaya Kekeringan di Kabupaten Karawang	II-55
Gambar II-52 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi di Kabupaten Karawang	II-56
Gambar II-53 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Karawang.....	II-57

Gambar II-54 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.....	II-57
Gambar II-55 Total Emisi Kabupaten Karawang	II-59
Gambar II-56 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Dalam Ribu)	II-62
Gambar II-57 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 (Jiwa/Km2).....	II-64
Gambar II-58 Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2024...	II-66
Gambar II-59 Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2024 (Jiwa)....	II-67
Gambar II-60 Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024.....	II-68
Gambar II-61 Total Fertility Rate Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023	II-69
Gambar II-62 Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang 2025 – 2030 (Jiwa)	II-70
Gambar II-63 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang 2025 – 2030	II-70
Gambar II-64 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2024	II-73
Gambar II-65 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 – 2024 (%).....	II-74
Gambar II-66 Proporsi Kontribusi PDRB ADHK di Kabupaten Karawang Tahun 2024.....	II-75
Gambar II-67 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024.....	II-76
Gambar II-68 PDRB ADHK Kabupaten Karawang Terhadap Jawa Barat Tahun 2020 - 2024.....	II-77
Gambar II-69 Proporsi Kontribusi PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2024.....	II-79
Gambar II-70 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024.....	II-79
Gambar II-71 PDRB ADHK dan ADHB per-Kapita Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-81
Gambar II-72 Laju Tingkat Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024	II-82

Gambar II-73 Estimasi Biaya Hidup per Orang VS Upah Minimum Kabupaten Tahun 2021 - 2024.....	II-82
Gambar II-74 Indeks Gini Rasio Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2024.....	II-84
Gambar II-75 Tren Indeks Pembangunan Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-85
Gambar II-76 Tren Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	II-86
Gambar II-77 Tren Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-87
Gambar II-78 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024	II-88
Gambar II-79 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-89
Gambar II-80 Hubungan Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pendidikan Tahun 2020 - 2024	II-90
Gambar II-81 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024	II-91
Gambar II-82 Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Karawang 2020 - 2024	II-92
Gambar II-83 Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024	II-92
Gambar II-84 Pengeluaran per Kapita berdasarkan Jenisnya Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024	II-93
Gambar II-85 Rata Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Karawang dan Jawa Barat 2020 - 2024	II-94
Gambar II-86 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2024	II-96
Gambar II-87 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Makanan Tahun 2020 - 2024.....	II-97
Gambar II-88 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020 - 2024	II-97
Gambar II-89 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karawang Tahun 2004 - 2024.....	II-99

Gambar II-90 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-100
Gambar II-91 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 – 2024 (%).....	II-101
Gambar II-92 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-103
Gambar II-93 Angka Stunting Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2023	II-106
Gambar II-94 Prevalensi Stunting di Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 - 2024.....	II-106
Gambar II-95 Tren Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2020 - 2024.....	II-107
Gambar II-96 Target dan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024	II-108
Gambar II-97 Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024....	II-108
Gambar II-98 Jumlah Bayi Lahir, BBLR, dan Gizi Buruk Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-109
Gambar II-99 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2019 – 2023	II-110
Gambar II-100 Jumlah Rumah Sakit KabupatenKarawang Tahun 2019-2023	II-111
Gambar II-101 Presentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Layak Minum pada Air Bersih Tahun 2019-2023.....	II-111
Gambar II-102 Tren Persentase Akses Rumah Tangga pada Sanitasi Layak Tahun 2019-2023.....	II-112
Gambar II-103 Tren Persentase Akses Rumah pada Hunian Layak Huni Tahun 2019 - 2022.....	II-112
Gambar II-104 Perbandingan Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2022 - 2024	II-113
Gambar II-105 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD dan SMP Tahun 2021 - 2024	II-114
Gambar II-106 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020 - 2024	II-114
Gambar II-107 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2024 (%)	II-120

Gambar II-108 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%).....	II-121
Gambar II-109 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%)	II-121
Gambar II-110 Presentase Perkawinan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%).....	II-122
Gambar II-111 Pengasuhan Anak Tidak Layak di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2023.....	II-123
Gambar II-112 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-123
Gambar II-113 Komponen Indeks Daya Saing Daerah	II-124
Gambar II-114 Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2024	II-127
Gambar II-115 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Usia	II-128
Gambar II-116 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Karawang.....	II-129
Gambar II-117 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kab Karawang dan Prov Jawa Barat 2019 - 2023.....	II-130
Gambar II-118 Proporsi PDRB terhadap Sektor Sektor Terkait 2019 - 2023...	II-130
Gambar II-119 Posisi relatif TPAK Kabupaten,Provinsi, dan Nasional 2022-2024....	II-131
Gambar II-120 Proporsi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utamanya Seminggu yang Lalu (%).....	II-132
Gambar II-121 Persentase Wirausaha Terhadap Seluruh jenis Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu (%) 2020 - 2024	II-133
Gambar II-122 Kontributor PDRB ADHK Kabupaten Karawang 2020 - 2024 ..	II-142
Gambar II-123 Tren Jumlah Investasi Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024	II-143
Gambar II-124 5 Besar Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2024.....	II-144
Gambar II-125 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Huni 2019 – 2024 (%)	II-144
Gambar II-126 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Karawang (%).....	II-145

Gambar II-127 Rumah Tangga dengan Akses Fasilitas Sanitasi Layak (KK).....	II-146
Gambar II-128 Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) 2019 - 2023.....	II-146
Gambar II-129 Jumlah PDRB ADHK Kabupaten Karawang dan Kontribusinya Terhadap Prov. Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	II-148
Gambar II-130 Persentase PDRB Kabupaten Karawang Terhadap Rata-rata Se- Jawa Barat Tahun 2020-2024 (%)	II-149
Gambar II-131 Tingkat Inflasi Tahunan dan Pertumbuhannya di Kabupaten Karawang per 2009 - 2024	II-150
Gambar II-132 Capaian Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024.....	II-151
Gambar II-133 Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Terhadap Pusat dan Nasional.....	II-154
Gambar II-134 Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Karawang	II-188
Gambar II-135 Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Karawang	II-189
Gambar II-136 Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	II-191
Gambar II-137 Rencana Pengembangan Rusunawa bagi MBR-1 di Kawasan Perkotaan	II-192
Gambar II-138 Rencana Pengembangan Rusunawa bagi Buruh di Kawasan Peruntukan Industri.....	II-193
Gambar II-139 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029	II-195
Gambar II-140 Timbulan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029.	II-197
Gambar II-141 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Kabupaten Karawang Tahun 2024	II-199
Gambar II-142 Pendapatan Daerah Kab Karawang 2016 - 2024.....	II-203
Gambar II-143 Perkembangan Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kab Karawang Tahun 2017 – 2024 (Persen).....	II-204
Gambar II-144 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Karawang Tahun 2017 – 2024	II-204
Gambar II-145 Dana Perimbangan (Transfer) Kab Karawang Tahun 2016 – 2024...	II-205

Gambar II-146 Lain Lain Pendapatan yang Sah Kab Karawang Tahun 2016 – 2024	II-205
Gambar II-147 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024	II-206
Gambar II-148 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Karawang Periode 2020 - 2024.....	II-208
Gambar II-149 Proporsi Perkembangan Komponen PAD Periode 2020 - 2024	II-209
Gambar II-150 Komponen Dana Perimbangan Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-210
Gambar II-151 Komponen Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kab Karawang Periode 2020 - 2024.....	II-210
Gambar II-152 Komponen Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Kab Karawang Periode 2020 - 2024.....	II-211
Gambar II-153 Komponen Transfer Provinsi Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-212
Gambar II-154 Komponen Lain Lain Pendapatan yang Sah Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-212
Gambar II-155 Belanja Daerah Kab Karawang Periode 2017 - 2024.....	II-213
Gambar II-156 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kab Karawang Periode 2017 - 2024	II-214
Gambar II-157 Proporsi Komponen Belanja Operasi Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-216
Gambar II-158 Proporsi Komponen Belanja Modal Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-217
Gambar II-159 Proporsi Komponen Belanja Tak Terduga Kab Karawang Periode 2020 - 2024.....	II-218
Gambar II-160 Proporsi Komponen Belanja Transfer Kab Karawang Periode 2020 - 2024.....	II-218
Gambar II-161 Komponen Pembiayaan Daerah Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-219
Gambar II-162 Proporsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kab Karawang Periode 2020 - 2024	II-220

Gambar II-163 Rasio Kemandirian Daerah Kab Karawang Tahun 2020 – 2024	II-221
Gambar II-164 Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kab/Kota di Jawa Barat.....	II-222
Gambar II-165 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2024.....	II-222
Gambar II-166 Nilai Aset Kabupaten Karawang Periode Tahun 2020 – 2024.	II-228
Gambar II-167 Jumlah Kewajiban Kabupaten Karawang Periode Tahun 2020 – 2024	II-229
Gambar II-168 Perkembangan Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024	II-230
Gambar II-169 Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030.....	II-243
Gambar II-170 Hasil Proyeksi Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030.....	II-244
Gambar II-171 Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030	II-247
Gambar II-172 Komposisi Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2029.....	II-247
Gambar II-173 Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030.....	II-250
Gambar II-174 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kab Karawang Periode 2026 - 2029	II-255
Gambar III-1 Kesenambungan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten	III-11



Source : karawang.go.id

Bab

I

PENDAHULUAN

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Penyusunan RPJMD Karawang 2025 – 2029 sebagai Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karawang, sebagai wilayah strategis di Jawa Barat, menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks. Potensi pembangunan seperti pertumbuhan industri manufaktur, ekspansi infrastruktur, dan potensi pertanian yang besar, namun di sisi lain, tantangan seperti kesenjangan sosial, tekanan lingkungan akibat industrialisasi, kesenjangan teknologi antara masyarakat industrial dengan masyarakat pedesaan, terjadinya segregasi perkembangan perkotaan antara sisi utara, tengah, dan selatan, serta keterbatasan akses layanan dasar di wilayah perdesaan masih menjadi perhatian. Pandemi COVID-19 juga meninggalkan dampak multidimensi, termasuk perlambatan ekonomi dan peningkatan angka kemiskinan. Kondisi ini mendorong kebutuhan untuk merumuskan dokumen perencanaan per lima tahunan sebagai perencanaan strategis untuk mencapai cita-cita Kabupaten Karawang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karawang tahun 2025 – 2045 dan visi Indonesia Emas 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai pedoman pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan responsif terhadap perubahan global maupun lokal.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun sedangkan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJPD, yang mengindikasikan bahwa penyusunan RPJMD hendaknya selaras dan berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi RPJPD. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam penyusunan RPJMD diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan dalam penyusunan RPJMD sebagai penjabaran dalam visi, misi, kepala daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD

dan RKPD, menyatakan bahwa, tahapan penyusunan RPJMD daerah dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, politis, partisipatif serta *top down* dan *bottom up* yang bertujuan untuk pemantapan landasan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan kepada peningkatan daya saing produk dan hubungan regional terutama dengan provinsi tetangga, dengan meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan efisiensi usaha dengan menggunakan teknologi maju.

RPJMD Kabupaten Karawang menegaskan bahwa arah pembangunan daerah harus selaras dengan dinamika tantangan global, nasional, dan lokal. Kabupaten Karawang sebagai salah satu pusat pertumbuhan industri nasional dihadapkan pada kebutuhan untuk meningkatkan daya saing, mengoptimalkan potensi sumber daya, dan mengatasi permasalahan spesifik daerah seperti kesenjangan pembangunan, tekanan lingkungan, dan kebutuhan layanan publik yang berkualitas. Dalam konteks ini, riset dan inovasi menjadi instrumen strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi, serta Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD perlu didukung oleh landasan ilmiah yang kredibel dan relevan. Melalui kegiatan riset yang terarah dan inovasi yang aplikatif, Kabupaten Karawang dapat mengidentifikasi potensi unggulan daerah, merumuskan solusi berbasis bukti (*evidence-based policy*), dan mendorong lahirnya produk serta layanan baru yang memberi nilai tambah ekonomi dan sosial.

RPJMD juga memandatkan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Riset dan inovasi berperan penting dalam mendukung ketiga aspek ini, misalnya dengan menghasilkan teknologi tepat guna untuk sektor industri dan pertanian, sistem informasi yang mempercepat pelayanan publik, serta model pengelolaan lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dengan demikian, riset dan inovasi bukan hanya bagian dari agenda pengembangan IPTEK, tetapi juga merupakan penggerak utama pencapaian visi RPJMD Kabupaten Karawang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global

Dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, maka diawali dengan evaluasi RPJMD 2021-2026 yang sudah dilakukan, serta penyusunan studi pendahuluan (*Background Study*) RPJMD 2025-2029 untuk mengumpulkan data dan informasi kondisi saat ini serta *review* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Hasil studi pendahuluan RPJMD 2025-2029 menghasilkan bahan untuk menyusun rancangan teknokratik RPJMD yang memuat pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan daerah serta permasalahan dan isu strategis daerah (Pasal 44 Permendagri 86/2017). Rancangan teknokratik dibahas oleh tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk kemudian disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan dan

ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala Perangkat Daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD kemudian menjadi bahan penyusunan Rancangan Awal RPJMD, setelah Bupati terpilih dilantik dan bertugas secara efektif.

Dokumen RPJMD mempunyai nilai strategis sebagai instrumen kunci dalam:

1. Mewujudkan pembangunan SDM yang adaptif dan berkarakter, mempersiapkan masyarakat Karawang menjadi masyarakat modern dan maju, dengan tetap menjadi nilai dan modal sosial yang ada, dengan juga menyediakan jaring pengaman sosial agar tidak ada masyarakat yang tertinggal.
2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang inklusif dan infrastruktur wilayah yang terintegrasi, yang bertujuan untuk Mempercepat pengembangan kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan perdesaan yang terintegrasi.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi, dengan memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor industri, pertanian, dan pariwisata berbasis inovasi.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan guna mendukung pelayanan publik yang inovatif.

Pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang salah satunya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang periode 2025 – 2030. Berdasarkan hasil perhitungan suara, pada tanggal 9 Januari 2025 melalui rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Karawang menetapkan pasangan Aep Syaepuloh dan Maslani sebagai Bupati Kabupaten Karawang periode 2025 – 2030. Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Bupati Kabupaten Karawang terpilih. Dengan dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka penyusunan RPJMD wajib diselesaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik (UU No. 23 Tahun 2014).

RPJMD 2025–2029 disusun dalam konteks kepemimpinan Bupati Karawang periode 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan hingga akhir masa jabatan bupati pada tahun 2029, dengan tetap memastikan kontinuitas program melalui transisi kepemimpinan berikutnya. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Karawang 2025–2029 tidak hanya menjadi *blueprint* teknokratis, tetapi juga representasi komitmen politik untuk mewujudkan masyarakat Karawang yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di era transformasi global.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karawang berdasarkan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2045 adalah **“Kabupaten Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”**. Dimana penjabarannya masing masing adalah sebagai berikut:

a. Unggul

Mewujudkan Kabupaten Karawang 2045 dengan menaikkan posisinya dalam ketahanan pangan dan resiliensi secara ekonomi dan sosial, bukan hanya untuk

kesejahteraan penduduknya, akan tetapi untuk pengembangan ekonomi-sosial negara secara keseluruhan. Diperlukan 3 langkah utama antara lain: 1) Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi; 2) Berkolaborasi dengan mitra global yang sudah mapan untuk memperoleh transfer teknologi dan litbang; dan 3) Pengembangan UMKM berwawasan global untuk tumbuh menjadi Industri Kecil dan Menengah yang tangguh, UMKM perlu meningkatkan akses ke pasar, baik domestik maupun ekspor, dan kemampuan untuk menarik *talent pool* yang jauh lebih kuat.

b. Maju

Terwujudnya Kabupaten Karawang menjadi daerah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih unggul dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan lebih unggul dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, pendidikan, dan inovasi. Dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

c. Berkelanjutan

Berkelanjutan termanifestasi dalam komitmen Kabupaten Karawang dalam menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, termasuk pengurangan pencemaran, pelestarian hutan dan air, serta pengembangan energi terbarukan.

Selanjutnya, isu strategis utama sebagaimana disebutkan dalam RPJPD Kabupaten Karawang, antara lain adalah:

1. Penguatan kualitas dan daya saing SDM dalam menghadapi tantangan global;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan aparaturnya yang berintegritas;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan potensi lokal;
4. Pembangunan sosial dan infrastruktur dan penataan ruang yang selaras; dan
5. Keseimbangan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Karawang berdasarkan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2045 antara lain.

Tabel I-1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang berdasarkan RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045

Tahap	Arah Kebijakan	Keterangan
Tahap I (2025 – 2029)	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah	Mengembangkan fondasi pembangunan Kab Karawang yang kokoh dengan mendorong kompetitivitas ekonomi Kab Karawang, meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangi kemiskinan, memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan

Tahap	Arah Kebijakan	Keterangan
		sesuai kebutuhan untuk memperkuat SDM yang terdidik dan sehat.
Tahap II (2030 – 2034)	Percepatan Pembangunan yang Berkelanjutan, Inklusif, dan Kolaboratif	Fokus pada pengembangan landasan pembangunan Kab Karawang menuju daerah yang aman, nyaman, dan berkelanjutan, inklusif dengan menekankan pada pengembangan sarana dan prasarana kota yang efisien dan efektif, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, meningkatkan kualitas kehidupan dengan mempertahankan UMKM dan IKM, serta investasi untuk mendukung ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tahap III (2035 – 2039)	Pembangunan Ekosistem Inovasi dan Ekspansi Global	Fokus pada peningkatan kapasitas inovasi dan kreasi daerah dengan memetakan dirinya sebagai pusat keunggulan berstandar global. Melalui kecerdasan buatan dan digitalisasi, Kab Karawang menjelma menjadi <i>Smart City</i> .
Tahap IV (2040 – 2045)	Perwujudan Kabupaten Karawang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan	Fokus pada perwujudan Kab Karawang yang berdaya saing global berlandaskan kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, tata kelola pemerintahan yang baik, perekonomian yang kuat dan berkualitas dan berkelanjutan serta kapasitas inovasi dan kreasi daerah yang terus meningkat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sumber : RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045, 2025

1.1.2. Proses Penyusunan RPJMD Karawang 2025 – 2029

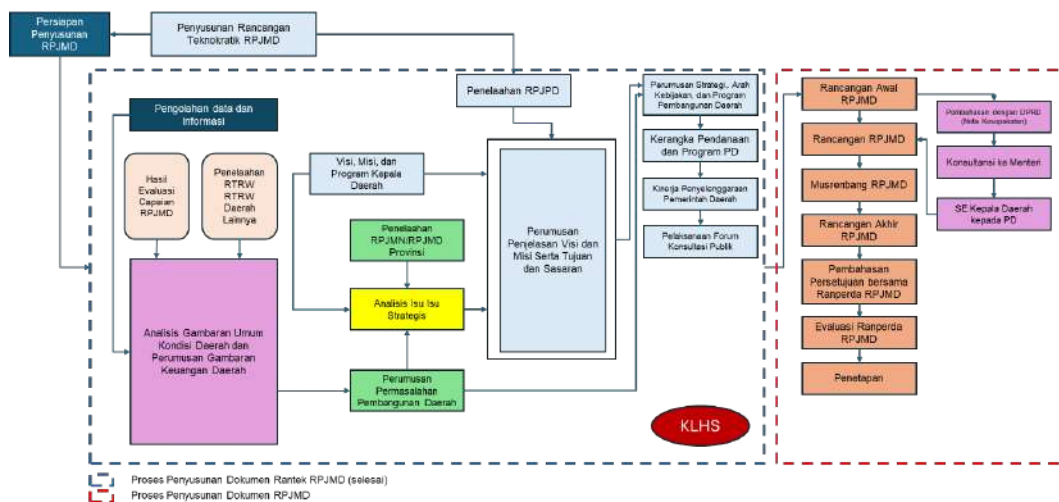
Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 dilakukan secara simultan dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029. Selain itu juga dilakukan simultan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029. Dengan begitu, diharapkan penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 selaras dengan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2029, serta dapat dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menyusun RPJMD telah menerapkan pendekatan yang diatur pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan perencanaan pembangunan yang dimaksud meliputi:

- Pendekatan Teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Pendekatan Partisipatif**, melaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan;
- Pendekatan Politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD;

- d. **Top-Down and Bottom-Up**, hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan lintas sektor daerah.

Alur penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar I-1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang, 2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029, dilakukan secara berkesinambungan, diawali dengan tahapan persiapan dan berakhir pada tahap penetapan melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1. Tahap Persiapan

Dilaksanakannya penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD beserta *background study* pada masing masing sektor untuk mengenali isu dan permasalahan dari Kabupaten Karawang. Selanjutnya Rancangan Teknokratik ini menjadi salah satu input dalam penyusunan RPJMD.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Karawang

Dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan awal berdasarkan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan DPRD Kabupaten Karawang.

3. Tahap Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Karawang

Dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan masukan dari konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Karawang, serta telah dilengkapi dengan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

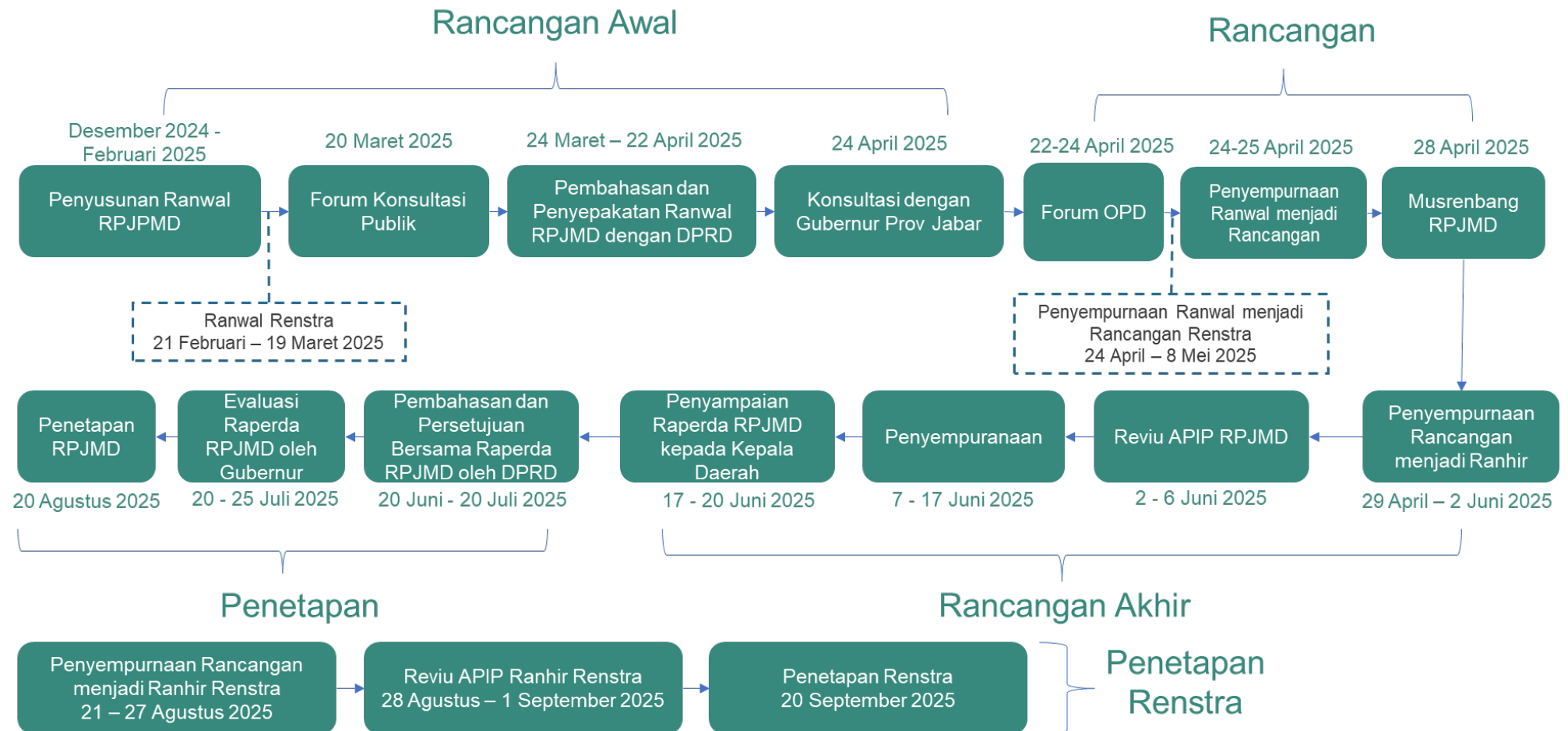
4. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karawang

Dilaksanakan dengan penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan Berita Acara kesepakatan Musrenbang RPJMD untuk selanjutnya disampaikan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk direviu. Hasil reviu APIP

menjadi bahan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD sebelum disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi ranperda RPJMD.

5. Tahap Penetapan RPJMD Kabupaten Karawang

Dilaksanakan dengan penyempurnaan Ranperda RPJMD Kabupaten Karawang dari Kemendagri untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029.



Gambar I-2 Tahap dan Jadwal Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang, 2025

Dokumen RPJMD Kabupaten Karawang merupakan dokumen kebijakan strategis hal ini dikarenakan dokumen ini dapat menjadi:

- a. Acuan dan arah pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD merupakan dokumen yang menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah, kepala daerah terpilih ke dalam bentuk tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. Pedoman pembangunan daerah dan penganggaran. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahunan, KUA (Kebijakan Umum Anggaran), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Penjabaran arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPD, serta menyinergikan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga memastikan integrasi antarkebijakan; dan
- d. Dasar dalam evaluasi kinerja pembangunan, dan penilaian keberhasilan daerah dalam mewujudkan janji politik dan tujuan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

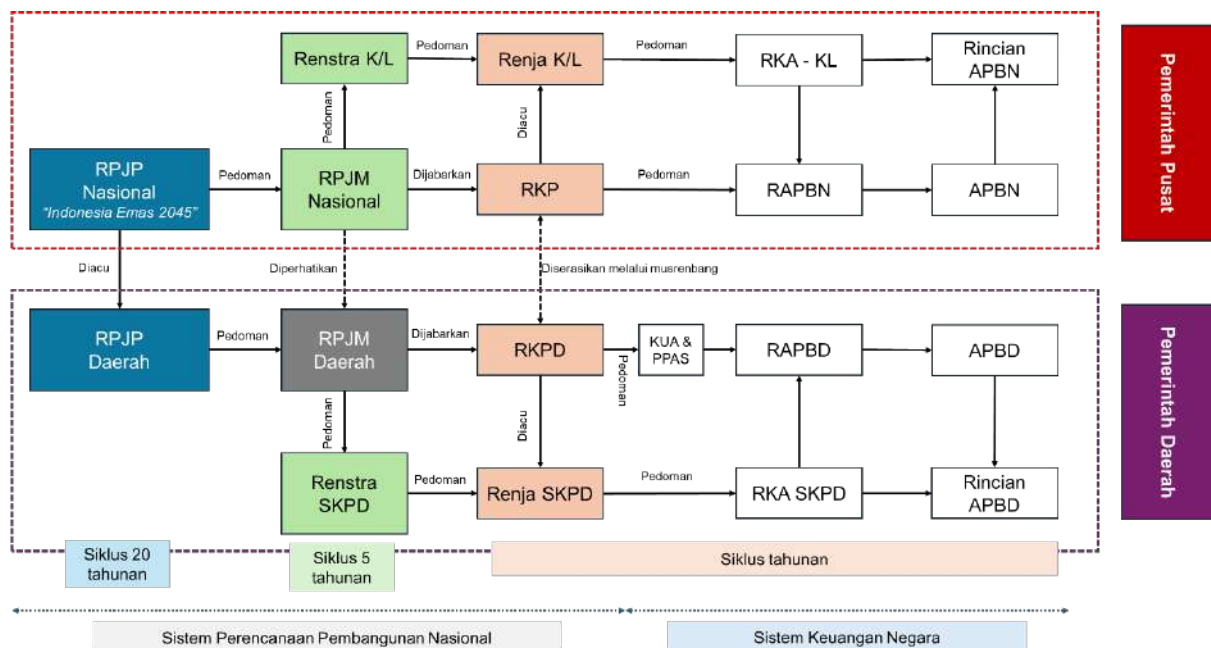
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2024 nomor 12);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11); dan
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan dan memperhatikan sistem penganggaran dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keuangan Negara. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan; Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Karawang disusun dengan memperhatikan arahan dan amanat kebijakan yang mengacu pada dokumen perencanaan lainnya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat aspek utama dalam peraturan ini yakni, perlunya sinkronisasi perencanaan antara perencanaan nasional, dan perencanaan provinsi, serta perlunya konsistensi apa yang direncanakan dapat diwujudkan melalui alokasi penganggaran yang tepat.



Gambar I-3 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017, 2025

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang perlu memperhatikan tujuan, sasaran, dan arah pembangunan yang termuat dalam dokumen RPJPD dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Khususnya terkait capaian dan lokus wilayah yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Karawang. Selain itu, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan pada RPJMD Provinsi Jawa Barat telah berkait dengan arahan nasional yang tertuang dalam RPJMN. Hal ini dalam konteks konsistensi dan mencapai tujuan bersama "Indonesia Emas 2045".

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD, dan Renja-PD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86/2017 hubungan antara dokumen RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renja (Rencana Kerja Tahunan), Renstra (Rencana Strategis), serta proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

RPJPD merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah, mencakup visi, misi, dan tujuan strategis. RPJPD kemudian dijabarkan ke dalam RPJMD, yang merupakan rencana pembangunan untuk periode 5 tahunan, disusun berdasarkan visi-misi kepala daerah terpilih dan diselaraskan

dengan RPJPD. RPJMD memuat prioritas pembangunan, program, dan kebijakan yang lebih spesifik untuk mencapai sasaran jangka panjang.

Dari RPJMD, disusun RKPD sebagai rencana kerja tahunan yang menguraikan program dan kegiatan prioritas untuk satu tahun anggaran. RKPD menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra (Rencana Strategis) yang berisi strategi pencapaian tujuan PD selama 5 (lima) tahun, serta Renja (Rencana Kerja Tahunan) yang merinci kegiatan, indikator, target, dan anggaran untuk satu tahun.

Renstra dan Renja-PD kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD, di mana kebutuhan pendanaan dari seluruh program dan kegiatan dalam Renja dihimpun dan dialokasikan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. APBD disusun melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, pendapatan, dan belanja daerah. Sistem keuangan daerah, yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memastikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD selaras dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan secara berjenjang dari RPJPD hingga Renja.

Seluruh dokumen perencanaan ini membentuk satu kesatuan sistem yang hierarkis dan terintegrasi, mulai dari perencanaan jangka panjang hingga operasional tahunan, dengan APBD sebagai instrumen pendanaan yang menjamin implementasi program pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan RTRW Kabupaten Karawang

Berdasarkan Undang Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang Undang tentang Penataan Ruang menghendaki keintegrasian antara dokumen tata ruang dengan dokumen rencana pembangunan. Seperti diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 menyatakan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 -2029 memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031. Hal ini untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan menengah Kabupaten Karawang dengan kebijakan pengembangan wilayah, struktur ruang, dan pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karawang

Berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, telah mengamanatkan Pemerintah Pusat maupun Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dokumen KLHS sendiri merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar atau terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dan dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi berupa antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 terdapat 7 (tujuh) isu prioritas *Sustainable Development Goals (SDG's)* Kabupaten Karawang antara lain sebagai berikut:

Tabel I-2 Isu Strategis dan TPB Terkait Kabupaten Karawang

No.	Isu Strategis	TPB Terkait
I	Belum Optimalnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang	TPB 1, TPB 2, TPB 8, TPB 10, dan TPB 17
II	Belum meratanya akses terhadap infrastruktur lingkungan yang berkualitas	TPB 1, dan TPB 6
III	Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi, dan penanganan bencana	TPB 11
IV	Belum meratanya akses terhadap infrastruktur ekonomi yang berkualitas	TPB 1
V	Penurunan terhadap kualitas lingkungan hidup	TPB 11
VI	Diperlukan optimalisasi terhadap upaya upaya peningkatan kualitas SDM	TPB 3, dan TPB 4
VII	Peningkatan terhadap sistem tata kelola pemerintahan	TPB 16

Sumber : KLHS Kabupaten Karawang 2025 - 2045, 2025

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Karawang dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

RPJMD Kabupaten Karawang sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan yang erat dengan dokumen perencanaan sektoral lainnya, seperti RAD SDG's dan RAD GRK. RAD SDG's (Rencana Aksi Daerah untuk Sustainable Development Goals) merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB, sedangkan RAD GRK (Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Gas Rumah Kaca) berfokus pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

RPJMD Kabupaten Karawang dapat diintegrasikan dengan RAD SDG's dan RAD GRK untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Integrasi ini dapat dilakukan dengan memasukkan indikator-indikator SDG's dan target penurunan emisi GRK ke dalam RPJMD, sehingga pembangunan daerah dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Karawang dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, yang tidak hanya memuat rencana pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga rencana pembangunan yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu Kabupaten Karawang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

1.4. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang dimaksudkan untuk memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dalam rangka memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan konsistensi antara penganggaran, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan selama 5 (lima) tahun masa pembangunan di Karawang, untuk mewujudkan Kabupaten Karawang yang lebih baik. Pelaksanaan yang efektif dari RPJMD ini diharapkan akan menghasilkan capaian pembangunan sebagai ukuran kinerja yang ditetapkan dalam indikator kinerja pembangunan di level impact dan outcome. Indikator kinerja ini selaras dengan indikator kinerja pembangunan pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029 adalah:

1. Penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah terpilih ke dalam kebijakan pembangunan yang terukur dan realistis;
2. Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah, dengan memperhatikan dokumen RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat;
3. Memberikan prioritas dalam pembangunan, sektor unggulan, serta program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Daerah
5. Memastikan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan inklusif dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan;
6. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan, dengan perencanaan yang jelas, sehingga perencanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana RPJMD disusun dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
8. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis selama jangka waktu 2025 – 2029.

1.4.3. Sasaran

Sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Terumuskannya gambaran umum kondisi Kabupaten Karawang;
2. Teridentifikasi dan terumuskannya gambaran keuangan Kabupaten Karawang;
3. Terumuskannya kebijakan pembangunan di Kabupaten Karawang, Nasional, otonomi daerah serta komitmen internasional, nasional dan provinsi yang berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Karawang;
4. Terumuskannya permasalahan dan isu strategis Kabupaten Karawang;
5. Terumuskannya visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang;
6. Terumuskannya strategi dan program pembangunan Kabupaten Karawang; dan
7. Terumuskannya kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Karawang.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2025 - 2029 ini terdiri dari lima bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II

Gambaran Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek Geografi dan Demografi, Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, Pelayanan Umum, Keuangan Daerah, dan Permasalahan dan Isu Strategis serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menyajikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

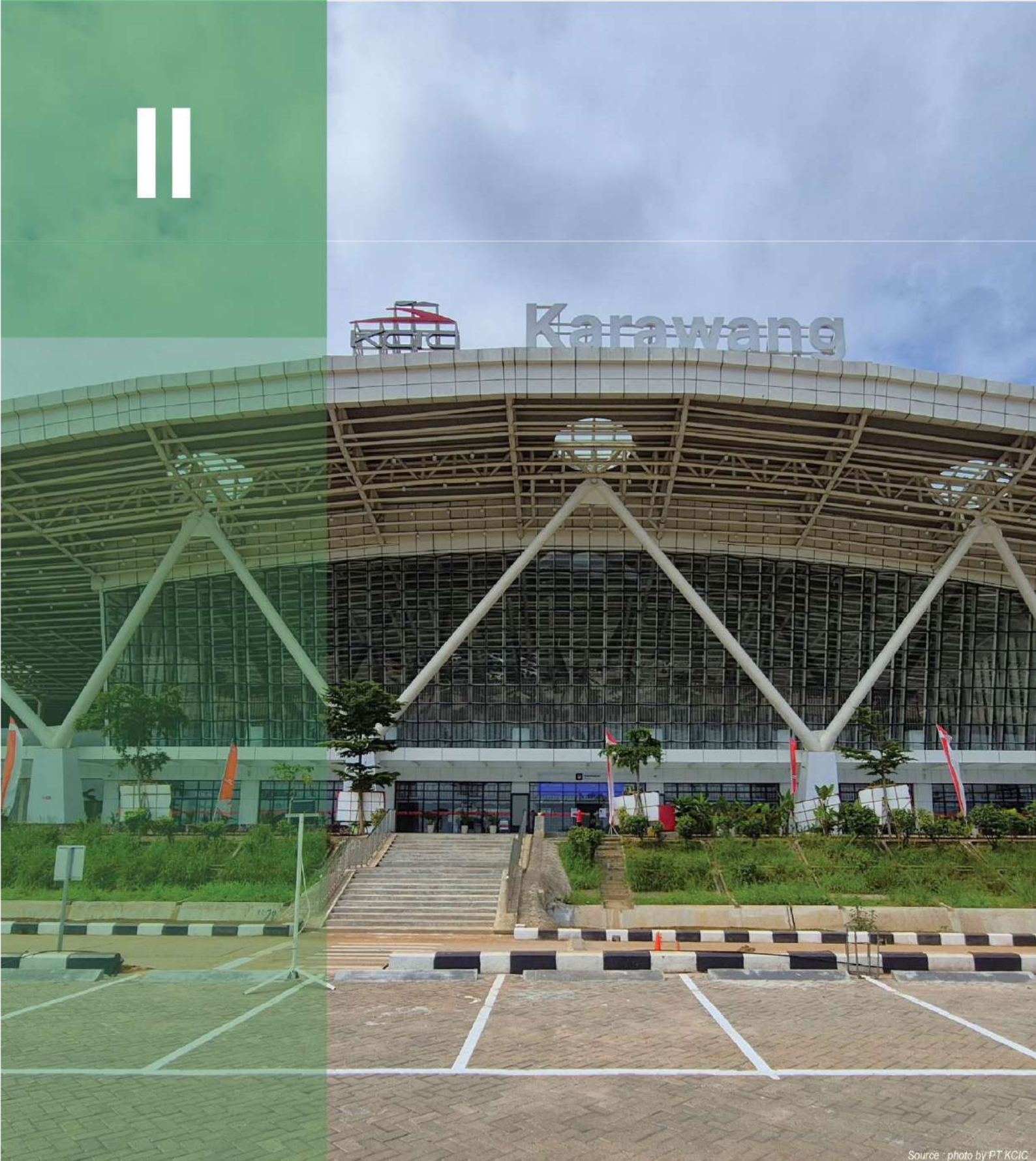
Bagian ini memuat program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, dilengkapi dengan indikator program, target, dan pagu indikatif program perangkat daerah. Selain itu memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

BAB V

Penutup

Bab ini memuat diantara-Nya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

II



Source : photo by PT KCIC

Bab II

GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB II

Gambaran Umum Daerah

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara administratif Kabupaten Karawang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat dengan letak geografis antara 107°02' - 107°40' Bujur Timur dan 5°56' - 6°34' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Karawang, yaitu: Sebelah Utara: Laut Jawa, Sebelah Timur: Kabupaten Subang, Sebelah Tenggara: Kabupaten Purwakarta, Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, dan Sebelah Barat: Kabupaten Bekasi.



Gambar II-1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Barat

Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Kabupaten Karawang berada pada posisi yang sangat strategis, mengingat kondisi kewilayahannya yang berada di utara Pulau Jawa, yang menghubungkan langsung antara Kota Bandung dan Jalan Pantai Utara Jawa. Selain itu, dalam aksesnya, Kab Karawang dilewati oleh Jalur Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), serta Jalan Tol Cipularang sebagai salah satu sambungan dari Jalan Tol Trans Jawa. Dengan strategisnya wilayah ini serta akses yang fleksibel, memberikan keuntungan Investasi yang cukup besar di Karawang, dengan transformasinya Kabupaten Karawang menjadi Kota Industri.

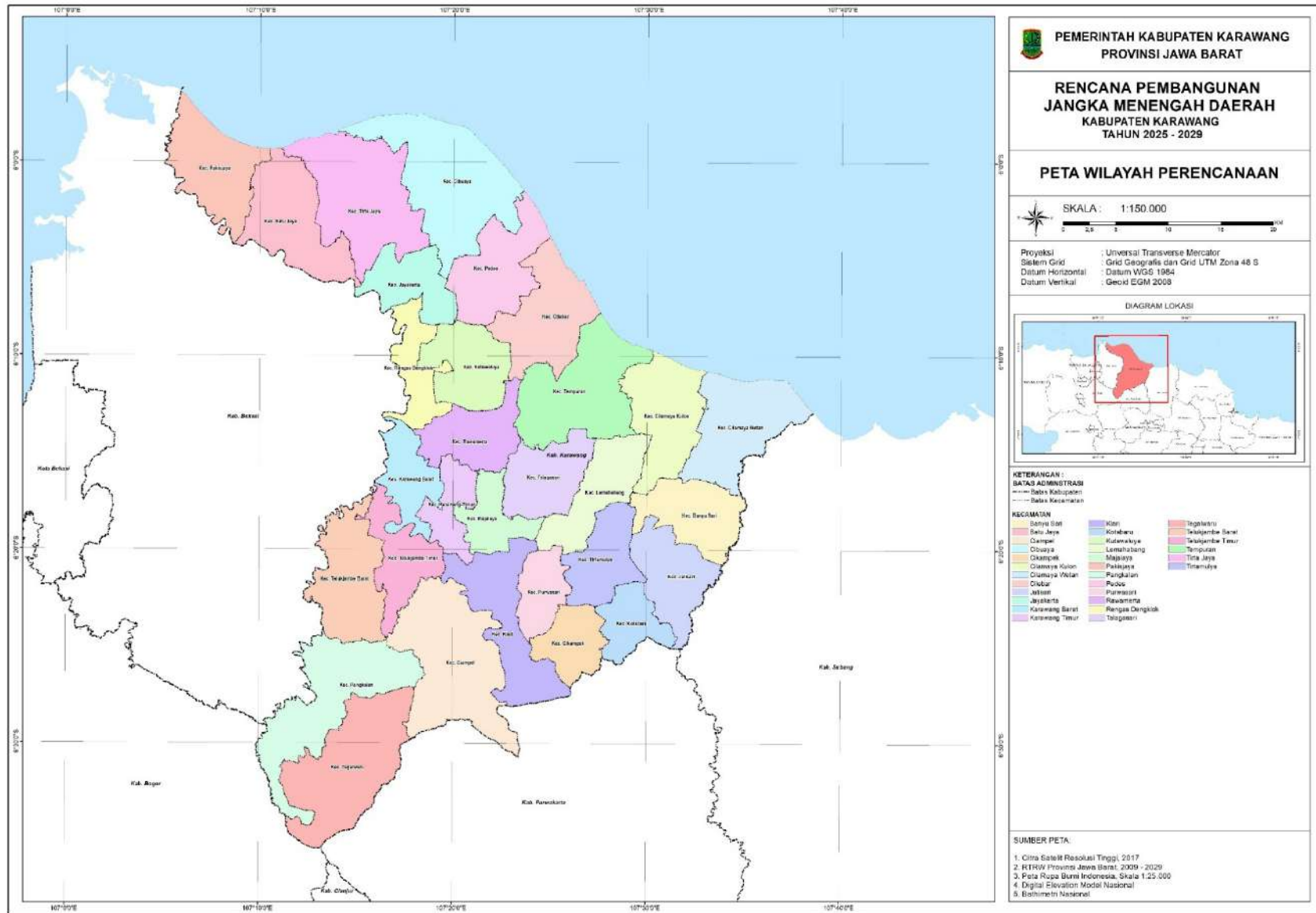
Kabupaten Karawang memiliki luas wilayah sebesar 1.913,71 Km² dengan kecamatan terluas pada Kecamatan Cibuaya sebesar 118,22 km² dan kecamatan dengan

luas terkecil pada Karawang Timur sebesar 30,37 km². Berikut merupakan luas wilayah Kabupaten Karawang berdasar kecamatan.

Tabel II-1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Banyusari	55.46
2	Batujaya	75.19
3	Ciampel	117.1
4	Cibuaya	118.22
5	Cikampek	36.34
6	Cilamaya Kulon	68.33
7	Cilamaya Wetan	78.17
8	Cilebar	71.93
9	Jatisari	55.34
10	Jayakarta	43.5
11	Karawang Barat	39.52
12	Karawang Timur	30.37
13	Klari	73.65
14	Kotabaru	33.31
15	Kutawaluya	54.6
16	Lemahabang	53.44
17	Majalaya	33.54
18	Pakisjaya	68.38
19	Pangkalan	99.66
20	Pedes	66.05
21	Purwasari	32.15
22	Rawamerta	50.32
23	Rengasdengklok	37.68
24	Tegalwaru	52.14
25	Telagasari	105.7
26	Telukjambe Barat	70.92
27	Telukjambe Timur	47.21
28	Tempuran	93.57
29	Tirtajaya	105.4
30	Tirtamulya	46.52

Sumber: Karawang Dalam Angka, 2025



Gambar II-2 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

Sumber: RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Kabupaten Karawang mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan di Jawa Barat maupun di Nasional. Realisasi Laju investasi di Kabupaten Karawang merupakan nomor 2 tertinggi di Jawa Barat. Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan di mempunyai kontributor terbesar di Kabupaten Karawang mencapai 71% dari seluruh sektor. Hal ini dikarenakan tersedianya infrastruktur strategis di Kabupaten Karawang. Selain itu, saat ini Kabupaten Karawang bertransformasi menjadi Kota Industri.



Gambar II-3 Kawasan Industri Strategis di Karawang

Sumber: Dok. PT Karawang International Industrial City (KIIC) dan Suryacipta City of Industry

Kawasan Industri strategis yang terdapat di Kabupaten Karawang salah satunya merupakan Kawasan Industri *Karawang Internasional Industrial City* dan *Suryacipta City of Industry*, selain itu berdasarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Karawang saat ini terdapat 12 Kawasan Industri dan 4.109 pada tahun 2022. Jenis Industri yang dominan terhadap jenis industri otomotif, elektronik, dan manufaktur.



Gambar II-4 Konektivitas Transportasi dalam Mendukung Mobilitas Orang dan Barang di Kab Karawang

Sumber: Dok. Antara News dan PT.KCIC

Kabupaten Karawang memiliki konektivitas yang sangat strategis melalui Jalan Tol Jakarta–Cikampek dan jalur kereta api, menjadikannya pusat pergerakan orang dan barang antara Jakarta, Bandung, serta kawasan industri utama di Jawa Barat. Akses tol melalui Gerbang Karawang Barat dan Timur, ditambah Tol Layang MBZ, memperlancar distribusi logistik dan mobilitas harian. Di sisi lain, Stasiun Karawang melayani kereta api antarkota dan komuter, serta diperkuat dengan kehadiran Stasiun Kereta Cepat Whoosh yang memangkas waktu tempuh ke Jakarta dan Bandung secara signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kawasan transit.



Gambar II-5 Infrastruktur Energi di Kabupaten Karawang

Sumber: Dok. PLTGU Jawa I dan CNBC Indonesia

Kabupaten Karawang memiliki infrastruktur energi yang kuat untuk mendukung aktivitas industri dan permukiman, terutama melalui pasokan listrik dan gas. Salah satu sumber energi utama adalah PLTGU Jawa-1 di Cilamaya, pembangkit listrik tenaga gas dan uap terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 1.760 MW, yang mulai beroperasi sejak 2024 untuk menopang kebutuhan listrik nasional dan kawasan industri Karawang. Selain itu, jaringan gas bumi dari PGN telah menjangkau banyak kawasan industri, menyediakan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Ketersediaan energi ini menjadi faktor penting yang mendukung daya saing Karawang sebagai pusat industri nasional.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Karawang mempunyai daerah dataran tinggi dan dataran rendah yang melintas dari sisi selatan ke sisi utara. Kabupaten Karawang mempunyai potensi besar di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata.

A. Pertanian

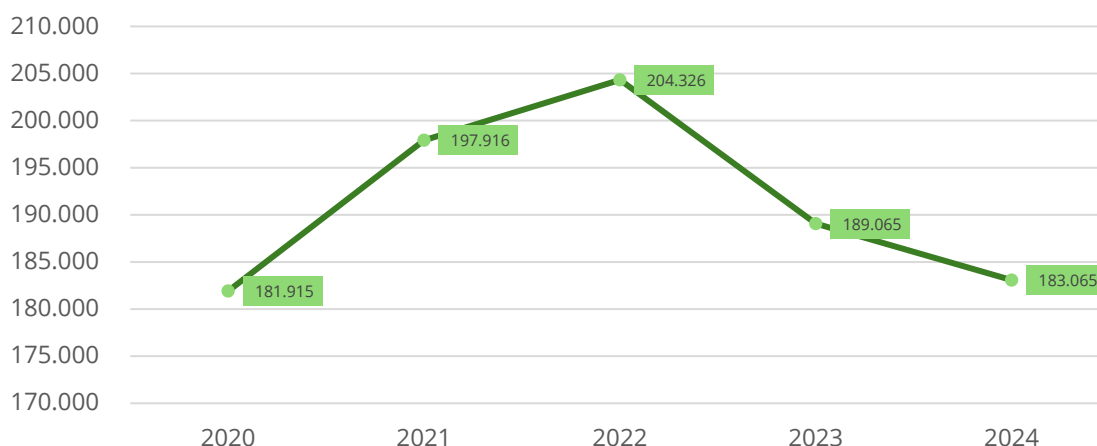
Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang menjadi salah satu pendukung dalam fokus utama pemerintahan Prabowo Gibran yang fokus dalam sektor ketahanan pangan. Ketahanan pangan juga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dalam sektor ketahanan pangan.

Sumber daya alam pertanian di Kabupaten Karawang terdiri dari tanaman pangan, kawasan hortikultura, serta peternakan. Sektor pertanian di Kab Karawang memegang peran vital dalam pembangunan di Kab Karawang. Sektor ini masih berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan. Meskipun saat ini sudah beralih ke Industrialisasi.

1. Pertanian Tanaman Pangan

Luas lahan pertanian padi selama periode 2013-2020 mengalami penurunan, dengan rata rata penurunan 0,4% dan total penyusutan 6.240 Ha. Hal ini dapat disinyalir sebagai dampak akibat terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Karawang karena lahan terbangun. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan pangan akan meningkat.

Luas Areal Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024 (Ha)

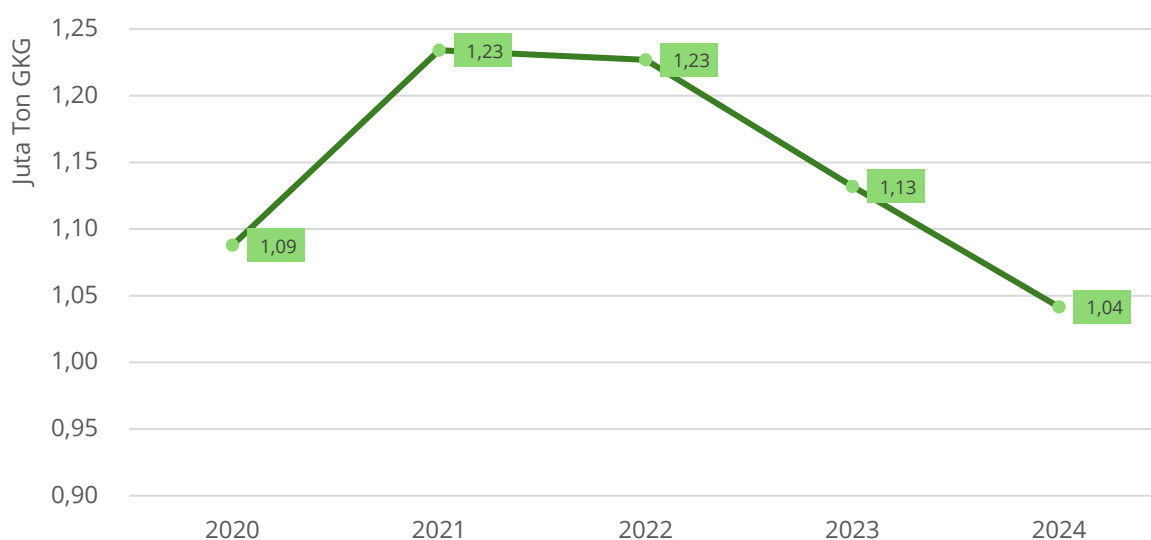


Gambar II-6 Luas Area Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ha)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Produksi padi dalam jangka waktu 2013 – 2020 mengalami fluktuasi, dari yang awalnya tahun 2019 sebesar 185 ribu hektar dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 204 ribu hektar, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 183 Ha. Menunjukkan terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi pada tanaman padi. Hal ini juga berdampak terhadap produksi tanaman padi yang mengalami fluktuasi dari tahun 2019 ke tahun 2024, pada tahun 2019 produksi padi mencapai 1,1 Juta Ton GKG, lalu pada tahun 2021 mencapai 1,23 Juta Ton GKG, akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,04 Juta Ton GKG. Hal ini sejalan dengan luas areal tanaman padi yang dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi.

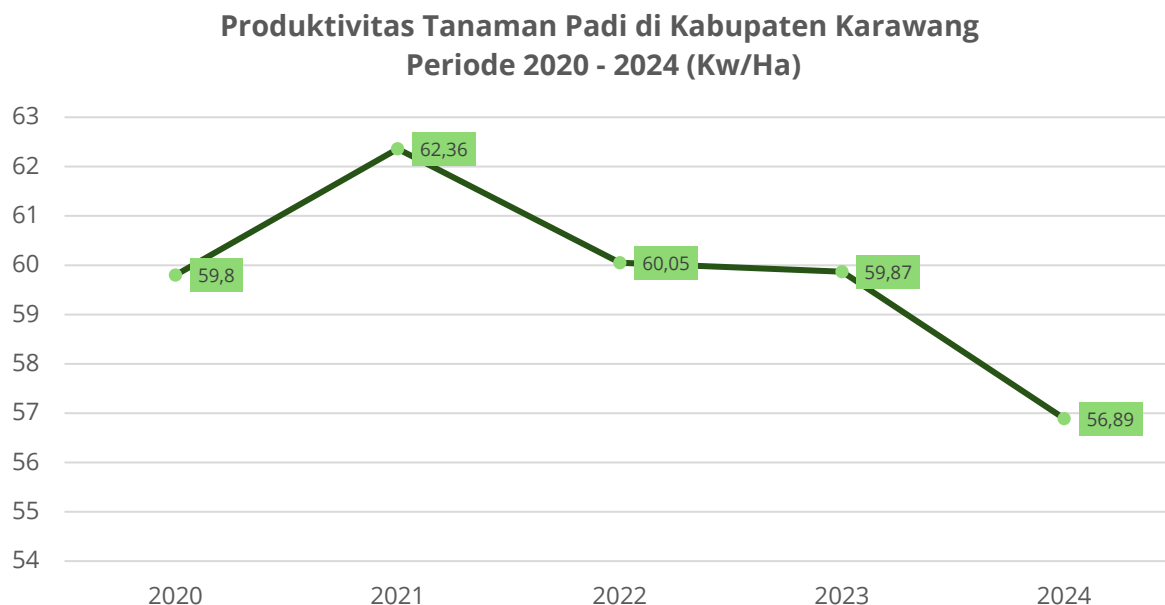
Produksi Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ton GKG)



Gambar II-7 Produksi Tanaman Padi Kab Karawang Periode 2020 – 2024 (Ton GKG)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Apabila dilihat dari produktivitas tanaman padi dalam kurun 5 tahun terakhir, sejak tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini dapat diindikasikan sebagai dampak dari perubahan iklim serta terjadinya alih fungsi lahan.



Gambar II-8 Produktivitas Tanaman Padi di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Kw/Ha)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karawang produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2023 sebesar 1.411.330 ton, meningkat sebesar 6,68% selama tahun 2019 – 2023. Apabila dilihat pada tahun 2023, terjadi surplus kebutuhan dan produksi beras sejumlah 598.818 ton. Selain itu cadangan beras pada tahun 2023 sebesar 118.851 kg.

B. Hortikultura

Data produksi buah-buahan di Kabupaten Karawang pada periode 2020-2024 menunjukkan variasi yang signifikan pada beberapa jenis buah. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan yang stabil pada jenis buah-buahan tertentu seperti mangga, pisang, dan petai, yang secara konsisten mencatatkan volume produksi tinggi. Produksi buah tertinggi tercatat pada komoditas mangga dengan puncak pada 2021 sebesar 124.176 kuintal, sedangkan produksi buah seperti anggur dan lemon relatif kecil setiap tahunnya. Total produksi keseluruhan menunjukkan fluktuasi dengan tren menurun pada 2023, yang mungkin disebabkan oleh faktor cuaca atau kebijakan pertanian setempat. Data ini mencerminkan potensi hortikultura yang besar di Karawang dan menunjukkan peluang pengembangan lebih lanjut, terutama untuk buah-buahan dengan nilai ekonomi tinggi dan tingkat produksi yang stabil.

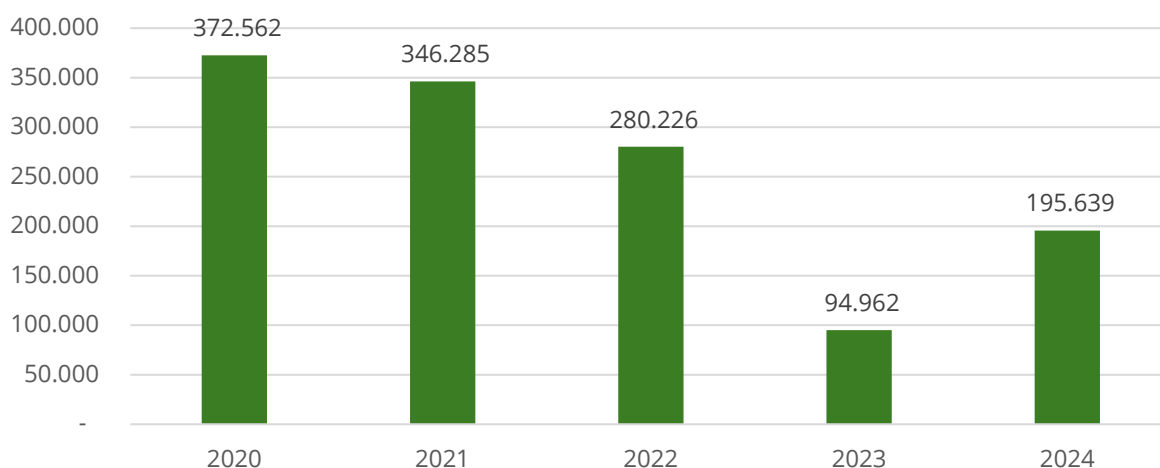
Tabel II-2 Produksi Tanaman Buah Buahan di Kabupaten Karawang (Dalam Kuintal)

No	Nama Buah	2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	257	309	450	309	7.054
2	Anggur	9	7	7	-	3
3	Belimbing	1.427	1.467	1.423	875	559

No	Nama Buah	2020	2021	2022	2023	2024
4	Duku/Langsar	35	5	35	-	60
5	Durian	40.539	42.980	12.428	106	4.772
6	Jambu Air	12.450	11.798	35.973	20.736	5.650
7	Jambu Biji	18.689	19.141	47.875	10.627	4.508
8	Jengkol	5.918	5.869	3.680	219	7.105
9	Jeruk Besar (Pomelo)	68	70	147	60	560
10	Jeruk Siam/Keprok	30.236	36.538	4.370	1.247	1.550
11	Mangga	124.176	104.921	74.780	9.068	57.620
12	Manggis	2.725	2.199	2.004	-	550
13	Melinjo	2.052	2.223	1.766	624	325
14	Nangka/Cempedak	10.488	11.132	8.030	2.930	5.347
15	Nenas	302	308	212	-	168
16	Pepaya	16.344	14.512	10.172	5.328	7.257
17	Petai	12.712	11.525	5.680	535	6.361
18	Pisang	74.026	60.660	58.573	35.140	76.313
19	Rambutan	14.006	13.410	5.850	5.150	2.567
20	Salak	104	206	17	-	63
21	Sawo	862	917	344	362	240
22	Sirsak	1.012	1.156	867	448	3.142
23	Sukun	4.117	4.454	4.864	917	3.025
24	Buah Naga	8	5	87	61	43
25	Lemon		380	515	168	201
26	Lengkeng		93	77	50	599
Total		372.562	346.285	280.226	94.962	195.639

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Total Produksi Tanaman Buah Buahan di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Kwintal)



Gambar II-9 Total Produksi Tanaman Buah Buahan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Kwintal)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Data BPS Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa produksi tanaman hias di Kabupaten Karawang dari 2020-2024 didominasi oleh beberapa jenis utama, yaitu

anggrek, anthurium bunga dan daun, hanjuang, dracaena, mawar, dan melati. Produksi anggrek tercatat sangat besar pada 2020 dan 2020, masing-masing mencapai 902.693 dan 750.950 tangkai. Namun, data produksi pada 2021-2024 untuk anggrek dan beberapa tanaman lain tampaknya kosong atau tidak tersedia, yang kemungkinan disebabkan oleh pencatatan yang tidak lengkap atau faktor-faktor eksternal. Beberapa jenis tanaman seperti mawar dan melati baru tercatat produksinya pada 2023 dan 2024 dengan volume relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sektor tanaman hias di Karawang masih fokus pada beberapa komoditas utama, dengan potensi untuk diversifikasi dan pengembangan jenis baru di masa mendatang. Selain itu, tren produksi menunjukkan adanya fluktuasi, yang bisa disebabkan oleh perubahan iklim, ketersediaan lahan, serta pergeseran permintaan pasar.

Tabel II-3 Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Karawang

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Anggrek (tangkai)	750.950	-	-	-	-
Anthurium Bunga (tangkai)	81	-	-	-	-
Anthurium Daun (pohon)	1.550	-	-	-	-
Hanjuang (pohon)	120	-	-	-	-
Dracaena (pohon)	1.100	-	-	-	-
Mawar (tangkai)	-	-	-	3.000	1.500
Melati (kg)	-	-	-	500	55

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

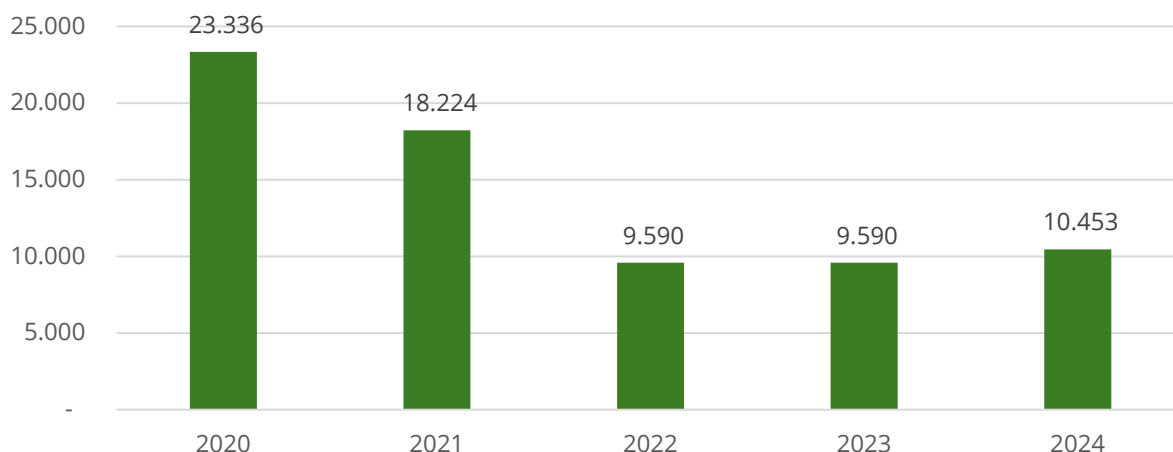
Data produksi tanaman sayur di Kabupaten Karawang selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan pada beberapa komoditas utama. Produksi kacang panjang misalnya, mencatatkan angka yang sangat tinggi tahun 2020 sebesar 20.553 kwintal, kemudian mengalami tren menurun pada 2021 hingga 2022, sebelum kembali meningkat pada 2024 (3.907 kwintal). Komoditas kangkung dan kembang kol memiliki tren produksi yang lebih stabil meskipun ada sedikit penurunan pada beberapa tahun. Bayam dan bawang merah mencatatkan volume yang relatif kecil dan fluktuatif sepanjang periode ini. Data ini menunjukkan bahwa kondisi iklim, ketersediaan lahan, dan kemungkinan faktor kebijakan atau permintaan pasar berkontribusi pada naik-turunnya volume produksi. Karawang masih memiliki potensi pengembangan pertanian sayuran yang cukup besar, terutama untuk jenis-jenis yang sudah menunjukkan tren stabil, seperti kangkung dan kembang kol.

Tabel II-4 Produksi Tanaman Sayur Sayuran di Kabupaten Karawang (Dalam Kw)

Jenis Tanaman	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Merah	330	-	20	20	-
Bayam	219	107	203	203	58
Kacang Panjang	20.553	8.760	1.779	1.779	3.907
Kangkung	2.234	1.000	761	761	954
Kembang Kol	-	8.357	6.827	6.827	5.534
Labu Siam	-	-	-	-	-
Total	23.336	18.224	9.590	9.590	10.453

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Total Produksi Tanaman Sayur Sayuran di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Kuintal)



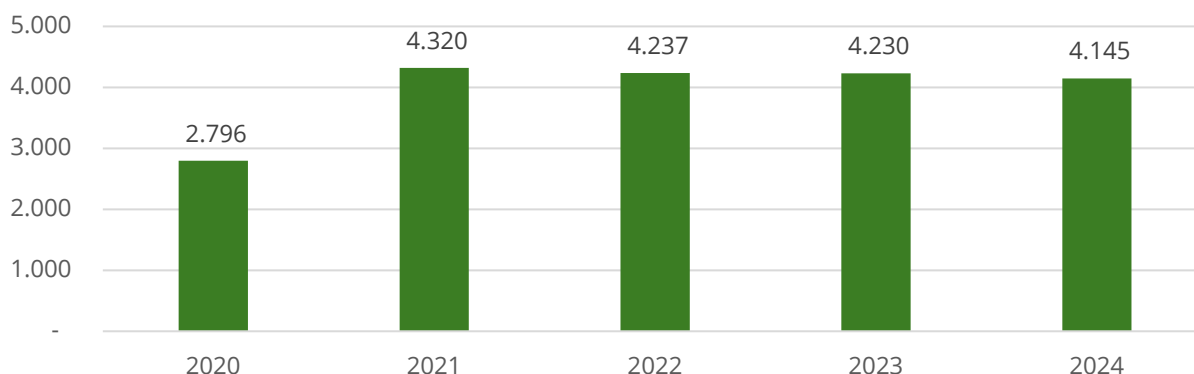
Gambar II-10 Total Produksi Tanaman Sayur Sayuran di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Kuintal)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

C. Perkebunan

Data luas lahan perkebunan Kabupaten Karawang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa komoditas kelapa mendominasi penggunaan lahan, dengan luas yang cukup stabil meskipun sempat mengalami penurunan pada 2020 (dari 4.103 ha pada tahun sebelumnya yaitu 2019 menjadi 2.106 ha) sebelum kembali naik dan relatif stabil di angka sekitar 3.300 ha pada tahun-tahun berikutnya. Komoditas kopi menempati posisi kedua dengan luas lahan sekitar 745–750 ha sejak 2021. Produksi kakao sempat menurun tajam dari 152 ha pada 2021 menjadi 47 ha pada 2023 dan 40,7 ha pada 2024. Beberapa komoditas lain seperti kelapa sawit, karet, teh, dan lada tidak tercatat atau hanya memiliki luas lahan yang sangat kecil. Komoditas cengkeh dan “lainnya” juga tercatat memiliki luas yang kecil, cenderung stabil di angka belasan hektar. Data ini menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas perkebunan utama di Karawang, sedangkan komoditas lain relatif lebih terbatas. Potensi pengembangan dapat difokuskan pada kelapa dan kopi, sementara penurunan pada komoditas kakao menjadi perhatian khusus untuk evaluasi lebih lanjut.

Total Luas Areal Lahan Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ha)

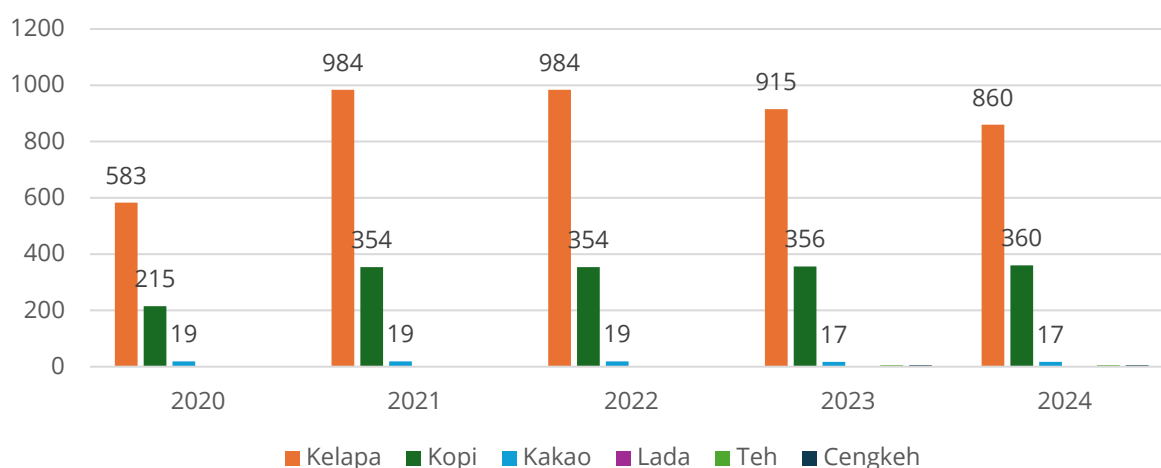


Gambar II-11 Total Luas Areal Lahan Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Ha)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Produksi perkebunan Kabupaten Karawang periode 2020-2024 menunjukkan pola yang stabil pada komoditas utama, dengan beberapa variasi pada beberapa tahun. Produksi kelapa tercatat sebagai yang terbesar, meski ada tren penurunan dari 1.077 ton pada 2019 menjadi 860 ton pada 2024. Produksi kopi mengalami kenaikan signifikan dari 218 ton pada 2019 menjadi 360 ton pada 2024, menunjukkan potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Sebaliknya, produksi kakao relatif stabil di sekitar 17-19 ton, sedangkan lada, teh, dan cengkeh memiliki volume yang sangat kecil, konsisten di bawah 10 ton per tahun. Tidak tercatat adanya produksi kelapa sawit pada periode ini. Fluktuasi dan tren yang muncul di data ini mencerminkan pentingnya diversifikasi dan optimalisasi sektor perkebunan di Karawang, terutama untuk menjaga stabilitas produksi kelapa serta memanfaatkan momentum pertumbuhan produksi kopi.

Produksi Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ton)

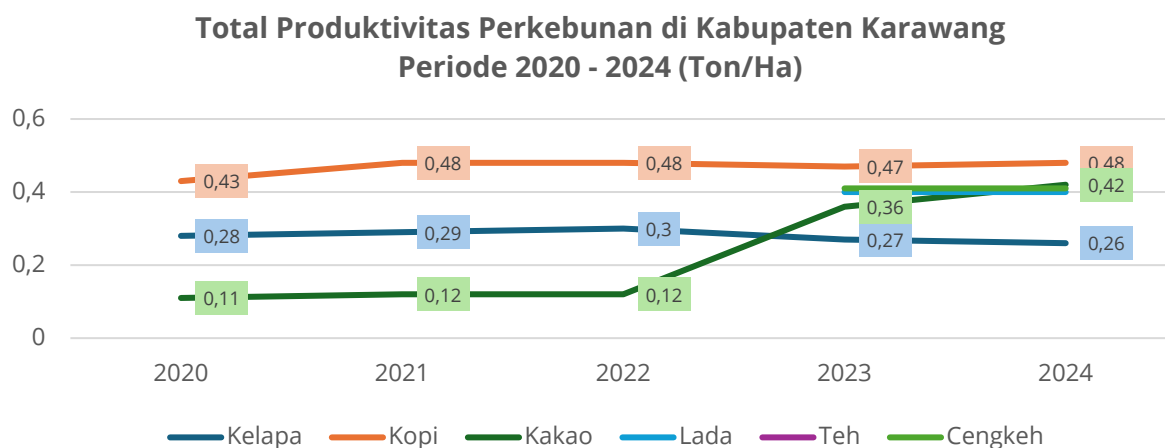


Gambar II-12 Total Produksi Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Ton)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Produktivitas perkebunan di Kabupaten Karawang periode 2020-2024 menunjukkan pola yang cukup stabil dan bervariasi antar komoditas. Komoditas kelapa

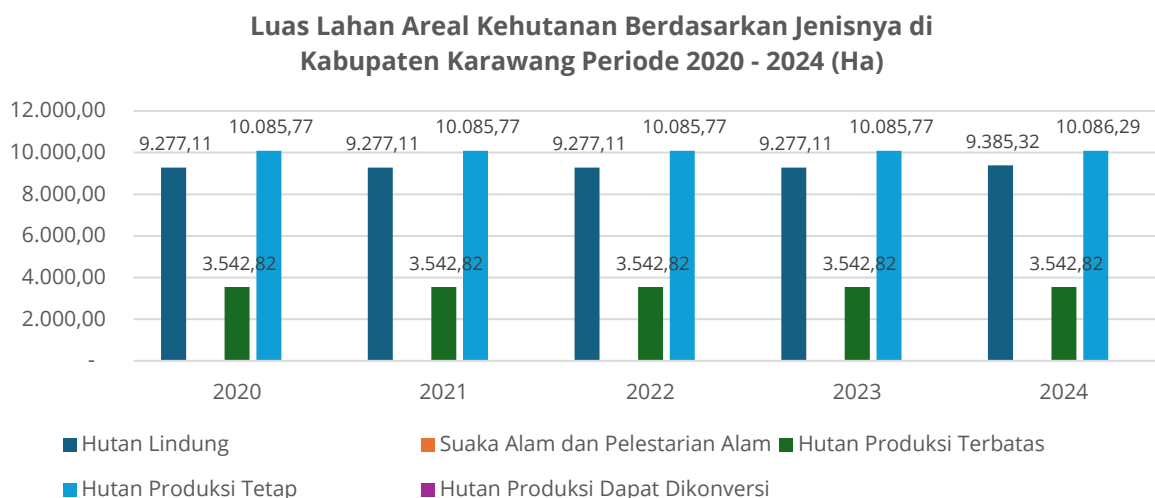
memiliki produktivitas rata-rata sekitar 0,26–0,30 ton/ha, relatif stabil meskipun sedikit naik pada 2021–2022. Komoditas kopi menunjukkan produktivitas yang cukup baik dengan rata-rata sekitar 0,43–0,48 ton/ha, konsisten meski sedikit menurun di 2023. Kakao mengalami kenaikan signifikan pada 2023 menjadi 0,36 ton/ha, meski jumlah lahannya relatif kecil dan menurun pada 2024. Produktivitas lada, teh, dan cengkeh tercatat sangat kecil dan hanya muncul pada beberapa tahun saja. Hal ini menegaskan bahwa komoditas kelapa dan kopi merupakan andalan utama di sektor perkebunan Karawang dengan produktivitas yang stabil, sedangkan kakao dan beberapa komoditas lain menunjukkan fluktuasi signifikan.



Gambar II-13 Total Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ton/Ha)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

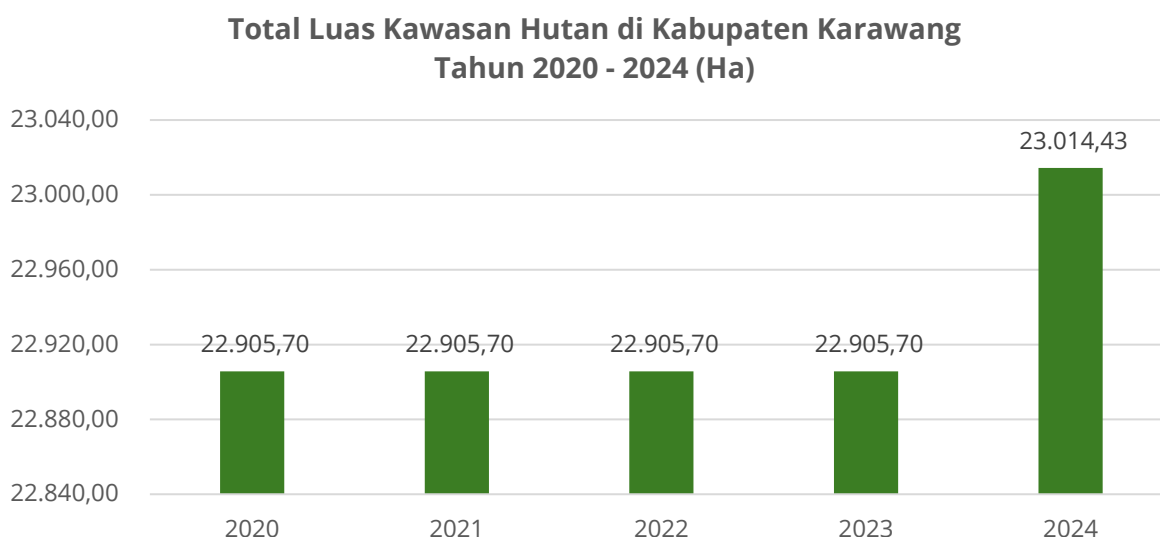
D. Kehutanan

Kabupaten mempunyai area hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati serta memiliki manfaat bagi masyarakat, selain sebagai tempat produksi oksigen dan hasil hutan, juga dapat memberikan manfaat untuk penyeimbang lingkungan dari bahaya kerusakan lingkungan.



Gambar II-14 Luas Lahan Areal Kehutanan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Ha)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Data luas kawasan hutan di Kabupaten Karawang periode 2020-2024 menunjukkan kestabilan dan sedikit kenaikan pada 2024, dengan Hutan Lindung yang berada di angka sekitar 9.277,11 ha hingga 9.385,32 ha, Hutan Produksi Terbatas yang konsisten di 3.542,82 ha, dan Hutan Produksi Tetap yang stabil di sekitar 10.085,77 ha hingga 10.086,29 ha; sementara data untuk Suaka Alam dan Pelestarian Alam serta Hutan Produksi Dapat Dikonversi tidak tercatat sama sekali, yang mengindikasikan fokus utama pengelolaan hutan di Karawang masih bertumpu pada fungsi produksi dan perlindungan. Total Kawasan Hutan antara lain:

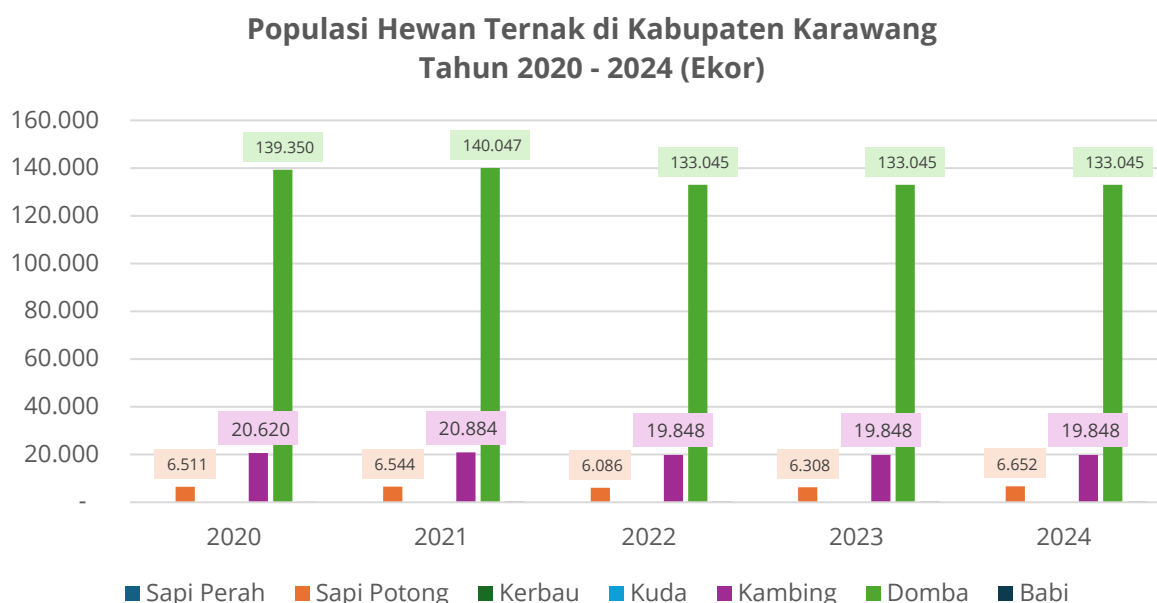


Gambar II-15 Total Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ha)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

E. Peternakan

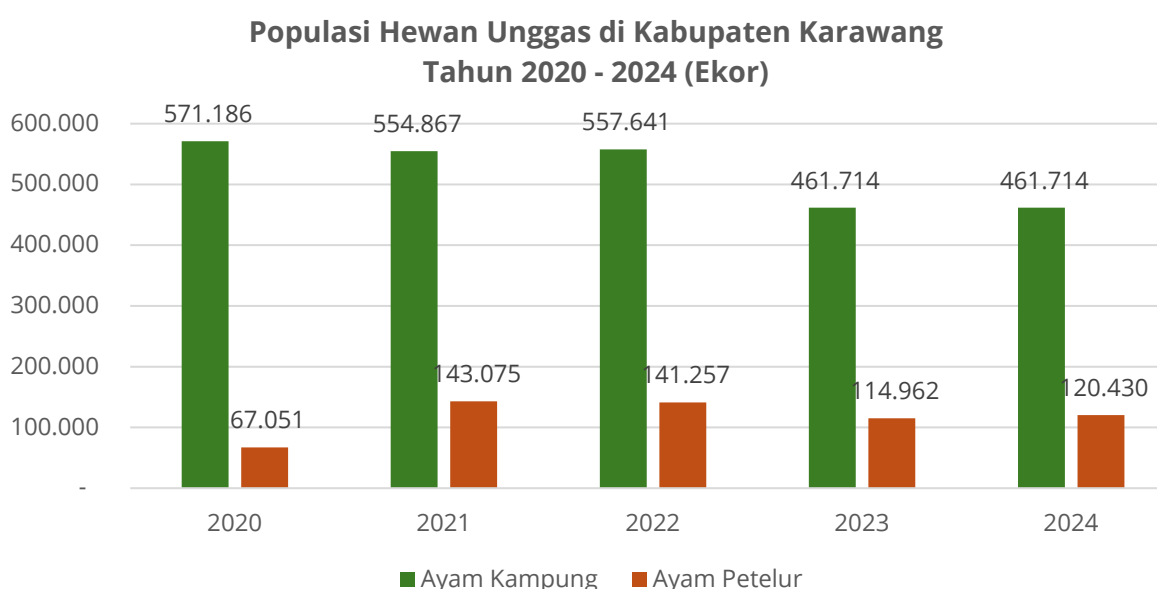
Sektor peternakan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan di Kabupaten Karawang. Dengan keberagaman komoditas dan potensi sumber daya yang ada, sektor ini memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya peternak lokal, serta mendukung penyediaan protein hewani yang berkualitas.



Gambar II-16 Populasi Hewan Ternak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ekor)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

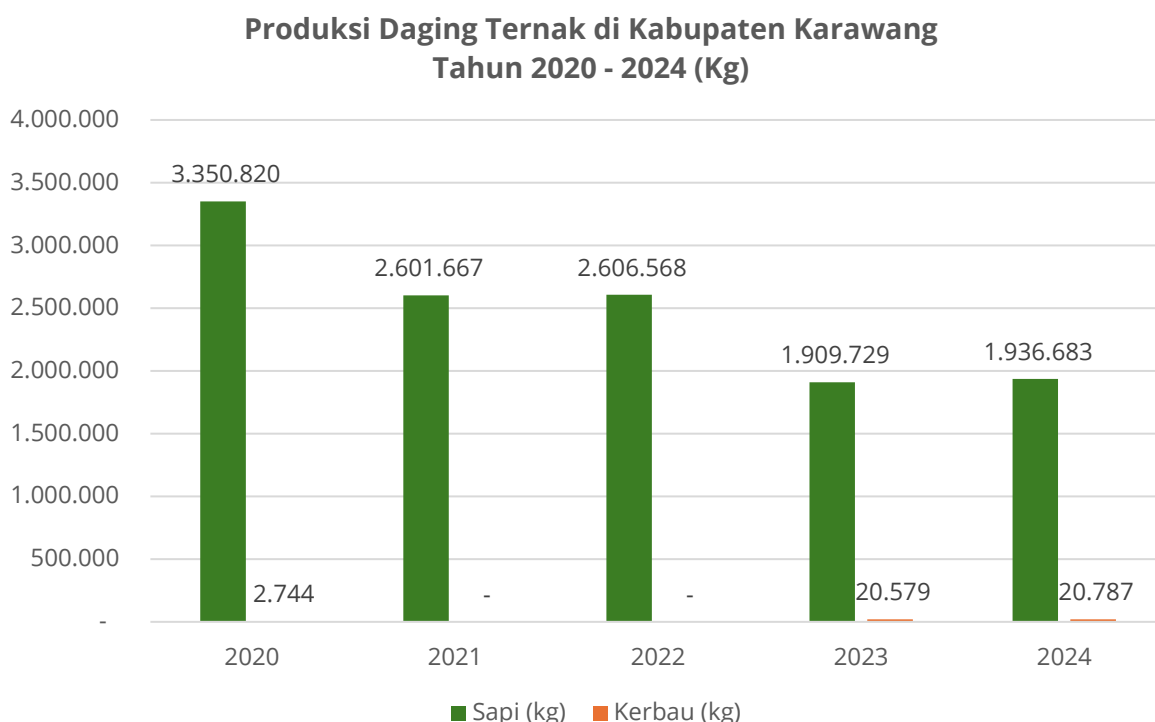
Populasi ternak di Kabupaten Karawang selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil untuk jenis ternak seperti sapi perah (sekitar 8–10 ekor), sapi potong (rata-rata sekitar 6.000–6.500 ekor), dan kambing (sekitar 19.000–21.000 ekor). Populasi domba mengalami sedikit fluktuasi dengan rata-rata sekitar 133.000–140.000 ekor. Sementara itu, jumlah populasi babi tercatat relatif rendah (sekitar 157–225 ekor) dan tidak ada data signifikan untuk populasi kerbau dan kuda di Karawang. Data ini menggambarkan bahwa sektor peternakan di Karawang masih berfokus pada jenis ternak seperti sapi potong, kambing, dan domba, yang menjadi sumber protein hewani penting bagi masyarakat. Namun, jumlah sapi perah yang sangat kecil menunjukkan bahwa pengembangan sektor susu belum menjadi prioritas di Karawang.



Gambar II-17 Populasi Hewan Unggas di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (Ekor)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

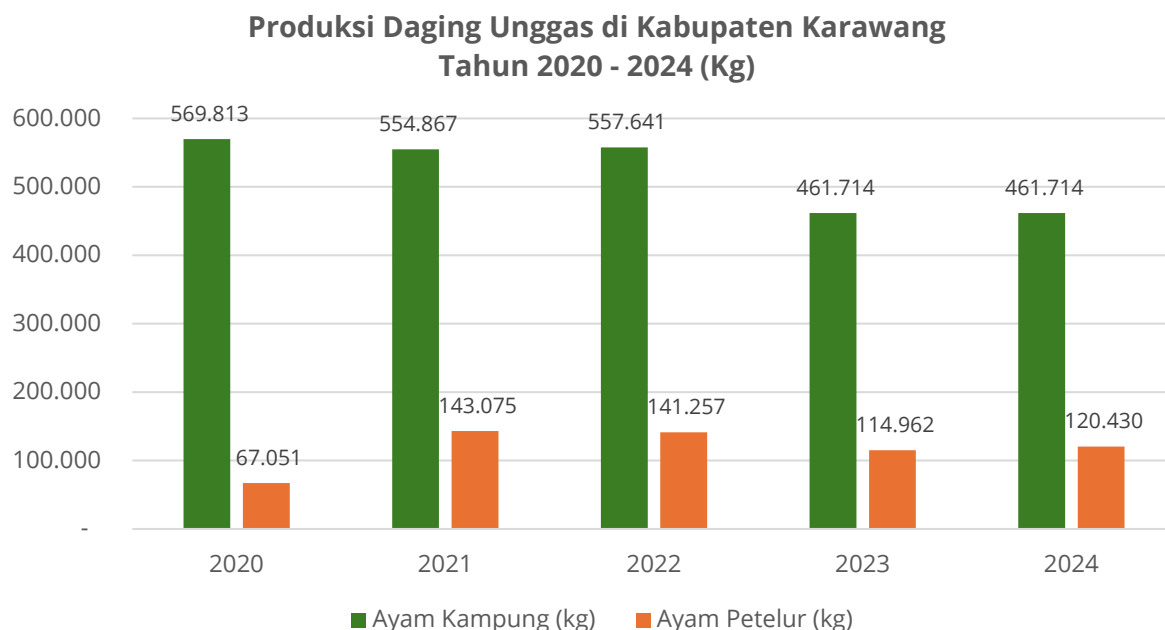
Populasi unggas di Kabupaten Karawang pada periode 2020–2024 didominasi oleh ayam kampung dan ayam petelur. Ayam kampung mengalami fluktuasi, dari sekitar 571 ribu ekor pada 2020, menurun sedikit pada 2021, dan mencapai 461 ribu ekor pada 2023. Populasi ayam petelur juga mengalami lonjakan pada 2021 hingga sekitar 143 ribu ekor, namun kembali menurun menjadi sekitar 114 ribu ekor pada 2023–2024. Data ini menunjukkan bahwa ayam kampung masih menjadi komoditas utama dalam sektor unggas Karawang, dengan ayam petelur sebagai sumber utama telur konsumsi. Tren ini menegaskan pentingnya kebijakan pengembangan peternakan unggas yang lebih stabil dan peningkatan produktivitas ayam petelur agar dapat menyesuaikan permintaan pasar dan meningkatkan kesejahteraan peternak lokal.



Gambar II-18 Produksi Daging Ternak di Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Kg)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Produksi daging ternak di Kabupaten Karawang selama periode 2020–2024 didominasi oleh daging sapi yang menunjukkan fluktuasi signifikan: dari sekitar 3,35 juta kg pada 2019–2020, kemudian menurun menjadi 1,9 juta kg pada 2023. Produksi daging kerbau tercatat sangat kecil dan sempat nihil pada 2021–2022, kemudian meningkat menjadi sekitar 20 ribu kg pada 2023–2024. Data ini mengindikasikan bahwa produksi daging sapi di Karawang masih menjadi andalan utama, meskipun mengalami fluktuasi yang perlu diantisipasi dalam konteks kestabilan pasokan pangan hewani. Peningkatan produksi kerbau pada 2023 juga membuka peluang diversifikasi sumber protein hewani lokal, meskipun masih perlu penguatan dari sisi pengelolaan dan pembudidayaan.



Gambar II-19 Produksi Daging Unggas di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024 (Kg)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Produksi daging unggas di Kabupaten Karawang selama periode 2020–2024 didominasi oleh ayam kampung, yang stabil di sekitar 550–570 ribu kg pada 2020–2022 namun turun menjadi 461 ribu kg pada 2023–2024. Sementara itu, produksi daging ayam petelur sempat melonjak menjadi 143 ribu kg pada 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar 114 ribu kg pada 2023. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun ayam kampung masih menjadi komoditas utama, produksi daging ayam petelur sempat menjadi kontributor penting, terutama saat permintaan pasar tinggi. Penurunan produksi unggas dalam beberapa tahun terakhir mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan atau program penguatan sektor peternakan unggas agar dapat memenuhi kebutuhan pangan hewani masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel II-5 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi di Kabupaten Karawang

Tahun	Ayam Kampung (kg)	Ayam Petelur (kg)	Susu Sapi (liter)
2020	1.077	2.646	19.917
2021	1.190	2.513	19.917
2022	1.196	2.822	19.917
2023	1.198	1.714	19.917
2024	990	1.841	19.917

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Data produksi telur unggas dan susu sapi di Kabupaten Karawang menunjukkan tren yang cukup stabil pada periode 2020–2024. Produksi telur ayam kampung berada di kisaran 1.000–1.200 kg, dengan sedikit fluktuasi yang relatif kecil. Sementara itu, produksi telur ayam petelur sempat meningkat menjadi 2.800 kg pada 2022, tetapi menurun drastis menjadi sekitar 1.700 kg pada 2023–2024. Produksi susu sapi terlihat stabil di angka sekitar 19.900 liter per tahun selama periode tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa sektor produksi susu sapi di Karawang memiliki kestabilan tinggi, sementara

produksi telur ayam petelur memerlukan perhatian lebih agar dapat kembali meningkat dan memenuhi permintaan konsumsi lokal yang terus berkembang.

F. Perikanan

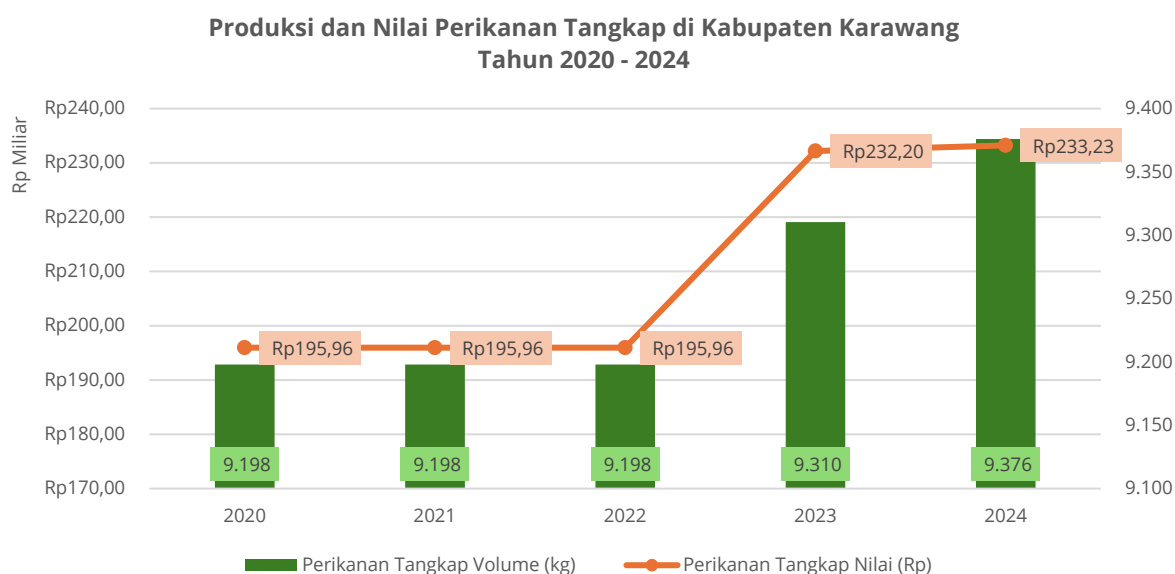
Kabupaten Karawang memiliki kawasan pesisir di sisi utara yang memberikan kontribusi penting terhadap sektor perikanan. Potensi sumber daya laut yang melimpah dan keberadaan nelayan tradisional menjadi modal utama untuk pengembangan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan.

Tabel II-6 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya

Tahun	Perikanan Tangkap		Perikanan Budidaya	
	Volume (Ton)	Nilai (Rp)	Volume (Ton)	Nilai (Rp)
2020	9.198	Rp 195.960.411.000,00	45.249	Rp 1.193.705.970.000,00
2021	9.198	Rp 195.960.411.000,00	45.249	Rp 1.193.705.970.000,00
2022	9.198	Rp 195.960.411.000,00	45.249	Rp 1.193.705.970.000,00
2023	9.310	Rp 232.199.581.926,00	45.797	Rp 1.403.716.070.000,00
2024	9.376	Rp 233.230.436.926,00	46.727	Rp 1.403.716.070.000,00

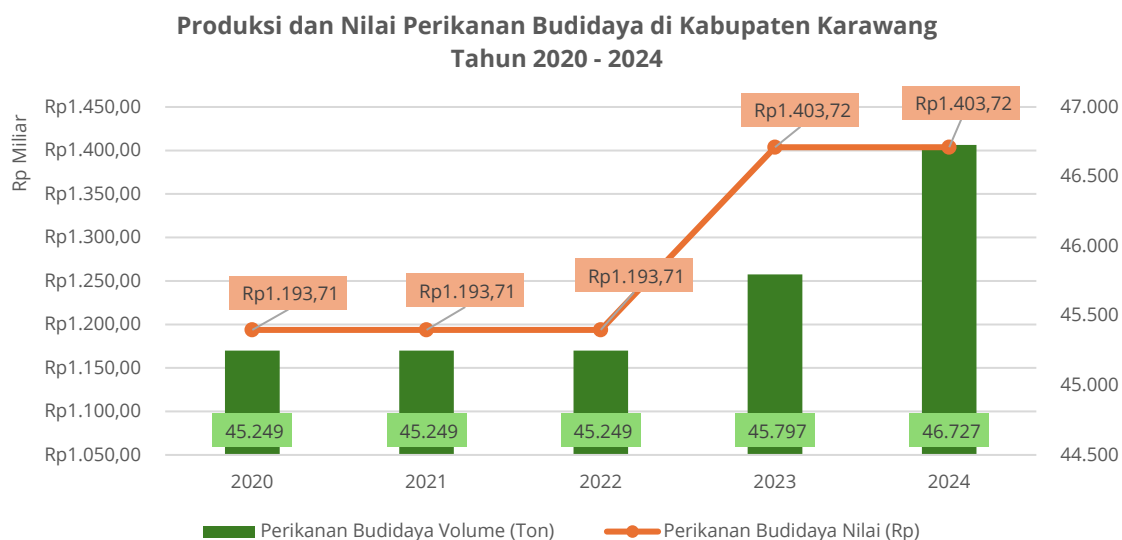
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Dari tahun 2020 hingga 2024, data menunjukkan bahwa volume dan nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Karawang relatif stabil pada kisaran 8.902 hingga 9.376 ton per tahun, dengan nilai produksi yang terus meningkat, dari Rp195,6 miliar pada 2020 menjadi Rp233,2 miliar pada 2024. Di sisi lain, perikanan budidaya mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan volume produksi melonjak dari 45.429 kg pada 2020 menjadi 46.727 ton pada 2024, serta nilai produksi yang naik drastis dari Rp1,07 triliun menjadi Rp1,40 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan Karawang memiliki potensi besar, dengan sektor tangkap yang stabil dan sektor budidaya yang berkembang pesat, menjadi peluang strategis untuk penguatan ekonomi daerah



Gambar II-20 Produksi dan Nilai Perikanan Tangkap di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

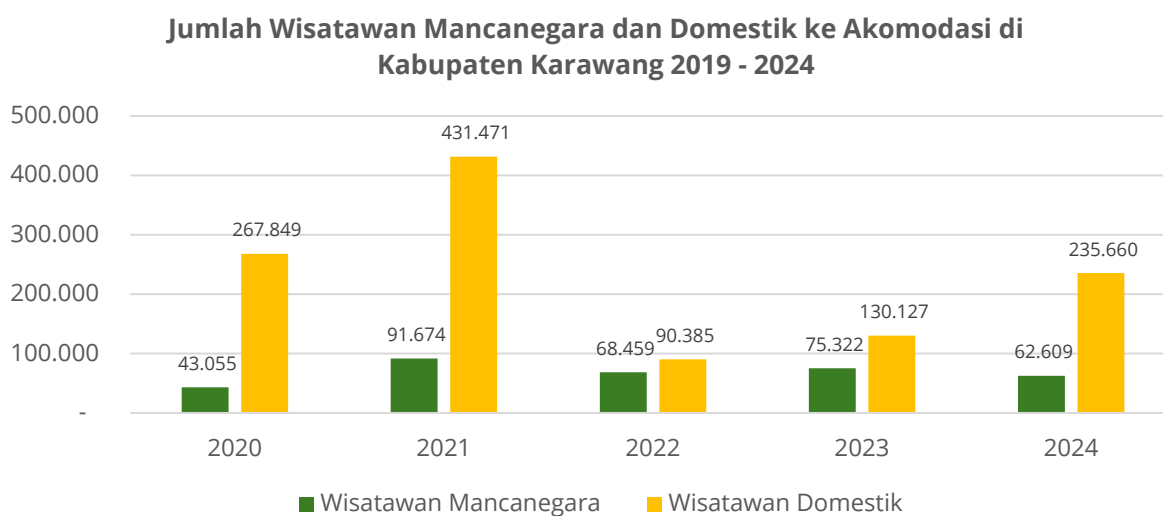


Gambar II-21 Produksi dan Nilai Perikanan Budidaya di Kabupaten Karawang 2020 - 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

G. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Karawang yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, membuka peluang usaha baru, serta mendorong pelestarian budaya lokal dan potensi wisata alam yang beragam.



Gambar II-22 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Akomodasi di Kabupaten Karawang 2019 - 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Karawang pada periode 2020-2024 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan dominasi tetap dari wisatawan domestik dibandingkan wisatawan mancanegara. Kunjungan ini tidak hanya untuk keperluan liburan, tetapi juga mencakup perjalanan dinas, kunjungan kerja, dan kegiatan bisnis, mengingat Karawang merupakan kawasan industri yang cukup besar. Puncak kunjungan wisatawan domestik terjadi pada tahun 2021 sebanyak 431.471 jiwa, kemungkinan

dipengaruhi oleh pelanggaran mobilitas pasca-pandemi dan meningkatnya aktivitas kerja maupun kunjungan keluarga. Sementara itu, wisatawan mancanegara mencapai angka tertinggi di tahun yang sama dengan 91.674 jiwa, yang juga bisa mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis internasional. Namun, kedua kategori wisatawan mengalami penurunan pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat secara bertahap hingga 2024. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan ketidakpastian ekonomi global serta penyesuaian pasca-pandemi. Fakta bahwa wisatawan domestik tetap mendominasi menunjukkan bahwa daya tarik Karawang tidak hanya terletak pada sektor pariwisata, tetapi juga pada peran strategisnya sebagai pusat industri dan bisnis. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata Karawang ke depan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara destinasi rekreasi dan fasilitas pendukung kegiatan profesional atau bisnis..

Jenis Wisata yang terdapat di Kabupaten Karawang antara lain:

Tabel II-7 Jenis Wisata yang Terdapat di Kabupaten Karawang

Wisata	Lokasi	Keterangan
Pantai Tanjung Pakis	Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang	Pantai Tanjung Pakis adalah salah satu pantai andalan di Karawang yang terletak di Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya. Pantai ini memiliki garis pantai yang panjang dengan pasir kecoklatan dan ombak yang cukup tenang, sehingga cocok untuk berenang dan bermain air. Terdapat berbagai warung makanan laut yang menjual hasil tangkapan nelayan setempat, serta perahu-perahu kecil yang dapat disewa untuk menjelajahi pantai. Suasana yang asri dengan panorama laut yang luas membuat Pantai Tanjung Pakis menjadi tujuan populer wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai yang santai.
Curug Bandung	Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang	Curug Bandung terletak di Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru. Air terjun ini menawarkan pemandangan alam yang asri dengan air yang jernih dan suasana yang sejuk, dikelilingi oleh tebing batu dan pepohonan hijau yang rindang. Lokasinya cukup menantang karena jalur menuju Curug Bandung melewati jalanan menanjak dan medan berbatu, tetapi keindahan alamnya membuat usaha ini terbayar lunas. Pengunjung juga dapat menikmati suasana tenang dan suasana khas pegunungan yang menenangkan pikiran.
Curug Cigentis	Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang	Curug Cigentis terletak di kaki Gunung Sanggabuana, Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter dan airnya berasal dari aliran pegunungan yang sangat jernih dan segar. Selain itu, terdapat area trekking yang cocok untuk para petualang yang ingin merasakan suasana alam liar yang masih alami. Curug Cigentis dikelilingi oleh pepohonan hijau dan suara gemericik air yang menenangkan, menjadikannya tempat yang pas untuk melepas penat dan menikmati keindahan alam.
Monumen Rengasdengklok	Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang	Monumen Rengasdengklok terletak di Kecamatan Rengasdengklok, Karawang. Monumen ini merupakan situs bersejarah yang menjadi saksi peristiwa penting Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 16 Agustus 1945, ketika Soekarno dan Hatta "diculik" ke rumah seorang pejuang untuk merumuskan teks proklamasi. Monumen ini dilengkapi dengan prasasti dan taman yang tertata rapi, sehingga menjadi tempat yang cocok untuk belajar sejarah sembari menikmati suasana yang tenang.
Candi Jiwa Batujaya	Desa Segaran, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang	Kompleks Candi Jiwa di Batujaya adalah situs candi Buddha kuno yang terletak di Desa Segaran, Kecamatan Batujaya. Situs ini merupakan salah satu peninggalan sejarah budaya yang penting, terdiri dari beberapa struktur candi yang diperkirakan dibangun antara abad ke-5 hingga ke-7 Masehi. Candi Jiwa memiliki bentuk stupa yang unik dengan material batu bata merah yang kontras dengan hamparan sawah di sekitarnya. Kawasan ini sangat cocok untuk wisata sejarah dan edukasi, sambil menikmati keindahan pedesaan yang asri.
Curug Cigeuntis	Desa Mekarbuana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang	Curug Cigeuntis merupakan air terjun alami yang berada di kawasan hutan tropis di Kecamatan Tegalwaru. Air terjun ini memiliki ketinggian sedang dan dikelilingi oleh pepohonan hijau yang rimbun, memberikan suasana segar dan asri. Selain

Wisata	Lokasi	Keterangan
		keindahan air terjun itu sendiri, pengunjung juga dapat menikmati udara sejuk pegunungan dan suara gemericik air yang menenangkan. Tempat ini cukup populer di kalangan pendaki dan wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang alami.
Pantai Samudera Baru	Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang	Pantai Samudera Baru terletak di Kecamatan Pedes dan merupakan destinasi wisata pantai yang ramah keluarga. Pantai ini memiliki hamparan pasir coklat yang luas, ombak yang relatif tenang, dan berbagai fasilitas wisata seperti warung makan, tempat duduk, dan arena bermain. Pengunjung bisa menikmati suasana santai, bermain air, atau sekadar menikmati pemandangan laut di senja hari.
Waterboom Indah Jaya Kampoeng Sawah	Desa Kampung Sawah, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang	Waterboom Indah Jaya Kampoeng Sawah merupakan destinasi wisata buatan yang menyediakan kolam renang dan wahana air seru. Terletak di Kecamatan Jayakarta, tempat ini cocok untuk liburan keluarga karena menyediakan area bermain air yang aman dan menyenangkan untuk anak-anak. Selain kolam renang, area ini juga memiliki taman yang asri dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti kafe dan tempat bersantai.
Danau Cipule	Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang	Danau Cipule terletak di Desa Walahar, Kecamatan Ciampel, dan terkenal sebagai lokasi perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk cabang dayung. Danau ini menawarkan pemandangan yang indah dengan suasana air yang tenang. Wisatawan sering datang untuk memancing, menikmati keindahan alam, atau sekadar bersantai sambil menikmati angin sepoi-sepoi dan panorama danau yang memukau.
Goa Dayeuh	Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang	Goa Dayeuh terletak di Kecamatan Pangkalan, sebuah gua alam yang memiliki nilai sejarah dan suasana mistis. Gua ini konon digunakan sebagai tempat persembunyian atau pertapaan pada masa lampau. Selain nilai sejarahnya, Goa Dayeuh memiliki stalaktit dan stalagmit yang unik, menambah daya tarik bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata alam dengan sentuhan sejarah.
Kampung Wisata Curug Cigentis	Kabupaten Karawang	Selain air terjun utamanya, kawasan Curug Cigentis juga memiliki kampung wisata yang dikelola warga setempat. Pengunjung bisa menikmati suasana kampung tradisional, lengkap dengan homestay, kuliner khas, dan kerajinan tangan. Hal ini menjadikan pengalaman wisata semakin lengkap, karena tak hanya menikmati keindahan air terjun, tetapi juga budaya lokal.
Waduk Barugbug	Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang	Waduk Barugbug yang terletak di Kecamatan Jatisari merupakan salah satu destinasi wisata air di Karawang. Waduk ini berfungsi sebagai irigasi, namun juga menjadi tempat rekreasi warga. Pengunjung biasanya datang untuk memancing, berfoto, atau sekadar menikmati suasana damai di sekitar bendungan yang dikelilingi pemandangan hijau.
Situs Cibuaya	Desa Cibuaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang	Situs Cibuaya adalah peninggalan sejarah yang terletak di Desa Cibuaya. Di kawasan ini ditemukan beberapa artefak kuno, termasuk arca dan struktur yang menunjukkan adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha. Tempat ini cocok untuk wisatawan yang ingin menelusuri jejak sejarah masa lampau di Karawang.
Hutan Mangrove Pantai Sedari	Pantai Sedari, Kabupaten Karawang	Pantai Sedari memiliki kawasan hutan mangrove yang menarik untuk dijelajahi. Pengunjung dapat berjalan di jembatan kayu yang membelah area mangrove, sambil menikmati pemandangan ekosistem pesisir yang unik. Ini menjadi destinasi wisata edukasi dan ekowisata yang menarik, terutama bagi yang ingin melihat bagaimana mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi.
Bendungan Walahar	Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang	Bendungan Walahar, yang berada di Kecamatan Klari, adalah destinasi yang populer sebagai tempat rekreasi sekaligus sumber irigasi. Bendungan ini memiliki suasana yang damai, cocok untuk bersantai, memancing, atau sekadar menikmati pemandangan air yang mengalir. Keindahan alam sekitar yang hijau serta warung-warung yang menjajakan kuliner khas daerah menambah daya tarik wisata bendungan ini.
Alun-Alun Karawang	Kabupaten Karawang	Alun-Alun Karawang terletak di pusat kota Karawang, menjadi tempat berkumpulnya warga lokal dan wisatawan. Area ini memiliki taman yang luas, air mancur, serta berbagai fasilitas bermain anak-anak. Biasanya, alun-alun ini ramai pada sore hari, di mana pengunjung datang untuk berolahraga, menikmati jajanan kaki lima, atau sekadar nongkrong sambil menikmati suasana kota.

Wisata	Lokasi	Keterangan
Situ Kamojing	Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang	Situ Kamojing adalah danau buatan yang berada di Kecamatan Cikampek. Danau ini menjadi tempat wisata air yang cocok untuk memancing atau bersantai. Keindahan danau yang dikelilingi oleh pepohonan hijau memberikan suasana yang sejuk dan tenang, cocok untuk piknik keluarga atau acara santai bersama teman.
Pantai Pisangan	Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang	Pantai Pisangan, meskipun tidak sepopuler Tanjung Pakis, adalah destinasi pantai lain di Karawang yang tenang dan alami. Pantai ini cocok untuk wisatawan yang ingin mencari suasana pantai yang lebih sepi dan damai. Pasir pantai dan ombak yang tenang membuat Pantai Pisangan menjadi tempat untuk bersantai dan menikmati pemandangan laut.
Kampung Budaya Karawang	Kabupaten Karawang	Kampung Budaya berada di Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur, Lokasinya sangat strategis karena hanya sekitar 2 - 3 kilometer dari pintu tol Karawang Barat area <i>interchange</i> Karawang Barat. Kampung Budaya Gerbang Karawang diproyeksikan sebagai " <i>Windows Shopping</i> " Pariwisata dan Budaya asli Karawang. Tempat ini dilengkapi dengan fasilitas restoran, penginapan, dan pendopo akan tetapi saat ini kondisinya membutuhkan rehabilitasi.

Sumber: Berbagai sumber, 2025

Selain dari beberapa Destinasi Wisata yang disebutkan di atas, berdasarkan Peraturan Bupati Karawang No. 50 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Kabupaten Karawang pada tahun 2025 telah menetapkan 8 Desa Wisata yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karawang nomor : 100.3.3.2/Kep.160-Huk/2025 tanggal 16 Mei 2025 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Karawang sebagaimana berikut:

Tabel II-8 Desa Wisata yang Ditetapkan Pada SK No. 100.3.3.2/Kep.160-Huk/2025

No	Desa Wisata	Kecamatan	Kategori
1	Desa Karangjaya	Kecamatan Tirtamulya	Berkembang
2	Desa Sedari	Kecamatan Cibuaya	Berkembang
3	Desa Cintelaksana	Kecamatan Tegalwaru	Rintisan
4	Desa Cicinde Utara	Kecamatan Banyusari	Rintisan
5	Desa Kamojing	Kecamatan Cikampek	Rintisan
6	Desa Curug	Kecamatan Klari	Rintisan
7	Desa Muara Baru	Kecamatan Cilamaya Wetan	Rintisan
8	Desa Pangulah	Kecamatan Kotabaru	Rintisan

Sumber: SK Bupati Karawang No. 100.3.3.2/Kep.160-Huk/2025, 2025

Dengan adanya Desa Wisata ini diharapkan dalam lima tahun kedepan dapat terbentuknya Desa Wisata baru dan terjadi peningkatan pada Desa Wisata dengan kategori Rintisan menjadi Berkembang, Maju, dan Mandiri.

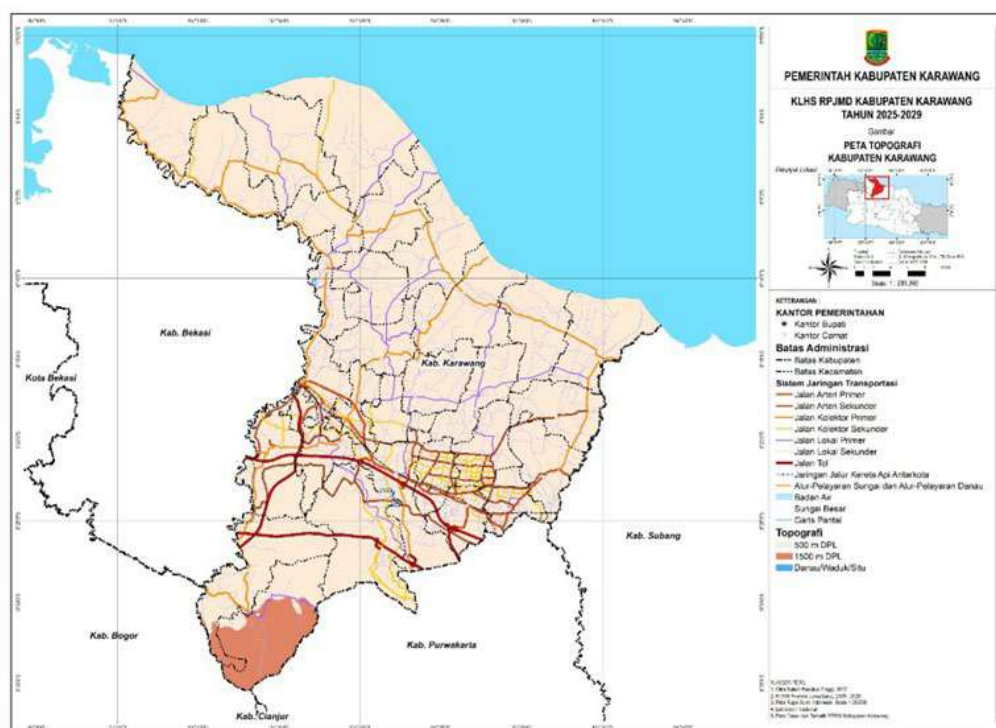
H. Topografi

Berdasarkan tinggi wilayah, Kabupaten Karawang terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi topografi yang didominasi oleh dataran rendah dengan rentang 0-500 mdpl. Kecamatan dengan ketinggian terendah berada pada Kecamatan Cilebar sementara ketinggian tertinggi berada pada Kecamatan Tegalwaru.

Tabel II-9 Kondisi Topografi di Kabupaten Karawang

No	Topografi	Kecamatan
1	0-500 mdpl	Kecamatan Batujaya, Pakisjaya, Tirtajaya, Rengasdengklok, Kutawaluya, Pedes, Cimalaya, Tempuran, Rawamerta, Lemahabang, Tegalsari, Jatisari, Karawang, Klari, sebagian Telukjambe, Majalaya, Jayakarta, serta sebagian Cikampek, dan Ciampel.
2	1500 mdpl	Hanya sedikit daerah perbukitan pada Kabupaten Karawang yang memiliki topografi bergelombang atau berbukit di mana sebagian besar terdapat pada wilayah Kecamatan Tegalwaru serta sebagian kecil berada pada Kecamatan Pangkalan dan Ciampel.

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029



Gambar II-23 Peta Topografi Kabupaten Karawang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Selain ketinggian, topografi juga menggambarkan kondisi kemiringan lereng suatu daerah. Meskipun didominasi oleh dataran rendah Kabupaten Karawang terbagi menjadi 4 klasifikasi dengan derajat kemiringan 0-8%, 8-13%, 15-25%, 25-45%, dan >45%. Kemiringan tercuram dengan persenan terbesar (>45%) menunjukkan wilayah yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan pembangunan, sedangkan wilayah dengan derajat kemiringan lereng rendah atau datar merupakan wilayah yang direkomendasikan dalam melakukan pembangunan.

I. Sumber Daya Air

Sumber daya air memiliki ketergantungan tinggi pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) suatu wilayah yang berfungsi dalam menampung, menyimpan, hingga mengalirkan air hujan menuju danau atau laut secara alami.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Kabupaten Karawang terletak pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) 02-06 Citarum. Sistem sungai yang

ada berasal dari Sungai Citarum dengan 3 (tiga) waduk utama yaitu Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS yang mendominasi Kabupaten Karawang sekitar 981,43 Km² dari total luas wilayah Kabupaten Karawang yang bisa dijadikan potensi sumber daya air pada Kabupaten Karawang apabila dikelola dengan baik.

Tabel II-10 Luas Wilayah Berdasar Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	DAS	Luas (Km ²)
1	DAS Cimalaya	79,39
2	DAS Citarum	981,43
3	DAS Kali Bekasi	4,63
4	DAS Kali Pegadungan	848,32
Total		1.913,71

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029



Gambar II-24 Peta DAS Kabupaten Karawang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Kondisi eksisting pada Daerah Aliran Sungai di DAS Cimalaya dan DAS Citarum, antara lain:

a. Kondisi DAS Citarum

Air pada DAS Citarum telah dimanfaatkan untuk sumber air minum, industri, pembangkit listrik dan pertanian peternakan atau irigasi. Pada kegiatan operasional industri, selain sebagai sumber air baku, Sungai Citarum dijadikan Badan Air Penerima (BAP) pembuangan air limbah industri yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu di instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Pada irigasi, terdapat 3 saluran irigasi besar, yaitu:

- Saluran Irigasi Tarum Barat
- Saluran Irigasi Tarum Utara
- Saluran Irigasi Tarum Tengah

Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan kerusakan DAS Citarum dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2019 tentang Renaksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2019-2025, maka Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum dapat dikendalikan dan tidak terjadi kerusakan yang semakin berat.

Kualitas Sungai Citarum dalam kondisi tercemar dengan kondisi DAS Citarum saat ini:

- *Catchment area* yang kritis
- Pendangkalan sungai.
- Kerusakan tanggul.
- Penurunan kualitas sungai akibat masuknya limbah domestik

b. Kondisi DAS Cilamaya

Arah aliran DAS Cilamaya mengalir dari hulu di daerah selatan (Kab. Subang), kemudian bersatu dengan aliran Sungai Ciherang (Kab. Purwakarta) di Bendung Barugbug Desa Situdam Kec. Jatisari Kab. Karawang lalu mengalir ke arah utara Muara Cilamaya Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang dan bermuara di Laut Jawa.

Berdasarkan hasil perhitungan daya tampung beban pencemaran, Sungai Cilamaya Segmen Karawang, Kualitas air Sungai Cilamaya Segmen Karawang tidak memenuhi baku mutu kriteria air kelas III sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2013, kemudian daya tampung beban pencemaran Sungai Cilamaya segmen Karawang telah terlampaui, Kualitas air dan daya tampung beban pencemaran Sungai Cilamaya segmen Karawang sangat dipengaruhi oleh kualitas air di Bendung Barugbug yang bersumber dari sungai-sungai yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Subang dan Purwakarta, dan Sumber pencemaran utama Sungai Cilamaya segmen Karawang adalah limbah domestik. Hal ini terlihat dari persentase penurunan beban BOD yang lebih besar dari COD.

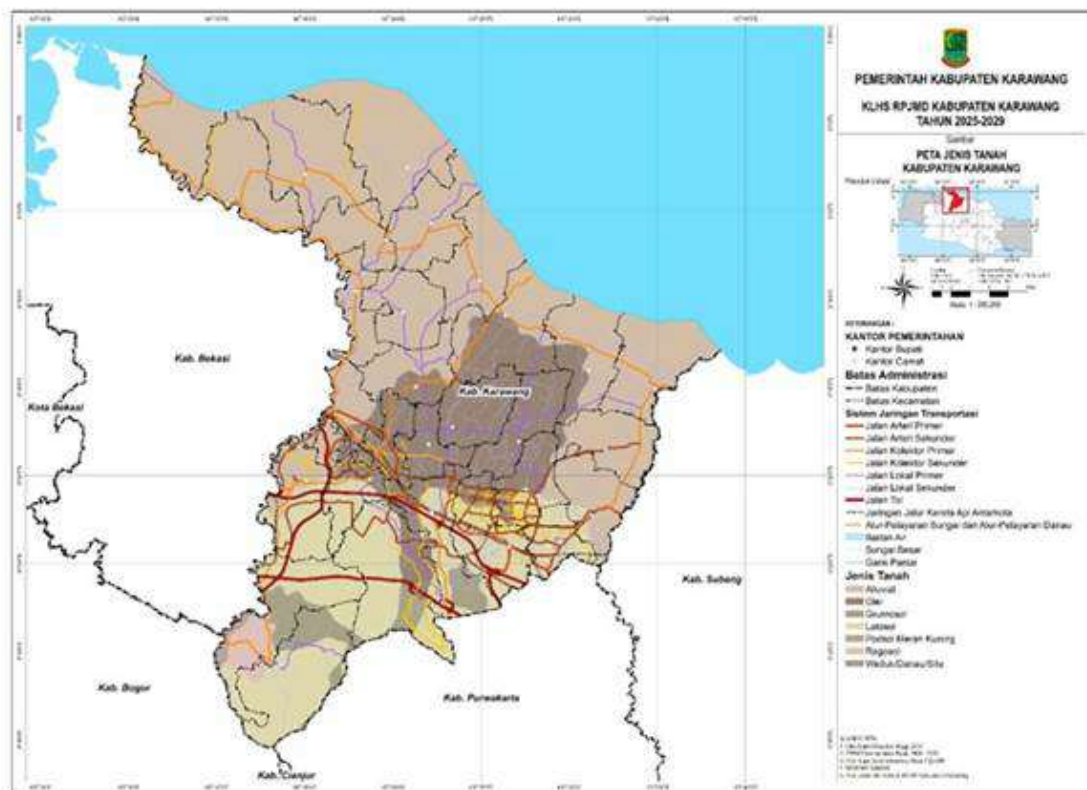
J. Sumber Daya Tanah

Sumber daya tanah pada Kabupaten Karawang terbagi menjadi 6 (enam) jenis tanah berupa aluvial, glei, grumusol, latosol, podsol merah kuning, dan regosol. Berbatasan dengan pantai, Kabupaten Karawang didominasi oleh jenis tanah aluvial yang terbentuk dari endapan lumpur dan pasir halus yang terbawa oleh air sungai.

Tabel II-11 Luas Wilayah Berdasar Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial	102.462,17
2	Glei	36.494,18
3	Grumusol	6.851,12
4	Latosol	42.417,67
5	Podsol Merah kuning	559,38
6	Regosol	2.470,80
7	Waduk/Danau/Situ	123,47
Total		191.378,79

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029



Gambar II-25 Peta Jenis Tanah Kabupaten Karawang

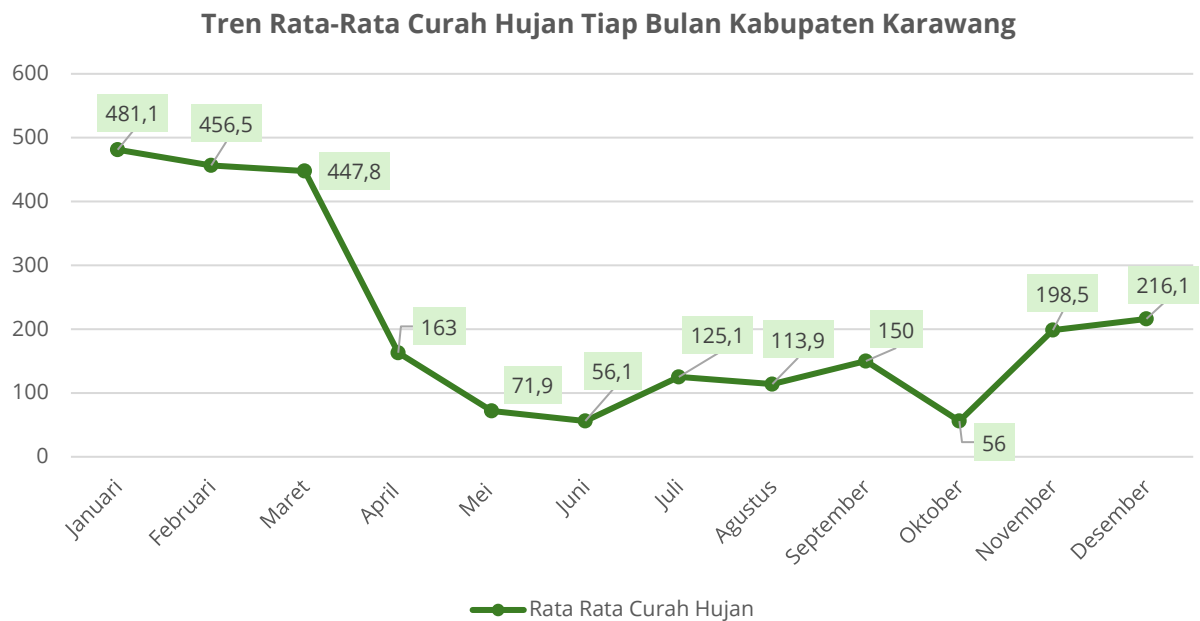
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Berdasarkan tabel diatas, jenis tanah aluvial memiliki luasan yang paling besar dengan 102.462,17 Ha. Tanah jenis terbentuk dari endapan material yang terbawa oleh air, terutama sungai dan bersifat mudah menyerap air membuatnya cocok untuk lahan persawahan dan memudahkan proses irigasi. Selain itu dengan minimnya kandungan unsur zat hara menunjukkan potensi tanah dalam mengembangkan vegetasi pertanian perladangan seperti padi dan jagung, serta beberapa tanaman perkebunan seperti kelapa.

K. Klimatologi

Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata sebesar 27°C dengan temperatur udara rata-rata sebesar 0,01 milibar. Kecepatan angin di Kabupaten Karawang berkisar antara 30-35 km/jam, lama rata-rata penyinaran

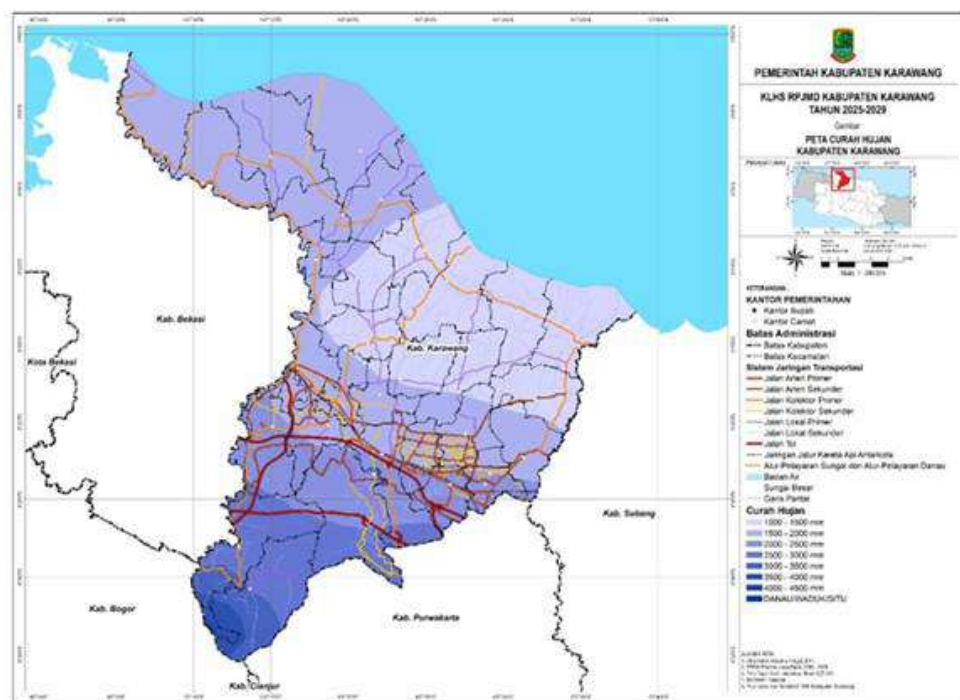
matahari sebesar 66 % dan kelembaban nisbi sebesar 80%. Curah hujan tahunan di Kabupaten Karawang berkisar antara 1.000-4.500 mm/tahun.



Gambar II-26 Tren Rata-Rata Curah Hujan Tiap Bulan Kabupaten Karawang

Sumber: Karawang Dalam Angka, 2025

Kabupaten Karawang memiliki 2 (dua) musim yang disebabkan oleh angin muson barat yang bersifat lembab dan basah serta angin muson timur yang bersifat kering. Berdasar data pada tahun 2024 bulan Januari, Februari, dan Maret merupakan bulan paling basah dengan rata-rata curah hujan tinggi yang kemudian menurun drastis pada bulan Mei hingga Juni dengan intensitas hujan rendah yang perlahan kembali meningkat.

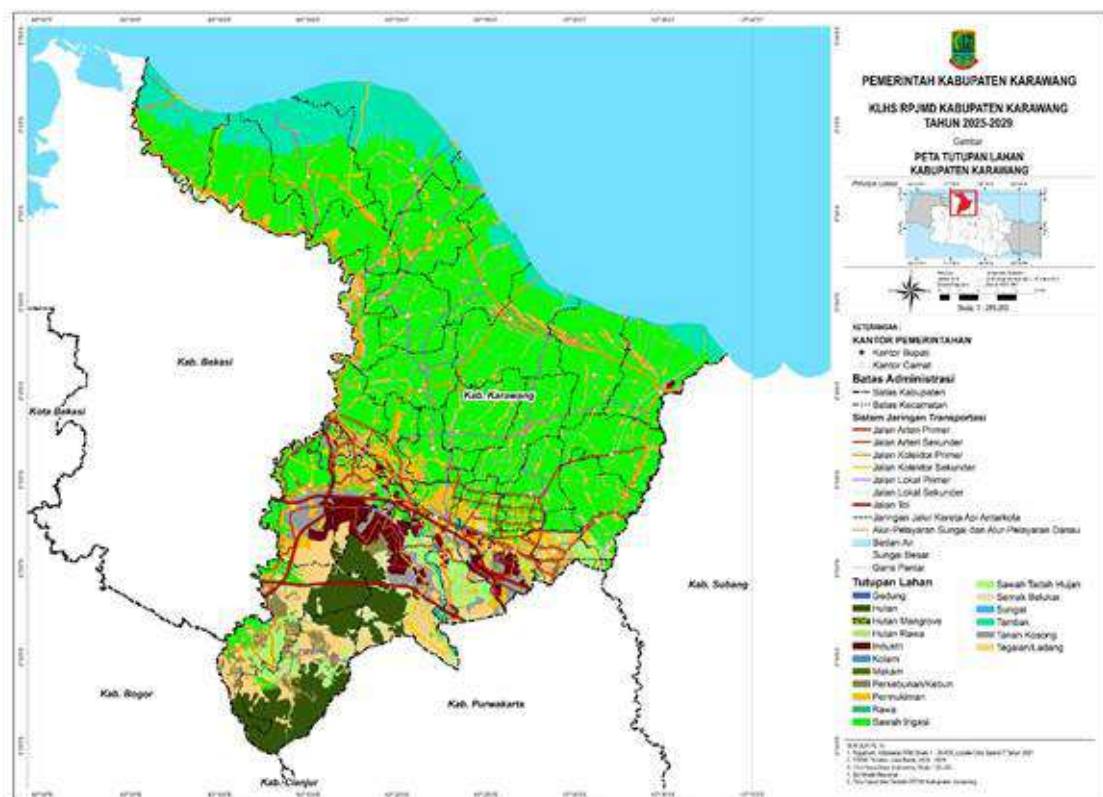


Gambar II-27 Peta Curah Hujan Kabupaten Karawang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

L. Penggunaan Lahan

Berdasarkan citra tahun 2021 Kabupaten Karawang memiliki 17 jenis tutupan lahan dengan dominasi lahan sawah pada kawasan utara dan permukiman yang tersebar di wilayah tengah Kabupaten Karawang.



Gambar II-28 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Karawang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Penjelasan mengenai luas lahan berdasarkan jenis tanah lebih lanjut seperti berikut.

Tabel II-12 Luas Wilayah Berdasar Tutupan Lahan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Gedung	21,24	0,01
2	Hutan	11.580,48	6,05
3	Hutan Mangrove	17,89	0,01
4	Hutan Rawa	19,71	0,01
5	Industri	5.415,47	2,83
6	Kolam	38,14	0,02
7	Makam	41,53	0,02
8	Perkebunan/Kebun	5.054,36	2,64
9	Permukiman	24.502,76	12,80
10	Rawa	298,35	0,16
11	Sawah Irigasi	101.257,18	52,91
12	Sawah Tadah Hujan	6.160,04	3,22
13	Semak Belukar	2.713,92	1,42
14	Sungai	1.356,13	0,71

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
15	Tambak	18.288,33	9,56
16	Tanah Kosong	4.991,46	2,61
17	Tegalan/Ladang	9.621,81	5,03
Total		1.913,71	100,00

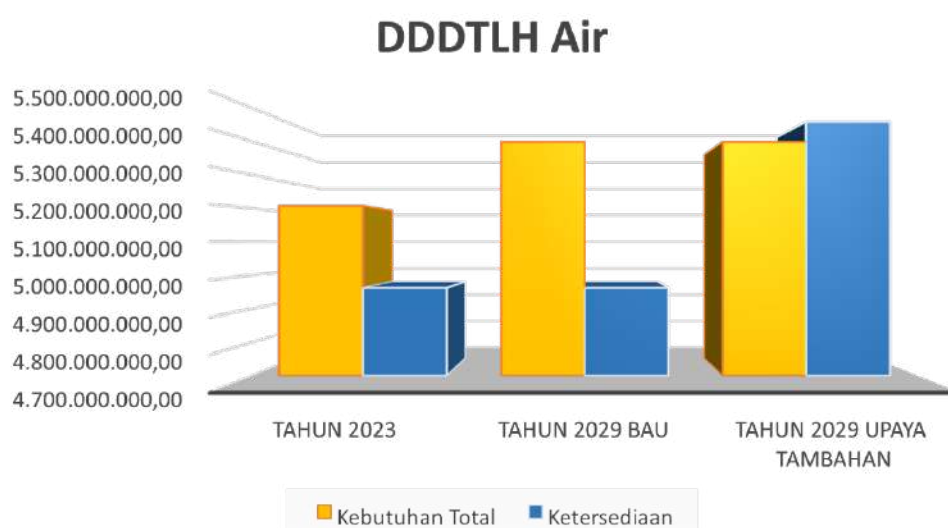
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Selain tutupan lahan berupa sawah yang mendominasi setengah kawasan Kabupaten Karawang (52,91%) dan permukiman sebesar 12,8% dari total luas Kabupaten Karawang, penggunaan lahan jenis industri sebesar 5.415 Ha ini juga menunjukkan bagaimana perekonomian Kabupaten Karawang tidak hanya didorong oleh sektor pertanian saja.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup (DDLH) digambarkan melalui perbandingan jumlah sumber daya yang dikelola terhadap jumlah konsumsi penduduk.

Total kebutuhan air di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 sebesar 5.207.597.332,75 m³/thn dengan ketersediaan air di Kabupaten Karawang sebesar 4.962.631.656,87 m³/thn menghasilkan selisih status daya dukung air di Kabupaten Karawang pada tahun 2023 sudah terlampaui. Berdasar proyeksi jumlah penduduk maupun kawasan terbangun akan terus berkembang menunjukkan kebutuhan air yang kian meningkat. Hasil prediksi kebutuhan air tahun 2029 di Kabupaten Karawang mencapai 5.399.292.692,75 m³/thn, sehingga daya dukung air semakin mengalami penurunan dan defisit mencapai -436.661.035,88 m³/thn dengan asumsi ketersediaan air di Kabupaten Karawang tidak menurun tanpa perubahan kebijakan yang sedang berjalan. Maka demikian diperlukan upaya tambahan dalam mempertahankan dan meningkatkan kuantitas SDA.



Gambar II-29 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kabupaten Karawang Tahun 2029

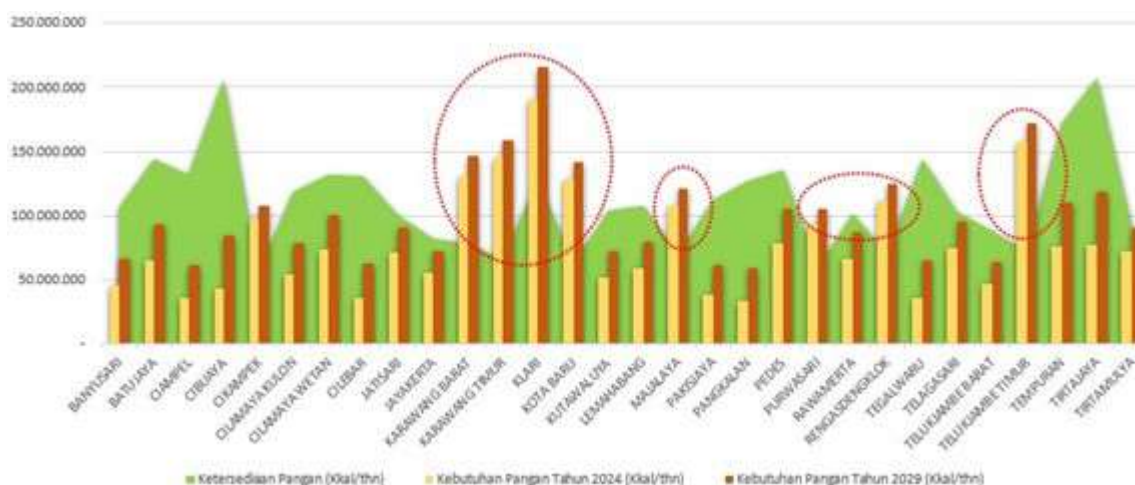
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029

Selain penambahan air, pertumbuhan penduduk turut meningkatkan kebutuhan pangan. Berdasar data eksisting tahun 2023 daya dukung pangan belum terlampaui, namun pada tahun 2029 terdapat 19 kecamatan statusnya sudah terlampaui jika tanpa upaya tambahan, sehingga perlu kebijakan dan strategi untuk pemenuhan daya dukung pangan kedepannya.



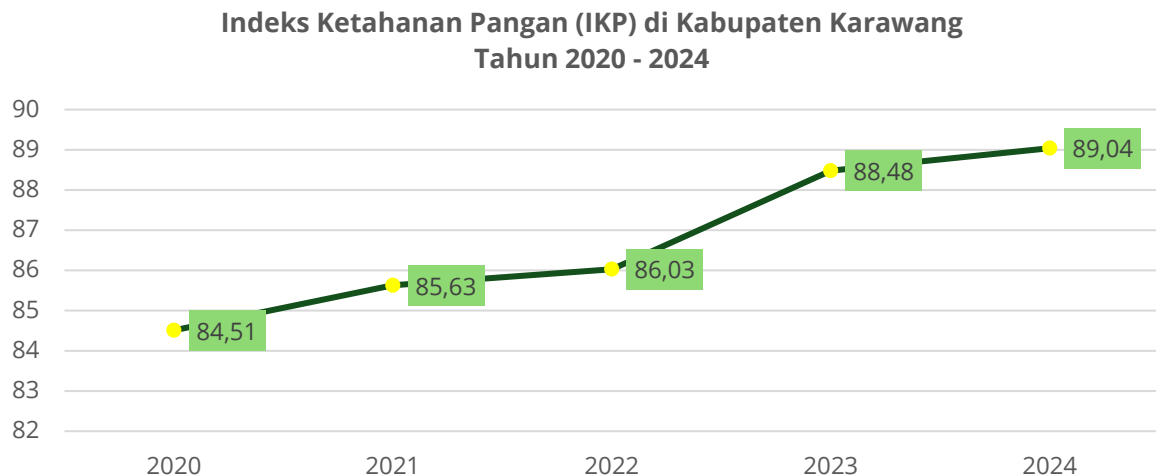
Gambar II-30 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Karawang Tahun 2029

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029



Gambar II-31 Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan Kabupaten Karawang Per Kecamatan Tahun 2029

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029



Gambar II-32 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

44Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

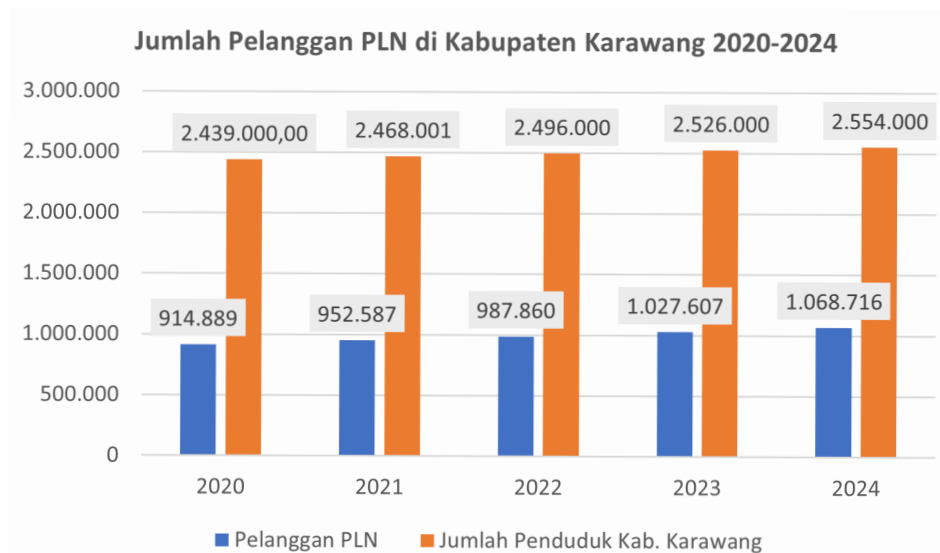
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan stabil dari 84,51 pada 2020 menjadi 89,04 pada 2024, mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang semakin baik. Kenaikan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam produksi dan distribusi pangan lokal, perbaikan kesejahteraan petani, serta edukasi gizi di masyarakat. Peran Karawang sebagai lumbung pangan utama Jawa Barat mendukung kestabilan IKP ini, yang menjadi modal penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menghadapi tantangan global.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kondisi ketahanan energi, air, dan pangan merupakan kesatuan yang saling berkaitan untuk menjamin keberlangsungan hidup pembangunan berkelanjutan.

A. Gambaran Kondisi Ketahanan Energi

Pada tahun 2020, sekitar 37,5% dari total penduduk Kabupaten Karawang terdaftar sebagai pelanggan PLN. Persentase ini meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 41,8% pada tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan pelanggan setiap tahun sekitar 40.000–50.000 pelanggan, menunjukkan peningkatan rasio elektrifikasi atau kepemilikan sambungan listrik per rumah tangga.



Gambar II-33 Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Karawang 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan jumlah pelanggan PLN sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, namun jumlah pelanggan bertambah lebih cepat dibandingkan dengan jumlah penduduk. Hal ini dapat mengindikasikan peningkatan akses listrik, pertumbuhan rumah tangga baru, atau meningkatnya kebutuhan listrik di sektor industri dan bisnis di Karawang. Konsumsi listrik per kapita dicari berdasarkan konsumsi listrik per tahun dibagi dengan jumlah penduduk dalam setahun. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini menandakan aktivitas perekonomian, peningkatan penggunaan listrik, serta meluasnya penggunaan teknologi di berbagai sektor.

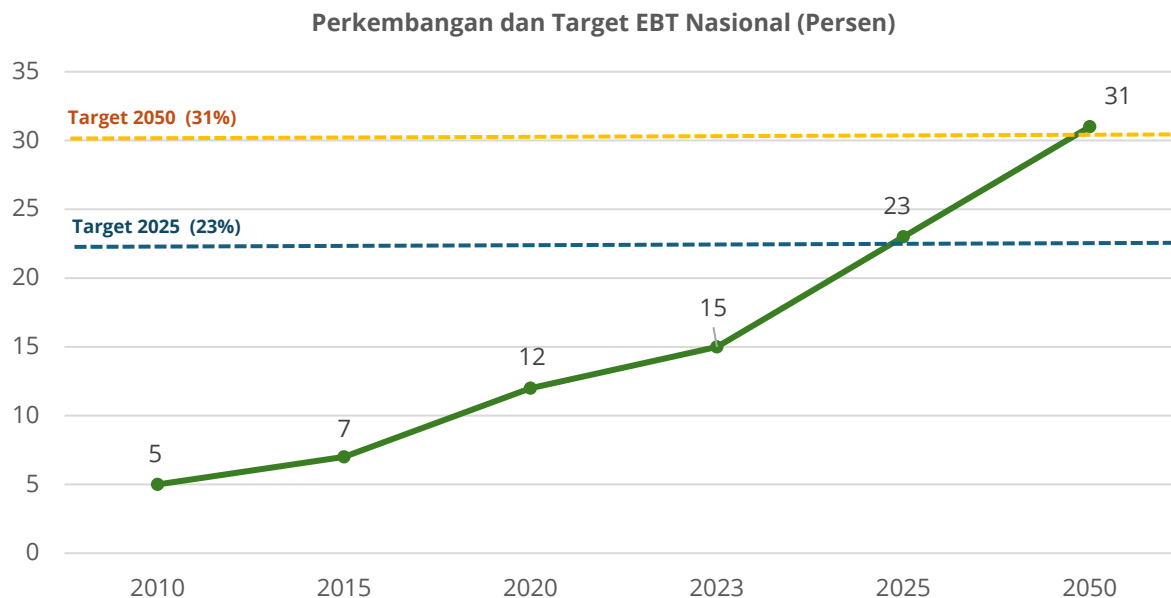


Gambar II-34 Konsumsi Listrik Per kapita di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024 (kWh)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Karawang menunjukkan tren peningkatan stabil dari 2.439,88 kWh pada tahun 2020 menjadi 2.977,46 kWh pada 2024, yang mencerminkan kenaikan sekitar 22% dalam lima tahun. Kenaikan ini mengindikasikan pertumbuhan permintaan energi listrik seiring dengan perkembangan

industri dan kebutuhan rumah tangga di Karawang, yang merupakan salah satu pusat industri di Jawa Barat. Hal ini juga menggambarkan kemajuan ekonomi dan urbanisasi yang berkelanjutan, namun sekaligus menuntut pengelolaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.



Gambar II-35 Perkembangan dan Target Bauran Energi Nasional

Sumber: Rencana Umum Energi Nasional, 2017

Target EBT nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mencapai 23% dalam bauran energi nasional pada 2025 dan 31% pada 2050. Target ini tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai bagian dari upaya transisi menuju energi bersih dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong berbagai program, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pemanfaatan biomassa, dan peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor. Kabupaten Karawang, sebagai salah satu pusat industri nasional, juga memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya target EBT ini. Dengan inisiatif seperti penggunaan PLTS atap pada pabrik dan gedung-gedung, serta pengembangan energi terbarukan di sektor pertanian dan kawasan industri, Karawang menjadi salah satu motor utama dalam mendorong tercapainya ketahanan energi yang lebih hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

B. Gambaran Kondisi Ketahanan Air

Selain listrik prasarana air minum PDAM Tirta Tarum di Kabupaten Karawang saat ini telah mencakup 20-21% dari total penduduk Kabupaten Karawang dengan total sambungan langganan aktif sebanyak 108.819 SL.

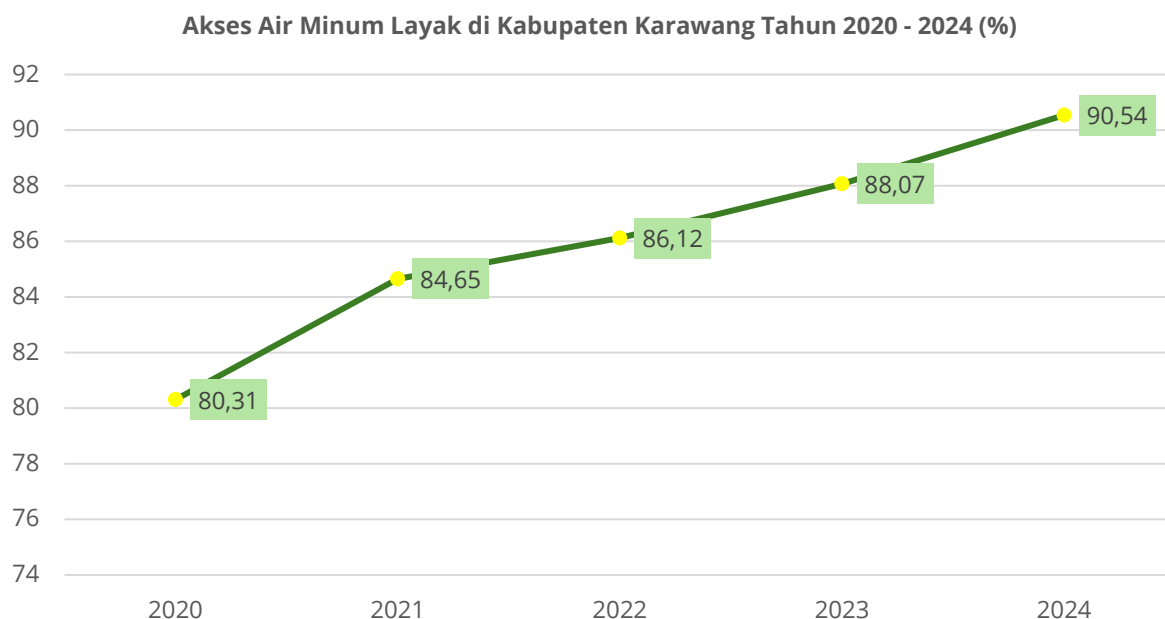
Tabel II-13 Distribusi Air Bersih Berdasarkan Cabang di Kabupaten Karawang 2024

Cabang/Unit	Wilayah Pelayanan	Pelanggan	Air Terjual	Nilai (Rp.)
Karawang	Karawang Barat/Timur. Klari. Telukjambe Timur	26.387	10.134.725	Rp26.987.677.970,00
Rengasdengklok	Rengasdengklok, Kutawaluya	4.490	1.460.242	Rp4.979.265.800,00
Rawamerta	Rawamerta	607	245.910	Rp539.291.000,00
Telagasari	Telagasari	938	456.834	Rp757.549.600,00
Kotabaru	Kotabaru, Jatisari	58.277	1.513.698	Rp4.846.708.000,00
Pedes	Pedes, Cilebar	3.049	544.558	Rp1.862.214.700,00
Lemahabang	Lemahabang, Tempuran	1.705	550.435	Rp1.209.823.000,00
Pangkalan	Pangkalan	1.819	491.845	Rp1.448.272.600,00
Tirtajaya	Tirtajaya, Batujaya, dan Jayakarta	4.583	1.189.848	Rp3.712.519.000,00
Klari	Klari. Purwasari	3.561	1.932.971	Rp13.548.873.350,00
Cibuaya	Cibuaya, Pedes	3.735	835.276	Rp2.847.513.400,00
Telukjambe	Telukjambe Timur	13.034	4.683.892	Rp16.800.427.400,00
Cilamaya	Cilamaya Wetan. Banyusari. Cilamaya Kulon. dan Jatisari	5.009	1.296.880	Rp4.046.700.100,00
Ciampel	Ciampel	1.463	486.363	Rp1.743.641.900,00
Cipule	Ciampel	2.185	880.364	Rp3.005.855.600,00
Karanganyar	Klari, Cikampek	3.303	708.381	Rp2.337.712.400,00
Cilebar	Cilebar	1.518	380.784	Rp1.172.428.600,00
Mulyasejati	Ciampel	1.337	273.634	Rp1.002.995.400,00
Batujaya	Batujaya, Pakisjaya	5.365	1.427.248	Rp4.063.823.100,00
Majalaya	Majalaya. Karawang Timur	11.627	2.030.506	Rp8.577.478.350,00
Kabupaten Karawang		114.550	34.289.690	Rp119.576.428.740

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Distribusi layanan air bersih oleh berbagai cabang/unit di Kabupaten Karawang, yang meliputi jumlah pelanggan, volume air yang terjual (dalam satuan kubik), dan nilai penjualan (dalam rupiah). Total pelanggan di Karawang mencapai 114.550 rumah tangga dengan volume air terjual sebesar 34.289.690 m³ dan nilai penjualan mencapai Rp119,5 miliar. Unit layanan Karawang (yang mencakup Karawang Barat/Timur, Klari, dan Telukjambe Timur) menjadi penyumbang terbesar dengan nilai penjualan hampir Rp27 miliar, diikuti oleh Telukjambe dan Klari yang masing-masing melayani volume air di atas 1,9 juta m³. Cabang/unit dengan nilai penjualan terendah adalah Rawamerta dan Mulyasejati. Ini menggambarkan variasi yang signifikan dalam kapasitas pelayanan air bersih di wilayah Karawang, yang sangat terkait dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk. Hal ini menegaskan bahwa beberapa unit seperti Karawang, Klari, dan Telukjambe menjadi tulang punggung distribusi air bersih di kabupaten ini. Sebaliknya, daerah-daerah dengan konsumsi air yang lebih rendah bisa menjadi fokus

pengembangan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan air bersih, guna mendukung pencapaian target akses air minum layak di Kabupaten Karawang.



Gambar II-36 Akses Air Minum Layak Rumah Tangga di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (%)

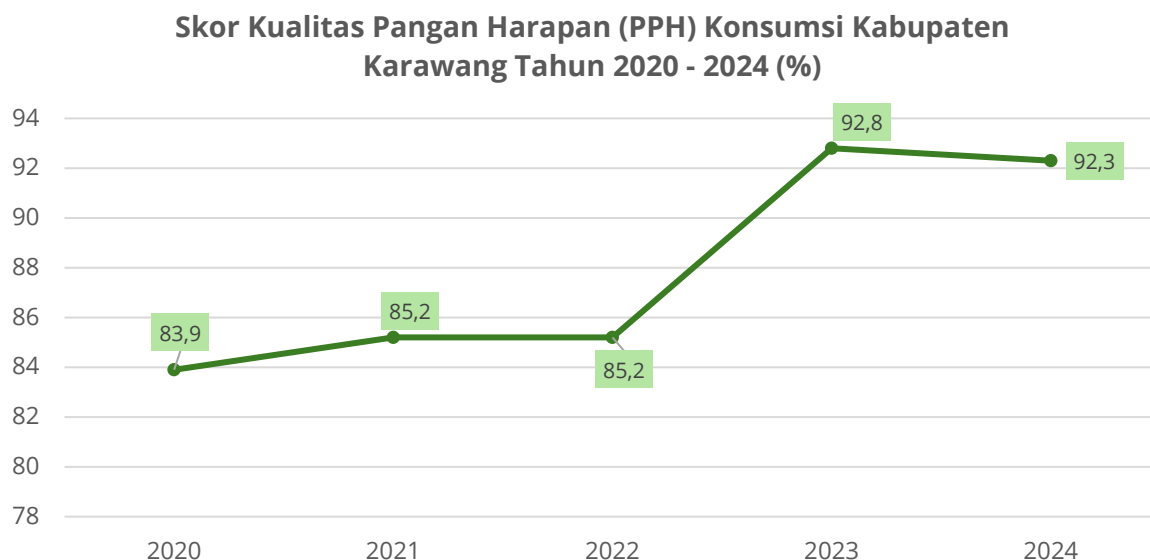
Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Data capaian akses air minum layak di Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 80,31% pada 2020 menjadi 90,54% pada 2024. Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemerintah daerah dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan peningkatan layanan PDAM. Meskipun telah melampaui 90%, capaian ini juga menjadi indikator bahwa Karawang terus mendekati target akses air minum layak yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, sekaligus menekankan pentingnya pemerataan akses di daerah pedesaan dan kawasan dengan akses air terbatas.

C. Gambaran Kondisi Ketahanan Pangan

1. Kualitas Konsumsi Pangan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) bertujuan untuk menilai apakah pola konsumsi pangan penduduk sudah beragam, bergizi seimbang, dan aman. Skor PPH dihitung berdasarkan konsumsi pangan pokok (karbohidrat), protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan lainnya. Sementara itu persentase kualitas konsumsi pangan berdasarkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) hingga tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 92,3% dari target nasional yang dikeluarkan Perpres Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar 95,2%. Kondisi atau progres tersebut dinilai cukup baik mengingat terjadi peningkatan dari tahun 2020 sebesar 83,9% ke tahun 2023 sebesar 92,8% akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2024 sebesar 92,3%.



Gambar II-37 Skor Kualitas Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024 (%)

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Grafik Kualitas Konsumsi Pangan (Skor PPH) Kabupaten Karawang periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang fluktuatif namun positif, dengan realisasi yang umumnya berada sedikit di bawah target nasional (95,2%). Peningkatan skor PPH ini menandakan adanya perbaikan dalam keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Karawang, meskipun fluktuasi di 2023–2024 menunjukkan tantangan dalam stabilisasi konsumsi pangan yang bergizi seimbang. Sebagai lumbung pangan Jawa Barat, Karawang memiliki potensi besar untuk terus meningkatkan pola konsumsi gizi masyarakatnya, dan intervensi kebijakan di bidang edukasi pangan dan diversifikasi konsumsi diharapkan mampu mendorong skor PPH realisasi agar mendekati target nasional pada tahun-tahun mendatang.

Secara umum, realisasi masih di bawah target nasional (95,2%) hingga 2024, namun terus mendekati target tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ketersediaan pangan di Karawang cukup baik (sebagai lumbung padi Jawa Barat), pola konsumsi pangan masih perlu disempurnakan—khususnya dalam konsumsi protein hewani dan sayuran. Tren BAU yang stabil menandakan bahwa tanpa intervensi, perbaikan kualitas konsumsi pangan hanya akan naik sedikit-sedikit. Dengan berbagai upaya seperti program gizi seimbang, diversifikasi pangan, dan peningkatan kesejahteraan petani, diharapkan skor PPH realisasi di Karawang bisa mendekati target nasional.

2. Indeks Ketahanan Pangan

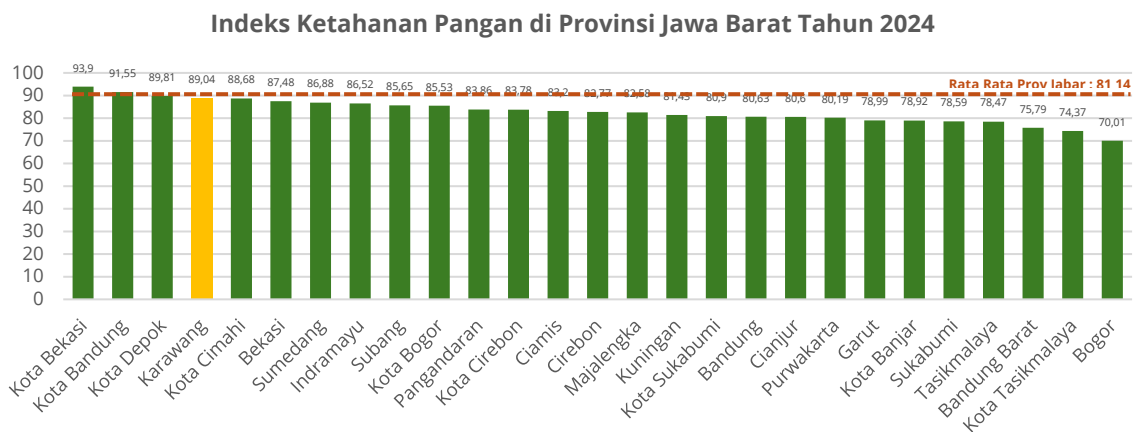
Indeks Ketahanan Pangan menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah. Nilai IKP Kabupaten Karawang pada tahun 2019-2024 sendiri sudah tergolong pada kelompok 6 (sangat tahan) atau kelompok prioritas.



Gambar II-38 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Karawang

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Apabila dilihat komparasi pada seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat maka kabupaten karawang termasuk berada diatas rata rata IKP Provinsi Jawa Barat.



Gambar II-39 Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

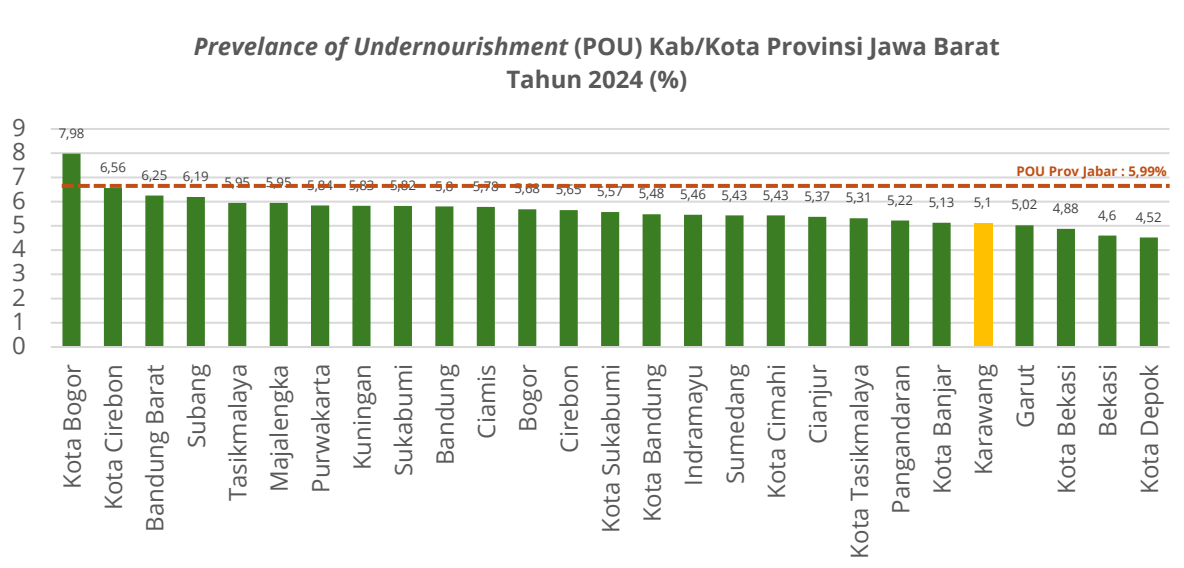
Berdasarkan dari data IKP di Provinsi Jawa Barat dapat ditunjukkan bahwa Kabupaten Karawang mempunyai Indeks Ketahanan Pangan yang berada diatas rata rata Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan capaian ketahanan pangan di Kabupaten Karawang cukup baik dan mempunyai ketahanan yang tinggi.

3. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi Ketidacukupan konsumsi pangan, mengukur proporsi penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan minimal. Pada Kabupaten Karawang, indikator ini menggambarkan terdapat adanya kelompok masyarakat yang menghadapi kendala akses terhadap pangan, baik dalam faktor ekonomi, geografis, dan keterbatasan tentang makanan yang sehat.

Berdasarkan data BPS Tahun 2024 Prevalensi Ketidacukupan Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Kabupaten karawang tercatat sebesar 5,10%, indeks POU di

Kabupaten Karawang berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 sebesar 5,99%, hal ini menunjukkan proporsi penduduk yang mengkonsumsi makanan dibawah kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif di Kabupaten Karawang lebih sedikit dibandingkan rata rata Jawa Barat, akan tetapi masih jadi tugas pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dimana penduduknya sebesar 5,10% belum mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan aktif, sehingga Pemerintah Daerah harus terus mendorong program ketahanan pangan, perbaikan gizi, dan peningkatan akses logistik.



Gambar II-40 Prevalance Of Undernourishment (POU) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

Apabila dilihat dari per tahun *Prevalance Of Undernourishment* (POU) di Kabupaten Karawang dari tahun 2019 – 2024. Pada tahun 2019, angka PoU di Kabupaten Karawang tercatat sebesar 3,42%. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 3,42% penduduk Karawang mengalami kekurangan konsumsi energi pangan. Angka ini relatif lebih rendah dari rata-rata POU Provinsi Jawa Barat. Hal ini mencerminkan cukup baiknya ketersediaan pangan di Karawang yang memang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Namun, tantangan masih tetap ada untuk memastikan distribusi dan akses pangan yang merata.

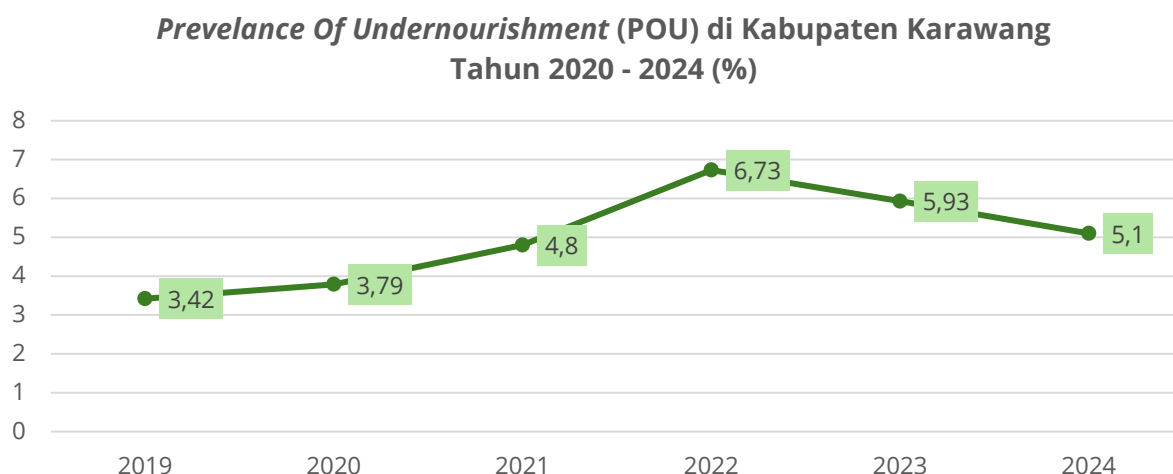
Pada 2020, PoU Karawang naik menjadi 3,79%. Kenaikan ini kemungkinan besar terkait dengan dampak pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, termasuk Karawang. Pembatasan aktivitas ekonomi, PHK, dan terganggunya distribusi pangan berdampak pada menurunnya daya beli dan akses pangan sebagian masyarakat, meskipun Karawang tetap menjadi salah satu pusat produksi pangan di Jawa Barat.

Tahun 2021 menunjukkan peningkatan PoU menjadi 4,8%. Tahun kedua pandemi COVID-19 memaksa pemerintah dan masyarakat beradaptasi, namun pemulihan ekonomi dan stabilitas pangan belum sepenuhnya pulih. Data ini menjadi sinyal bahwa program perlindungan sosial dan intervensi gizi perlu diperkuat agar masyarakat rentan tetap memiliki akses pangan yang cukup dan bergizi.

Pada 2022, PoU melonjak signifikan menjadi 6,73%. Kenaikan drastis ini menjadi peringatan bagi Karawang bahwa meskipun menjadi sentra produksi pangan, sebagian penduduknya masih menghadapi kendala konsumsi pangan yang cukup. Ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi, kesenjangan pendapatan, dan perluasan wilayah industri yang kadang mengorbankan lahan pertanian produktif.

PoU sedikit turun menjadi 5,93% pada 2023. Penurunan ini menandakan adanya upaya pemulihan dan stabilisasi akses pangan yang mulai membuahkan hasil, meskipun belum kembali ke level yang lebih rendah seperti sebelum pandemi. Pemerintah daerah dan sektor swasta memainkan peran penting dalam memulihkan distribusi pangan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, dan mendorong konsumsi pangan bergizi.

Tahun 2024, PoU di Karawang tercatat sebesar 5,1%, menunjukkan tren menurun yang positif. Angka ini mengindikasikan bahwa intervensi pemerintah dan adaptasi masyarakat dalam meningkatkan ketahanan pangan sudah mulai efektif. Meskipun belum mencapai level yang ideal (mendekati 0%), penurunan ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mewujudkan target SDGs untuk menghapus kelaparan.

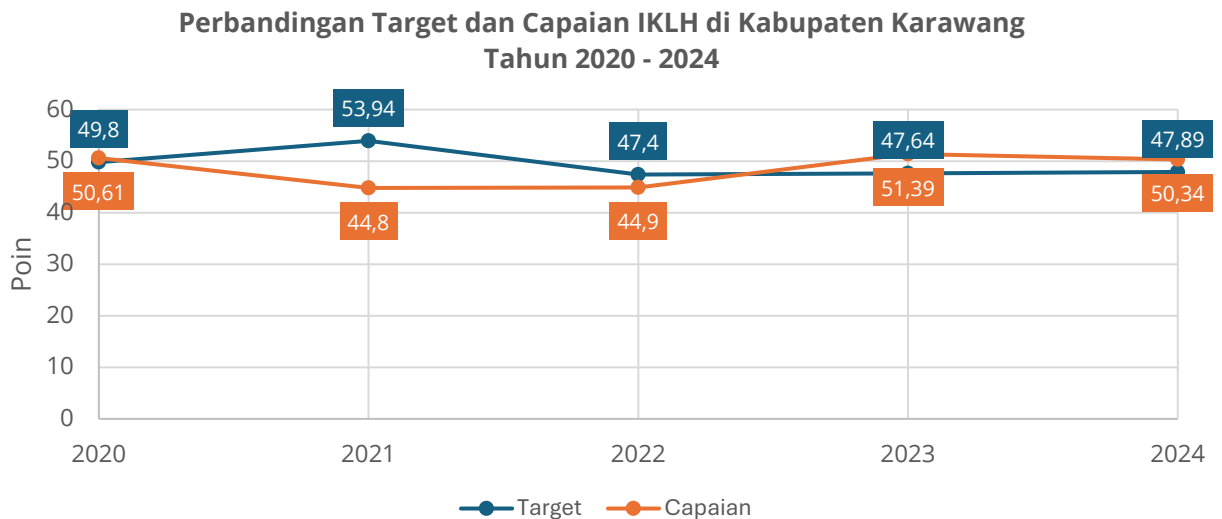


Gambar II-41 Prevalance Of Undernourishment (POU) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistika, 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang dapat direpresentasikan dengan beberapa indikator antara lain Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Pengelolaan Sampah. Kinerja urusan Lingkungan Hidup Berkualitas direpresentasikan melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), yang merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

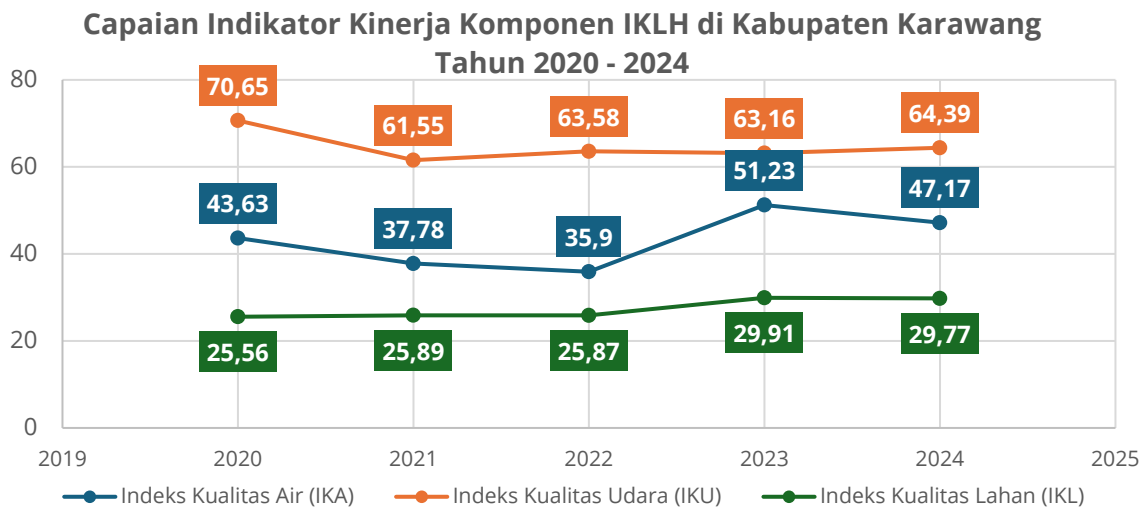


Gambar II-42 Perbandingan Target dan Capaian IKLH di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Karawang, 2025

Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi poin yang cukup signifikan. Pada IKLH tercatat 2020 sebesar 50,61. Namun, terjadi penurunan cukup tajam pada tahun 2021 dengan poin 44,80, yang sedikit meningkat menjadi 44,92 pada tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan perbaikan sebesar 47,64, dan pada tahun 2024, poin IKLH kembali naik menjadi 50,34.

Berdasarkan tren ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Karawang berhasil meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara bertahap, masih terjadi ketidakstabilan pada beberapa tahun tertentu. Fluktuasi ini kemungkinan besar disebabkan oleh dinamika pembangunan industri, perubahan tata guna lahan, serta faktor-faktor lain seperti kualitas air dan udara. Kenaikan di tahun 2024 mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan telah menunjukkan hasil positif. Hal ini penting untuk menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang, agar tren kenaikan kualitas lingkungan terus berlanjut dan mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Karawang secara berkelanjutan.



Gambar II-43 Capaian Indikator Kinerja Komponen IKLH Kabupaten Karawang 2020 - 2024

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Karawang, 2025

IKLH Kabupaten Karawang, meskipun ada peningkatan Tahun 2024, terdapat tren penurunan pada tahun 2021 s.d 2022 menunjukkan bahwa upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup masih menghadapi tantangan. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih dan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia untuk memastikan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Perhitungan capaian IKLH yang Tahun 2020-2024 menggunakan rumus perhitungan lama. Sedangkan untuk Baseline IKLH Nasional 2023 menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- IKU (Indeks Kualitas Udara) : Penambahan Parameter PM (*Particulate Matter*) 2,5 Sehingga Nilai Proyeksi IKU Memiliki Kecenderungan Penurunan (Terutama Perkotaan)
- IKA (Indeks Kualitas Air) : Perubahan metode perhitungan menjadi metode IKA-INA (Skala Maks. 100, Bukan Berdasarkan Indeks Pencemar, dan Tidak dibandingkan dengan kelas sungai). IKA-INA dikembangkan untuk menyusun formulasi indeks kualitas air yang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian kualitas air di Indonesia, sehingga semua penyusunan komponen IKA-INA yang berupa pemilihan parameter kualitas air, bobot parameter kualitas air dan penyusunan kurva sub indeks merupakan hasil pengolahan data primer yang berasal dari panelis bidang air di Indonesia.
- IKL : 23 Klasifikasi Tutupan Lahan dimasukkan dalam perhitungan IKL (sebelumnya hanya 9) dan memasukkan Faktor Koreksi Ekosistem Gambut. Sedangkan untuk Karawang masuk kedalam kriteria Non-Gambut.

Tabel II-14 Konversi Perhitungan Rumus Lama ke Rumus Baru Perhitungan IKLH

CAPAIAN 2023 (RUMUS LAMA)				CAPAIAN 2023 (KONVERSI RUMUS BARU)			
IKLH	IKU	IKA	IKL	IKLH	IKU	IKA	IKL
51,39	63,16	51,23	29,91	43,94	20,56	64,36	52,13

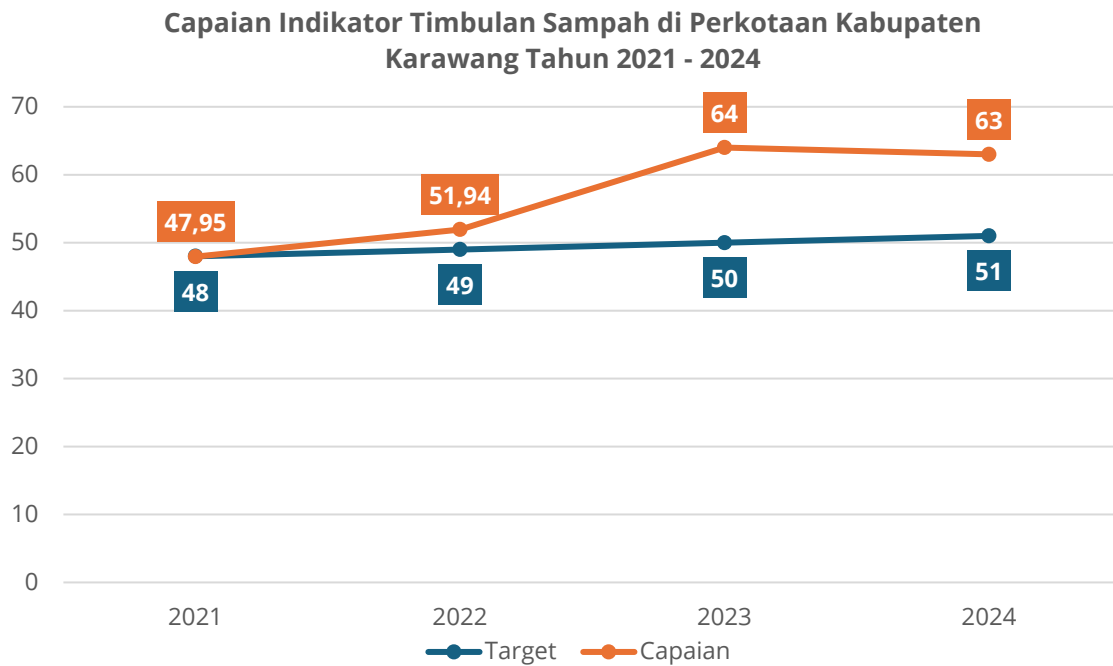
Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

Tabel II-15 Kondisi Eksisting Penyebab Pencemaran Pada Kualitas Lingkungan Hidup

Komponen IKLH	Kondisi terkini
IKU (Indeks Kualitas Udara)	➤ Peningkatan jumlah/ volume kendaraan dan terjadinya kepadatan lalu lintas. ➤ Belum adanya transportasi umum yang memadai dan ramah lingkungan. ➤ Masih terdapat pelaku usaha pembakaran kapur yang belum memiliki perizinan. ➤ Tungku pembakaran kapur belum dilengkapi alat pengendali pencemaran. ➤ Belum semua pelaku usaha yang menghasilkan sumber pencemar udara memenuhi ketentuan.
IKA (Indeks Kualitas Air)	➤ Nilai parameter organik cenderung tinggi (BOD>3 ppm, COD>25 ppm, Coliform>1000 MPN) ➤ Belum ada IPAL Komunal Domestik yang berfungsi dengan baik ➤ Belum tersedia IPLT yang representative ➤ Banyak sampah yang dibuang ke saluran pembuangan air sehingga kapasitas saluran berkurang dan tersumbat
IKL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	➤ Keterbatasan lahan (keterbatasan biaya untuk penyediaan lahan untuk RTH) ➤ Tingginya pertumbuhan penduduk ➤ Banyak terjadi alih fungsi lahan ➤ Kurangnya peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan RTH ➤ Belum ada rencana detail tata ruang yang menjadi acuan dalam mengatur alokasi untuk RTH

Sumber: Analisa DLH Kab. Karawang 2024

Selain IKLH, Kabupaten Karawang berkomitmen dalam mewujudkan pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan peningkatan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk.



Gambar II-44 Capaian Indikator Timbulan Sampah di Perkotaan Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024

Sumber: LKIP DLH Kabupaten Karawang, 2025

Capaian Kinerja Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Perkotaan tercapai. Namun indikator yang disampaikan adalah Timbulan Sampah yang dilayani hanya pada wilayah perkotaan berdasarkan materi teknis RTRW Kab. Karawang Tahun 2022 s.d 20245 belum seluruh wilayah di 30 Kecamatan Kabupaten Karawang. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Kab. Karawang

1. Fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah belum optimal
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. Pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih open dumping
4. Regulasi Penegakan hukum yang belum berjalan optimal
5. Keterlibatan antar *stakeholder* pengelolaan sampah baik sektor pemerintahan dan non pemerintahan belum optimal
6. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang belum optimal
7. Sebaran pelayanan pengelolaan sampah pada 30 Kecamatan belum optimal

Kondisi Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang berdasarkan Data Persampahan Tahun 2024, Persentase Capaian Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang adalah 36,75 % sekitar 413,34 Ton/Hari. Angka Pelayanan tersebut masih terdiridari angka Pengurangan Sampah di angka 3,18 % (35 Ton/Hari), dan Penanganan Sampah dengan kondisi pengangkutan Sampah ke TPA di angka 34,55 % (378,44 Ton/Hari).

Tabel II-16 Timbulan dan Volume Sampah per Tempat Pengolahan

Timbu lan Samp ah 2024	Volume Pengura ngan 2024	Kondisi Persampahan Karawang Tahun 2024										Vol Belum Terlay ani
		TPA		TPS3R		TPST		Bank Sampah		TPA Regio nal	Vol Terta ngani	
		Jum lah	Vol	Jum lah	Vol	Jum lah	Vol	Jum lah	Vol	Vol		
(Ton/ Hari)	(Ton/Ha ri)	(uni t)	(Ton/ Hari)	(uni t)	(Ton/ Hari)	(uni t)	(Ton/ Hari)	(uni t)	(Ton/ Hari)	(Ton/ Hari)	(Ton/ Hari)	(Ton/ Hari)
1095	35	1	378,34	13 Akti v dari 23	10,32	3 Akti v dari 3	29,5	113 Akti v dari 165	7,1	0	425,26	634,74

Sedangkan untuk Rincian Kebutuhan Idel untuk Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut.

**Tabel II-17 Proyeksi Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029**

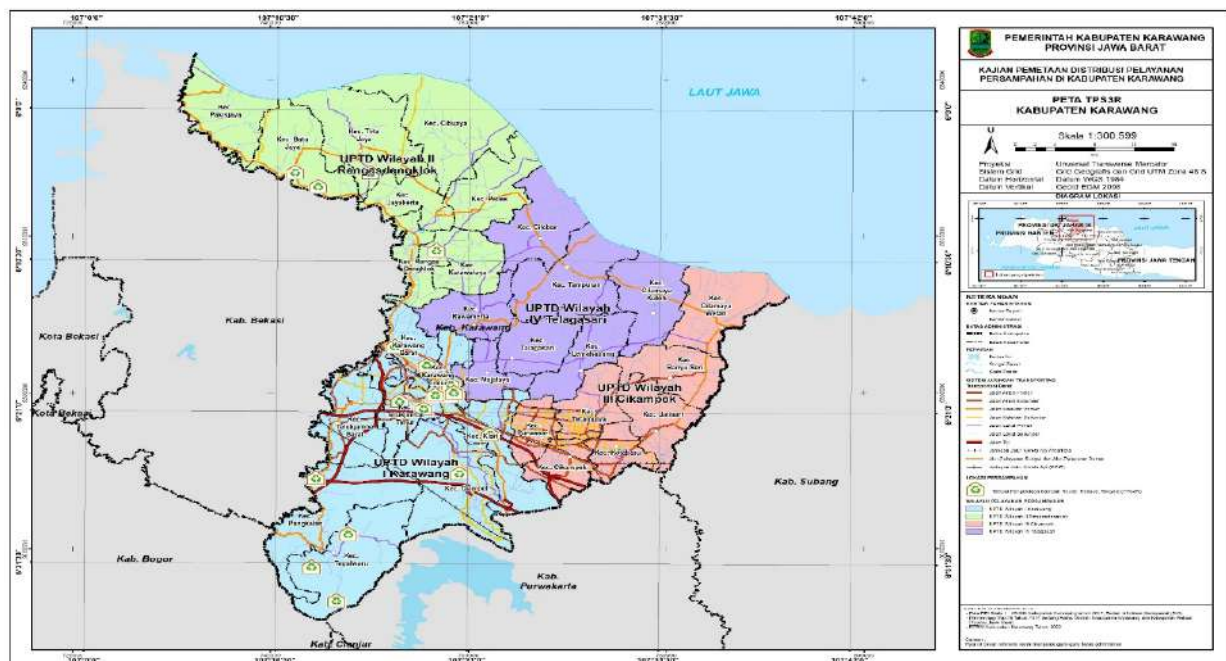
Uraian	Kondisi Tahun 2023	Jangka Pendek	Jangka Menengah			
		2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.518.456	2.581.245	2.593.098	2.617.343	2.617.575	2.653.826
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)	1.067	1.078,92	1.089,10	1.099,28	1.099,38	1.114,61
Proyeksi Jumlah Kebutuhan TPST (25 ton/hari)	3	4	5	5	6	7
Proyeksi Jumlah TPS 3R (kapasitas minimal 1 ton/hari)	20	27	32	37	42	50
Proyeksi Jumlah Bank Sampah Induk/Pusat Daur Ulang	1	3	6	10	13	16

Sumber: RISPS Kab. Karawang 2025 s.d 2040



Gambar II-45 Peta Lokasi TPA dan TPST Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Pemetaan Distribusi Pelayanan persampahan tahun 2024



Gambar II-46 Peta Sebaran TPS3R Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Pemetaan Distribusi Pelayanan persampahan tahun 2024

Sumber sampah di Kabupaten Karawang berasal dari kawasan permukiman, pasar, kawasan komersial (pertokoan, hotel dan restoran), kawasan institusi (perkantoran dan sekolah), kawasan industri, taman & jalan, puskesmas/rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Untuk kategori pewadahan, Kabupaten Karawang menggunakan dua pola pewadahan yaitu pola pewadahan individual dan pola pewadahan komunal. Pewadahan rumah tangga biasanya menggunakan bin/bak sampah, lubang di pagar, pojokan jalan,

atau di dalam kantong plastik tidak adanya sistem pemilahan sehingga sampah menjadi tercampur, untuk pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur, sebagian besar kios menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas.

Kegiatan pengumpulan sampah dimulai dari kegiatan penyapuan sampah di jalan-jalan protokol dan non protokol termasuk pelataran/trotoarnya, dan pengumpulan sampah langsung dari sumbernya baik yang bersumber dari rumah tangga atau non rumah tangga. Sebagian besar pengumpulan sampah di Kabupaten Karawang dilakukan secara swakelola. Pengumpulan sampah dikoordinir oleh RT atau RW masing-masing. Sampah di sumber dibawa ke TPS oleh petugas kebersihan yang telah ditunjuk oleh pengelola RT atau RW masing-masing dengan menggunakan gerobak/motor sampah. Pada saat ini tercatat sebanyak 138 unit sarana pengumpul sampah yang terdiri dari container, arm roll, dan truk.

Sarana pengangkutan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang sebanyak 147 unit kendaraan yang terdiri atas Gerobak Sampah, Pickup, Motor Sampah, Arm Roll dan Trailer Kontainer.

Sarana pengolahan sampah yang dikembangkan di Kabupaten Karawang terdiri atas Bank Sampah, TPS 3R, TPST, dan TPA. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang terdapat 154 unit bank sampah, 23 unit TPS 3R, 3 unit TPST, dan 1 TPA, selain itu Kabupaten Karawang memiliki 2 unit depo kendaraan angkut sampah dan 146 TPSS. Sarana pengolahan Kabupaten Karawang tidak tersebar secara merata sehingga masih banyak terdapat wilayah yang belum terlayani.

Upaya untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah di area Kabupaten Karawang dengan sasaran memberikan layanan persampahan yang terus meningkat. Upaya ini perlu didukung oleh peran institusi dan partisipasi masyarakat, dalam rangka pengurangan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada jangka menengah dimulai tahun 2026 hingga 2029 atau akhir tahun kelima dari rencana induk ini, dilakukan upaya untuk meningkatkan performa sistem manajemen dan pelayanan sampah di area Kabupaten Karawang dengan sasaran memberikan layanan persampahan yang terus meningkat. Upaya ini perlu didukung oleh peran institusi dan partisipasi masyarakat, dalam rangka pengurangan sampah, pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah.

Target pada jangka menengah ini adalah untuk mewujudkan tahapan pertama dalam visi dan misi RPJPD Kabupaten Karawang terkait pengelolaan persampahan untuk mewujudkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang merata dan terjangkau. Pada tahap pertama tujuan akhirnya adalah mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu hingga menginisiasi perubahan paradigma pengolahan sampah di sumber dan menunjang pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat.

Peningkatan jumlah penduduk ini akan berdampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan perencanaan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Beberapa upaya kebijakan yang dapat dilakukan untuk menangani pengelolaan persampahan diantaranya:

1. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan/penyelenggaraan persampahan

Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah Kabupaten Karawang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran bahwa urusan persampahan merupakan urusan bersama dalam rangka mencapai target – target terkait pelayanan persampahan dan kesehatan yang telah ditentukan, peningkatan koordinasi ini dilakukan melalui berbagai rapat koordinasi dan internalisasi program – program kerja/kegiatan terkait persampahan dalam rencana strategis/kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing.

2. Pembentukan, pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola persampahan swasta/Masyarakat (misal: TPS3 R/Bank Sampah)

Dalam jangka menengah ini juga diperlukan fasilitas pembentukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola persampahan swasta/Masyarakat (misal: TPS 3R/Bank Sampah) sesuai dengan target pengurangan sampah, kebutuhan pembinaan dan pengawasan lembaga pengelola sampah juga perlu dilakukan sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu pada tahap ini juga disusun kebijakan penerapan insentif dan disinsentif kepada pihak swasta/pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus yang sudah/belum melaksanakan kewajiban penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah serta penyediaan dan operasionalisasi TPS 3R.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia persampahan (rekrutmen dan pelatihan, perbaikan sistem kerja).

Dalam periode perencanaan jangka menengah ini direncanakan untuk terus meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia persampahan melalui rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, perbaikan sistem kerja dan perbaikan kesejahteraan yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan persampahan di Kabupaten Karawang, beberapa program kegiatan yang direncanakan diantaranya:

- a) Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (ANJAB ABK) terhadap Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang dan semua UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan UPTD Pengelolaan Sampah Akhir untuk mengetahui kebutuhan SDM yang ideal. Dalam ANJAB ABK perlu dipastikan pemenuhan jabatan fungsional

minimal pengelola sampah yaitu diantaranya:

- a. Jabatan fungsional di bidang pengelolaan sampah, dengan Tugas dan fungsi antara lain:
 - Mengkoordinir operasional TPS 3R milik pemerintah daerah di wilayah kerjanya
 - Mengkoordinir TPS 3R milik swasta di wilayah kerjanya
 - Mengkoordinir fasilitas RDF di wilayah kerjanya
 - Mengkoordinir Bank Sampah di wilayah kerjanya termasuk bank sampah yang dioperasikan oleh masyarakat
 - Mengkoordinir saran dan prasarana pengolahan sampah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
- b. Jabatan fungsional penegakan hukum (PPNS LH) dengan tugas dan fungsi antara lain:
 - Mengawasi pelanggaran hukum di bidang persampahan di wilayah kerjanya
 - Memberikan laporan dan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk penegakan peraturan daerah dalam hal ini Satpol PP
 - Berperan aktif dalam penerapan peraturan daerah yang mengatur mengenai penegakan hukum di bidang persampahan.

Dalam ANJAB ABK juga harus dipastikan kebutuhan ideal jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan berdasarkan pendekatan kebutuhan terhadap sarana pengangkut sampah telah dipetakan proyeksi kebutuhan SDM pada dokumen RISPS.

- b) Perkuatan peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Lingkungan Hidup dalam menegakkan Perda terkait pengelolaan sampah (Pembentukan/Penambahan PPNS-LH).
- c) Pelaksanaan program pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas persampahan secara berkala sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) Bidang persampahan baik untuk SDM Dinas Lingkungan Hidup (sebagai regulator), SDM UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan/ UPTD Pengelolaan Akhir Sampah maupun SDM TPS 3R, TPST, Bank Sampah dan masyarakat pengolah sampah lainnya.
- d) Penyusunan, sosialisasi dan penerapan SOP (*Standard Operational Procedure*) mulai dari proses pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pengangkutan, pemrosesan akhir sampah dan monitoring serta evaluasi kinerja persampahan.

- e) Peningkatan inovasi dalam sistem kerja persampahan, diantaranya dengan pengembangan sistem informasi persampahan (sebagai sarana pengembangan mekanisme koordinasi dan informasi antara regulator, operator dan seluruh stakeholder persampahan) yang dapat juga digunakan dalam pemantauan sampah liar.
 - f) Peningkatan internalisasi nilai – nilai kesadaran pengelolaan sampah melalui kegiatan pendidikan mulai di tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) oleh Dinas Pendidikan dan pemicuan kesadaran masyarakat oleh dinas kesehatan.
4. Pelimpahan sebagian kewenangan dalam pelayanan dasar bidang persampahan dari Pemerintah Kabupaten Karawang (Bupati Karawang/Dinas LH) kepada kecamatan (camat) dan desa yang disertai penyerahan pembiayaan, sarana prasarana dan/atau personil (pelimpahan kewenangan tersebut diantaranya pengangkutan sampah dari sumber ke tempat pembuangan sementara/TPS/TPST, penarikan retribusi) pelimpahan ini diformalisasi melalui peraturan Bupati Kabupaten Karawang. Pelimpahan kewenangan ini juga perlu didukung dengan kegiatan internalisasi dan sosialisasi penggunaan dana desa untuk bidang pengelolaan sampah dan/atau pembinaan dan pendampingan pembagunan/pengadaan sarana persampahan tingkat desa (misal TPS 3R/TPST) wilayah pedesaan yang selama ini belum terlayani pelayanan persampahan.
 5. Dalam jangka menengah ini direncanakan untuk dilakukan program peningkatan kerjasama antar daerah/pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Kerjasama antar daerah dilakukan untuk memperkuat kinerja pelayanan sampah secara regional, sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan baik dalam kerangka *social corporate responsibility* (CSR) maupun dengan mempersiapkan kerangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Berdasarkan data evaluasi RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026 operasional TPA di Kabupaten sudah terkelola dengan baik mengalami peningkatan sebesar 100%.

Tabel II-18 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan dan Penanganan Sampah di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok masyarakat yang bersama Pemda yang terlibat dalam melaksanakan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) dan Bank Sampah	n.a	n.a	27	36	55

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dan Bank Sampah. (%)	n.a	n.a	10	18	20
Terlaksananya pengelolaan sampah. (%)	33,52	41,39	43,63	45,26	47,83

Sumber: KLHS, 2025

Aktivitas penduduk salah satunya menghasilkan buangan berupa sampah, yang disebut dengan sampah domestik. Potensi timbunan sampah di Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel II-19 Potensi Timbunan Sampah

No	Kecamatan	Timbunan Sampah Tahun 2023 (Kg/thn)	Timbunan Sampah Tahun 2029 (Kg/thn)
1	Banyusari	8.212.777,60	8.559.312,81
2	Batujaya	11.723.364,80	12.218.027,98
3	Ciampel	6.470.228,80	6.743.237,79
4	Cibuaya	7.778.600,00	8.106.815,24
5	Cikampek	17.497.684,80	18.235.993,34
6	Cilamaya Kulon	9.922.004,80	10.340.660,24
7	Cilamaya Wetan	13.403.400,00	13.968.951,66
8	Cilebar	6.616.046,40	6.895.208,11
9	Jatisari	12.816.996,80	13.357.805,39
10	Jayakarta	10.087.758,40	10.513.407,75
11	Karawang Barat	23.767.841,60	24.770.717,16
12	Karawang Timur	26.334.601,60	27.445.780,68
13	Klari	34.428.617,60	35.881.320,78
14	Kotabaru	23.343.347,20	24.328.311,37
15	Kutawaluya	9.424.601,60	9.822.269,29
16	Lemahabang	10.630.872,00	11.079.437,83
17	Majalaya	19.430.622,40	20.250.490,55
18	Pakisdjaya	7.010.779,20	7.306.596,52
19	Pangkalan	6.075.923,20	6.332.294,60
20	Pedes	14.196.710,40	14.795.735,51
21	Purwasari	16.961.833,60	17.677.532,09
22	Rawamerta	12.076.516,80	12.586.081,10
23	Rengasdengklok	20.159.852,80	21.010.490,56
24	Tegalwaru	6.587.708,80	6.865.674,81
25	Telagasari	13.572.286,40	14.144.964,16
26	Telukjambe Barat	8.465.252,80	8.822.441,11
27	Telukjambe Timur	28.625.960,00	29.833.822,12
28	Tempuran	13.718.958,40	14.297.824,93
29	Tirtajaya	14.100.875,20	14.695.856,58

No	Kecamatan	Timbulan Sampah Tahun 2023 (Kg/thn)	Timbulan Sampah Tahun 2029 (Kg/thn)
30	Tirtamulya	13.080.152,00	13.632.064,33
TOTAL		426.522.176,00	444.519.126,37

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Karawang, 2025

Selain persampahan, lingkungan hidup berkualitas juga diukur dari kemudahan akses rumah tangga terhadap sanitasi yang layak. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan tren positif dalam akses sanitasi di wilayah Jawa Barat. Berikut data tiap Kab/Kota di Jawa Barat.

Tabel II-20 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak 2022-2024

Kab/Kota	2022	2023	2024
Bogor	73,47	71,49	67,18
Sukabumi	63,32	53,21	51,9
Cianjur	61,76	63,83	63,3
Bandung	70,85	66,67	69,12
Garut	51,9	54,68	49,99
Tasikmalaya	54,39	51,33	54,68
Ciamis	75,5	71,38	77,12
Kuningan	69,29	83,03	84,64
Cirebon	86,76	89,02	87,92
Majalengka	81,26	82,67	83,61
Sumedang	80,59	72,55	77,32
Indramayu	86,64	95,9	97,27
Subang	80,02	89,4	90,29
Purwakarta	82,46	77,33	83,01
Karawang	85,1	83,02	85,99
Bekasi	89,99	91,54	89,16
Bandung Barat	50,96	56,93	54,02
Pangandaran	83	86,91	90,3
Kota Bogor	67,93	74,36	71,49
Kota Sukabumi	45,8	44,76	45,88
Kota Bandung	49,85	56,01	55,9
Kota Cirebon	90,62	93,27	95,38
Kota Bekasi	90,8	98,52	99,08
Kota Depok	96,21	97,43	98,76
Kota Cimahi	77,18	76,37	76,44
Kota Tasikmalaya	52,62	56,25	53,16
Kota Banjar	88,26	89,06	91,07
Provinsi Jawa Barat	74,02	74,88	75,1
Rata-Rata	66,22	67,56	68,13

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

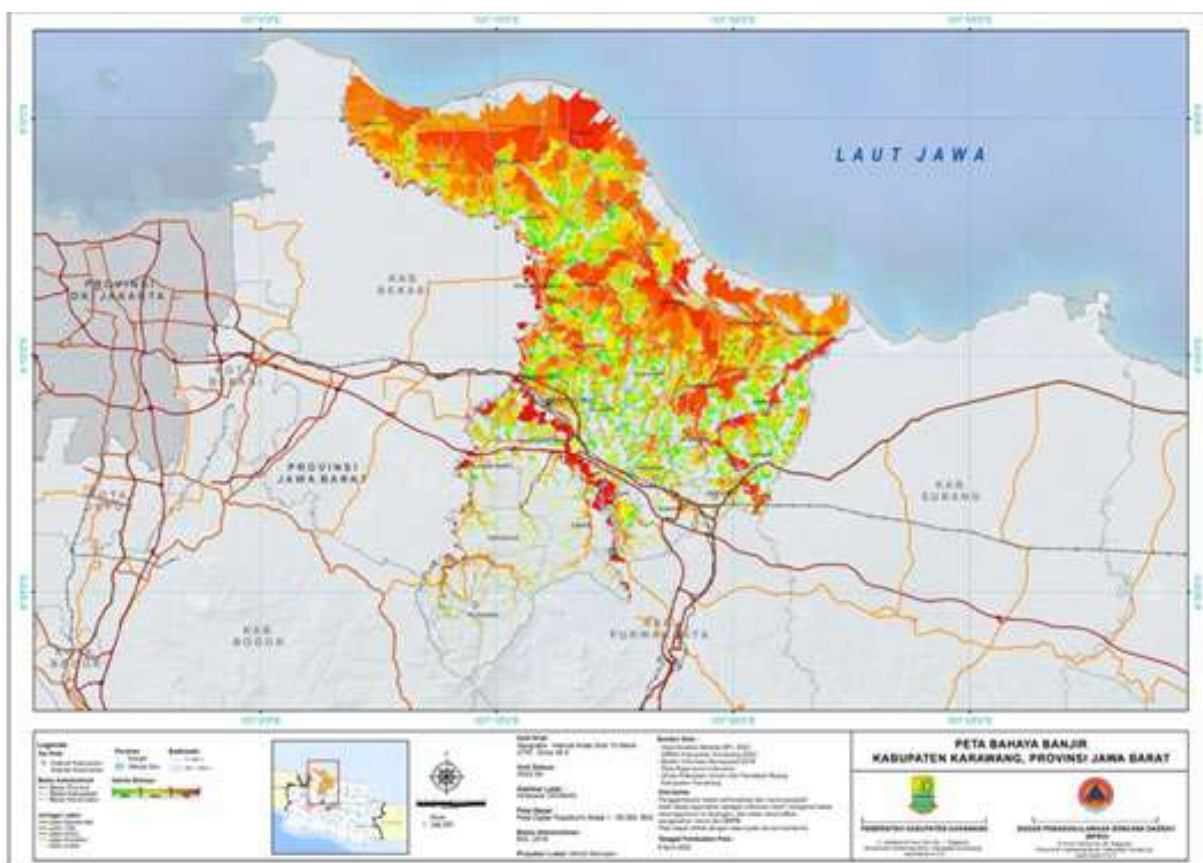
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan merugikan akibat faktor alam maupun non alam dan

menyebabkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, kerugian, hingga dampak psikologi. Kabupaten Karawang memiliki indeks risiko dengan kategori tinggi berada pada urutan ke-4 di Provinsi Jawa Barat (IRBI, 2023) memiliki nilai Indeks Risiko Bencana 152,32 dengan riwayat pada Tahun 2023 tercatat 468 kejadian bencana, meliputi: Banjir (104 kejadian), Kebakaran Hutan dan Lahan (260 kejadian), Cuaca Ekstrem/angin puting beliung (103 kejadian), Gelombang Ekstrem dan Abrasi (1 kejadian). Namun, pada Tahun 2024, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karawang menjadi 142,06 dengan kategori sedang. Berikut merupakan jenis-jenis bahaya bencana yang terdapat di Kabupaten Karawang sesuai Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karawang Tahun 2024-2029.

A. Banjir

Kondisi geografis Kabupaten Karawang yang memiliki topografi relatif rendah dan kelerengan datar cenderung membuat air hujan sulit mengalir sehingga terbentuk genangan. Sungai Citarum yang menjadi sungai terbesar pada wilayah ini juga turut menjadikan Kabupaten Karawang rentan terhadap banjir akibat volume sungai yang meluap saat curah hujan tinggi.



Gambar II-47 Peta Bahaya Banjir Kabupaten Karawang

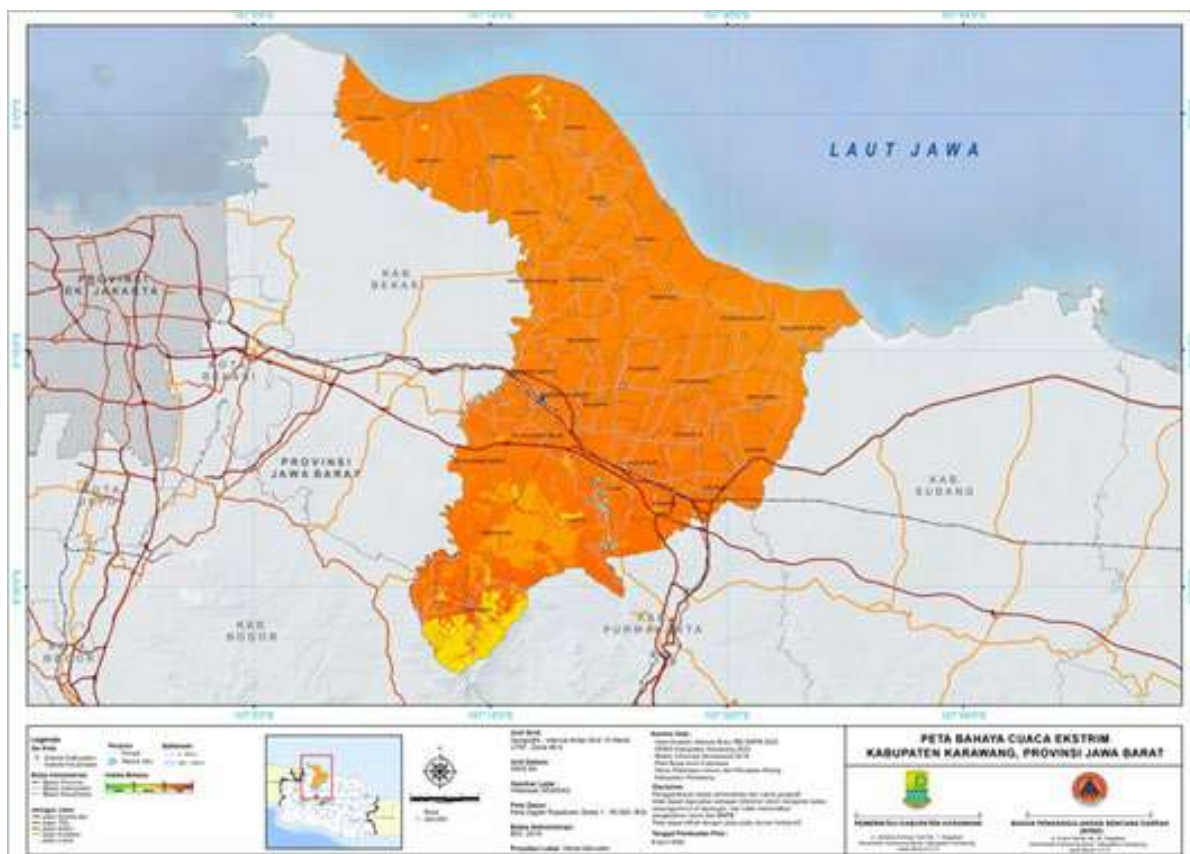
Sumber: *Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025*

Berdasar peta di atas diketahui bahwa kerentanan banjir kategori rendah berada pada bagian selatan yang memiliki topografi tinggi, sementara kerentanan tinggi terjadi pada bagian utara wilayah dan beberapa titik pada tengah wilayah, di mana hal ini terjadi akibat perkembangan industri dan urbanisasi pesat yang belum direncanakan dengan baik sehingga mengurangi area resapan air. Total luasan pada bahaya rendah mencapai

35.145,45 Ha, sedangkan untuk bahaya sedang mencapai 57.128,58 Ha dan untuk bahaya tinggi mencapai 57.192,39 Ha

B. Cuaca Ekstrem

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang rentan terhadap cuaca ekstrem akibat iklim yang tidak menentu. Perubahan ekstrem suhu udara maupun curah hujan yang terjadi berpotensi menimbulkan kerugian kedepannya.



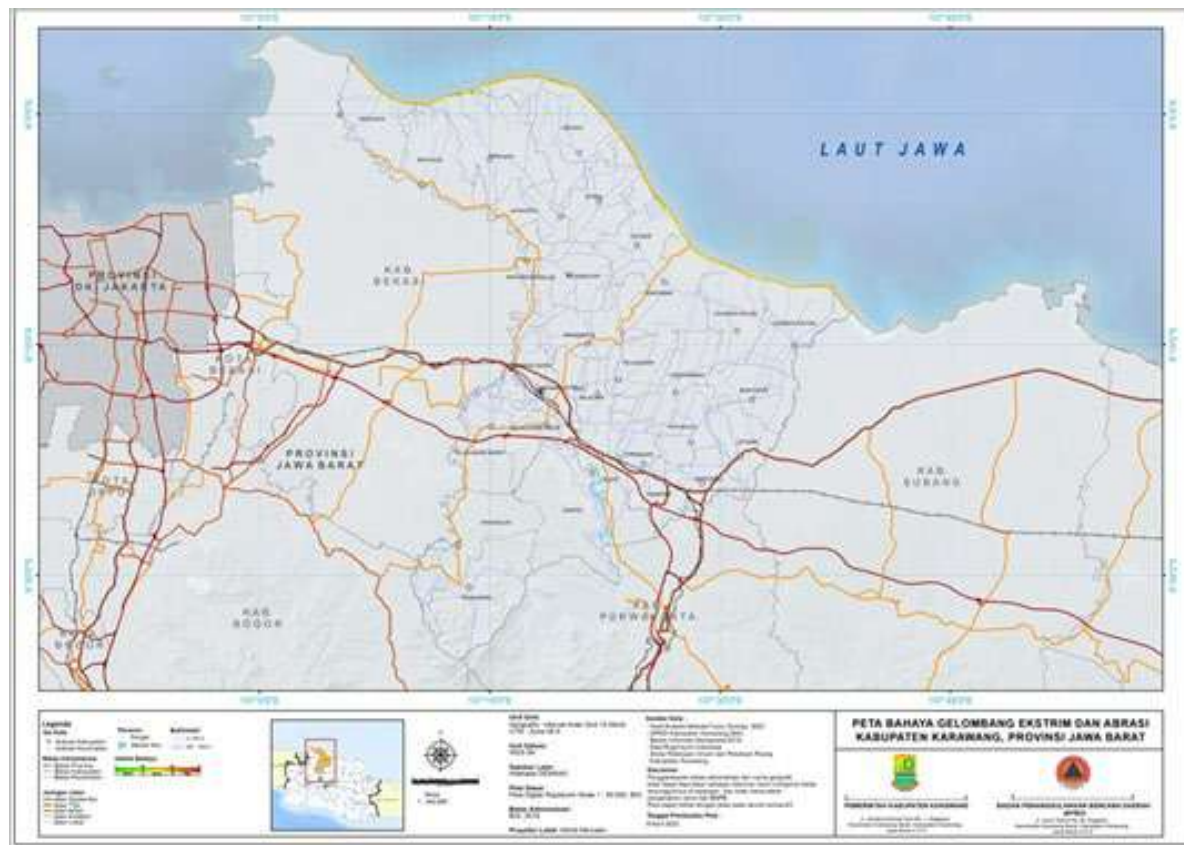
Gambar II-48 Peta Bahaya Cuaca Ekstrem Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025

Berdasarkan hasil kajian analisis bahaya cuaca ekstrem (angin puting beliung) di Kabupaten Karawang memiliki sebaran kelas bahaya tinggi. total luasan pada bahaya rendah mencapai 3.779,55 ha, sedang mencapai 84.072,60 ha, sedangkan total luasan pada bahaya tinggi mencapai 105.545,70 ha. Terutama apada bagian Tenggara Kabupaten Karawang.

C. Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Kabupaten Karawang yang berbatasan langsung dengan garis pantai sepanjang Laut Jawa menjadikan wilayah ini rentan terhadap ancaman gelombang ekstrem hingga abrasi sebagai efek pengikisan garis pantai.



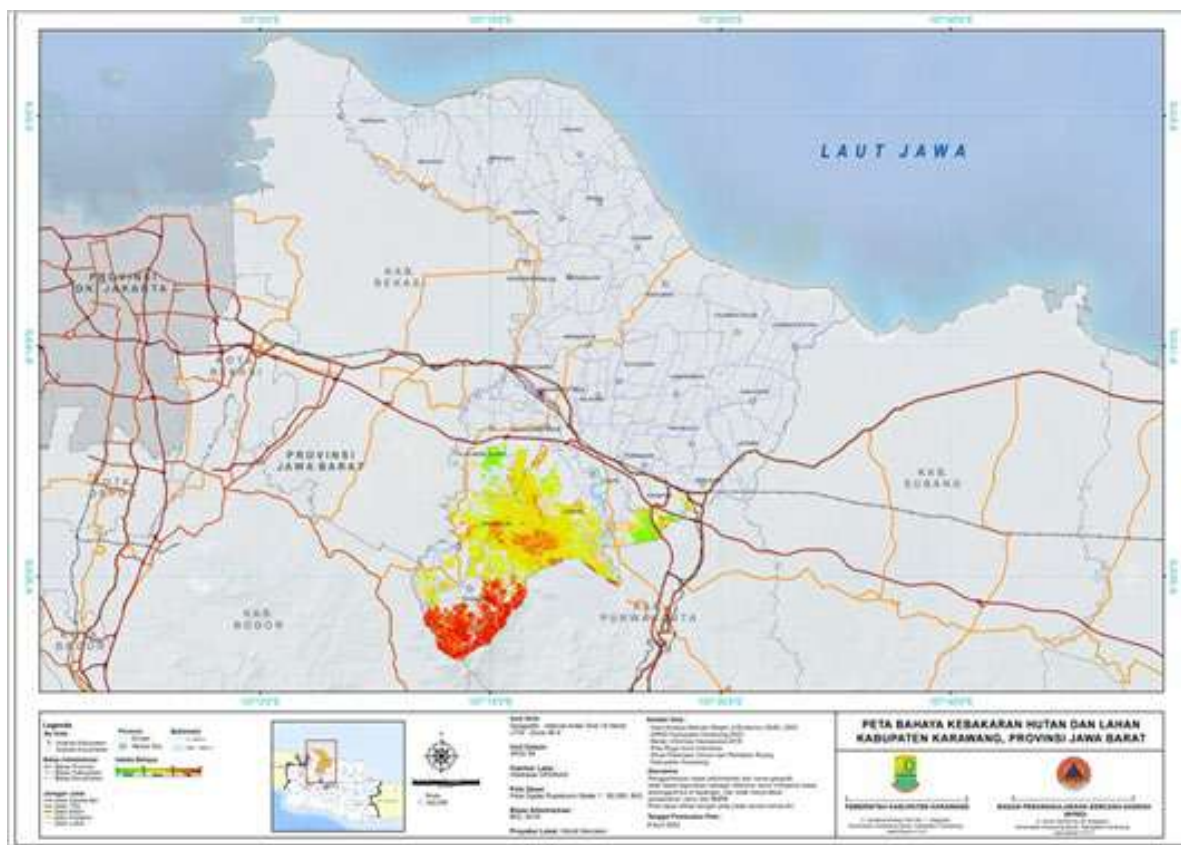
Gambar II-49 Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025

Berdasarkan hasil kajian analisis bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di kabupaten Karawang memiliki sebaran kelas bahaya sedang-tinggi. total luasan pada bahaya sedang mencapai 1.011,24 ha, sedangkan total luasan pada bahaya tinggi mencapai 555,66 ha. kabupaten Karawang termasuk dalam kelas bahaya tinggi. bahaya gelombang ekstrem dan abrasi di kabupaten Karawang tersebar di 9 kecamatan dengan kelas bahaya tinggi terdapat di 6 kecamatan yaitu: kecamatan batujaya, cibuya, cilamaya kulon, cilamaya wetan, pakisjaya dan kecamatan pedes, sedangkan kelas bahaya sedang terdapat di 3 kecamatan yaitu: kecamatan cilebar, tempuran dan kecamatan tirtajaya. adapun kecamatan cibuya memiliki area terdampak pada kelas bahaya tinggi paling luas, mencapai 175,05 ha.

D. Kebakaran Hutan dan Lahan

Selain menyebabkan kerusakan hutan, kebakaran hutan juga menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Seringkali bencana ini menimbulkan bencana lain seperti bencana asap yang mengganggu lingkungan.



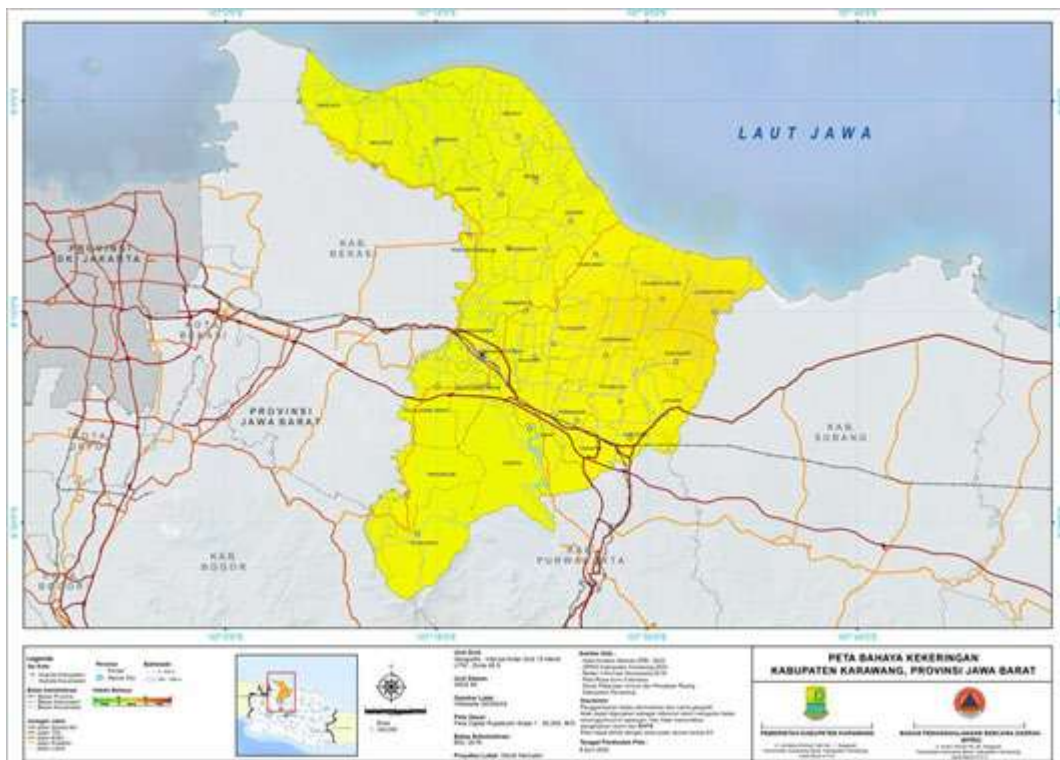
Gambar II-50 Peta Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025

Berdasarkan pada peta bahaya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Karawang memiliki sebaran kelas bahaya sedang-tinggi. total luasan mencapai 22.506,93 ha. total luasan pada bahaya sedang mencapai 14.389,47 ha, sedangkan total luasan pada bahaya tinggi mencapai 6.628,32 ha. Kabupaten Karawang termasuk dalam kelas bahaya tinggi, dimana kecamatan tegalwaru memiliki area yang terdapat kelas bahaya tinggi paling luas, mencapai 4.883,31 ha. sedangkan kecamatan Karawang timur memiliki area terdampak kelas bahaya tinggi paling kecil, mencapai 0,99 ha.

E. Kekeringan

Kekeringan terjadi akibat berkurangnya volume curah hujan pada musim kemarau berkepanjangan. Selain itu kekeringan juga kerap terjadi akibat pasokan air tanah atau air permukaan berkurang akibat ulah manusia. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman hingga krisis sosial maupun ekonomi.



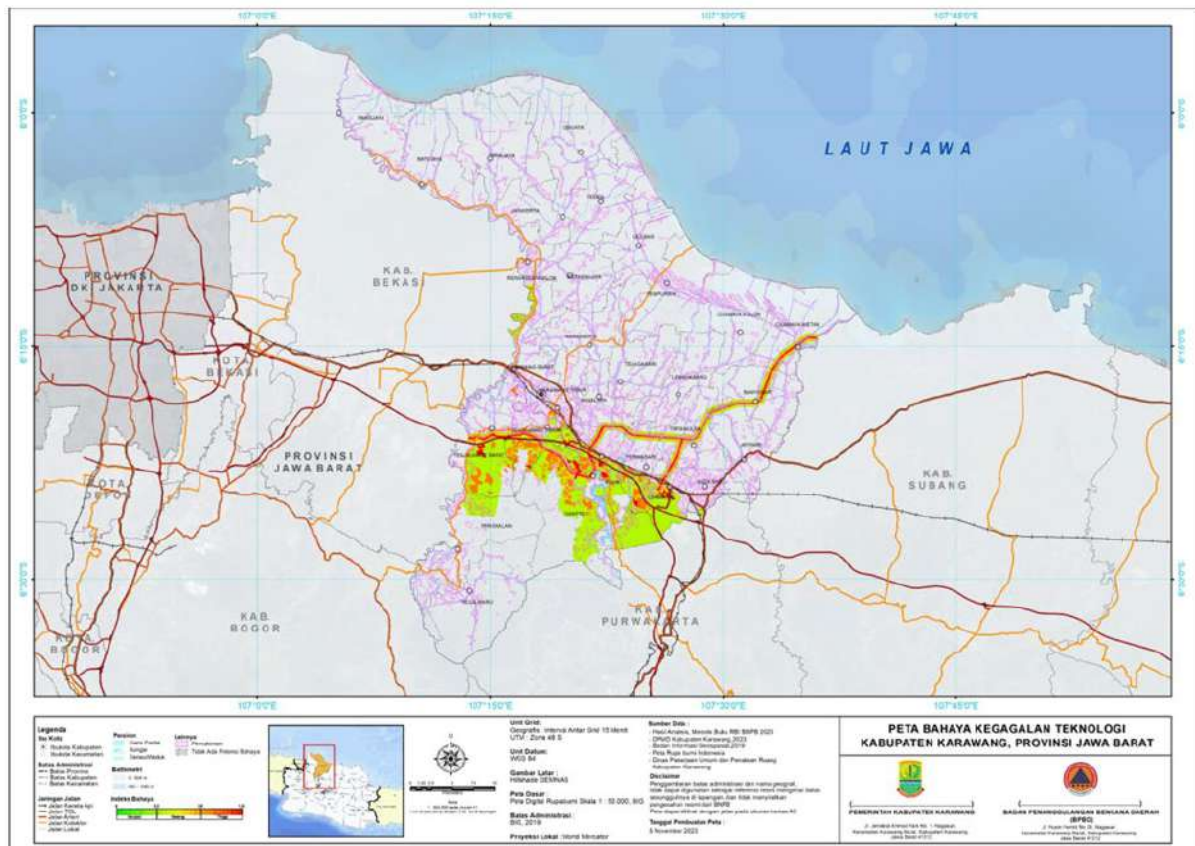
Gambar II-51 Peta Bahaya Kekeringan di Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025

Berdasarkan peta bahaya kekeringan di kabupaten Karawang memiliki sebaran kelas bahaya sedang. total luasan mencapai 193.397,85 Ha. kabupaten Karawang termasuk dalam kelas bahaya sedang, dimana kecamatan ciampel memiliki area kelas bahaya sedang paling luas, mencapai 11.948,04 Ha. sedangkan kecamatan karawang timur memiliki area terdampak kelas bahaya sedang paling kecil, mencapai 3.156,75 Ha.

F. Kegagalan Teknologi

Bencana kegagalan teknologi merupakan bencana yang disebabkan oleh kesalahan dalam desain, pengoperasian, kelalaian, atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan industri. Bencana ini termasuk dalam kategori bencana non-alam.



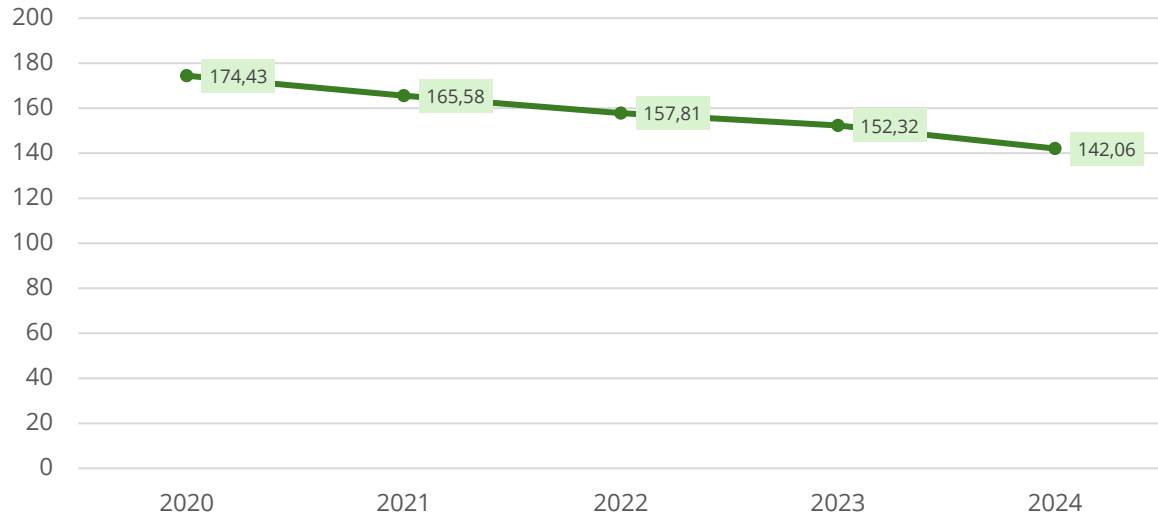
Gambar II-52 Peta Bahaya Kegagalan Teknologi di Kabupaten Karawang

Sumber: Kajian Kerentanan Bencana Karawang, 2025

Berdasarkan peta bahaya kegagalan teknologi di kabupaten karawang memiliki sebaran kelas bahaya rendah-tinggi. total luasan pada bahaya rendah mencapai 16.401,87 Ha, sedangkan untuk bahaya sedang mencapai 3.132,27 Ha dan untuk bahaya tinggi mencapai 4.486,77 Ha. kabupaten Karawang termasuk dalam kelas bahaya tinggi. bahaya kegagalan teknologi di kabupaten Karawang tersebar di 7 kecamatan dengan kelas bahaya tinggi, sedangkan kelas bahaya sedang terdapat di 3 kecamatan dan 6 kecamatan dengan kelas bahaya rendah.

Indeks Risiko Bencana (IRBI) merupakan indikator untuk mengukur dan menganalisis potensi ancaman yang ditimbulkan dari Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan angin topan. Indeks Risiko Bencana digunakan untuk memahami besarnya risiko yang dihadapi dalam suatu wilayah terhadap bencana dan untuk merencanakan langkah langkah mitigasi. Capaian Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karawang dari tahun 2020 – 2024.

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Karawang

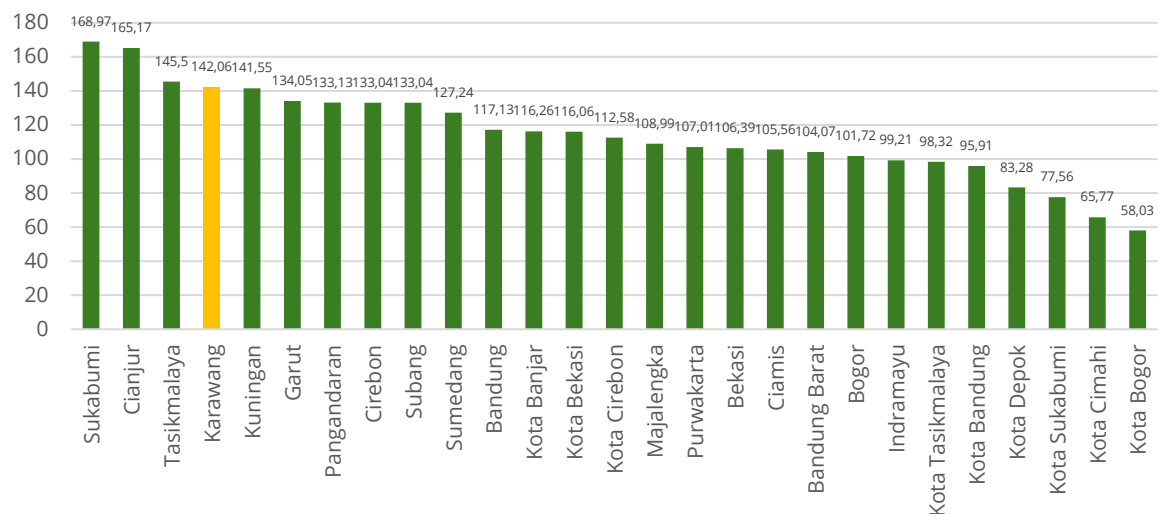


Gambar II-53 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Karawang

Sumber: BNPB, 2025

Data Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan dari 174,43 (kategori risiko tinggi) pada 2020 menjadi 142,06 (kategori risiko sedang) pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya pengurangan risiko bencana, termasuk peningkatan kapasitas penanggulangan, mitigasi kerentanan, dan pengelolaan potensi bencana di wilayah Karawang. Meskipun demikian, selama periode 2020 hingga 2023, Kabupaten Karawang tetap berada pada kategori risiko tinggi, yang menandakan bahwa masih terdapat tantangan signifikan dalam manajemen risiko bencana. Baru pada tahun 2024, capaian tersebut berhasil masuk ke kategori sedang, menandai hasil positif dari berbagai intervensi dan program pengurangan risiko bencana yang dijalankan pemerintah daerah dan masyarakat.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024



Gambar II-54 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: BNPB, 2025

Untuk Kabupaten Karawang pada tahun 2024, nilai risiko bencana tercatat sebesar 142,06 dan masuk dalam kategori kelas risiko sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Karawang tidak berada di level tertinggi risiko seperti beberapa daerah lainnya, potensi bencana tetap signifikan. Nilai yang cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan dan pengurangan risiko bencana. Upaya mitigasi dan adaptasi yang tepat, seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan infrastruktur yang tangguh bencana, sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Secara keseluruhan, meskipun Karawang bukan yang paling rawan, perlindungan dan upaya antisipasi perlu terus dilakukan mengingat dinamika wilayah dan potensi bencana yang terus berkembang.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam upaya pembangunan daerah rendah karbon dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang dikaji ulang pada tahun 2018. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, target penurunan emisi GRK secara kumulatif pada tahun 2029 ditetapkan sebesar 21,12%, yang perlu didukung oleh setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan rendah karbon meliputi berbagai strategi yang telah ditetapkan Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Sektor Kehutanan

Meliputi upaya untuk melakukan penanaman pohon baru, memulihkan kawasan hutan dan lahan, serta menjaga kelestarian hutan.

2. Sektor Pertanian

Difokuskan pada peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui teknologi *System Rice Intensification* (SRI), penerapan metode Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), dan pembangunan fasilitas Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO).

3. Sektor Energi

Berisi pengembangan sumber energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), serta penggantian bahan bakar fosil dengan energi terbarukan (biogas) dan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB).

4. Sektor Transportasi

Menekankan pada pengembangan sistem transportasi massal, penerapan sistem manajemen lalu lintas (ITS/ATCS), penyelenggaraan *Car Free Day* (CFD), modernisasi armada transportasi umum, pengelolaan parkir, dan pelatihan pengemudi ramah lingkungan (*eco-smart driving*).

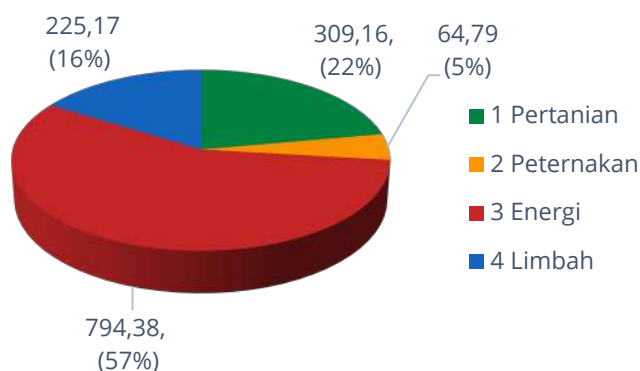
5. Sektor Pengelolaan Sampah dan Air Limbah

Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 3R (*reduce, reuse, recycle*), serta pembangunan fasilitas IPAL domestik dan program sanitasi masyarakat (Sanimas)

Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan serta berdampak langsung pada sektor energi dan pangan. Sektor energi menjadi sorotan karena kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca (GRK), yang memicu pemanasan global. Gangguan cuaca yang semakin tidak terprediksi mengakibatkan masalah pada panen dan produksi pangan. Perubahan iklim juga berkaitan dengan pemanasan global dan isu keadilan iklim. Peningkatan emisi gas rumah kaca disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk alih fungsi lahan, praktik pertanian dan peternakan yang tidak ramah lingkungan, penggunaan energi fosil yang berlebihan, serta pengelolaan limbah domestik yang buruk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dan tingginya mobilitas masyarakat turut mempengaruhi perubahan iklim.

Salah satu faktor perubahan iklim berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Karawang yang disebabkan ketidakmerataan curah hujan dan periode kekeringan yang berkepanjangan menimbulkan tantangan bagi petani dalam mengelola lahan mereka. Hal ini mengakibatkan gangguan pada produksi tanaman, yang berujung pada penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga mempengaruhi ketersediaan air bersih di Kabupaten Karawang. Perubahan pola hujan menyebabkan penurunan cadangan air tanah, sungai, dan danau, sehingga masyarakat di beberapa daerah mengalami krisis air bersih yang serius, terutama selama musim kemarau yang panjang.

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan dari beberapa sektor yang telah diinventarisir, didapatkan total hasil emisi di Kabupaten Karawang sebesar berikut.



Gambar II-55 Total Emisi Kabupaten Karawang

Sumber: Laporan Inventarisasi GRK 2023

Grafik di atas menunjukkan penghasil emisi tertinggi berasal dari sektor transportasi 57%, kemudian sektor pertanian 22%, sektor limbah 16% dan paling rendah berasal dari sektor peternakan sebesar 5%.

Pada Sektor Pertanian, sumber emisi karbon meliputi:

1. Emisi karbon dioksida (CO₂) dari Budidaya Tanaman Padi, Pengelolaan lahan sawah menghasilkan emisi metana yang berasal dari dekomposisi bahan organik secara anaerob. Luas panen budidaya padi sawah yang dihasilkan pada Tahun 2022 kabupaten Karawang dihitung melalui frekuensi penanam dikali dengan luas lahan. Adapun rejime air terdiri dari irigasi dan tadah hujan yang meliputi 1-2 kali panen 2 atau lebih kali panen dalam setahun, pada hasil perhitungan menunjukkan bahwa budidaya padi sawah menghasilkan emisi metana sebesar 11,85 Gg CH₄/tahun atau 296,34 Gg CO₂/tahun.
2. Emisi CO₂ dari Penggunaan Pupuk Urea, Penggunaan pupuk urea dapat menyebabkan lepasnya CO₂ yang diikat selama proses pembuatan pupuk. Total konsumsi pupuk urea pada lahan pertanian adalah sebesar 64.060 ton Urea/tahun berdasarkan SK Alokasi Pupuk 2022 Kabupaten Karawang dengan emisi yang dihasilkan 12,8 Gg CO₂/tahun
3. Emisi N₂O Pengelolaan Kotoran Ternak paling banyak berasal dari Emisi metan fermentasi enterik sebesar 26,587 CO₂eq Gg/tahun dan Emisi metan pengelolaan kotoran ternak 37,752 CO₂eq Gg/tahun.
4. Sektor Limbah Pengelolaan limbah Padat berpotensi menyumbang emisi terbanyak yaitu 201,26 CO₂eq Gg/tahun. Total keseluruhan limbah yang dihasilkan dari sektor limbah adalah sebesar 225,17 CO₂eq Gg/tahun
5. Sektor Transportasi, beragamnya jenis penggunaan bahan bakar yang tersedia penggunaan bahan bakar Gasoline di Karawang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis bahan bakar lainnya. Tentunya penggunaan bahan bakar Gasoline menyumbang emisi terbesar pada sektor transportasi sebesar 110,12 Gg/Tahun.

Berdasarkan Buku 1 Pedoman Penyelarasan Dokumen RPJPN dengan RPJPD, Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO₂e/2010 IDR miliar) memiliki definisi perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Melalui definisi tersebut diketahui nilai PDRB atas dasar harga konstan kabupaten (miliar) pada Tahun 2023 senilai Rp. 187.051,65 (Miliar) dan Nilai Total Emisi dalam satuan CO₂Eq (Ton/tahun) yang dihasilkan di Kabupaten Karawang memiliki nilai sebesar 1.393.500 CO₂Eq (Ton/tahun), sehingga diperoleh estimasi angka intensitas emisi pada Tahun 2023 senilai 7,45 (ton CO₂e/2010 IDR miliar). Capaian penurunan emisi GRK kumulatif di tahun 2024 masih memiliki gap yang besar dengan target, berikut tabulasi realisasi penurunan emisi tahun 2024 berdasarkan sektor.

Tabel II-21 Capaian Penurunan Emisi GRK Kumulatif Tahun 2024

No.	Sektor	Realisasi Penurunan Emisi Tahun 2024 (Ton CO ₂ eq)
1	Afolu/Penggunaan Lahan	260,93
2	Pertanian	44247,03
3	Perternakan	482,24
4	Persampahan	2819,65
5	Limbah Cair	1454,02
6	Transportasi	277,52
Total		49.541,39

Sumber: Pengisian Kegiatan Penurunan Emisi GRK melalui Aplikasi Aksara Tahun 2025

Gap yang masih besar dengan target, sehingga diperlukan Inventarisir data/kegiatan penurunan emisi GRK dari setiap perangkat daerah, kemudian PD juga perlu melaporkan kegiatan mitigasi pada aplikasi AKSARA. Upaya dan Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi GKR Kumulatif

➤ Sektor Pertanian:

- Luas Panen Sawah Tahun 2024 berdasarkan data BPS Tahun 2024 180.093 Ha, untuk luas lahan LP2B 85.339 Ha Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam 1 Tahun 2 x panen. Bilamana menggunakan varietas padi Ciherang dalam 1 Tahun diperoleh 314.189,53 Ton CO₂eq/Tahun. Sehingga perlu melaporkan setidaknya dalam kurun waktu 4 Tahun. Bilamana menggunakan varietas padi yang bukan termasuk kategori rendah emisi, akan semakin sulit untuk mencapai target penurunan emisi GRK.
- Untuk penerapan *System of Rice Intensification* (SRI)
- Penerapan sistem pengairan berselang atau intermiten pada PTT mampu menurunkan emisi GRK secara signifikan. Perhitungan penurunan emisi terhadap pengelolaan tanaman terpadu, dilakukan berdasarkan nilai emisi sebelum aksi PRK dilakukan dan setelah aksi PRK.

➤ Sektor Persampahan:

- Peningkatan Operasional Pengelolaan Sampah
- Pendataan pengelolaan sampah pada Bank Sampah

➤ Sektor Transportasi:

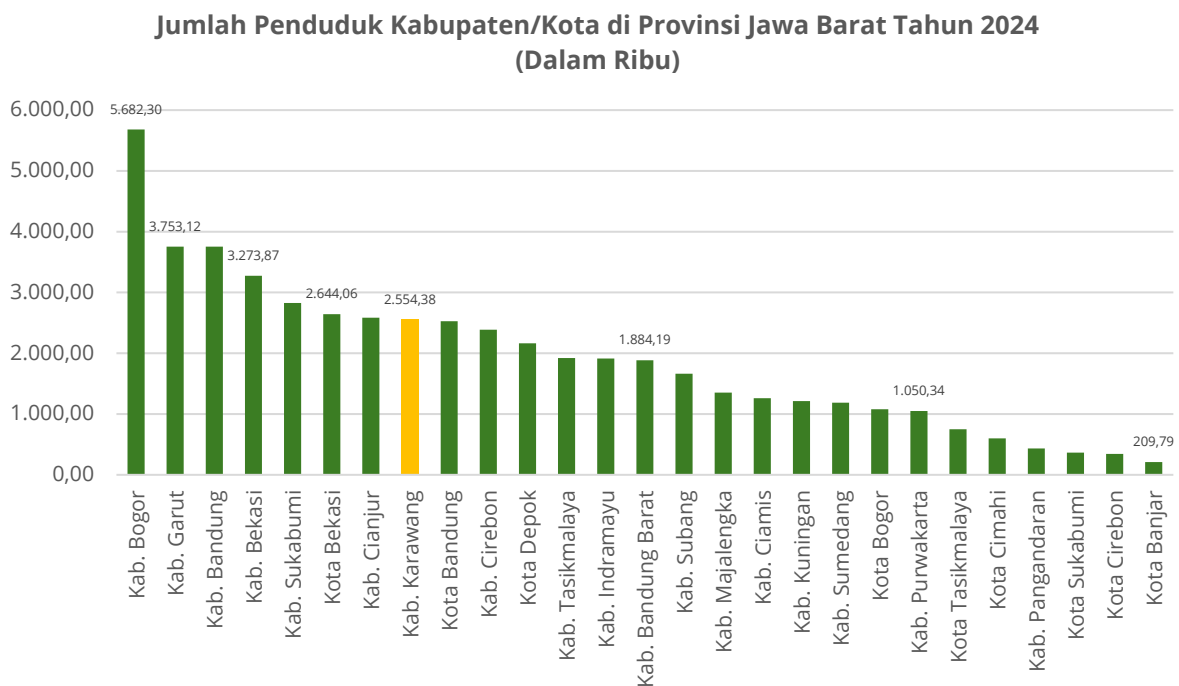
- *Car Free Day*
- Manajemen Parkir
- Form koridor intelligent Transportasion System (ITS): Sistem Teknologi Komunikasi dan Informasi yang saling terintegrasi antara sarana dan prasarana lalu lintas dalam rangka penyelesaian permasalahan lalu lintas serta untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran

lalu lintas dan angkutan jalan yang diselenggarakan dengan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.

- Peremajaan Armada Angkutan Umum
- pelatihan *Smart Driving* kepada pengemudi untuk meningkatkan budaya berkendara yang lebih baik untuk menghemat bahan bakar, mengurangi polusi udara dan emisi GRK dan menghemat biaya perawatan kendaraan
- Sektor Perternakan:
 - Penginput data Pengelolaan Ternak – Penggunaan *Feed Suplemen* Untuk Bahan Pakan Sapi
 - Biogas Ternak Asal Masyarakat (Penggunaan Biodigester)
- Sektor Limbah Domestik:
 - Pendataan pada Dinkes terkait Inspeksi Sanitasi Masyarakat untuk rumah tangga yang sudah memiliki tangka septik
 - Penginputan data IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) terbangun pada aplikasi AKSARA

2.1.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2024 mencapai 2.554.384 jiwa menjadikan Kabupaten Karawang penyumbang penduduk ke-7 terbesar dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar II-56 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Dalam Ribu)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah penduduk berdasar Kab/Kota di Jawa Barat tahun 2020-2024 lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel II-22 Jumlah Penduduk Menurut Kab/Kota 2020 – 2024 (Ribuan Jiwa)

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	5.427,07	5.489,54	5.556,31	5.627,02	5.682,30
Sukabumi	2.725,45	2.761,48	2.775,31	2.802,40	2.828,02
Cianjur	2.477,56	2.506,68	2.529,81	2.558,14	2.584,99
Bandung	3.623,79	3.666,16	3.687,25	3.721,11	3.753,12
Garut	2.586,61	2.604,79	2.648,95	2.683,67	2.716,95
Tasikmalaya	1.865,20	1.883,73	1.892,22	1.907,05	1.920,92
Ciamis	1.229,07	1.237,73	1.243,32	1.251,54	1.259,23
Kuningan	1.167,69	1.180,39	1.189,01	1.201,76	1.213,93
Cirebon	2.270,62	2.290,97	2.331,36	2.360,44	2.387,96
Majalengka	1.305,48	1.318,97	1.328,01	1.340,44	1.352,54
Sumedang	1.152,51	1.159,35	1.168,84	1.178,24	1.187,13
Indramayu	1.834,43	1.851,38	1.873,40	1.894,33	1.914,04
Subang	1.595,32	1.608,59	1.635,56	1.649,82	1.663,16
Purwakarta	997,87	1.011,47	1.023,18	1.037,07	1.050,34
Karawang	2.439,09	2.468,58	2.496,19	2.526,00	2.554,38
Bekasi	3.113,02	3.157,96	3.193,84	3.237,42	3.273,87
Bandung Barat	1.788,34	1.814,23	1.834,23	1.859,64	1.884,19
Pangandaran	423,67	427,61	428,60	431,46	434,10
Kota Bogor	1.043,07	1.052,36	1.060,94	1.070,72	1.078,35
Kota Sukabumi	346,33	350,80	355,42	360,64	365,74
Kota Bandung	2.444,16	2.452,94	2.484,15	2.506,60	2.528,16
Kota Cirebon	333,30	336,86	338,94	341,98	344,85
Kota Bekasi	2.543,68	2.564,94	2.598,07	2.627,21	2.644,06
Kota Depok	2.056,34	2.085,94	2.113,62	2.145,40	2.163,64
Kota Cimahi	568,40	571,63	582,65	590,78	598,70
Kota Tasikmalaya	716,16	723,92	732,48	741,76	750,73
Kota Banjar	200,97	203,42	205,14	207,51	209,79
Provinsi Jawa Barat	48.274,16	48.782,40	49.306,78	49.860,33	50.345,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kepadatan penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2020 menunjukkan nilai tertinggi sebesar 1.346 jiwa/km² sebelum terjadi penurunan pada tahun 2022 sebanyak 1286,76 jiwa/km² yang kemudian kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 1.334,78 jiwa/km² tiap tahunnya.

Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 (Jiwa/km²)



Gambar II-57 Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024 (Jiwa/Km²)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kecamatan Karawang Timur menjadi penyumbang terbesar kepadatan penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2024 dengan kepadatan 5.482 jiwa/km², sementara Kecamatan Ciampel menjadi penyumbang terkecil dengan kepadatan 390 jiwa/km².

Tabel II-23 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Karawang per Kecamatan

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)					Kepadatan Penduduk Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pangkalan	99,66	38,41	41,27	41,9	42	43	428,91
Tegalwaru	52,14	37,63	39,45	40	40	41	780,82
Ciampel	117,1	44,1	44,59	45,14	45	46	390,98
Telukjambe Timur	47,21	135,91	134,48	135,36	135	136	2.875,41
Telukjambe Barat	70,92	54,96	56,11	56,88	57	58	815,68
Klari	73,65	181,11	200,02	204,79	208	212	2.884,77
Cikampek	36,34	115,37	120,77	122,22	123	124	3.409,18
Purwasari	32,15	75,93	81,78	83,75	85	87	2.704,07
Tirtamulya	46,52	49,6	50,62	51,29	52	52	1.119,98
Jatisari	55,34	78,57	81,48	82,48	83	84	1.511,40
Banyusari	55,46	55,43	56,78	57,39	58	58	1.046,41
Kotabaru	33,31	131,14	139,22	141,26	142	144	4.321,49
Cilamaya Wetan	78,17	78,28	80,96	81,58	82	82	1.048,87
Cilamaya Kulon	68,33	64,57	66,69	67,42	68	68	998,08
Lemahabang	53,44	64,71	66,8	67,44	68	68	1.273,32
Telagasari	105,7	68,18	69,71	70,71	71	72	681,25
Majalaya	33,54	64,56	76,51	80,43	84	88	2.622,90
Karawang Timur	30,37	146,33	155,74	159,8	163	167	5.482,01
Karawang Barat	39,52	161,55	165,72	166,86	167	167	4.236,79
Rawamerta	50,32	53,61	54,7	55,34	56	56	1.113,92
Tempuran	93,57	64,98	65,72	66,47	67	67	719,28
Kutawaluya	54,6	59,09	61,36	62,16	63	63	1.156,24
Rengasdengklok	37,68	109,72	117,27	118,62	119	120	3.187,62

Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Dalam Ribu Jiwa)					Kepadatan Penduduk Tahun 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jayakarta	43,5	65,56	68,08	68,93	69	70	1.608,03
Pedes	66,05	78,19	79,83	80,84	81	82	1.242,40
Cilebar	71,93	43,49	45,47	46,1	46	47	652,15
Cibuaya	118,22	52,05	53,88	54,43	55	55	465,12
Tirtajaya	105,4	70,17	70,83	71,76	72	73	691,71
Batujaya	75,19	77,97	81,56	82,23	82	83	1.100,82
Pakisjaya	68,38	39,89	41,19	41,68	42	42	617,61

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Laju pertumbuhan penduduk dihitung dengan membandingkan selisih antara jumlah penduduk pada tahun akhir dan tahun awal dengan selisih tahun tertentu untuk mendapat persentase pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2020-2024 memiliki nilai yang melebihi rata-rata yang ada, mengindikasikan jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang berkembang pesat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Barat.

Tabel II-24 Tabulasi Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kab/Kota 2021-2024 (Dalam Persen)

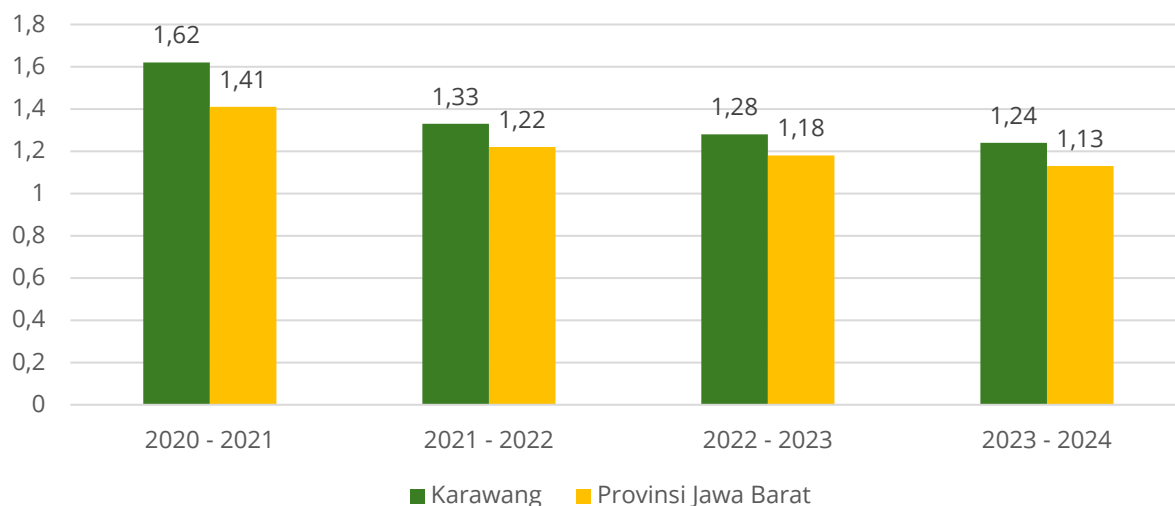
Kab/Kota	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
Bogor	1,54	1,35	1,32	1,23
Sukabumi	1,77	1,04	1,02	0,99
Cianjur	1,57	1,20	1,17	1,14
Bandung	1,56	1,00	0,97	0,94
Garut	0,99	1,39	1,36	1,33
Tasikmalaya	1,33	0,82	0,81	0,79
Ciamis	0,94	0,66	0,66	0,65
Kuningan	1,45	1,04	1,05	1,04
Cirebon	1,2	1,52	1,42	1,35
Majalengka	1,38	0,98	0,97	0,95
Sumedang	0,79	0,81	0,81	0,79
Indramayu	1,23	1,21	1,18	1,14
Subang	1,11	1,43	1,23	1,12
Purwakarta	1,82	1,44	1,41	1,38
Karawang	1,62	1,33	1,28	1,24
Bekasi	1,62	1,48	1,44	1,35
Bandung Barat	1,93	1,46	1,43	1,40
Pangandaran	1,24	0,66	0,67	0,65
Kota Bogor	1,19	0,98	0,96	0,89
Kota Sukabumi	1,73	1,49	1,48	1,46
Kota Bandung	0,48	0,93	0,92	0,91
Kota Cirebon	1,43	0,96	0,94	0,91
Kota Bekasi	1,43	1,22	0,94	1,04
Kota Depok	1,92	1,58	1,55	1,37
Kota Cimahi	0,76	1,42	1,41	1,39
Kota Tasikmalaya	1,45	1,3	1,29	1,27
Kota Banjar	1,62	1,18	1,17	1,15
Provinsi Jawa Barat	1,41	1,22	1,18	1,13

Kab/Kota	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024
Rata-Rata	1,28	1,10	1,07	1,03

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Posisi relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karawang terhadap Provinsi dan Nasional menunjukkan bagaimana LPP pada ketiga perbandingan ini cenderung menurun tiap tahunnya dengan posisi LPP Kabupaten Karawang yang berada di atas nilai Provinsi maupun Nasional. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan terkait pengendalian jumlah penduduk untuk memastikan pemerataan sumber daya dan pembangunan.

Tren Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 - 2024 (Dalam Persen)

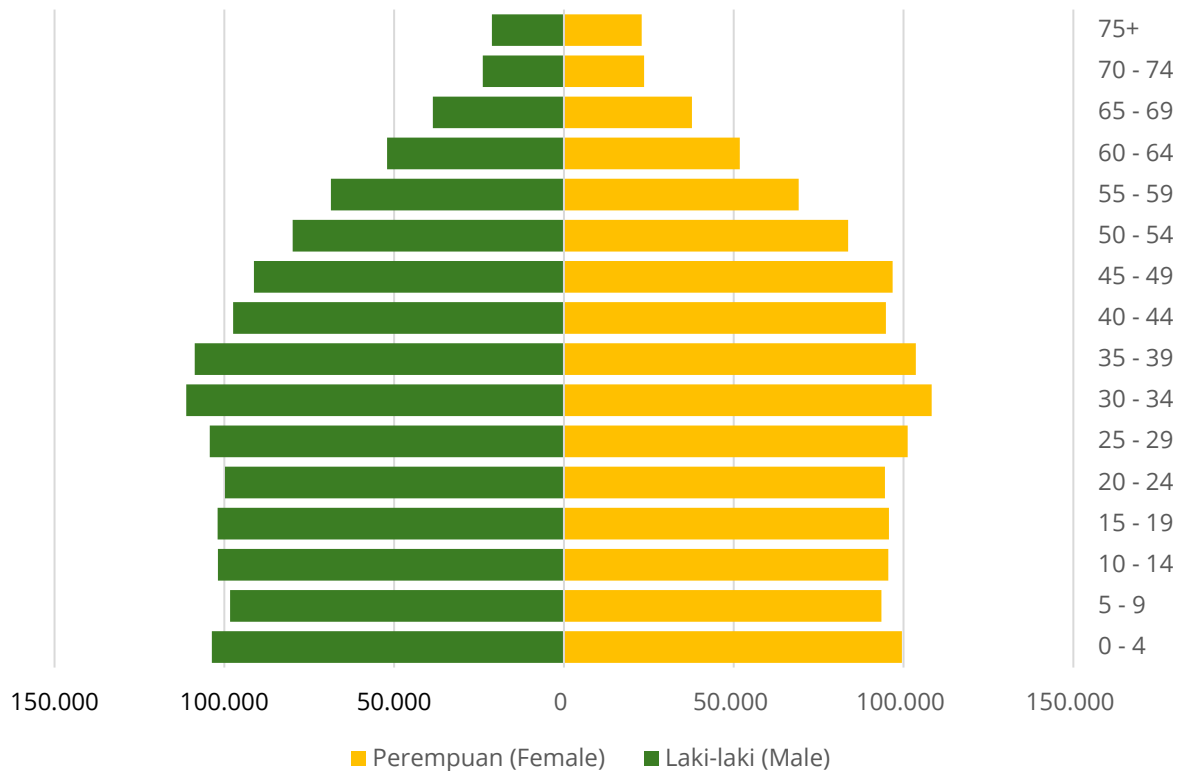


Gambar II-58 Posisi Relatif Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Hal lain yang menggambarkan karakteristik penduduk adalah komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah susunan atau pengelompokkan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini adalah berdasarkan usia dan jenis kelamin yang tergambarkan dari bentuk piramida penduduk berikut.

Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2024 (Jiwa)



Gambar II-59 Piramida Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2024 (Jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Piramida penduduk tersebut menunjukkan penduduk di Kabupaten Karawang termasuk jenis yang ekspansif ditandai dengan bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Bentuk piramida ini menunjukkan penduduk Kabupaten Karawang berada dalam keadaan bertumbuh di mana penduduk usia muda lebih besar. Kondisi ini sejalan dengan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Karawang yang tergolong cepat. Pertumbuhan penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) menandakan adanya potensi sumber daya manusia yang tersedia.

Berikut adalah tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan umur.

**Tabel II-25 Struktur Penduduk Berdasarkan Umur Kabupaten Karawang Tahun 2024
(Dalam Ribu Jiwa)**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	103,7	99,5	203,2
5 - 9	98,3	93,5	191,8
10 - 14	101,9	95,5	199,4
15 - 19	102,0	95,7	197,7
20 - 24	99,8	94,5	194,3
25 - 29	104,3	101,2	205,5
30 - 34	111,2	108,3	219,5
35 - 39	108,7	103,6	212,3
40 - 44	97,4	94,8	196,2
45 - 49	91,3	96,8	188,1

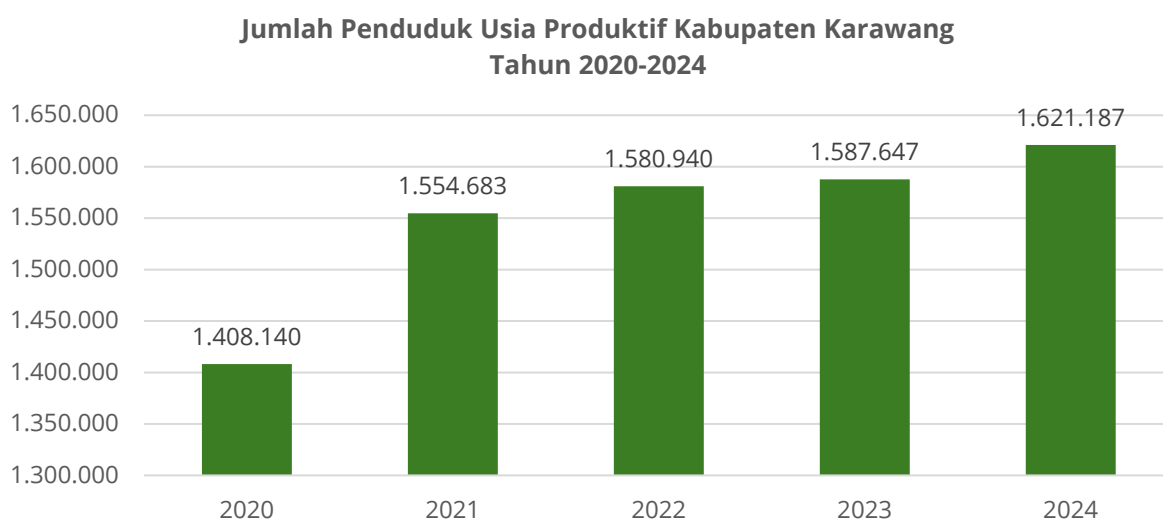
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
50 - 54	79,9	83,7	163,6
55 - 59	68,6	69,1	137,7
60 - 64	52,1	51,8	103,9
65 - 69	38,6	37,7	76,2
70 - 74	23,9	23,6	47,6
75+	21,2	22,9	44,1
Jumlah / Total	1.302,9	1.272,2	2.581,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan struktur penduduk jumlah penduduk yang berusia 16 – 18 Tahun berjumlah 197,7 Ribu Jiwa, jumlah ini menunjukkan potensi besar dalam jenjang pendidikan menengah atas serta awal masa produktif. Sementara itu untuk penduduk kurang dari 16 tahun berjumlah 594,4 Ribu Jiwa, yang menindikasikan beban tanggungan pendidikan dan pelayanan dasar masih tinggi, dan pentingnya perhatian pada pembangunan berbasis anak dan keluarga.

Dari kelompok produktif utama yaitu berumur 16-54 Tahun berjumlah kurang lebih 1,5 Juta Jiwa hal ini menggambarkan dukungan yang sangat kuat untuk struktur demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, asalkan hal ini difasilitasi oleh penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kualitas SDM.

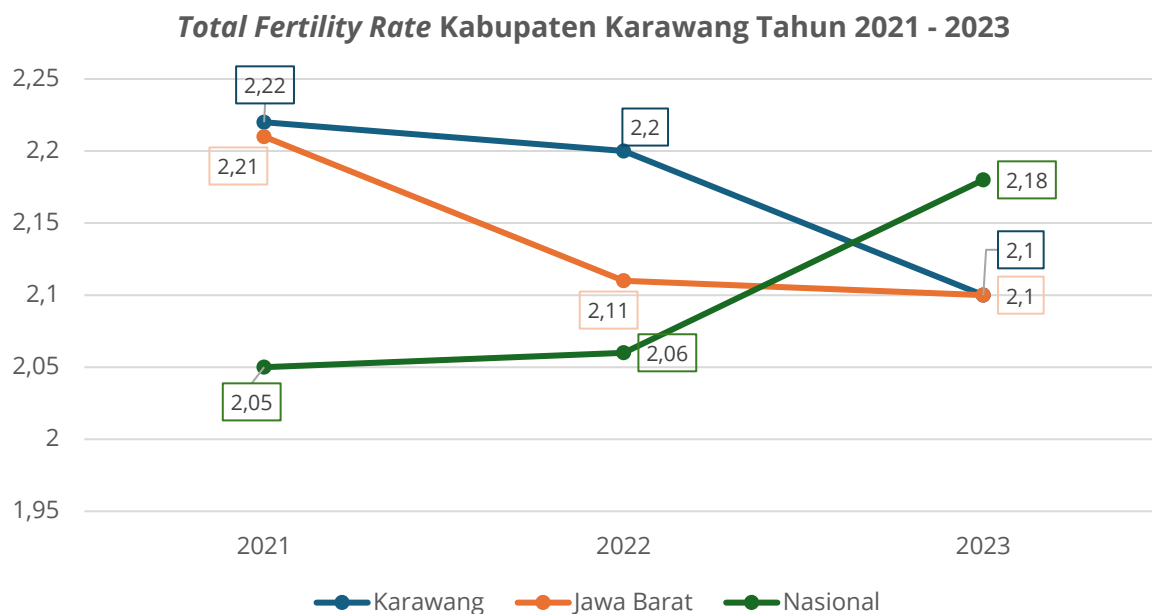
Sementara itu untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan, penyandang disabilitas pada umur 4 – 18 Tahun menurut Dispendukcapil Jawa Barat, pada Kabupaten Karawang mempunyai sekitar 753 Jiwa hal ini menandakan perlunya kebijakan yang inklusif serta layanan sosial yang lebih adaptif. Untuk jumlah penduduk perempuan pada usia 19 Tahun keatas berjumlah 888 Ribu Jiwa, menandakan peran strategis perempuan dalam sektor ekonomi, sosial, dan pembangunan keluarga yang signifikan.



Gambar II-60 Jumlah Penduduk Usia Produktif Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Total Fertility Rate (TFR) digunakan sebagai salah satu indikator demografi yang menghitung rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). Memiliki standar nasional 2,1 TFR menunjukkan asumsi terjadinya penurunan atau pertumbuhan penduduk suatu wilayah.



Gambar II-61 Total Fertility Rate Kabupaten Karawang Tahun 2021-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

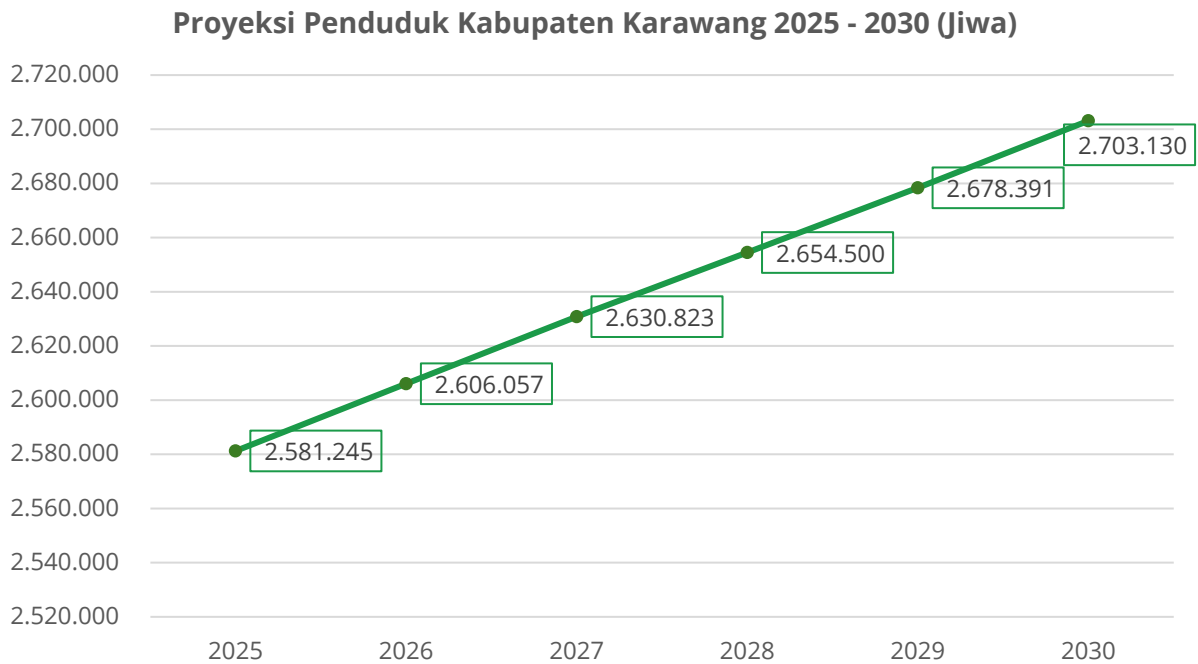
Grafik Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Karawang tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan angka fertilitas. Kabupaten Karawang mencatat penurunan dari 2,06 pada tahun 2023 menjadi 2,03 pada tahun 2024, di mana hal ini belum memenuhi standar nilai TFR nasional sebesar 2,1. Penurunan angka fertilitas di Karawang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan sosial-ekonomi hingga kesadaran masyarakat.

A. Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang

Proyeksi penduduk merupakan salah satu landasan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang. Data proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai jumlah dan karakteristik penduduk di masa mendatang, yang menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan, alokasi sumber daya, serta penentuan kebutuhan pelayanan publik. Dengan memahami proyeksi penduduk, diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang responsif, adil, dan berkelanjutan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Karawang secara keseluruhan.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Karawang adalah 2.439.085 jiwa, dengan 1.236.052 laki-laki dan 1.203.033 perempuan, kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 2.554.384 jiwa. Tren positif dalam

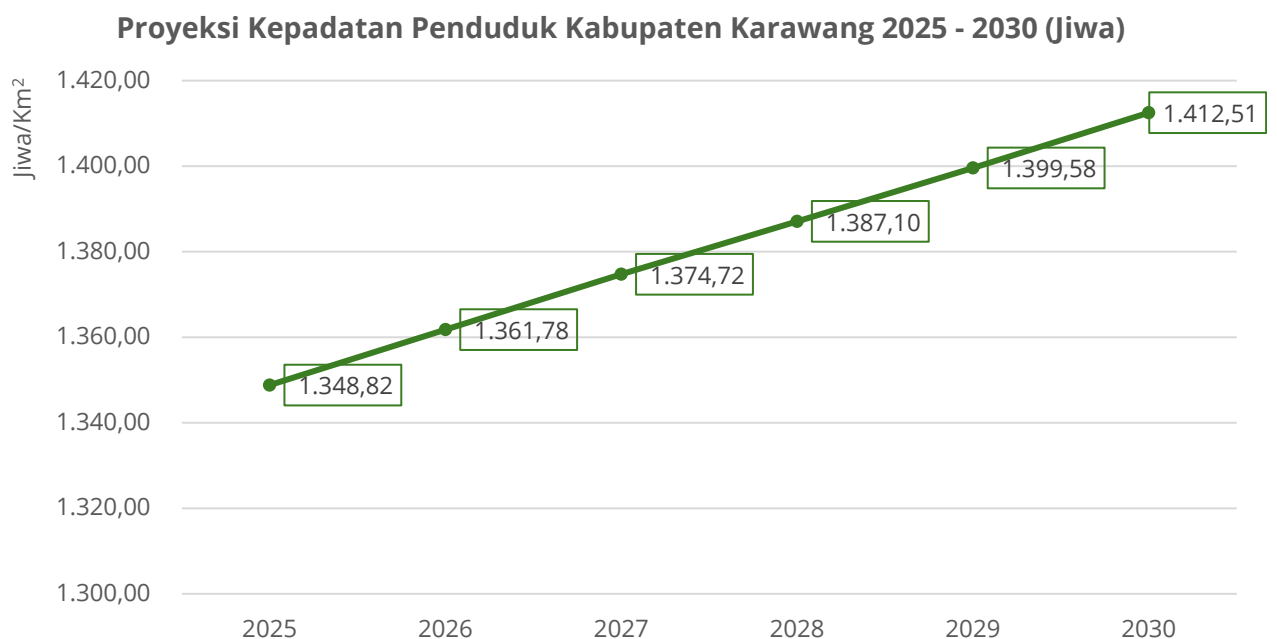
peningkatan penduduk, sehingga dapat diproyeksikan peningkatan penduduk pada perkembangan penduduk Karawang dari tahun ke tahun.



Gambar II-62 Proyeksi Penduduk Kabupaten Karawang 2025 – 2030 (Jiwa)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Karawang telah menyentuh angka 2.554.380 jiwa dan diproyeksikan terus mengalami peningkatan selama 5 tahun kedepan.



Gambar II-63 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Karawang 2025 – 2030

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang pada periode 2025 hingga 2030, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten. Jumlah penduduk meningkat dari 2.581.245 jiwa di tahun 2025 menjadi 2.703.130 jiwa di tahun 2030, sementara kepadatan penduduk juga naik dari 1.348,82 jiwa/km² menjadi 1.412,51 jiwa/km². Hal ini mencerminkan pertumbuhan populasi yang berkelanjutan dan potensi tekanan yang lebih besar terhadap lahan, infrastruktur, dan layanan publik di masa mendatang. Kenaikan kepadatan penduduk menuntut perencanaan yang cermat agar fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, dan perumahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan penguatan kapasitas pelayanan publik, untuk mendukung kualitas hidup penduduk dan menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah laju urbanisasi yang terus berkembang.

Tabel II-26 Komponen Hasil Proyeksi Kependudukan Kabupaten Karawang 2025 - 2045

Komponen	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penduduk						
Laki Laki (Ribuan Jiwa)	1.295,78	1.308,24	1.332,56	1.332,56	1.344,55	1.356,97
Perempuan (Ribuan Jiwa)	1.285,46	1.297,82	1.321,94	1.333,84	1.333,84	1.346,16
Total (Ribuan Jiwa)	2.581,25	2.606,06	2.630,82	2.654,50	2.678,39	2.703,13
Sex Ratio (%)	101%	101%	101%	101%	101%	101%
Komposisi Umur						
0 - 14	607.656	613.498	619.329	624.903	630.528	636.352
15 - 64	1.825.571	1.843.118	1.860.633	1.877.381	1.894.277	1.911.773
65+	148.018	149.441	150.861	152.216	153.587	155.005

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Proyeksi penduduk Kabupaten Karawang tahun 2025–2030 menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dari 2.581.245 jiwa pada 2025 menjadi 2.703.130 jiwa pada 2030, dengan rata-rata peningkatan sekitar 0,93% per tahun. Komposisi jenis kelamin relatif seimbang dengan sex ratio 101%, menunjukkan jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dari perempuan. Secara umur, penduduk usia produktif (15–64 tahun) mendominasi lebih dari 70% total populasi, menandakan potensi bonus demografi yang besar. Sementara itu, penduduk anak-anak (0–14 tahun) tetap stabil di sekitar 24%, mencerminkan keberlanjutan regenerasi penduduk. Jumlah lansia (65+ tahun) perlahan meningkat dari 148 ribu menjadi 155 ribu, menandakan awal transisi menuju masyarakat menua yang perlu diantisipasi sejak dini dalam perencanaan layanan sosial dan kesehatan. Struktur demografi ini secara keseluruhan menggambarkan kondisi yang sehat dan berpotensi besar untuk dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi daerah.

Proyeksi Struktur Kependudukan merupakan estimasi bagaimana komposisi kependudukan suatu daerah mengalami perubahan berdasarkan tren kondisi

kependudukan saat ini. Berikut adalah proyeksi struktur penduduk di Kabupaten Karawang periode tahun 2025 – 2029.

Tabel II-27 Hasil Proyeksi Kependudukan Kabupaten Karawang berdasarkan Struktur Umur 2025 - 2029

Kelompok Umur	Proyeksi Penduduk					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-4	199.955	201.878	203.797	205.632	207.483	209.400
5-9	202.552	204.499	206.443	208.300	210.175	212.116
10-14	205.149	207.121	209.089	210.971	212.870	214.836
15-19	202.593	204.519	206.460	208.319	210.192	212.116
20-24	202.552	204.499	206.443	208.301	210.175	212.136
25-29	212.900	214.987	217.030	218.983	220.954	222.995
30-34	223.326	225.453	227.614	229.662	231.728	233.867
35-39	210.345	212.365	214.382	216.313	218.260	220.256
40-44	197.359	199.258	201.154	202.967	204.795	206.689
45-49	184.375	186.148	187.901	189.591	191.299	193.085
50-54	166.197	167.794	169.387	170.911	172.448	174.040
55-59	129.842	131.089	132.334	133.524	134.726	135.969
60-64	96.082	97.006	97.928	98.810	99.699	100.620
65-69	64.920	65.544	66.167	66.761	67.362	67.984
70-74	44.146	44.570	44.994	45.398	45.807	46.230
75+	38.952	39.327	39.700	40.057	40.418	40.791
Total	2.581.245	2.606.057	2.630.823	2.654.500	2.678.391	2.703.130

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kabupaten Karawang tahun 2025–2029, terlihat adanya pertumbuhan penduduk yang stabil dari 2.579.163 jiwa pada 2025 menjadi 2.696.667 jiwa pada 2029. Struktur umur menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi, yang berarti potensi ekonomi daerah ini masih cukup besar.

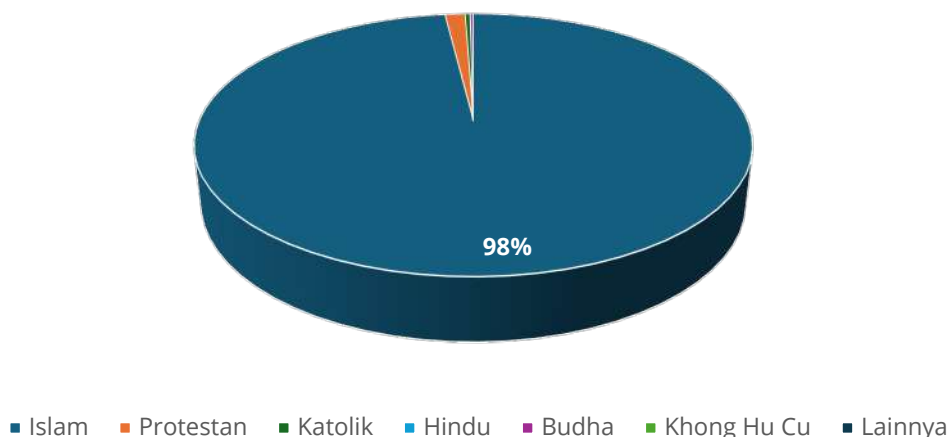
Kelompok umur 15–64 tahun mencakup hampir 65–70% dari total populasi, yang merupakan modal kerja dan pasar konsumsi yang potensial. Di sisi lain, kelompok anak-anak (0–14 tahun) dan lansia (65+ tahun) juga menunjukkan tren kenaikan, meskipun lebih lambat dibandingkan kelompok produktif. Peningkatan proporsi lansia ini merupakan tanda awal terjadinya penuaan penduduk (aging population) yang harus diantisipasi melalui kebijakan kesehatan dan perlindungan sosial yang lebih kuat. Secara keseluruhan, proyeksi ini mengindikasikan bonus demografi yang masih bisa dimanfaatkan pada periode ini, tetapi juga sinyal bahwa ke depannya akan terjadi peningkatan rasio ketergantungan, terutama dari kelompok lansia

B. Kebudayaan Lokal

Mayoritas penduduk di Kabupaten Karawang adalah Sunda, dengan minoritas suku Jawa, Betawi, dan lainnya. Bahasa Sunda sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak memungkiri juga terdapat bahasa lainnya tapi sifatnya minoritas. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan pengantar dalam urusan formal. Dari sisi Agama

didominasi oleh penduduk Islam, dan terdapat juga keagamaan lainnya seperti Protestan, Katolik, Hindu Budha, Khong Hu Cu, dan Pemeluk Agama lainnya.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2024



Gambar II-64 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Karawang Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Selain itu, di Kabupaten Karawang memiliki kampung adat yang menjadi pusat kearifan lokal dan kebudayaan Sunda, yaitu Kampung Salapan di Kecamatan Banyusari. Kampung Salapan terletak di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Kampung ini terkenal karena hanya dihuni oleh sembilan kepala keluarga, jumlah yang dianggap sakral dan tidak boleh melebihi itu. Jika salah satu keluarga pergi, maka segera digantikan oleh keluarga baru yang berkomitmen mempertahankan tradisi ini. Masyarakat Kampung Salapan memiliki beberapa tradisi spiritual, seperti upacara Ngabungbang yang dilakukan setiap malam Sabtu dan Nyalin yang digelar saat panen padi. Tradisi ini menjadi simbol kelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan masyarakat dari kacamata ekonomi diukur dari beberapa indikator keekonomian di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, dan indeks pembangunan manusia.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

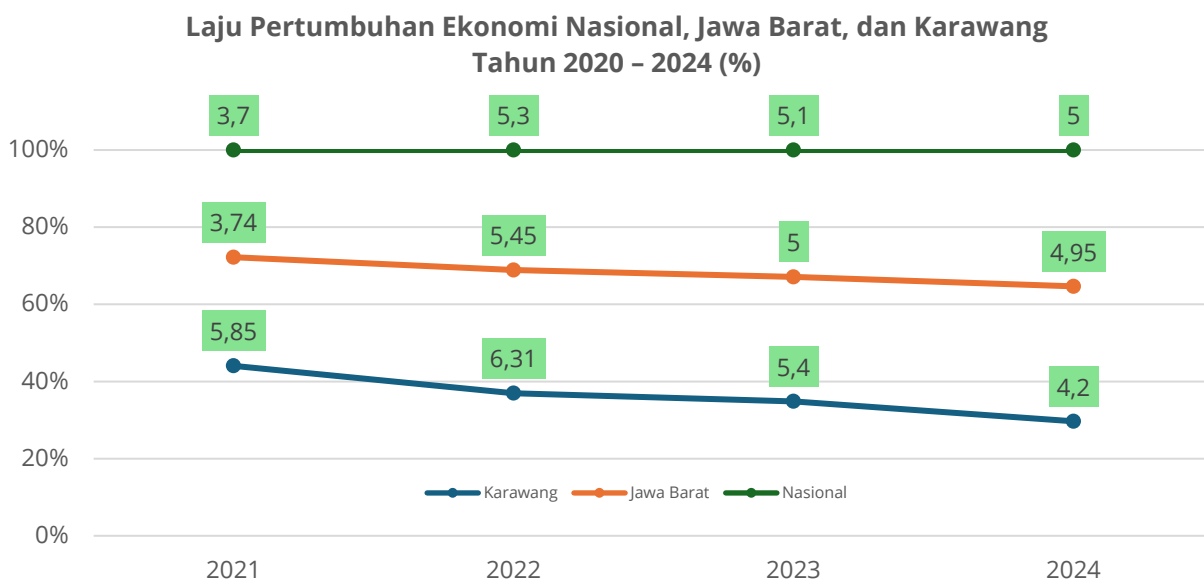
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuatif, pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang sejalan dengan pola pertumbuhan ekonomi Nasional dan Jawa Barat. Pada tahun 2020, kondisi perekonomian global termasuk Indonesia mengalami penurunan yang signifikan akibat bencana pandemi Covid-19. Perekonomian yang melambat mulai mengalami

perbaikan dan stabil dimulai pada 2021. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang, Provinsi dan Nasional sebagai berikut.

Tabel II-28 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional

Tahun	Karawang	Jawa Barat	Nasional
2021	5,85	3,74	3,7
2022	6,31	5,45	5,3
2023	5,4	5	5,1
2024	4,2	4,95	5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar II-65 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 – 2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang melambat menjadi 4,2%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,4%. Dari sisi lapangan usaha, hal ini disebabkan karena menurunnya kinerja sektor Industri Pengolahan yang menjadi penampang utama dari perekonomian Kabupaten Karawang. Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurunnya Konsumsi Pemerintah serta Net Ekspor Barang dan Jasa.

B. PDRB ADHK dan ADHB di Kabupaten Karawang

Produk Domestik regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Karawang pada rentang 2020 – 2024 sebagai berikut.

Tabel II-29 PDRB ADHK Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

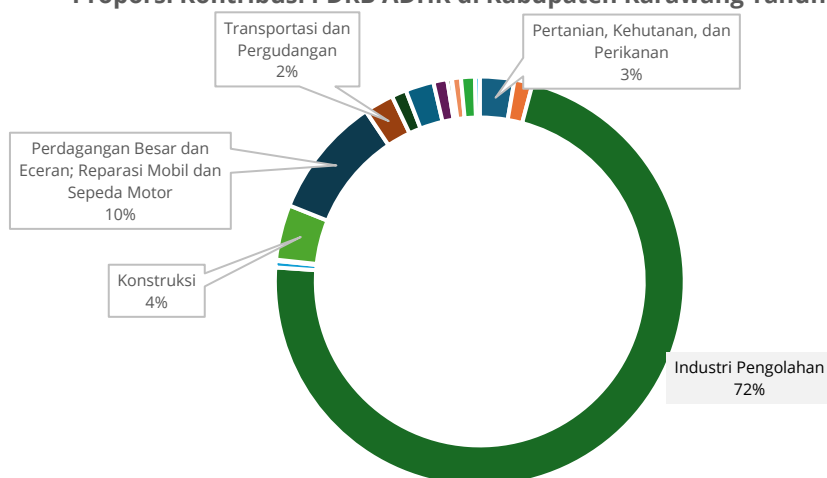
Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rata-rata
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.937,17	5.051,87	5.166,51	5.156	5.244,65	25.556,66	5.111,33
B	Pertambangan dan Penggalian	3.228,52	3.023,30	2.946,01	2.923,14	2.772,64	14.893,61	2.978,72
C	Industri Pengolahan	111.073,03	118.943,08	127.898,89	134.737,45	138.664,96	631.317,41	126.263,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	964,73	1.031,53	1.095,05	1.091,39	984,96	5.167,66	1.033,53

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Total	Rata-rata
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	130,86	148,78	152,52	164,45	182,08	778,69	155,74
F	Konstruksi	6.615,77	6.995,47	6.962,60	7.445,65	8.377,08	36.396,57	7.279,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.413,07	15.958,60	16.639,75	17.530,73	18.436,62	83.978,77	16.795,75
H	Transportasi dan Pergudangan	3.052,52	3.101,20	3.347,75	3.733,60	4.519,10	17.754,17	3.550,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.732,26	1.759,24	1.877,26	2.105,34	2.252,01	9.726,11	1.945,22
J	Informasi dan Komunikasi	3.158,18	3.359,85	3.531,70	3.813,26	4.307,66	18.170,65	3.634,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.851,43	1.937,31	1.930,73	2.008,98	2.105,88	9.834,33	1.966,87
L	Real Estate	485,04	534,48	579,23	636,12	653,40	2.888,27	577,65
M,N	Jasa Perusahaan	51,36	55,05	59,69	64,78	68,35	299,23	59,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.301,28	1.271,69	1.256,21	1.320,94	1.361,12	6.511,24	1.302,25
P	Jasa Pendidikan	1.713,82	1.726,71	1.802,50	1.921,27	2.117,41	9.281,71	1.856,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	506,95	540,89	576,68	621,51	710,37	2.956,40	591,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.494,59	1.502,44	1.647,81	1.776,59	2.144,81	8.566,24	1.713,25
Total		157.710,58	166.941,49	177.470,89	187.051,66	194.903,10	884.077,72	176.815,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Besar kontribusi sektor dalam total PDRB ADHK sebagai berikut.

Proporsi Kontribusi PDRB ADHK di Kabupaten Karawang Tahun 2024

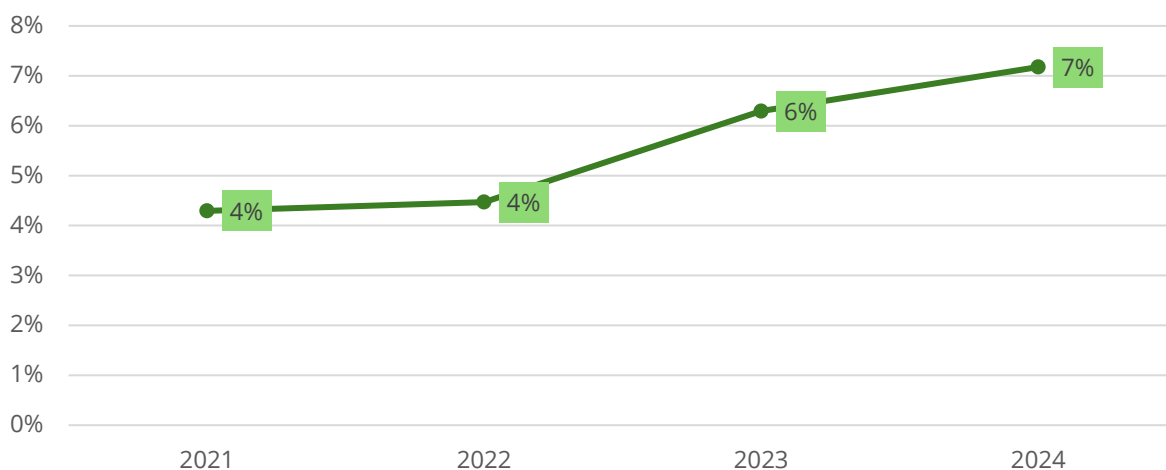


Gambar II-66 Proporsi Kontribusi PDRB ADHK di Kabupaten Karawang Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Menurut data PDRB ADHK menunjukkan bahwa sektor kontributor terbesar dan secara berurutan adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta transportasi. Sektor-sektor tersebut menunjukkan dominasi sektor riil karena volume produksinya yang mencerminkan kekuatan sektor secara nyata di ekonomi Kabupaten Karawang. Namun, rata-rata pertumbuhan per tahun pada 2021 – 2024 menunjukkan sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih di bawah sektor-sektor lainnya. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan per tahun yang tinggi dan dapat menjadi sektor potensial adalah sektor transportasi dan pergudangan (11%), sektor jasa lainnya (10%), sektor jasa kesehatan dan sosial lainnya (9%), sektor real estate (8%), sektor informasi dan komunikasi (8%).

**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Karawang
Tahun 2021 - 2024**



Gambar II-67 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata pertumbuhan per tahun cenderung positif dalam rentang 2021 – 2024, akan tetapi pertumbuhan tiap tahun memperlihatkan sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan menurun dan fluktuatif di antaranya sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pengadaan listrik dan gas.

Sebagaimana pada proporsi kontribusi PDRB ADHK diketahui sektor industri pengolahan berkontribusi paling besar bagi PDRB ADHK Kabupaten Karawang namun secara pertumbuhan mengalami penurunan di 2024.

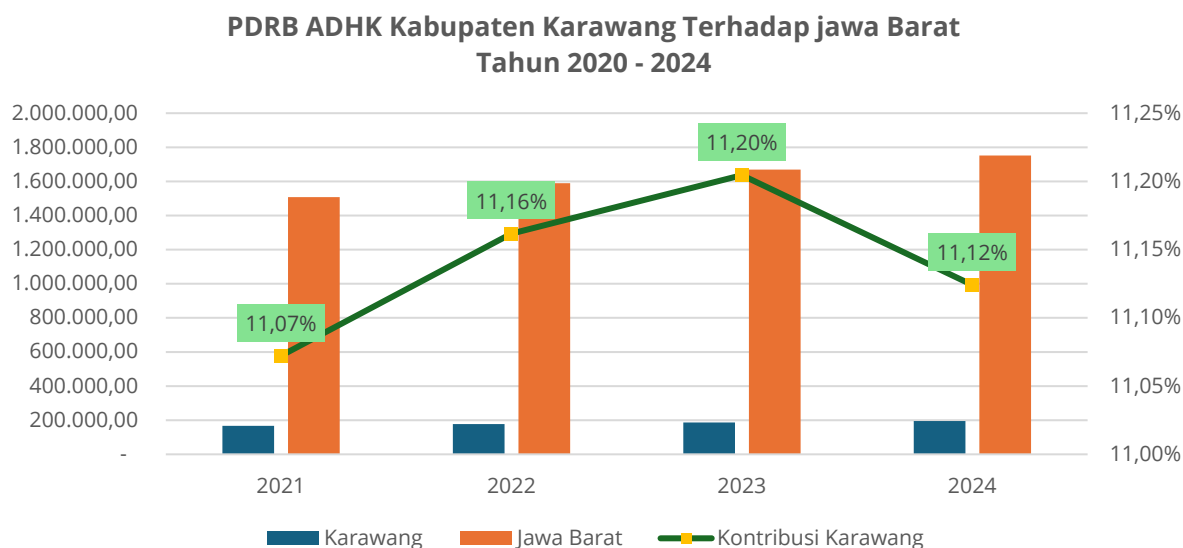
Tabel II-30 Pertumbuhan PDRB ADHK 2020 – 2024

Uraian	2020 - 2021	2021 -2022	2022 - 2023	2023 -2024	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2%	2%	0%	2%	2%
Pertambangan dan Penggalian	-6%	-3%	-1%	-5%	-4%
Industri Pengolahan	7%	8%	5%	3%	6%
Pengadaan Listrik dan Gas	7%	6%	0%	-10%	1%

Uraian	2020 - 2021	2021 -2022	2022 - 2023	2023 -2024	Rata-rata
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14%	3%	8%	11%	9%
Konstruksi	6%	0%	7%	13%	6%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4%	4%	5%	5%	5%
Transportasi dan Pergudangan	2%	8%	12%	21%	11%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2%	7%	12%	7%	7%
Informasi dan Komunikasi	6%	5%	8%	13%	8%
Jasa Keuangan dan Asuransi	5%	0%	4%	5%	3%
Real Estate	10%	8%	10%	3%	8%
Jasa Perusahaan	7%	8%	9%	6%	7%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2%	-1%	5%	3%	1%
Jasa Pendidikan	1%	4%	7%	10%	5%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7%	7%	8%	14%	9%
Jasa lainnya	1%	10%	8%	21%	10%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kontribusi PDRB ADHK Kabupaten Karawang terhadap perolehan ADHK Provinsi Jawa Barat berada pada rentang 11% tiap tahun pada 2021 – 2024 dan cenderung meningkat setiap tahunnya menunjukkan produksi riil Kabupaten Karawang terus bertumbuh setiap tahunnya.



Gambar II-68 PDRB ADHK Kabupaten Karawang Terhadap Jawa Barat Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perolehan terbesar PDRB ADHB Kabupaten Karawang berasal dari sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan jumlah per tahun serta total sebagai berikut.

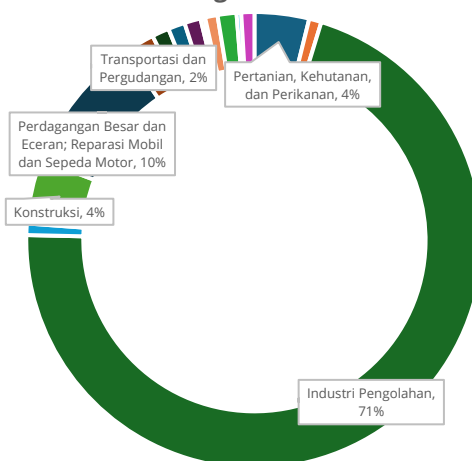
Tabel II-31 PDRB ADHB Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Miliar Rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.773,51	9.605,73	10.103,35	10.926	11.216,13
B	Pertambangan dan Penggalian	2.267,57	2.315,59	2.563,92	2.271,97	2.235,36
C	Industri Pengolahan	155.923,03	172.568,73	191.460,51	206.317,68	216.605,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.923,32	2.052,37	2.272,25	2.315,73	2.260,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	208,85	238,77	250,61	273,79	310,04
F	Konstruksi	9.619,08	10.865,36	11.495,91	12.922,44	14.774,43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.106,34	23.718,93	25.777,24	28.513,11	30.407,04
H	Transportasi dan Pergudangan	4.559,52	4.669,45	5.087,95	6.035,11	7.997,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.537,02	2.771,94	3.113,36	3.692,79	4.103,89
J	Informasi dan Komunikasi	3.022,46	2.910,42	3.016,53	3.259,83	3.755,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.733,35	2.959,88	3.281,10	3.552,72	3.805,50
L	Real Estate	575,67	677,96	761,59	888,63	955,07
M,N	Jasa Perusahaan	83,48	92,58	107,69	1.209,91	145,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.268,31	2.244,27	2.270,08	2.428,13	2.586,66
P	Jasa Pendidikan	3.010,85	3.153,39	3.448,39	3.812,59	4.431,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	730,55	780,34	842,87	929,68	1.086,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.079,16	2.087,62	2.375,44	2.654,78	3.166,72
Total		222.422,07	243.713,33	268.228,79	292.005,33	309.842,87

Sumber: BPS

Dari total perolehan **PDRB ADHB** rentang 2020 – 2024 di Kabupaten Karawang sektor terbesar yang berkontribusi di dalamnya adalah **industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan** yang secara proporsional juga diisi oleh beberapa sektor lainnya sebagai berikut.

Proporsi Kontribusi PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2024

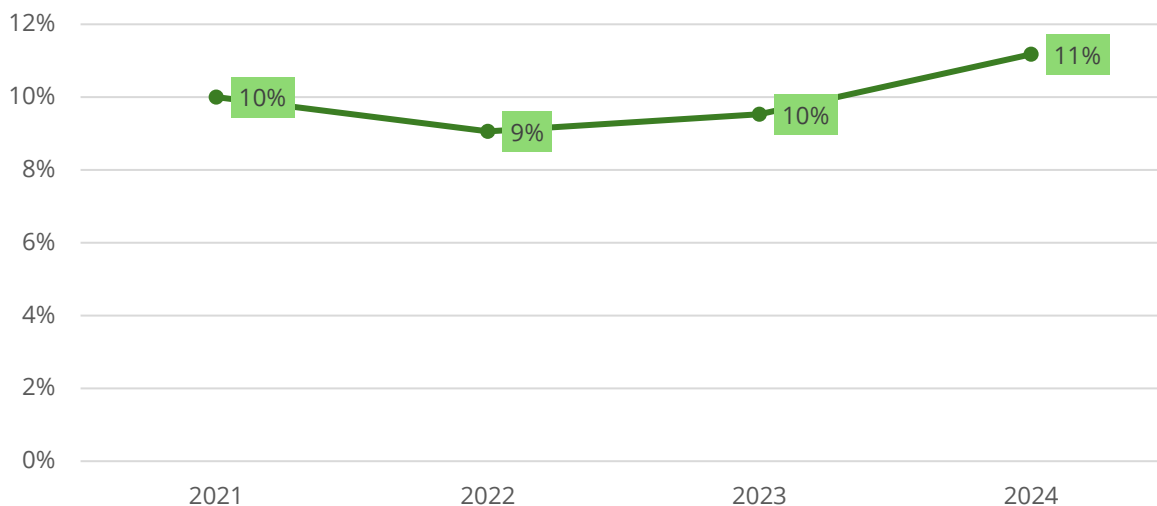


Gambar II-69 Proporsi Kontribusi PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata pertumbuhan per tahun sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih di bawah sektor-sektor lainnya. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan per tahun yang tinggi yang dapat menjadi **sektor potensial adalah sektor jasa keuangan dan asuransi (24%), sektor transportasi dan pergudangan (16%), sektor jasa perusahaan (15%), dan sektor real estate (14%).**

Laju Pertumbuhan PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024



Gambar II-70 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sempat melemah di tahun 2020 karena efek pandemi covid-16, perekonomian yang melambat mulai kembali stabil. Rata-rata pertumbuhan per tahun cenderung positif dalam rentang 2021 - 2024, akan tetapi pertumbuhan tiap

tahun memperlihatkan sektor yang memiliki kecenderungan pertumbuhan menurun dan fluktuatif di antaranya:

1. sektor pertambangan dan penggalian
2. sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang
3. sektor jasa keuangan dan asuransi
4. sektor *real estate*

Sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi paling besar bagi PDRB ADHB Kabupaten Karawang namun secara pertumbuhan mengalami penurunan di 2024.

Tabel II-32 Pertumbuhan PDRB ADHB 2020 – 2024

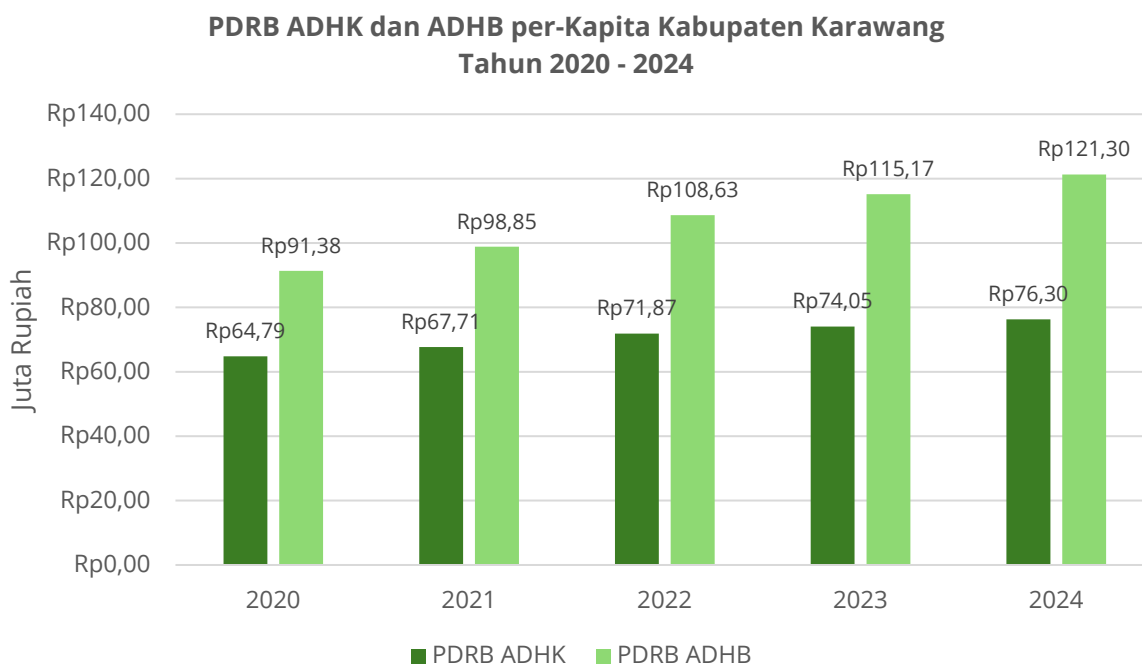
Uraian	2020 - 2021	2021 - 2022	2022 - 2023	2023 - 2024	Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-2%	5%	8%	3%	4%
Pertambangan dan Penggalian	2%	11%	-11%	-2%	0%
Industri Pengolahan	11%	11%	8%	5%	9%
Pengadaan Listrik dan Gas	7%	11%	2%	-2%	4%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14%	5%	9%	13%	10%
Konstruksi	13%	6%	12%	14%	11%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7%	9%	11%	7%	8%
Transportasi dan Pergudangan	2%	9%	19%	33%	16%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9%	12%	19%	11%	13%
Informasi dan Komunikasi	-4%	4%	8%	15%	6%
Jasa Keuangan dan Asuransi	71%	11%	8%	7%	24%
Real Estate	18%	12%	17%	7%	14%
Jasa Perusahaan	11%	16%	12%	20%	15%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1%	1%	7%	7%	3%
Jasa Pendidikan	5%	9%	11%	16%	10%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7%	8%	10%	17%	10%
Jasa lainnya	0%	14%	12%	19%	11%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Industri pengolahan tumbuh progresif di Kabupaten Karawang yang tercermin dari kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Karawang, namun potensi SDM masih di taraf **kurang akibat pendidikan dan keterampilan**. Secara pendidikan, **dominasi pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Karawang adalah SMA/SMK** namun jumlah **pengangguran paling besar juga pada kelompok lulusan SMA/SMK**. Di tahun 2024, angkatan kerja lulusan SMA/SMK sebesar 536.413, sedangkan perguruan tinggi hanya sebesar 104.188 jiwa setara dengan 19% dari jumlah lulusan SMA/SMK. Permasalahan ini berimplikasi pada **ketidakterisian profesional di bidang industri** dari putra daerah sendiri.

Bidang yang berkontribusi dalam pergerakan ekonomi di Kabupaten Karawang dalam dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB yakni perkalian dari

harga barang yang diproduksi dengan jumlah barang yang dihasilkan pada periode yang sama. PDRB terdiri atas dua jenis, yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun dan dapat **digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi**. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku di tahun tertentu sebagai dasar dan dapat **digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun**.



Gambar II-71 PDRB ADHK dan ADHB per-Kapita Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

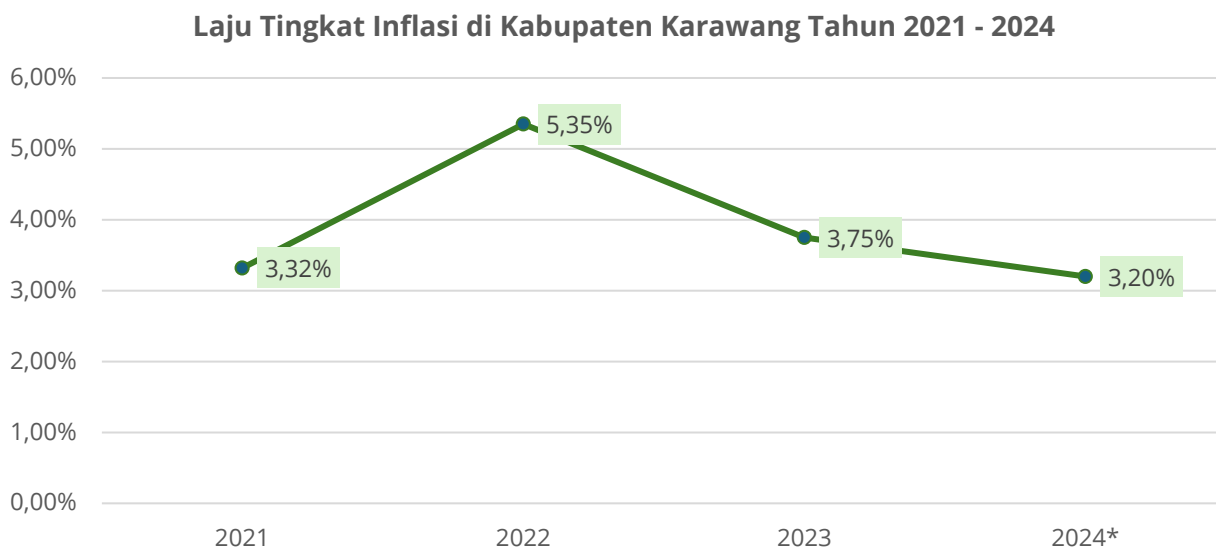
Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan positif pada PDRB per kapita Kabupaten Karawang selama periode 2020–2024, dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp91,38 juta pada 2020 menjadi Rp121,30 juta pada 2024, sementara PDRB ADHK tumbuh dari Rp64,79 juta menjadi Rp76,30 juta pada periode yang sama. Kenaikan PDRB ADHK menandakan pertumbuhan ekonomi riil yang kuat, sedangkan kenaikan PDRB ADHB yang lebih tinggi mencerminkan adanya inflasi dan ekspansi nominal dalam perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang tidak hanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang konsisten, tetapi juga menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk dan aktivitas sektor produktif, meskipun tetap perlu diimbangi dengan pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

C. Laju Inflasi

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menjaga harga agar tetap stabil, dalam pada Kab Karawang dibentuk tim khusus yaitu Tim Pengendali Inflasi Daerah

(TPID), dalam hal ini, laju inflasi di Kabupaten Karawang dijaga di sekitar angka 3,94% (TPID Kabupaten Karawang, 2025). Berikut adalah data tingkat inflasi Kab Karawang.

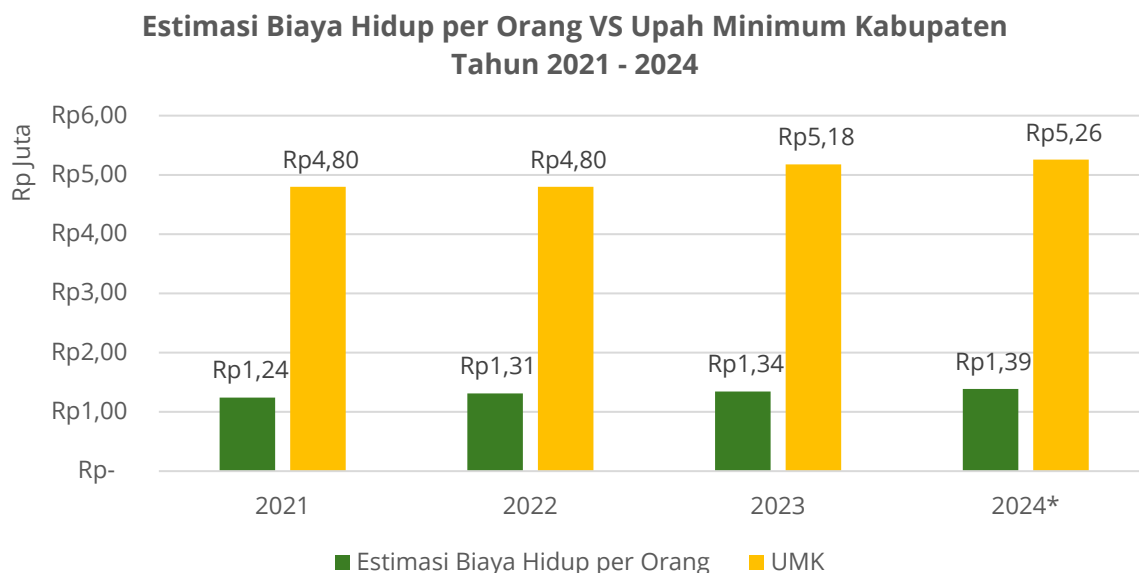


*Asumsi BI Rate

Gambar II-72 Laju Tingkat Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Jika diketahui biaya hidup per orang oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2021 adalah Rp 1.242.403,-, maka dapat dibandingkan dengan tingkat pendapatan berdasarkan UMR, berdasarkan inflasi tersebut maka didapatkan estimasi peningkatan biaya hidup sebesar.



Gambar II-73 Estimasi Biaya Hidup per Orang VS Upah Minimum Kabupaten Tahun 2021 - 2024

Sumber: Susenas diolah, 2025

Berdasarkan estimasi biaya hidup dari tahun 2021 - 2024 diestimasi mengalami peningkatan sebesar 4%, dengan memperhitungkan tingkat inflasi dari tahun 2021 - 2024.

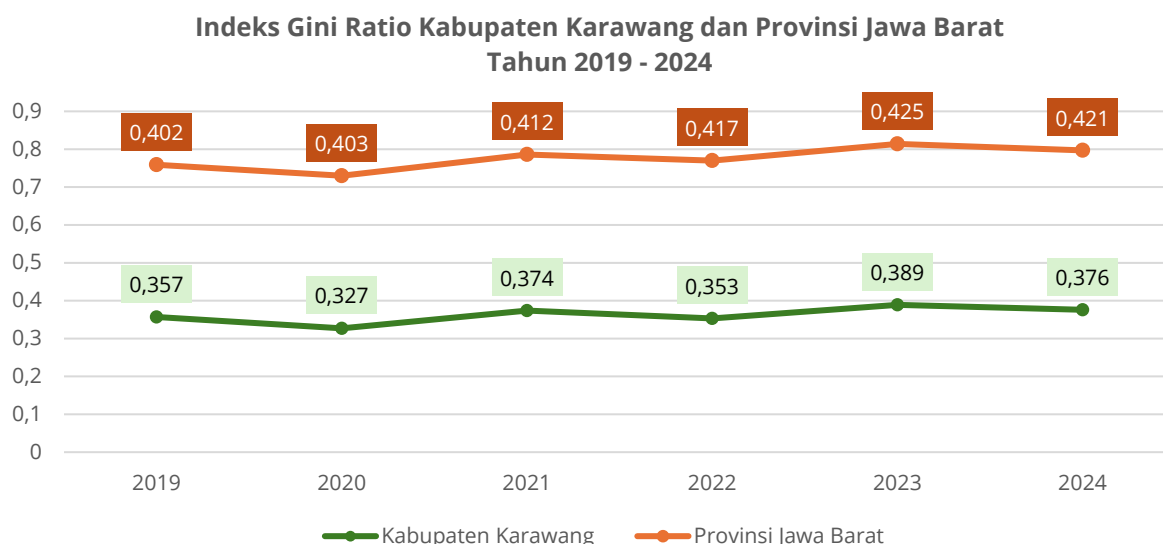
D. Gini Rasio

Gini Rasio merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Di Kabupaten Karawang, Gini Rasio menjadi salah satu tolok ukur utama dalam memantau kesenjangan ekonomi dan efektivitas program pembangunan, yang secara langsung berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gini ratio di kabupaten/kota lingkungan Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel II-33 Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2019 - 2024

Kab/Kota	Gini Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bogor	0,404	0,381	0,396	0,4	0,369	0,398
Kabupaten Sukabumi	0,347	0,334	0,343	0,309	0,355	0,342
Kabupaten Cianjur	0,363	0,35	0,372	0,313	0,319	0,338
Kabupaten Bandung	0,355	0,414	0,386	0,37	0,348	0,364
Kabupaten Garut	0,352	0,352	0,322	0,302	0,361	0,324
Kabupaten Tasikmalaya	0,322	0,343	0,378	0,378	0,404	0,363
Kabupaten Ciamis	0,354	0,336	0,342	0,337	0,341	0,326
Kabupaten Kuningan	0,435	0,361	0,349	0,345	0,351	0,369
Kabupaten Cirebon	0,344	0,338	0,339	0,355	0,361	0,374
Kabupaten Majalengka	0,347	0,336	0,354	0,367	0,342	0,354
Kabupaten Sumedang	0,344	0,384	0,359	0,394	0,366	0,337
Kabupaten Indramayu	0,284	0,319	0,321	0,3	0,344	0,306
Kabupaten Subang	0,333	0,35	0,329	0,36	0,331	0,32
Kabupaten Purwakarta	0,399	0,414	0,388	0,367	0,372	0,398
Kabupaten Karawang	0,357	0,327	0,374	0,353	0,389	0,376
Kabupaten Bekasi	0,354	0,372	0,34	0,373	0,397	0,367
Kabupaten Bandung Barat	0,362	0,376	0,356	0,368	0,374	0,4
Kabupaten Pangandaran	0,31	0,335	0,32	0,294	0,323	0,286
Kota Bogor	0,386	0,412	0,441	0,43	0,464	0,477
Kota Sukabumi	0,419	0,397	0,436	0,482	0,458	0,436
Kota Bandung	0,442	0,402	0,427	0,459	0,459	0,44
Kota Cirebon	0,408	0,421	0,489	0,468	0,468	0,424
Kota Bekasi	0,352	0,352	0,401	0,441	0,414	0,435
Kota Depok	0,344	0,344	0,367	0,394	0,402	0,398
Kota Cimahi	0,437	0,38	0,415	0,408	0,394	0,402
Kota Tasikmalaya	0,36	0,366	0,414	0,405	0,428	0,359
Kota Banjar	0,302	0,312	0,341	0,362	0,337	0,318
Provinsi Jawa Barat	0,402	0,403	0,412	0,417	0,425	0,421

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



Gambar II-74 Indeks Gini Rasio Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 - 2024

Sumber: BPS diolah, 2025

Gini Rasio Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dalam enam tahun terakhir, meskipun sedikit mengalami penurunan dan kenaikan. Di Kabupaten Karawang, Gini Rasio tercatat sebesar 0,357 pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 0,327 pada 2020, yang menandakan adanya perbaikan tingkat ketimpangan. Namun, pada tahun 2021, Gini Rasio kembali naik menjadi 0,374, kemudian turun lagi di 2022 menjadi 0,353, dan naik tipis di 2023 menjadi 0,389. Pada tahun 2024, angkanya turun menjadi 0,376, yang masih lebih rendah dari angka tahun 2021.

Sementara di tingkat Provinsi Jawa Barat, Gini Rasio berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Karawang. Pada tahun 2019, tercatat 0,402 dan cenderung mengalami kenaikan stabil hingga mencapai 0,421 pada tahun 2024. Angka Gini Rasio di atas 0,4 ini menunjukkan ketimpangan yang relatif tinggi, meskipun masih berada pada ambang wajar menurut standar internasional.

Gini Rasio sendiri merupakan indikator ketimpangan pendapatan, di mana nilai 0 menandakan pemerataan sempurna (tidak ada ketimpangan) dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (seluruh pendapatan hanya dinikmati oleh satu orang). Dengan kata lain, semakin tinggi Gini Rasio, semakin timpang distribusi pendapatan di daerah tersebut.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia adalah IPM yakni salah satu indikator makro dengan komponen yang dihitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah konsep yang pertama kali dipublikasikan dalam *Human Development Report* pada tahun 1996 oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Penghitungan IPM digunakan untuk mengukur

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) dan penghitungan IPM dapat menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya (BPS, 2015).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten 2020 – 2024 dalam tabulasi berikut.

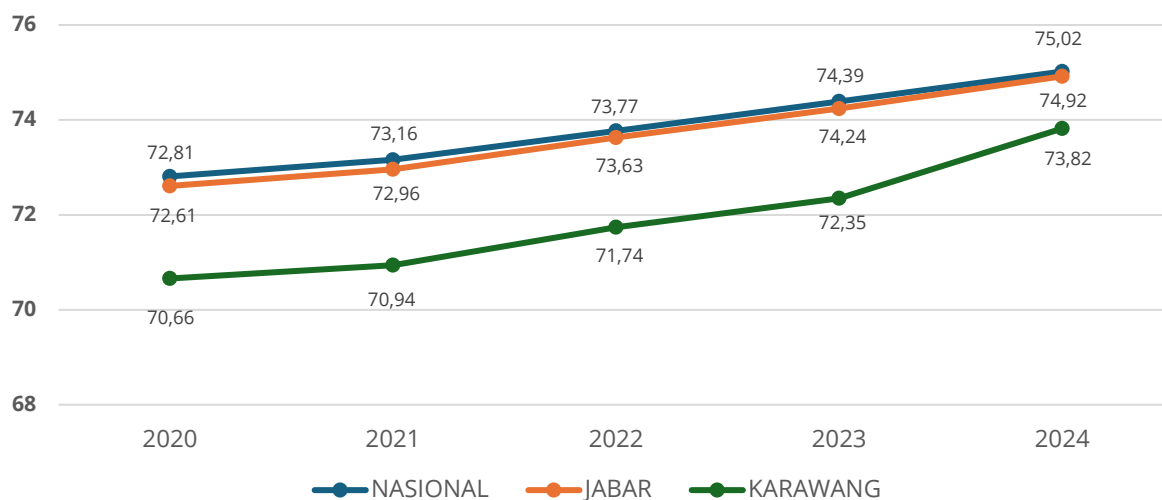
Tabel II-34 Tabulasi Capaian Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Jawa Barat, dan Karawang

Tingkat	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
Prov. Jabar	72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
Kabupaten Karawang	70,66	70,94	71,74	72,35	73,82

Sumber: BPS, 2025

Capaian IPM Kabupaten Karawang tergolong kelompok tinggi dengan parameter $70 \leq \text{IPM} < 80$ meski berada di bawah tren Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dalam tempo 5 tahun, capaian IPM Kabupaten Karawang menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1%.

Tren Indeks Pembangunan Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 - 2024

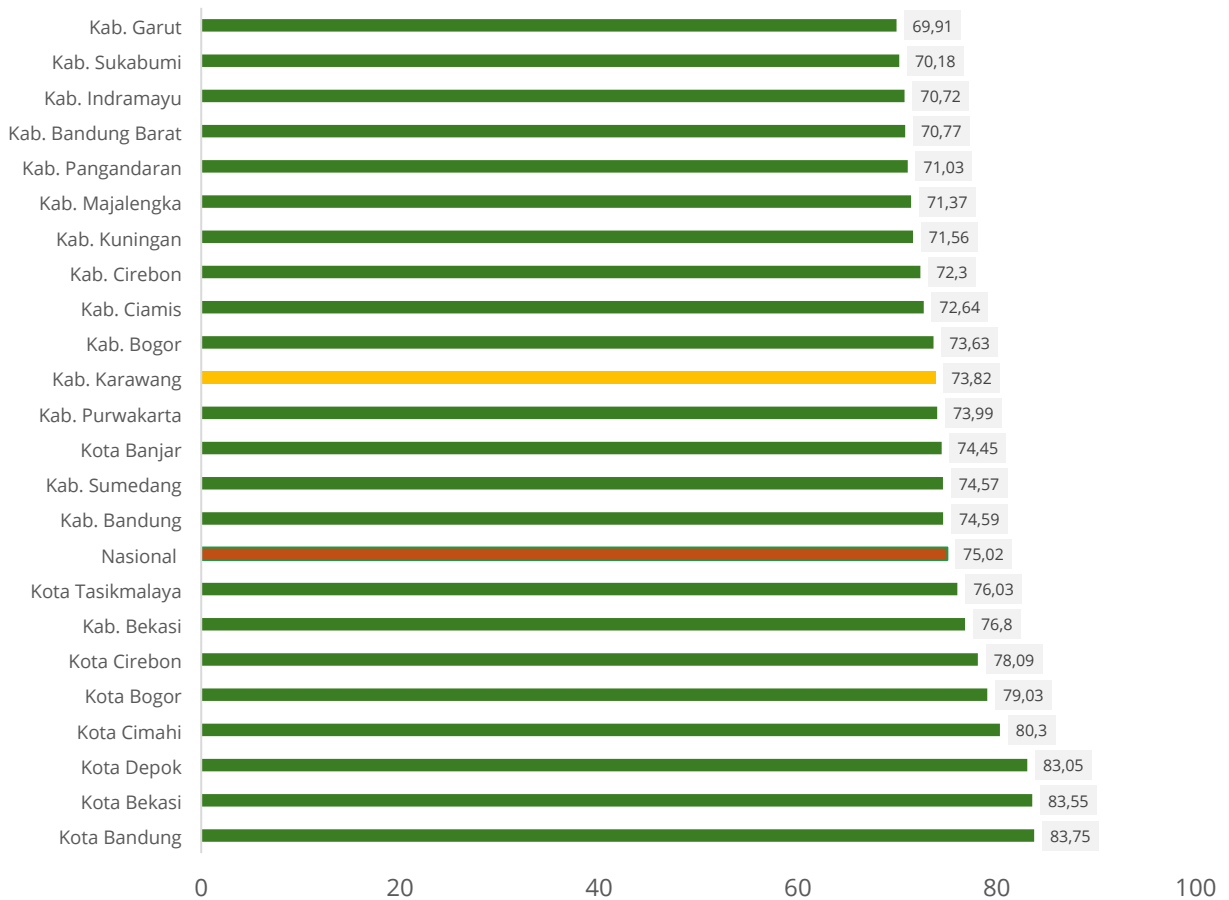


Gambar II-75 Tren Indeks Pembangunan Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Perbandingan capaian IPM tahun 2024 antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten sekitarnya dalam Provinsi Jawa Barat, menunjukkan posisi relatif Kabupaten Karawang.

Tren Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2024



Gambar II-76 Tren Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

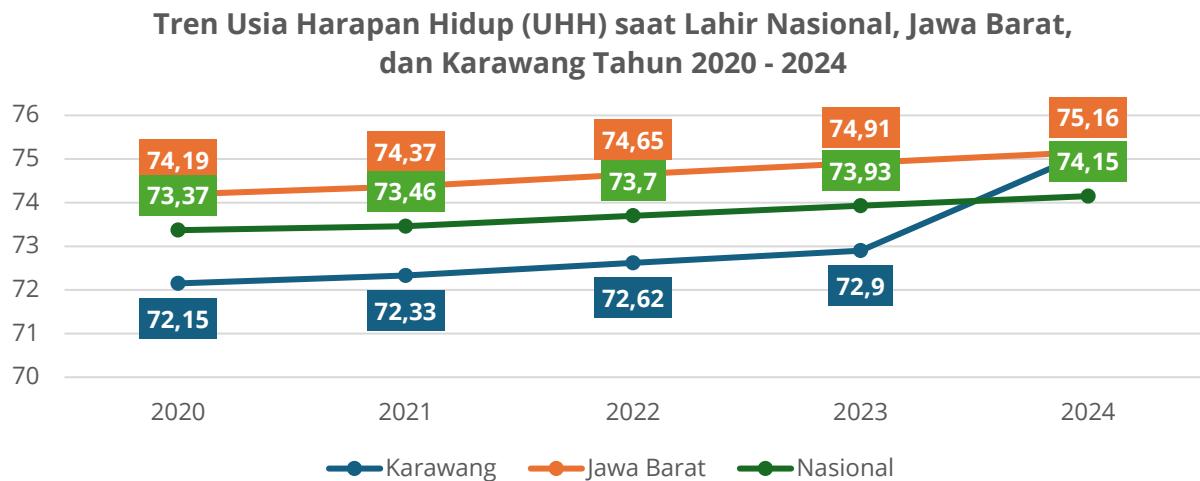
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Capaian IPM penduduk Kabupaten Karawang dalam taraf kehidupan yang baik namun masih banyak hal-hal yang perlu disesuaikan untuk dapat mendorong kualitas hidup masyarakatnya dalam dimensi IPM yakni dimensi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Aspek kesehatan yang baik akan mempengaruhi Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir yakni perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu populasi. UHH saat Lahir di negara berkembang lebih rendah daripada negara maju, disebabkan perhitungan UHH saat Lahir dipengaruhi oleh angka kematian bayi saat lahir.

Tren UHH saat Lahir di Kabupaten Karawang periode 2020 – 2024 sebagai berikut.



Gambar II-77 Tren Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir Nasional, Jawa Barat, dan Karawang Tahun 2020 - 2024

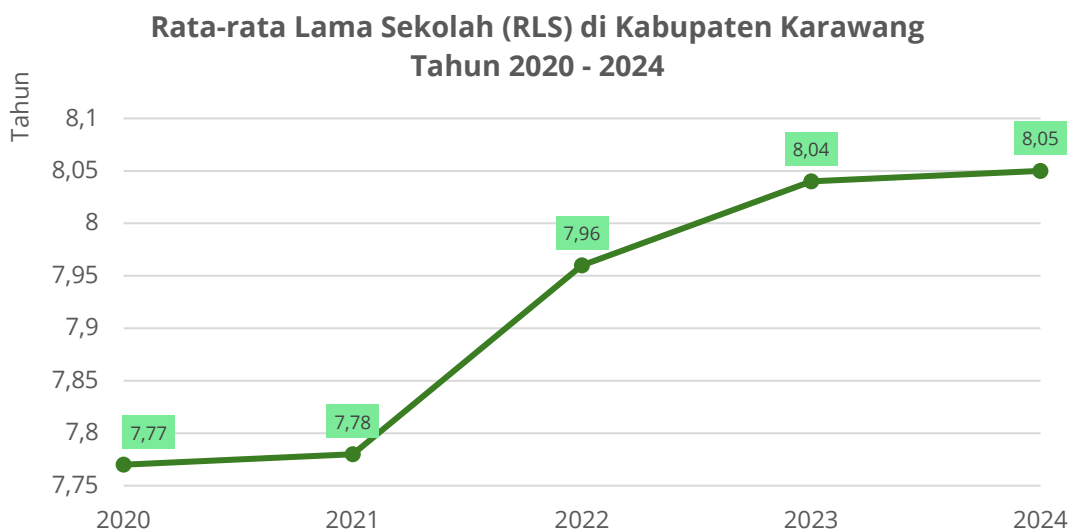
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 - 2024

Periode 2020 – 2023 nilai UHH saat Lahir Kabupaten Karawang berada di bawah nasional dan Jawa Barat, pada 2024 mengungguli nasional dengan selisih 1,01 tahun yang berarti bayi di Kabupaten Karawang yang lahir pada 2024 memiliki harapan hidup 1,01 tahun lebih lama dari angka nasional.

Usia Harapan Hidup (UHH) saat Lahir di Kabupaten Karawang menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir artinya bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga 75,16 tahun, 2,26 tahun lebih lama daripada mereka yang lahir pada 2023. Tren UHH saat Lahir yang positif menunjukkan adanya perbaikan standar kesejahteraan hidup masyarakat, di sisi lain adanya perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi peralatan teknologi kesehatan yang turut berpengaruh. UHH yang menunjukkan tren positif berimplikasi pada meningkatnya jumlah penduduk berusia lanjut (Lansia) yang mempengaruhi struktur usia penduduk secara keseluruhan atau *ageing population* dan kondisi ini dapat diperparah jika angka kelahiran kian menurun.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata Rata Lama Sekolah (RLS)

Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Jawa Barat perkotaan sudah **di atas 9 atau sudah menyelesaikan sampai SMP/ sederajat**, sedangkan di wilayah kabupaten masih di **kisaran 7 atau tidak menyelesaikan tingkat SMP/ sederajat**. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Karawang **berada di rentang 7 – 8 tahun artinya belum menyelesaikan pendidikan SMP/ sederajat**.



Gambar II-78 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata lama sekolah antar seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat berdasarkan gender dengan periode 2021 – 2024 menunjukkan bahwa **Kabupaten Karawang memiliki rata-rata lebih rendah daripada beberapa kabupaten/kota lainnya**, begitu pula jika dilihat dari proporsi berdasarkan gender menunjukkan **lebih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan daripada laki-laki**.

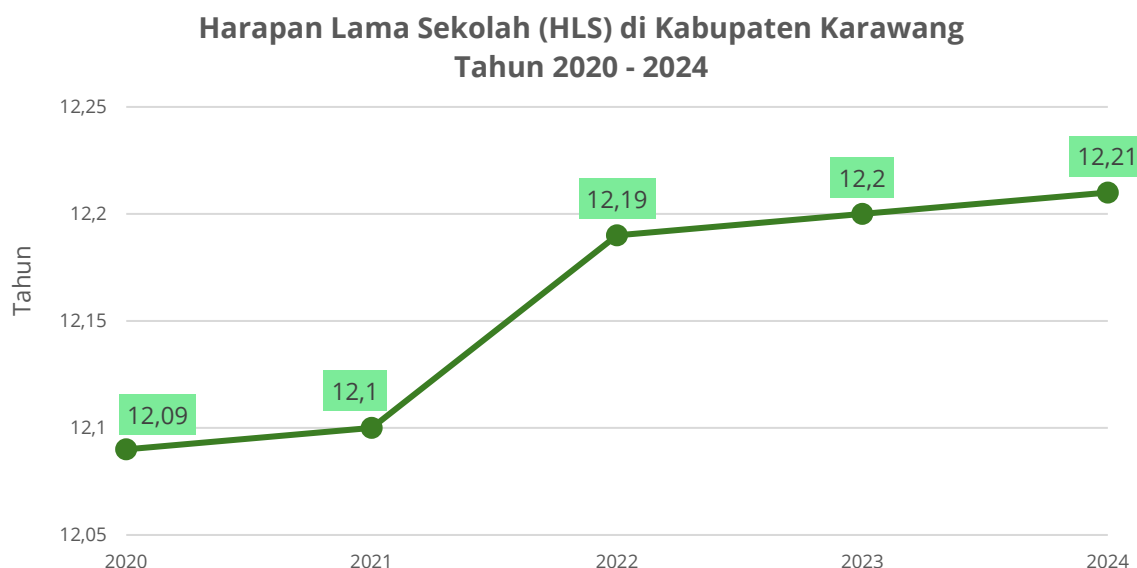
Tabel II-35 Tabulasi Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Per Gender

KAB/KOTA	laki-laki					Perempuan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	8,93	8,94	8,96	8,97	8,99	7,71	7,79	8	8,03	8,05
Sukabumi	7,77	7,8	7,81	7,82	7,84	6,81	6,84	6,85	7,08	7,09
Cianjur	7,49	7,5	7,51	7,53	7,54	6,71	6,72	6,73	6,75	6,93
Bandung	9,13	9,3	9,31	9,32	9,34	8,71	8,82	8,83	8,93	9,03
Garut	7,89	7,9	8,13	8,14	8,19	7,09	7,1	7,41	7,49	7,50
Tasikmalaya	7,63	7,64	7,93	8,1	8,11	7,04	7,33	7,58	7,83	7,84
Ciamis	7,95	8,2	8,21	8,31	8,32	7,52	7,63	7,84	7,89	7,90
Kuningan	8,01	8,11	8,15	8,16	8,17	7,28	7,54	7,62	7,63	7,64
Cirebon	7,43	7,62	7,81	8,06	8,07	6,63	6,66	6,97	7,21	7,22
Majalengka	7,70	7,74	7,79	7,8	7,84	6,73	6,88	7,08	7,2	7,21
Sumedang	8,69	8,7	8,94	8,95	8,96	8,33	8,34	8,45	8,48	8,49
Indramayu	7,01	7,2	7,49	7,5	7,51	5,53	5,77	6,12	6,36	6,37
Subang	7,57	7,58	7,66	7,9	7,91	6,53	6,54	6,82	7,12	7,14
Purwakarta	8,76	8,77	8,78	8,8	8,81	7,65	7,66	7,68	7,69	7,70
Karawang	8,41	8,42	8,43	8,48	8,49	6,96	6,97	7,22	7,48	7,49
Bekasi	9,76	9,77	9,79	9,8	9,99	8,62	8,82	9,07	9,17	9,34
Bandung Barat	8,71	8,72	8,74	8,75	8,76	7,82	7,83	7,85	7,86	7,87
Pangandaran	8,26	8,27	8,39	8,4	8,41	7,44	7,55	7,73	7,77	7,88
Kota Bogor	10,73	10,96	11,03	11,04	11,06	9,93	10,12	10,23	10,24	10,36
Kota Sukabumi	10,11	10,36	10,62	10,7	10,71	9,23	9,44	9,79	10,09	10,10

KAB/KOTA	laki-laki					Perempuan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Bandung	11,10	11,3	11,31	11,42	11,43	10,40	10,65	10,66	10,71	10,78
Kota Cirebon	10,48	10,65	10,66	10,67	10,83	9,33	9,58	9,84	10,12	10,39
Kota Bekasi	11,86	11,98	12,06	12,15	12,29	10,92	11,11	11,43	11,66	11,79
Kota Depok	11,60	11,81	11,82	11,89	11,94	10,70	10,84	11,15	11,28	11,29
Kota Cimahi	11,04	11,21	11,4	11,65	11,78	10,63	10,71	10,83	10,98	11,22
Kota Tasikmalaya	9,53	9,64	9,65	9,66	9,78	9,00	9,29	9,3	9,31	9,40
Kota Banjar	8,96	9,21	9,22	9,23	9,25	8,23	8,34	8,51	8,52	8,58
Rata-rata	8,9	9,1	9,2	9,2	9,2	8,1	8,3	8,4	8,6	8,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Harapan lama sekolah adalah rata-rata tahun menempuh sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk. Secara statistik harapan lama sekolah Kabupaten Karawang **sudah sesuai dengan upaya pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun.**



Gambar II-79 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Angka harapan lama sekolah antar kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukkan **harapan lama sekolah Kabupaten Karawang di bawah rata-rata** begitu pula jika diproporsikan secara *gender*. *Gap* HLS perempuan dan laki-laki di Karawang lebih besar daripada rata-rata *gap* skala provinsi. *Gap* HLS perempuan dan laki-laki sebanyak 0,05 tahun, sedangkan *gap* rata-rata Provinsi Jawa Barat adalah 0,02 tahun.

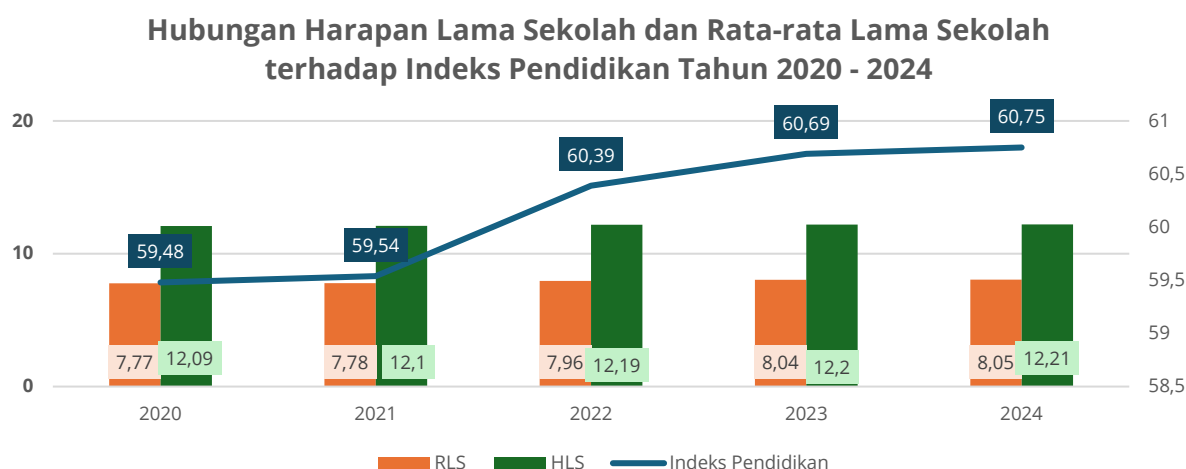
Tabel II-36 Tabulasi Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Per Gender 2024

Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Bogor	12,91	12,65
Sukabumi	12,66	12,35
Cianjur	12,32	12,00
Bandung	12,28	13,12
Garut	12,38	12,11

Kab/Kota	Laki-Laki	Perempuan
Tasikmalaya	12,75	12,64
Ciamis	14,69	14,30
Kuningan	12,94	12,27
Cirebon	12,42	12,77
Majalengka	12,49	12,25
Sumedang	13,00	13,68
Indramayu	12,01	12,60
Subang	12,10	12,18
Purwakarta	12,25	12,29
Karawang	12,25	12,21
Bekasi	13,13	13,23
Bandung Barat	11,94	12,18
Pangandaran	12,36	12,31
Kota Bogor	13,42	13,70
Kota Sukabumi	14,43	13,60
Kota Bandung	14,24	14,50
Kota Cirebon	12,84	13,46
Kota Bekasi	14,35	14,14
Kota Depok	13,97	14,35
Kota Cimahi	14,27	13,85
Kota Tasikmalaya	13,43	13,82
Kota Banjar	13,60	13,21
Rata-rata	13,02	13,02

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Guna melihat keunggulan pendidikan dalam suatu daerah dapat dilihat dari besar capaian indeks pendidikan yang dihitung dari variabel angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Indeks pendidikan Kabupaten Karawang dan hubungannya dengan RLS dan HLS sebagai berikut.



Gambar II-80 Hubungan Harapan Lama Sekolah dan Rata Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pendidikan Tahun 2020 - 2024

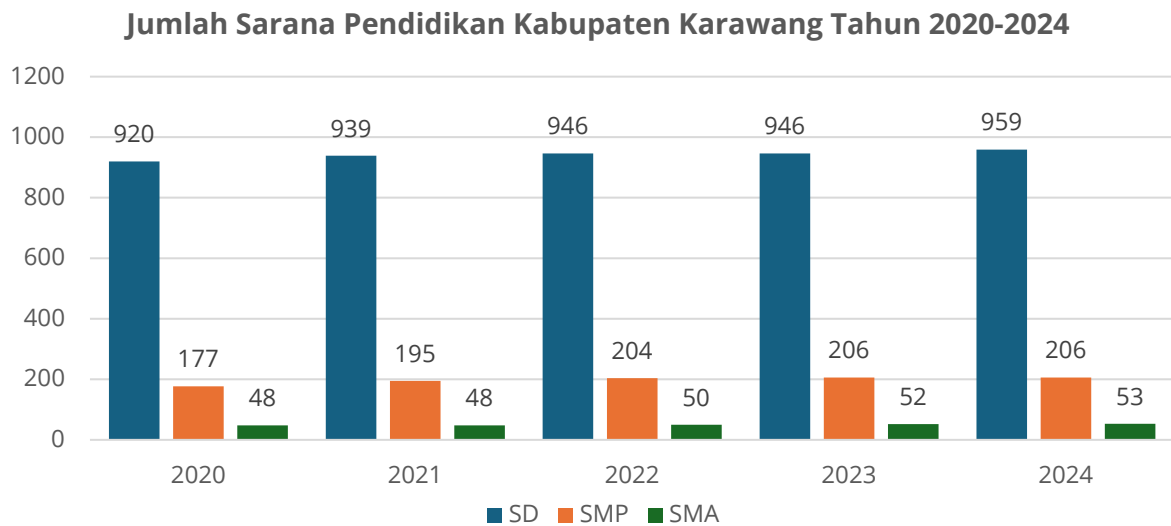
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik di atas terlihat bahwa kenaikan RLS dan HLS turut memengaruhi indeks pendidikan. Kondisi RLS dan HLS perlu ditingkatkan agar memberi dampak positif kepada indeks pendidikan.

Faktor yang signifikan memengaruhi HLS dan RLS adalah (Rahminawati, 2023):

1. Biaya pendidikan baik SPP maupun dalam bentuk iuran komite, seragam, buku pelajaran, dan lain-lain
2. Tingginya angka kemiskinan
3. Angka ketergantungan banyaknya jumlah anggota keluarga
4. Tempat tinggal dengan aksesibilitas terbatas

Fasilitas pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Berdasarkan data jumlah sekolah di Kabupaten Karawang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir.



Gambar II-81 Jumlah Sarana Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang, 2025

Penambahan sarana pendidikan bertumbuh sejalan dengan penambahan jumlah murid dan guru.

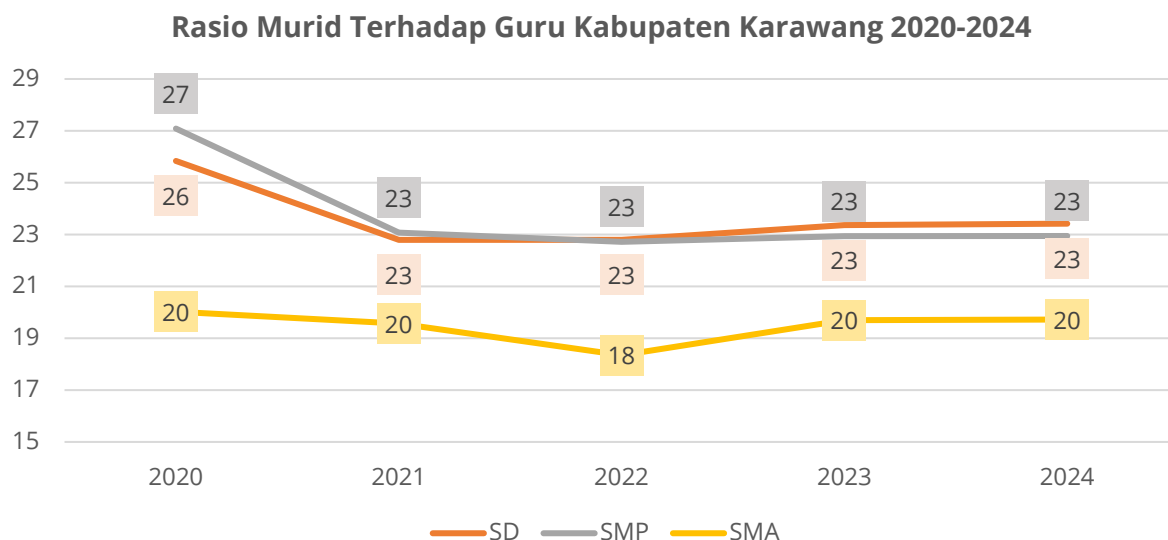
Tabel II-37 Jumlah Guru dan Murid Tiap Jenjang Pendidikan Tahun 2019-2023

Tahun	SD		SMP		SMA	
	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru
2020	236.839	9.166	97.731	3.608	28.392	1.418
2021	235.811	10.345	87.997	3.814	28.683	1.466
2022	237.752	1.429	87.218	3.839	30.767	1.677
2023	237.752	10.176	89.557	3.904	32.517	1.651
2024	242.444	10.351	89.577	3.904	33.071	1.677

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang, 2025

Bila dibandingkan dengan murid, rasio murid terhadap guru pada jenjang SD pada tahun 2024 adalah 23:1 artinya satu guru bertanggung jawab terhadap 23 orang murid. Kondisi ini tergolong berada di bawah kondisi ideal. Menurut Pasal 17 Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa pada jenjang SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Dengan kata lain Kabupaten Karawang masih membutuhkan guru pada jenjang SD dan SMP untuk menciptakan kondisi ideal.

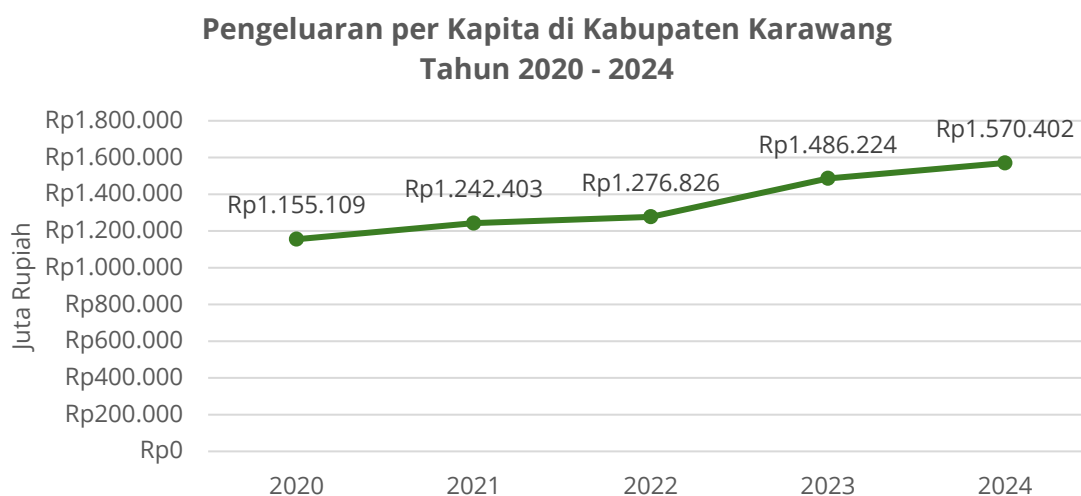


Gambar II-82 Rasio Murid Terhadap Guru Kabupaten Karawang 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang, 2025

3. Pengeluaran per Kapita

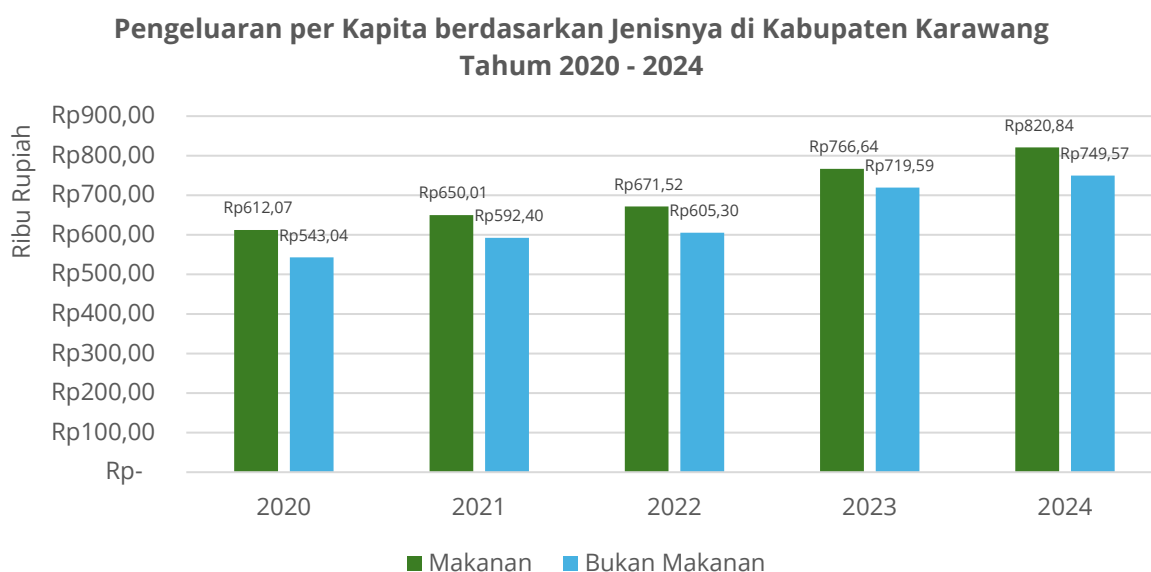
Pengeluaran per kapita menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karawang. Angka ini tidak hanya mencerminkan daya beli dan kemampuan konsumsi penduduk, tetapi juga menjadi cerminan kualitas hidup dan distribusi pendapatan di wilayah tersebut. Melalui analisis pengeluaran per kapita, dapat diketahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Karawang berkembang seiring dengan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi.



Gambar II-83 Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang, 2025

Berdasarkan data pengeluaran per kapita Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan dari Rp1.155.109 pada tahun 2020 menjadi Rp1.570.402 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan daya beli masyarakat Karawang, yang umumnya sejalan dengan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Secara rata-rata, kenaikan pengeluaran per kapita ini menunjukkan laju pertumbuhan yang positif dan konsisten, yang mengindikasikan adanya peningkatan akses terhadap barang dan jasa bagi masyarakat. Namun, disisi lain, perlu diperhatikan apakah pertumbuhan pengeluaran ini diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, atau justru memperlebar ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat.



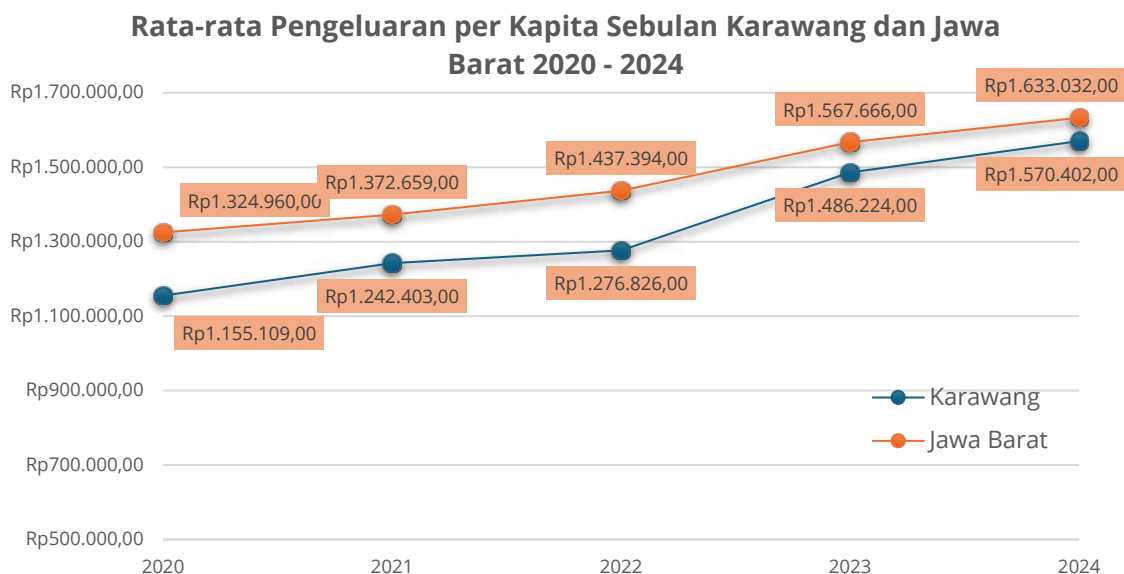
Gambar II-84 Pengeluaran per Kapita berdasarkan Jenisnya Kabupaten Karawang Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang, 2025

Data menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami kenaikan stabil baik untuk komponen makanan maupun bukan makanan. Pengeluaran untuk makanan naik dari Rp612.070,15 pada 2020 menjadi Rp820.835,00 pada 2024, sementara pengeluaran bukan makanan juga meningkat dari Rp543.038,98 menjadi Rp749.567,00 pada periode yang sama. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Karawang diikuti oleh peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, dengan komponen makanan tetap menjadi pengeluaran terbesar. Namun, pertumbuhan pengeluaran bukan makanan yang cukup signifikan menandakan bahwa masyarakat juga semakin mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder dan tersier (misalnya transportasi, pendidikan, kesehatan, dan hiburan). Ini menunjukkan potensi positif bagi pertumbuhan sektor ekonomi Bukan makanan di Karawang.

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karawang menunjukkan tingkat konsumsi seluruh anggota rumah tangga. Angka pengeluaran per kapita mencerminkan kesejahteraan masyarakat berdasar tingkat konsumsi dan standar hidup suatu daerah. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk komoditas makanan dan non

makanan Kabupaten Karawang rentang 2020 – 2024 cenderung meningkat kecuali pada tahun 2021 yang turun diakibatkan Covid-19.



Gambar II-85 Rata Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Karawang dan Jawa Barat 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, pengeluaran Kabupaten Karawang masih **pada rentang yang cukup dekat dengan pengeluaran penduduk Provinsi Jawa Barat secara general.**

Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karawang masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat dalam rentang 5 tahun 2020 – 2022. Kabupaten/kota yang konsisten memiliki pengeluaran di atas rata-rata adalah Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Cimahi. Sedangkan di 2021, Kabupaten Purwakarta memiliki pengeluaran di atas rata-rata dan Kota Tasikmalaya di tahun 2023 juga memiliki pengeluaran di atas rata-rata.

Tabel II-38 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan (Makanan dan non Makanan) Kabupaten/Kota di Jawa Barat (2020 – 2024)

KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Bogor	Rp1.111.824	Rp1.220.669	Rp1.377.576	Rp1.248.999	Rp1.321.439	Rp1.256.101
Sukabumi	Rp918.757	Rp1.018.783	Rp1.034.412	Rp1.253.479	Rp1.194.801	Rp1.084.046
Cianjur	Rp927.198	Rp959.447	Rp867.547	Rp1.040.537	Rp1.187.797	Rp996.505
Bandung	Rp1.184.544	Rp1.210.944	Rp1.169.603	Rp1.289.023	Rp1.337.190	Rp1.238.261
Garut	Rp940.065	Rp831.102	Rp858.077	Rp1.039.588	Rp1.083.996	Rp950.566
Tasikmalaya	Rp849.656	Rp884.303	Rp985.340	Rp1.067.692	Rp1.095.641	Rp976.526
Ciamis	Rp1.010.334	Rp1.021.571	Rp1.201.396	Rp1.243.666	Rp1.338.192	Rp1.163.032
Kuningan	Rp1.157.538	Rp1.211.685	Rp1.100.726	Rp1.121.601	Rp1.161.901	Rp1.150.690
Cirebon	Rp985.859	Rp1.016.767	Rp1.135.006	Rp1.230.691	Rp1.338.098	Rp1.141.284
Majalengka	Rp1.123.214	Rp1.095.739	Rp1.029.656	Rp1.142.852	Rp1.222.651	Rp1.122.822

KAB/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Sumedang	Rp1.271.292	Rp1.144.317	Rp1.333.296	Rp1.405.938	Rp1.366.502	Rp1.304.269
Indramayu	Rp1.159.454	Rp1.248.638	Rp1.254.515	Rp1.469.031	Rp1.388.655	Rp1.304.059
Subang	Rp1.060.201	Rp1.154.420	Rp1.230.677	Rp1.257.902	Rp1.265.998	Rp1.193.840
Purwakarta	Rp1.216.437	Rp1.400.487	Rp1.240.484	Rp1.453.118	Rp1.436.378	Rp1.349.381
Karawang	Rp1.155.109	Rp1.242.403	Rp1.276.826	Rp1.486.224	Rp1.570.402	Rp1.346.193
Bekasi	Rp1.708.115	Rp1.588.582	Rp1.754.664	Rp1.770.214	Rp1.898.977	Rp1.744.110
Bandung Barat	Rp1.007.906	Rp952.620	Rp1.158.398	Rp1.130.470	Rp1.179.921	Rp1.085.863
Pangandaran	Rp1.131.678	Rp1.179.731	Rp1.197.041	Rp1.293.640	Rp1.367.729	Rp1.233.964
Kota Bogor	Rp1.720.694	Rp1.960.500	Rp1.791.592	Rp2.733.270	Rp2.470.557	Rp2.135.323
Kota Sukabumi	Rp1.445.759	Rp1.483.147	Rp1.479.933	Rp2.273.334	Rp1.850.558	Rp1.706.546
Kota Bandung	Rp1.958.841	Rp2.082.375	Rp2.078.106	Rp2.476.783	Rp2.378.226	Rp2.194.866
Kota Cirebon	Rp1.474.219	Rp1.629.708	Rp1.559.130	Rp1.328.161	Rp1.650.993	Rp1.528.442
Kota Bekasi	Rp2.347.086	Rp2.488.463	Rp2.569.193	Rp2.709.214	Rp3.132.705	Rp2.649.332
Kota Depok	Rp2.169.732	Rp2.304.941	Rp2.538.382	Rp2.612.174	Rp2.823.228	Rp2.489.691
Kota Cimahi	Rp1.808.790	Rp1.827.072	Rp1.909.733	Rp2.183.003	Rp2.166.367	Rp1.978.993
Kota Tasikmalaya	Rp1.255.705	Rp1.310.775	Rp1.292.484	Rp1.717.562	Rp1.590.190	Rp1.433.343
Kota Banjar	Rp1.144.798	Rp1.088.977	Rp1.268.890	Rp1.389.002	Rp1.405.968	Rp1.259.527
Rata-rata	Rp1.305.363	Rp1.354.006	Rp1.396.025	Rp1.569.154	Rp1.600.928	Rp1.445.095

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

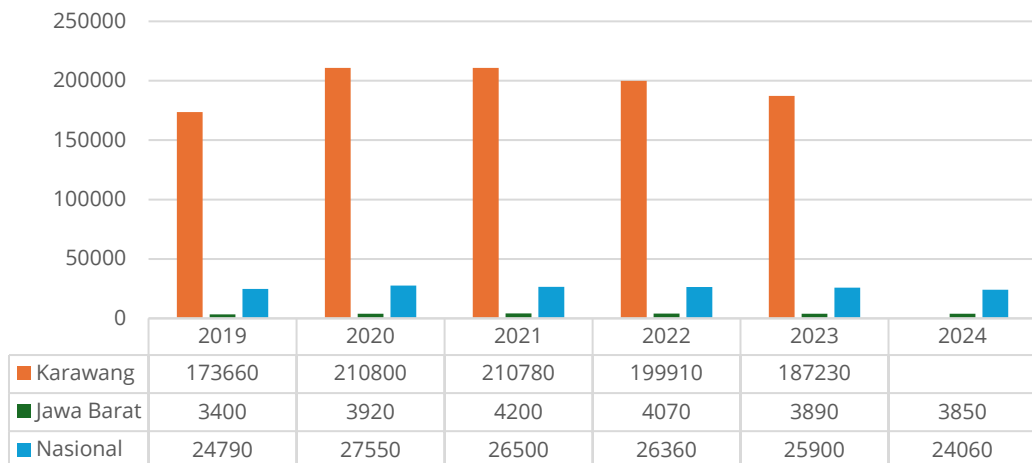
F. Profil Kemiskinan Kabupaten Karawang

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karawang, yang dilihat dari Garis Kemiskinan, mengalami penurunan sebesar 0,01% dari Maret 2023. Namun, secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin bertambah 540 orang, sehingga total penduduk miskin pada Maret 2024 menjadi sekitar 187,77 ribu orang. Fenomena ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, nominal Garis Kemiskinan di Kabupaten Karawang naik dari Rp 555.889 per kapita per bulan pada Maret 2023 menjadi Rp 597.345 per kapita per bulan pada Maret 2024 (kenaikan Rp 41.456). Kenaikan ini menyebabkan sejumlah penduduk yang sebelumnya tidak tergolong miskin masuk ke dalam kategori miskin. Kenaikan nominal garis kemiskinan tersebut umumnya disebabkan oleh fluktuasi harga barang kebutuhan, inflasi, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kedua, pertumbuhan penduduk juga memungkinkan jumlah penduduk miskin tertutupi oleh laju pertumbuhan penduduk, meskipun hal ini belum tentu mencerminkan perbaikan yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan.

1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin

Efek dari penurunan kondisi perekonomian berimplikasi ke jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Karawang yang bertambah di rentang 2020 – 2021.

Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jabar, dan Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2024



Gambar II-86 Jumlah Penduduk Miskin Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nasional dan Jawa Barat = Dalam Juta
Kabupaten Karawang = Dalam Ribu
Semua dikonversi dalam satuan ribu

Tabel II-39 Jumlah Masyarakat Miskin

Jumlah Masyarakat Miskin			
Tahun	Karawang (Ribu)	Jawa Barat (Juta)	Nasional (Juta)
2019	0,195	3,4	24,79
2020	173,66	3,92	27,55
2021	210,8	4,2	26,5
2022	210,78	4,07	26,36
2023	199,91	3,89	25,9
2024	187,23	3,85	24,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

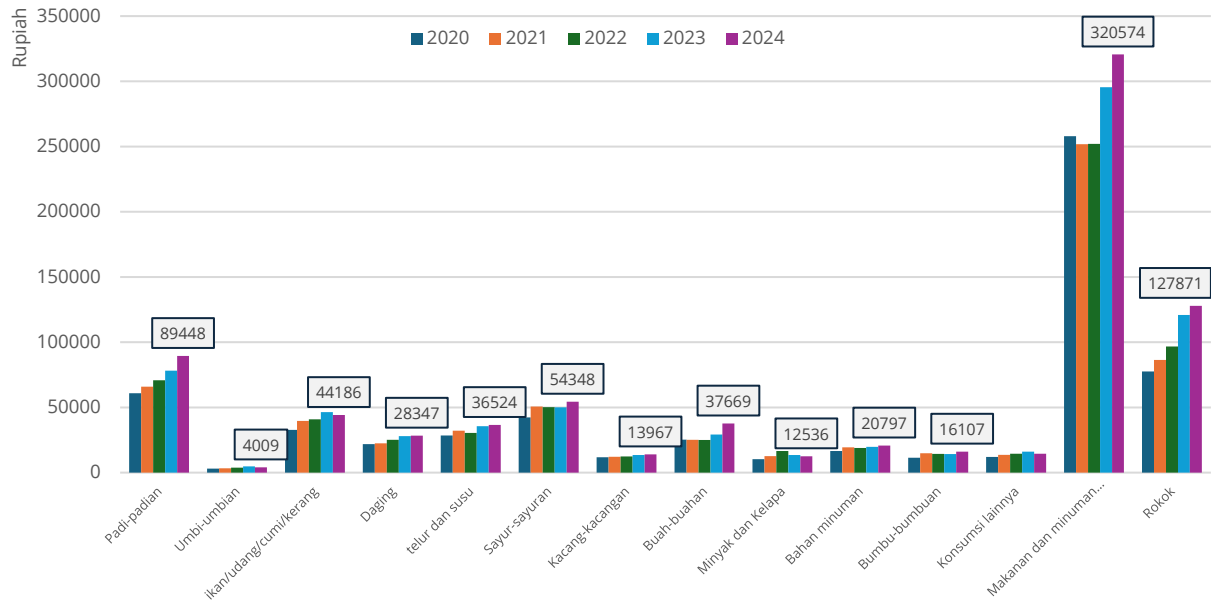
Dalam Statistik Indonesia 2025, jumlah penduduk miskin Jawa Barat masih lebih besar dari beberapa provinsi terdekat misalnya dengan Provinsi Jawa Tengah (3.396,34 ribu) jiwa, Provinsi DKI Jakarta (449,07 ribu jiwa), dan Provinsi Banten (777,49 ribu jiwa).

Kenaikan jumlah penduduk miskin Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat di tahun yang berbeda namun di 2020 sama-sama mengalami kenaikan. Pada Kabupaten Karawang, kenaikan jumlah penduduk miskin pada 2020 – 2021 mengalami peningkatan masing-masing meningkat sebanyak 21,75 ribu jiwa dan 15,37 ribu jiwa.

Kemiskinan adalah salah satu siklus yang dapat diperparah oleh berbagai faktor misalnya asupan gizi yang rendah, rendahnya akses terhadap pendidikan, kurangnya akses kepada pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Jika hal tersebut terjadi maka siklus kemiskinan dapat berulang.

Statistik menunjukkan 40% rumah tangga Kabupaten Karawang mengandalkan makanan dengan kandungan gizi rendah seperti nasi putih dan makanan olahan disisi lain konsumsi terhadap sayur dan buah sedikit.

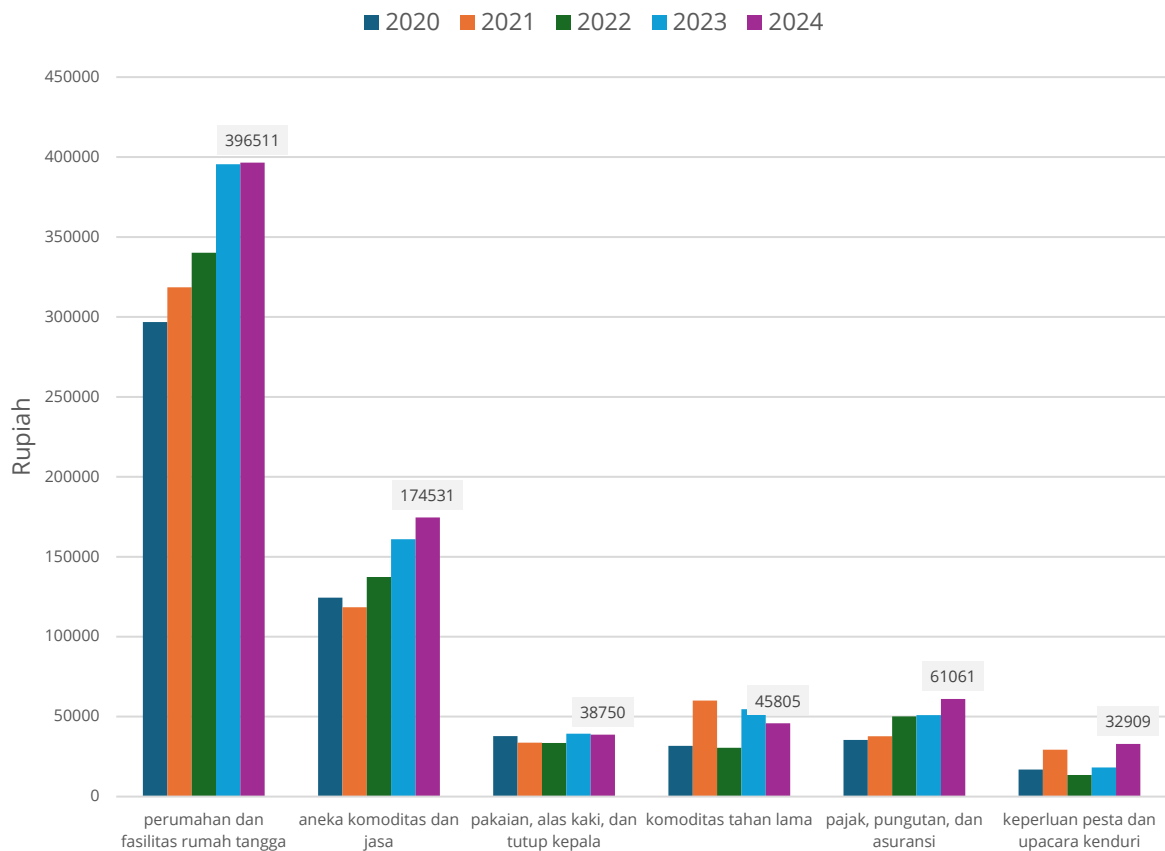
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan Tahun 2020 - 2024



Gambar II-87 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Makanan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020 - 2024



Gambar II-88 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kelompok Bukan Makanan Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tabel II-40 Tabulasi Rata-rata Pengeluaran per Kapita/Bulan Kelompok Makanan dan Bukan Makanan 2020 – 2024 (Rupiah)

Jenis	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Makanan						
Padi-padian	60.914	65.890	70.772	78.122	89.448	365.146
Umbi-umbian	3.051	3.285	3.764	4.832	4.009	18.941
ikan/udang/cumi/kerang	32.731	39.611	40.839	46.416	44.186	203.783
Daging	21.860	22.417	25.190	27.951	28.347	125.765
telur dan susu	28.426	32.141	30.492	35.633	36.524	163.216
Sayur-sayuran	42.374	50.674	50.153	50.012	54.348	247.561
Kacang-kacangan	11.776	12.123	12.365	13.531	13.967	63.762
Buah-buahan	25.250	25.181	25.026	29.180	37.669	142.306
Minyak dan Kelapa	10.319	12.586	16.507	13.479	12.536	65.427
Bahan minuman	16.560	19.416	18.856	19.753	20.797	95.382
Bumbu-bumbuan	11.418	14.809	14.407	14.244	16.107	70.985
Konsumsi lainnya	11.970	13.653	14.432	16.107	14.422	70.584
Makanan dan minuman jadi	257.892	251.800	252.041	295.467	320.574	1.377.774
Rokok	77.529	86.422	96.680	120.907	127.871	509.409
Total	612.070	650.008	671.524	765.634	820.805	3.520.041
Bukan Makanan						
perumahan dan fasilitas rumah tangga	296.796	318.496	340.187	395.505	396.511	1.747.495
aneka komoditas dan jasa	124.409	118.380	137.374	160.954	174.531	715.648
pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	37.817	33.731	33.542	39.359	38.750	183.199
komoditas tahan lama	31.711	60.054	30.490	54.689	45.805	222.749
pajak, pungutan, dan asuransi	35.428	37.764	50.153	50.914	61.061	235.320
keperluan pesta dan upacara kenduri	16.877	29.369	13.554	18.166	32.909	110.875
Total	543.038	597.794	605.300	719.587	749.567	3.215.286

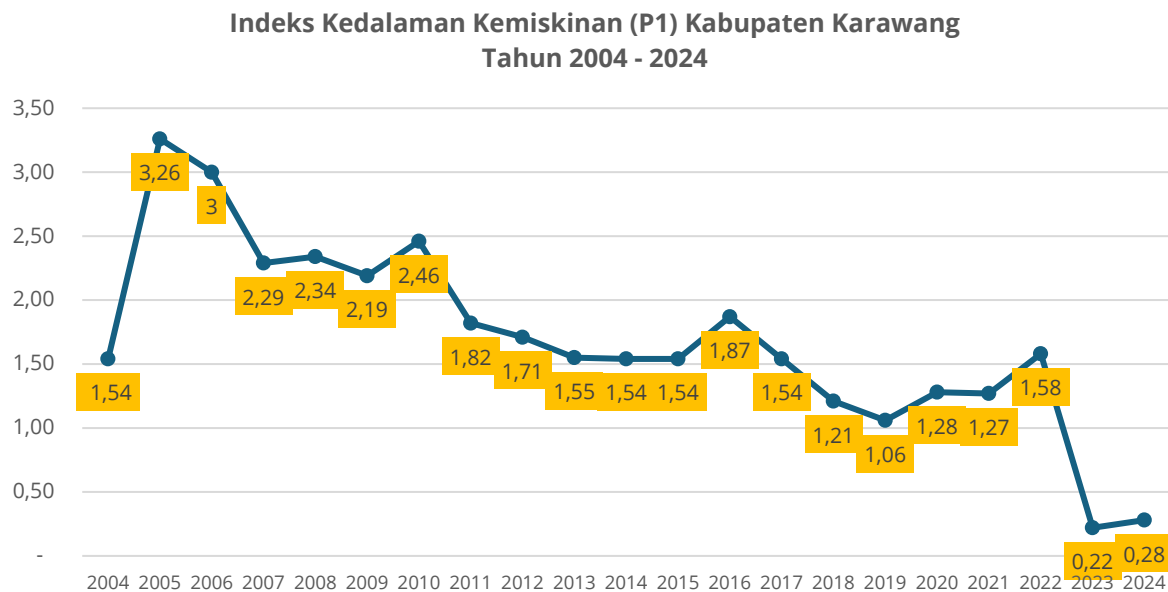
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan pada kelompok makanan, diketahui bahwa **pos terbesar adalah makanan dan minuman jadi serta rokok**. Pengeluaran pangan lebih tinggi mengindikasikan **rendahnya penghasilan dan tingginya harga pangan**.

2. Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Pada Maret 2024, penduduk miskin di Kabupaten Karawang mengalami kondisi kemiskinan yang bertambah berat. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 1,08 pada Maret 2024 dari 1,06 pada Maret 2023 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin lebih rendah Rp6.451 dari garis kemiskinan, sehingga dibutuhkan tambahan pendapatan sebesar itu untuk keluar dari kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi sejak 2004 – 2024 ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah ini. Disimpulkan bahwa indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan perbaikan sejak tahun 2006.



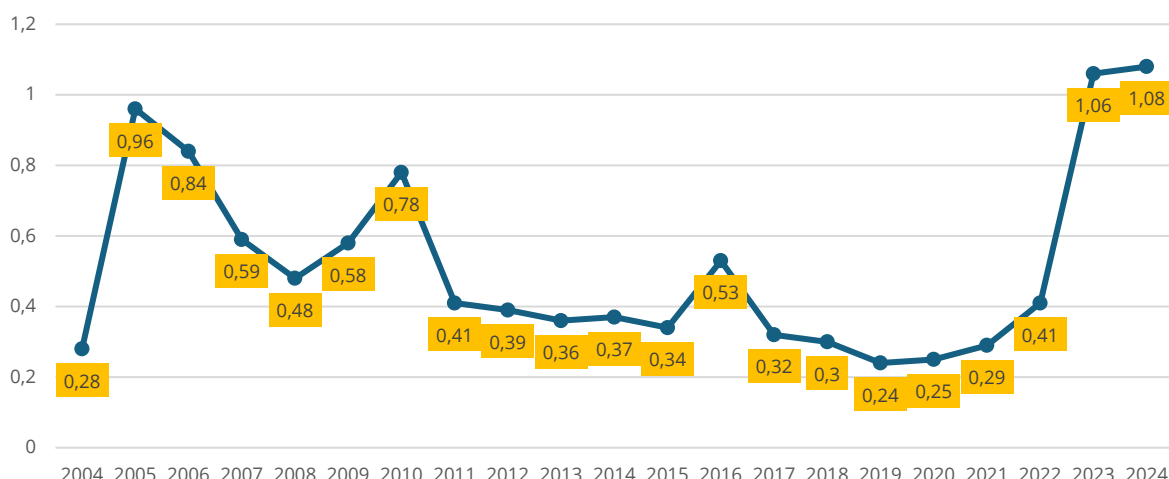
Gambar II-89 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Karawang Tahun 2004 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Di sisi lain, bayangan ketimpangan juga semakin menandai beratnya kondisi kemiskinan di mana pada Maret 2024 indeks keparahan (P2) mengalami peningkatan menjadi 0,28 pada Maret 2024 dari 0,22 pada Maret 2023 di mana secara persentase kenaikan indeks keparahan ini meningkat sebesar 27,2% menunjukkan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin yang melebar antara “penduduk hampir miskin” dan penduduk “miskin parah”. Artinya, terdapat kelompok hampir keluar garis kemiskinan di sisi lain terdapat kelompok yang semakin terperosok.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Karawang turut mengalami fluktuasi sejak 2004 – 2024 ditampilkan dalam tabel dan grafik di bawah ini. Disimpulkan bahwa indeks keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan sejak tahun 2006.

Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Karawang Tahun 2004 - 2024



Gambar II-90 Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

3. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Pengangguran

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja kian bertambah seiring dengan naiknya populasi namun jumlah lowongan pekerjaan stagnan. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, komposisi penduduk di Indonesia didominasi oleh Gen Z (kelahiran 1997 – 2012 sebesar 27,94%) dan Milenial (kelahiran 1981 – 1996 sebesar 25,87%) yang termasuk dalam usia angkatan kerja (15 – 65 tahun). Sulitnya pemenuhan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja menyebabkan tingkat pengangguran terbuka tergolong besar. Kondisi memprihatinkan mengingat Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah pusat industri di Jawa Barat. Jumlah angkatan kerja (baik berstatus bekerja maupun pengangguran terbuka) pada 2024 di Kabupaten Karawang sebesar 1.248.626 jiwa, yang berstatus bekerja sebesar 1.148.222 jiwa dan yang berstatus pengangguran terbuka sebesar 100.404 dengan komposisi perempuan yang paling rendah di keduanya.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel II-41 Angkatan Kerja Kab/Kota Jawa Barat 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	2.733.670	2.786.372	2.897.332	2.736.757	2.861.902
Sukabumi	1.146.833	1.222.156	1.313.905	1.450.273	1.511.976
Cianjur	1.185.595	1.175.885	1.222.589	1.390.522	1.416.220
Bandung	1.717.376	1.824.927	1.808.799	1.878.757	1.910.662
Garut	1.156.180	1.200.346	1.330.353	1.391.755	1.438.490
Tasikmalaya	944.706	936.109	940.713	1.009.847	1.025.501
Ciamis	679.192	671.063	664.523	657.801	681.600
Kuningan	521.677	542.782	530.825	574.169	618.129
Cirebon	1.060.362	1.082.691	1.110.529	1.192.360	1.261.776
Majalengka	664.374	651.599	644.128	719.492	739.144
Sumedang	637.668	639.867	609.471	626.159	646.454

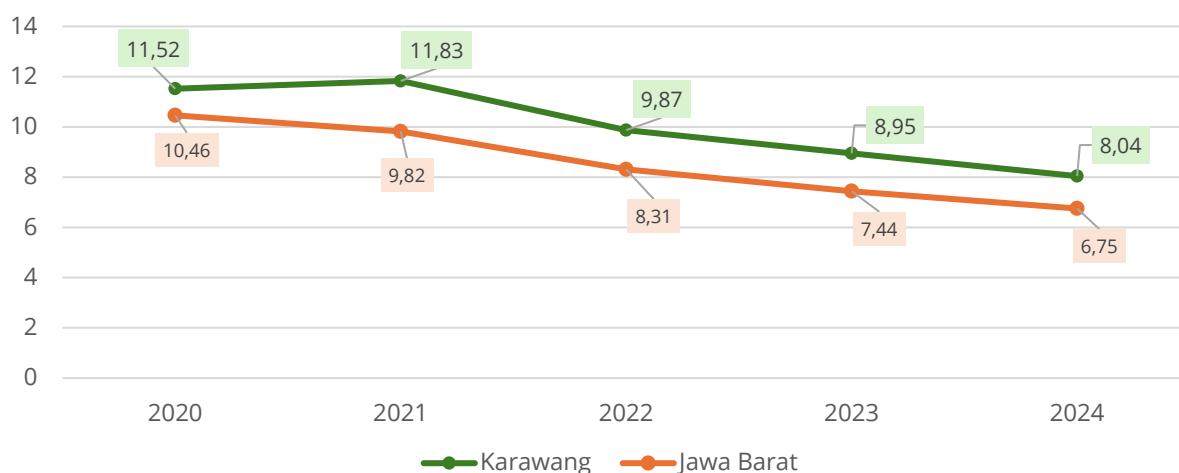
Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Indramayu	940.706	954.521	952.841	941.729	991.603
Subang	824.467	846.262	868.132	909.343	939.682
Purwakarta	432.428	438.371	472.075	519.389	529.236
Karawang	1.162.633	1.161.202	1.195.947	1.227.390	1.248.626
Bekasi	1.840.666	1.953.408	2.006.507	1.592.879	1.619.896
Bandung Barat	747.644	765.935	819.559	947.124	978.735
Pangandaran	245.619	241.542	260.761	27.455	276.503
Kota Bogor	514.323	529.003	556.541	534.532	561.986
Kota Sukabumi	139.657	143.914	159.618	171.381	174.375
Kota Bandung	1.314.930	1.339.128	1.435.635	1.318.915	1.354.881
Kota Cirebon	156.500	155.798	163.639	180.902	182.653
Kota Bekasi	1.509.841	1.544.421	1.592.545	1.318.330	1.350.395
Kota Depok	1.195.632	1.207.111	1.258.739	1.033.237	1.048.091
Kota Cimahi	293.754	292.252	320.574	31.559	311.859
Kota Tasikmalaya	343.285	342.585	347.063	369.778	395.357
Kota Banjar	98.212	94.378	94.831	108.924	109.604
Provinsi Jawa Barat	24.207.930	24.743.628	24.818.342	25.399.990	26.185.336
Rata-Rata	806.931	824.788	852.606	828.692	969.827

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dengan nilai yang berada di atas rata-rata jumlah angkatan kerja pada Kab/Kota lainnya, Kabupaten Karawang menjadi Kabupaten urutan ke-9 yang memiliki jumlah angkatan kerja terbanyak di Provinsi Jawa Barat.

Dari total angkatan kerja yang ada, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Karawang masih di bawah TPT Provinsi Jawa Barat.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 (%)



Gambar II-91 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

TPT Kabupaten Karawang berada di atas Provinsi Jawa Barat dan setiap tahunnya menduduki TPT 10 besar di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel II-42 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Jawa Barat 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	14,29	12, 22	10,64	8,47	7,34
Sukabumi	9, 60	9,51	7,77	7,32	7,11
Cianjur	11,05	9, 32	8,41	7,71	5,99
Bandung	8,58	8, 32	6,98	6,52	6,36
Garut	8,96	8, 68	7,6	7,33	6,96
Tasikmalaya	7,12	6, 16	4,17	3,89	3,74
Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
Kuningan	11,22	11,68	9,81	3,52	7,78
Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
Sumedang	9, 89	9, 18	7,72	6,94	6,16
Indramayu	9,21	8, 30	6,49	6,46	6,25
Subang	9,48	9, 77	7,77	7,65	6,73
Purwakarta	11,07	10,7	8,75	7,72	7,34
Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
Bandung Barat	12,25	11 ,65	9,63	8,11	6,7
Pangandaran	5,08	3,25	1 ,56	1,52	1,58
Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,9	7,82
Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
Kota Cimahi	13,3	13,07	10,77	10,52	8,97
Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Besar angka TPT Kabupaten Karawang berhubungan erat dengan kualitas pendidikan atau kualitas pelatihan angkatan kerja di Kabupaten Karawang. Rata-rata penduduk berusia 15 tahun ke atas masih belum menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama artinya hanya menamatkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga **belum sesuai dari standar nasional yakni wajib belajar 12 tahun**. Dengan kondisi seperti ini, penduduk kabupaten Karawang memiliki daya saing yang rendah. Di sisi lain, Kabupaten Karawang sebagai daerah industri yang besar membutuhkan *skilled labour*.

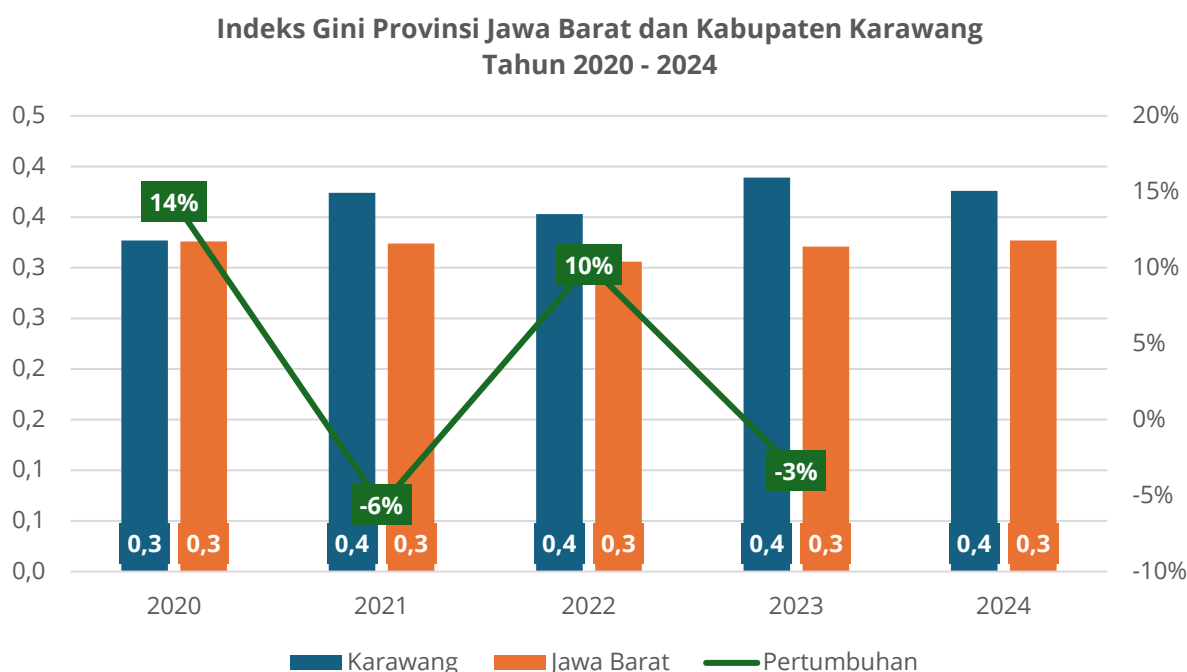
Pada 2024 **pengangguran berjumlah 100.404 jiwa yang didominasi oleh laki-laki** sebesar 60.961 jiwa. Namun **tingkat pengangguran didominasi oleh perempuan** sebesar 9,32% dan laki-laki 7,39% yang dapat disebabkan oleh:

1. Jumlah angkatan kerja yang memang lebih kecil (pada 2024 sebesar 423.220 jiwa, sedangkan laki-laki 825.406 jiwa).
2. Dimungkinkan adanya pekerja perempuan tidak terdata (bekerja di bidang informal)

3. Banyak perempuan yang tidak masuk ke jumlah angkatan kerja dapat disebabkan karena faktor sosial budaya di Kabupaten Karawang terhadap perempuan.

Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi perempuan sebagai gender yang terhimpit faktor sosial budaya baik dalam sektor formal dan informal perlu diperhatikan agar perempuan lebih resilien terhadap masalah ekonomi dan rumah tangga, ketimpangan gender, menyokong kondisi keluarga, dan memperbaiki kultur pendidikan keluarga. Pemenuhan lapangan pekerjaan juga dapat diperhatikan bagi kelompok rentan, misalnya kelompok LANSIA, kelompok disabilitas, dan kelompok marjinal lainnya. Selain menyediakan lapangan pekerjaan, perlu memperhatikan perlindungan pekerja migran melalui *spreading awareness* terhadap para pencari kerja terkait lowongan pekerjaan di negara Kamboja yang diberangkatkan lebih dulu ke Myanmar, Thailand, Vietnam atas maraknya jaringan perekrutan pekerjaan operator judi *online* dan *online scammer* yang dekat dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adanya industri dapat memberi efek yang positif atau justru sebaliknya. Pengukuran dengan indeks gini untuk melihat ketimpangan pengeluaran di populasi Kabupaten Karawang pada 2020 – 2024 disandingkan dengan data Provinsi Jawa Barat.



Gambar II-92 Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks gini Kabupaten Karawang fluktuatif terhadap Provinsi Jawa Barat dan berada di rentang 0,3 – 0,4 di 5 tahun terakhir yang tergolong dalam tingkat ketimpangan rendah (0,3) dan tingkat ketimpangan sedang (0,4).

Selain itu dampak dari apabila dilihat dari *multiplier effectnya* melalui analisis tabel input dan output lebih banyak dampak yang ditimbulkan daripada keuntungan yang didapatkan, berikut adalah hasil analisis dari tabel Input dan Output, terhadap *multiplier effect* yang ditimbulkan.

Tabel II-43 Hasil Analisis Tabel *Input* dan *Output* terhadap *Multiplier Effect* di Kabupaten Karawang

Pengaruh Persektor	Kode	Multiplier Output	Multiplier Income	Multiplier Labor	Multiplier Value Added
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	A	2,48	1,48	269,16	2,01
Pertambangan dan Penggalian	B	2,24	1,19	2,66	1,45
Industri Pengolahan	C	1,45	0,63	128,56	0,62
Pengadaan Listrik dan Gas	D	7,82	3,05	2,41	1,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	1,39	0,81	19,20	0,84
Konstruksi	F	1,24	0,55	34,77	0,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	1,79	1,07	812,08	1,28
Transportasi dan Pergudangan	H	2,94	1,43	67,69	1,51
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	1,30	0,63	348,66	0,63
Informasi dan Komunikasi	J	1,80	1,07	13,55	1,18
Jasa Keuangan dan Asuransi	K	2,52	1,55	40,99	1,98
Real Estate	L	2,57	1,70	2,92	2,23
Jasa Perusahaan	MN	57,74	28,25	39,00	34,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	1,04	0,63	-	0,63
Jasa Pendidikan	P	1,23	0,84	143,29	0,86
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	1,50	0,80	36,59	0,81
Jasa Lainnya	RSTU	1,48	0,93	122,28	1,01
Pengaruh Investasi Kab Karawang Terhadap Kondisi Ekonomi Prov Jabar		1,62	0,77	2083,81	0,80

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil analisis tersebut didapatkan:

1. **Multiplier Output** : Menunjukkan seberapa besar total produksi/output di seluruh perekonomian akan meningkat jika ada kenaikan demand pada sektor tertentu. Sehingga, setiap 1 Milliar kenaikan permintaan di salah satu sektor akan mendorong kenaikan total output barang atau jasa di Karawang sebesar 1,62 Milliar.
2. **Multiplier Income** : Menunjukkan seberapa besar kenaikan total pendapatan (rumah tangga atau pekerja) yang terjadi akibat kenaikan permintaan di satu sektor. Jika terjadi peningkatan pada sektor tertentu sebanyak 1 Milliar maka terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga/pekerja sebesar 0,77 kali.

3. ***Multipiler Labor*** : Mengukur seberapa besar penyerapan tenaga kerja jika ada kenaikan permintaan pada suatu sektor. Jika terjadi peningkatan permintaan akhir pada sektor tertentu sebanyak 1 Miliar maka akan terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 2.084 Jiwa diseluruh sektor.
4. ***Multiplier Value Added*** : Mengukur seberapa besar nilai tambah bersih yang tercipta di seluruh perekonomian akibat kenaikan permintaan akhir di suatu sektor. Nilai ini mencerminkan kontribusi sektor terhadap PDB. Jika sektor tertentu meningkat permintaan akhir 1 Miliar akan memicu peningkatan total nilai tambah sebesar 0,80 Miliar di perekonomian

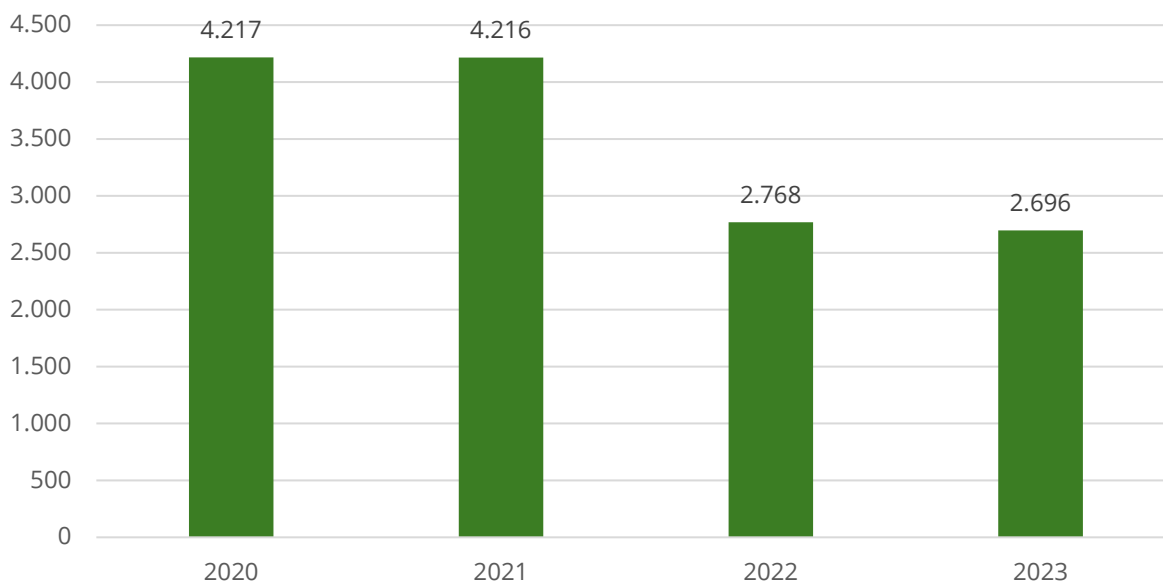
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Aspek kesehatan adalah pondasi utama perbaikan sumber daya manusia, tak terkecuali bagi SDM Kabupaten Karawang. Kondisi kesehatan dari sejak janin di dalam kandungan sampai ketika lahir dan tumbuh kembang termasuk pada kesehatan remaja putri dan ibu hamil perlu untuk diperhatikan. Pencegahan *stunting* dapat dimulai dari remaja putri melalui perbaikan gizi, perbaikan asupan zat besi, dan perbaikan pola makan.

Stunting atau kekurangan gizi kronis adalah masalah gizi yang diakibatkan dari kekurangan asupan gizi dari makanan yang berlangsung cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. *Stunting* adalah keadaan ketika tinggi badan anak lebih rendah dari rata-rata yang seharusnya pada usia tersebut akibat kekurangan nutrisi. *Stunting* dapat terjadi dimulai sejak janin ada dalam kandungan dan baru dapat terlihat saat anak berusia dua tahun.

30% anak di bawah usia 5 tahun di Kabupaten Karawang mengalami *stunting* yang sering dipicu oleh pola makan kurang bergizi dan praktik pola asuh yang tidak optimal. Selain itu juga disebabkan kurangnya asupan makanan, adanya penyakit infeksi, kurangnya pengetahuan gizi pada ibu hamil dan anak, kondisi anemia pada remaja putri, pola asuh tidak sesuai kelompok umur, ketersediaan pangan dalam rumah tangga dalam jumlah kurang, pelayanan kesehatan kurang serta sanitasi dan lingkungan buruk. Berikut adalah angka *stunting* di Kabupaten Karawang.

Angka Stunting Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2023

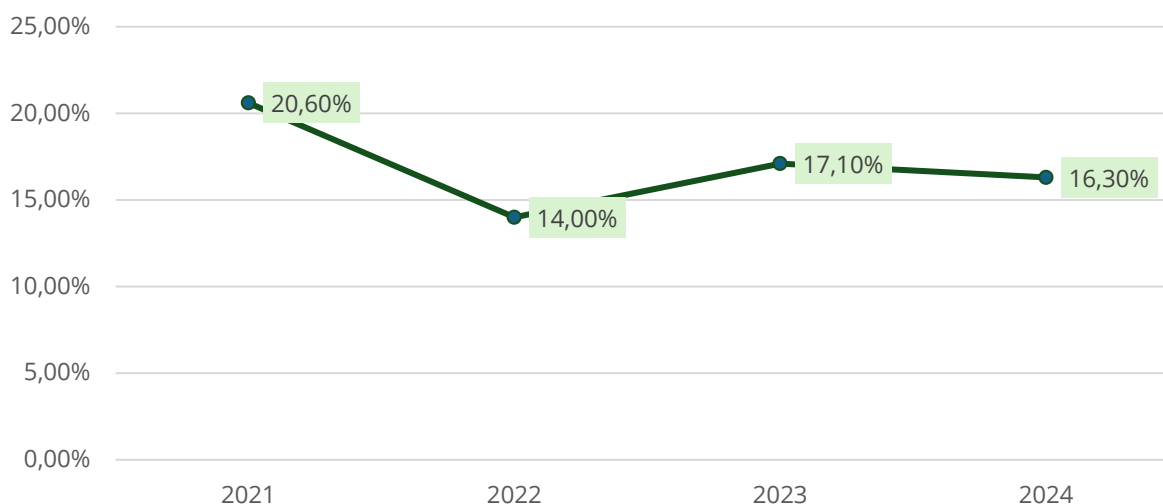


Gambar II-93 Angka Stunting Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2025

Selain itu, angka prevalensi *stunting* di Kabupaten Karawang adalah.

Indeks Prevalensi *Stunting* Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 - 2024



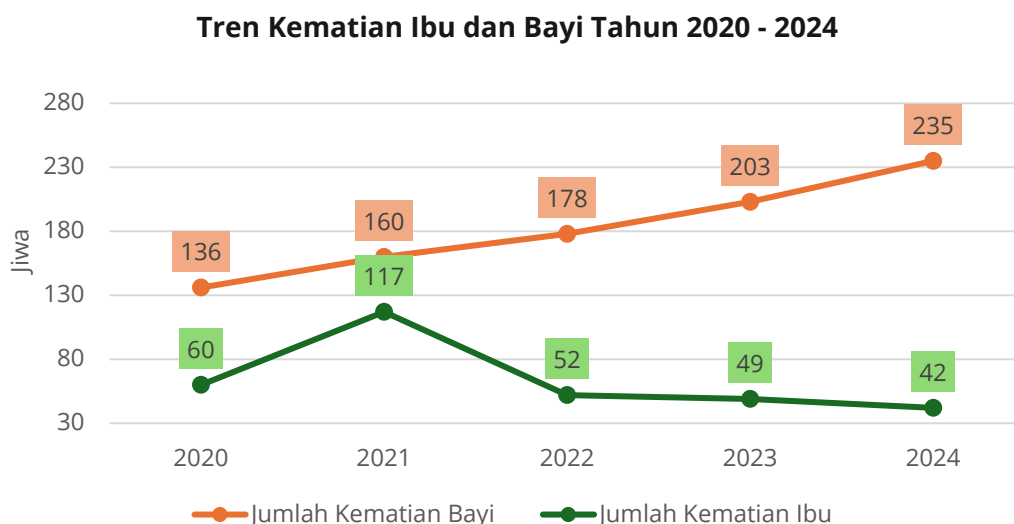
Gambar II-94 Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 - 2024

Sumber: LAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2025

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, prevalensi dan jumlah kasus stunting di Kabupaten Karawang menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.217 anak balita mengalami stunting, dan jumlah ini relatif stabil di tahun 2021 dengan 4.216 kasus, saat prevalensi stunting tercatat sebesar 20,6 %. Memasuki tahun 2022, upaya intervensi mulai menunjukkan hasil positif, ditandai dengan penurunan kasus menjadi 2.768 anak dan prevalensi menurun drastis ke 14,0 %. Namun, pada tahun 2023, meskipun jumlah kasus sedikit turun menjadi 2.696 anak, prevalensi justru meningkat menjadi 17,1 %, yang kemungkinan disebabkan oleh perubahan jumlah

populasi balita atau cakupan pengukuran yang lebih luas. Terbaru, pada tahun 2024, prevalensi stunting kembali menurun ke 16,3 %, mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penanganan gizi anak. Secara keseluruhan, selama periode 2020–2023, Kabupaten Karawang berhasil menurunkan jumlah kasus stunting sebanyak 1.521 anak, atau sekitar 36 persen, meskipun fluktuasi angka prevalensi menunjukkan perlunya strategi yang lebih konsisten dan komprehensif.

Selain itu, Angka kematian pada ibu dan bayi di Kabupaten Karawang periode 2020 – 2024.



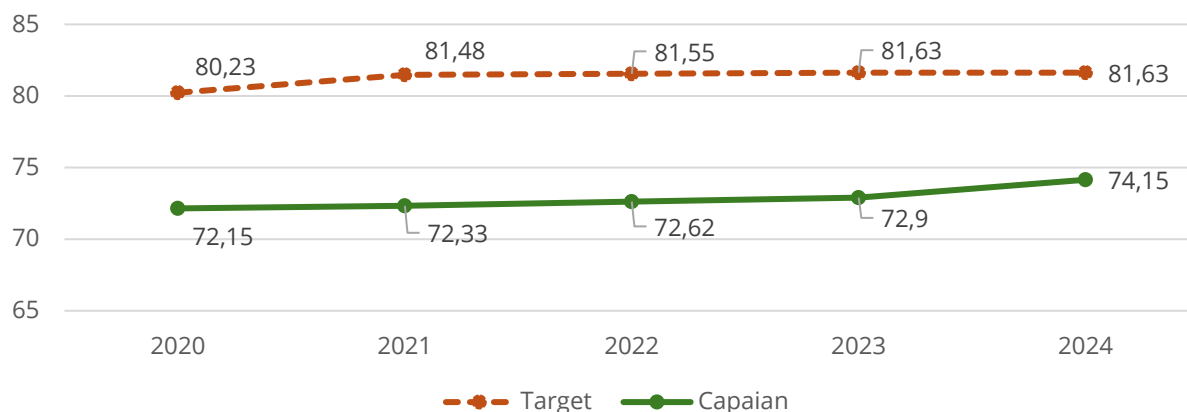
Gambar II-95 Tren Kematian Ibu dan Bayi Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah kematian bayi semakin **meningkat** setiap tahunnya dengan **pertumbuhan rata-rata sebesar 14,68%**. Di sisi lain, jumlah kematian ibu justru mengalami penurunan.

Indikator angka harapan hidup memberikan gambaran rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Beberapa faktor yang memengaruhi angka harapan hidup di masyarakat meliputi tingkat kelahiran dan kematian, layanan kesehatan, pengelolaan gizi, serta perkembangan dan penyebaran penyakit menular maupun tidak menular. Berikut ini disajikan data target dan capaian angka harapan hidup tersebut.

Target dan Capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Karawang (UHH) Tahun 2020 - 2024



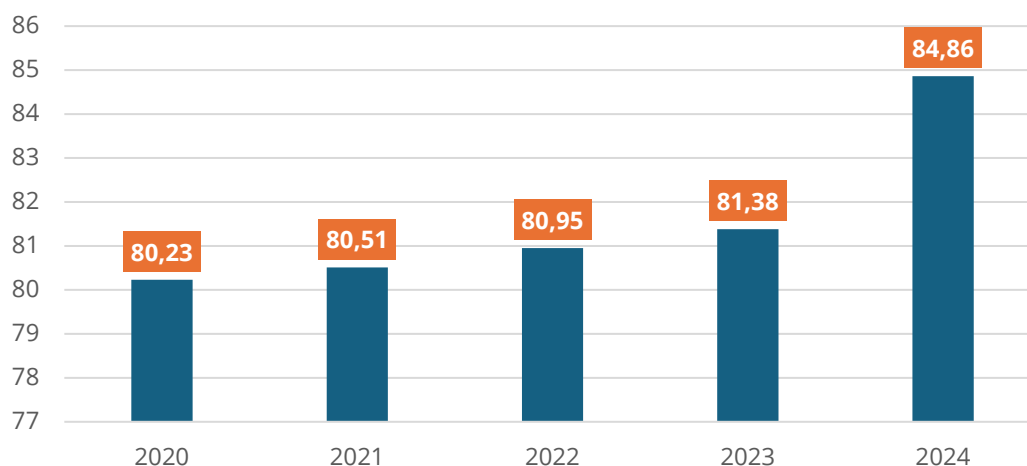
Gambar II-96 Target dan Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data target dan capaian angka harapan hidup (UHH) di Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa meskipun capaian angka harapan hidup terus meningkat dari 72,15 tahun pada 2020 menjadi 74,15 tahun pada 2024, capaian tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, yaitu sekitar 81,63 tahun pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesehatan masyarakat secara umum, tetapi masih terdapat gap yang perlu dikejar melalui peningkatan akses layanan kesehatan, perbaikan gizi, dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular.

Indeks Kesehatan merupakan indikator yang memberikan gambaran menyeluruh terkait tingkat kesehatan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai aspek, mulai dari status gizi, ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan, hingga pengendalian penyakit. Indeks kesehatan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 - 2024 Kabupaten Karawang sebagai berikut.

Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

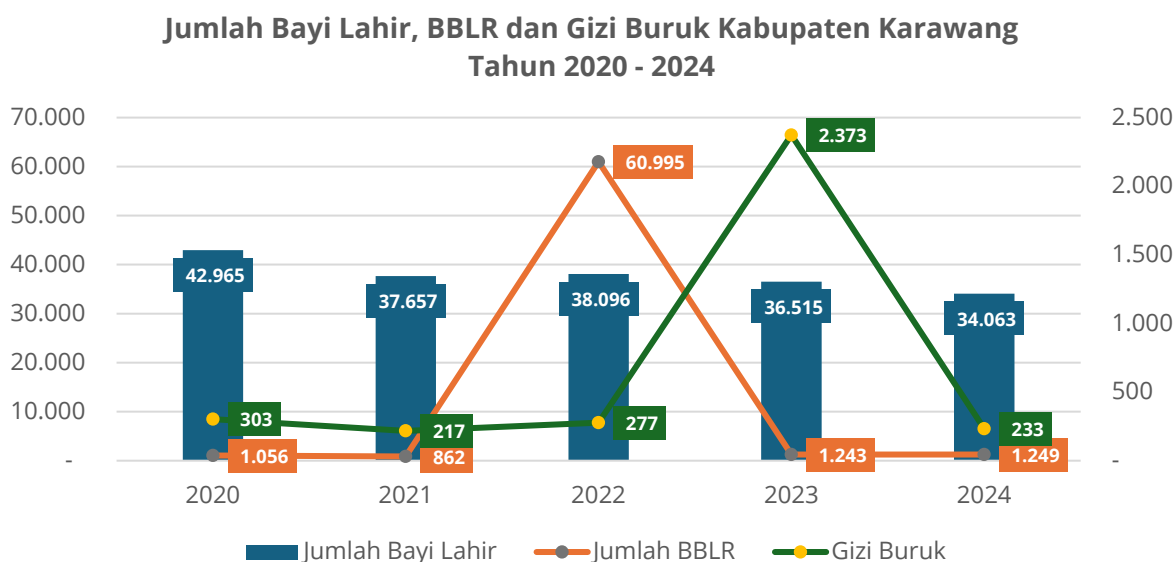


Gambar II-97 Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 Indeks Kesehatan mencapai 80,23 sementara pada tahun 2024 mencapai 84,86. Hal ini menandakan intervensi pemerintah daerah yang mengalami peningkatan dalam menciptakan masyarakat yang sehat.

Bayi-bayi yang lahir tidak seluruhnya sehat. Terdapat bayi dalam kondisi Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau lahir dengan berat badan di bawah 2,5 kilogram yang dapat disebabkan oleh kelahiran prematur, suplai nutrisi dan oksigen terganggu, dan kondisi gizi ibu hamil. Faktor risiko lainnya antara lain preeklampsia atau hipertensi kehamilan, infeksi kehamilan, kondisi diabetes ibu hamil, perokok aktif atau pasif, dan stres pada ibu hamil, usia ibu hamil terlalu muda atau terlalu tua, jarak kehamilan yang berdekatan, dan permasalahan di plasenta. BBLR dapat berisiko pada *stunting* yang akan mengganggu tumbuh kembang anak, perkembangan otak dan daya tahan pada anak. Di sisi lain, faktor risiko BBLR juga dapat menyebabkan gizi buruk pada anak. Berikut jumlah BBLR dan gizi buruk di Kabupaten Karawang.



Gambar II-98 Jumlah Bayi Lahir, BBLR, dan Gizi Buruk Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

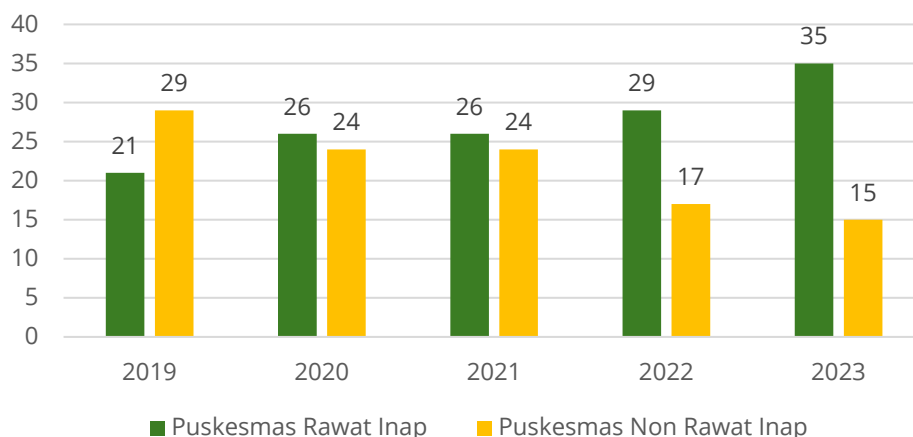
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah BBLR terhadap jumlah bayi lahir berada di rentang 2% - 4%, begitu juga dengan kasus gizi buruk terhadap jumlah bayi lahir berada di rentang 1% - 6%.

Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2018 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Karawang menunjukkan grafik yang cenderung meningkat bagi puskesmas rawat inap, namun berlaku sebaliknya bagi puskesmas non rawat inap.

Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2023



Gambar II-99 Jumlah Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2025

Target nasional rasio puskesmas jumlah penduduk adalah 1:30.000 penduduk di mana, melihat dari rasio eksisting jumlah puskesmas terhadap Kabupaten Karawang masih berada di bawah target nasional.

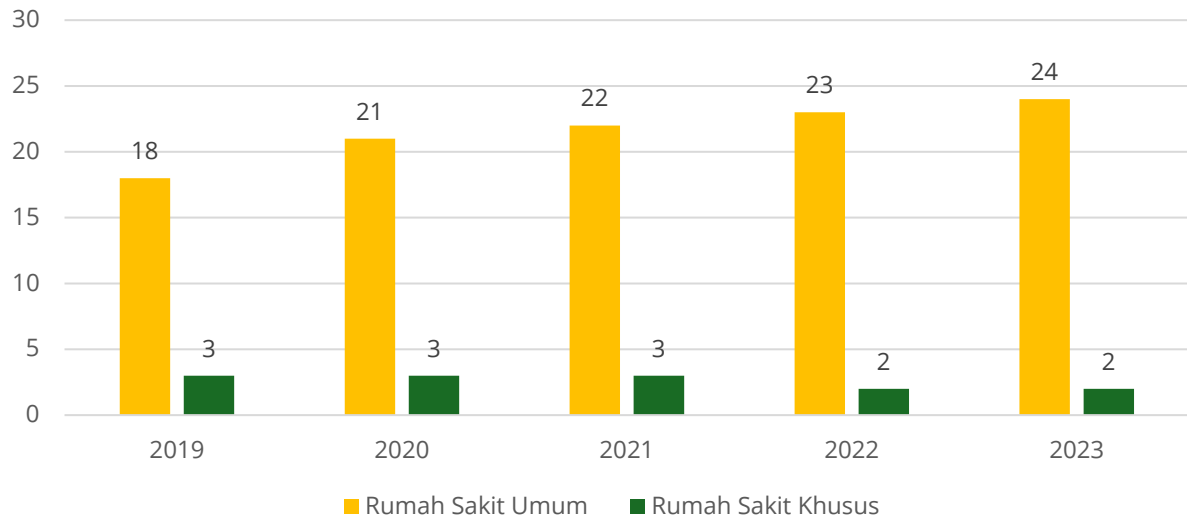
Tabel II-44 Jumlah Eksisting dan Ideal Puskesmas di Kabupaten Karawang

Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
Puskesmas Eksisting	50	50	50	46	50
Kepadatan Penduduk	2.353.915	2.439.085	2.468.576	2.505.147	2.526.002
Puskesmas Ideal	78	81	82	84	84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2025

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, di mana jumlah rumah sakit umum bertambah 1 selama 5 tahun hingga terdapat 23 RSU pada tahun 2023.

Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Karawang 2019 - 2023

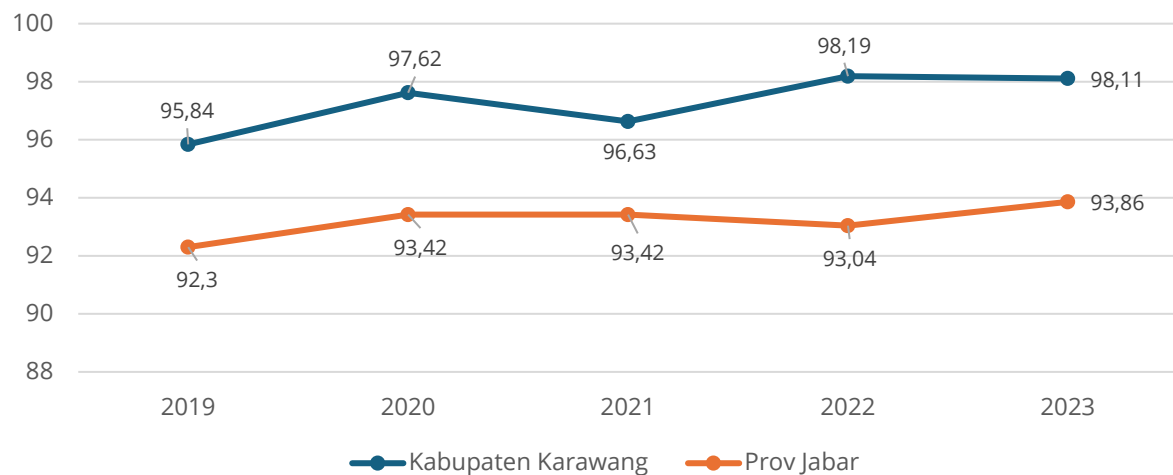


Gambar II-100 Jumlah Rumah Sakit Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2025

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi hak semua orang. Pada Kabupaten Karawang jumlah rumah tangga yang terhubung dengan akses air minum layak kerap mengalami kenaikan dengan nilai capaian di atas nilai provinsi.

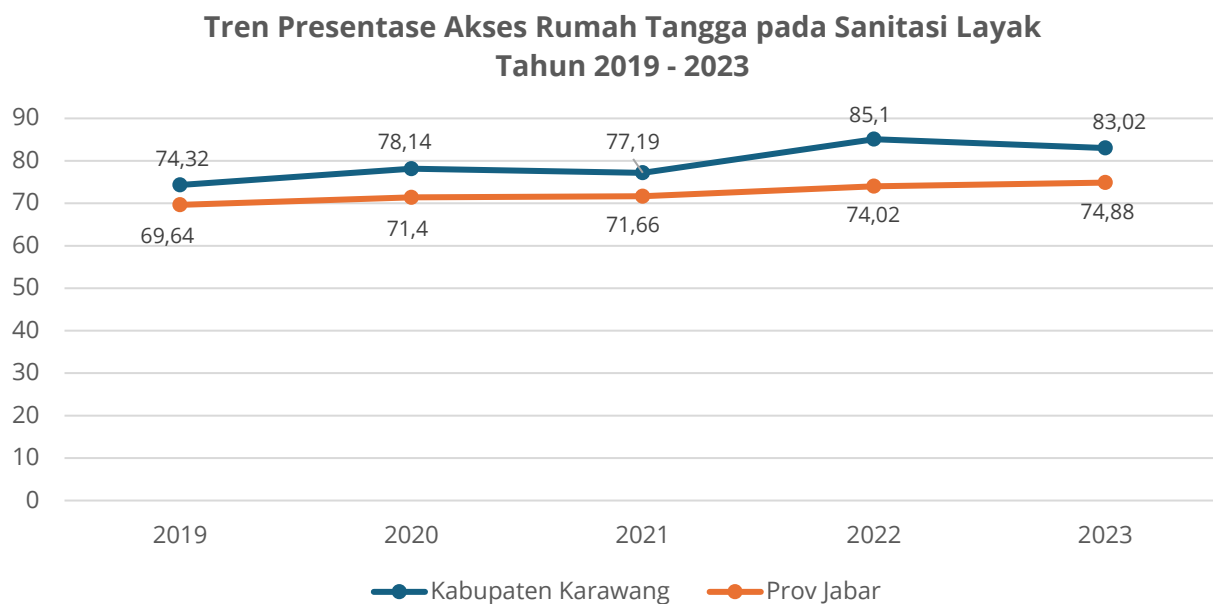
Presentase Rumah Tangga Terhadap Air Layak Minum pada Air Bersih Tahun 2019 - 2023



Gambar II-101 Presentase Akses Rumah Tangga Terhadap Air Layak Minum pada Air Bersih Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Nilai capaian Kabupaten Karawang dalam menyediakan pelayanan terkait sanitasi layak diketahui sudah lebih baik dari nilai provinsi dengan akses mencapai 80% rumah tangga pada tahun 2023.



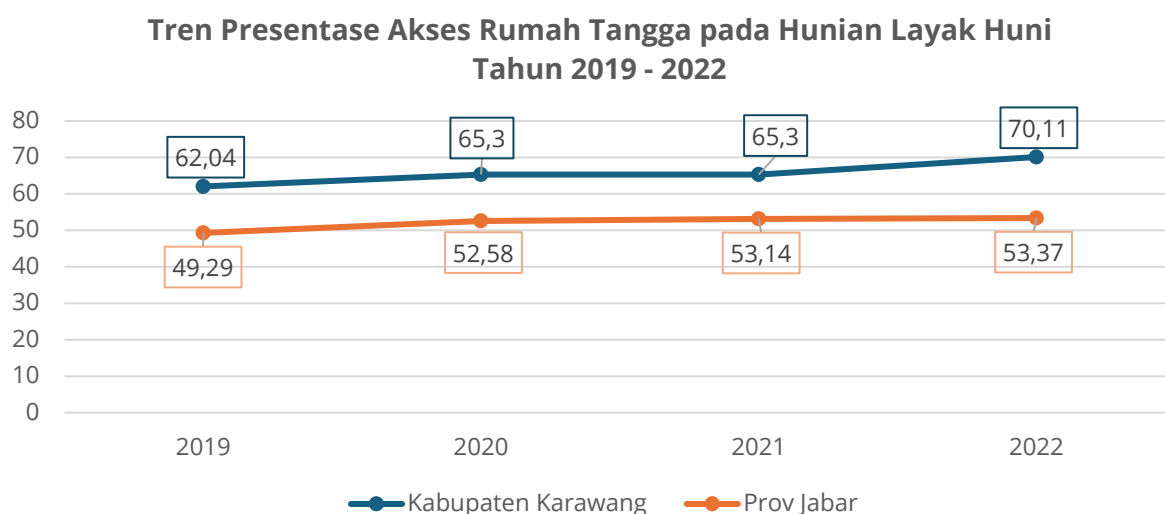
Gambar II-102 Tren Persentase Akses Rumah Tangga pada Sanitasi Layak Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Pada 2019, rumah tangga dinyatakan memiliki akses terhadap hunian layak huni apabila memenuhi kriteria:

- Luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita
- Memiliki akses terhadap air minum layak
- Memiliki akses terhadap sanitasi layak
- Ketahanan bangunan

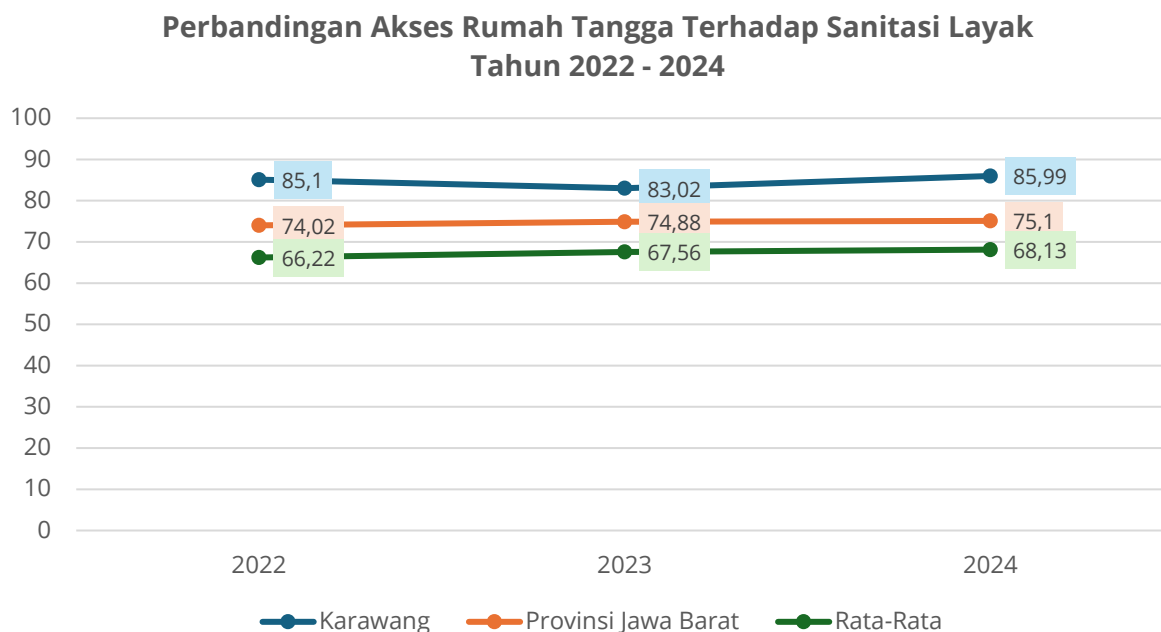
Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak huni di Kabupaten Karawang berada di atas nilai capaian provinsi yang mencapai 70,11% pada 2022 atau terdapat 29,89 persen rumah tangga yang belum mengakses hunian layak.



Gambar II-103 Tren Persentase Akses Rumah pada Hunian Layak Huni Tahun 2019 - 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data BPS Jawa Barat, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan pada tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan tren positif dalam akses sanitasi di wilayah Jawa Barat. Berikut data tiap Kab/Kota di Jawa Barat.



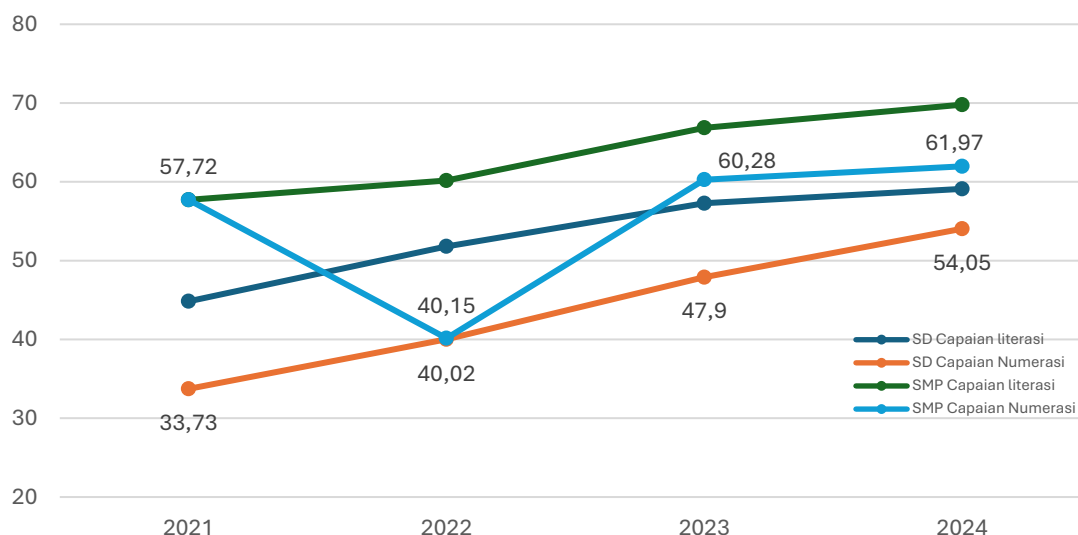
Gambar II-104 Perbandingan Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Tahun 2022 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Dalam mendukung cita cita Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat diukur melalui skor PISA. Dalam penilaian PISA, dilakukan dalam tiga domain utama yakni, kecerdasan literasi membaca, matematika, dan sains. Selain itu terdapat Inovasi Digital dalam mendukung anak bangsa yang cerdas dan berkarakter.

Kemampuan literasi numerasi kini menjadi parameter perhitungan untuk memperkirakan besar kemampuan siswa dalam memahami penggunaan angka dan simbol untuk penyelesaian permasalahan di kehidupan nyata. Indeks literasi numerasi menunjukkan kemampuan literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP Kabupaten Karawang masih jauh dari cukup.



Gambar II-105 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD dan SMP Tahun 2021 - 2024

Sumber: Rapor Pendidikan, 2025

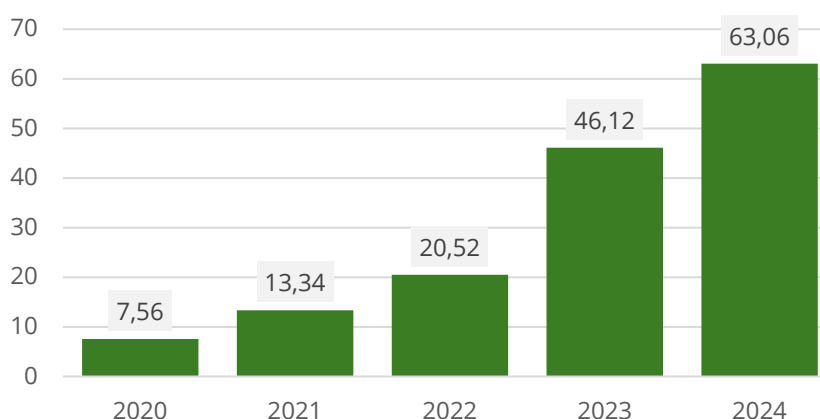
Tabel II-45 Tabulasi Indeks Literasi Numerasi SD - SMP

Tahun	SD		SMP	
	Capaian literasi	Capaian Numerasi	Capaian literasi	Capaian Numerasi
2021	44,84	33,73	57,72	57,72
2022	51,81	40,02	60,17	40,15
2023	57,28	47,9	66,86	60,28
2024	59,11	54,05	69,8	61,97

Sumber: Rapor Pendidikan, 2025

Secara general, Kabupaten Karawang memiliki indeks pembangunan literasi masyarakat yang jauh dari angka 100 sebagai parameter tertinggi. Berdasarkan tingkatan skor, nilai IPLM Kabupaten Karawang berada pada **rentang sangat rendah**.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020 - 2024



Gambar II-106 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Pada 2023, sebesar 96,61% penduduk Kabupaten Karawang telah terdaftar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau setara dengan 2.424.553 penduduk yang

akhirnya berhasil membawa Kabupaten Karawang mencapai predikat *Universal Health Coverage* (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Sisanya, sebesar 3,09% penduduk atau setara dengan 77.618 penduduk Kabupaten Karawang belum terdaftar BPJS yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pada tahun 2023, pemerintah menggelontorkan dana melalui kegiatan program jaminan sosial sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Tabel II-46 Jenis Program Perlindungan Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2023

Jenis Program Perlindungan Sosial	Persentase Rumah Tangga yang Menerima
Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako)	8,58
Program Indonesia Pintar (PIP)	N/A
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) / Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	8,64
Program Keluarga Harapan (PKH)	10,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Sebanyak 8,58 persen penduduk mendapat bantuan pangan, dan 8,64 persen penduduk mendapatkan bantuan melalui program Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera dan 10,15 Persen mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan.

Tabel II-47 Presentase Rumah Tangga menurut Jenis Jaminan Sosial Tahun 2023

Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga (%)
Jaminan Pensiun/Hari Tua	9,70
Asuransi/PHK	9,54

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran akan jaringan pengaman sosial di Kabupaten Karawang masih cukup rendah.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Jumlah penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan agama secara proporsi mayoritas memeluk Islam.

Tabel II-48 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 2020 - 2024

Tahun	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Lainnya
2020	2.172.254	18.094	8.846	1.120	6.354	155
2021	2.164.103	23.794	10.164	1.223	5.848	63
2022	2.167.245	26.959	11.738	1.460	5.973	0
2023	2.157.209	22.350	11.047	1.797	11.273	343
2024	2.489.386	35.040	8.483	464	5.765	243

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang 2020 - 2024

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Karawang sebagai berikut.

Tabel II-49 Jumlah Tempat Beribadah 2020 - 2024

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng	Lintang
2020	1980	5144	26	2	1	10	2	1

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng	Lintang
2021	1765	4677	28	1	1	6	2	1
2022	2050	4907	20	14	2	6	4	1
2023	2050	4907	20	14	2	6	4	1
2024	2050	4907	20	9	2	6	4	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Karawang 2020 - 2024

Kabupaten Karawang memiliki kebudayaan yang cukup beragam. Banyaknya jenis kesenian dan budaya yang masih melekat menjadi bukti nyata keberagaman budaya yang dimiliki. Hal ini menjadi bukti bagaimana Kabupaten Karawang memiliki potensi dalam melestarikan seni dan budaya yang ada.

Tabel II-50 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	36	36	36	36	36
Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	99	28	20	22	36
Jumlah grup kesenian	1.138	1.368	1.408	1.510	1.603
Jumlah Sanggar Budaya/Seni	39	56	56	56	53
Jumlah Pelaku Budaya	13.845	14.500	14.500	2.630	2.815

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, 2025

Jumlah grup kesenian, sanggar budaya/seni, dan jumlah pelaku budaya cenderung meningkat dalam waktu 5 tahun terakhir, hal ini menunjukkan bagaimana kesadaran masyarakat akan kebutuhan pelestarian dan pengelolaan kesenian dan budaya kian meningkat seiring bertambahnya waktu.

Selain melestarikan kesenian dan budaya yang ada, mengelola situs cagar budaya untuk tetap terjaga juga merupakan salah satu bentuk menjaga kebudayaan yang ada. Tercatat Kabupaten Karawang memiliki beberapa situs cagar budaya yang terus dikelola sebagai berikut.

Tabel II-51 Jumlah Situs Sejarah dan Cagar Budaya Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik	33	33	33	33	33

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang, 2025

Kepemudaan dan olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun karakter, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 20 (Tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Dalam mendukung hal tersebut Kabupaten Karawang memberikan fasilitas berupa pembinaan dan perbaikan sarana prasarana olahraga yang meningkat tiap tahunnya.

Tabel II-52 Capaian Kinerja Peningkatan Peran serta Kepemudaan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	50	52	52	250	276
Jumlah Pembinaan Wirausaha Pemuda	43.930	44.320	44.790	N/A	63.461
Jumlah Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	88.174	92.390	98.480	131.396	131.396
Jumlah Organisasi Fungsional Olahraga Masyarakat	80	82	84	85	82

Sumber: Badan Kesbangpol dan Disdikpora Kabupaten Karawang Tahun 2024

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Kabupaten Karawang tahun 2020 hingga 2024 juga turut mengalami kenaikan. Pada tahun 2023, jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 5 cabang olahraga.

Tabel II-53 Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	49	50	52	52	58

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 2024

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Keluarga adalah unit terkecil di sebuah lingkungan populasi. Anak-anak akan tumbuh dan mendapat pendidikan pertamanya di dalam keluarga. Apabila terdapat peran yang tidak berfungsi dalam struktur keluarga, maka fungsi keluarga menjadi tidak utuh lagi.

Peran keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan anak-anak di dalamnya. Dukungan keluarga khususnya orang tua juga berpengaruh ke kualitas pendidikan anak, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Karawang. Salah satu penyebab tingkat putus sekolah dan keinginan melanjutkan pendidikan adalah *mindset* orang tua yang menganggap pendidikan tidak penting. Selain berdampak pada kualitas pendidikan,

peran orang tua juga akan menjaga dan membentuk anak-anak agar terhindar dari permasalahan di lingkungan sosial. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Karawang selama 2020 – 2024 yang tidak terbatas pada anak-anak sebagai berikut.

Tabel II-54 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2020 - 2023

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024
Balita Terlantar	22.943	22.943	2	6	10
Anak Terlantar	4.515	4.515	35	83	2.927
Anak Nakal/ Brat	656	656	-	-	-
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	14.939	14.939	87	163	790
Korban Tindak Kekerasan	154	154	-	1	1
Lanjut Usia Terlantar	7.363	7.363	237	1.641	4.119
Penyandang Cacat	1.336	1.336	136	1.294	5.776
Wanita Tuna Susila	142	142	-	1	1
Pengemis	168	168	5	6	21
Gelandangan	243	243	1	7	12
Eks Napi	106	106	1	2	5
Korban NAPZA	629	629	-	1	2
Keluarga Fakir Miskin	256.120	256.120	279	1.541	6.566
Keluarga dengan Kondisi Perumahan dan Lingkungan Tidak Layak	-	-	-	-	-
Korban Bencana Alam	6.008	6.008	-	68	158
Korban Bencana Sosial	187	187	-	5	6
Pekerja Migran Bermasalah	379	379	-	1	4
Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	501	501	2	1	9
Anak Jalanan	176	176	-	1	2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 – 2023

Terdapat beberapa kategori yang berhubungan dengan anak-anak, hal ini menunjukkan kurangnya sinergi antara tiga sentra pendidikan (sekolah, masyarakat, dan keluarga).

Gender menjadi salah satu isu yang rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial. Guna melihat kesetaraan gender suatu wilayah dapat dilihat dari indeks ketimpangan gender yang jika nilainya mendekati satu atau sama dengan 1 maka ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki tergolong besar.

Tabel II-55 Indeks Ketimpangan Gender

Tahun	Karawang	Jawa Barat
2020	0,477	0,489
2021	0,504	0,493
2022	0,485	0,490
2023	0,498	0,482
2024	0,478	0,458

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Nilai indeks ketimpangan gender di atas belum mencapai 1 namun sudah setengah menuju 1 sehingga ketimpangan gender belum tergolong besar.

Pembangunan kini mulai memperhatikan keterlibatan gender. Melalui indeks pembangunan gender, dapat diketahui apakah terdapat kesetaraan dalam hasil pembangunan yang apabila nilainya besar maka kesetaraan terjalin sempurna. Nilai indeks pembangunan gender Kabupaten Karawang rentang 2020 – 2024 hampir mendekati 100%.

Tabel II-56 Indeks Pembangunan Gender

Tahun	Karawang	Jawa Barat
2020	90,79	89,90
2021	91,06	90,17
2022	91,32	90,69
2023	91,85	90,91
2024	91,98	91,04

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Keterlibatan perempuan secara aktif di perekonomian wilayah dan perpolitikan diukur dari indeks pemberdayaan gender yang menunjukkan berapa besar pengaruh dan kontrol. Besar indeks pemberdayaan gender Kabupaten Karawang rentang 2020 – 2024 masih di atas 50% dari 100.

Tabel II-57 Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Karawang	Jawa Barat
2020	74,42	70,24
2021	74,83	70,62
2022	73,28	71,22
2023	70,65	71,74
2024	65,80	72,76

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

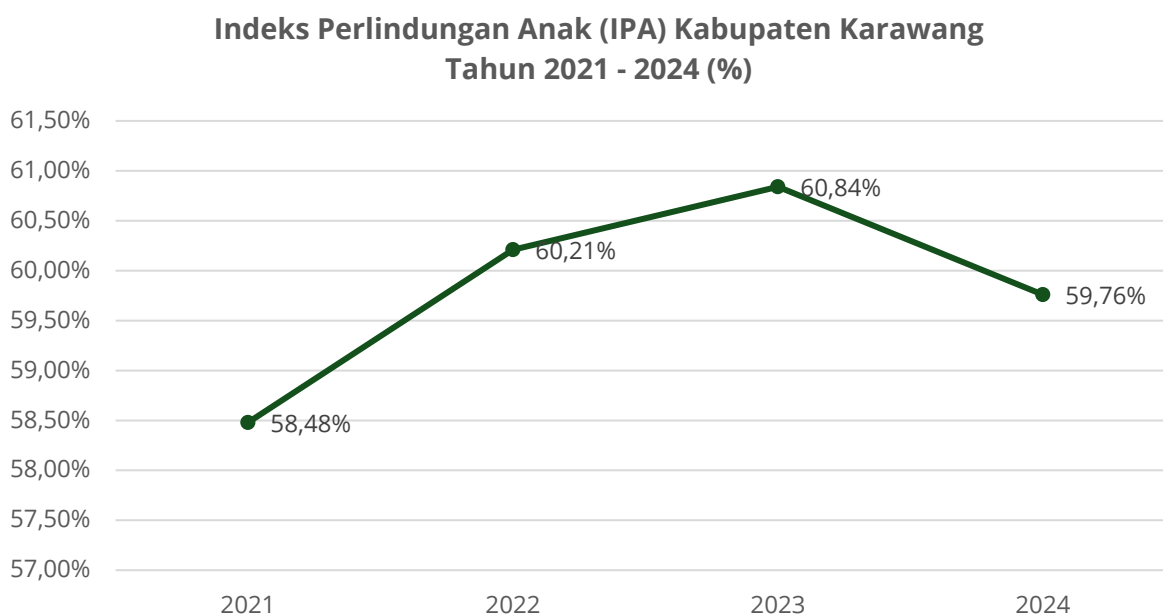
Komponen indeks pemberdayaan gender adalah keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Komponen indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Karawang jenis keterlibatan perempuan dan sumbangan pendapatan perempuan mengalami penurunan pada tahun 2024 dan mengalami peningkatan pada jenis perempuan sebagai tenaga profesional di tahun 2024.

Tabel II-58 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Karawang			Jawa Barat		
	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Daerah	Keterlibatan Perempuan Di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	Sumbangan Pendapatan Daerah
2020	28,00	52,01	28,42	20,83	43,02	30,10
2021	28,00	51,61	28,58	20,83	45,35	30,04
2022	28,00	40,87	28,29	21,85	42,91	30,00
2023	24,00	37,12	28,30	22,69	43,40	29,62
2024	16,00	42,71	27,96	22,69	45,79	29,93

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Di sisi lain, pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari peran penting anak-anak sebagai generasi penerus yang akan menentukan masa depan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah penting untuk menjamin kualitas pembangunan anak-anak adalah dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Hal ini diwujudkan melalui pengukuran menggunakan Indeks Perlindungan Anak (IPA). IPA terdiri dari dua indikator utama, yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). IPHA mencakup empat klaster penilaian, yakni: 1) hak sipil dan kebebasan; 2) lingkungan keluarga serta pengasuhan alternatif; 3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; serta 4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan aktivitas budaya. Sementara itu, IPKA terdiri dari satu klaster utama yang berfokus pada perlindungan anak terhadap situasi khusus.

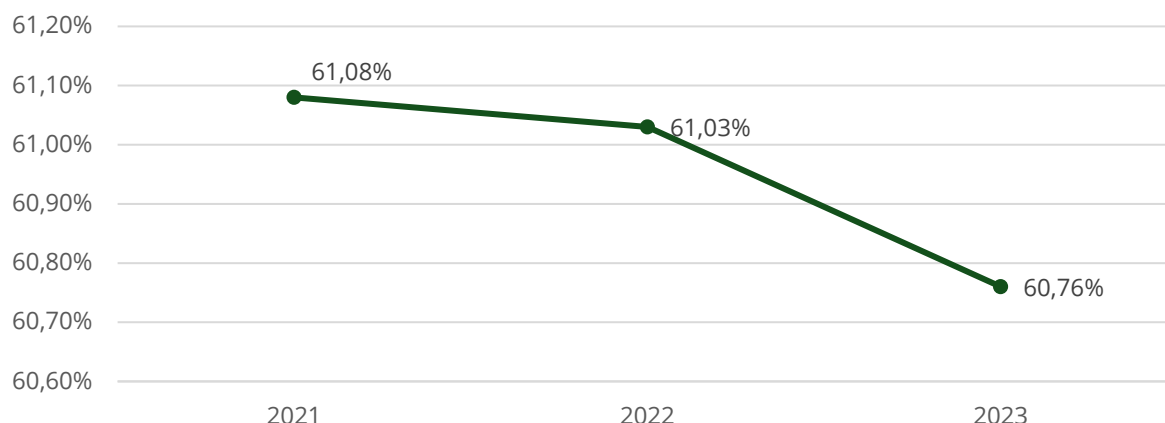


Gambar II-107 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2024 (%)

Sumber: BKKBN, 2025

Dalam periode empat tahun terakhir, capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Karawang menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada awal periode. Pada tahun 2021, IPA Karawang berada pada angka 58,48, kemudian mengalami kenaikan menjadi 60,21 pada tahun 2022 dan mencapai nilai tertinggi sebesar 60,84 di tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 59,76. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, upaya yang konsisten dan menyeluruh tetap dibutuhkan untuk menjaga serta meningkatkan kualitas perlindungan anak di Kabupaten Karawang secara berkelanjutan.

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2023 (%)

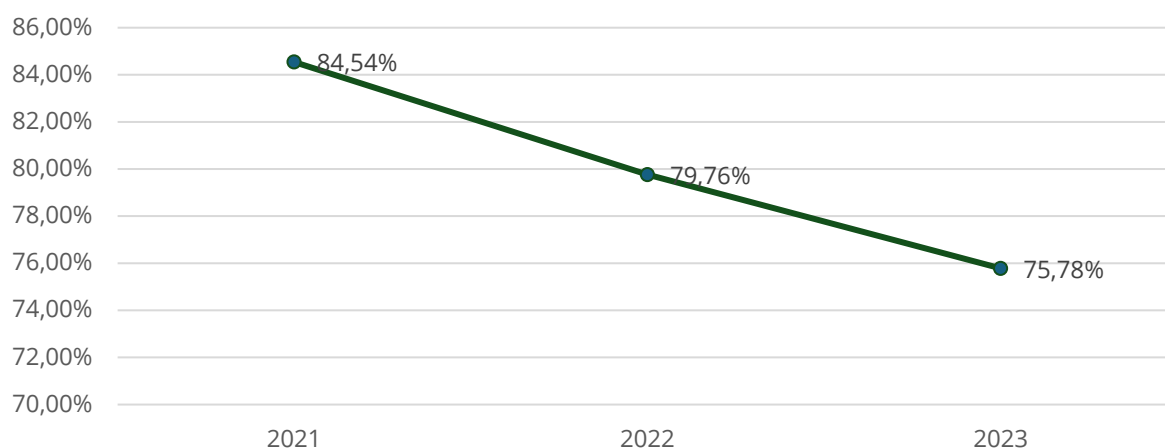


Gambar II-108 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%)

Sumber: BKKBN, 2025

Selama tiga tahun terakhir, capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) di Kabupaten Karawang menunjukkan tren penurunan tipis yang perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2021, IPHA tercatat sebesar 61,08, kemudian sedikit menurun menjadi 61,03 pada tahun 2022, dan kembali turun ke angka 60,76 di tahun 2023. Meskipun penurunannya tergolong kecil, tren ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan dan intervensi yang lebih terarah dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam klaster hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan, serta pendidikan dan kegiatan budaya. Upaya berkelanjutan perlu dilakukan agar kualitas pemenuhan hak anak dapat terus meningkat sejalan dengan tujuan pembangunan anak yang berkelanjutan.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2023 (%)

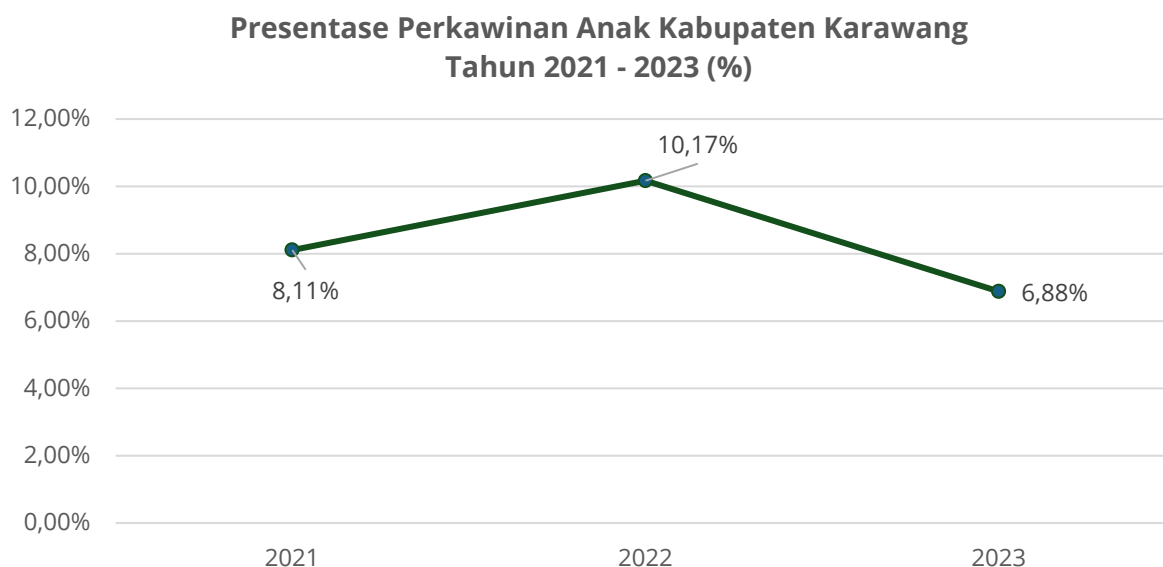


Gambar II-109 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%)

Sumber: BKKBN, 2025

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Kabupaten Karawang mengalami penurunan bertahap selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, IPKA berada di angka 84,54, namun menurun cukup signifikan menjadi 79,76 pada tahun 2022. Penurunan ini

berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 75,78. Tren penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam upaya perlindungan anak terhadap situasi khusus seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan kondisi kerentanan lainnya. Penurunan skor IPKA ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk melalui peningkatan deteksi dini kasus, respons layanan, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam upaya perlindungan anak secara komprehensif.

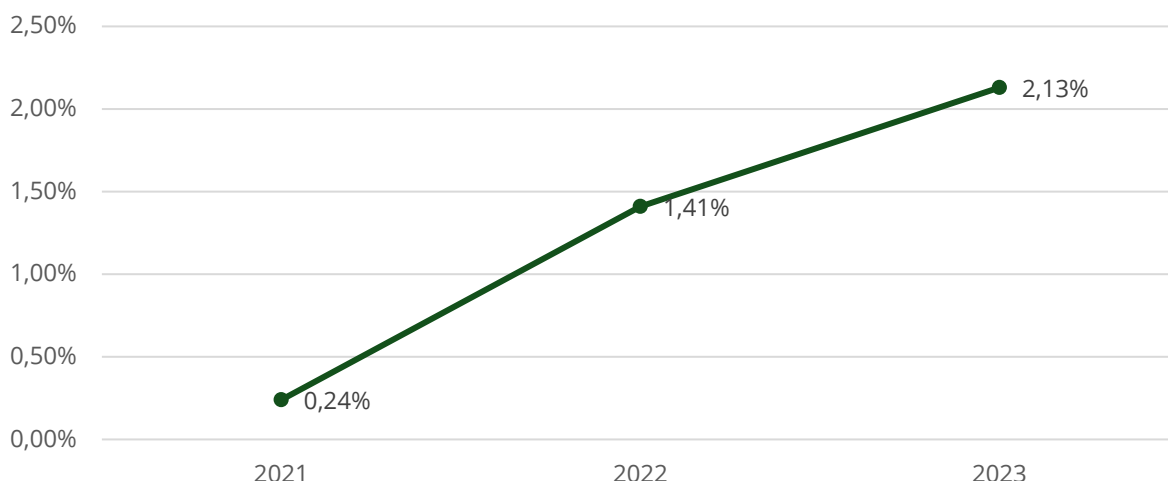


Gambar II-110 Presentase Perkawinan Anak Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2023 (%)

Sumber: BKKBN, 2025

Persentase perkawinan anak di Kabupaten Karawang menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka perkawinan anak tercatat sebesar 8,11 %, kemudian mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 10,17 %, yang mengindikasikan tingginya praktik perkawinan usia dini di daerah tersebut. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 6,88 %, memberikan sinyal positif atas berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan, seperti edukasi publik, penguatan regulasi, serta peningkatan peran keluarga dan lembaga pendidikan. Meski demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa perlindungan anak dari praktik perkawinan dini tetap menjadi isu penting yang memerlukan intervensi berkelanjutan dan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat.

Pengasuhan Anak Tidak Layak di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2023 (%)

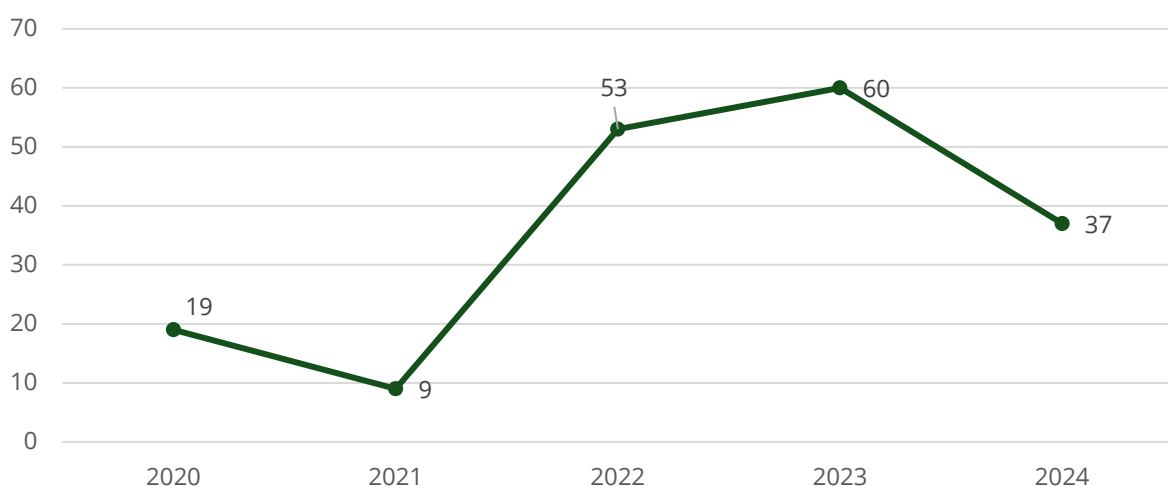


Gambar II-111 Pengasuhan Anak Tidak Layak di Kabupaten Karawang Tahun 2021 - 2023

Sumber: BKKBN, 2025

Persentase pengasuhan anak tidak layak di Kabupaten Karawang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka pengasuhan tidak layak masih berada di angka rendah yaitu 0,24 %, namun meningkat tajam menjadi 1,41 % pada tahun 2022, dan kembali naik ke 2,13 % pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks dalam praktik pengasuhan anak, yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial-ekonomi keluarga, kurangnya edukasi pengasuhan yang tepat, serta lemahnya pengawasan terhadap pola asuh di lingkungan sekitar.

Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024



Gambar II-112 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: BKKBN, 2025

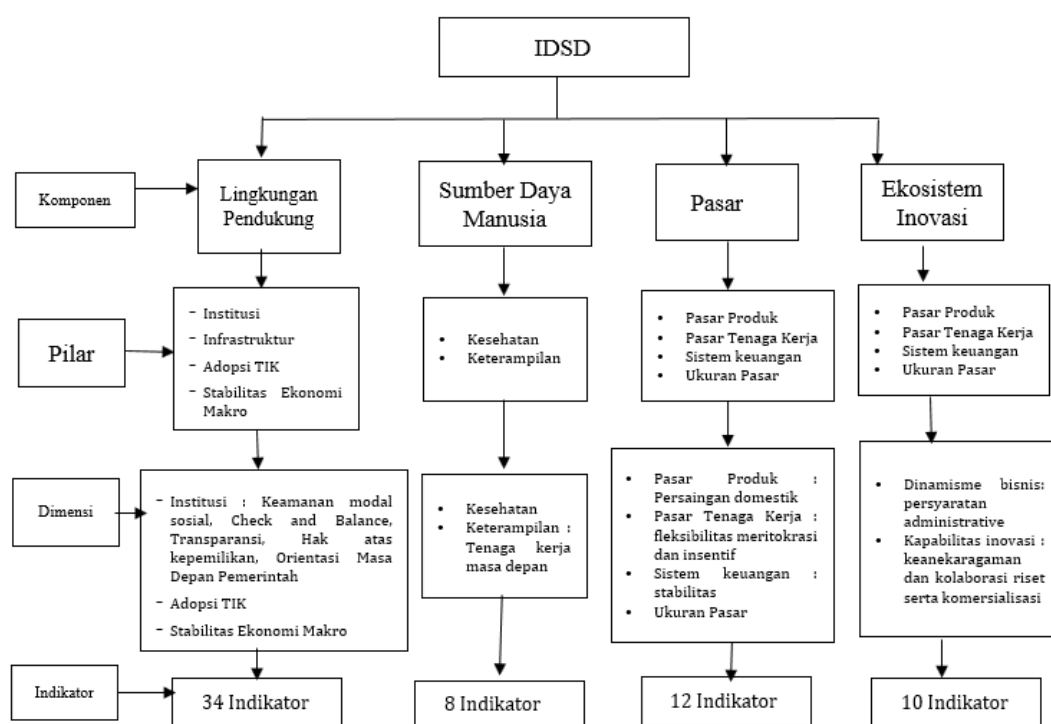
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat

sebanyak 19 kasus, kemudian menurun drastis menjadi 9 kasus pada tahun 2021. Namun, tren ini berubah signifikan pada tahun 2022 dengan lonjakan kasus menjadi 53, yang terus meningkat menjadi 60 kasus pada tahun 2023 — angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami penurunan menjadi 37 kasus, yang meskipun menurun, tetap tergolong tinggi dibandingkan awal periode. Tren ini mencerminkan dinamika kompleks dalam perlindungan anak, di mana peningkatan laporan bisa mencerminkan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi, namun juga menandakan perlunya penguatan sistem pencegahan, deteksi dini, dan pemulihan bagi korban kekerasan anak secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu ukuran yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menilai dan membandingkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan pembangunan guna menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Berikut adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karawang dari BRIN.

Kekuatan utama dari konsep pengukuran daya saing IDSD terletak pada kemampuannya dalam mengombinasikan perspektif mikro di level perusahaan/industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (*basic requirement factors*), faktor penguat efisiensi (*efficiency enhancers*), dan faktor inovasi dan kecanggihan (*innovation and shopistication factors*). Ketiga faktor penentu daya saing ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing.



Gambar II-113 Komponen Indeks Daya Saing Daerah

Sumber: Global Competiveness Index, 2019

Pada perhitungan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), terdapat beberapa komponen utama yang diukur, masing-masing terdiri atas pilar-pilar sebagai berikut:

1. Lingkungan Pendukung, meliputi empat pilar, yaitu:
 - Institusi: mencakup aspek politik, hukum, dan keamanan.
 - Infrastruktur: sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas perekonomian.
 - Adopsi TIK: faktor determinan bagi kemajuan menuju Industri 4.0.
 - Stabilitas ekonomi makro: meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup.
2. Pasar, meliputi empat pilar, yaitu:
 - Pasar produk: mendorong efisiensi dalam sistem produksi.
 - Pasar tenaga kerja: mampu menekan pengangguran dengan menciptakan kesempatan kerja.
 - Sistem keuangan: merefleksikan kapasitas lembaga perbankan dan non-perbankan dalam memediasi aktivitas ekonomi.
 - Ukuran pasar: memperkuat struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Sumber Daya Manusia, meliputi dua pilar, yaitu:
 - Kesehatan: merepresentasikan kualitas hidup manusia, diukur melalui angka harapan hidup.
 - Keterampilan: mencerminkan ketersediaan tenaga kerja produktif sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
4. Ekosistem Inovasi, meliputi dua pilar, yaitu:
 - Dinamika bisnis: menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
 - Kapabilitas inovasi: mengukur kemampuan daerah dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

**Tabel II-59 Indeks Daya Saing Daerah Berdasarkan Kategorinya
Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2024**

Pilar	Kategori	2024	2023	2022
Pilar 1	Institusi	4,69	4,1	3,88
Pilar 2	Infrastruktur	4,54	3,48	2,89
Pilar 3	Adopsi TIK	4,37	4,36	3,14
Pilar 4	Stabilitas Ekonomi Makro	3,87	3,01	3,92
Pilar 5	Kesehatan	4	4,05	4
Pilar 6	Keterampilan	3,32	3,09	2,59

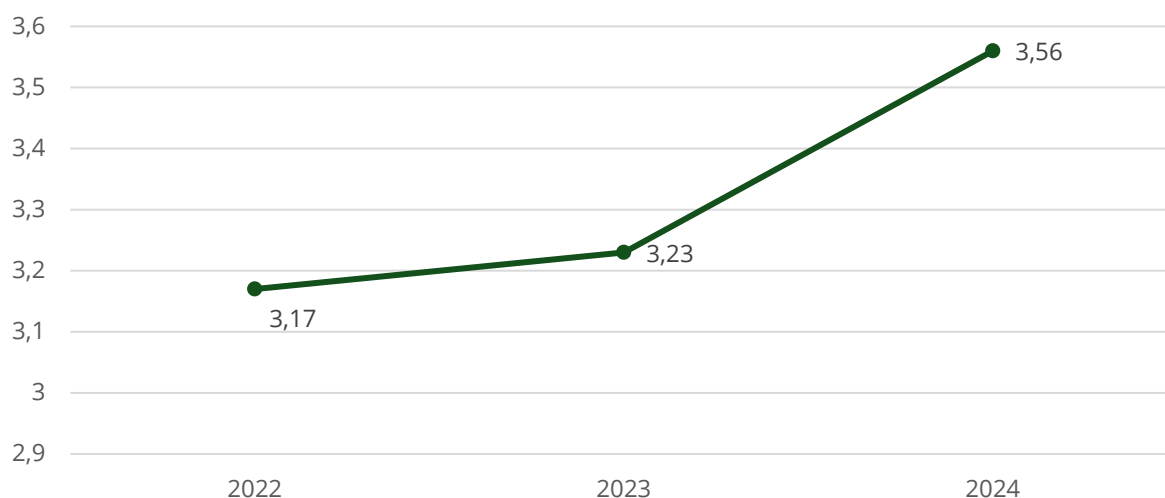
Pilar	Kategori	2024	2023	2022
Pilar 7	Pasar Produk	1,73	0,04	1,24
Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	2,93	2,82	2,05
Pilar 9	Sistem Keuangan	1,57	2,86	1,91
Pilar 10	Ukuran Pasar	5	5	5
Pilar 11	Dinamika Bisnis	3,61	2,99	5
Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	3,13	2,99	2,4
Skor IDSD		3,56	3,23	3,17

Sumber: BRIN, 2025

Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan daya saing daerah yang konsisten, tercermin dari kenaikan skor IDSD dari 3,17 pada tahun 2022, menjadi 3,23 di 2023, dan mencapai 3,56 pada tahun 2024. Capaian ini menandakan perbaikan yang cukup signifikan di berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Pilar-pilar dengan kontribusi paling kuat terhadap peningkatan ini antara lain Institusi (naik dari 3,88 ke 4,69), Infrastruktur (naik dari 2,89 ke 4,54), dan Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang stabil tinggi di kisaran 4,3. Peningkatan pada pilar-pilar ini menunjukkan penguatan dalam tata kelola pemerintahan, pengembangan sarana-prasarana, serta akselerasi digitalisasi yang menjadi fondasi penting dalam pembangunan daya saing jangka panjang. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro yang sempat menurun pada 2023 pun kembali menguat pada 2024, menjadi 3,87, mengindikasikan perbaikan iklim ekonomi daerah pasca ketidakstabilan ekonomi global.

Namun, menunjukkan bahwa beberapa pilar masih menjadi titik lemah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Pilar Pasar Produk dan Sistem Keuangan mencatat skor paling rendah secara konsisten, masing-masing hanya 1,73 dan 1,57 pada tahun 2024. Ini menandakan adanya keterbatasan daya saing sektor usaha lokal, rendahnya nilai tambah produk daerah, serta lemahnya akses masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembiayaan atau layanan keuangan yang inklusif. Di sisi lain, Pilar Kesehatan dan Pilar Ukuran Pasar relatif stabil di angka 4–5, menegaskan potensi ekonomi Karawang yang besar dengan basis populasi dan infrastruktur kesehatan yang cukup memadai. Sementara itu, Kapabilitas Inovasi yang meningkat dari 2,4 menjadi 3,13 mengindikasikan mulai tumbuhnya ekosistem inovatif di daerah. Secara umum, peningkatan skor IDSD Karawang mencerminkan arah pembangunan yang membaik, namun optimalisasi potensi dan penguatan sektor ekonomi riil, pasar keuangan, serta kualitas sumber daya manusia tetap menjadi pekerjaan rumah utama untuk mendorong Karawang naik ke kategori daya saing tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2024



Gambar II-114 Indeks Daya Saing Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2024

Sumber: BRIN, 2025

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Keberhasilan produktivitas daerah dapat dilihat dari komposisi usia penduduk karena semakin besar kelompok penduduk usia produktif (15–64 tahun) maka akan memiliki potensi besar untuk berkontribusi membangun daerah.

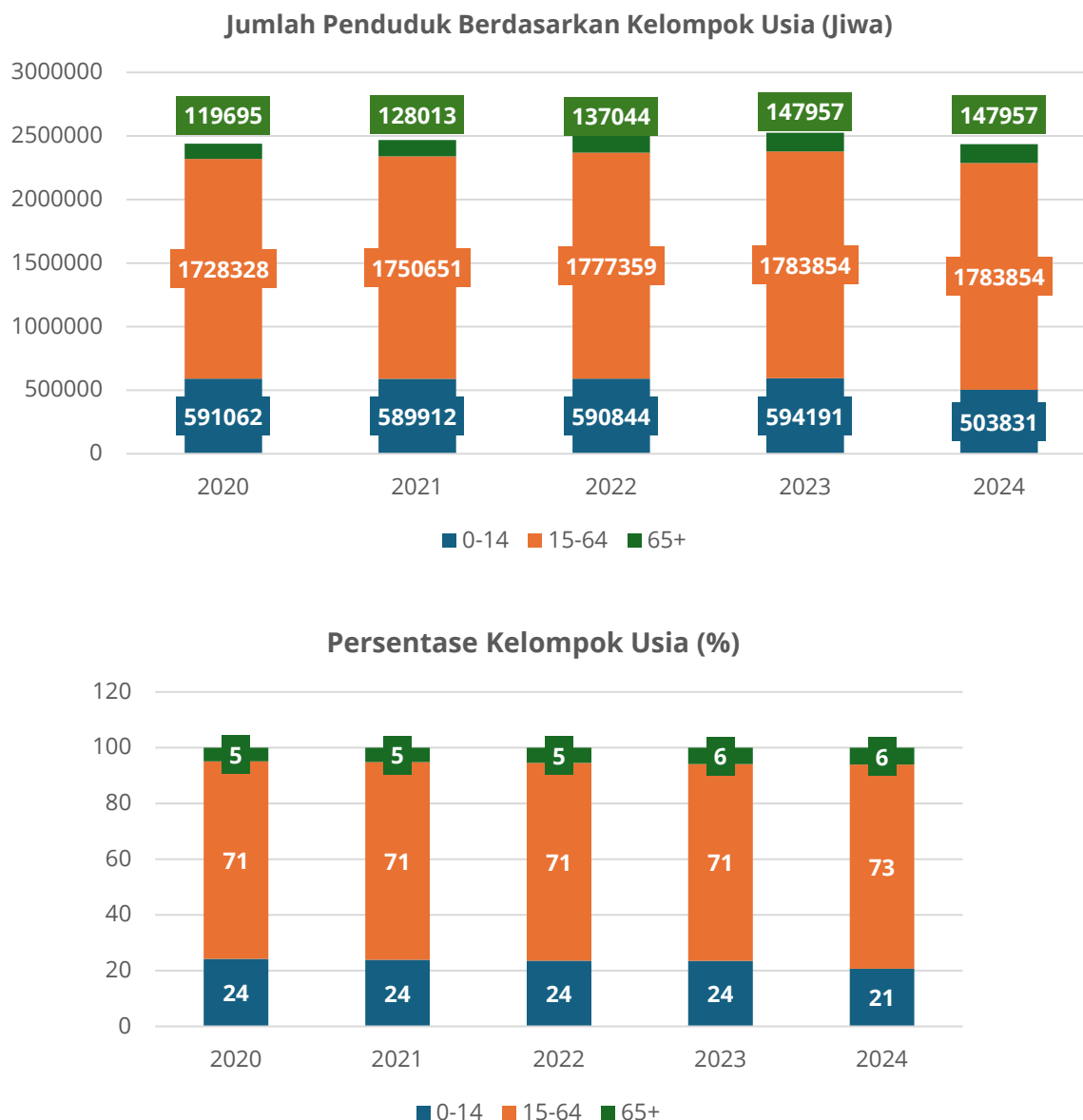
Tabulasi komposisi penduduk berdasarkan usia di Kabupaten Karawang dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kenaikan penduduk di setiap tahun kecuali 2024.

Tabel II-60 Kelompok Usia Penduduk Kabupaten Karawang 2020 - 2024

Kelompok Usia	2020	2021	2022	2023	2024
0-4 tahun	192.111	193.284	194.942	196.296	105.936
5-9 tahun	200.047	199.410	200.230	198.444	198.444
10-14 tahun	198.904	197.218	195.672	199.451	199.451
15-19 tahun	196.237	195.968	196.419	196.207	196.207
20-24 tahun	206.803	206.918	207.279	197.651	197.651
25-29 tahun	219.247	220.474	222.377	212.384	212.384
30-34 tahun	213.047	214.409	216.138	219.022	219.022
35-39 tahun	198.185	200.017	202.641	206.174	206.174
40-44 tahun	190.833	193.019	195.304	194.069	194.069
45-49 tahun	167.323	171.134	175.379	180.969	180.969
50-54 tahun	142.781	146.782	151.162	155.401	155.401
55-59 tahun	110.070	114.139	118.436	126.710	126.710
60-64 tahun	83.802	87.791	92.224	95.267	95.267
65-69 tahun	55.777	58.972	62.214	67.814	67.814
70-74 tahun	35.810	38.911	42.335	42.183	42.183
75+ tahun	28.108	30.130	32.495	37.960	37.960
Total	2.439.085	2.468.576	2.505.247	2.526.002	2.435.642

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021-2025

Struktur penduduk Kabupaten Karawang pada 2020 – 2024 menunjukkan struktur penduduk yang didominasi oleh kelompok usia produktif (15 tahun-64 tahun).



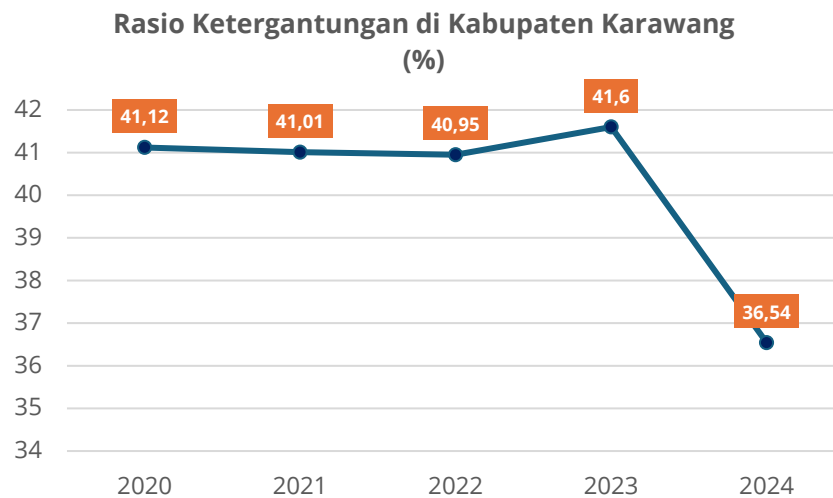
Gambar II-115 Jumlah Penduduk Berdasar Kelompok Usia

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021-2025

Proporsi kelompok usia yang mendominasi adalah usia produktif yang tinggi, maka secara jumlah menunjukkan besar tenaga kerja yang dimiliki yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan. Guna mengetahui beban ekonomi yang ditanggung kelompok penduduk usia produktif, maka perlu mengetahui besar rasio ketergantungan antara penduduk produktif dan yang sudah lanjut usia.

Proporsi kelompok usia yang mendominasi adalah usia produktif yang tinggi, maka secara jumlah menunjukkan besar tenaga kerja yang dimiliki yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pembangunan. Guna mengetahui beban ekonomi yang ditanggung kelompok penduduk usia produktif, maka perlu

mengetahui besar rasio ketergantungan antara penduduk produktif dan yang sudah lanjut usia.



Gambar II-116 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Karawang

Sumber: Hasil Analisis, 2025

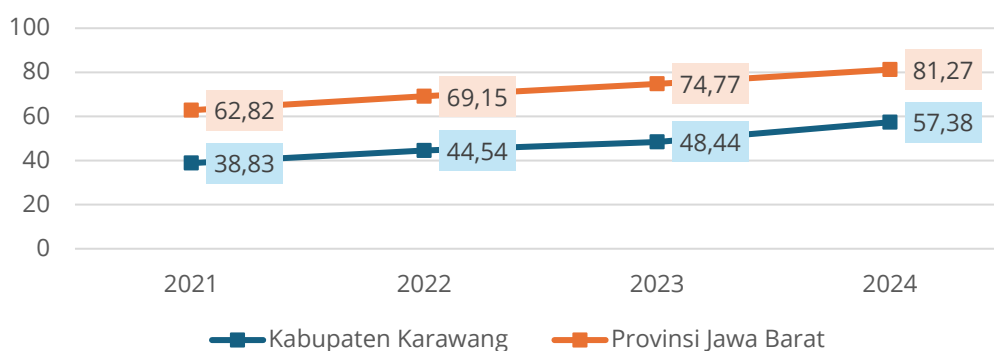
Rasio ketergantungan di kabupaten Karawang pada rentang 2020 – 2024 masih pada angka yang stabil di bawah 50% namun mengalami fluktuasi. pada tahun 2020, 100 penduduk usia produktif menanggung 41 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), pada tahun 2021 41 penduduk usia non produktif tertanggung, tahun 2022 41 penduduk usia non produktif tertanggung, pada tahun 2023 42 penduduk usia non produktif tertanggung, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan hingga menyisakan 37 penduduk usia non produktif tertanggung

Struktur penduduk ini mengindikasikan adanya jumlah kelompok usia yang mengalami penyusutan, di mana pada kondisi ini kelompok usia 0-14 tahun di 2024 mengalami penurunan dari yang semula sebesar 24% di 2023 menjadi 21%.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Kondisi Iptek dan Inovasi menjadi pendorong dalam percepatan keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi Iptek dan Inovasi daerah dapat diukur berdasarkan Indeks Inovasi Daerah (IID), Kabupaten Karawang dalam 4 tahun terakhir, dikategorikan sebagai daerah yang "Inovatif".

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kab Karawang dan Prov Jawa Barat Tahun 2019 - 2023

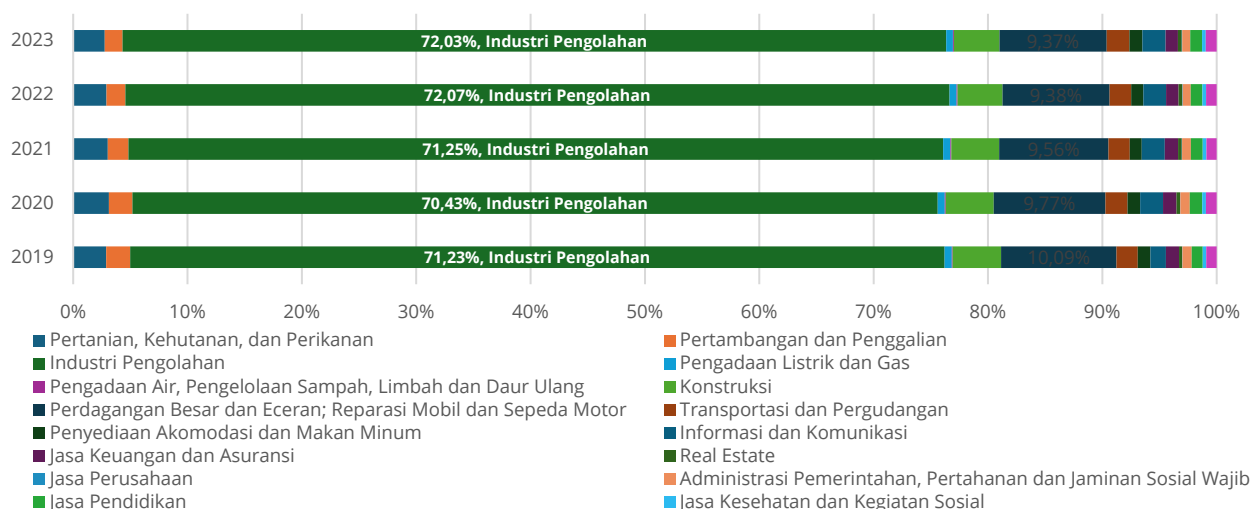


Gambar II-117 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kab Karawang dan Prov Jawa Barat 2019 - 2023

Sumber: Litbang Kemendagri, 2025

Kondisi iptek dan inovasi berdasarkan indeks inovasi daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam grafik di bawah ini menunjukkan bahwa persentase Industri Pengolahan terhadap PDRB mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Indeks Inovasi Daerah diukur dari beberapa indikator inovasi daerah, berbanding lurus dengan Industri Pengolahan yang berbasis inovasi.

Proporsi PDRB terhadap Sektor Terkait 2019 - 2023



Gambar II-118 Proporsi PDRB terhadap Sektor Sektor Terkait 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam 4 tahun berturut-turut Kabupaten Karawang berpredikat daerah yang inovatif. Dengan capaian itu dan dengan melihat kontribusi industri pengolahan yang besar menunjukkan daya saing Kabupaten Karawang cukup ideal.

Industri pengolahan di Kabupaten Karawang adalah industri padat karya yang membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjalankan industri. partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Karawang tentu akan menjadi lebih besar mengingat terdapat industri yang dapat menyerapnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel II-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karawang 2022-2024

Uraian	2022			2023			2024		
	P	L	Total	P	L	Total	P	L	Total
TPAK Kabupaten Karawang	45,19	84,85	65,51	41,36	86,17	63,4	43,48	83,56	63,67
TPAK Jabar	49,23	83	66,31	49,68	83,44	66,75	49,79	84,54	67,34
TPAK Nasional	53,41	83,87	68,63	54,52	82,26	69,48	56,42	84,66	70,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

TPAK Kabupaten Karawang diketahui memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan nilai provinsi maupun nasional. Tren TPAK Karawang mengalami penurunan signifikan dari 2022 ke 2023 sebesar 1,11% sementara Jawa Barat dan Nasional mengalami kenaikan stabil dari tahun ke tahun, menandakan pertumbuhan tenaga kerja yang lebih kuat dibandingkan Karawang.



Gambar II-119 Posisi relatif TPAK Kabupaten, Provinsi, dan Nasional 2022-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan jenis pekerjaan utama selama seminggu yang lalu rentang 2020-2024 yang didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebagai berikut.

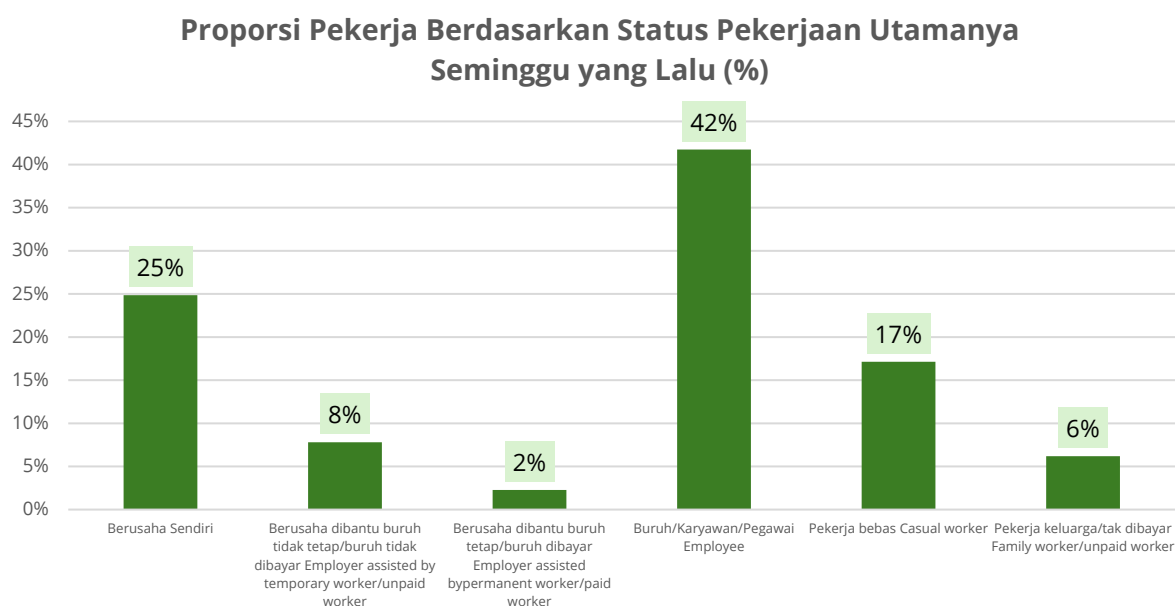
Tabel II-62 Jumlah Penduduk usia 15 Tahun Berdasarkan Jenis Pekerjaan Utama Selama Seminggu yang Lalu 2020 - 2024

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Berusaha Sendiri	273.424	254.664	231.045	275.788	306.595	1.341.516
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	68.045	82.856	107.148	81.235	81.848	421.132
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	15.176	24.128	32.992	32.132	18.152	122.580
Buruh/Karyawan/Pegawai	426.350	408.805	429.062	448.341	539.264	2.251.822
Pekerja bebas	187.665	188.884	196.240	212.828	139.226	924.843

Status Pekerjaan Utama	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Pekerja keluarga/tak dibayar	58.075	64.453	81.452	67.172	63.137	334.289
Total	1.028.735	1.023.790	1.077.939	1.117.496	1.148.222	5.396.182

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2025

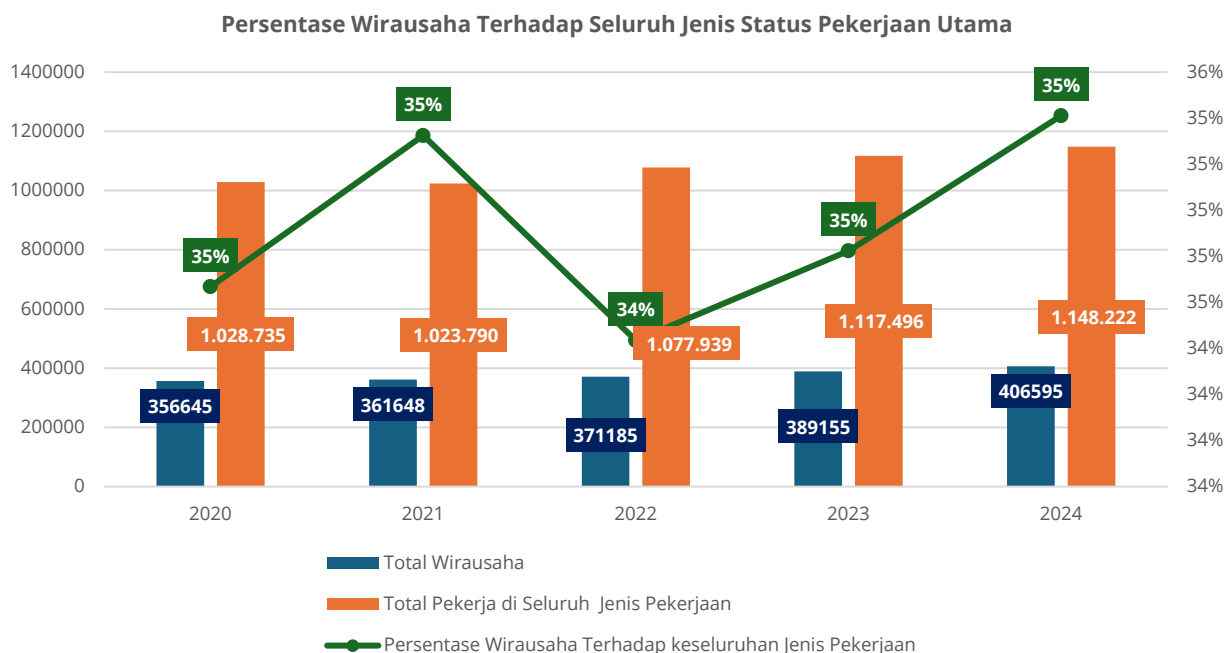
Jika diproporsi dalam persentase, terlihat pada rentang 2020-2024 besar jumlah buruh/karyawan/pegawai menjadi yang teratas dan hampir dua kali lebih besar dari wirausaha. TPAK Kabupaten Karawang dimungkinkan banyak terserap di sektor industri pengolahan dengan sebab data menunjukkan kontributor PDRB terbesar adalah industri pengolahan dan dalam struktur jenis pekerjaan utama yang dilakoni oleh penduduk usia 15 tahun ke atas selama seminggu didominasi sebagai buruh/karyawan/ pegawai.



Gambar II-120 Proporsi Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utamanya Seminggu yang Lalu (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam struktur PDRB yang menunjukkan industri pengolahan sebagai kontributor utama penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Karawang, di sisi lain industri pengolahan mudah mengalami hambatan yang berhubungan dengan kondisi global maka ketergantungan kepada industri pengolahan harus dikurangi melalui berbagai diversifikasi produk dan jasa yang dapat membentuk pasar dan *demand* pun dapat dipenuhi dari *supply* yang ada. *Supply* ini dapat diberikan oleh para penduduk yang berwirausaha. Keseimbangan antara industri pengolahan dan wirausaha akan membentuk sistem keonomi yang lebih tangguh, menambah added value bagi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi dan sektor formal. Dalam data BPS, wirausaha terbagi atas 3 yakni Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar, Berusaha Dibantu Buruh tetap/Buruh Dibayar. Berikut jumlah total 3 jenis wirausaha dan persentasenya terhadap semu jenis status pekerjaan utama.



Gambar II-121 Persentase Wirausaha Terhadap Seluruh jenis Pekerjaan Utama Seminggu yang Lalu (%) 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rata-rata proporsi wirausaha di struktur ekonomi Kabupaten Karawang setiap tahun di 2020 – 2024 di angka 35% yang menunjukkan tidak sepenuhnya Kabupaten Karawang bergantung pada sektor formal padat karya seperti industri pengolahan. Keberadaan wirausaha dapat mengupayakan penciptaan lapangan pekerjaan sebab jumlah wirausaha kurang lebih sepertiga dari keseluruhan jenis pekerjaan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan kelestarian alam serta memastikan bahwa sumber daya alam dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang. Penerapan ekonomi hijau bertujuan mendorong transformasi ekonomi agar pertumbuhan dapat berjalan seiring dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

Kerangka ekonomi hijau nasional menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan tahun 2010, serta peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi 83,00 pada tahun yang sama. Sementara itu, indikator capaian indeks ekonomi hijau yang dijadikan baseline dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah sebesar 70,80 pada tahun 2025, dengan target mencapai 90,65 pada tahun 2045.

Di tingkat Provinsi Jawa Barat, capaian indeks ekonomi hijau pada periode 2015–2023 menunjukkan bahwa pilar sosial dan pilar ekonomi konsisten mencatat nilai tertinggi. Sebaliknya, pilar lingkungan terus menjadi pilar dengan capaian terendah, terutama disebabkan oleh menurunnya tutupan lahan, rendahnya kualitas air

permukaan (diukur melalui parameter BOD), dan masih tingginya emisi gas rumah kaca (GRK).

Ekonomi biru adalah konsep pembangunan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan perekonomian. Pilar dalam ekonomi biru terdiri atas pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan yang keseluruhannya berbasis *Sustainable Development Goals*.

Berdasarkan Dokumen Peta Jalan Ekonomi Biru Edisi 2 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, hasil perhitungan IBEI pada tahun 2023 menunjukkan bahwa skor IBEI di tingkat nasional rata-rata 43,98. Terdapat 16 dari 34 Provinsi yang memiliki skor di atas 50. Perhitungan terakhir menunjukkan bahwa pilar sosial merupakan penyumbang utama skor indeks saat ini, yaitu menyumbang 48,5 persen dari total skor indeks. Skor rata-rata untuk pilar sosial adalah 53,21, lebih tinggi dibandingkan skor pilar lingkungan yang sebesar 28,94 dan skor pilar ekonomi yang sebesar 20,15. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pengembangan ekonomi biru di Indonesia belum optimal dalam pengelolaan sumber daya dan penciptaan nilai, sementara data menunjukkan bahwa banyak rakyat Indonesia yang mengandalkan sumber daya laut untuk menunjang kehidupan mereka. Hal ini dikonfirmasi oleh skor pilar lingkungan, dimana hanya 14 dari 34 Provinsi yang memiliki skor di atas rata-rata nasional pada pilar tersebut. Sementara di sisi lain, walaupun jumlah provinsi dengan skor melebihi rata-rata nasional di pilar ekonomi sama dengan di pilar lingkungan, terdapat sedikit perbedaan dalam nama provinsi. Untuk pilar sosial, juga terdapat 14 dari 34 provinsi yang memiliki skor di atas rata-rata nasional pada pilar tersebut.

Porsi EBT dalam bauran energi primer nasional di 2025 mengalami perubahan rencana dari yang semula 23% menjadi sekitar 17%-20% yang disebabkan pada *benchmarking* tahun sebelumnya yakni 2024 yang capaian bauran energi primernya belum menyentuh target sebesar 14,68% dari target semula sebesar 19,5%. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang perlu melakukan beberapa hal dalam mendorong rencana nasional misalnya dengan mengintegrasikan target EBT nasional ke dalam dokumen perencanaan ruang dan mempermudah perizinan bagi pelaku usaha di bidang EBT, memetakan lokasi potensi EBT, memberikan edukasi pentingnya EBT, dan memperluas kerjasama dengan lembaga riset EBT untuk mendapatkan jalan terkait pemanfaatan EBT secara lebih baik.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Di tengah pesatnya teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak efisiensi dalam berkomunikasi serta dapat diinternalisasi di dalam kebutuhan birokrasi dan pemerintahan menuntut daerah untuk terus inovatif dalam pemanfaatannya. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi akan membawa berbagai jenis pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah. Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia terdiri atas 3 subindeks yakni akses dan

infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK yang pada 2022 dan 2023 secara nasional menunjukkan perbaikan di 2023 dengan capaian berikut.

Tabel II-63 Capaian Indeks Pembangunan TIK Nasional 2022-2023

Subindeks	Indeks Pembangunan TIK		Peningkatan	Pertumbuhan
	2022	2023		
Akses dan infrastruktur TIK	5,8	5.81	+0,01	0,17
Penggunaan TIK	5.82	5.91	+0,09	1,55
Keahlian TIK	6.00	6.04	+0.04	0.67
Indeks Pembangunan TIK	5.85	5.90	+0.05	0,85

Sumber: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2023

indikator penyusun indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:

Tabel II-64 Indikator Indeks Pembangunan TIK

Subindeks	2022	2023
Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK		
Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk	3,96	3,29
Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk	124,23	126,36
Bandwidth internet international (bit/s) per pengguna	99.382,58	115.613,38
Persentase rumah tangga dengan komputer	18,04	18,06
Persentase rumah tangga dengan akses internet	86,54	87,08
Subindeks Penggunaan TIK		
Persentase individu yang menggunakan internet	66,48	69,21
Pelanggan fixed <i>broadband</i> internet per 100 penduduk	4,79	4,86
Pelanggan <i>mobile broadband</i> internet aktif per 100 penduduk	116,36	119,53
Subindeks Keahlian TIK		
Rata-rata lama sekolah	9,08	9,13
Angka partisipasi kasar sekunder	88,76	89,37
Angka partisipasi kasar tersier	30,81	31,02

Sumber: Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, 2023

Dari komponen perhitungan subindeks di atas, terlihat bahwa selain berhubungan dengan internet dan sambungan telepon juga berhubungan dengan kemampuan pengoperasian TIK yang melibatkan pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah barang yang perlu dipelajari dan digunakan terus menerus agar dapat menjadi terbiasa, dan hal ini biasa didapatkan di pendidikan formal. Secara tidak

langsung subindeks ini mengindikasikan bahwa pendidikan berpengaruh langsung terhadap penggunaan TIK. Hal ini dapat menjadi input bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang bahwa perbaikan pendidikan dapat menjadi daya ungkit ke indikator indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Ketika tidak terjadi hambatan apapun dalam pemanfaatan TIK di lingkup daerah akan membuat investasi dan pengembangan teknologi menjadi lebih lancar dan tepat guna.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi dan Domestik dan Global

Pada April 2025 kontribusi ekspor dari Kabupaten Karawang 10 besar diduduki oleh komoditas industri baik berupa hasil industri ekstraktif dan manufaktur ringan sampai manufaktur berat.

Tabel II-65 Jenis, Berat (kg), dan Nilai Ekspor (USD)

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Ekspor (USD)	Berat Ekspor (Kg)
[27] Bahan bakar mineral	4.060.438.435	44.318.283.998
[15] Lemak dan minyak hewani/nabati	3.027.985.275	2.669.555.899
[72] Besi dan baja	2.380.872.370	1.963.070.983
[85] Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya	1.570.845.243	91.522.070
[87] Kendaraan dan bagiannya	982.337.634	102.932.929
[75] Nikel dan barang daripadanya	756.932.774	218.683.514
[38] Berbagai produk kimia	726.285.158	523.100.205
[64] Alas kaki	678.060.637	35.795.063
[26] Bijih logam, terak, dan abu	587.406.292	272.198.939
[84] Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya	569.031.531	57.508.274
[71] Logam mulia dan perhiasan/permata	515.373.858	592.845
[40] Karet dan barang dari karet	508.915.254	199.459.184
[62] Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)	359.956.931	13.101.897
[48] Kertas, karton, dan barang daripadanya	351.924.751	474.269.366
[28] Bahan kimia anorganik	344.895.278	534.513.337
[18] Kakao dan olahannya	342.989.614	30.610.110
[03] Ikan, krustasea, dan moluska	342.089.013	74.827.520
[29] Bahan kimia organik	334.645.565	299.065.757
[61] Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	330.242.861	16.263.730
[44] Kayu dan barang dari kayu	325.698.711	447.460.316
[09] Kopi, teh, dan rempah-rempah	289.447.371	53.299.977
[47] Pulp dari kayu	285.149.689	547.900.054
[74] Tembaga dan barang daripadanya	280.391.253	31.118.647
[94] Perabotan, lampu, dan alat penerangan	220.037.263	52.881.204
[39] Plastik dan barang dari plastik	219.623.606	173.079.662
[76] Aluminium dan barang daripadanya	204.607.801	69.103.759
[80] Timah dan barang daripadanya	191.006.383	5.847.033
[24] Tembakau dan rokok	186.172.824	14.554.579
[21] Berbagai makanan olahan	157.162.546	55.873.908
[73] Barang dari besi dan baja	142.778.496	69.884.649
[42] Barang dari kulit samak	137.233.016	8.680.811
[55] Serat stapel buatan	136.903.486	74.358.962

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Ekspor (USD)	Berat Ekspor (Kg)
[19] Olahan dari tepung	135.999.752	59.115.079
[16] Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska	127.020.462	18.231.728
[34] Sabun dan preparat pembersih	125.302.262	107.578.302
[08] Buah-buahan	116.458.241	149.796.842
[33] Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik	98.033.404	11.281.607
[23] Ampas dan sisa industri makanan	76.513.633	506.179.416
[95] Mainan, permainan dan keperluan olahraga	65.926.102	6.354.525
[90] Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis	65.539.141	2.302.995
[30] Produk farmasi	62.413.064	1.926.184
[04] Susu, mentega, dan telur	58.466.644	3.764.563
[25] Garam, belerang, batu, dan semen	55.468.398	2.410.319.675
[54] Filamen buatan	51.073.277	14.772.439
[14] Bahan anyaman nabati	46.967.463	448.446.425
[32] Sari bahan samak dan celup	46.053.420	13.877.823
[92] Instrumen musik dan bagiannya	42.515.143	2.699.664
[12] Biji dan buah mengandung minyak	37.726.522	25.254.910
[52] Kapas	37.164.796	13.010.596
[89] Kapal, perahu, dan struktur terapung	36.438.825	5.872.971
[20] Olahan dari sayuran, buah, dan kacang	33.575.225	20.760.032
[17] Gula dan kembang gula	33.149.880	44.852.338
[70] Kaca dan barang dari kaca	30.962.975	55.746.051
[22] Minuman, alkohol, dan cuka	27.514.822	41.027.141
[96] Berbagai barang buatan pabrik	25.544.904	11.239.565
[69] Produk keramik	22.818.624	20.025.587
[31] Pupuk	22.536.353	58.422.812
[81] Logam tidak mulia lainnya	20.327.085	4.986.859
[68] Barang dari batu, semen, asbes, atau mika	18.319.049	37.946.253
[67] Barang dari bulu unggas, bunga artifisial, dan wig	17.716.211	495.679
[13] Lak, getah, dan damar	16.556.674	4.944.841
[56] Kain kempa, benang khusus, dan benang pintal	14.071.646	3.575.964
[88] Kendaraan udara dan bagiannya	11.374.814	81.426
[60] Kain rajutan	10.460.144	1.635.196
[83] Berbagai barang logam tidak mulia	9.942.191	2.467.737
[63] Barang tekstil jadi lainnya	9.617.632	2.251.108
[41] Jangat dan kulit mentah/samak	8.497.612	246.042
[65] Tutup kepala dan bagiannya	7.599.793	316.782
[46] Barang anyaman	7.541.453	1.556.469
[82] Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia	6.884.379	555.938
[86] Kereta api, trem, dan bagiannya	6.654.589	1.745.871
[07] Sayuran	5.862.641	6.675.190
[11] Hasil penggilingan	5.779.800	9.398.491
[35] Perak dan enzim	5.348.516	1.933.454
[05] Produk hewani	5.177.980	2.924.318
[78] Timbal dan barang daripadanya	5.060.921	3.423.879
[59] Kain tekstil dilapisi atau dilaminasi	4.877.246	947.094

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Ekspor (USD)	Berat Ekspor (Kg)
[58] Kain tenunan khusus	4.124.715	296.670
[79] Seng dan barang daripadanya	3.448.286	1.304.907
[57] Karpas dan tekstil penutup lantai lainnya	2.963.708	892.706
[49] Produk industri percetakan	2.007.796	293.782
[06] Pohon hidup dan bunga potong	1.844.587	1.350.033
[91] Jam dan arloji serta bagiannya	1.505.168	25.455
[99] Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman	1.065.717	105.575
[02] Daging hewan	930.480	149.461
[53] Serat tekstil nabati lainnya	680.440	2.762.871
[01] Binatang hidup	665.111	17.945
[97] Karya seni, barang kolektor, dan barang antik	649.675	57.156
[36] Bahan peledak, korek api, dan kembang api	494.879	287.345
[66] Payung, tongkat, dan bagiannya	163.745	43.514
[37] Barang fotografi atau sinematografi	156.937	18.028
[10] Sereal	146.912	126.271
[98] Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap)	64.604	2.789
[93] Senjata dan amunisi serta bagiannya	39.468	22.059
[51] Wol, bulu hewan halus atau kasar	6.921	722
[43] Kulit berbulu, bulu tiruan, dan barang daripadanya	6.134	184
[45] Gabus dan barang dari gabus	2.428	631
[50] Sutra	158	285

Sumber: BPS, 2025

Hasil industri manufaktur ringan misalnya produk alas kaki dan produk lemak dan minyak hewani/nabati. produk hasil industri ekstraktif misalnya bijih logam, terak dan abu, bahan bakar mineral, dan nikel dan barang daripadanya, serta untuk hasil industri manufaktur sedang sampai berat meliputi besi dan baja, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, dan berbagai produk kimia. 10 komoditas teratas ini menunjukkan industri padat teknologi yang menggunakan dan memerlukan tenaga kerja ekstra terampil dan berpendidikan tinggi akan standar kualitas, keamanan, dan keselamatan kerja. Potensi besar bagi para putra daerah untuk bersaing di industri yang ada di Kabupaten Karawang melalui pelatihan dan pendidikan vokasi yang kuat dan inovatif.

Industri pengolahan pada hal ini tentu berkontribusi besar bagi iklim ekspor di Kabupaten Karawang dengan nilai ekspor total sebesar USD 23.247.262.499

Tabel II-66 Jenis, Berat (kg), dan Nilai Impor (USD)

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (USD)	Berat Impor (Kg)
[27] Bahan bakar mineral	3.453.982.958	7.098.132.077
[84] Mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya	2.679.672.609	2.317.071
[85] Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya	2.255.421.852	122.213.883
[87] Kendaraan dan bagiannya	893.765.116	120.895.726
[39] Plastik dan barang dari plastik	801.751.936	493.940.728

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (USD)	Berat Impor (Kg)
[72] Besi dan baja	722.780.750	1.076.160.899
[71] Logam mulia dan perhiasan/permata	596.960.533	585.340
[29] Bahan kimia organik	566.574.685	477.427.468
[38] Berbagai produk kimia	360.337.629	144.922.687
[23] Ampas dan sisa industri makanan	334.333.336	787.381.562
[28] Bahan kimia anorganik	320.582.035	694.767.447
[90] Instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis	301.955.307	8.599.982
[73] Barang dari besi dan baja	288.610.474	146.612.981
[10] Sereal	274.756.641	977.845.465
[18] Kakao dan olahannya	240.561.577	27.290.434
[31] Pupuk	221.977.796	808.144.216
[40] Karet dan barang dari karet	189.655.929	59.747.330
[25] Garam, belerang, batu, dan semen	187.246.335	1.390.977.525
[08] Buah-buahan	181.289.500	90.874.776
[26] Bijih logam, terak, dan abu	172.658.079	1.688.392.391
[76] Aluminium dan barang daripadanya	169.315.379	53.978.935
[48] Kertas, karton, dan barang daripadanya	152.044.407	105.046.694
[17] Gula dan kembang gula	147.922.323	269.040.661
[33] Minyak atsiri, wewangian, dan kosmetik	139.361.571	8.227.045
[04] Susu, mentega, dan telur	136.016.657	42.467.770
[47] Pulp dari kayu	130.696.501	374.414.442
[54] Filamen buatan	130.357.948	48.176.259
[89] Kapal, perahu, dan struktur terapung	125.117.043	89.718.516
[74] Tembaga dan barang daripadanya	123.211.876	13.160.640
[60] Kain rajutan	122.690.841	15.538.280
[24] Tembakau dan rokok	122.428.428	50.414.908
[32] Sari bahan samak dan celup	118.515.634	35.102.269
[94] Perabotan, lampu, dan alat penerangan	114.890.631	64.843.608
[21] Berbagai makanan olahan	108.959.364	31.277.833
[30] Produk farmasi	106.906.421	2.337.024
[52] Kapas	94.565.375	32.611.638
[12] Biji dan buah mengandung minyak	87.178.863	145.935.740
[64] Alas kaki	84.217.543	8.518.079
[55] Serat stapel buatan	78.439.678	22.451.049
[07] Sayuran	76.398.073	63.750.385
[88] Kendaraan udara dan bagiannya	73.277.759	152.371
[83] Berbagai barang logam tidak mulia	64.138.411	22.212.108
[59] Kain tekstil dilapisi atau dilaminasi	61.365.800	8.822.565
[34] Sabun dan preparat pembersih	60.343.893	23.204.065
[09] Kopi, teh, dan rempah-rempah	56.296.273	17.254.586
[98] Kendaraan bermotor dan komponennya (terbongkar tidak lengkap)	55.100.075	5.116.419
[44] Kayu dan barang dari kayu	54.324.384	296.383.221
[96] Berbagai barang buatan pabrik	50.731.629	9.163.859
[82] Perkakas dan peralatan dari logam tidak mulia	50.059.134	8.407.160

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (USD)	Berat Impor (Kg)
[35] Perekat dan enzim	49.669.126	22.270.786
[86] Kereta api, trem, dan bagiannya	49.597.713	9.395.266
[41] Jangat dan kulit mentah/samak	49.515.268	6.992.805
[70] Kaca dan barang dari kaca	48.477.276	59.882.779
[56] Kain kempa, benang khusus, dan benang pintal	47.858.883	13.923.404
[01] Binatang hidup	41.194.322	12.588.070
[95] Mainan, permainan dan keperluan olahraga	40.776.639	9.576.784
[02] Daging hewan	38.783.983	14.330.645
[68] Barang dari batu, semen, asbes, atau mika	38.021.317	200.305.737
[19] Olahan dari tepung	36.837.778	15.098.709
[69] Produk keramik	36.497.787	48.439.666
[15] Lemak dan minyak hewani/nabati	35.273.065	16.335.660
[03] Ikan, krustasea, dan moluska	34.808.606	20.774.251
[61] Pakaian dan aksesorinya (rajutan)	33.696.256	2.568.788
[11] Hasil penggilingan	33.190.949	71.388.556
[42] Barang dari kulit samak	32.185.540	4.227.404
[79] Seng dan barang daripadanya	31.579.870	10.227.580
[93] Senjata dan amunisi serta bagiannya	31.279.467	34.588
[62] Pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan)	29.088.520	2.223.045
[91] Jam dan arloji serta bagiannya	28.714.547	719.677
[99] Piranti lunak, barang digital dan barang kiriman	28.308.106	117
[58] Kain tenunan khusus	25.760.943	1.680.415
[20] Olahan dari sayuran, buah, dan kacang	25.202.202	15.346.650
[49] Produk industri percetakan	16.354.382	2.287.195
[22] Minuman, alkohol, dan cuka	12.371.616	13.346.444
[05] Produk hewani	11.424.591	6.198.380
[63] Barang tekstil jadi lainnya	10.737.091	3.915.896
[75] Nikel dan barang daripadanya	9.772.331	559.990
[92] Instrumen musik dan bagiannya	9.674.998	609.326
[81] Logam tidak mulia lainnya	9.114.562	126.184
[36] Bahan peledak, korek api, dan kembang api	9.072.744	1.092.724
[13] Lak, getah, dan damar	7.703.107	1.083.339
[16] Olahan dari daging, ikan, krustasea, dan moluska	6.434.919	1.544.293
[78] Timbal dan barang daripadanya	5.861.578	2.754.857
[37] Barang fotografi atau sinematografi	5.138.956	700.999
[51] Wol, bulu hewan halus atau kasar	4.443.758	211.588
[53] Serat tekstil nabati lainnya	3.855.658	1.435.756
[65] Tutup kepala dan bagiannya	3.368.080	384.425
[67] Barang dari bulu unggas, bunga artifisial, dan wig	2.765.428	781.462
[80] Timah dan barang daripadanya	1.980.951	67.866
[66] Payung, tongkat, dan bagiannya	976.559	609.292
[06] Pohon hidup dan bunga potong	769.916	152.366
[57] Karpet dan tekstil penutup lantai lainnya	633.903	191.405
[43] Kulit berbulu, bulu tiruan, dan barang daripadanya	546.131	37.585
[14] Bahan anyaman nabati	387.563	948.210

Kode HS dan Deskripsi	Nilai Impor (USD)	Berat Impor (Kg)
[45] Gabus dan barang dari gabus	244.026	26.576
[97] Karya seni, barang kolektor, dan barang antik	205.208	45.755
[50] Sutra	43.659	8.789
[46] Barang anyaman	31.910	1.409

Sumber: BPS, 2025

Jenis komoditas impor yang masuk di Kabupaten Karawang kurang lebih bergerak dari manufaktur yang hampir sama dengan komoditas yang diekspornya namun ada sedikit perbedaan yakni adanya manufaktur sedang-berat yang memerlukan barang impor berupa mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, serta logam mulia dan perhiasan/permata. Ada tumpang tindih atau jenis barang yang sama dalam proses impor-ekspor yakni bahan bakar mineral, mesin mekanis, mesin elektrik, kendaraan, besi dan baja serta produk kimia di mana hal ini dapat dipahami bahwa barang yang diespor atau diimpor mungkin dalam bentuk setengah jadi atau bahan mentah. Misalnya, jika yang diimpor bahan mentah dan diolah di dalam negeri maka ketika diekspor akan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dapat juga diasumsikan bahwa barang yang diimpor adalah barang modal yang akan digunakan untuk operasional perusahaan yang dapat berbentuk barang setengah jadi untuk kemudian diproses di dalam negeri.

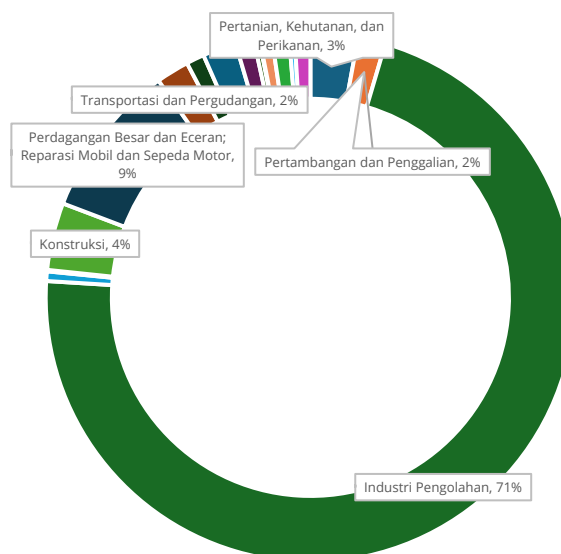
Dalam Renstra Disperindag Kabupaten Karawang tahun 2016 – 2021 bahwa pada rentang 2011-2015 negara tujuan ekspor dari barang-barang yang diproduksi di Kabupaten Karawang meliputi USA, Italia, Belgia, India, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II-67 Nilai Ekspor (USD) dan Negara Tujuan Ekspor Kabupaten Karawang

Tahun	Nilai Ekspor (US\$)	Negara Tujuan
2011	954.777.989,30	USA, Itali, Jepang, Belgia, India, Pakistan, Singapura, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Australia, Korea, Afrika, China, dll.
2012	5.723.847.940,85	Sda
2013	1.536.108.020,26	Sd
2014	1.178.089.893,65	Sda
2015	1.018.383.275,03	Sda

Sumber: Renstra Disperindag Kabupaten Karawang 2016 - 2021

Kontributor PDRB ADHK Kabupaten Karawang 2020 - 2024



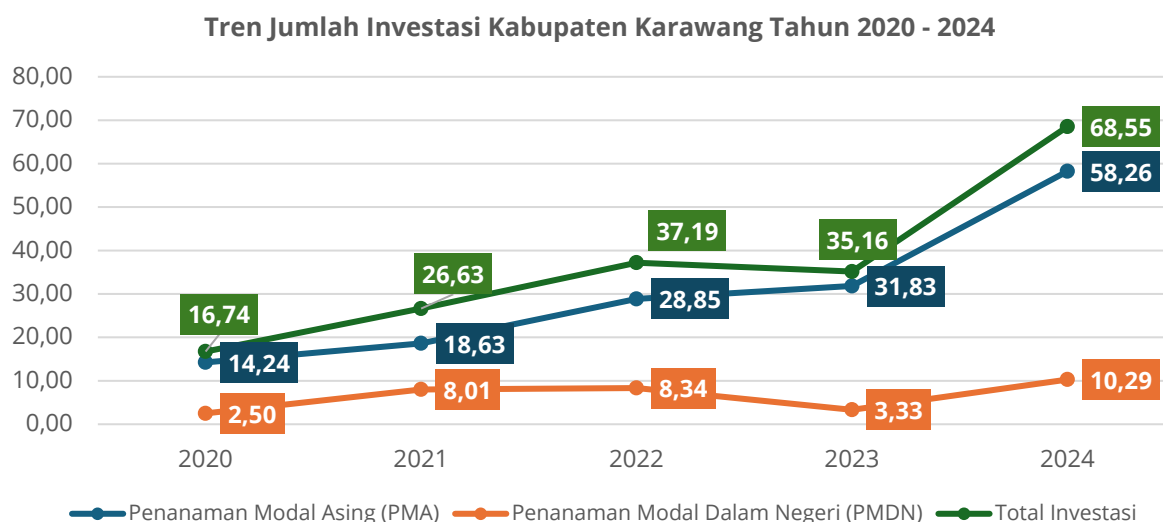
Gambar II-122 Kontributor PDRB ADHK Kabupaten Karawang 2020 - 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Kontribusi sektor PDRB dalam 2020-2024 yang terbesar adalah industri pengolahan kemudian diikuti dengan perdagangan besar dan eceran, konstruksi, kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan sisanya adalah transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian dan jasa lainnya yang persentasenya tidak lebih dari 2%. Industri pengolahan menyumbang 631.317,41 miliar rupiah selama 2020-2024 dari total perolehan PDRB 2020-2024 adalah 884.077,72 miliar rupiah.

industri pengolahan mendominasi kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Karawang. rata-rata pertumbuhan per tahun sektor ini sebesar 6% selama 2020-2024. meski perolehan PDRB di 2020 - 2024 selalu meningkat, namun secara rata-rata pertumbuhan terus mengalami penurunan pada 2021 rata-rata pertumbuhan sebesar 7,09%, naik menjadi 7,53% di 2022, dan konsisten turun sejak 2023 dan 2024 secara berurutan sebesar 5,35% dan 2,91%.

Investasi Kabupaten Karawang cenderung memiliki pola linier meningkat tiap tahunnya, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1.435 Triliun atau sebesar 3% sebelum kembali meningkat sebesar 95% pada tahun 2024.



Gambar II-123 Tren Jumlah Investasi Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2025

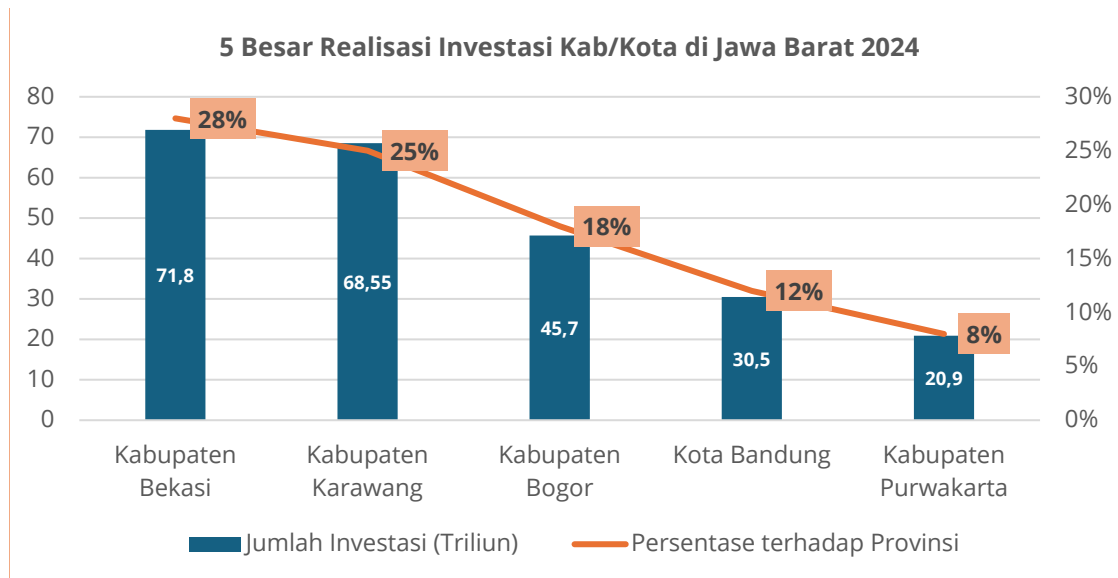
Melihat dari jenis investasi yang dilakukan, penurunan jumlah investasi pada tahun 2023 ini ikut dipengaruhi oleh penurunan Penanaman Modal Dalam Negeri yang juga berkurang sebanyak 5,01 Triliun.

Tabel II-68 Tabulasi Jumlah Investasi Kabupaten Karawang 2020-2024

Investasi	2020	2021	2022	2023	2024
Penanaman Modal Asing (PMA)	14,24	18,63	28,85	31,83	58,26
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD)	2,50	8,01	8,34	3,33	10,29
Total	16,74	26,63	37,19	35,16	68,55

Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2025

Sempat menurun pada tahun 2023 dan kembali naik dengan angka yang cukup tinggi pada tahun 2024 menunjukkan bagaimana Kabupaten Karawang masih menjadi tujuan investasi dari investor dalam dan luar negeri. Pada tahun 2024 Kabupaten Karawang menjadi Kab/Kota dengan peringkat investasi kedua terbanyak di Provinsi Jawa Barat dengan menyumbang sebanyak 25% dari total investasi Provinsi.



Gambar II-124 5 Besar Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2024

Sumber: DPMPSTP Jawa Barat, 2025

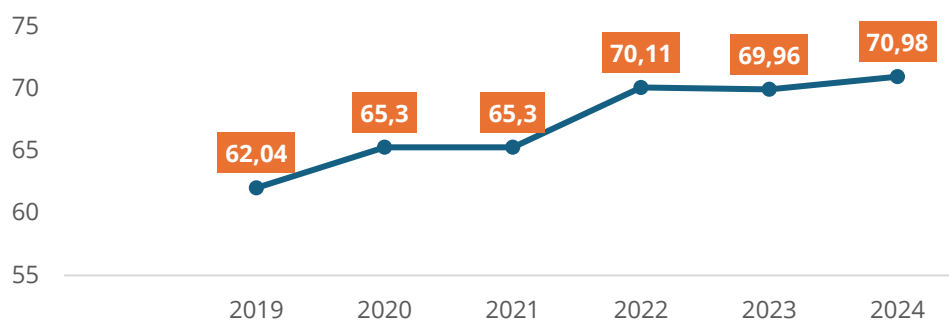
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks kualitas infrastuktur terdiri atas subindeks berupa:

1. Jalan dan Jembatan, terdiri atas indikator tingkat kemantapan jalan
2. sumber daya air, terdiri atas indikator indeks kinerja sistem irigasi dan persentase peningkatan kapasitas tampung
3. perumahan dan permukiman, terdiri atas indikator akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, akses penanganan sampah perkotaan, dan persentase rumah tangga layak huni
4. energi atau kelistrikan, terdiri atas indikator konsumsi listrik perkapita

Untuk meningkatkan indeks kualitas infrastruktur perlu intervensi strategis pada setiap subindeks dan indikatornya. Adapun kondisi infrastruktur di beberapa subindeks di atas di Kabupaten Karawang dalam kondisi berikut.

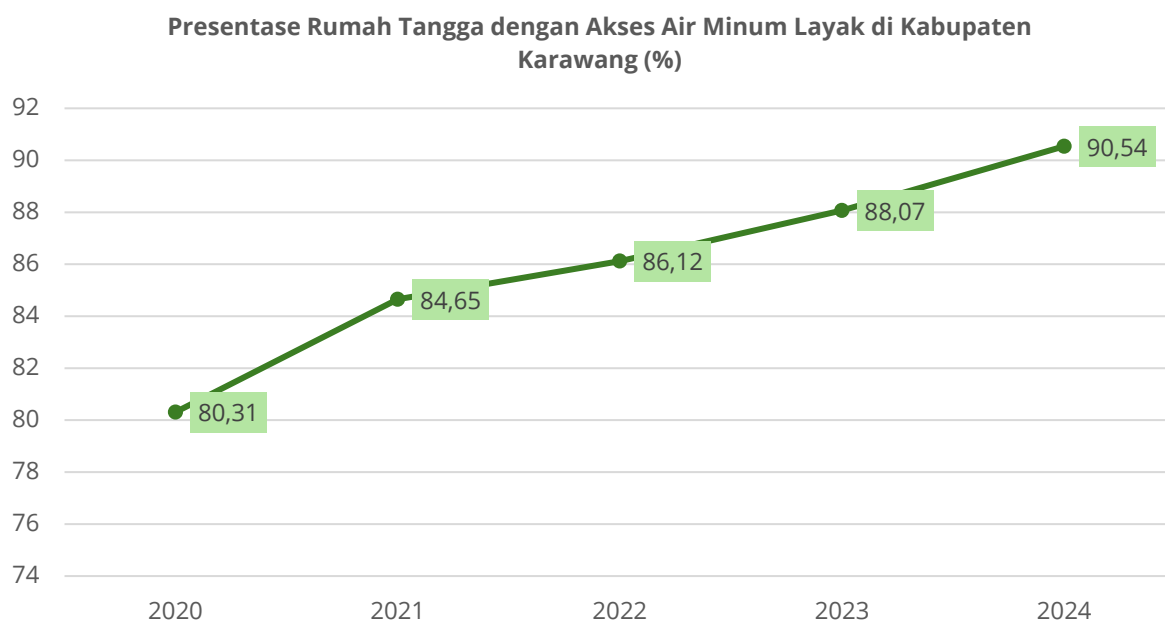
Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak (%)



Gambar II-125 Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Huni 2019 – 2024 (%)

Sumber: Open Data Jabar

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak di Kabupaten Karawang menunjukkan tren yang positif namun memiliki dinamika di beberapa hal. Di tahun 2019 – 2020 menunjukkan peningkatan signifikan artinya terdapat upaya perbaikan kualitas hunian dan stagnan di 2020-2021 yang tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan apapun. Di 2021-2022 peningkatan terjadi cukup signifikan, dan setelahnya fluktuatif.

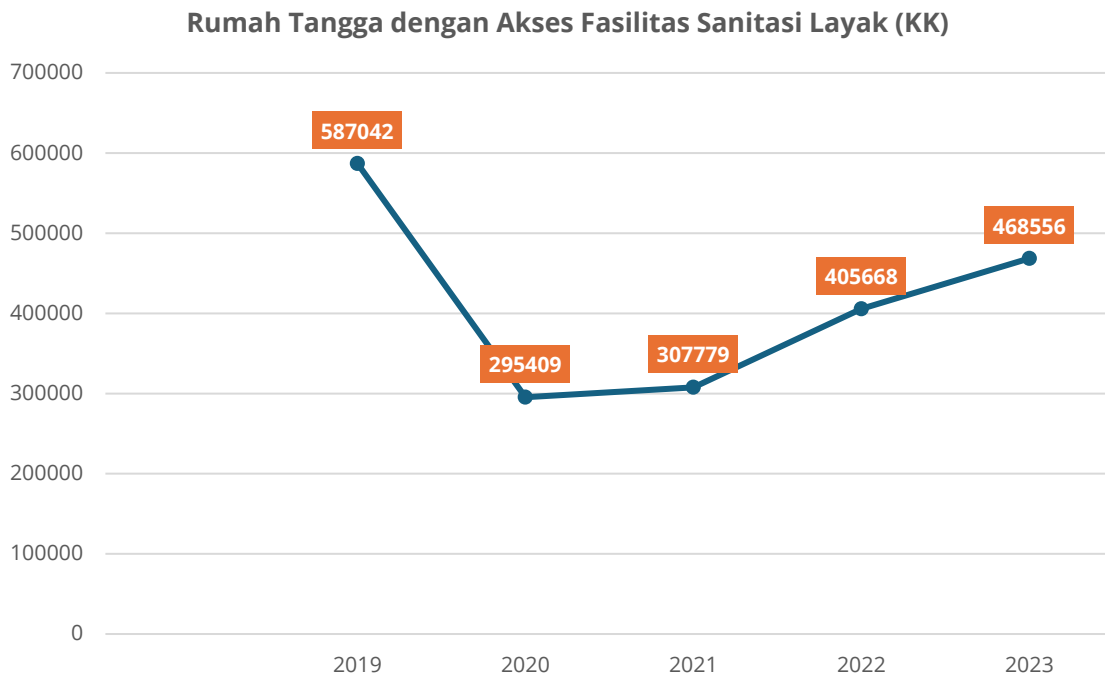


Gambar II-126 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Karawang (%)

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

Data capaian akses air minum layak di Kabupaten Karawang dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 80,31% pada 2020 menjadi 90,54% pada 2024. Peningkatan signifikan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemerintah daerah dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan peningkatan layanan PDAM. Meskipun telah melampaui 90%, capaian ini juga menjadi indikator bahwa Karawang terus mendekati target akses air minum layak yang diamanatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, sekaligus menekankan pentingnya pemerataan akses di daerah pedesaan dan kawasan dengan akses air terbatas.

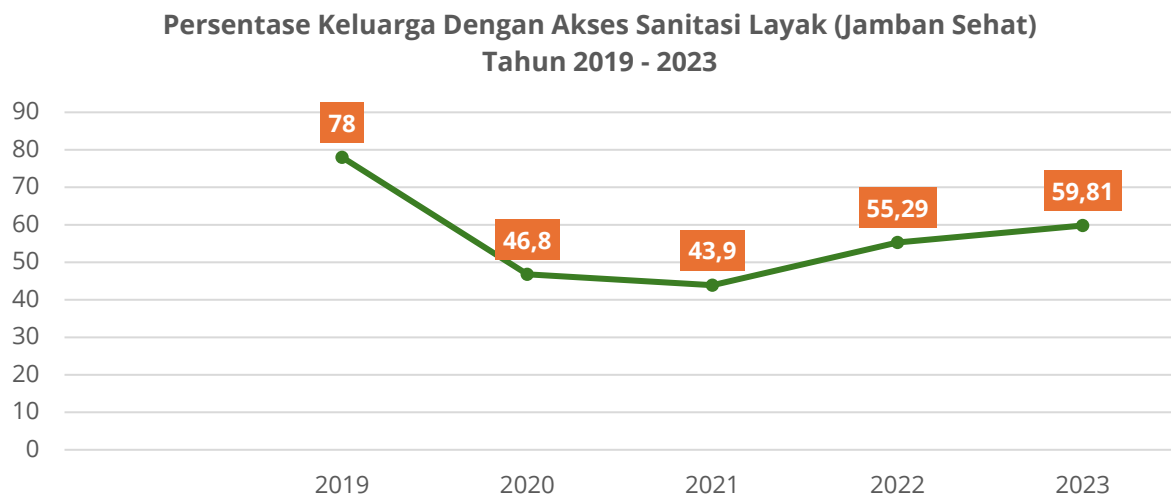
Kualitas sanitasi layak di Kabupaten Karawang berdasarkan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebagai berikut.



Gambar II-127 Rumah Tangga dengan Akses Fasilitas Sanitasi Layak (KK)

Sumber: Open Data Jabar

Terjadi penurunan ekstrem dari 2019 ke 2020 namun secara bertahap mengalami perbaikan dari 2020 sampai 2023. Kondisi ini dapat dimungkinkan adanya kendala pendataan ketika terjadi kondisi COVID-19 yang membatasi pergerakan di luar ruangan. namun perbaikan bertahap itu tetap terjadi meski secara umum mengalami penurunan tajam di awal.



Gambar II-128 Persentase Keluarga Dengan Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) 2019 - 2023

Sumber: Open Data Jabar

Persentase keluarga dengan akses sanitasi layak mengalami penurunan sejak 2019-2021 namun perbaikan terjadi di 2022. Secara umum, tren ini menunjukkan tantangan yang signifikan akibat adanya penurunan yang cukup ekstrem meski menunjukkan perbaikan setelahnya.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

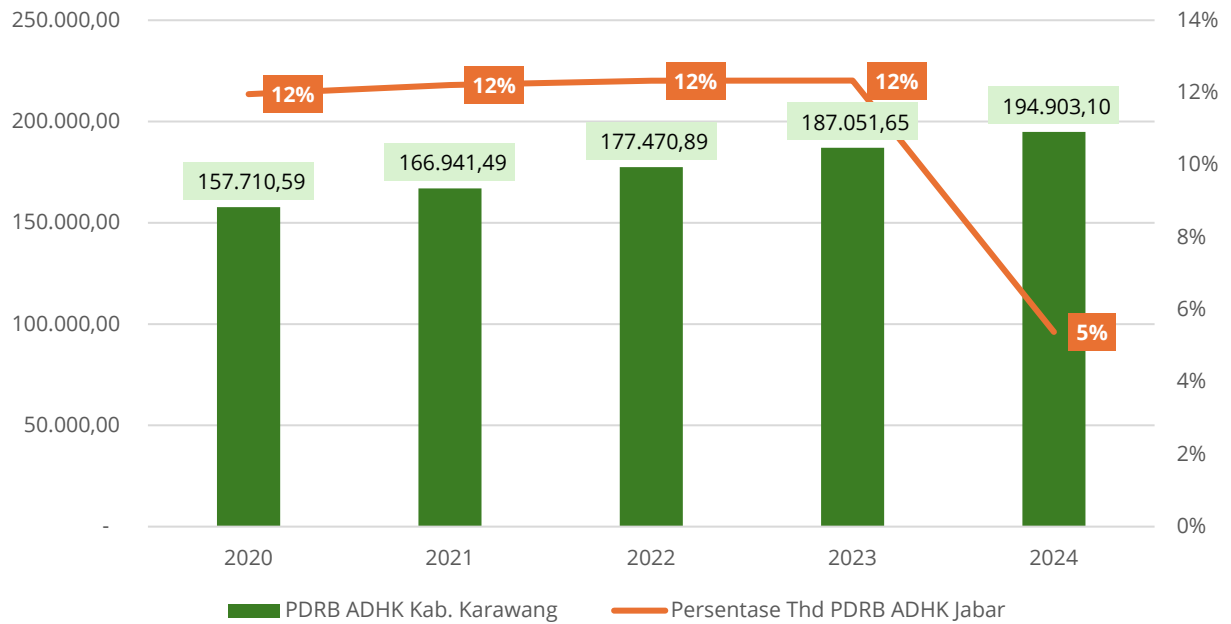
Kabupaten Karawang menduduki PDRB Kabupaten Karawang secara ADHK dengan kabupaten/kota lainnya setingkat Jawa Barat sebagai berikut. Jumlah perolehan PDRB ADHK Kabupaten Karawang selama 2020 – 2024 konsisten berada di atas rata-rata se-Provinsi Jawa Barat.

Tabel II-69 Tabulasi PDRB ADHK Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023*)	2024**)
Bogor	154.113,60	159.589,55	167.966,18	176.683,58	185.882,34
Sukabumi	46.205,28	47.935,63	50.388,72	52.993,98	55.723,92
Cianjur	31.792,32	32.897,53	34.556,40	36.339,55	38.208,18
Bandung	81.060,97	83.949,37	88.437,96	92.830,17	97.509,91
Garut	38.598,43	39.981,19	42.012,96	44.087,22	46.270,92
Tasikmalaya	24.344,86	25.179,48	26.361,66	27.599,16	28.879,68
Ciamis	21.970,41	22.774,93	23.918,89	25.111,71	26.360,94
Kuningan	16.882,76	17.483,56	18.450,34	19.418,73	20.050,72
Cirebon	33.304,05	34.127,52	35.523,78	37.246,57	39.418,27
Majalengka	21.754,54	22.787,90	24.298,10	25.793,24	27.438,93
Sumedang	23.665,01	24.368,73	25.595,02	26.876,86	27.965,76
Indramayu	59.200,00	59.544,87	61.259,61	67.237,69	68.701,96
Subang	28.344,32	28.960,89	30.202,58	31.604,98	33.126,46
Purwakarta	45.293,24	46.840,15	49.292,98	51.740,50	54.142,29
Karawang	157.710,59	166.941,49	177.470,89	187.051,65	194.903,10
Bekasi	242.971,39	251.778,52	265.120,49	279.224,90	293.664,79
Bandung Barat	30.640,41	31.701,79	33.393,29	35.062,19	36.793,68
Pangandaran	7.738,97	8.022,78	8.426,40	8.869,86	9.324,31
Bogor	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36	38.964,67
Sukabumi	8.534,72	8.851,05	9.324,16	9.801,88	10.303,16
Bandung	193.144,95	200.414,03	211.250,67	221.969,13	233.053,79
Cirebon	16.648,21	17.155,75	18.030,25	18.934,40	19.884,06
Bekasi	67.619,24	69.796,94	73.260,65	77.241,79	81.251,61
Depok	48.135,93	49.947,24	52.564,98	55.221,82	58.241,86
Cimahi	22.340,56	23.275,78	24.652,73	25.931,98	27.296,93
Tasikmalaya	15.430,02	15.980,75	16.781,04	17.781,93	18.709,87
Banjar	3.251,76	3.371,78	3.516,57	3.682,30	3.883,98
Total	1.318.745,68	1.367.442,13	1.439.349,99	1.516.709,55	1.620.750,03

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

Jumlah PDRB ADHK Kabupaten Karawang dan Kontribusinya Terhadap Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 - 2024



Gambar II-129 Jumlah PDRB ADHK Kabupaten Karawang dan Kontribusinya Terhadap Prov. Jawa Barat Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

Kontribusi PDRB ADHK terhadap perolehan PDRB ADHK Provinsi Jawa Barat secara konsisten di 12% pada 2020-2023 namun turun signifikan di 2024 di mana data angka di tahun 2024 masih bersifat sangat sementara.

PDRB Kabupaten Karawang secara konsisten sejak 2020 – 2024 menduduki posisi 5 teratas atas kontribusinya pada PDRB Provinsi Jawa Barat.

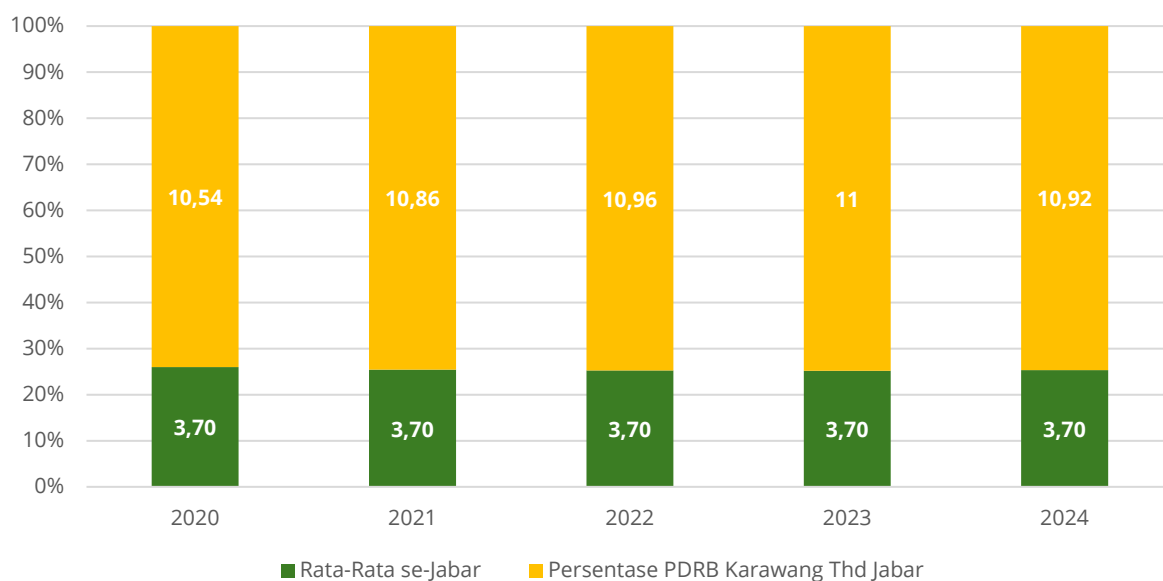
Tabel II-70 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten/Kota Terhadap provinsi Jawa Barat 2020-2024

Distribusi Persentase	2020	2021	2022	2023	2024
Bogor	11,12	11,09	10,94	10,93	10,99
Sukabumi	3,18	3,15	3,12	3,11	3,11
Cianjur	2,24	2,23	2,21	2,21	2,27
Bandung	5,83	5,81	5,84	5,82	5,84
Garut	2,74	2,71	2,72	2,73	2,78
Tasikmalaya	1,77	1,75	1,74	1,74	1,76
Ciamis	1,51	1,5	1,5	1,51	1,52
Kuningan	1,21	1,2	1,21	1,23	1,25
Cirebon	2,34	2,33	2,32	2,32	2,37
Majalengka	1,52	1,52	1,54	1,58	1,63
Sumedang	1,67	1,65	1,64	1,64	1,66
Indramayu	3,74	3,64	3,71	3,92	3,72
Subang	1,89	1,88	1,89	1,88	1,94
Purwakarta	3,16	3,15	3,13	3,11	3,11
Karawang	10,54	10,86	10,96	11	10,92
Bekasi	14,98	15,16	15,02	14,89	14,85
Bandung Barat	2,19	2,17	2,16	2,15	2,16

Distribusi Persentase	2020	2021	2022	2023	2024
Pangandaran	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55
Bogor	2,16	2,15	2,16	2,16	2,15
Sukabumi	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Bandung	13,37	13,24	13,41	13,28	13,11
Cirebon	1,1	1,09	1,09	1,09	1,08
Bekasi	4,55	4,52	4,49	4,5	4,56
Depok	3,32	3,31	3,32	3,31	3,32
Cimahi	1,52	1,53	1,53	1,53	1,53
Tasikmalaya	1,02	1,02	1,02	1,04	1,04
Banjar	0,21	0,21	0,2	0,2	0,2

Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2025

Persentase PDRB Kabupaten Karawang Terhadap Rata-Rata se Jawa Barat Tahun 2020 - 2024 (%)



Gambar II-130 Persentase PDRB Kabupaten Karawang Terhadap Rata-rata Se-Jawa Barat Tahun 2020-2024 (%)

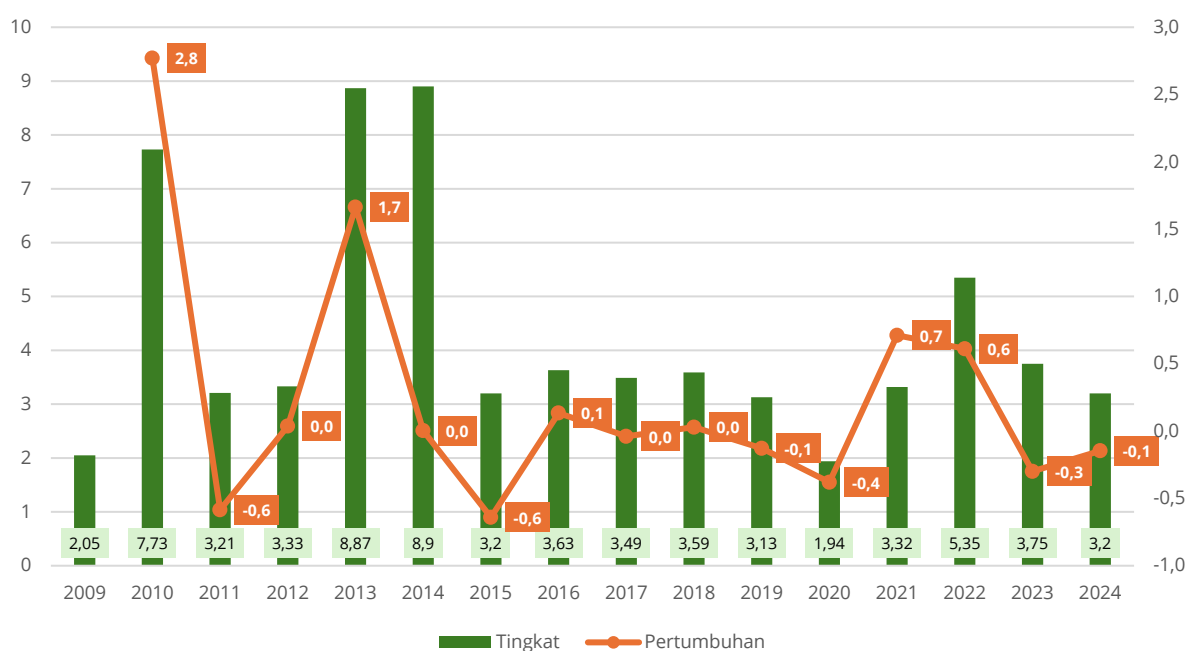
Sumber: BPS, 2025

Kontribusi PDRB Kabupaten Karawang terhadap total perolehan PDRB di Provinsi Jawa Barat di atas rata-rata sleuruh kabupaten/kota di Jawa Barat yakni pada rentang 3,7%.

Dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menjaga harga agar tetap stabil, pada Kabupaten Karawang dibentuk tim khusus yaitu Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam hal ini, laju inflasi di Kabupaten Karawang dijaga di sekitar angka 3,94% (TPID Kabupaten Karawang, 2025).

Inflasi di Kabupaten Karawang fluktuatif sejak 2009-2024 yang menunjukkan konsumsi terhadap barang terus bergerak.

**Tingkat Inflasi Tahunan dan Pertumbuhannya Kabupaten Karawang
(%) per Tahun 2009 - 2024**



Gambar II-131 Tingkat Inflasi Tahunan dan Pertumbuhannya di Kabupaten Karawang per 2009 - 2024

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, 2025

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan pada 2020-2024 dengan predikat B dan A- di 2024 yang secara umum menggambarkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Karawang sudah memadai namun perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar. Sistem meritokrasi di Pemerintah Kabupaten Karawang berdasarkan hasil penilaian KASN pada tahun 2021 dengan predikat sangat baik dengan capaian nilai 329,4 yang akan dievaluasi setiap 2 tahun dan pada 2023 capaian meningkat hingga nilai 334 dengan predikat sangat baik.

Tabel II-71 Indeks Reformasi Birokrasi

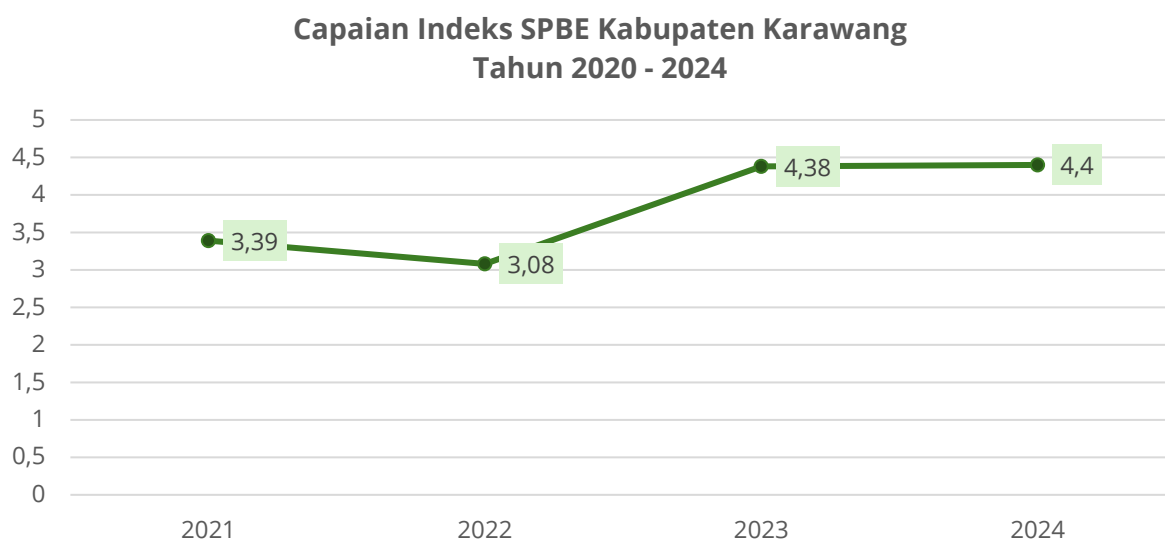
Tahun	Karawang	Peringkat
2020	62.2	B
2021	60.16	B
2022	63.36	B
2023	81.5	A-
2024	81,87	A-

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Dalam lima tahun terakhir, kinerja akuntabilitas Kabupaten Karawang menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023 saat terjadi lonjakan dari nilai 63,36 (peringkat B) menjadi 81,50 (peringkat A-). Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam memperbaiki perencanaan dan pengukuran kinerja, serta tindak lanjut evaluasi yang lebih baik. Konsistensi nilai tinggi pada tahun 2024

menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan manajemen kinerja terus dijalankan secara berkelanjutan.

Peningkatan kinerja tersebut turut didukung oleh transformasi digital yang terus dikembangkan sebagai strategi penguatan tata kelola dan pelayanan publik. Dalam transformasi digital Kabupaten Karawang mempunyai TANGKAR (Tanggap Karawang) yang berfungsi sebagai aspirasi dan pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu terdapat aplikasi pemerintah yang bertujuan sebagai pelayanan masyarakat seperti Karawang Sehat Mobile dan SIGAP Karawang. Untuk mencerminkan transformasi digital di Karawang, dapat dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).



**Gambar II-132 Capaian Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Karawang
Tahun 2020 - 2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari tahun 2021 – 2024, dan pada tahun 2024 menjadi No. 2 tertinggi se Jawa Barat. Mencerminkan komitmen Kab Karawang dalam transformasi digital.

Penurunan nilai dari tahun 2021 ke 2022 disebabkan oleh perubahan sifat pelaksanaan menjadi pemantauan, bukan evaluasi menyeluruh seperti tahun-tahun sebelumnya. Dalam proses pemantauan tahun 2022, tidak dilakukan tahapan wawancara maupun perbaikan. Evaluator langsung menilai berdasarkan pengisian indikator dan evidence yang telah kami siapkan, tanpa proses klarifikasi atau komunikasi lanjutan. Akibatnya, nilai yang dikeluarkan merupakan nilai akhir tanpa adanya ruang untuk perbaikan.

Sebaliknya, pada tahun 2023, proses yang dilakukan kembali bersifat evaluasi penuh, sehingga terdapat tahapan wawancara dan perbaikan. Kami memiliki kesempatan untuk melengkapi *evidence* serta mengklarifikasi pengisian indikator secara langsung kepada evaluator. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas penilaian, karena

evidence yang disiapkan lebih matang dan mendapatkan umpan balik langsung saat proses wawancara, yang kemudian dijadikan dasar penilaian akhir oleh evaluator.

Selain berdampak pada peningkatan kualitas penilaian internal, capaian positif tersebut juga tercermin dari hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada periode 2020–2024 dinilai cukup memuaskan oleh masyarakat. Hal ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan birokrasi dan pelayanan yang dilakukan selama ini telah memberikan pengaruh nyata terhadap kualitas layanan yang dirasakan publik. Adapun rincian indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Karawang pada periode tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel II-72 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun	Karawang
2020	80,61
2021	82,3
2022	82,38
2023	83,4
2024	84,88

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Karawang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dari 80,61 pada tahun 2020 menjadi 84,88 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya komitmen dan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, tata kelola pemerintahan, serta kepuasan masyarakat secara umum

Outcome pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2020 hingga 2024 yang menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan yang stabil setiap tahunnya, meskipun belum mengalami lonjakan yang signifikan. Capaian ini menggambarkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar dapat mencapai kategori “BB” (Baik) atau bahkan “A” (Sangat Baik).

Tabel II-73 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

Tahun	Karawang
2020	65,56
2021	66,86
2022	66,57
2023	66,95
2024	67,48

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2023

Pelayanan pemerintahan yang mulai beradaptasi ke era digitalisasi untuk efisiensi pelayanan dan kecepatan serta pengurangan human error dapat diukur dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang pada 2020 – 2022 mendapat nilai baik dan 2023 – 2024 mendapat nilai memuaskan. Komponen pembentuk SPBE adalah

dimensi kebijakan, tata kelola, dan layanan dengan capaian nilai Pemerintah Kabupaten Karawang sebagai berikut.

Tabel II-74 Nilai Dimensi Kebijakan dan Tata Kelola

Tahun	Dimensi Kebijakan	Dimensi Tata Kelola	Dimensi Layanan
2020	4	3.14	3,70
2021	4.1	3,10	3,58
2022	3.2	2,5	4,08
2023	5	4.2	4,70
2024	4.9	4.3	

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020-2024 Rankhir RPJPD Kabupaten Karawang 2025

Nilai dimensi kebijakan mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2023, dari sebelumnya 3,20 pada 2022 menjadi 5,00, yang mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan strategis. Seiring itu, dimensi tata kelola yang sempat menurun hingga 2,50 pada 2022 juga menunjukkan peningkatan menjadi 4,30 pada 2024. Dimensi layanan terus menunjukkan tren positif hingga mencapai 4,70, yang menandakan pelayanan publik semakin optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Perlu disampaikan bahwa nilai pada tahun 2020 menggunakan hasil penilaian (LHE) tahun 2019 karena pada tahun tersebut tidak dilakukan proses evaluasi. Tahun 2020 merupakan periode pemantauan SPBE, dan pemilihan lokus ditentukan berdasarkan usulan Kementerian PANRB. Saat itu, Kabupaten Karawang tidak termasuk dalam lokus yang dipantau sehingga tidak mengikuti proses penilaian. Sementara itu, nilai pada tahun 2022 diperoleh dari hasil pemantauan SPBE, bukan dari evaluasi seperti pada tahun-tahun lainnya. Oleh karena itu, dokumen yang diterbitkan berupa Laporan Hasil Pemantauan (LHP), bukan Laporan Hasil Evaluasi (LHE), meskipun instansi tetap mengikuti proses pemantauan secara aktif

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

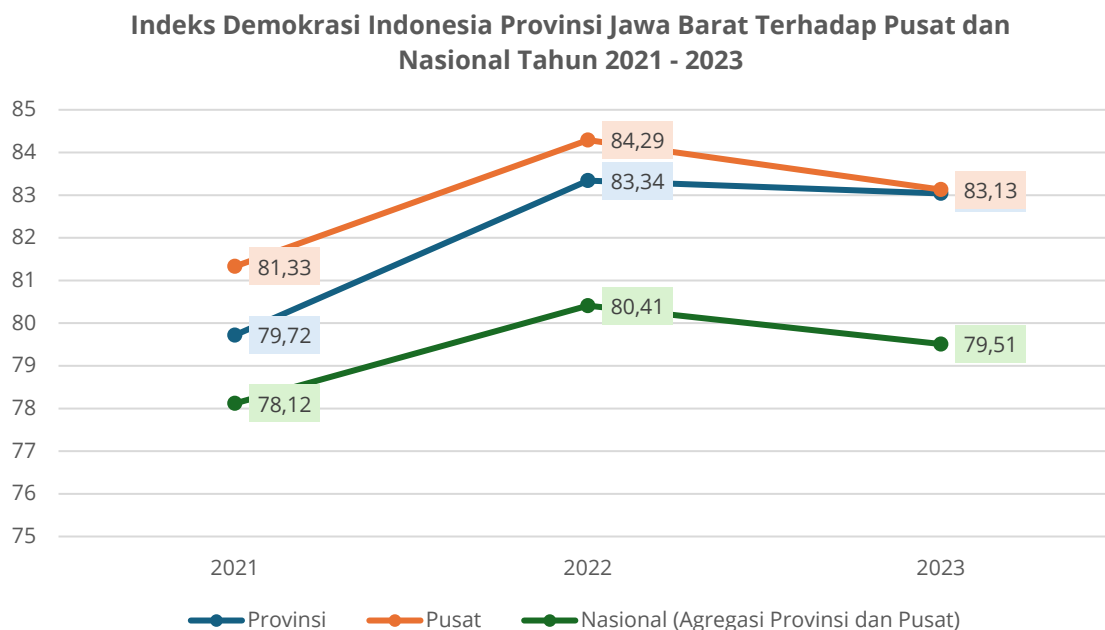
Indeks Demokrasi Indonesia yakni asesmen kondisi demokrasi di provinsi, baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (aspek *procedural democracy*) maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (*substantive democracy*). Aspek yang diukur dalam IDI meliputi Aspek Kebebasan, Aspek Kesenjangan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi 22 indikator. Statistik Indonesia 2025 pada nilai Indeks Demokrasi Indonesia yang dihitung dengan metode baru dengan komponen aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi yang dimulai pada 2021 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki capaian yang cukup tinggi dan tidak terlalu jauh dengan capaian pusat dan nasional.

Tabel II-75 Indeks Demokrasi Indonesia

Tahun	Provinsi	Pusat	Nasional (Agregasi Provinsi dan Pusat)
2021	79,72	81,33	78,12

Tahun	Provinsi	Pusat	Nasional (Agregasi Provinsi dan Pusat)
2022	83,34	84,29	80,41
2023	83,04	83,13	79,51

Sumber: Statistik Indonesia 2023-2025



Gambar II-133 Indeks Demokrasi Provinsi Jawa Barat Terhadap Pusat dan Nasional

Sumber: Statistik Indonesia 2023-2025

Sepanjang 2021-2024 penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Karawang telah mencapai 100% yang berarti 100% masyarakat dan entitas lainnya mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Di tingkat internasional pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan langkah awal dalam membuka komunikasi dan negosiasi melalui penyampaian *Letter of Intent* (LOI) kepada Pemerintah Daedeok-gu, Kota Metropolitan Daejeon, Republik Korea.

Inisiatif ini ditujukan untuk menjajaki kerja sama antarkota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik dalam bidang-bidang: budaya, pariwisata, industri dan ekonomi, pertanian, perikanan dan perkebunan, pengelolaan sampah, ketenagakerjaan, serta teknologi dan informatika.

Langkah diplomatik ini sejalan dengan upaya daya saing daerah, yang tidak hanya menuntut kolaborasi lintas negara tetapi juga membutuhkan modal strategis dalam meningkatkan kapasitas daerah secara menyeluruh. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar membutuhkan modal untuk bersaing di mana pada skala kawasan telah dihitung indeks daya saing daerah berupa formulasi yang diperoleh dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah model yang dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan domestik dan internasional demi kesejahteraan dan berkelanjutan. Aspek utama penghitungan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. 12 pilar yang digunakan adalah kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi dengan 23 dimensi dan 78 indikator (kuesioner). Berikut merupakan besaran indeks daya saing daerah di Kabupaten Karawang.

Tabel II-76 Indeks Daya Saing Daerah

Tahun	Kabupaten Karawang	Provinsi Jawa Barat
2022	3,17	3,64
2023	3,23	3,76
2024	3,56	3,88

Sumber: BRIN 2022-2024

Berdasarkan data diatas, Kabupaten Karawang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat yang juga mengalami peningkatan dari 3,64 (2022) menjadi 3,88 (2024), gap antara Kabupaten Karawang dan Provinsi Jawa Barat cenderung mengecil. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur, pelayanan publik, inovasi, dan sumber daya manusia

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap urusan periode 2021 – 2024 seperti tabel di bawah.

Tabel II-77 Capaian IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
1. Urusan Pendidikan							109,67			127,97			76,42
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Usia Dini	%	55,95	61,22	56,76	61,94	109,13	57,57	65,98	114,61	100	73,43	67,48
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam Pendidikan Dasar	%	98,76	98,99	98,91	99,11	100,20	99,06	98,05	98,98	100	100,28	100,28
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	78,68	79,2	78,94	79,52	100,73	79,21	88,18	111,32	100	92,69	92,69
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	20,11	20,24	20,29	26,1	128,63	20,47	38,27	186,96	100	45,24	45,24
2. Urusan Kesehatan							78,92			87,71			88,73
5.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio	0,7361111	0,875	0,001	0,0012285	122,85	0,7361111	16:05,7	90,57	0,7361111	1,33	
6.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	87,5	83,34	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	92,42	100	89,18	89,18	100	87,67	87,67	100	100	100
8.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,17	100	94,45	94,45	100	91,73	91,73	100	99,23	99,23
9.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	98,36	100	100	100,00	100	96,07	96,07	100	99,41	99,41

No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
10.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	81,68	100	89,49	89,49	100	89,38	89,38	100	99,08	99,08
11.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	73,86	100	85,12	85,12	100	97,18	97,18	100	99,51	99,51
12.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	59,44	100	23,36	23,36	100	60,51	60,51	100	68,33	68,33
13.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	53,44	100	71,03	71,03	100	75,47	75,47	100	90,61	90,61
14.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	31,61	31,61	100	83,48	83,48	100	52,91	52,91
15.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	65,4	100	42,82	42,82	100	93,34	93,34	100	79,06	79,06
16.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	60,01	100	73,55	73,55	100	81,47	81,47	100	83,17	83,17
17.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	48,07	100	97,89	97,89	100	92,51	92,51	100	68,65	68,65
18.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	52,41	100	83,5	83,50	100	88,52	88,52	100	113,53	113,53
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							57,67			75,27			76,30
19.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	65,3	95	66,8	70	104,79	68,3	89	130,31	69,8	100	143,27

No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
20.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	84,65	84,36	86,12	85,61	99,41	88,07	88,03	99,95	90,54	88,56	97,81
21.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	75,87	75,96	76,75	76,34	99,47	77,97	77,16	98,96	79,37	78,37	98,74
22.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	26	26	27	N/A	0,00	28	28	100	29	N/A	0
23.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	85,08	N/A	86	N/A	0,00	87	85	97,7	88	82,98	94,30
24.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	4	4	8	N/A	0,00	12	N/A	0	16	N/A	0
25.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100,00	100	N/A	0	100	100	100
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							85,42			123,18			151,63
26.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	2809,00%	26,09	53,18	54,18	101,88	78,26	88,96	113,67	100	100	100
27.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	12,15	9,1	15,46	2,98	19,28	18,77	28,43	151,47	22,08	51,12	231,52
28.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	95,91	93,76	95,58	92,09	96,35	93,25	90,36	96,9	91,92	93,1	98,73
29.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	5,4	5,2	7,9	9,81	124,18	10,4	13,59	130,67	12,9	22,74	176,28
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							100			100			395,31

No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
30.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100
31.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100
32.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	658,33	658,33
33.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100
34.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	1.328,57	1328,57
35.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100,00	100	100	100	100	84,96	84,96
6. Urusan Sosial							102,01			91,70			50
36.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	90	97,15	100	104,02	104,02	100	83,39	83,39	100	N/A	0
37.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	82	100	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100
7. Urusan Tenaga Kerja							119,48			101,66			145,84
38.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	100	100	100,00	100	3,6	3,6	100	100	100



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
39.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	38,02	82	42,11	44,36	105,34	45	12,7	28,22	47,62	45,64	95,84
40.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	42	79,16	43	46,41	107,93	44	85,05	193,3	45	79,32	176,27
41.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	21,47	34,83	21,82	35,93	164,67	22,22	40,33	181,5	22,67	47,89	211,25
8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							50,40			59,80			60,03
42.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,6	1,18	5,6	1,89	33,75	5,8	2,14	36,9	5,8	5,8	100
43.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,019	0,006	0,019	0,007	36,84	0,019	0,01	52,63	0,019	N/A	0
44.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	5,397	4,75	5,397	4,35	80,60	5,397	4,85	89,86	5,397	4,32	80,08
9. Urusan Pangan							109,9			112,21			90,89
45.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	91,84	90,84	92	101,1	109,89	92,84	104,17	112,21	93	84,53	90,89
10. Urusan Lingkungan Hidup							98,11			106,26			91,18
46.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	47,15	44,8	47,4	44,92	94,77	47,64	51,4	107,89	47,89	50,34	105,12
47.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	48	47,94	49	51,94	106,00	50	62	124	51	37,45	73,43



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
48.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	96,88	100	93,55	93,55	100	86,89	86,89	100	95	95
11. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							94,91			111,14			100,23
49.	Perekaman KTP elektronik	%	98,9	98,05	99,2	98	98,79	99,3	100	100,7	99,5	99,99	100,49
50.	Kepemilikan akta kelahiran	%	90,35	96,18	90,5	97,54	107,78	90,8	95,17	104,81	91,3	95,56	104,67
51.	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	23	29,68	26	33,93	130,50	29	53,08	183,03	32	62,64	195,75
52.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	6,25	4	9,4	4	42,55	12,5	7	56	15,5	N/A	0
12. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							74,35			118,69			49,5
53.	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	%	2,02	2	2,69	2	74,35	3,37	4	118,69	4,04	2	49,5
13. Urusan Keluarga Berencana							116,40			90,05			99,78
54.	TFR (Angka Kelahiran Total)	Poin	2,3	2,22	2,28	2,21	96,93	2,26	2,05	90,71	2,24	2,01	111,44
55.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	62	72,39	65	70,02	107,72	68	68,65	100,96	70	64,22	91,74
56.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	10,72	14,38	9,72	14,05	144,55	9,22	11,75	78,47	8,72	9,07	96,15
14. Urusan Perhubungan							102,81			85,23			81,87
57.	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Poin	0,6297	0,49	0,6299	0,68	107,95	0,6301	0,515	81,73	0,6303	0,5845	92,73
58.	V/C Rasio di Jalan Kabupaten	%	0,75	0,52	0,73	0,713	97,67	0,71	0,63	88,73	0,69	0,49	71,01



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
15. Urusan Komunikasi dan Informatika							68,21			204,09			101,14
59.	Prosentase Penyelenggaraan SPBE di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang	%	69	78,23	76	84,68	111,42	82	88,71	108,18	88	90	102,27
60.	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik	Peringkat	4	-	4	1	25,00	3	1	300	1	1	100
16. Urusan Koperasi dan UMKM							111,88			116,50			97,23
61.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	68	69,1	68,3	69,5	101,76	68,5	77,4	112,99	68,7	51,27	74,63
62.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	4,93	5.9	5	6,1	122,00	5,5	6,6	120	6	7,19	119,83
17. Urusan Penanaman Modal							1983			1065,5			32,79
63.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	2	56	2	39,66	1983,00	2	21,31	1065,5	2	6,1	32,79
18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga							159,38			34,42			119,22
64.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	8,01	7,88	8,21	7,88	95,98	8,41	N/A	0	8,6	N/A	0
65.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	16,06	16,42	16,45	16,42	99,82	16,84	17,39	103,27	17,22	21,41	124,33
66.	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	15	23	17	48	282,35	19	N/A	0	21	49	233,33
19. Urusan Statistik							92,64			100			100
67.	Prosentase statistik sektoral yang diterbitkan	%	100	100	100	92,64	92,64	100	100	100	100	100	100
20. Urusan Persandian										100			100
68.	Indeks Keamanan Informasi	Indeks	Level I+ s/d II	Level I+ s/d III	Level II s/d II+	I+ s/d II		Level II+ s/d III	Level II+ s/d III+	100	Level III s/d III+	Level III s/d III+	100



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
21. Urusan Kebudayaan							100			100			105,26
69.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	82,5	82,5	85	85	100,00	90	90	100	95	100	105,26
22. Urusan Perpustakaan							155,38			123,18			245,33
70.	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	49	44,96	53	43,92	82,87	49,1	53,3	108,55	53,1	54,48	102,6
71.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	8	13,34	9	20,51	227,89	15,25	21,015	137,8	16,25	63,06	388,06
23. Urusan Kearsipan							126,87			100,57			237,29
72.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	60	33,87	61	39,69	65,07	62	62,7	101,13	63	89,06	141,37
73.	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	2	5425	3	5,66	188,67	4	4	100	5	16,66	333,2
24. Urusan Kelautan dan Perikanan							100,06			100,14			100,02
74.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	54.382,89	54.411,19	54.973,33	55.007,24	100,06	55.572,21	55.648,53	100,14	56.179,44	56.188,76	100,02
25. Urusan Pariwisata							82,31			92,32			191,46
75.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	62,09	59,64	68,3	56,22	82,31	75,13	69,36	92,32	82,64	158,22	191,46
26. Urusan Pertanian							69,49			68,92			69,71



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
76.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Padi (Kw/Ha)	71,76	72,69	72,48	72,82	100,47	73,2	72,01	98,37	73,93	70,24	95,01
		Kedelai (Kw/Ha)	15,15	17,01	15,25	16,47	108,00	15,4	16,69	108,38	15,65	17,86	114,12
77.	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	7	0	6	0	0,00	5	0	0,00	5	0	0,00
27. Urusan Perdagangan							99,75			100			99,34
78.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,24	70,24	72,5	72,5	100,00	72,5	72,5	100	72,5	88,989	122,74
79.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	20,5	20,1	21	21	100,00	21	21	100	21	21	100
80.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	80,1	80	80,1	79,5	99,25	80,1	80,1	100	80,1	60,31	75,29
28. Urusan Perindustrian							87,74			88,75			81,90
81.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1,5	1,2	1,55	1,25	80,65	1,6	1,24	77,5	1,65	1,3	78,79
82.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	76,92	71,95	76,92	72,95	94,84	76,92	76,92	100	76,92	65,38	85
29. Urusan Pengawasan							81,5			94,18			100
83.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat	3	3	3	2,5	83,33	3	3,031	101,03	3	3	100



No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
84.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	3	3	3	2,39	79,67	3	2,62	87,33	3	3	100
30. Urusan Kepegawaian							32,40			232,97			239,43
85.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	625	242,97	630	70,84	11,24	63,5	69,71	109,78	6,4	72,34	1130,31
		%	88	24,72	90	N/A	0	92	69,71	75,77	94	N/A	0
86.	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	14	11,25	14,5	11,25	77,59	15	31,02	206,8	15,5	31,23	201,48
		%	4,5	3,9	5	N/A	0	5,5	31,02	564	6	N/A	0
87.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,8	35,36	33,5	35,36	105,55	34	24,09	70,85	34,5	36,15	104,78
		%	5,5	N/A	6	N/A	0	6,5	24,09	370,62	7	N/A	0
31. Urusan Keuangan							153,39			113,55			123,35
88.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4	2,35	4	0,871	21,78	4	2,17	184,33	4	1,58	253,16
89.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	129,95	5	5,934	118,68	5	4,53	110,38	5	6,13	81,57
90.	Manajemen Aset	%	100	4	100	100	100,00	100	100	100	100		
91.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4	15,01	4	18,54	463,50	4	12,3	32,52	4	9,71	41,19
92.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	25	16,43	25	18,54	74,16	25	17,07	68,28	25	19,37	77,48
93.	Rasio PAD terhadap Pendapatan	%	15	0,65	15	33,684	224,56	15	34,19	227,93	15	32,12	214,13

No	Indikator sasaran	Satuan	2021		2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4		5			6			7		
94.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	85	0,61	85	60,425	71,09	85	60,67	71,38	85	61,7	72,59
32. SETDA							73,47			44,34			517,17
95.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	100	100	100	100,00	100	N/A	0	100	93,23	93,23
96.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100,00	100	66,67	66,67	100	100	100
97.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0,5	0	0,00	0,75	0	0	1	0	0
98.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	3,03	2,85	3,5	0,588	16,80	4	0,17	4,25	4,2	96,734	2303,19
99.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40	30,21	42	63,226	150,54	45	67,84	150,76	47	42,031	89,43

Sumber : Bappeda Kabupaten Karawang, 2025

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

2.1.5.1 Sektor Pendidikan

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar SPM pendidikan di tingkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. pendidikan dasar
- c. pendidikan kesetaraan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menyebutkan pendidikan dasar meliputi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini adalah peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Penerima pelayanan dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan adalah Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
- c. tata cara pemenuhan standar

2.1.5.2 Sektor Kesehatan

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM sektor ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota terdiri atas: pelayanan kesehatan ibu hamil

- a. pelayanan kesehatan ibu bersalin
- b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- c. pelayanan kesehatan balita
- d. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- e. pelayanan kesehatan pada usia produktif
- f. pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- g. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- h. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- i. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- j. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- k. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM kesehatan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar adalah warga negara dengan ketentuan:

- a. penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- b. penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
- c. ibu hamil untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu hamil
- d. ibu bersalin untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin
- e. bayi baru lahir untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- f. balita untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan balita
- g. usia pendidikan dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- h. usia produktif untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif
- i. usia lanjut untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- j. penderita hipertensi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- k. penderita diabetes melitus untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- l. orang dengan gangguan jiwa berat untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- m. orang terduga tuberkulosis untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- n. orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia [*Human Immunodeficiency Virus*] untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Capaian target SPM Dinas Kesehatan Kabupaten 2024 sebagai sudah mencapai target yang dibuat misalnya capaian pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi

Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sudah lebih 100% sedangkan pelayanan lainnya masih di bawah 100%.

2.1.5.3 Sektor Pekerjaan Umum

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. petunjuk teknis atau tata cara standar

Dalam Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Pekerjaan Uum dan Perumahan Rakyat, mutu pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Penerima pelayanan dasar SPM pekerjaan umum pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
- b. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

Capaian target SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2024 pada bagian pekerjaan umum sudah mencapai 100% untuk seluruhnya.

2.1.5.4 Sektor Perumahan Rakyat

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/ atau jasa
- b. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Penerima pelayanan dasar SPM perumahan rakyat pemerintah daerah kabupaten/kota adalah warga negara dengan ketentuan:

- a. korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program kabupaten/kota

Dalam Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disebut jenis pelayanan dasar SPM perumahan rakyat pemerintah daerah kabupaten/kota mencakup:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni berupa:

- a. pendampingan/pembinaan
- b. pembimbingan
- c. penyuluhan
- d. pelayanan informasi
- e. bantuan teknis

Bantuan teknis meliputi:

- a. pendampingan penggantian kerugian
- b. penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus
- c. pembangunan Rumah Susun Umum
- d. pembangunan Rumah Khusus
- e. pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

Mutu pelayanan dasar SMP perumahan rakyat pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar
- b. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa setiap unit rumah rusak akibat bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni
- d. mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
- e. standar jumlah sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa setiap rumah tangga terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani
- f. kualitas pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni pelayanan dasar kewenangan kabupaten

Penerima pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
- b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.

Capaian target SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karawang 2024 pada bagian perumahan rakyat sudah mencapai 100% kecuali Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

2.1.5.5 Sektor Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM sektor ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. pelayanan informasi rawan bencana
- c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu warga negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- c. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten Kota disebutkan bahwa mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP
- b. standar sarana prasarana Satpol PP
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat

- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- a. pelayanan kerugian materiil
- b. pelayanan pengobatan

Kerugian materiil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. dan kerugian materiil terdiri atas:

- a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan
- b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara yang dimaksud ialah yang memiliki kriteria:

- a. yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

2.1.5.6 Sektor Sosial

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum menjelaskan bahwa jenis pelayanan dasar pada SPM sosial kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar adalah warga negara dengan ketentuan:

- a. penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti
- c. lanjut usia telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar berhak mendapatkan Mutu Pelayanan Dasar berupa::

- a. standar dan jumlah kualitas barang dan/atau jasa
- b. standar dan jumlah kualitas sumber daya manusia
- c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam Laporan SPM Dinas Sosial Kabupaten Karawang 2024 diketahui bahwa capaian sudah sesuai target kecuali penyediaan tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota yang ditargetkan 3 unit namun baru tercapai 1 unit dan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang ditargetkan 40 orang namun hanya tercapai 20 orang

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal perdagangan dilakukan dengan beberapa negara USA, Italia, Jepang, Belgia, India, Pakistan, Singapura, Denmark, Belanda, Inggris, Perancis, Australia, Korea, Afrika, China, dll. namun tidak terbatas pada perdagangan, bentuk kerjasama antar pemerintah daerah maupun pemerintah daerah dengan lembaga lainnya juga diketahui terjadi.

Beberapa kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan pihak-pihak, di antaranya:

1. Pada 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yakni menjalin kerjasama dengan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung untuk mendapatkan kajian ilmiah pengembangan daerah yang memadai.
2. Pada 2018, terdapat kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT TASPEN (Persero) dan BPJS Ketenagakerjaan
3. Pada 2024, ditandatangani kerjasama ekonomi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Daerah Daedeok-Gu Korea Selatan

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten. Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berbagai program pembangunan infrastruktur telah disusun dan dilaksanakan.

2.1.7.1 Proyek/Program Strategis Nasional di Kabupaten Karawang

Pembangunan Infrastruktur Strategis dari Pemerintah Pusat, dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut daftar PSN yang terdapat di lingkup wilayah Kabupaten Karawang.

1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I
Proyek ini bertujuan menyediakan air minum dengan kapasitas 5.000 liter/detik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. SPAM ini memanfaatkan air baku dari Bendungan Jatiluhur di Provinsi Jawa Barat.
2. Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan
Jalan tol ini dirancang untuk mengurangi kemacetan di ruas tol Jakarta–Cikampek eksisting dan meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan wilayah timur, termasuk Karawang.
3. Pembangunan Bahan Bakar Hijau (*Green Refinery*) – Katalis Merah Putih Pupuk Kujang Cikampek

Proyek ini merupakan inisiatif untuk mengembangkan energi terbarukan melalui produksi bahan bakar hijau di fasilitas Pupuk Kujang Cikampek.

2.1.7.2 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042

Rencana pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karawang dapat dilihat dari RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042 yang mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu, Peraturan Daerah Jawa Barat No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042.

Kabupaten Karawang sendiri terdapat dalam WP Purwasuka meliputi daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Dengan arahan pengembangan antara lain:

1. meningkatkan peran PKN sebagai pusat koleksi dan distribusi skala internasional, nasional atau beberapa provinsi melalui penetapan fasilitas pendukung perhubungan dan fasilitas ekonomi skala regional pada setiap Kawasan;
2. meningkatkan peran PKW sebagai penghubung pergerakan dari PKL ke PKN terdekat melalui pengembangan prasarana dan permukiman yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi di Wilayah sekitarnya;
3. meningkatkan peran PKL sebagai Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
4. menata perkembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah utara dan tengah untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan;
5. pengendalian perkembangan perkotaan di wilayah selatan dengan tidak melebihi daya dukung dan daya tampungnya;
6. mengembangkan sistem angkutan umum massal berbasis rel di Kawasan Perkotaan Bodebek, Karawang dan Purwakarta, Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Kawasan Perkotaan Cirebon Raya untuk mengurangi masalah transportasi perkotaan;
7. mengembangkan sistem energi dan kelistrikan yang dapat meningkatkan fungsi pendukung kegiatan di perkotaan dan perdesaan;
8. mengembangkan sistem telekomunikasi untuk menunjang kegiatan ekonomi di perkotaan dan perdesaan;
9. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana sumber daya air berbasis DAS dan CAT untuk menunjang kegiatan domestik, industri dan pertanian;
10. meningkatkan pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan budaya di PKL, untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mengurangi mobilitas dan migrasi ke pusat kegiatan di PKN dan PKW;
11. meningkatkan fungsi Kawasan Lindung dan memulihkan secara bertahap Kawasan Lindung yang telah berubah fungsi;
12. membatasi pengembangan sarana prasarana Wilayah di sekitar Kawasan Lindung untuk menghindari tumbuhnya kegiatan perkotaan yang mendorong alih fungsi Kawasan Lindung;

13. meningkatkan fungsi lindung Kawasan Budi Daya yang merupakan kawasan resapan air dan Kawasan rawan bencana melalui pengaturan jenis kegiatan dan intensitas ruang dalam ketentuan khusus;
14. mempertahankan lokasi Kawasan ekosistem esensial;
15. mengoptimalkan pendayagunaan Kawasan Lindung hutan dan bukan hutan melalui jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
16. meningkatkan tutupan lahan hutan sebagai penyerap
17. emisi, pengatur tata air, dan mengurangi risiko bencana alam;
18. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan pada Kawasan Lindung;
19. mengendalikan kerusakan DAS melalui rehabilitasi hutan di hulu DAS kritis dan sangat kritis;
20. meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan;
21. meningkatkan luasan hutan untuk mencapai luasan minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS;
22. mempertahankan dan meningkatkan Kawasan resapan air atau Kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
23. mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Lindung yang berada di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Kabupaten Karawang meliputi Karawang, Rengasdengklok, Teluk Jambe Barat, dan Cilamaya dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal dalam struktur RTRW Provinsi Jawa Barat.

Rencana Struktur Ruang pada Kabupaten Karawang antara lain:

Tabel II-78 Rencana Pembangunan Transportasi Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang Tahun 2022 - 2042

No	Rencana	Keterangan
Rencana Transportasi		
1	Jalan Arteri Primer	• Bts. Kota Cikarang – Bts. Kota Karawang • Jalan Pangkal perjuangan • Lingkar Karawang • Bts. Kota Karawang – Bts. Kota Cikampek • Jalan Raya Dawuan • Jalan Jend. A. Yani • Bts. Kota Cikampek – Bts. Kabupaten Subang/Karawang • Jalan Jend. Sudirman • Jalan Raya Jatisari • Bts. Kabupaten Subang/Karawang – Bts. Kota Pamanukan • Bts. Kabupaten Karawang/Pwk – Sadang • Jalan Ir. H. Juanda • Jalan By Pass Jomin • Akses Tol Kalihurip (Dawuan) - Karawang
2	Jalan Kolektor Primer Dua (JKP -2)	• Jalan Proklamasi • Tanjungpura – Batujaya • Kosambi – Batas Karawang/Purwakarta (Curug) Kabupaten Purwakarta

No	Rencana	Keterangan
		Batas Karawang/Purwakarta (Curug) - Purwakarta
3	Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP - 3)	- Palumbonsari – Johar – Tegalloya (Loji) Kabupaten Karawang - Tegalloya (Loji) – Baged/Jagatamu (Batas Kabupaten Karawang/Bogor) - Cariu-Jagatamu (Batas Kabupaten Bogor/Karawang) - Jalan Bhayangkara I - Jalan Surotokunto - Jalan Jenderal Ahmad Yani - Jalan Pangkal Perjuangan - Jalan Tuparev I - Manunggal VII - Telgasari - Tempuran
4	Jalan Tol	- Sentul Selatan – Karawang Barat (JORR III) (JB39) (Rencana) - Karawang Barat – JORR II (Babelan) (JB38) (Rencana)
5	Terminal Penumpang Tipe A	Terminal Tipe A pada Kabupaten Karawang
6	Jalan Timbang	Balonggaduh, Daerah Kabupaten Karawang
7	Stasiun Kereta Api	Stasiun Kereta Api di Daerah Kabupaten Karawang
8	Pelabuhan Sungai dan Danau	Pelabuhan Pusakajaya di Kabupaten Karawang
9	Terminal Khusus	Terminal Khusus di Daerah Kabupaten Karawang
10	Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) - PPP Ciparage Daerah Kabupaten Karawang Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) - Daerah Kabupaten Karawang yaitu PPI Pakis Jaya, PPI Sedari, PPI Cemar, PPI Sungai Buntu, PPI Pasir Putih, dan PPI Tangkolak
11	Alur Pelayanan Umum dan Perlintasan	- Sepanjang perairan utara Daerah Kabupaten Bekasi hingga Daerah Kabupaten Karawang, - Pelabuhan Tanjung Pakis Daerah Kabupaten Karawang
12	Bandar Udara Pengumpul	Bandar Udara Pengumpul di Kabupaten Karawang
Rencana Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi		
1	Jaringan Minyak dan Gas Bumi	- Jaringan Minyak dan Gas Bumi di Daerah Kabupaten Karawang - Jaringan Pipa Gas dan Pipa Bawah Laut di Daerah Kabupaten Karawang - Jaringan Pipa Gas di Permukaan Laut di Daerah Kabupaten Karawang - Jaringan Gas Perkotaan di Daerah Kabupaten Karawang
Jaringan Infrastruktur Ketenaga Listrik		
1	Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Daerah Kabupaten Karawang
2	Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Saran Pendukung	- Pengembangan transmisi tenaga listrik antarsistem meliputi SUTT, SUTET, Jaringan Transmisi Tenaga Listrik di seluruh Kabupaten Karawang - Jaringan Distribusi Tenaga Listrik meliputi gardu listrik, dan jaringan distribusi tenaga listrik di seluruh Kabupaten Karawang
Sistem Jaringan Telekomunikasi		

No	Rencana	Keterangan
1	Jaringan Bergerak	- Pengembangan Jaringan Seluler, Jaringan Satelit pada area <i>blankspot</i> di seluruh Kabupaten Karawang - Pengembangan Cakupan dan Kualitas Layanan melalui pengaturan lokasi
2	Jaringan Tetap	- Jaringan Kabel Bawah Laut di Daerah Kabupaten Karawang - Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Instalasi Penunjang Jaringan Kabel Telekomunikasi Laut dan Darat
Sistem Jaringan Sumber Daya Air		
1	Sistem Jaringan Irigasi	- Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Pusat Lintas Daerah Kabupaten/Kota di DI Jatiluhur - Jaringan Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota di DI Pundong di Daerah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta dan DI Waru di Daerah Kabupaten Karawang - Jaringan Irigasi Tambak Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di DI Tambak Kapur Asem dan DI Tambak Muara Baru
2	Sistem Pengendali Banjir	- Jaringan Pengendali Banjir pada Sungai Cibeet - Bangunan Pengendali Banjir pada Waduk Cibeet
3	Jaringan dan Bangunan Sumber Daya Air	- Bendungan di Kabupaten Karawang - Bendung di Kabupaten Karawang
4	Jaringan Prasarana Lainnya	- Jaringan SPAM di Kabupaten Karawang - Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat di Kabupaten/Kota - Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada Pengelolaan Limbah B3 Terpadu di Daerah Kabupaten Karawang - Sistem Jaringan Persampahan pada TPPAS Regional Ciwaringin

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 - 2042, 2025

2.1.7.3 Rencana Pembangunan Infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031

Rencana Penataan Ruang di Kabupaten Karawang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011 – 2031 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Karawang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Karawang sejahtera **berbasis pertanian dan industri**. Untuk itu tujuan Penataan Ruang disusun dengan kebijakan dan strategi Penataan Ruang antara lain :

Tabel II-79 Kebijakan dan Strategi Rencana Tata Ruang Kabupaten Karawang 2011 - 2031

No	Kebijakan	Strategi
1	Pengembangan kawasan perkotaan serta pusat-pusat kegiatan yang berhirarkis dalam rangka mendukung pengembangan pertanian dan industri	- Mengembangkan kawasan perkotaan Cikampek meliputi Kecamatan Cikampek, Kotabaru, Purwasari, dan kawasan perkotaan Karawang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, dan Klari; - Mengembangkan kecamatan Klari, Purwasari, Jatisari, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Kotabaru, Tirtamulya, Telagasari, Batujaya, Pedes, Majalaya, Cilamaya Kulon, Tegalwaru, Pangkalan, dan Lemahabang yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan kawasan;

No	Kebijakan	Strategi
		c. Mengembangkan kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Cilebar, Rawamerta, Jayakarta dan Kutawaluya yang memiliki potensi sebagai pusat pelayanan lingkungan; d. Mengembangkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian lahan basah, perkebunan, dan hortikultura di Kecamatan Rengasdengklok dan Cilamaya Wetan; dan e. Mengembangkan pusat-pusat pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, dan Ciampel.
2	Pelestarian lahan tanaman pangan yang mendukung pengelolaan pertanian lahan basah berkelanjutan	a. Menetapkan kawasan yang secara eksisting didominasi oleh lahan pertanian sebagai kawasan peruntukan pertanian; b. Meminimalkan potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi peruntukan dan penggunaan lahan lainnya; c. Memperhatikan secara khusus kawasan pertanian yang mempunyai desakan paling besar untuk terjadinya alih fungsi lahan akibat perkembangan kawasan perkotaan koridor Karawang – Cikampek; d. Memperhatikan secara khusus potensi alih fungsi lahan pertanian yang tinggi akibat pengembangan pelabuhan internasional Cilamaya.
3	Pemantapan pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan industri	a. Mengarahkan pengembangan industri di Kecamatan Cikampek, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Pangkalan dan Rengasdengklok sebagai kawasan peruntukan industri; b. Menangani secara khusus kawasan industri yang rawan terhadap potensi banjir; dan c. Mengembangkan penanganan khusus bagi industri-industri yang secara eksisting sudah berdiri di luar kawasan industri dan kawasan peruntukan industri.
4	Pengembangan sistem jaringan prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan yang ada serta mampu melayani keseluruhan wilayah	a. Mempertegas sistem hirarkis jaringan jalan dengan mengembangkan sistem jaringan jalan yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan; b. Menjaga agar peningkatan ataupun pembangunan jaringan jalan di bagian utara Kabupaten tidak menimbulkan bangkitan kegiatan yang dapat mengancam keberadaan lahan pertanian dan kawasan pesisir; c. Mengembangkan terminal dalam tipe yang sesuai di setiap pusat kegiatan; d. Mengembangkan secara bertahap sistem angkutan massal yang berbasis kereta api; e. Mengembangkan jaringan pelayanan air minum, kelistrikan, limbah dan persampahan secara optimal sehingga dapat melayani kawasan pengembangan industri dan kawasan perkotaan lainnya, serta secara bertahap melayani seluruh kawasan perdesaan; dan f. Mengembangkan pasar induk skala regional di kawasan perkotaan.
5	Pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	a. Memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; b. Melindungi dan menjaga fungsi lindung yang ada di kawasan lindung yang ditetapkan; dan

No	Kebijakan	Strategi
		c. Memperhatikan secara khusus keberadaan Situs Batujaya sebagai bukti kesejarahan keberadaan Kabupaten.
6	Pengembangan pola ruang wilayah yang mengarahkan distribusi peruntukan ruang dalam wilayah berdasarkan kebutuhan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya	a. Menetapkan pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, perikanan, pertambangan, pariwisata, permukiman, industri serta peruntukan lainnya; b. Merumuskan ketentuan pemanfaatan ruang di setiap kawasan peruntukan dengan prinsip setiap kegiatan yang akan dikembangkan tidak mengganggu fungsi utama kawasan serta menurunkan kualitas ruang; c. Melindungi fungsi dan keberadaan kawasan hutan produksi, pengembangan pertanian dan permukiman; d. Memprioritaskan pengembangan kawasan pertanian dan industri; dan e. Menjaga keberadaan kawasan pertahanan dan keamanan yang berada di Kecamatan Tegalwaru dan Telukjambe Timur.

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031, 2025

Rencana Struktur Ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 antara lain :

Tabel II-80 Ringkasan Rencana Pola dan Struktur Ruang RTRW Kabupaten Karawang 2011 - 2031

No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
Rencana Struktur Ruang				
1	Sistem Pusat Pelayanan	Sistem Perkotaan	PKL	a. PKL Karawang Barat dan PKL Karawang Timur membentuk Kawasan Perkotaan Karawang yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Klari. b. PKL Cikampek membentuk Kawasan Perkotaan Cikampek yang terdiri dari Kecamatan Cikampek, Kotabaru dan Purwasari. c. PKL Rengasdengklok membentuk Kawasan Perkotaan Rengasdengklok yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok. d. PKL Cilamaya Wetan membentuk Kawasan Perkotaan Cilamaya Wetan yang meliputi Kecamatan Cilamaya Wetan.
			PPK	Kecamatan Klari; Kecamatan Purwasari; Kecamatan Jatisari; Kecamatan Telukjambe Barat; Kecamatan Telukjambe Timur; Kecamatan Kotabaru; Kecamatan Tirtamulya; Kecamatan Telagasari; Kecamatan Lemahabang; Kecamatan Majalaya; Kecamatan Batujaya; Kecamatan Pedes; Kecamatan Cilamaya Kulon; Kecamatan Pangkalan; dan Kecamatan Tegalwaru.
			PPL	Ibukota Kecamatan Tempuran, Banyusari, Pakisjaya, Ciampel, Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar, Rawamerta, Jayakarta, dan Kecamatan Kutawaluya.
2	Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan Jalan	Jalan Bebas Hambatan	Perencanaan pengembangan sistem jalan bebas hambatan meliputi ruas jalan bebas hambatan Jakarta - Cikampek dan Cikampek - Bandung.
			Jaringan Jalan Nasional	a. Peningkatan jalan Arteri Primer pada Jalan Cikampek - Cirebon, Bandung, dan Karawang b. Peningkatan Jalan Kolektor Primer, pada jalan lingkaran utara perkotaan Karawang c. Peningkatan status ruas jalan cikalang - cimaya d. Pembangunan ruas baru, lingkaran barat dan timur perkotaan karawang dan jalan penghubung Kawasan Pelabuhan Internasional Cimaya
			Jaringan Jalan Provinsi	a. Peningkatan jalan kolektor primer pada, Tanjungpura - Rengasdengklok - Batujaya dan Kosambi - Curug - Batas Purwakarta b. Peningkatan status jalan kolektor primer pada jalan johar-badami-pangkalan-loji-kutamaneuh, jalan pangkalan - batas bogor, jalan johar - telagasari - lemahabang-cimaya wetan, johar-balendung-gempolhaji, dan telukjambe barat - kobakbiru. c. Pembangunan ruas baru, peningkatan jalan eksisting pada jalan Batujaya - Tirtajaya - Jayakarta - Pedes - Cilebar - Tempuran - Cilamaya Kulon d. Peningkatan status jalan kolektor primer pada jalan johar-badami-pangkalan-loji-kutamaneuh, jalan pangkalan - batas bogor, jalan johar - telagasari - lemahabang-cimaya wetan, johar-balendung-gempolhaji e. Peningkatan status jalan kolektor primer f. Peningkatan status ruas jalan cikalang - cimaya
			Jaringan Jalan Kabupaten Jaringan Jalan Kabupaten	Peningkatan jalan kolektor a. Peningkatan Jalan Kolektor Primer, pada jalan lingkaran utara perkotaan karawang b. Peningkatan status ruas jalan cikalang - cimaya Peningkatan jalan kolektor, pembangunan dan peningkatan jaringan jalan menuju ke objek pariwisata, peningkatan jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.
			Rencana Prasarana Lalu	a. Peningkatan Terminal Penumpang pada, Tipe C → Tipe A di Kawasan Perkotaan Cikampek

No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
			Lintas dan Angkutan Jalan	b. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kawasan Perkotaan Karawang dan Tipe C di Batujaya, Cilamaya Wetan, Lemahabang, Tegalwaru/Pangkalan, dan Pedes c. Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe C di Perkotaan Karawang dan Rengasdengklok d. Pembangunan Terminal Peti Kemas Pendukung Pelabuhan Internasional Cilamaya e. Pembangunan Terminal barang f. Pengembangan Interchange Tol g. Pembangunan dan Peningkatan jalan Lingkungan sekunder
			Pelayanan Lalu Lintas dan angkutan Jalan	Mengoptimalkan jalur angkutan perdesaan dan perkotaan dengan memodernisasi kendaraan yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan; mengembangkan angkutan umum massal dan cepat untuk menghubungkan wilayah Karawang Timur, Cikampek, Cilamaya Wetan, dan Rengasdengklok; menyediakan jalur pedestrian yang aman dan nyaman di kawasan perkotaan dan perdesaan; menyediakan fasilitas penyeberangan yang memadai; serta memasang rambu dan lampu lalu lintas yang cukup.
			Rencana Jaringan Perkeretaapian	a. Peningkatan jalur Cikampek – Karawang Barat untuk kereta komuter. b. Pembangunan jalur kereta api Cikampek – Pelabuhan (barang dan penumpang). c. Pengembangan jaringan kereta api lokal. d. Pembangunan jalur baru untuk jalur pintas Cibungur – Tanjunggrasa. e. Peningkatan jalur Cikampek – Padalarang (termasuk bantalan rel). f. Elektrifikasi jalur ganda Cikarang – Cikampek (kereta antarkota). g. Peningkatan keandalan jalur Jakarta – Cikampek (utara). h. Pembangunan jalur kereta cepat Jakarta – Surabaya melalui Karawang. i. Fokus pada Stasiun Cikampek, Dawuan, Kosambi, Klari, dan Karawang.
			Rencana Jaringan Transportasi Laut	a. Pembangunan Pelabuhan Internasional Cilamaya di Kec Tempuran b. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul, Pengumpan, dan Terminal Khusus
3	Sistem Prasarana Lainnya	Sistem Jaringan Prasarana Energi	Jaringan Energi Listrik	a. Pembangunan SUTET 500 KV PLTU Indramayu – GITET Cibatu. b. Pengembangan jaringan kabel listrik bawah tanah di perkotaan. c. Pengembangan jaringan kabel listrik udara di perdesaan. d. Pembangunan/peningkatan gardu distribusi dan pembangkit listrik. e. Peningkatan pelayanan kelistrikan untuk semua sektor (kota dan desa). f. Penetapan area di bawah SUTET sebagai zona perlindungan.
			Jaringan Minyak dan Gas	Pembangunan jaringan pipa gas bumi di wilayah utara Kabupaten
			Energi Lainnya	a. Pemanfaatan batu bara untuk industri di beberapa kecamatan (Cikampek, Telukjambe Timur/Barat, Klari, Ciampel, Pangkalan). b. Pemanfaatan gas alam untuk industri melalui pipa bawah tanah. c. Penyediaan bahan bakar gas untuk kendaraan (SPPBE) di beberapa kecamatan (Karawang Barat/Timur, Rengasdengklok, Purwasari, Jatisari, Lemah Abang, Cikampek, dan lainnya).
		Sistem Sumber Daya Air	Wilayah Sungai dan Situ	a. Pengelolaan wilayah sungai, bendung, dan situ b. Menjaga keberadaan dan fungsi seluruh sungai sebagai sumber air baku (minum, irigasi, drainase). c. Pengelolaan sungai dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten, Provinsi, Pusat, dan daerah tetangga. d. Peningkatan dan pembangunan bendung serta pengelolaan situ, meliputi: Pemeliharaan Bendung Walahar (Klari), Situ Kamojing (Cikampek), Situ Cipule (Ciampel). e. Optimalisasi situ di Klari, Ciampel, Telukjambe Timur, dan Karawang Barat. f. Pengembangan bendung karet di muara sungai untuk irigasi dan pengendalian banjir.

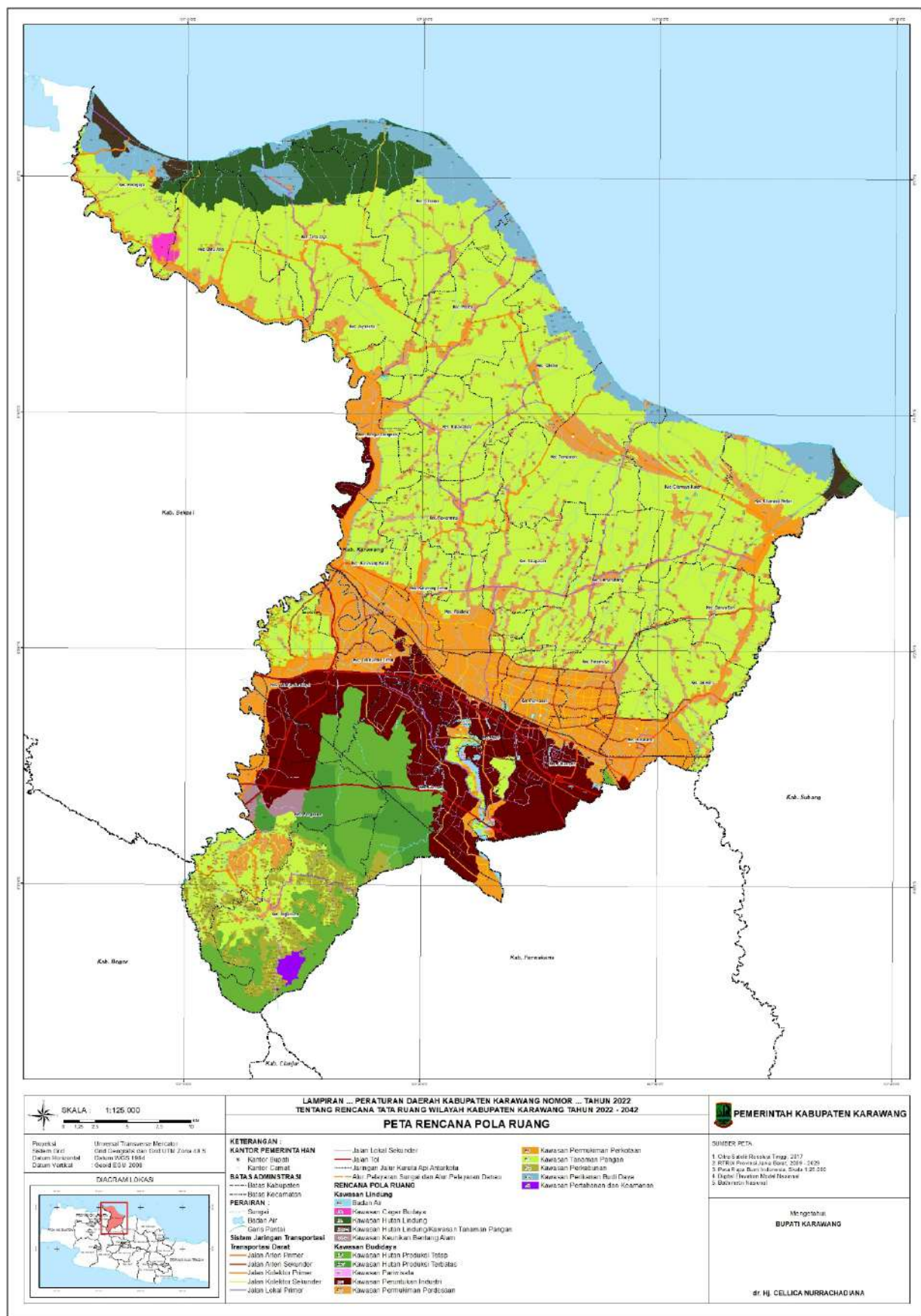
No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
			Sistem Jaringan Irigasi	Pengelolaan saluran irigasi primer, sekunder dan tersier berturut-turut merupakan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
			Sistem Jaringan Air Minum	a. Peningkatan pelayanan air bersih: 90% perkotaan (perpipaan), 70% perdesaan (hidran umum). b. Peningkatan kualitas dan kapasitas instalasi pengolahan dan penampungan air. c. Peningkatan kapasitas WTP di beberapa kecamatan (Karawang Barat, Cikampek, Rengasdengklok, Karawang Timur, Kotabaru, Klari, Telukjambe Timur). d. Pembangunan WTP baru sesuai penyebaran penduduk. e. Pembangunan jaringan distribusi air minum untuk wilayah yang belum terlayani.
			Sistem Pengendalian Banjir	a. Perlindungan Daerah Aliran Sungai (DAS): penataan sempadan, pencegahan pencemaran, menjaga kondisi fisik sungai, pengamanan aliran. b. Revitalisasi Sungai Citarum. c. Pengembangan mitigasi bencana banjir: pemetaan area rawan banjir, penyediaan dan pemeliharaan sarana pengendali banjir (pompa, polder, bendung, embung).
		Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi		a. Perluasan jaringan telepon tetap dan seluler ke seluruh desa. b. Penyediaan telepon umum di kantor pemerintahan (hingga tingkat desa) dan kawasan perumahan. c. Penggunaan jaringan kabel telepon bawah tanah di Karawang Barat, Karawang Timur, dan permukiman perkotaan. d. Pembangunan menara telekomunikasi bersama. e. Mendukung pengembangan <i>cyber province</i> .
4	Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya	Sistem Jaringan Persampahan	Jaringan Prasarana Persampahan	a. Peningkatan cakupan layanan persampahan di perkotaan dan perdesaan. b. Revitalisasi TPPAS Jalupang (Kotabaru) dan Leuwisisir (Telukjambe Barat). c. Pembangunan TPPAS baru sebagai cadangan. d. Penyediaan fasilitas pemilah sampah di berbagai kawasan. e. Penyediaan transfer depo dan tempat sampah sementara di kawasan perkotaan. f. Perluasan layanan persampahan ke kawasan perdesaan. g. Pengembangan persampahan di perdesaan: Jangka pendek: Pengolahan mandiri (dengan pengawasan). Jangka menengah: Pengolahan komunal. Jangka panjang: Sistem melayani seluruh kawasan perdesaan. h. Pengembangan teknologi pengomposan sampah organik dan sistem 3R di kawasan permukiman.
			Jaringan Pengelolaan Limbah	a. Pembangunan sistem limbah sesuai kebutuhan tiap kecamatan. b. Pembangunan IPAL mandiri di kawasan industri. c. Penyediaan pengolahan limbah terpadu untuk industri di kawasan peruntukan industri. d. Penyediaan pengelolaan limbah B3 untuk rumah sakit dan industri besar di luar kawasan industri. e. Pengolahan limbah di permukiman dan perdagangan/jasa perkotaan dengan IPAL bersama. f. Penyediaan mobil tinja di permukiman dan perdagangan/jasa perdesaan. g. Penyediaan MCK umum di setiap lingkungan permukiman perdesaan. h. Penyediaan IPAL komunal dan sistem perpipaan limbah bertahap di setiap kecamatan perdesaan. i. Pembangunan IPAL dan IPLT skala kabupaten di lokasi aman dari permukiman, perkotaan, serta perdagangan dan jasa. j. Seluruh rencana pengembangan sistem limbah menjadi bagian dari Rencana Induk Pengelolaan Limbah Daerah. k. Target pelayanan sistem air limbah tahun 2031: 90% penduduk kota, 70% penduduk desa, 100% industri, perdagangan/jasa, dan instansi.
		Jaringan Drainase		a. Pembangunan Saluran Drainase Tertutup untuk daerah komersial dan pusat kota b. Pemeliharaan dan penataan drainase perkotaan (pembersihan lumpur, sampah, bangunan).

No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
				c. Pembangunan drainase di seluruh kawasan industri. d. Pembangunan drainase di seluruh kawasan permukiman dan perdagangan/jasa perkotaan. e. Pembangunan sumur resapan di permukiman perdesaan dan perkotaan padat, serta kawasan industri. f. Pembangunan saluran drainase di jalan arteri sekunder dan kolektor primer/sekunder. g. Pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Citarum dan sungai besar lainnya (kawasan industri, perkotaan, permukiman).
		Rencana Jalur dan Ruang Evakuasi		a. Jalur evakuasi bencana mengarah dari titik bencana ke jalan kolektor atau arteri terdekat yang aman. b. Lokasi pengungsian sementara disediakan dekat jalan kolektor dan arteri di sekitar kawasan rawan bencana. c. Lokasi pengungsian tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan. d. Bangunan pengungsian dapat berupa kantor pemerintah, sekolah, sarana olahraga, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya. e. Pembangunan lokasi pengungsian harus sesuai ketentuan. f. Jaringan jalan di sekitar kawasan rawan banjir ditetapkan sebagai jalur evakuasi banjir, meliputi beberapa kecamatan (Pangkalan, Ciampel, Telukjambe Timur/Barat, Jatisari, Banyusari, Kotabaru, Cilamaya Wetan, Karawang Barat/Timur, Rengasdengklok, Batujaya, Pakisjaya). g. Penanganan bencana alam akan diatur lebih lanjut dalam Perda tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana.
Rencana Pola Ruang				
5	Kawasan Lindung	Perlindungan Kawasan Hutan Mangrove		a. Rehabilitasi hutan mangrove di beberapa kecamatan. b. Perluasan hutan mangrove. c. Pengembangan daerah penyangga hutan mangrove. d. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan.
		Perlindungan Kawasan Perlindungan Setempat		a. Rehabilitasi sempadan pantai dari abrasi. b. Pembatasan kegiatan di sempadan pantai. c. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan pantai. d. Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir. e. Rehabilitasi sempadan sungai di perkotaan. f. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sempadan sungai. g. Penghijauan di sekitar mata air, situ/danau, dan jaringan SUTET.
		Perlindungan Kawasan Rawan Bencana		a. Penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. b. Pembangunan pusat pengungsian di kawasan rawan bencana. c. Penghijauan atau pengembangan RTH di kawasan rawan bencana. d. Pengembangan rekayasa teknik penahan bencana. e. Peningkatan ketahanan gempa bangunan publik. f. Penyediaan jalur evakuasi bencana. g. Penyiapan titik-titik pengungsian di permukiman.
		Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya		a. Pemugaran situs bersejarah (Candi Jiwa, Makam Syech Quro, Monumen Rengasdengklok). b. Penghijauan di sekitar Curug Santri. c. Penyusunan rencana tata ruang rinci di sekitar situs dan objek. d. Penataan kawasan di sekitar situs dan objek.
		Perlindungan Kawasan Lindung Geologi		a. Kajian karst. b. Pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan.

No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
		Perlindungan Kawasan Terumbu Karang		a. Pemetaan kawasan terumbu karang. b. Penyusunan rencana penanganan dan pelibatan masyarakat dalam perlindungan terumbu karang. c. Pembangunan batas-batas kawasan terumbu karang.
		Hutan Produksi		a. Rehabilitasi kawasan sekitar hutan produksi. b. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan. c. Pengembangan budidaya tanaman keras. d. Pengembangan hutan rakyat terintegrasi dengan hutan produksi.
		Pertanian Tanaman Pangan		a. Penyusunan Rencana Induk Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. b. Penyusunan rencana tata ruang rinci lahan pertanian pangan. c. Pengendalian alih fungsi lahan. d. Pengembangan pusat pengembangan dan pengolahan hasil pertanian. e. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian.
		Pertanian Hortikultura		a. Perluasan jaringan irigasi. b. Penyiapan kawasan hortikultura sebagai cadangan lahan pangan.
		Perkebunan		a. Pengembangan perkebunan rakyat (komoditas unggulan). b. Pembangunan fasilitas koleksi dan distribusi hasil perkebunan skala lokal. c. Penyusunan rencana induk pengembangan perkebunan.
		Peternakan		a. Pengembangan peternakan skala besar. b. Pembinaan peternakan skala rumah tangga. c. Pembangunan rumah pemotongan hewan dan ayam.
		Perikanan		a. Pembangunan tempat pelelangan ikan. b. Pembangunan pelabuhan pendaratan ikan. c. Pengembangan tambak rakyat. d. Pengembangan minapolitan.
		Pertambangan		a. Kajian potensi bahan tambang. b. Kajian kelayakan usaha tambang. c. Penutupan usaha tambang yang tidak layak.
		Kawasan Peruntukan Industri		a. Revitalisasi dan optimalisasi kawasan industri. b. Revitalisasi industri di luar kawasan industri. c. Pengembangan kawasan perkotaan pendukung industri. d. Promosi kawasan industri. e. Penyusunan rencana induk pengembangan industri.
		Pariwisata		a. Penataan kawasan/objek wisata. b. Perbaikan akses ke kawasan/objek wisata. c. Revitalisasi objek wisata. d. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. e. Pengembangan lapangan golf. f. Pengembangan pemakaman komersial. g. Promosi pariwisata daerah.
		Permukiman Perkotaan		a. Kajian kebutuhan dan rencana induk penyediaan perumahan. b. Penyediaan kasiba dan lisiba permukiman perkotaan. c. Penyediaan prasarana lingkungan permukiman perkotaan. d. Penataan permukiman kumuh perkotaan. e. Penyediaan sarana pendukung permukiman perkotaan.

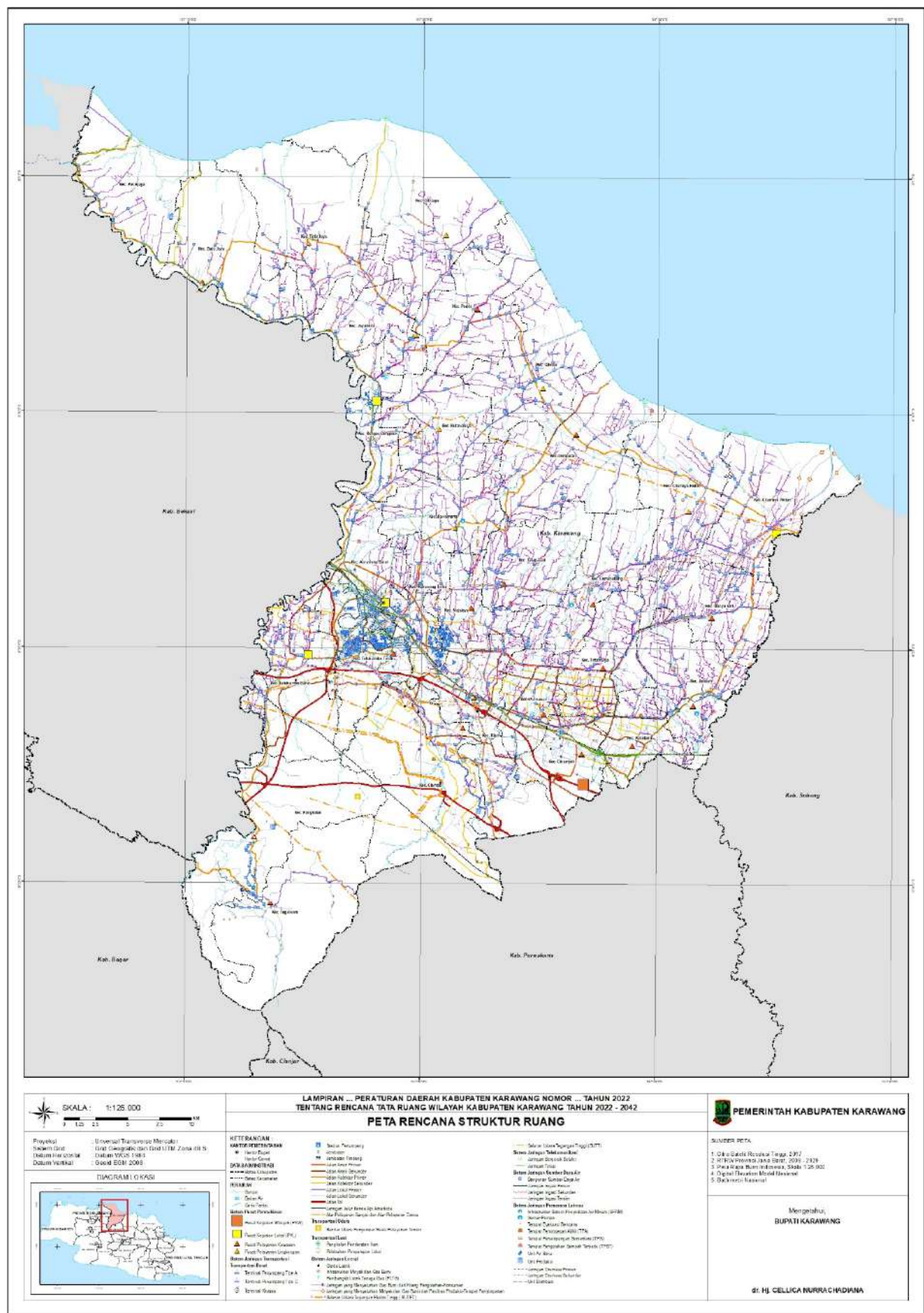
No	Kategori	Rencana	Sub Rencana	Keterangan
				f. Pengembangan rumah susun sewa dan milik. g. Revitalisasi fasilitas pemerintah di sekitar permukiman perkotaan.
		Permukiman Perdesaan		a. Penataan permukiman kumuh nelayan. b. Perbaikan lingkungan kumuh perdesaan. c. Pengembangan kawasan perdesaan tertinggal dan terpencil. d. Pengembangan kawasan terpadu permukiman perdesaan. e. Revitalisasi fasilitas pemerintah di sekitar permukiman perdesaan.
		Perdagangan dan Jasa		a. Penataan kawasan perdagangan dan jasa di perkotaan. b. Pengembangan Pasar Induk Beras. c. Pembangunan pasar tradisional di ibukota kecamatan. d. Pembangunan sentra penjualan hasil pertanian. e. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa pendukung pertanian di perdesaan.
		Pertahanan dan Keamanan		a. Penyediaan area penyangga berupa RTH. b. Peningkatan jalan akses ke Jalan Tol Jakarta - Cikampek.

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031, 2025



Gambar II-134 Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Karawang

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 diolah, 2025



Gambar II-135 Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Karawang

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 diolah, 2025

Kawasan Strategis Kabupaten, memperhatikan Kawasan Strategis Provinsi yang meliputi antara lain:

- KSP pesisir Panturas;
- KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat; dan
- KSP koridor Bekasi-Cikampek.

Kawasan Strategis Kabupaten serta penanganannya meliputi:

Tabel II-81 Kawasan Strategis Kabupaten Karawang dan Penanganannya

No	Kawasan Strategis Kabupaten	Penanganan KSK
1	KSK Industri Telukjambe dengan sudut kepentingan Lingkungan Hidup dan ekonomi	- meminimalisasi dampak banjir; - mengembangkan sistem jaringan drainase yang mampu menampung aliran permukaan; - menyediakan RTH untuk penyerapan air hujan dengan baik; - menyediakan sistem pompa untuk mengendalikan genangan; dan; - Pengembangan prasarana dan sarana pengendali banjir lainnya.
2	KSK Pertanian koridor Karawang Cikampek dengan sudut kepentingan ekonomi	- Penataan batas kawasan perkotaan dengan lahan-lahan pertanian; dan - Penerapan aturan insentif dan disinsentif yang efektif, yang akan ditetapkan secara terpisah.
3	KSK pariwisata situs Batujaya dengan sudut kepentingan Sosial Budaya	Pelestarian situs bangunan sejarah di Situs Batujaya

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031, 2025

2.2 Kondisi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

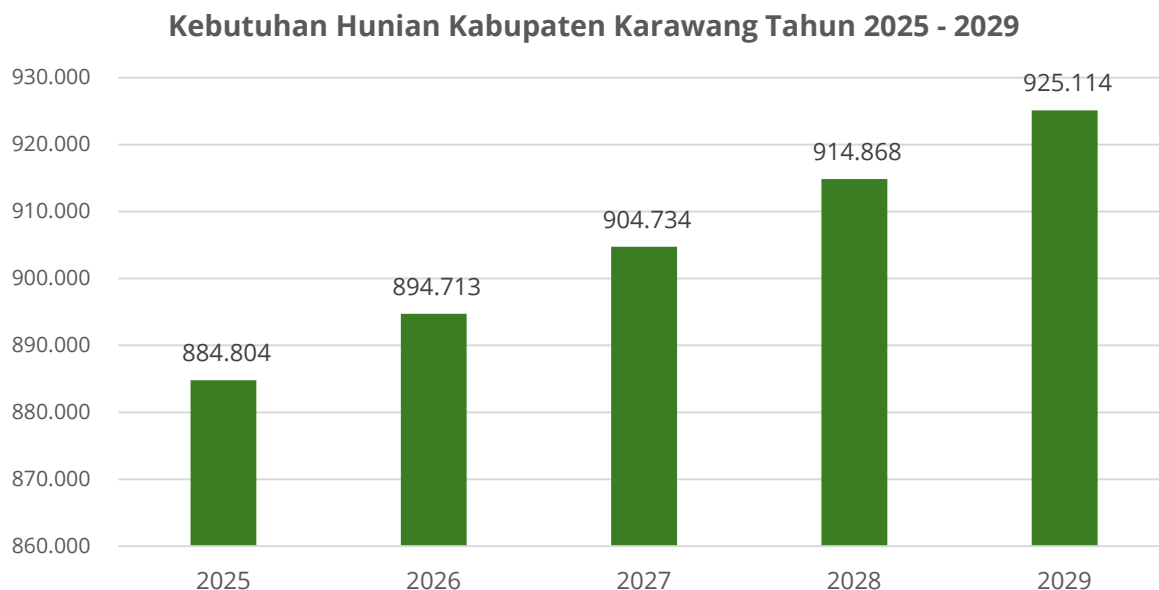
Kondisi sarana dan prasarana mempunyai peran yang penting dalam pembangunan Kabupaten Karawang. Dalam 5 tahun ke depan dapat diketahui proyeksi sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karawang.

2.2.1 Kebutuhan Hunian

Proyeksi kebutuhan hunian menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan. Kabupaten Karawang, sebagai pusat pertumbuhan industri dan kawasan urban, terus mengalami peningkatan kebutuhan hunian yang harus diantisipasi secara matang. Sub bab ini akan menguraikan proyeksi kebutuhan hunian di Kabupaten Karawang, sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika demografi serta ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil perhitungan Materi Teknis RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031. Jumlah penduduk di Kabupaten Karawang diproyeksikan pada tahun 2029

adalah 2.696.667 Jiwa. Diasumsikan setiap Kepala Keluarga ditempati oleh 4 Jiwa dengan 1 KK menempati 1 rumah. Selain itu, diasumsikan bahwa penduduk yang mempunyai rumah adalah penduduk yang berusia 20 – 75+ Tahun.



Gambar II-136 Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Dengan asumsi setiap rumah ditempati 4 jiwa, dan penduduk berusia 20 – 75+ Tahun, maka pada tahun 2029 mencapai 925.114 Unit.

Kebutuhan hunian vertikal menggunakan asumsi kebutuhan hunian vertikal 20% dari hunian tapak (*draft RP3KP Jawa Barat, 2023*), dimana pemenuhannya diprioritaskan pada kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Karawang diproyeksikan hunian vertikal pada tahun 2030 sebesar.

Tabel II-82 Proyeksi Kebutuhan Hunian Vertikal

Tahun	Proyeksi Hunian Vertikal (Tower)
2025	188.638
2030	221.413

Sumber : RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045, 2025

Proyeksi kebutuhan hunian vertikal juga cukup penting karena pertambahan rumah (Unit Hunian) yang semakin besar jumlahnya maka membutuhkan lahan yang besar, jika dipenuhi melalui rumah tapak maka lahan tidak akan mencukupi karena jumlah luas lahan cenderung tetap. Proyeksi pemenuhan kebutuhan rumah perlu diintegrasikan dengan definisi operasional Rumah Layak Huni yakni memenuhi ketentuan teknis ketahanan bangunan, memenuhi luasan perkapita per orang, memiliki akses air minum layak dan memiliki akses sanitasi layak serta memenuhi ketentuan fungsi lain.

Arahan pengembangan hunian berdasarkan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Karawang

pada Tahun 2022, terdapat rencana penyediaan perumahan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat antara lain:

1. Rencana Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi MBR;

Terkait dengan rencana pengembangan Rusunawa di Kabupaten Karawang didasarkan atas kebutuhan pemenuhan kebutuhan hunian bagi MBR yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang. Terkait lokasi dan alokasi ruang bagi MBR diprioritaskan di kawasan perkotaan utama Kabupaten Karawang. Sesuai dengan arahan kawasan perkotaan dalam rencana kawasan peruntukan permukiman di RTRW Kabupaten Karawang terkait dengan rencana pengembangan Rusunawa di Kabupaten Karawang.



Gambar II-137 Rencana Pengembangan Rusunawa bagi MBR-1 di Kawasan Perkotaan

Sumber : RP3KP Kabupaten Karawang, 2022

Berdasarkan rencana pengembangan Rusunawa Karawang di atas berdasarkan arahan kawasan perkotaan dalam rencana kawasan peruntukan permukiman di RTRW Kabupaten Karawang salah satunya menyebutkan pembangunan rumah susun dikembangkan dan diterapkan pada Kecamatan Karawang Barat, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Cikampek, Kecamatan Klari, dan Kecamatan Telukjambe Timur. Lokasi tersebut menjadi lokasi percontohan pembangunan Rusunawa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui skema pendanaan KPBU. Berikut rencana pengembangan Rusunawa bagi MBR.

Tabel II-83 Rencana Pengembangan Rusunawa Bagi MBR

No	Kecamatan	Jumlah Tower (<i>Twin Block</i>)	Luas (Ha)	Keterangan Arahkan Lokasi
1	Telukjambe Timur	3	1,9	Program KPBU Pemerintah Pusat
2	Karawang Timur	2	1,2	Arahan RTRW Kabupaten Karawang
3	Karawang Barat	3	1,8	Arahan RTRW Kabupaten Karawang
4	Klari	2	1,2	Arahan RTRW Kabupaten Karawang
5	Cikampek	2	1,2	Arahan RTRW Kabupaten Karawang

Sumber : Dokumen RP3KP Kabupaten Karawang Tahun 2022, 2025

- Rencana Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) bagi buruh di Kawasan Peruntukan Industri;

Terkait dengan rencana pengembangan Rusunawa di Kabupaten Karawang didasarkan atas kebutuhan untuk para buruh maka diperuntukan untuk kawasan industri yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Karawang. Rusunawa ini untuk memenuhi hunian buruh yang bekerja pada industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri, dan menghindari kawasan permukiman kumuh disekitar Kawasan Peruntukan Industri.



Gambar II-138 Rencana Pengembangan Rusunawa bagi Buruh di Kawasan Peruntukan Industri

Sumber : RP3KP Kabupaten Karawang, 2022

- Rencana Penyediaan perumahan tapak di kawasan pedesaan, rencana pengembangan permukiman di kawasan pedesaan, sesuai dengan arahan pengembangan RP3KP Kabupaten Karawang sebagai berikut:

- c. Kawasan permukiman perdesaan dikembangkan untuk menahan laju urbanisasi ke kawasan perkotaan selain sebagai upaya pemerataan jumlah penduduk.
- d. Perlu perbaikan kondisi fisik bangunan serta lingkungan rumah agar tercipta kualitas permukiman yang layak huni.
- e. Industri rumah tangga serta industri kecil dapat dilakukan di kawasan permukiman perdesaan selama memiliki izin lingkungan dan memperhatikan gangguan yang ditimbulkannya.
- f. Perlu disediakan akses yang baik antara permukiman perdesaan dengan kawasan pertanian di sekitarnya.
- g. Setiap lingkungan permukiman perdesaan diarahkan mempunyai sistem pengelolaan persampahan, limbah dan air bersih secara mandiri dan komunal.
- h. Setiap lingkungan permukiman perdesaan diarahkan mempunyai sistem pengelolaan persampahan, limbah dan air bersih secara mandiri dan komunal.

2.2.2 Kebutuhan Air Bersih

Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan untuk keperluan rumah tangga. sumber air bersih pada umumnya terdiri atas PDAM, sumur bor, Jet Pump dan lain-lain. Air merupakan sumber kehidupan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti : konsumsi air minum, mencuci, mandi dan keperluan rumah tangga lainnya. Kebutuhan air bersih di Kabupaten Karawang dipenuhi oleh PDAM, sumur gali dan sumur bor.

Perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Karawang diharapkan dapat dipenuhi melalui sistem perpipaan yang didistribusikan kerumah-rumah, kran umum serta bangunan-bangunan kegiatan pelayanan kota. Untuk mengetahui rencana kebutuhan air bersih di Kabupaten Karawang untuk skala regional dan skala lokal dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Bertambahnya kebutuhan akan air bersih disebabkan adanya perkembangan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Penggunaan air bersih ini digolongkan menjadi pemakaian domestik (rumah tangga) dan non domestik . Adapun standar untuk masing-masing penggunaan adalah :

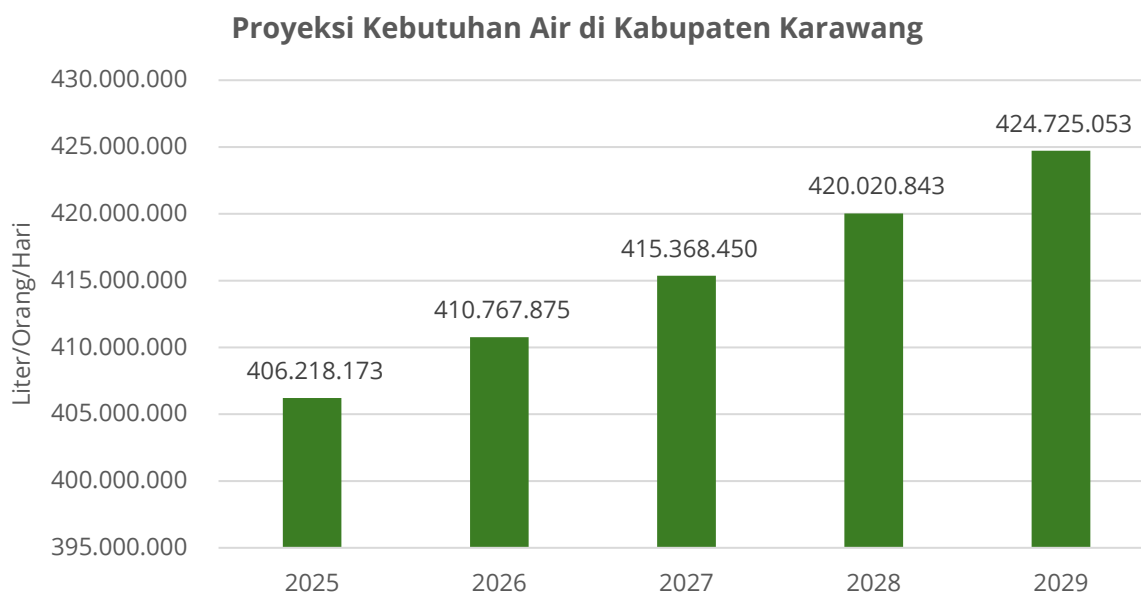
- Kebutuhan Domestik sebesar 150 liter/orang/hari.
- Kebutuhan Sosial 5% dari kebutuhan domestik.

Hasil proyeksi kebutuhan air bersih berdasarkan standar dan analisis didapatkan hasil, sebagai berikut.

**Tabel II-84 Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Non Domestik di Kabupaten Karawang
Tahun 2025 - 2029**

Jenis	Tahun (liter/orang/hari)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Domestik	386.874.450	391.207.500	395.589.000	400.019.850	404.500.050
Non Domestik	19.343.723	19.560.375	19.779.450	20.000.993	20.225.003
Total	406.218.173	410.767.875	415.368.450	420.020.843	424.725.053

Sumber : Hasil Analisis, 2025



Gambar II-139 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan data proyeksi kebutuhan air domestik dan non domestik di Kabupaten Karawang untuk periode 2025 hingga 2029, terlihat adanya tren pertumbuhan yang stabil pada kedua jenis kebutuhan air tersebut. Kebutuhan air domestik meningkat dari 386.874.450 liter/orang/hari pada tahun 2025 menjadi 430.000.000 liter/orang/hari pada tahun 2029. Sementara itu, kebutuhan air non domestik juga mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari 19.343.723 liter/orang/hari pada 2025 menjadi 22.000.000 liter/orang/hari pada 2029. Secara total, kebutuhan air (gabungan domestik dan non domestik) tumbuh dari 406.218.173 liter/orang/hari pada 2025 menjadi 452.000.000 liter/orang/hari pada 2029. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi air yang signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Karawang yang terus berkembang. Hal ini menjadi penting untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan sumber daya air.

Selain itu, juga perlu dihitung proyeksi kebutuhan di sektor air minum di tingkat kabupaten/kota untuk mengetahui kebutuhan air minum di Kabupaten Karawang. Dihitung berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018. Kriteria penerima layanan air minum di kabupaten/kota adalah rumah tangga, dengan prioritas

diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang tinggal di daerah rawan air, dan mereka akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

Tabel II-85 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2030

Tahun	Proyeksi Kebutuhan Minimal Air Minum (Juta Liter)
2025	56.374,39
2030	59.036,36

Sumber : Laporan Kajian Ketersediaan Prasarana untuk Pelayanan Dasar di Kabupaten Karawang, 2025

2.2.3 Kebutuhan Energi/Kelistrikan

Perencanaan Pembangunan infrastruktur kelistrikan, perlu memperhatikan faktor faktor kebutuhan energi/kelistrikan yang dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor faktor seperti, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat konsumsi energi listrik per kapita.

Kebutuhan listrik domestik dan non domestik dihitung dari proyeksi penduduk tahun 2025 – 2030 yang dilihat dari Proyeksi Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada UP3 PLN Menurut Unit Layanan Pelanggan/ULP di Kabupaten Karawang. Berdasarkan hasil proyeksi Kabupaten Karawang Tahun 2030 terdapat 992.986 Pelanggan.

Tabel II-86 Proyeksi Daya Terpasang, Produksi , dan Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) pada UP3 PLN Menurut Unit Layanan Pelanggan/ULP di Kabupaten Karawang

Tahun	Unit Layanan Pelanggan					
	Prima Karawang	Karawang Kota	Kosambi	Cikampek	Rengasdengklok	Total
2025	702	352.2532	213.433	238.073	192.761	952.587
2030	747	408.012	223.647	245.734	200.536	992.986

Sumber : RPJPD Kabupaten Karawang 2025 - 2045, 2025

Selain itu Kebutuhan Listrik di Kabupaten Karawang dapat diproyeksikan berdasarkan jenis kegiatan yang akan berkembang di Kabupaten Karawang, dapat diproyeksikan antara lain.

Tabel II-87 Kebutuhan Energi/Kelistrikan di Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2030

Kelompok Konsumen	Proyeksi Konsumsi Listrik (Tahun 2031) (MVA)
Rumah Tangga	328,87
Industri	682,34
Bisnis	308,59
Publik	21,78
Total	1.341,58

Sumber : Hasil Analisis, 2025

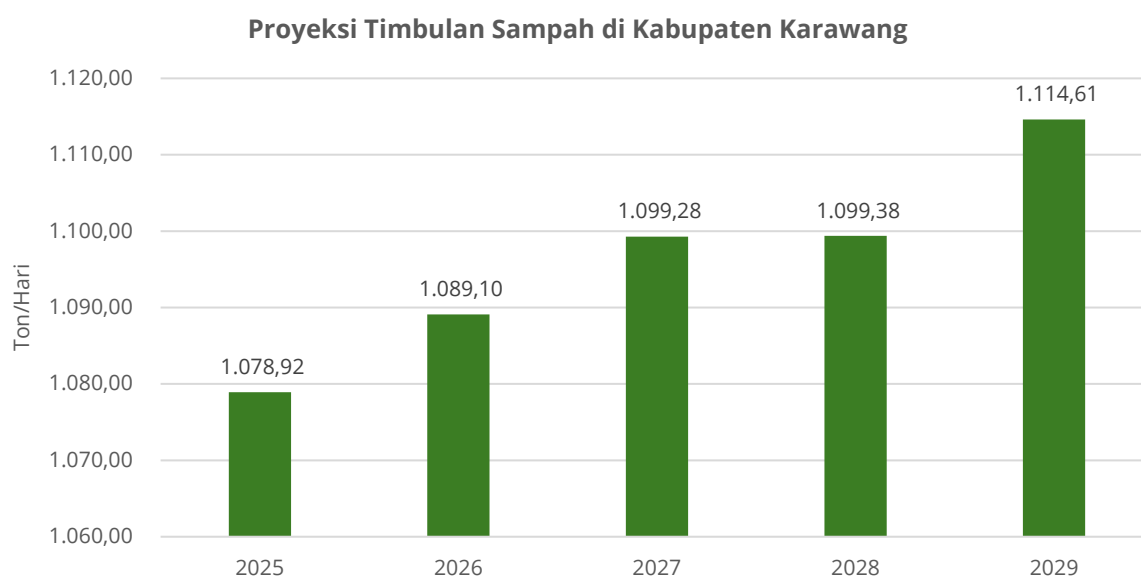
Hasil perhitungan diatas masih bersifat asumptif, perencanaan sarana dan prasarana kelistrikan di Kabupaten Karawang perlu disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2025 – 2034. Rencana Tersebut antara lain.

1. Rencana Penyediaan Gardu Induk Karawang 500 kV pada tahun 2027
2. Rencana Penyediaan Gardu Induk Karawang 500/150 kV pada tahun 2027

3. Rencana Penyediaan Gardu Induk Karawang 150kV/20kV pada tahun 2027
4. Rencana Penyediaan Gardu Induk Karawang 500kV/150kV pada tahun 2028
5. Rencana Penyediaan Gardu Induk Karawang 150kV pada tahun 2028
6. Telah dikembangkan *pilot project* pembangkit listrik dengan bahan bakar Batu Bara Tercairkan dan Batu Bara tergaskan dengan kapasitas 750kW
7. Rencana GITET Karawang, *Extension* IBT 3,4 Deltamas dan *Extension* IBT 3,4 Sukatani untuk meningkatkan keandalan permintaan Kabupaten Karawang
8. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Karawang – Telukjambe II 150kV pada tahun 2027
9. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi KIIC – Karawang 500kV pada tahun 2027
10. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Karawang – Inc. (Indramayu – Deltamas) 500kV pada tahun 2027
11. Rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Karawang – Jatiluhur Baru 150 kV pada tahun 2028

2.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan limbah padat di Kabupaten Karawang meliputi kegiatan pemindahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir yang disesuaikan dengan kondisi fisik wilayah pelayanan, distribusi volume limbah padat, serta kapasitas armada pengangkutan. Upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Karawang difokuskan pada transformasi sampah menjadi material yang lebih bermanfaat dan ramah lingkungan, sejalan dengan konsep Pengelolaan Sampah Terpadu Menuju *Zero Waste*. Konsep ini mengintegrasikan berbagai tahapan sistem pengelolaan sampah, meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir, serta memanfaatkan teknologi seperti kompos, daur ulang bahan non-organik, incinerator, dan *sanitary landfill* yang berkelanjutan dan dapat dimanfaatkan kembali. Berikut proyeksi timbulan sampah standar yang berlaku.



Gambar II-140 Timbulan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

Sumber : RISPS Kab Karawang 2025 - 2040, 2025

Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2040, untuk mengatasi jumlah timbulan sampah yang meningkat perharinya maka diperlukan penyediaan sarana prasarana persampahan, berikut jumlah kebutuhan sarana prasarana persampahan tahun 2025 – 2040.

Tabel II-88 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Persampahan

Uraian	Jangka Pendek	Jangka Menengah			
	2025	2026	2027	2028	2029
Proyeksi Jumlah Kebutuhan TPST (25 ton/hari)	4	5	5	6	7
Proyeksi Jumlah TPS 3R (kapasitas minimal 1 ton/hari)	27	32	37	42	50
Proyeksi Jumlah Bank Sampah Induk/Pusat Daur Ulang	3	6	10	13	16

Sumber : RISPS Kab Karawang 2025 - 2040, 2025

Proyeksi sarana prasarana persampahan tahun 2025–2029 di Kabupaten Karawang menunjukkan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah yang cukup signifikan, di mana kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 25 ton/hari naik dari 4 unit pada 2025 menjadi 7 unit pada 2029, sejalan dengan bertambahnya volume timbulan sampah; di sisi lain, jumlah TPS 3R dengan kapasitas minimal 1 ton/hari diproyeksikan meningkat secara konsisten dari 27 unit pada 2025 hingga 50 unit pada 2029, mencerminkan strategi desentralisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat; sementara itu, keberadaan Bank Sampah Induk/Pusat Daur Ulang juga mengalami lonjakan dari 3 unit pada 2025 menjadi 16 unit pada 2029, menunjukkan peran yang semakin besar dari skema ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan sampah; secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan komitmen untuk memperkuat infrastruktur persampahan, baik dari sisi pengolahan terpusat maupun berbasis masyarakat, guna mendukung target pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2.2.5 Kebutuhan Pengelolaan Limbah

Sistem Pengelolaan Limbah Cair di Kabupaten Karawang dibagi menjadi dua sistem pengelolaan yaitu limbah cair domestik dan non domestik. Sistem pengelolaan limbah cair domestik akan mengelola jenis buangan air limbah rumah tangga. Sementara air limbah non domestik mempunyai karakteristik khusus yang didominasi dengan unsur kimia yang tidak dapat diolah secara langsung. Dalam kasus ini, salah satu contohnya adalah limbah industri yang di Kabupaten Karawang, dikelola sendiri oleh industri atau dikelola oleh pihak ketiga, sehingga baku mutu air limbahnya dapat diterima oleh alam.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang 2011 – 2031. Volume limpasan air limbah adalah.

Tabel II-89 Proyeksi Timbulan Limpasan Limbah

Limpasan Limbah (Liter/Hari) Tahun 2030		Jumlah
Domestik	Non Domestik	
6.407.062,98	1.922.118,89	8.329.181,88

Sumber : RTRW Kabupaten Karawang Tahun 2011 - 2031, 2025

2.2.6 Kebutuhan Internet

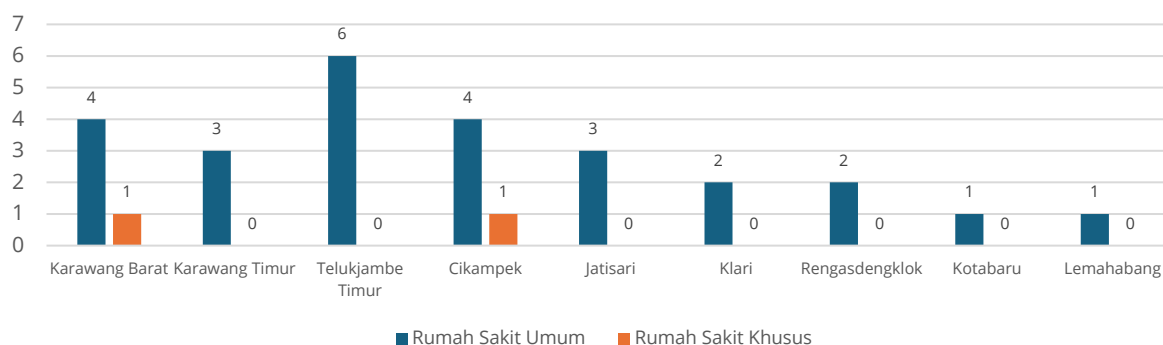
Akses internet di Kabupaten Karawang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan urbanisasi yang mendorong kebutuhan layanan digital. Berbagai program dan kebijakan telah dilaksanakan untuk memperluas jangkauan jaringan internet, termasuk pembangunan infrastruktur *fiber optic* dan penguatan sinyal seluler. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi digital. Namun, meskipun sudah mengalami peningkatan signifikan, akses internet belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Karawang.

Beberapa desa di Karawang masih mengalami *blank spot* atau area tanpa sinyal internet yang memadai. Sebagai contoh, Desa Parungmulya di Kecamatan Ciampel dan Desa Mekarbuana di Kecamatan Tegalwaru menjadi wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet. Blank spot ini menjadi tantangan, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan koneksi internet, seperti pelaksanaan pemilu atau pengembangan layanan publik digital.

2.2.7 Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Infrastruktur kesehatan merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Ketersediaan dan kelayakan fasilitas kesehatan yang memadai menjadi dasar dalam penyediaan layanan kesehatan yang optimal, baik dalam upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Kabupaten Karawang Tahun 2024



Gambar II-141 Jumlah Rumah Sakit Umum dan Khusus di Kabupaten Karawang Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Karawang, 2025

Menurut WHO, suatu wilayah idealnya memiliki 1 tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk, sehingga kecukupan tempat tidur di suatu daerah dihitung dalam rasio tersebut. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 jumlah ketersediaan tempat tidur di Kabupaten Karawang 3.392, apabila dihitung berdasarkan standar WHO mengenai kebutuhan jumlah tempat tidur maka dapat diketahui bahwa jumlah tempat tidur sudah tercukupi dan berlebih. Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur, dapat dilihat berdasarkan standar WHO sebagai berikut;

Tabel II-90 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur di Kabupaten Karawang

Tahun	Penduduk	Target Rasio 1 TT : 1000 Penduduk	Jumlah Kebutuhan TT	Penambahan
2022	2.505.250	1:738	3.392	
2025	2.579.163	1:738	3.495	103
2026	2.608.050	1:738	3.534	39
2027	2.637.260	1:738	3.574	40
2028	2.666.799	1:738	3.614	40
2029	2.696.667	1:738	3.654	40

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Selain itu, dasar penyediaan sarana ini adalah jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Mengacu pada standar sarana kesehatan, masing-masing sarana kesehatan memiliki standar kebutuhannya per kecamatan, kecuali untuk rumah sakit dihitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengembangan (WP).

Tabel II-91 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang

Tahun	Tahun	
	2025	2030
Rumah Sakit	27	28
Puskesmas	37	37
Puskesmas Pembantu	98	104
Poliklinik	177	183

Sumber : Laporan Kajian Ketersediaan Prasarana untuk Pelayanan Dasar di Kabupaten Karawang, 2025

2.2.8 Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar serta meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Karawang. Kebutuhan ini mengacu pada SNI 03-1733-1989 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA).

Tabel II-92 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Kabupaten Karawang

Jenis	Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan	
	2025	2030
SD/MI	113	116
SMP/MTS	114	108
SMA/MA/SMK	45	45

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Kebutuhan Sarana Pendidikan saat ini sudah terpenuhi dari kondisi eksisting, saat ini SD/MI berjumlah 1.123, SMP/MTs berjumlah 281, dan SMA/MA/SMK berjumlah 197, sehingga yang menjadi fokus dalam pengembangan infrastruktur pendidikan adalah kualitas sarana dan prasarana.

Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan juga perlu memperhatikan, kebutuhan, lokasi, dan jangkauan dari setiap wilayah, serta memperhatikan sarana dan prasarana pendidikan yang tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA/MA)

2.3 Kondisi Keuangan Daerah

2.3.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan kewajiban pengelolaan keuangan daerah melalui sumber pendanaan seperti transfer pusat, pajak, dan retribusi daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah, yang difokuskan pada APBD dan laporan keuangan, bertujuan menilai kapasitas fiskal Kabupaten Karawang dalam membiayai program strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. APBD disusun selaras dengan prioritas RPJMD untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Struktur APBD Kabupaten Karawang terdiri atas antara lain:

1. Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan dalam suatu APBD, dalam hal ini analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Realisasi Pelaksanaan APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

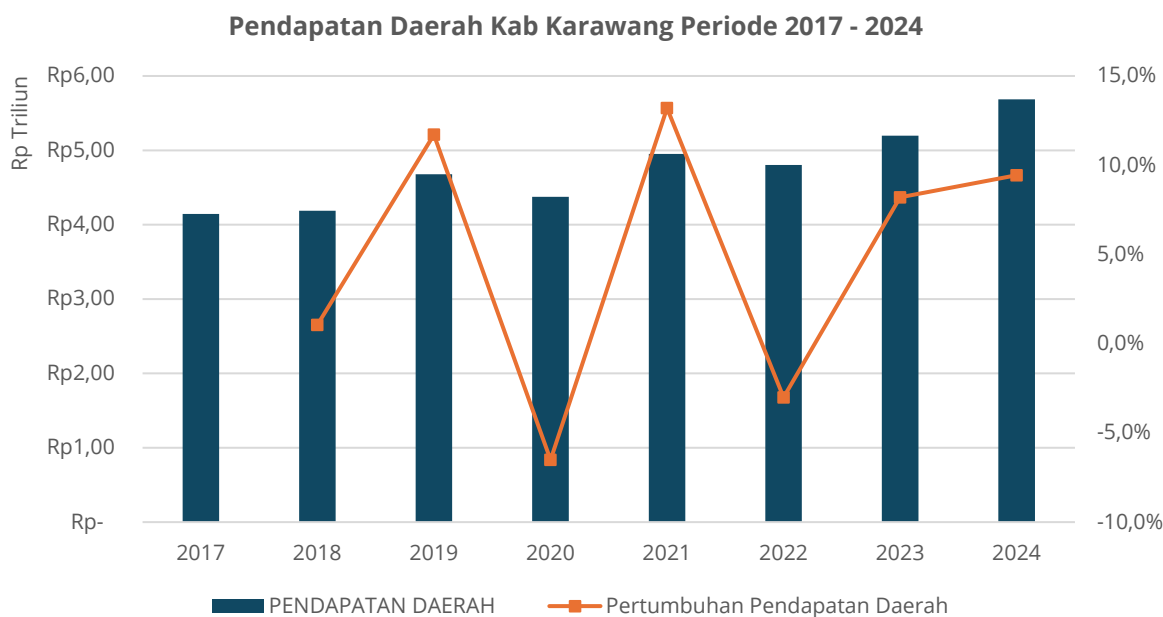
Tabel II-93 Realisasi APBD Kab Karawang Tahun 2020 - 2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN					
	A Pendapatan Asli Daerah	Rp1.303.353.416.438,00	Rp1.651.850.841.989,00	Rp1.617.783.012.031,00	Rp1.762.512.066.251,91	Rp1.826.280.795.928,09
	B Pendapatan Transfer	Rp2.786.286.030.356,00	Rp3.029.850.463.855,00	Rp3.171.144.250.469,00	Rp3.425.547.340.979,00	Rp3.776.674.179.554,00
	C Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 284.627.413.936,00	Rp 269.979.583.000,00	Rp 13.671.000.000,00	Rp 8.256.000.000,00	Rp 83.667.865.174,00
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp4.374.266.860.730,00	Rp4.951.680.888.844,00	Rp4.802.598.262.500,00	Rp5.196.315.407.230,91	Rp5.686.622.840.656,09
2	BELANJA					
	A Belanja Operasi	Rp3.147.394.191.316,00	Rp3.070.365.297.564,00	Rp3.177.822.614.519,00	Rp3.177.822.614.519,00	Rp4.229.900.349.166,00
	B Belanja Modal	Rp 277.221.396.937,00	Rp 955.603.523.632,00	Rp 993.705.467.696,00	Rp993.705.467.696,00	Rp 855.211.904.400,00
	C Belanja Tak Terduga	Rp 141.663.547.885,00	Rp 13.724.400.000,00	Rp 2.110.231.800,00	Rp 6.874.375.387,00	Rp -
	D Transfer	Rp 602.896.432.953,00	Rp 630.978.077.622,00	Rp 633.102.449.900,00	Rp 655.258.093.131,00	Rp 689.294.655.772,00
	JUMLAH BELANJA	Rp4.169.175.569.091,00	Rp4.670.671.298.818,00	Rp4.806.740.763.915,00	Rp5.203.555.794.737,00	Rp5.774.406.909.338,00
	SURPLUS/DEFISIT	Rp 205.091.291.639,00	Rp 281.009.590.026,00	-Rp 4.142.501.415,00	-Rp 7.240.387.506,09	-Rp 87.784.068.681,91
3	PEMBIAYAAN					
	A Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 162.880.971.920,00	Rp 345.572.263.560,00	Rp 626.581.853.586,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91
	B Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 22.400.000,00	Rp -	Rp 21.855.518,41	Rp -	Rp -
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 140.480.971.920,00	Rp 345.572.263.560,00	Rp 604.726.335.181,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	Rp 345.572.263.559,00	Rp 626.581.853.586,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91	Rp 505.559.377.578,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

2.3.1.1 Pendapatan Daerah

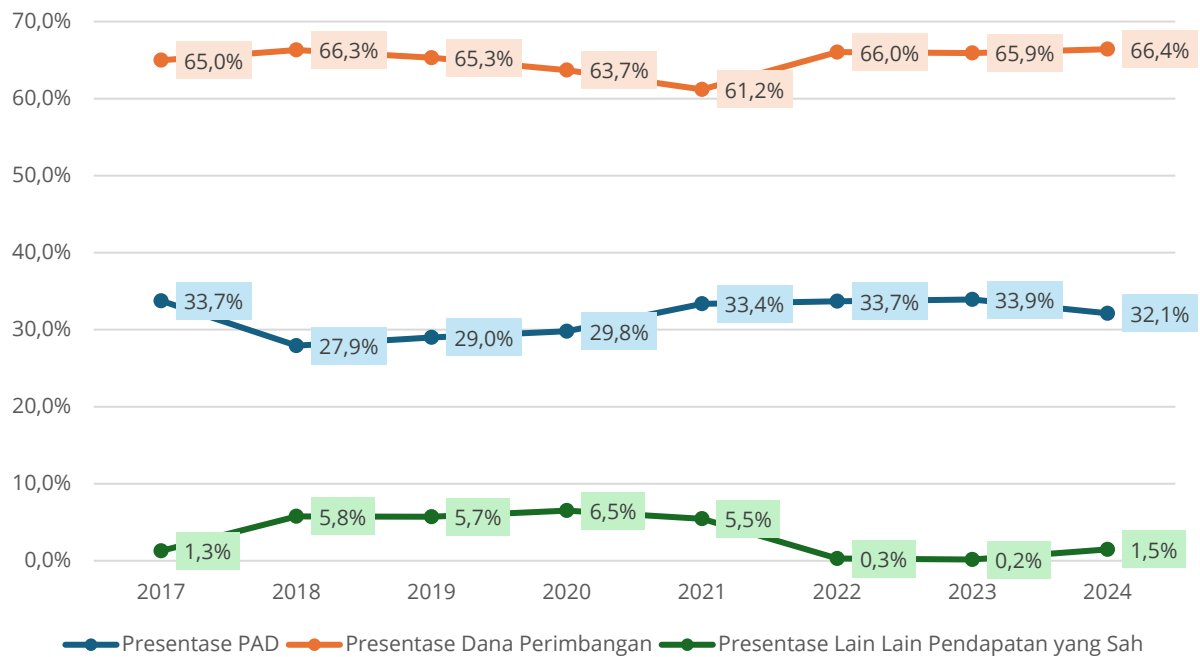
Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan asli daerah secara mandiri dan mampu mengelola pendapatan daerahnya dengan baik. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, maka kemandirian daerah semakin besar.



Gambar II-142 Pendapatan Daerah Kab Karawang 2016 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

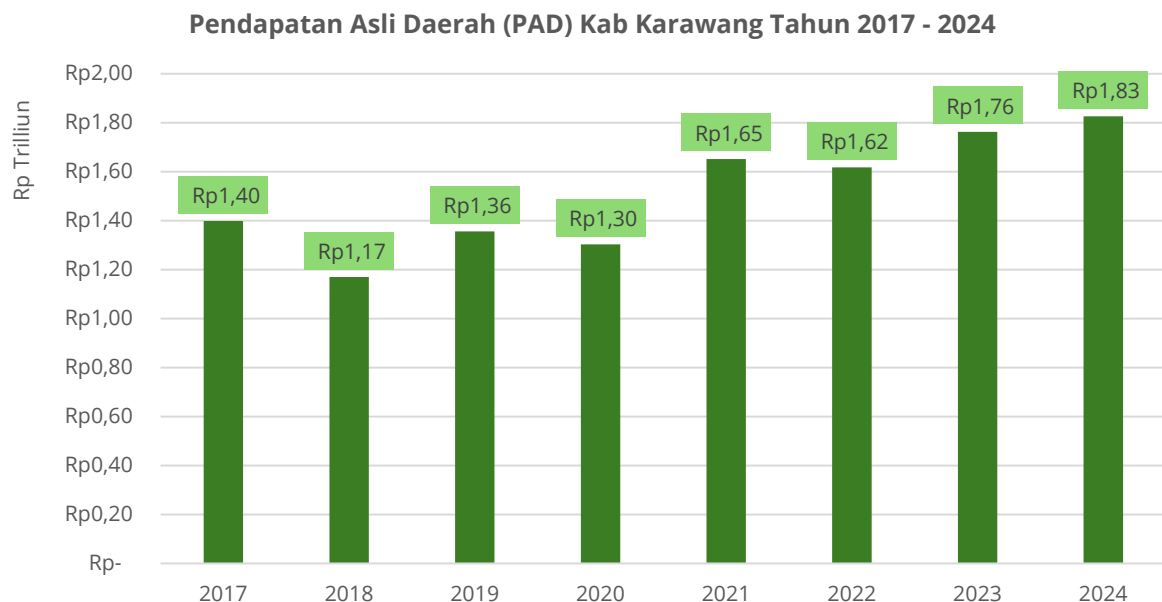
Berdasarkan pertumbuhan pendapatan daerah Kab Karawang dari Tahun 2016 – 2024 meningkat 6,3%, pendapatan daerah dari tahun 2016 adalah 3,57 Triliun dan 2024 adalah 5,69 Triliun, meningkat 2 (dua) kali lipat. Peningkatan ini apabila dilihat dari struktur pendapatan daerah Kabupaten Karawang pada periode 2016 – 2024 masih dominan dari Dana Perimbangan (Transfer Daerah) dengan tren yang meningkat dari tahun ke tahun yang menandakan kemandirian keuangan daerah masih ditopang oleh dana transfer daerah.



Gambar II-143 Perkembangan Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kab Karawang Tahun 2017 – 2024 (Persen)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Rincian perkembangan proporsi sumber pendapatan antara lain Dana Perimbangan (transfer), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Lain Lain Pendapatan yang Sah, yang perkembangannya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II-144 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Karawang Tahun 2017 – 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, , 2025



Gambar II-145 Dana Perimbangan (Transfer) Kab Karawang Tahun 2016 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025



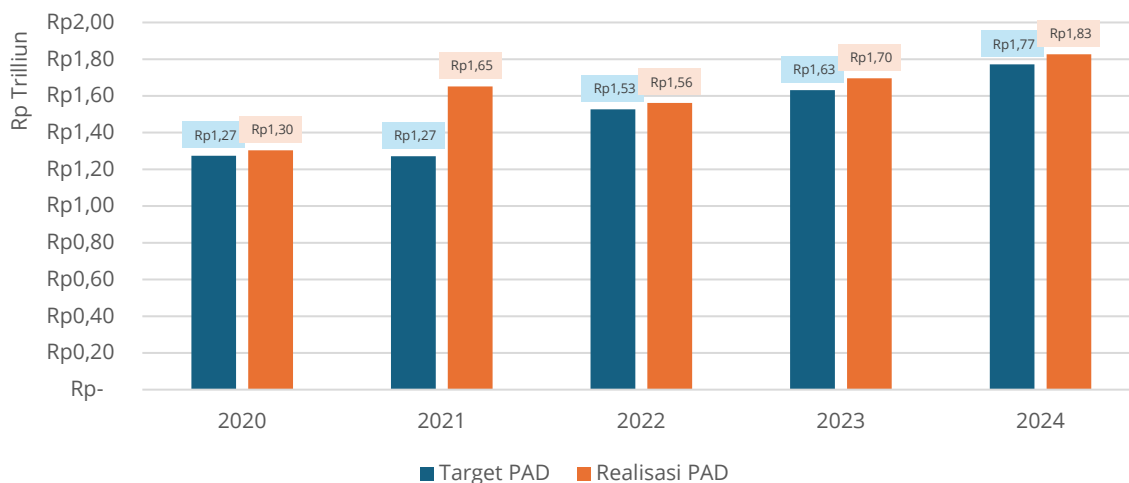
Gambar II-146 Lain Lain Pendapatan yang Sah Kab Karawang Tahun 2016 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Jika dilihat Pendapatan Daerah mengalami tren pertumbuhan sebesar 6,3% per tahunnya setelah dilihat dari struktur Pendapatan Daerahnya, pada tahun 2024 proporsi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 32%, selain itu terjadi pertumbuhan PAD sebesar 9% dari tahun ke tahun. Dari struktur Pendapatan Daerah, Kab Karawang masih didominasi dengan Dana Perimbangan (Transfer) dari tahun ke tahun proporsinya terbesar dan mencapai setengah dari Pendapatan Daerah, dan mengalami tren peningkatan dari Dana Perimbangan (Transfer). Pendapatan Daerah lain, dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Dengan Dana Perimbangan (Transfer) yang mendominasi menandakan bahwa Daerah Otonomi Kab Karawang masih berkegantungan dengan Pemerintah Pusat dalam Keuangan Daerahnya. Hal ini perlu dioptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya.

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Karawang Tahun 2020 - 2024



Gambar II-147 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui antara Target PAD yang ditetapkan dengan realisasi PAD pada tahun berjalan, selalu melebihi target yang ditetapkan, bahkan pada tahun 2021 antara target dengan realisasi PAD terpaut cukup jauh.

Rincian atas perkembangan tiap sumber pendapatan daerah beserta rerata tingkat pertumbuhannya per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (Periode 2020-2024) dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:



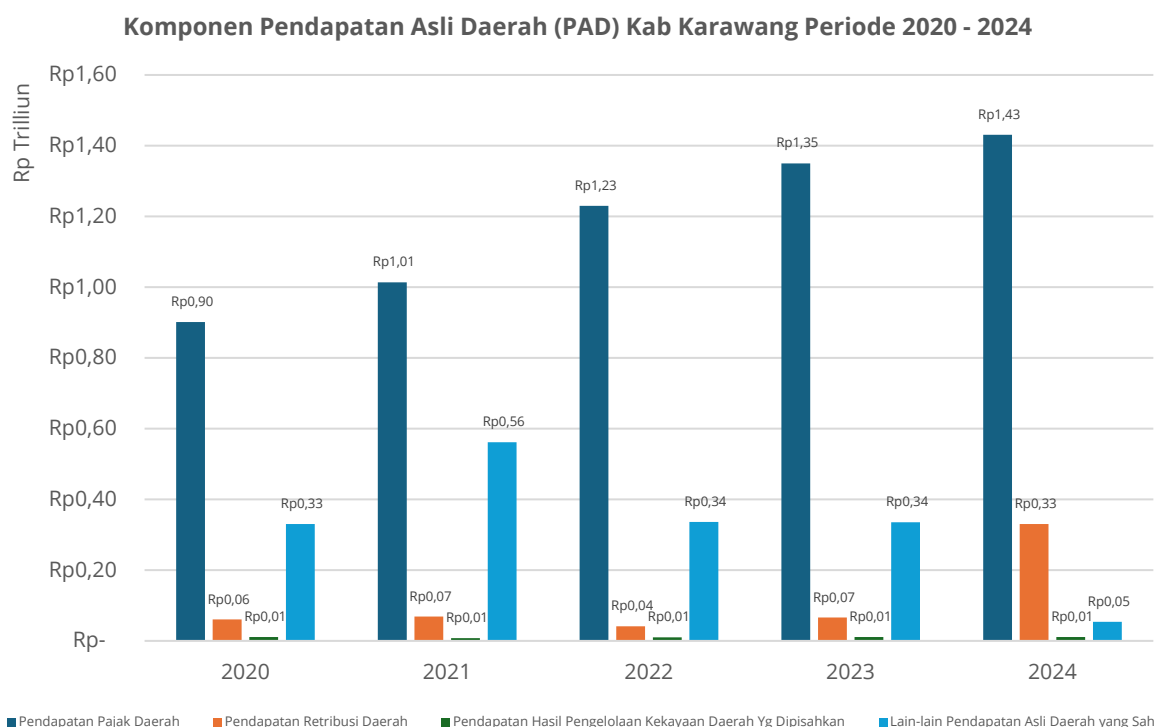
Tabel II-94 Rincian Perkembangan Pendapatan Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024

Uraian			Realisasi Tahun					Rata Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp1.303.353.416.438,00	Rp1.651.850.841.989,00	Rp 1.617.783.012.031,00	Rp 1.762.512.066.251,91	Rp 1.826.280.795.928,09	8,80%
	A	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 901.316.712.160,00	Rp 1.013.542.395.893,00	Rp 1.230.158.739.173,00	Rp 1.349.978.383.488,00	Rp 1.430.848.976.687,00	12,25%
	B	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 60.698.916.657,00	Rp 68.939.040.574,00	Rp 41.279.502.137,00	Rp 66.244.507.045,00	Rp 330.346.023.454,09	52,74%
	C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	Rp 11.017.769.694,00	Rp 7.946.102.415,00	Rp 10.181.332.281,00	Rp 10.906.689.800,00	Rp 10.980.207.535,00	-0,09%
	D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 330.320.017.927,00	Rp 561.423.303.107,00	Rp 336.163.438.440,00	Rp 335.382.485.918,91	Rp 54.105.588.252,00	-36,38%
II	Dana Perimbangan		Rp 2.786.286.030.356,00	Rp 3.029.850.463.855,00	Rp 3.171.144.250.469,00	Rp 3.425.547.340.979,00	Rp 3.776.674.179.554,00	7,90%
	A	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 1.990.406.413.616,00	Rp 2.064.399.869.185,00	Rp 2.245.012.786.660,00	Rp 2.462.884.844.756,00	Rp 2.795.449.285.074,00	8,86%
	1	Dana Bagi Hasil Pajak	Rp 293.267.130.995,00	Rp 377.053.774.892,00	Rp 324.701.914.374,00	Rp 402.865.379.362,00	Rp 483.174.652.440,00	13,29%
	2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp 57.048.679.904,00	Rp 50.530.913.601,00	Rp 63.659.940.449,00	Rp 38.191.073.634,00	Rp 57.188.987.000,00	0,06%
	3	Dana Alokasi Umum	Rp 1.211.636.504.021,00	Rp 1.199.911.350.000,00	Rp 1.180.625.850.080,00	Rp 1.298.387.423.200,00	Rp 1.456.054.337.461,00	4,70%
	4	Dana Alokasi Khusus	Rp 428.454.098.696,00	Rp 436.903.830.692,00	Rp 676.025.081.757,00	Rp 723.440.968.560,00	Rp 799.031.308.173,00	16,86%
	B	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 381.812.841.000,00	Rp 432.528.262.000,00	Rp 355.943.391.000,00	Rp 358.025.917.000,00	Rp 375.669.234.000,00	-0,40%
	1	Dana Insentif Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.720.980.000,00	Rp 18.969.890.000,00	231,58%
	2	Dana Desa	Rp 381.812.841.000,00	Rp 432.528.262.000,00	Rp 355.943.391.000,00	Rp 352.304.937.000,00	Rp 356.699.344.000,00	-1,69%
	C	Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 414.066.775.740,00	Rp 532.922.332.670,00	Rp 570.188.072.809,00	Rp 604.636.579.223,00	Rp 605.555.660.480,00	9,97%
	1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp 391.809.655.740,00	Rp 407.001.272.661,00	Rp 499.687.087.499,00	Rp 533.850.147.723,00	Rp 562.819.254.544,00	9,48%
	2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	Rp 22.257.120.000,00	Rp 125.921.060.009,00	Rp 70.500.985.310,00	Rp 70.786.431.500,00	Rp 42.736.405.936,00	17,72%
III	Lain Lain Pendapatan yang Sah		Rp 284.627.413.936,00	Rp 269.979.583.000,00	Rp 13.671.000.000,00	Rp 8.256.000.000,00	Rp 83.428.870.450,00	-26,37%
	A	Pendapatan Hibah	Rp 284.627.413.936,00	Rp -	Rp 13.671.000.000,00	Rp 8.256.000.000,00	Rp 5.612.550.000,00	-
	B	Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 269.979.583.000,00	Rp -	Rp -	Rp 77.816.320.450,00	-
Pendapatan Daerah			Rp4.374.266.860.730,00	Rp4.951.680.888.844,00	Rp4.802.598.262.500,00	Rp5.196.315.407.230,91	Rp5.686.622.840.656,09	6,78%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

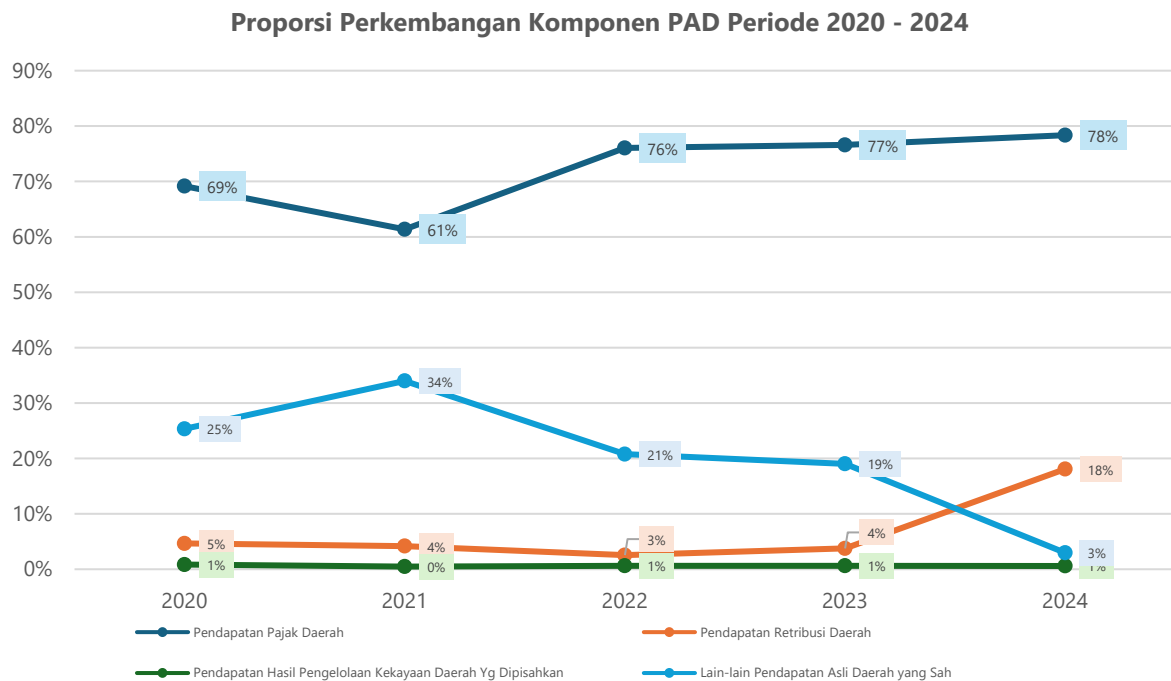
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar Pemerintah Daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menandakan bagaimana kemandirian daerah dalam melaksanakan keuangan daerahnya, semakin tinggi proporsi pendapatan asli daerah dibandingkan komponen pendapatan daerah lainnya, maka dapat dikatakan suatu daerah itu menjadi otonom. Berdasarkan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II-148 Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Berdasarkan strukturisasi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut komposisi Pendapatan Pajak Daerah masih mendominasi dengan kontribusi pada tahun 2024 sebesar 1,43 Triliun Rupiah. Sementara apabila dilihat dari proporsinya pada periode tahun 2020 - 2024, dapat dilihat pada grafik berikut.



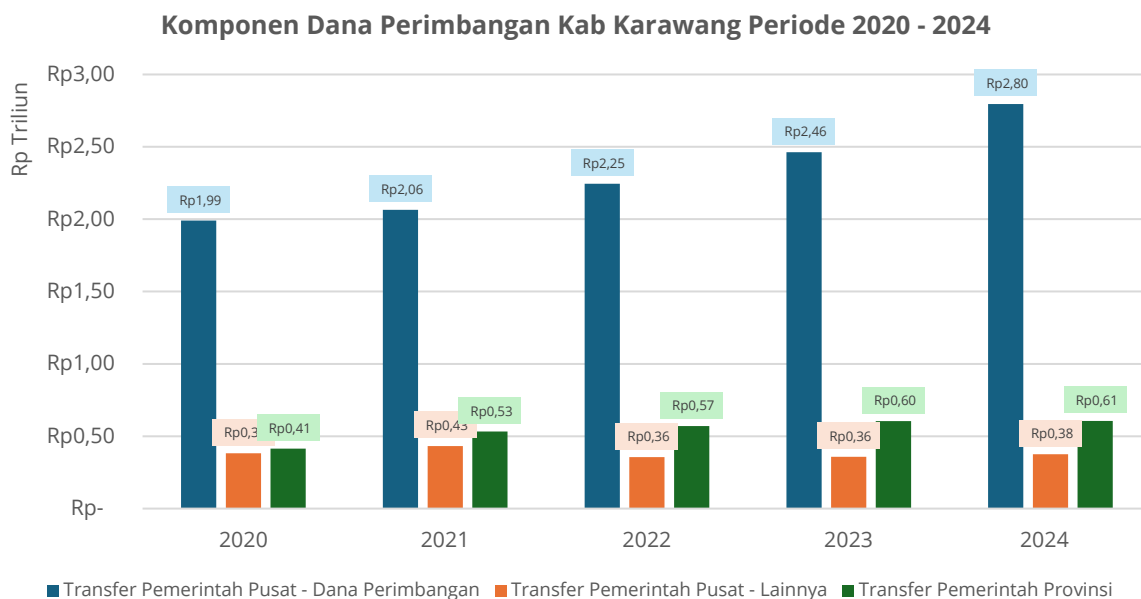
Gambar II-149 Proporsi Perkembangan Komponen PAD Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah pada periode 2020 - 2024, didapatkan bahwa pajak daerah dari tahun ke tahun mempunyai kontribusi yang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah, selain itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kontribusi Pajak Daerah dari awalnya 69% saat ini mencapai 78% dari total kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu PAD Lain-Lain yang sah mengalami pemindahan kode rekening yang awalnya Lain Lain PAD yang Sah ke Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Retribusi Daerah, sehingga PAD Lain Lain yang sah mengalami peningkatan pada tahun 2024. Retribusi Daerah yang awalnya stagnan di 60 Miliar pada tahun 2024 mencapai 330 Miliar. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pertahun sebesar 6,78%.

2. Dana Perimbangan (Transfer)

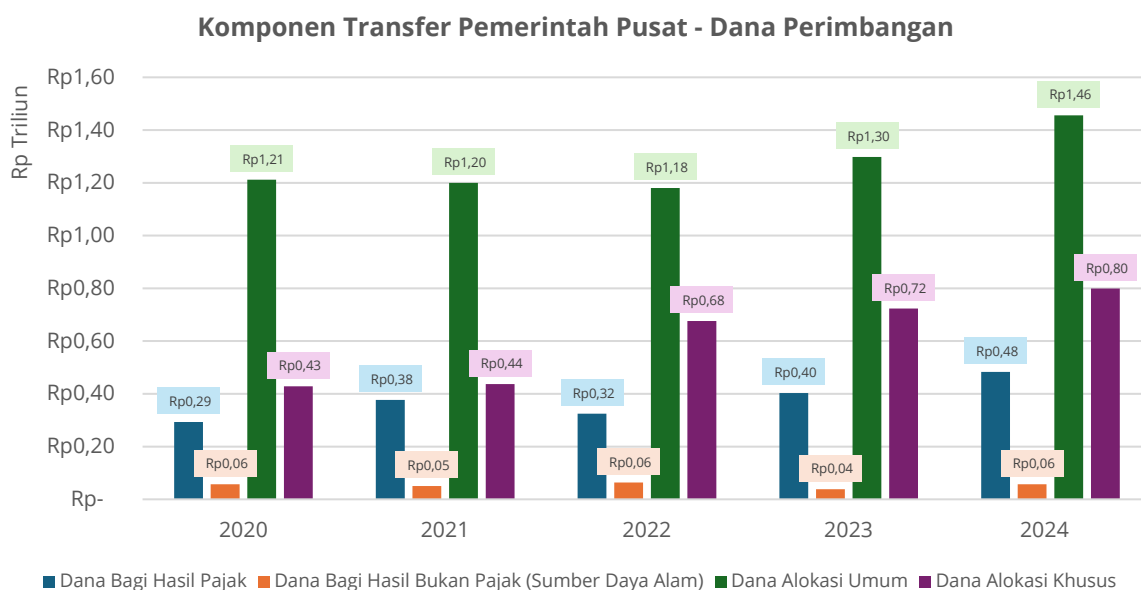
Dana perimbangan yang pada dasarnya adalah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dikeluarkan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Komponen dalam Dana Perimbangan antara lain (1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, (2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya, dan (3) Transfer Pemerintah Provinsi. Berikut adalah perkembangan Dana Perimbangan pada Kab Karawang pada periode tahun 2020 - 2024.



Gambar II-150 Komponen Dana Perimbangan Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Berdasarkan gambar diatas dalam komponen dana perimbangan, proporsi terbesar adalah Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, dengan tahun 2024 mencapai 2,8 Triliun transfer dari Pemerintah Pusat untuk Dana Perimbangan, dengan rincian sebagai berikut.



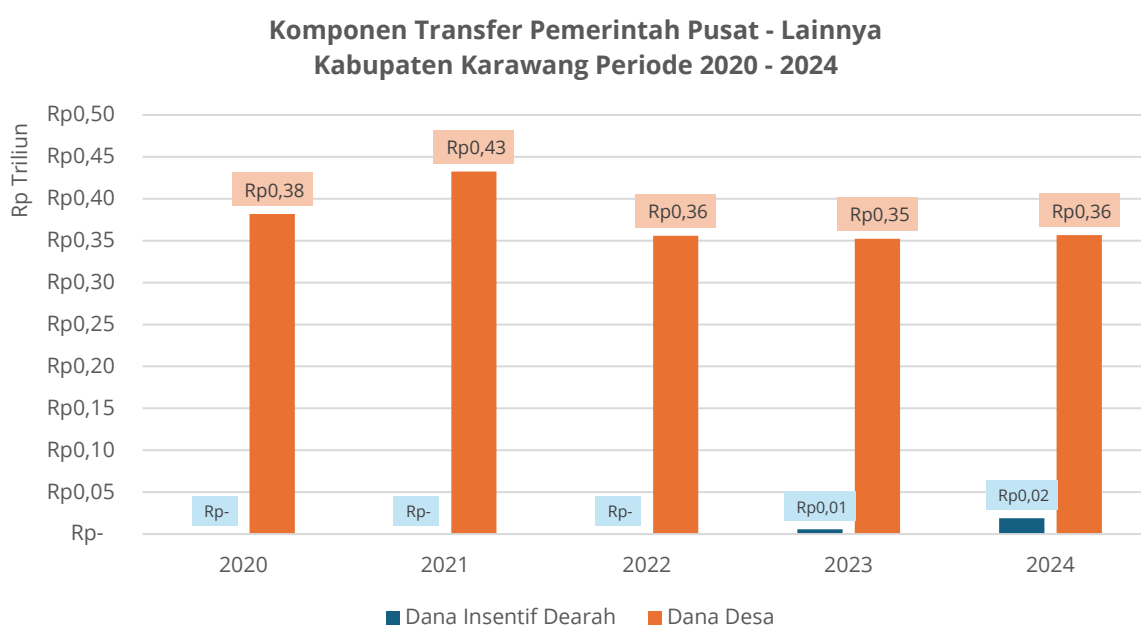
Gambar II-151 Komponen Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Berdasarkan hasil proporsi di atas dapat diketahui bahwa Transfer dari Pusat yang sifatnya Dana Perimbangan paling tinggi didominasi dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan operasional rutin daerah, seperti gaji pegawai, pemeliharaan fasilitas umum, maupun program pelayanan dasar.

Sementara itu Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN namun mempunyai sifat untuk membiayai program atau proyek tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Terjadi peningkatan DAK dan DAU yang menandakan bahwa biaya operasional rutin dari pemerintah daerah meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, DAK yang meningkat menandakan adanya kepentingan pembangunan nasional di Kab Karawang.

Selain itu, juga terdapat transfer pemerintah pusat ke daerah dengan sifatnya dana lainnya, dengan komponen antara lainnya (1) Dana Insentif Daerah, dan (2) Dana Desa. Berikut secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

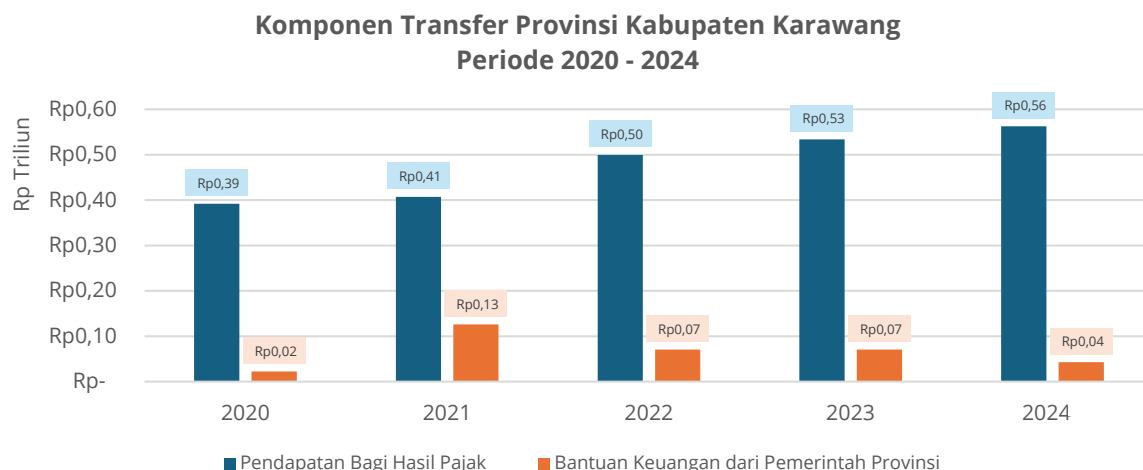


**Gambar II-152 Komponen Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Kab Karawang Periode 2020 - 2024**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Dalam grafik di atas didapatkan bahwa Dana Desa merupakan proporsi tertinggi dalam komponen transfer dari pusat yang sifatnya lainnya, dana desa Kab Karawang tidak jauh lebih dari 350 Miliar, hal ini juga mengingat jumlah desa di Kab Karawang hanya berkisar antara 197 Desa. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa atau kelurahan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik di tingkat desa. Dana ini merupakan bagian dari desentralisasi fiskal dalam rangka memperkuat otonomi desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Besaran dalam Dana Desa, tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang undangan, akan tetapi berjumlah minimal 10% dari total dana transfer ke daerah.

Selain itu terdapat, Transfer dari Pemerintah Provinsi yang sifatnya Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan. Apabila dilihat dalam gambar berikut



Gambar II-153 Komponen Transfer Provinsi Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Berdasarkan gambar diatas didapatkan kesimpulan bahwa Komponen Transfer Provinsi di dominasi dengan Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, hal ini menunjukkan tren peningkatan seiring dengan PAD dengan komponen Pendapatan Pajak Daerah dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun berkisar 390 Miliar dan di tahun 2024 sekitar 560 Miliar, dengan pertumbuhan per tahun 2,95%.

3. Lain Lain Pendapatan yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pinjaman Daerah. Lain Lain Pendapatan yang Sah dapat berupa, (1) Dana Hibah, dan (2) Pendapatan Lainnya. Untuk uraian lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar II-154 Komponen Lain Lain Pendapatan yang Sah Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Lain Lain Pendapatan yang Sah Kab Karawang tidak selalu stabil, karena sifatnya adalah hibah ataupun pendapatan lainnya dapat berupa hasil denda, pendapatan dari investasi, maupun pendapatan yang sifatnya tidak rutin. Pada tahun 2020, Dana Hibah di Kab Karawang merupakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir dengan jumlah 280 Miliar,

sementara Pendapatan Lainnya tertinggi berada pada tahun 2021 dengan total 270 Miliar, lalu pada tahun selanjutnya tidak terdapat pendapatan lainnya dan pada tahun 2024 mengalami pemasukan pendapatan lainnya sebesar 80 Miliar.

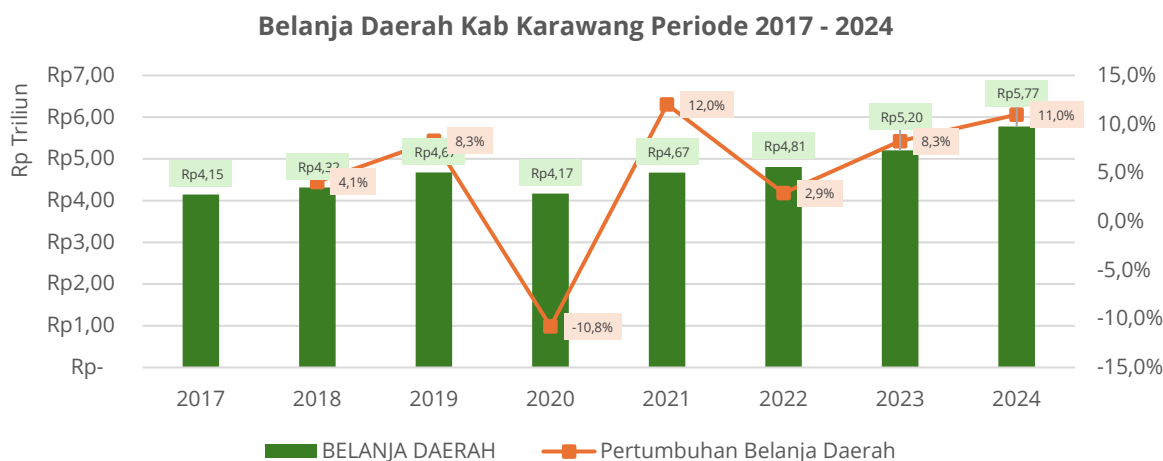
2.3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor. Belanja Daerah merupakan salah satu komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara umum komponen Belanja Daerah antara lain:

- Belanja Operasional yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota; dan
- Belanja Modal yang didalamnya terdiri atas Belanja Tanah, Belanja Peralatan Mesin, Belanja Bangunan Gedung, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Belanja Aset tetap Lainnya.
- Belanja Tak Terduga.
- Belanja Transfer yang di dalamnya terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya kepada pemerintah desa.

Pelaksanaan Belanja Daerah pada APBD periode 2017 – 2024, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 8,48%. Pada tahun 2017 realisasi Belanja Daerah adalah 4,15 Triliun, sementara pada tahun 2024 meningkat sampai 5,7 Triliun. Hal ini menunjukkan perkembangan besaran belanja daerah selama tahun 2017 – 2024 mencapai 1,5 kali lipat. Perkembangan Belanja Daerah pada saat COVID menurun.

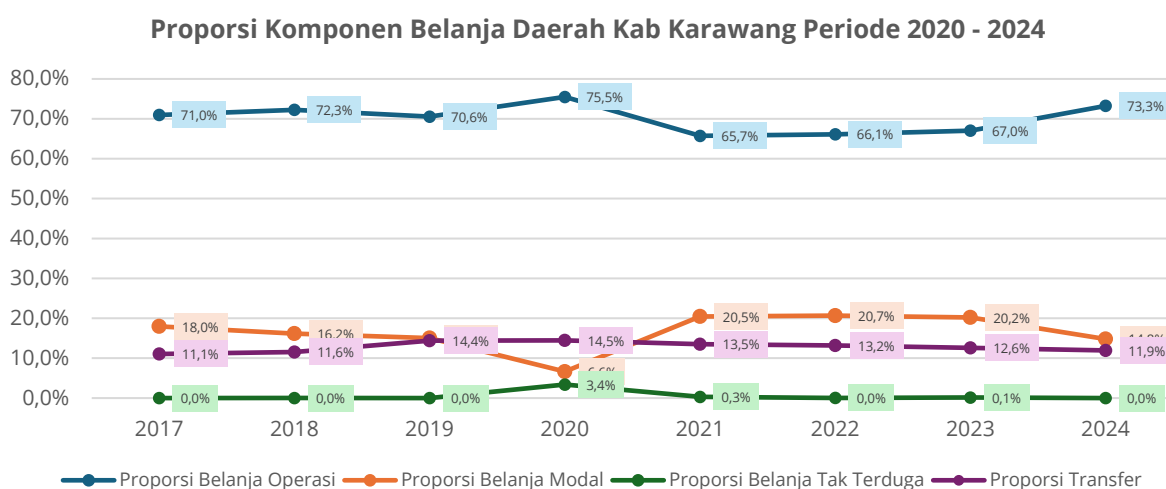


Gambar II-155 Belanja Daerah Kab Karawang Periode 2017 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2017 – 2024, 2025

Sedangkan apabila dilihat dari dilihat dari proporsi komponen Belanja Daerah, Belanja Operasi mempunyai proporsi tertinggi, disusul oleh Belanja Modal. Pada tahun 2024 proporsi Belanja Operasi mencapai 73,3% dan belanja modal mencapai 14,8%, sementara Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga adalah 11,9% dan 0%. Proporsi Belanja Operasi juga meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja yang bersifat bantuan. Dari tahun 2020 – 2024, belanja Operasi terus meningkat proporsinya dengan pertumbuhan per tahun sebesar 7,67%. Belanja Operasi yang tinggi mengindikasikan terjadi :

- Minimnya Anggaran untuk Pembangunan karena alokasi Belanja Modal (infrastruktur, sarana/prasarana), cenderung terbatas.
- Belanja Operasi yang tinggi, mengindikasikan birokrasi yang gemuk dan terjadi ketidakefisienan dalam Pemerintah Daerah mengelola keuangan daerah.



Gambar II-156 Proporsi Komponen Belanja Daerah Kab Karawang Periode 2017 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2017 – 2024, 2025

Secara Rinci Realisasi Belanja Daerah Kab Karawang dalam Periode Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

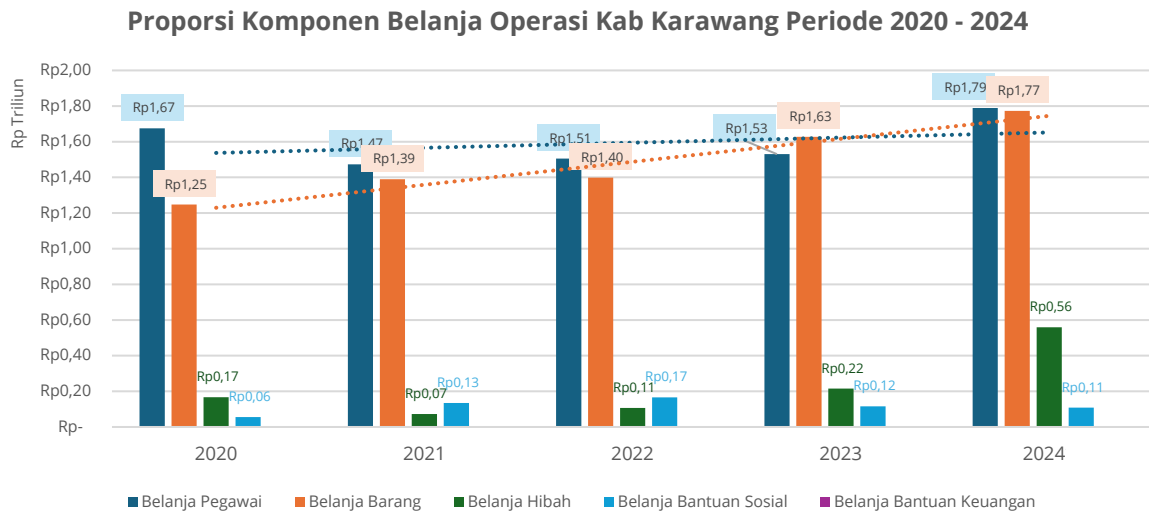
Tabel II-95 Rincian Perkembangan Belanja Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024

Uraian			Realisasi Tahun					Rata Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	
I	Belanja Operasi		Rp 3.147.394.191.316,00	Rp 3.070.365.297.564,00	Rp 3.177.822.614.519,00	Rp 3.488.841.598.404,00	Rp 4.229.900.349.166,00	7,67%
	A	Belanja Pegawai	Rp 1.674.792.123.017,00	Rp 1.472.994.277.529,00	Rp 1.505.483.233.383,00	Rp 1.530.384.155.396,00	Rp 1.789.588.061.474,00	1,67%
	B	Belanja Barang	Rp 1.247.812.609.218,00	Rp 1.389.632.190.791,00	Rp 1.398.924.929.547,00	Rp 1.627.648.161.935,00	Rp 1.773.327.072.723,00	9,18%
	C	Belanja Hibah	Rp 167.261.700.581,00	Rp 73.052.535.524,00	Rp 107.060.471.148,00	Rp 215.354.348.680,00	Rp 558.818.627.969,00	35,20%
	D	Belanja Bantuan Sosial	Rp 55.761.000.000,00	Rp 134.686.293.720,00	Rp 166.353.980.441,00	Rp 115.454.932.393,00	Rp 108.166.587.000,00	18,02%
	E	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 1.766.758.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0%
II	Belanja Modal		Rp 277.221.396.937,00	Rp 955.603.523.632,00	Rp 993.705.467.696,00	Rp 1.052.581.727.815,00	Rp 855.211.904.400,00	32,53%
	A	Belanja Tanah	Rp 2.249.646.200,00	Rp 17.027.963.000,00	Rp 10.914.420.850,00	Rp 2.984.460.856,00	Rp 9.839.094.582,00	44,61%
	B	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 89.011.650.824,00	Rp 165.360.008.874,00	Rp 147.683.304.657,00	Rp 177.355.290.865,00	Rp 191.909.065.420,00	21,17%
	C	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 52.783.793.856,00	Rp 181.629.105.305,00	Rp 199.229.394.669,00	Rp 311.223.543.180,00	Rp 375.208.289.697,00	63,28%
	D	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 127.579.463.100,00	Rp 589.626.590.753,00	Rp 634.580.287.770,00	Rp 560.135.465.694,00	Rp 277.715.274.201,00	21,47%
	E	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 5.596.842.957,00	Rp 1.959.855.700,00	Rp 1.298.059.750,00	Rp 882.967.220,00	Rp 540.180.500,00	-44,26%
	F	Belanja Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,0%
III	Belanja Tak Terduga		Rp 141.663.547.885,00	Rp 13.724.400.000,00	Rp 2.110.231.800,00	Rp 6.874.375.387,00	Rp -	-100,00%
	A	Belanja Tak Terduga	Rp 141.663.547.885,00	Rp 13.724.400.000,00	Rp 2.110.231.800,00	Rp 6.874.375.387,00	Rp -	-100,00%
IV	Transfer		Rp 602.896.432.953,00	Rp 630.978.077.622,00	Rp 633.102.449.900,00	Rp 655.258.093.131,00	Rp 689.294.655.772,00	3,4%
	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA dan Bantuan Keuangan							
	A	Bagi Hasil Pajak	Rp 74.468.905.200,00	Rp 96.017.471.300,00	Rp 117.959.800.000,00	Rp 133.113.809.131,00	Rp 140.555.743.810,00	17,21%
	B	Bagi Hasil Retribusi	Rp 5.159.565.553,00	Rp 5.718.742.422,00	Rp 4.475.960.000,00	Rp 7.285.592.000,00	Rp 6.563.139.562,00	6,20%
	C	Transfer Bantuan Keuangan	Rp 523.267.962.200,00	Rp 529.241.863.900,00	Rp 510.666.689.900,00	Rp 514.858.692.000,00	Rp 542.175.772.400,00	0,89%
Belanja Daerah			Rp 4.169.175.569.091,00	Rp 4.670.671.298.818,00	Rp 4.806.740.763.915,00	Rp 5.203.555.794.737,00	Rp 5.774.406.909.338,00	8,48%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial. Komposisi dari Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar berikut.



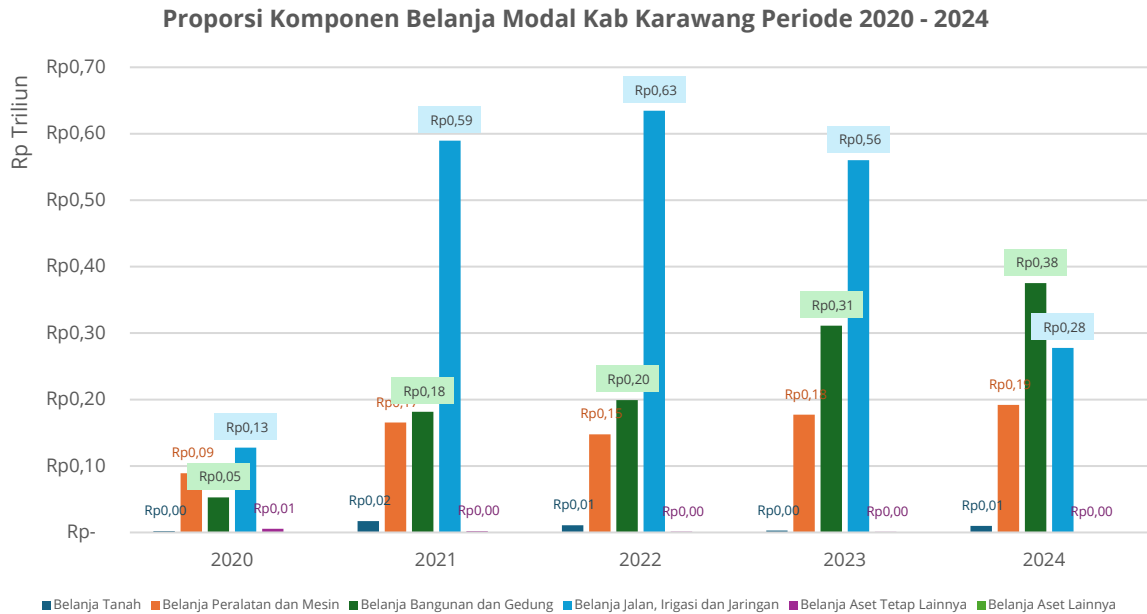
Gambar II-157 Proporsi Komponen Belanja Operasi Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Dapat dilihat bahwa 15 tahun Belanja Operasi didominasi dengan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang hampir mencapai 80% dari total Belanja Operasi. Jika dilihat bahwa dari tahun ke tahun Belanja Pegawai mengalami kenaikan per tahunnya 1,67%, dan Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar 9,18% dari periode 2020 – 2024. Peningkatan Belanja Pegawai perlu ditinjau ulang untuk mengetahui apakah proporsi dan peningkatan Belanja Pegawai apakah tepat dengan pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk pengadaan, pembangunan, atau peningkatan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang (lebih dari 1 tahun). Belanja ini bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Komponen Belanja Modal antara lain, (1) Belanja Tanah, (2) Belanja Peralatan Mesin, (3) Belanja Bangunan dan Gedung, (4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (5) Belanja Aset Tetap Lainnya, dan (6) Belanja Aset Lainnya. Belanja Modal secara rinci antara lain dapat dilihat pada gambar berikut.



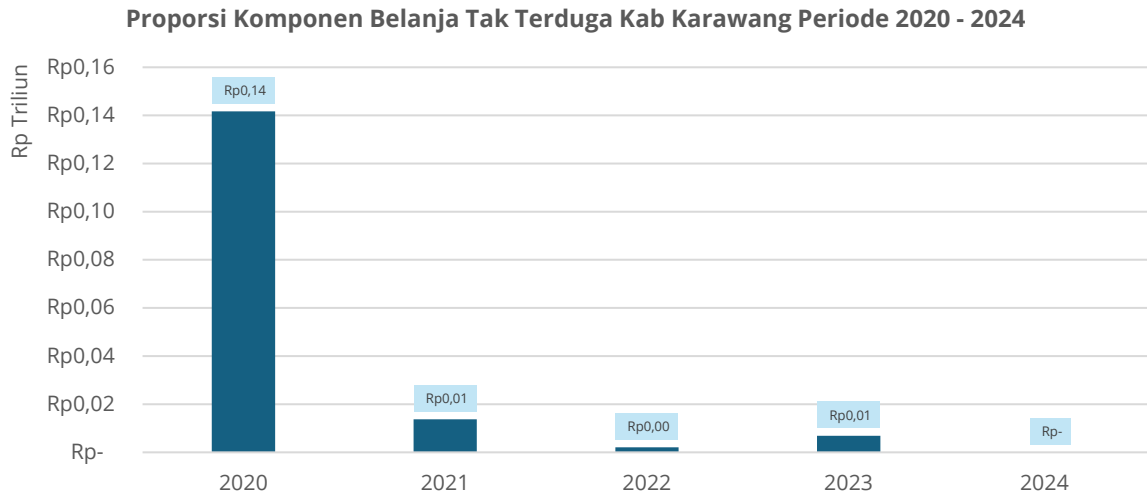
Gambar II-158 Proporsi Komponen Belanja Modal Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Dapat dilihat bahwa komposisi Belanja Modal dalam jangka waktu 5 tahun terakhir di dominasi dengan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Hal ini menandakan bahwa fokus pembangunan pada Kab Karawang adalah peningkatan akses dari Kab Karawang, mengingat luasnya Kab Karawang, sehingga membutuhkan akses yang baik, agar terhindar dari segregasi kawasan antara Kawasan Pegunungan, Perkotaan, dan Kawasan Pantai. Akan tetapi jika dilihat dari tren nya Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dengan rata rata 21,47% per tahunnya. Hal ini terjadi fokus transisi ke Belanja Modal dengan Komponen Belanja Bangunan dan Gedung dan Belanja Peralatan dan Mesin. Dengan fokus komponen belanja modal dapat diartikan Pemerintah Daerah mulai berfokus pada pembangunan fisik gedung dapat berupa sekolah, rumah sakit, jembatan, dll maupun peralatan yang sifatnya dapat menjadi pelayanan publik.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini bersifat fleksibel dan hanya digunakan dalam situasi luar biasa yang memerlukan respons cepat, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan darurat lainnya. Belanja Tak Terduga antara lain dapat dilihat pada gambar berikut.



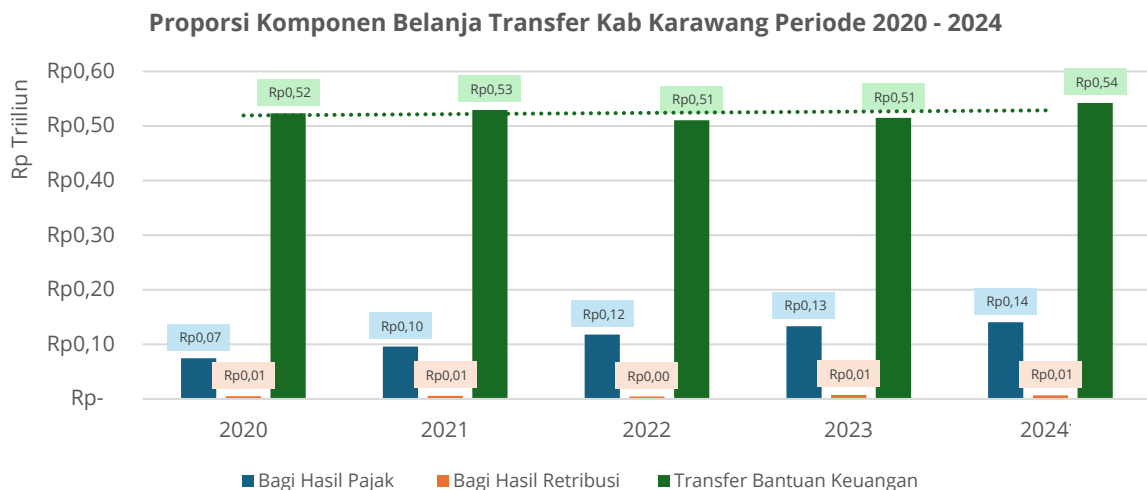
Gambar II-159 Proporsi Komponen Belanja Tak Terduga Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Belanja Tak Terduga terjadi pada tahun 2020 sebesar 140 Miliar mengingat hal itu merupakan kondisi pasca pemulihan COVID sehingga, diperlukan Belanja untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak pasca COVID.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mentransfer dana dari pemerintah daerah ke pihak lain , seperti desa, lembaga, atau institusi tertentu, guna melaksanakan urusan pemerintahan atau program yang menjadi kewenangan daerah. Belanja ini tidak digunakan langsung oleh pemerintah daerah, tetapi disalurkan ke penerima yang ditunjuk. Berdasarkan rincian Belanja Transfer dapat dilihat pada berikut.



Gambar II-160 Proporsi Komponen Belanja Transfer Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Komposisi Komponen Belanja Transfer pada Kab Karawang didominasi dengan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 79% pada 2024 yang mencapai 540 Miliar. Selama lima tahun terakhir Transfer Bagi Hasil Pajak cenderung mengalami fluktuatif, dengan

rata rata pertumbuhan 6,20%. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan mengalami rata rata pertumbuhan 0,89%.

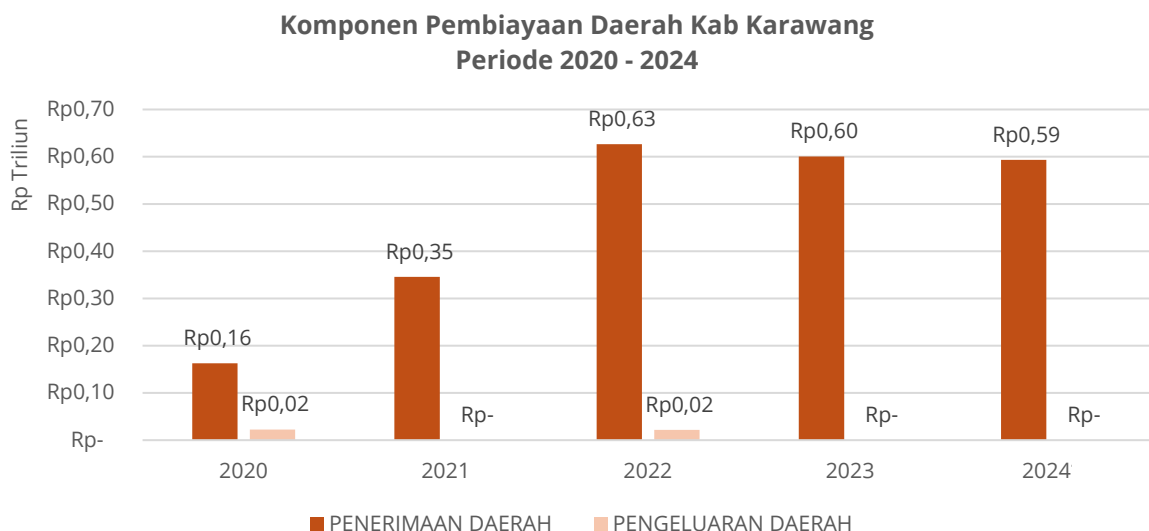
Komposisi Komponen Belanja Transfer pada Kab Karawang didominasi dengan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 81% pada 2024 yang mencapai 510 Miliar. Selama lima tahun terakhir Transfer Bagi Hasil Pajak cenderung mengalami pelambatan kenaikan, semula 28,94 persen pada tahun 2020 - 2021 melambat menjadi 17,21 persen pada tahun 2023 - 2024. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan mengalami perlambatan, semula 1,14 persen pada tahun 2020 - 2021 menurun menjadi 0,89 persen pada tahun 2023 - 2024.

2.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Karawang terdiri dari:

- Penerimaan pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- Pengeluaran pembiayaan daerah yang di dalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada gambar berikut.



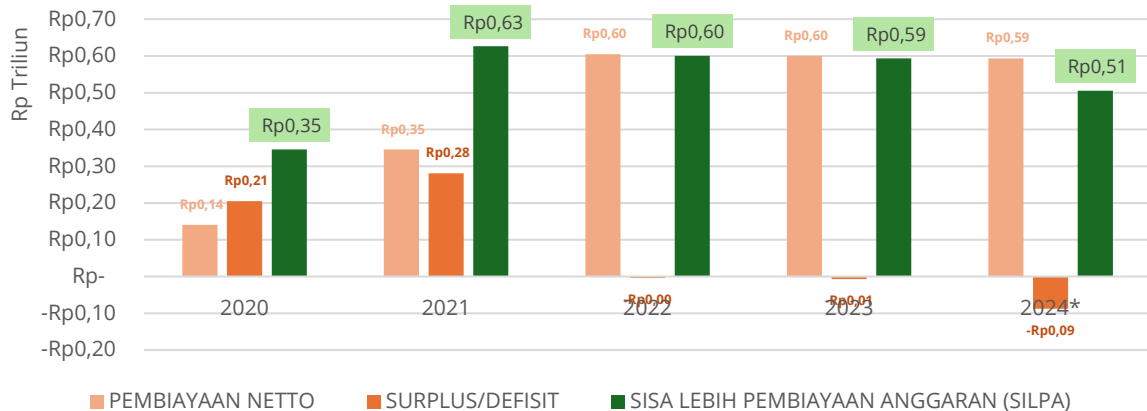
Gambar II-161 Komponen Pembiayaan Daerah Kab Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Dapat dilihat bahwa Penerimaan Daerah lebih tinggi daripada Pengeluaran Daerah sehingga Pembiayaan Netto pada tahun anggaran 2020 – 2024 terjadi tren yang

positif. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah yang dilakukan pada tahun 2020 – 2023 kecuali pada tahun 2024.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada periode tahun 2020 – 2024 mengalami tren positif menandakan cadangan pembiayaan daerah cukup tinggi untuk tahun berikutnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar II-162 Proporsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Kab Karawang Periode 2020 - 2024**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Rincian Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel II-96 Rincian Perkembangan Pembiayaan Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya
per Tahun Periode 2020 - 2024**

Uraian		Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	PENERIMAAN DAERAH	Rp 162.880.971.920,00	Rp 345.572.263.560,00	Rp 626.581.853.586,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91
	A Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp 162.880.971.920,00	Rp 345.572.263.560,00	Rp 626.581.853.586,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91
	B Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	C Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	D Penjualan Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
II	PENGELUARAN DAERAH	Rp 22.400.000.000,00	Rp -	Rp 21.855.518.405,00	Rp -	Rp -
	A Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	B Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 22.400.000.000,00	Rp -	Rp 21.855.518.405,00	Rp -	Rp -
	C Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
III	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 140.480.971.920,00	Rp 345.572.263.560,00	Rp 604.726.335.181,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91
IV	SURPLUS/DEFISIT	Rp 205.091.291.639,00	Rp 281.009.590.026,00	-Rp 4.142.501.415,00	-Rp 7.240.387.506,09	-Rp 87.784.068.681,91
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	Rp 345.572.263.559,00	Rp 626.581.853.586,00	Rp 600.583.833.766,00	Rp 593.343.446.259,91	Rp 505.547.697.851,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

2.3.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran kemampuan suatu pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan operasionalnya sendiri dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat (seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, atau Dana Bagi Hasil). Kemandirian keuangan daerah dapat dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

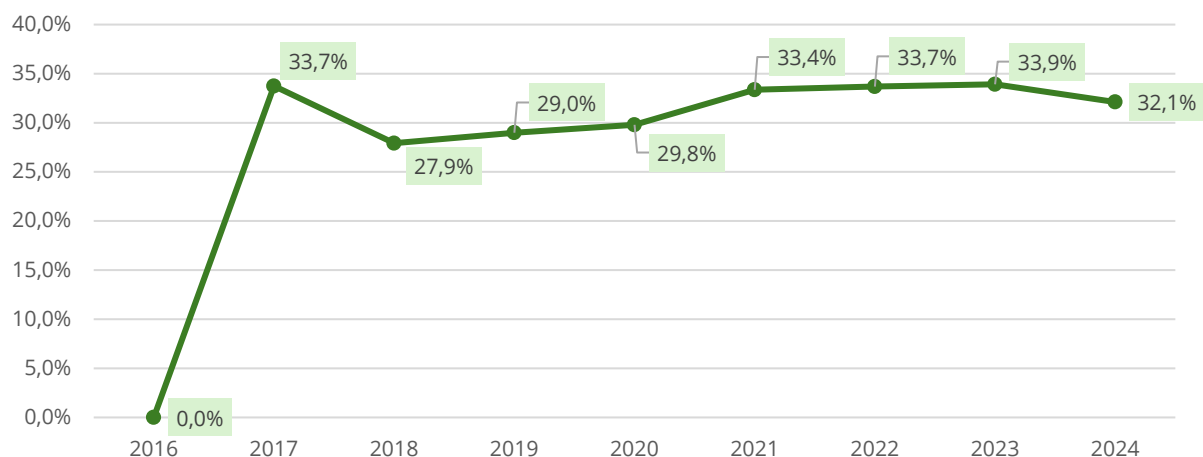
Jika dilihat dari indikator Rasio Kemandirian Daerah (RKD), mengalami tren peningkatan. Di tahun 2016 kemandirian baru mencapai 28,1% masuk ke dalam kategori Rendah (*Konsultif*) sampai pada tahun 2024 berdasarkan kategori LRA Jawa Barat, yang menandakan campur tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang.

Tabel II-97 Rasio Kemandirian

Kemampuan Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan	Keterangan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif	Peran Pemerintah Pusat Dominan
Rendah	25 – 50	Konsultif	Campur Tangan Pemerintah Pusat mulai berkurang
Sedang	50 – 75	Partisipatif	Mulai mampu melaksanakan otonomi daerah
Tinggi	75 – 100	Delegatif	Tidak ada campur tangan Pusat, karena mandiri dalam otonomi daerah

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Jawa Barat, 2025

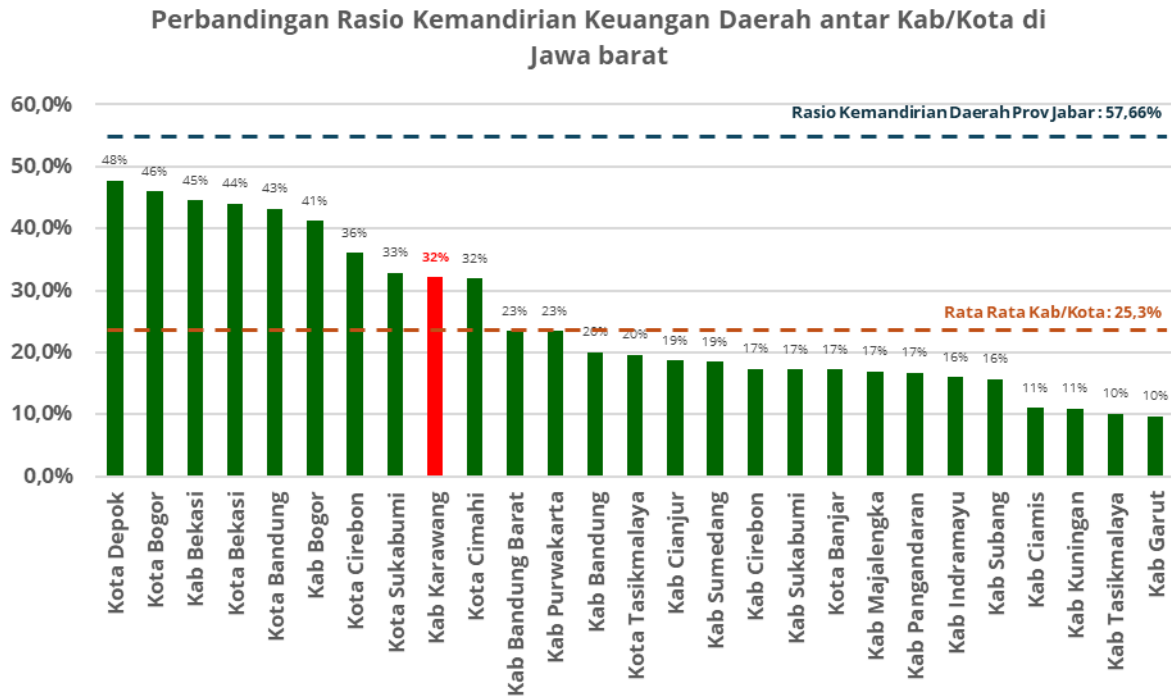
Rasio Kemandirian Daerah Kab Karawang Tahun 2020 - 2024



Gambar II-163 Rasio Kemandirian Daerah Kab Karawang Tahun 2020 – 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Jika dibandingkan dengan Rasio Kemandirian pada daerah lain, rasio kemandirian daerah Kab Karawang berada di atas rata-rata kemandirian daerah lain di provinsi Jawa Barat sebesar 25,3%.



Gambar II-164 Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kab/Kota di Jawa Barat

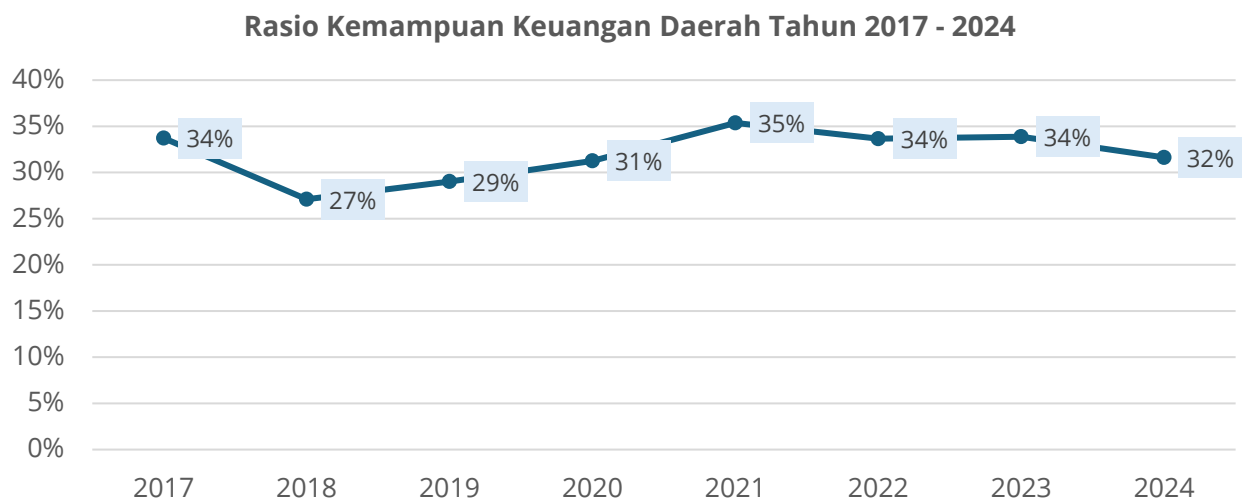
Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2025

2. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Daerah merupakan ukuran daya dukung PAD terhadap total belanja daerah (biasanya belanja rutin/operasional), sehingga dapat dilihat seberapa besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dapat dicari dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut maka dapat dicari rasio kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun pada Kabupaten Karawang adalah.



Gambar II-165 Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017 - 2024

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan, 2025

Kemampuan keuangan daerah dapat diklasifikasikan menjadi berikut.

Tabel II-98 Klasifikasi Rasio Kemampuan Keuangan Daerah

Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	Kategori
0 – 25 %	Sangat Rendah
25 – 50 %	Rendah
50 – 75 %	Sedang
75 – 100 %	Tinggi

Sumber : Halim, 2012

Grafik menunjukkan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah selama 2017–2024 berada pada kisaran 27%–35%, yang berarti daerah masih berada dalam kategori kemampuan rendah dan belum mampu membiayai belanja operasional secara mandiri dari PAD. Meskipun sempat meningkat hingga 35% pada 2021, tren tersebut tidak berlanjut dan justru sedikit menurun pada 2024 menjadi 32%. Hal ini mencerminkan ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan perlunya strategi peningkatan PAD yang lebih agresif dan berkelanjutan.

2.3.2 Neraca Daerah

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Neraca sekurang-kurangnya memberikan informasi mengenai kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan ekuitas dana. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif, maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya. Berikut ini disajikan Realisasi Neraca Kabupaten Karawang pada tahun 2020-2024 disertai dengan rata-rata pertumbuhan.

Tabel II-99 Rincian Perkembangan Neraca Daerah Kab Karawang Beserta Tingkat Pertumbuhannya per Tahun Periode 2020 - 2024

Uraian				Realisasi Tahun					Rata Rata
				2020	2021	2022	2023	2024	
I	ASET								
	A	ASET LANCAR							
		1	Kas di Kas Daerah	Rp 265.989,41	Rp 375.269,40	Rp 433.587,08	Rp 529.964,54	Rp 466.898,51	15,10%
		2	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 46,32	Rp 573,30	Rp 209,36	Rp 2.000,46	Rp 403,69	71,82%
		3	Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 0,00	Rp 4,61	Rp 22,32	Rp 0,39	Rp 1.421,37	319,04%
		4	Kas di BLUD	Rp 78.594,87	Rp 250.519,17	Rp 166.964,57	Rp 61.299,82	Rp 36.756,94	-17,30%
		5	Kas BOS	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 78,24	Rp 78,85	0,19%
		6	Kas Lainnya	Rp 955,73	Rp 215,38	Rp 0,95	Rp 37,69	Rp 76,34	-46,84%
		7	Investasi Jangka Pendek	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		8	Piutang Pajak	Rp 617.919,99	Rp 667.017,98	Rp 801.434,81	Rp 954.618,77	Rp 984.689,42	12,35%
		9	Penyisihan Piutang Pajak	(Rp 440.016,56)	(Rp 474.323,15)	(Rp 510.283,43)	(Rp 555.711,12)	(Rp 571.452,04)	6,75%
		10	Piutang Pajak Netto	Rp 177.903,43	Rp 192.694,83	Rp 291.151,38	Rp 398.907,65	Rp 413.237,37	23,45%
		11	Piutang Retribusi	Rp 2.588,28	Rp 2.859,05	Rp 5.486,58	Rp 4.449,72	Rp 73.051,55	130,49%
		12	Penyisihan Piutang Retribusi	(Rp 1.425,45)	(Rp 1.773,87)	(Rp 2.344,73)	(Rp 2.397,06)	(Rp 34.377,63)	121,61%
		13	Piutang Retribusi Netto	Rp 1.162,83	Rp 1.085,18	Rp 3.141,85	Rp 2.052,66	Rp 38.673,92	140,15%
		14	Piutang Lainnya	Rp 63.976,59	Rp 54.594,48	Rp 75.939,73	Rp 170.524,27	Rp 37.057,84	-12,76%
		15	Penyisihan Piutang Lainnya	(Rp 12.549,80)	(Rp 16.453,24)	(Rp 19.070,46)	(Rp 22.924,04)	(Rp 378,24)	-58,33%
		16	Piutang lainnya Netto	Rp 51.426,80	Rp 38.141,23	Rp 56.869,27	Rp 147.600,23	Rp 36.679,60	-8,10%
		17	Belanja Dibayar Dimuka	Rp 911,36	Rp 519,87	Rp 442,84	Rp 33.797,52	Rp 977,15	1,76%
		18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		19	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		20	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		21	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	Rp 1.478,94	Rp 1.425,76	Rp 1.488,47	Rp 1.350,72	Rp 1.284,86	-3,46%



Uraian				Realisasi Tahun					Rata Rata
				2020	2021	2022	2023	2024	
	22	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	23	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp 1.478,94	Rp 1.425,76	Rp 1.488,47	Rp 1.350,72	Rp 1.284,86	-3,46%
	24	Persediaan		Rp 47.238,96	Rp 187.443,63	Rp 206.310,42	Rp 46.857,20	Rp 198.397,26	43,16%
		Jumlah Aset Lancar		Rp 625.708,64	Rp 1.047.892,36	Rp 1.160.188,50	Rp 1.223.947,12	Rp 1.194.885,88	17,55%
	B	INVESTASI JANGKA PANJANG							
	1	Investasi Nonpermanen		Rp 12.673,21	Rp 12.747,11	Rp 12.816,69	Rp 0,00	Rp 0,00	-100,00%
	2	Pinjaman Jangka Panjang		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	3	Investasi dalam Surat Utang Negara		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	4	Investasi Non permanen Lainnya		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 12.854,73	Rp 12.900,17	0,09%
	5	Penyisihan Investasi Non Permanen		(Rp 7.733,79)	(Rp 7.693,34)	(Rp 8.074,13)	(Rp 8.201,01)	(Rp 8.311,07)	1,82%
		Jumlah Investasi Nonpermanen		Rp 4.939,41	Rp 5.053,77	Rp 4.742,55	Rp 4.653,72	Rp 4.589,10	-1,82%
	1	Investasi Permanen		Rp 147.017,78	Rp 161.545,35	Rp 225.225,14	Rp 0,00	Rp 0,00	-100,00%
	2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp 151.957,20	Rp 166.599,12	Rp 229.967,70	Rp 239.214,85	Rp 360.720,30	24,13%
	3	Investasi Permanen Lainnya		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		Jumlah Investasi Permanen		Rp 147.017,78	Rp 161.545,35	Rp 225.225,14	Rp 239.214,85	Rp 360.720,30	25,16%
		Jumlah Investasi Jangka Panjang		Rp 151.957,20	Rp 166.599,12	Rp 229.967,70	Rp 243.868,58	Rp 365.309,40	24,52%
	C	ASET TETAP							
	1	Tanah		Rp 1.483.306,74	Rp 1.502.938,22	Rp 4.110.918,66	Rp 4.228.146,74	Rp 4.301.559,67	30,50%
	2	Peralatan dan Mesin		Rp 986.766,36	Rp 1.133.558,56	Rp 1.267.783,65	Rp 1.430.611,15	Rp 1.405.929,47	9,25%
	3	Gedung dan Bangunan		Rp 1.826.391,54	Rp 1.917.896,27	Rp 2.048.004,44	Rp 2.251.790,92	Rp 2.633.627,26	9,58%
	4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		Rp 3.460.235,05	Rp 3.815.883,78	Rp 4.570.708,26	Rp 5.064.742,56	Rp 5.275.450,33	11,12%
	5	Aset Tetap Lainnya		Rp 87.163,85	Rp 87.677,84	Rp 88.174,06	Rp 86.770,31	Rp 88.969,93	0,51%
	6	Konstruksi dalam Pengerjaan		Rp 68.482,93	Rp 108.821,07	Rp 58.213,78	Rp 38.252,12	Rp 70.032,29	0,56%



Uraian				Realisasi Tahun					Rata Rata
				2020	2021	2022	2023	2024	
	7	Akumulasi Penyusutan		(Rp 3.450.911,64)	(Rp 3.784.726,22)	(Rp 4.202.587,55)	(Rp 4.700.300,16)	(Rp 5.008.396,72)	9,76%
		Jumlah Aset Tetap		Rp 4.461.434,83	Rp 4.782.049,52	Rp 7.941.215,29	Rp 8.400.013,65	Rp 8.767.172,24	
	D	DANA CADANGAN							
	1	Dana Cadangan		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		Jumlah Dana Cadangan		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	E	ASET LAINNYA							
	1	Tagihan Penjualan Angsuran		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	2	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	3	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	4	Tuntutan Ganti Rugi		Rp 382,63	Rp 112,54	Rp 32,79	Rp 19,16	Rp 11,09	-58,74%
	5	PenyisihanTuntutan Ganti Rugi					Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	6	Tuntutan Ganti Rugi Netto		Rp 382,63	Rp 112,54	Rp 32,79	Rp 19,16	Rp 11,09	-58,74%
	7	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp 55.929,73	Rp 55.929,73	Rp 55.929,73	Rp 55.946,42	Rp 55.946,42	0,01%
	8	Aset Tak Berwujud		Rp 15.271,15	Rp 17.715,39	Rp 21.177,96	Rp 24.423,48	Rp 28.405,36	16,78%
	9	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(Rp 11.507,02)	(Rp 12.826,81)	(Rp 14.378,81)	(Rp 16.457,70)	(Rp 18.654,57)	12,84%
	10	Aset Tak Berwujud Netto		Rp 3.764,14	Rp 4.888,59	Rp 6.799,15	Rp 7.965,78	Rp 9.750,79	26,87%
	11	Aset Lain-Lain		Rp 225.746,06	Rp 244.359,12	Rp 237.106,42	Rp 289.448,99	Rp 314.920,47	8,68%
	12	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)				Rp 41.215,17	Rp 0,00	Rp 0,00	-100,00%
		Jumlah Aset Lainnya		Rp 285.822,56	Rp 305.289,97	Rp 341.083,26	Rp 353.380,34	Rp 380.628,77	7,42%
		JUMLAH ASET		Rp 5.524.923,22	Rp 6.301.830,97	Rp 9.672.454,75	Rp 10.221.209,69	Rp 10.719.406,65	18,02%
II		KEWAJIBAN							
	A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
	1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 200,44	Rp 37,69	Rp 76,34	-21,44%

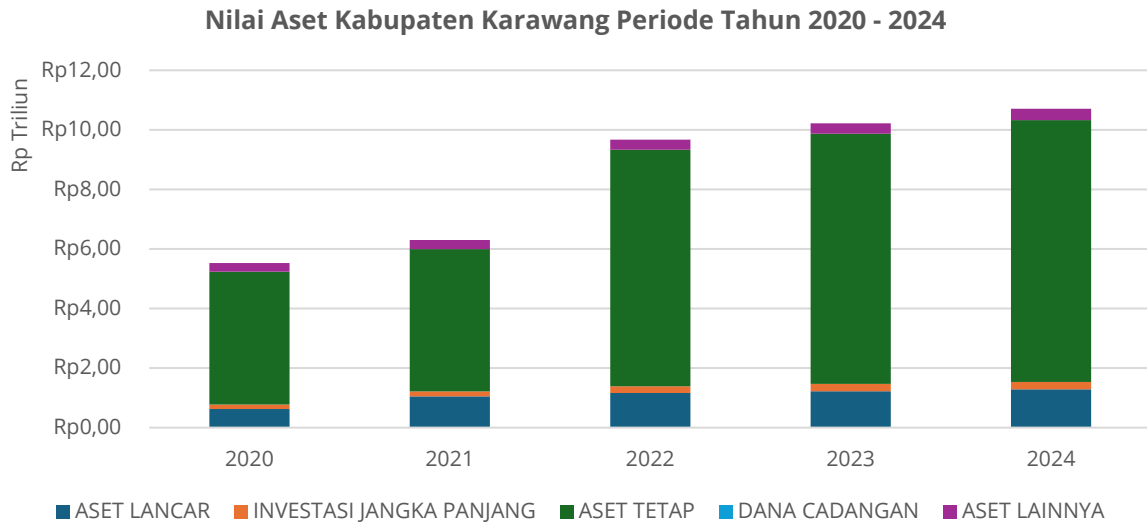


Uraian				Realisasi Tahun					Rata Rata
				2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Utang Bunga		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	4	Pendapatan Diterima Dimuka		Rp 11.619,90	Rp 9.059,77	Rp 7.262,37	Rp 11.688,78	Rp 10.741,04	-1,95%
	5	Utang Belanja		Rp 10.505,38	Rp 25.063,38	Rp 33.534,82	Rp 86.105,91	Rp 127.429,87	86,62%
	6	Utang Jangka Pendek Lainnya		Rp 35.467,58	Rp 26.573,13	Rp 43.348,58	Rp 20.416,39	Rp 17.258,85	-16,48%
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		Rp 57.592,86	Rp 35.467,58	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
	B	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							
	1	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	2	Utang Dalam Negeri - Obligasi		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	3	Premium (Diskonto) Obligasi		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
	4	Utang Jangka Panjang Lainnya		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
		JUMLAH KEWAJIBAN		Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.122,53	28,93%
		JUMLAH EKUITAS		Rp 5.467.330,36	Rp 6.241.134,69	Rp 9.588.108,53	Rp 10.102.960,92	Rp 10.563.900,55	17,90%
		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		Rp 5.524.923,22	Rp 6.301.830,97	Rp 9.672.454,75	Rp 10.221.209,69	Rp 10.719.406,65	18,02%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

2.3.2.1 Aset

Nilai Aset Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dengan rata rata peningkatan sebesar 19,5%. Dengan nilai aset dari tahun 2020 sebesar 5,5 Triliun dan pada tahun 2024 meningkat hingga 10,7 Triliun.



Gambar II-166 Nilai Aset Kabupaten Karawang Periode Tahun 2020 – 2024

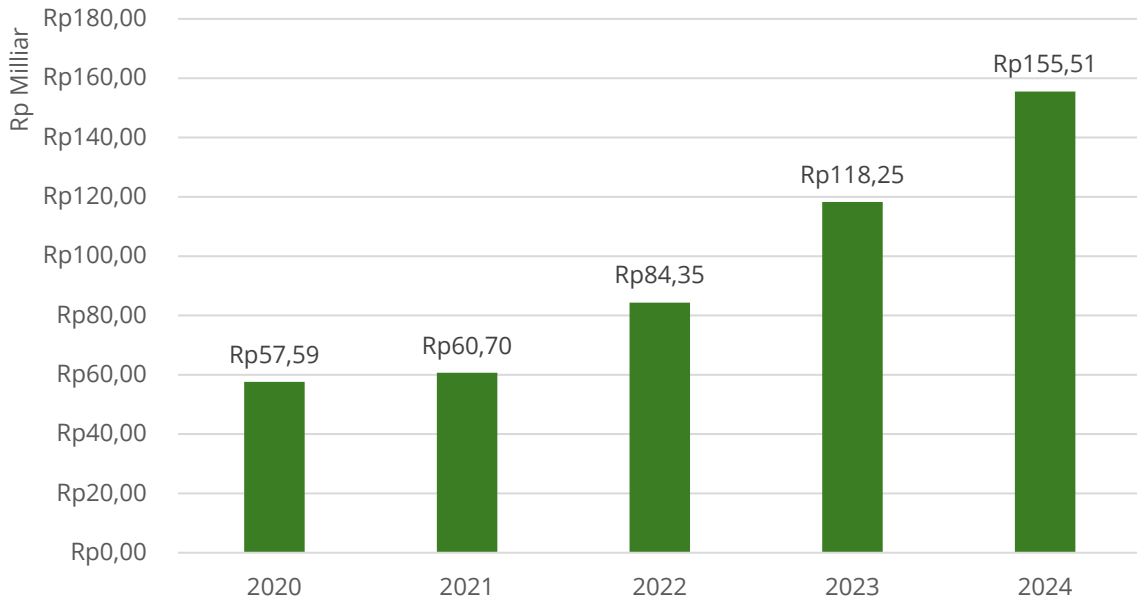
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Dari **Tabel II-99**, dapat diketahui bahwa aset tetap yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 18,40% dan diikuti oleh aset lancar sebesar 17,55%, selain itu proporsi Aset di dominasi dengan Aset Lancar dan Aset Tetap. Pada **Gambar II-166** dapat dilihat bahwa nilai aset mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

2.3.2.2 Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Jumlah Kewajiban Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari periode 2020 – 2025 dengan peningkatan sebesar 28,19%.

Jumlah Kewajiban Kab Karawang Periode Tahun 2020 - 2024



Gambar II-167 Jumlah Kewajiban Kabupaten Karawang Periode Tahun 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Karawang pada periode tahun 2020 - 2024 di dominasi dengan Kewajiban Jangka Pendek, dengan Hutang Belanja dan Hutang Jangka Pendek Lainnya yang terbesar. Pada Tahun 2024, Kewajiban Jangka Pendek sebesar 155 Miliar dengan rincian Hutang Belanja sebesar 126 Miliar, Hutang Jangka Pendek lainnya sebesar 18 Miliar, Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 11 Miliar, dan Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar 76 Juta.

2.3.2.3 Ekuitas Dana

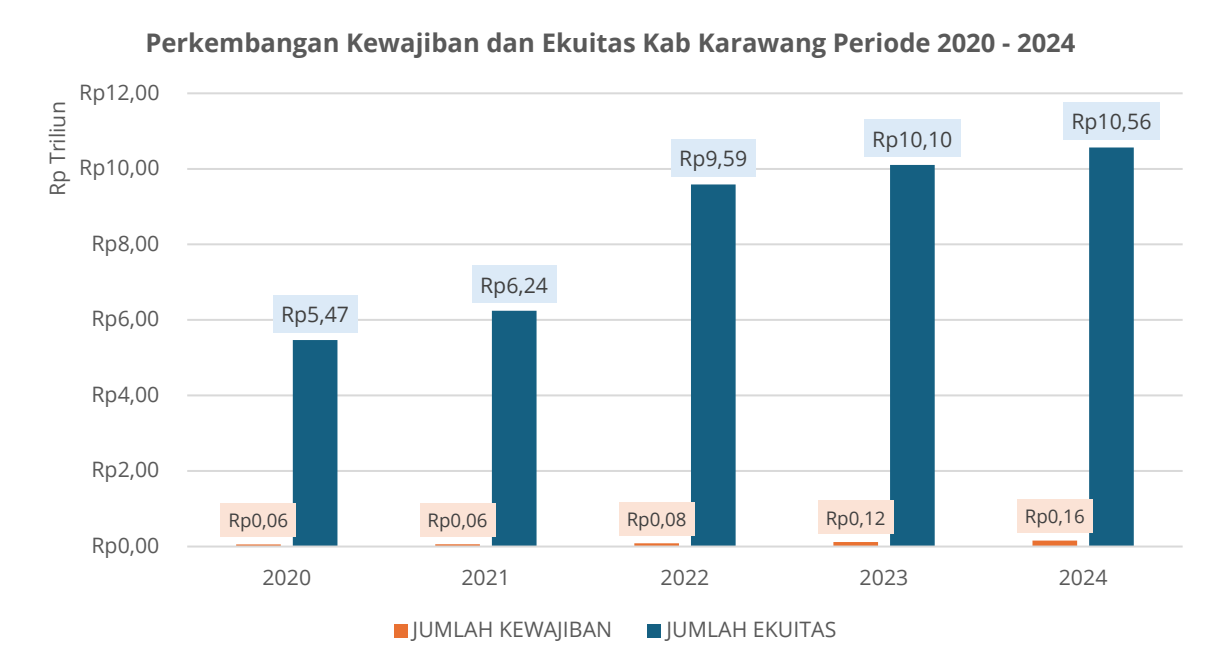
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel II-100 Rincian Ekuitas (Dalam Jutaan Rupiah) Kabupaten Karawang

Uraian	Realisasi Tahun					Rata Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Kewajiban Jangka Panjang	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
Jumlah Kewajiban	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
Nilai Aset	Rp 5.524.923,22	Rp 6.301.830,97	Rp 9.672.454,75	Rp 10.221.209,69	Rp 10.719.406,65	18,02%
Jumlah Ekuitas (Nilai Aset - Jumlah Kewajiban)	Rp 5.467.330,36	Rp 6.241.134,69	Rp 9.588.108,53	Rp 10.102.960,92	Rp 10.563.900,55	17,90%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp 5.524.923,22	Rp 6.301.830,97	Rp 9.672.454,75	Rp 10.221.209,69	Rp 10.719.406,65	18,02%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan Ekuitas dari tahun 2020 sebesar 5,5 Triliun dan pada tahun 2024 naik 2 kali lipat sebesar 10,7 Triliun, dengan pertumbuhan per tahunnya sebesar 17,90%



Gambar II-168 Perkembangan Kewajiban dan Ekuitas Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024, 2025

2.3.2.4 Analisis Perhitungan Risiko

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Rasio likuiditas yang digunakan adalah (i) rasio lancar dan (ii) rasio cepat.

Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Untuk memperoleh rasio lancar, rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Tabel II-101 Rasio Lancar Kabupaten Karawang Periode 2020 - 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun					Rata Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Aset Lancar	Rp 625.708,64	Rp 1.047.892,36	Rp 1.160.188,50	Rp 1.223.947,12	Rp 1.194.885,88	17,55%
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
Rasio Lancar	9,20%	5,79%	7,27%	9,66%	13,01%	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 - 2024 diolah, 2025

Berdasarkan **Tabel II-96**, terlihat adanya peningkatan rasio lancar pada periode 2020-2024, diikuti oleh peningkatan pada tahun 2020 dan 2021. Meskipun ada fluktuasi

penurunan pada tahun 2022 sampai tahun 2024, akan tetapi nilai rasio lancar masih dalam positif, yang menunjukkan bahwa daerah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya. Peningkatan aset lancar yang signifikan pada periode ini lebih besar dibandingkan peningkatan kewajiban jangka pendek, yang mendukung likuiditas Pemerintah Daerah.

Rasio cepat (Quick Ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rasio ini dinilai lebih valid dari rasio lancar karena aset lancar yang nantinya akan dicairkan untuk menutup tagihan jangka pendeknya.

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{(\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan})}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$$

Tabel II-102 Rasio Cepat Kabupaten Karawang Periode 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun					Rata Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Aset Lancar	Rp 625.708,64	Rp 1.047.892,36	Rp 1.160.188,50	Rp 1.223.947,12	Rp 1.194.885,88	17,55%
Persediaan	Rp 47.238,96	Rp 187.443,63	Rp 206.310,42	Rp 46.857,20	Rp 198.397,26	43,16%
AL – Persediaan	Rp 578.469,68	Rp 860.448,73	Rp 953.878,08	Rp 1.177.089,92	Rp 996.488,62	14,46%
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
Rasio Cepat	10,04 %	14,18%	11,31%	9,95%	6,41%	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Cepat, terkait tren perkembangan Rasio Cepat kurang lebih sama dengan Rasio Lancar, akan tetapi nilai rasio cepat berada pada nilai positif, Hal ini mengindikasikan bahwa daerah masih memiliki kemampuan yang cukup untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus bergantung pada penjualan persediaan, menjaga likuiditas yang aman dari tahun ke tahun.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*).

Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas). Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

Tabel II-103 Rasio Solvabilitas Kabupaten Karawang periode 2020 - 2024

Uraian	Realisasi Tahun					Rata Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Jumlah Kewajiban	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%

Uraian	Realisasi Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata
Jumlah Aset	Rp 5.524.923,22	Rp 6.301.830,97	Rp 9.672.454,75	Rp 10.221.209,69	Rp 10.719.406,65	18,02%
Rasio Total Hutang	1,04%	0,96%	0,87%	1,16%	1,45%	1,10%
Jumlah Kewajiban	Rp 57.592,86	Rp 60.696,28	Rp 84.346,22	Rp 118.248,76	Rp 155.506,10	28,19%
Jumlah Ekuitas	Rp 5.467.330,36	Rp 6.241.134,69	Rp 9.588.108,53	Rp 10.102.960,92	Rp 10.563.900,55	17,90%
Rasio Hutang/Modal	1,05%	0,97%	0,88%	1,17%	1,47%	1,11%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Berdasarkan **Tabel II-98**, terlihat bahwa rasio total hutang Kabupaten Karawang menunjukkan tren kenaikan pada periode 2020-2024 dengan rata rata pertumbuhan 1,10 persen, meskipun terjadi penurunan pada periode tahun 2021 – 2022. Nilai rasio total hutang yang relatif rendah selama periode ini menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola total kewajibannya dibandingkan dengan total aset yang dimilikinya. Meskipun terdapat peningkatan jumlah kewajiban, hal ini diimbangi oleh peningkatan jumlah aset yang signifikan.

Rasio hutang terhadap modal juga menunjukkan tren yang mirip, yaitu meningkat dari tahun 2020 hingga 2024 dengan rata rata peningkatan 1,11%, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2024. Penurunan rasio ini mencerminkan bahwa jumlah ekuitas meningkat lebih cepat dibandingkan peningkatan kewajiban, yang menunjukkan struktur modal yang sehat dan kemampuan yang baik dalam mempertahankan solvabilitas.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi peningkatan jumlah kewajiban, hal ini diimbangi dengan peningkatan jumlah aset dan jumlah ekuitas, yang mengindikasikan bahwa kemampuan Kabupaten Karawang dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya tetap terjaga dengan baik dari tahun ke tahun.

2.3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu merujuk pada prinsip, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Ini mencakup bagaimana alokasi anggaran dilakukan, prioritas belanja ditentukan, serta pengelolaan dan pengawasan keuangan yang diterapkan di masa lalu. Kebijakan ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan sebelumnya, serta memberikan gambaran tentang arah dan strategi yang harus diperbaiki atau dipertahankan dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

2.3.3.1 Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Pendapatan Daerah adalah serangkaian langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dapat diterima, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

dan pendapatan lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan operasional dan pembangunan tanpa bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat, serta memastikan pengelolaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan anggaran daerah.

1. Kondisi Umum

- Struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dalam periode 2018-2024, proporsi dana transfer rata-rata mencapai 63,95% dari total pendapatan.
- Realisasi pendapatan terhadap target cenderung fluktuatif. Pada Semester I 2023, realisasi mencapai 47,34% , sementara pada Semester I 2025, realisasi mencapai 44,42%.
- Kontribusi PAD terhadap total pendapatan menunjukkan tren meningkat, dengan rata-rata 30,75% (2018-2024). Pada Semester I 2025, realisasi PAD (53,70%) berjalan lebih cepat daripada realisasi Pendapatan Transfer (39,19%).

2. Permasalahan Utama

- Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dan PP No. 35 Tahun 2023 berpotensi menurunkan PAD karena beberapa objek pajak dan retribusi dihilangkan atau tarifnya disesuaikan (misalnya, tarif pajak parkir turun dari 20% menjadi 10%).
- Pemerintah Pusat semakin memperketat aturan penggunaan Dana Perimbangan (dana transfer), sehingga Pemda tidak lagi leluasa menggunakannya untuk kebijakan lokal di luar yang telah ditentukan (*earmarked*).
- Upaya peningkatan PAD masih terkendala oleh Hambatan Internal, yakni terbatasnya SDM pengelola pajak dan retribusi, baik kuantitas maupun kualitas, sistem dan aplikasi perpajakan masih belum optimal, kurangnya kesadaran wajib pajak dan sanksi belum optimal, dan basis *database* pajak dan retribusi belum optimal.

3. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

- Fokus utama dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara wajar dan akuntabel melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak pada sumber yang sudah ada maupun sumber baru.
- Menyesuaikan regulasi daerah, seperti revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), untuk mematuhi aturan yang lebih tinggi seperti UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Di tahun 2025, ini merujuk pada Perda No. 17 Tahun 2023.

- Mendayagunakan aset atau barang milik daerah yang belum optimal (idle) melalui berbagai skema kerjasama seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS), atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
- Mengoptimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis teknologi informasi.
- Anggaran Pendapatan Transfer (baik dari Pusat maupun Provinsi) disesuaikan berdasarkan alokasi resmi dalam APBN atau peraturan gubernur.

2.3.3.2 Kebijakan Belanja

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Karawang harus difokuskan pada pengelolaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Mengingat bahwa Karawang adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, dengan adanya banyak sektor industri dan pertanian, kebijakan belanja daerah harus mendukung pembangunan infrastruktur, sosial, dan ekonomi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah yang dapat diterapkan dalam anggaran belanja daerah antara lain.

1. Prioritas dan Fokus Belanja

- Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024, "Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Lokal serta Ekonomi Kreatif". Fokusnya mencakup Reformasi Kesehatan, Pemulihan Ekonomi (UMKM, industri, pariwisata), dan Jaring Pengaman Sosial.
- Prioritas Pembangunan 2025, Kebijakan belanja difokuskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD 2021-2026 , program prioritas nasional (Asta Cita), dan program prioritas bupati, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus lainnya adalah pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan SPBE, dan swasembada pangan
- Sesuai arahan Pemerintah Pusat (Inpres 1/2025), dilakukan efisiensi belanja. Ini mencakup rasionalisasi perjalanan dinas (minimal 50%) , pembatasan belanja non-prioritas (seperti ATK, seminar, honorarium, dan belanja seremonial), serta menunda belanja modal yang belum kontrak.

2. Alokasi Belanja Wajib (*Mandatory Spending*):

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal untuk:

- a. Pendidikan: Paling sedikit 20% dari total belanja daerah.
- b. Kesehatan: Minimal 10% dari total belanja APBD, di luar gaji.
- c. Infrastruktur: Minimal 40% dari total DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tertentu.

3. Fokus Struktur Belanja Daerah

- Belanja Operasi: Digunakan untuk operasional pemerintahan, termasuk Belanja Pegawai (gaji, tunjangan, TPP) , serta Belanja Barang dan Jasa (termasuk untuk Jaminan Kesehatan Daerah/UHC).
- Belanja Modal: Diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
- Belanja Tidak Terduga: Dialokasikan untuk kebutuhan darurat, mendesak, atau pengembalian atas kelebihan pembayaran.
- Belanja Transfer: Mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) (minimal 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi ke desa (minimal 10% dari realisasi).

2.3.3.3 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan Daerah merupakan kebijakan yang mengatur sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai defisit anggaran, mendukung program pembangunan daerah, serta memastikan keberlanjutan keuangan daerah tanpa mengganggu kestabilan fiskal. Di Kabupaten Karawang, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kebutuhan pembangunan yang besar, kebijakan pembiayaan daerah harus difokuskan pada diversifikasi sumber pembiayaan, pengelolaan utang yang bijaksana, dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Kebijakan dan Strategi dalam pembiayaan daerah dapat diterapkan melalui kebijakan berikut.

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pengeluaran Pembiayaan:

- Sumber utama penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, yang besarnya didasarkan pada hasil audit BPK. SiLPA ini antara lain berasal dari pelampauan PAD/Transfer, penghematan belanja, atau sisa dana BLUD, BOSP, dan BOK. Pemerintah daerah tidak berencana melakukan pinjaman atau penjualan aset.
- Pada tahun 2025, dialokasikan pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal kepada BUMD, yaitu Perumdam Tirta Tarum.

2.3.4 Proporsi Penggunaan Anggaran

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen penting untuk menjamin disiplin fiskal dalam pengambilan keputusan pendapatan dan belanja daerah. Penyusunan APBD menggunakan pendekatan kinerja, di mana setiap alokasi anggaran harus terkait dengan target pelayanan publik dan dampak nyata bagi masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Penguatan kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 (berlaku sejak 2010), yang

memperluas basis pajak, menambah jenis pajak/retribusi, menaikkan tarif maksimum, dan memberikan diskresi penetapan tarif. Regulasi ini didukung oleh PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang memastikan kewenangan pemungutan pajak dan transfer keuangan berjalan efektif. Dengan demikian, APBD tidak hanya menjadi alat anggaran, tetapi juga wujud kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan melalui penguatan kapasitas fiskal lokal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karawang merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir. Kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

2.3.4.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Karawang pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibandingkan dengan realisasi belanja daerah dari tahun 2020 – 2024 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Karawang.

**Tabel II-104 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Karawang
Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)**

Uraian		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata Rata (%)
I	Belanja Operasi	92,42	88,92	87,28	88,68	92,15	89,89
	A Belanja Pegawai	92,71	91,10	88,32	82,61	90,26	89,00
	B Belanja Barang dan Jasa	91,50	85,98	84,40	93,13	91,94	89,39
	C Belanja Hibah	97,61	93,64	99,73	99,25	98,01	97,65
	D Belanja Bantuan Sosial	89,85	95,08	96,89	98,58	99,40	95,96
	E Belanja Bantuan Keuangan	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
II	Belanja Modal	97,21	94,65	89,48	87,94	91,39	92,13
	A Belanja Tanah	100,00	91,18	83,66	59,74	70,19	80,95
	B Belanja Peralatan dan Mesin	94,06	83,90	65,73	95,42	92,75	86,37
	C Belanja Bangunan dan Gedung	97,50	94,50	90,11	71,40	90,95	88,89
	D Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	99,27	98,33	97,57	98,39	92,05	97,12

Uraian			2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Rata Rata (%)
	E	Belanja Aset Tetap Lainnya	99,26	99,13	100,00	98,03	96,94	98,67
	F	Belanja Aset Lainnya					0,00	0,00
III	Belanja Tak Terduga		97,26	80,97	9,43	34,37	0,00	44,41
	A	Belanja Tak Terduga	97,26	80,97	9,43	34,37	0,00	44,41
IV	Transfer		99,97	99,89	100,00	99,98	99,64	99,90
	Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA dan Bantuan Keuangan							
	A	Bagi Hasil Pajak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	B	Bagi Hasil Retribusi	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	100,00
	C	Transfer Bantuan Keuangan	97,72	99,96	99,86	99,99	99,55	99,42
Belanja Daerah			93,91	91,38	88,90	89,61	92,57	91,27

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Selama lima tahun terakhir (2020-2024), realisasi belanja Kabupaten Karawang menunjukkan fluktuasi, dengan rata-rata 91,50% dari anggaran. Rinciannya, realisasi belanja operasi rata-rata 89,89%, belanja modal 92,13%, dan belanja transfer 99,90%, menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, belanja tak terduga memiliki realisasi terendah, yaitu 44,41%, dengan fluktuasi yang signifikan.

Secara lebih rinci, belanja operasi mengalami tren sedikit menurun pada tahun 2020 – 2023 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali dengan rata-rata 89,89%. Penurunan signifikan terjadi pada belanja pegawai di tahun 2020-2023. Belanja barang dan jasa berfluktuasi dengan rata-rata 89,39%, sementara belanja hibah konsisten tinggi dengan rata-rata 97,65%. Belanja bantuan sosial menunjukkan peningkatan signifikan dengan rata-rata 95,96%.

Pada belanja modal, rata-rata realisasi adalah 92,13%. Belanja tanah mengalami penurunan tajam di tahun 2020 – 2023 akan tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan, dengan rata-rata 80,95%. Belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan masing-masing memiliki rata-rata 86,37% dan 88,89%. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya memiliki realisasi tinggi dengan rata-rata masing-masing 97,12% dan 98,67%.

Belanja tak terduga sangat fluktuatif, terutama dengan penurunan tajam di tahun 2022 - 2024, sehingga rata-rata hanya 44,41%, pada tahun 2024 pada realisasinya tidak terdapat belanja tak terduga. Sebaliknya, belanja transfer sangat tinggi dan konsisten dengan rata-rata 99,90%, menunjukkan efisiensi dalam penyaluran transfer bagi hasil pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah, dan bantuan keuangan ke daerah lain.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi di beberapa kategori, realisasi belanja Kabupaten Karawang menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan anggaran selama periode 2020-2024.

2.3.4.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Karawang ditampilkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel II-105 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Karawang Tahun 2020-2023

Uraian	Realisasi Tahun			
	2020	2021	2022	2023
BELANJA OPERASI				
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.004.329.041.697,00	Rp 733.724.371.364,00	Rp 731.579.478.740,00	Rp 766.439.450.439,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 366.160.084.432,00	Rp 616.341.026.303,00	Rp 932.103.440.384,00	Rp 406.275.139.306,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp 19.280.900.000,00	Rp 2.283.085.000,00	Rp 2.614.547.284,00	Rp 2.693.432.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak	Rp 38.133.103.500,00	Rp 45.992.459.850,00	Rp 58.676.403.550,00	Rp 63.617.272.438,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	-	-
Belanja Honorarium PNS/Non PNS	Rp 92.421.040.000,00	Rp 243.249.252.042,00	Rp 187.049.297.498,00	Rp 630.000.000,00
Uang Lembur	Rp 168.663.000,00	-	Rp 1.998.030.000,00	Rp 2.309.878.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 839.000.000,00	Rp 5.364.400.000,00	Rp 7.942.030.800,00	-
Belanja Pegawai di BLUD	Rp 86.686.731.649,00	Rp 35.849.014.985,00	Rp 17.286.211.000,00	Rp 18.784.421.000,00
Belanja Premi Asuransi	Rp 38.933.216.649,00	Rp 70.237.631.877,00	-	Rp 177.328.802.277,00
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 53.615.266.178,00	Rp 65.235.550.366,00	Rp 76.561.437.194,00	Rp 82.371.471.175,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya/ Pakaian Kerja/	Rp 3.661.422.940,00	Rp 3.735.459.500,00	Rp 4.393.290.850,00	Rp 4.501.512.965,00

Uraian	Realisasi Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 102.188.668.729,00	Rp 73.892.801.414,00	Rp 91.986.617.702,00	Rp 97.738.478.380,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp 106.500.000,00	Rp 97.000.000,00	Rp 86.000.000,00	Rp 95.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 1.192.366.358,00	Rp 7.496.252.400,00	Rp 8.856.617.697,00	Rp 7.613.562.072,00
Belanja Kursus dan Pelatihan untuk Non PNS	Rp 707.285.000,00	-	-	-
Honor Pegawai Kegiatan BOS/ Jasa Pendidikan	Rp 67.612.558.739,00	Rp 92.310.550.000,00	Rp 89.564.100.000,00	Rp 12.456.075.222,00
TOTAL	Rp 1.876.035.848.871,00	Rp 2.035.419.094.128,00	Rp 2.107.578.046.699,00	Rp 1.642.854.995.274,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2023, 2025

Tabel II-106 Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	Rp 1.876.035.848.871,00	Rp 4.191.575.569.091,00	44,76
2	2021	Rp 2.035.419.094.128,00	Rp 4.670.671.298.818,00	43,58
3	2022	Rp 2.107.578.046.699,00	Rp 4.828.596.282.320,00	43,65
4	2023	Rp 1.642.854.995.274,00	Rp 1.642.854.995.274,00	31,57

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2023, 2025

Analisis proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur Kabupaten Karawang selama periode 2019-2023 menunjukkan variasi signifikan. Pada tahun 2019, belanja aparatur mencapai 41,49% dari total pengeluaran, dengan nilai Rp1.943.992.225.433,00 dari total Rp4.684.945.968.655,00. Proporsi ini meningkat menjadi 44,76% pada tahun 2020, meskipun nilai belanja aparatur sedikit menurun menjadi Rp1.876.035.848.871,00 dari total Rp4.191.575.569.091,00.

Pada tahun 2021, belanja aparatur naik menjadi Rp2.035.419.094.128,00, namun proporsinya turun sedikit menjadi 43,58% dari total Rp4.670.671.298.818,00. Tren ini berlanjut pada tahun 2022, dengan belanja aparatur mencapai Rp2.107.578.046.699,00, atau 43,65% dari total Rp4.828.596.282.320,00. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan signifikan dalam proporsi belanja aparatur, menjadi 31,57% dengan nilai Rp1.642.854.995.274,00 dari total Rp5.203.555.794.737,00.

Fluktuasi persentase ini mencerminkan perubahan prioritas pengeluaran dan pengelolaan anggaran di Kabupaten Karawang selama lima tahun terakhir, terutama penurunan tajam pada tahun 2023.

2.3.4.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sangat penting dalam perencanaan anggaran untuk memastikan alokasi dana yang efisien dan tepat sasaran. Pengeluaran wajib ini mencakup kewajiban hukum yang harus dipenuhi, seperti pembayaran utang atau tunjangan, sementara prioritas utama mencakup program-program yang mendesak dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat. Melalui analisis yang cermat, diharapkan tercapai keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengeluaran belanja operasi menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan total belanja operasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp 2.107.578.046.699,00 dan terendah pada tahun 2023 sebesar Rp 1.642.854.995.274,00. Pengeluaran utama seperti belanja gaji dan tunjangan, insentif pemungutan pajak, serta belanja perjalanan dinas terus menjadi bagian signifikan dalam anggaran tahunan. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah terlihat terbatas dengan penyertaan modal daerah pada tahun 2021 dan 2022. Secara keseluruhan, ini mencerminkan alokasi anggaran yang besar untuk belanja pegawai dan insentif, dengan prioritas utama yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan operasional pemerintah serta mendukung kegiatan-kegiatan yang mendesak dan penting bagi kelangsungan administrasi daerah.

Tabel II-107 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Uraian	Realisasi Tahun			
	2020	2021	2022	2023
BELANJA OPERASI				
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 1.004.329.041.697,00	Rp 733.724.371.364,00	Rp 731.579.478.740,00	Rp 766.439.450.439,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Rp 366.160.084.432,00	Rp 616.341.026.303,00	Rp 932.103.440.384,00	Rp 406.275.139.306,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	Rp 19.280.900.000,00	Rp 2.283.085.000,00	Rp 2.614.547.284,00	Rp 2.693.432.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak	Rp 38.133.103.500,00	Rp 45.992.459.850,00	Rp 58.676.403.550,00	Rp 63.617.272.438,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	-	-	-	-
Belanja Honorarium PNS/Non PNS	Rp 92.421.040.000,00	Rp 243.249.252.042,00	Rp 187.049.297.498,00	Rp 630.000.000,00
Uang Lembur	Rp 168.663.000,00	-	Rp 1.998.030.000,00	Rp 2.309.878.000,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	Rp 839.000.000,00	Rp 5.364.400.000,00	Rp 7.942.030.800,00	-

Uraian	Realisasi Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai di BLUD	Rp 86.686.731.649,00	Rp 35.849.014.985,00	Rp 17.286.211.000,00	Rp 18.784.421.000,00
Belanja Premi Asuransi	Rp 38.933.216.649,00	Rp 70.237.631.877,00	-	Rp 177.328.802.277,00
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 53.615.266.178,00	Rp 65.235.550.366,00	Rp 76.561.437.194,00	Rp 82.371.471.175,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya/ Pakaian Kerja/ Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Rp 3.661.422.940,00	Rp 3.735.459.500,00	Rp 4.393.290.850,00	Rp 4.501.512.965,00
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 102.188.668.729,00	Rp 73.892.801.414,00	Rp 91.986.617.702,00	Rp 97.738.478.380,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	Rp 106.500.000,00	Rp 97.000.000,00	Rp 86.000.000,00	Rp 95.500.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 1.192.366.358,00	Rp 7.496.252.400,00	Rp 8.856.617.697,00	Rp 7.613.562.072,00
Belanja Kursus dan Pelatihan untuk Non PNS	Rp 707.285.000,00	-	-	-
Honor Pegawai Kegiatan BOS/ Jasa Pendidikan	Rp 67.612.558.739,00	Rp 92.310.550.000,00	Rp 89.564.100.000,00	Rp 12.456.075.222,00
TOTAL BELANJA OPERASI	Rp1.876.035.848.871,00	Rp 2.035.419.094.128,00	Rp2.107.578.046.699,00	Rp 1.642.854.995.274,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH				
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 22.400.000.000,00	Rp -	Rp 21.855.518.405,00	Rp -
Pembayaran Pokok Utang	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL PENGELUARAN DAERAH	Rp 22.400.000.000,00	Rp -	Rp 21.855.518.405,00	Rp -
TOTAL	Rp 1.898.435.848.871,00	Rp 2.035.419.094.128,00	Rp 2.129.433.565.104,00	Rp 1.642.854.995.274,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2023, 2025

2.3.5 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih

antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit. Pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut disajikan defisit riil anggaran Kabupaten Karawang.

Tabel II-108 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan	Rp 4.374.266,86	Rp 4.951.680,89	Rp 4.802.598,26	Rp 5.196.315,41	Rp 5.686.622,84
Belanja	Rp 4.169.175,57	Rp 4.670.671,30	Rp 4.806.740,76	Rp 5.203.555,79	Rp 5.774.406,91
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp 22.400,00	Rp 0,00	Rp 21.855,52	Rp 0,00	Rp 0,00
Surplus/Defisit Riil	Rp 182.691,29	Rp 281.009,59	(Rp 25.998,02)	(Rp 7.240,39)	(Rp 87.784,07)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Tabel II-109 Penutup Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Karawang 2020 – 2024 (Dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi Tahun					Rata Rata
	2020	2021	2022	2023	2024	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp 345.572,26	Rp 626.581,85	Rp 600.583,83	Rp 593.343,45	Rp 505.547,70	9,98%
Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-	
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	
Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-	
Jumlah Penerimaan Daerah	Rp 345.572,26	Rp 626.581,85	Rp 600.583,83	Rp 593.343,45	Rp 505.547,70	9,98%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kab Karawang 2020 – 2024, 2025

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2.3.6 Proyeksi Keuangan Daerah

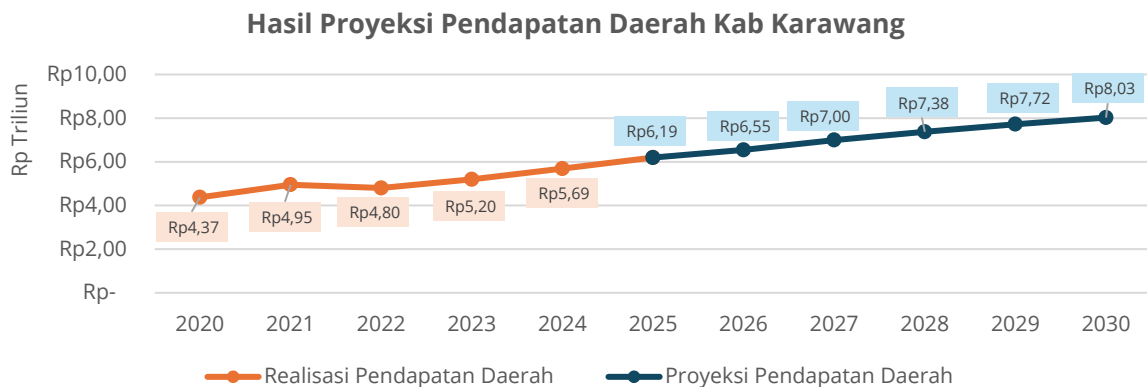
Kerangka struktur pendanaan suatu daerah adalah untuk mengukur keseluruhan kemampuan finansial daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Pendanaan Daerah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin yang bersifat wajib, kebutuhan prioritas utama, program-program pembangunan jangka menengah, serta alokasi belanja daerah lainnya. Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

2.3.6.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang tahun 2025-2030 dilakukan dengan metode trend analysis menggunakan aplikasi Minitab terhadap masing-masing pos jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang Tahun 2020 – 2024, selain itu dilakukan justifikasi pada pos pendapatan dan belanja daerah yang disesuaikan dengan perkiraan ekonomi Kabupaten Karawang.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasarkan hasil kajian proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Karawang tahun 2025 didapatkan hasil seperti pada gambar berikut.

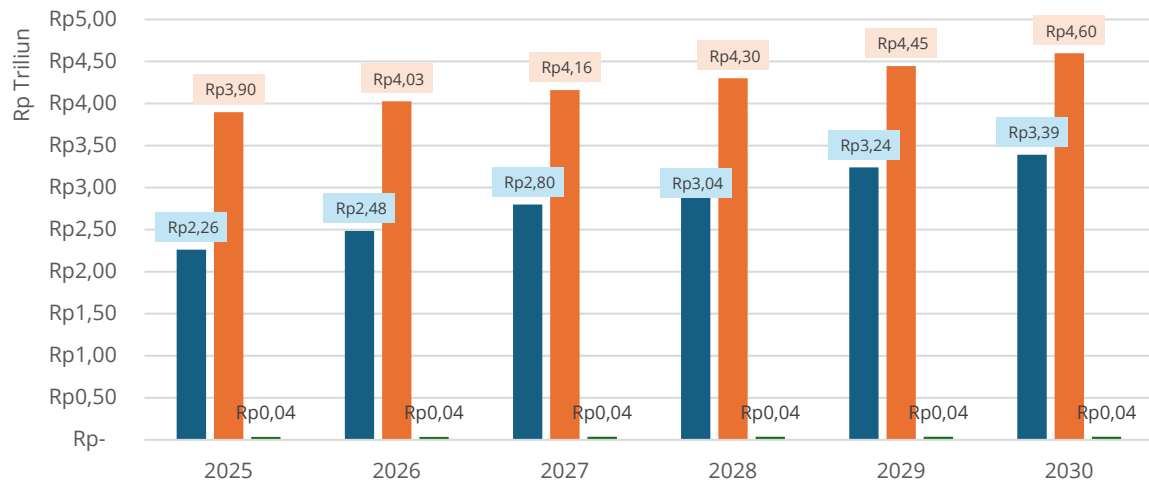


Gambar II-169 Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

Pendapatan Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan 4,20% dari Rp 5,69 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 8,03 triliun di tahun 2030. Secara umum, PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah diperkirakan naik, namun dengan rincian penurunan pada Pendapatan Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dan Dana Alokasi Umum berdasarkan tren data historis tahun 2020-2024. Proyeksi pendapatan daerah ini harus didukung oleh Kondisi Makro Sosial Ekonomi yang Stabil & Kondusif (tidak ada gejolak) di tataran lokal, nasional, atau internasional. Akselerasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak & retribusi daerah dilakukan secara ekstra di semua aspek (holistik)

dengan perubahan secara cepat dengan mengedepankan terobosan-terobosan baru/ inovasi yang diselenggarakan dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan kreatif.



**Gambar II-170 Hasil Proyeksi Komposisi Pendapatan Daerah
Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030**

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

Secara lebih rinci hasil proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang pada Periode 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II-110 Rincian Hasil Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026 - 2030

NO	URAIAN	Baseline 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4	Pendapatan Daerah	Rp5.686.622.840.656,09	Rp 6.546.964.108.772,82	Rp 6.995.363.051.519,98	Rp 7.375.629.218.632,47	Rp 7.722.645.118.284,37	Rp 8.027.040.192.799,77
4.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 1.826.280.795.928,09	Rp 2.484.332.438.620,91	Rp 2.798.711.211.194,14	Rp 3.038.992.752.986,65	Rp 3.239.801.130.407,20	Rp 3.391.495.409.224,08
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 1.430.848.976.687,00	Rp 1.928.279.650.189,35	Rp 2.114.845.563.614,03	Rp 2.327.515.659.829,31	Rp 2.570.361.793.539,97	Rp 2.848.141.963.439,47
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 330.346.023.454,09	Rp 335.417.490.478,21	Rp 348.306.938.805,31	Rp 362.293.355.215,85	Rp 376.736.678.785,16	Rp 392.675.115.510,08
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 10.980.207.535,00	Rp 111.339.304.404,90	Rp 169.333.164.586,80	Rp 176.208.770.095,02	Rp 136.346.987.319,84	Rp 35.742.544.643,97
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 54.105.588.252,00	Rp 109.295.993.548,45	Rp 166.225.544.188,00	Rp 172.974.967.846,47	Rp 156.355.670.762,23	Rp 114.935.785.630,55
4.2	Pendapatan Transfer	Rp 3.898.165.234.169,95	Rp 4.026.725.896.163,92	Rp 4.160.387.008.597,96	Rp 4.300.008.985.600,67	Rp 4.445.850.233.031,56	Rp 4.598.181.091.181,63
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Rp 2.912.064.882.201,62	Rp 3.033.825.516.560,37	Rp 3.160.964.438.422,80	Rp 3.293.725.676.946,13	Rp 3.432.364.544.916,04	Rp 3.577.148.167.340,01
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak	Rp 507.333.385.062,00	Rp 532.700.054.315,10	Rp 559.335.057.030,86	Rp 587.301.809.882,40	Rp 616.666.900.376,52	Rp 647.500.245.395,34
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	Rp 57.224.117.658,87	Rp 57.259.269.898,18	Rp 57.294.443.731,18	Rp 57.329.639.171,14	Rp 57.364.856.231,33	Rp 57.400.094.925,02
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Rp 1.524.505.132.062,55	Rp 1.596.173.877.506,35	Rp 1.671.211.853.374,80	Rp 1.749.777.451.078,06	Rp 1.832.036.508.189,23	Rp 1.918.162.658.497,11
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	RP 823.002.247.418,19	Rp 847.692.314.840,74	Rp 873.123.084.285,96	Rp 899.316.776.814,54	Rp 926.296.280.118,97	Rp 954.085.168.522,54
4.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Rp 375.669.234.000,00	Rp 344.768.993.314,90	Rp 338.954.298.499,35	Rp 333.237.671.307,21	Rp 327.617.457.780,86	Rp 322.092.031.857,48
4.2.2.1	Dana Insentif Daerah	Rp 18.969.890.000,00					

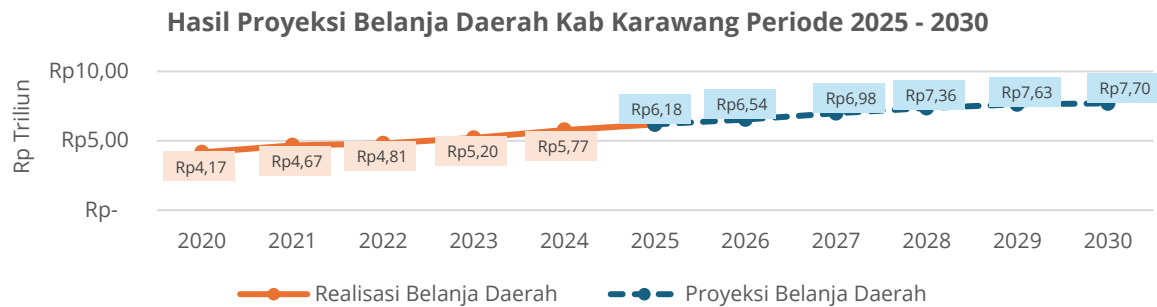


NO	URAIAN	Baseline 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
4.2.2.5	Dana Desa	Rp 356.699.344.000,00	Rp 344.768.993.314,90	Rp 338.954.298.499,35	Rp 333.237.671.307,21	Rp 327.617.457.780,86	Rp 322.092.031.857,48
4.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	Rp 585.557.152.427,58	Rp 585.557.152.427,58	Rp 597.268.295.476,13	Rp 609.213.661.385,65	Rp 621.397.934.613,37	Rp 633.825.893.305,63
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	Rp 585.557.152.427,58	Rp 585.557.152.427,58	Rp 597.268.295.476,13	Rp 609.213.661.385,65	Rp 621.397.934.613,37	Rp 633.825.893.305,63
4.2.4	Bantuan Keuangan	Rp 42.736.405.936,00	Rp 62.574.233.861,07	Rp 63.199.976.199,68	Rp 63.831.975.961,68	Rp 64.470.295.721,29	Rp 65.114.998.678,51
4.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp 83.667.865.174,00	Rp 35.905.773.988,00	Rp 36.264.831.727,88	Rp 36.627.480.045,15	Rp 36.993.754.845,61	Rp 37.363.692.394,06

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

B. Proyeksi Belanja Daerah

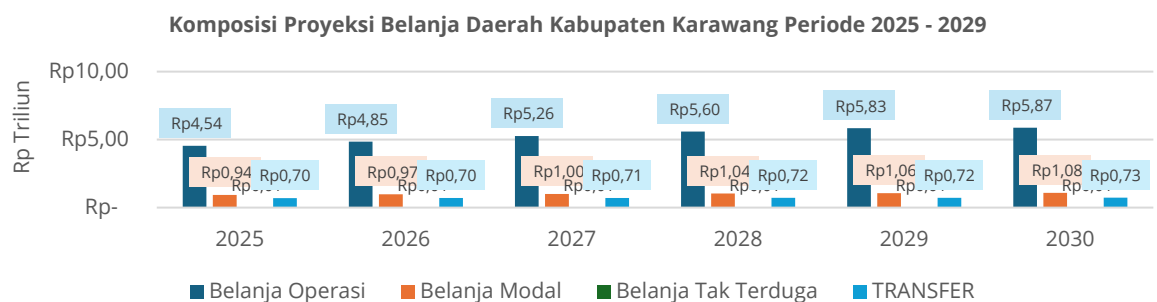
Perkiraan Belanja Daerah untuk tahun 2025 sampai 2030 dapat dilihat pada gambar di bawah. Diperkirakan bahwa Belanja Daerah akan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,48 persen. Pada awal periode, Belanja Daerah Kabupaten Karawang diproyeksikan sebesar Rp 6,18 triliun pada tahun 2025 dan akan mencapai Rp 7,70 triliun pada akhir periode.



Gambar II-171 Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

Di antara keempat bagian Belanja Daerah yang dapat dilihat pada gambar diatas Proyeksi belanja daerah 2025–2030 menunjukkan tren kenaikan dari Rp6,18 triliun pada 2025 menjadi Rp7,70 triliun pada 2030 atau tumbuh rata-rata 4–6% per tahun, dengan porsi terbesar berasal dari belanja operasi yang meningkat 4,4–7,0% per tahun dari Rp4,54 triliun menjadi Rp5,87 triliun; sementara belanja modal tumbuh lebih moderat sekitar 1,9–4,0% per tahun dari Rp936,57 miliar menjadi Rp1,08 triliun, belanja tidak terduga naik tipis sekitar 2% per tahun dari Rp7,01 miliar menjadi Rp7,74 miliar, dan transfer meningkat paling rendah hanya sekitar 1% per tahun dari Rp696,18 miliar menjadi Rp731,70 miliar, sehingga struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional dengan kenaikan investasi infrastruktur yang stabil namun relatif lebih lambat. Hal ini mencerminkan adanya pertumbuhan fiskal yang konsisten dengan prioritas utama pada belanja operasional dan dukungan pembangunan infrastruktur.



Gambar II-172 Komposisi Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2029

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

Secara lebih rinci hasil proyeksi Belanja Daerah Kab Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-111 Rincian Hasil Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2026 - 2030

NO	URAIAN	Baseline 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA	Rp 6.549.029.762.844,11	Rp 6.536.829.824.581,00	Rp 6.983.160.877.131,00	Rp 7.362.265.456.149,00	Rp 7.627.557.975.069,00	Rp 7.696.204.323.961,00
5.1	Belanja Operasi	Rp 4.908.864.970.684,21	Rp 4.851.595.454.815,28	Rp 5.264.935.069.531,75	Rp 5.596.791.041.528,97	Rp 5.834.037.805.801,56	Rp 5.873.615.410.111,64
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp 2.075.922.151.309,84	Rp 2.202.345.810.324,61	Rp 2.406.562.730.278,58	Rp 2.604.940.894.310,94	Rp 2.737.819.059.837,28	Rp 2.737.819.059.837,28
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	Rp 2.057.059.404.358,68	Rp 2.199.076.099.483,78	Rp 2.338.008.122.747,19	Rp 2.434.612.889.533,40	Rp 2.484.831.772.121,91	Rp 2.463.379.983.803,46
5.1.5	Belanja Hibah	Rp 648.229.608.444,04	Rp 299.521.714.490,77	Rp 342.571.053.517,77	Rp 347.412.998.018,77	Rp 363.760.916.662,38	Rp 380.178.165.358,45
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp 127.653.806.571,65	Rp 150.651.830.516,12	Rp 177.793.162.988,21	Rp 209.824.259.665,87	Rp 247.626.057.179,99	Rp 292.238.201.112,45
5.2	Belanja Modal	Rp 936.965.326.935,44	Rp 974.932.791.260,07	Rp 1.000.749.692.307,01	Rp 1.040.750.586.753,31	Rp 1.061.474.692.672,07	Rp 1.083.147.083.829,05
5.2.1	Belanja Modal Tanah	Rp 11.019.785.931,84	Rp 12.342.160.243,66	Rp 13.823.219.472,90	Rp 15.482.005.809,65	Rp 17.339.846.506,81	Rp 19.420.628.087,62
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 201.504.518.691,00	Rp 211.579.744.625,55	Rp 222.158.731.856,83	Rp 233.266.668.449,67	Rp 244.930.001.872,15	Rp 257.176.501.965,76
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 431.489.533.151,55	Rp 440.162.472.767,90	Rp 444.564.097.495,58	Rp 445.453.892.759,02	Rp 445.676.619.705,40	Rp 445.899.458.015,25
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 291.601.037.911,05	Rp 309.359.541.119,83	Rp 318.640.327.353,43	Rp 344.906.537.800,28	Rp 351.804.668.556,28	Rp 358.840.761.927,41

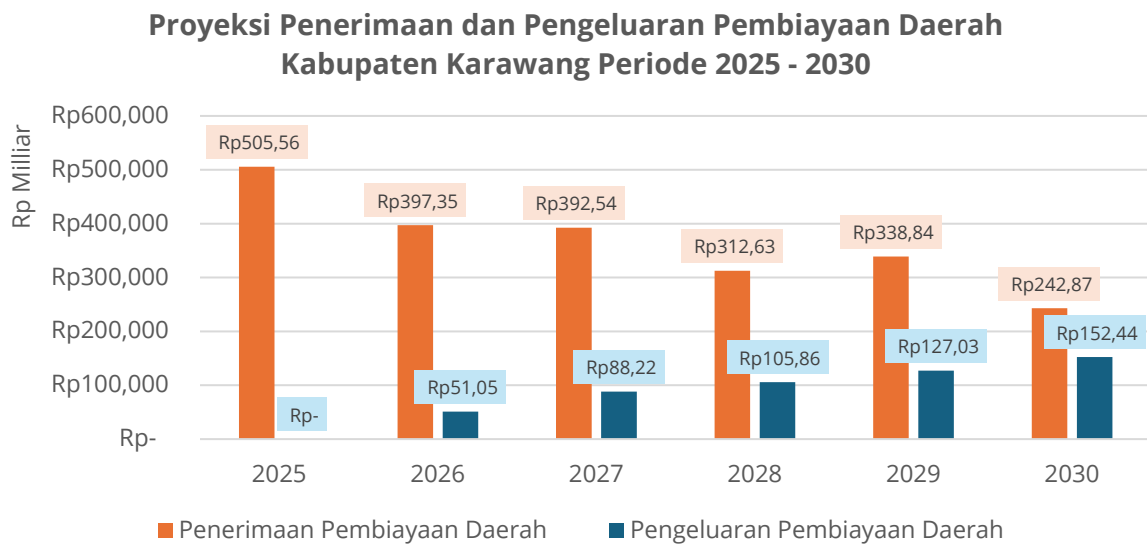


NO	URAIAN	Baseline 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 1.350.451.250,00	Rp 1.488.872.503,13	Rp 1.563.316.128,28	Rp 1.641.481.934,70	Rp 1.723.556.031,43	Rp 1.809.733.833,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5.3	Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp 7.152.100.152,63	Rp 7.295.142.155,69	Rp 7.441.044.998,80	Rp 7.589.865.898,78	Rp 7.741.663.216,75
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	Rp -	Rp 7.152.100.152,63	Rp 7.295.142.155,69	Rp 7.441.044.998,80	Rp 7.589.865.898,78	Rp 7.741.663.216,75
5.4	TRANSFER	Rp 689.294.655.772,00	Rp 703.149.478.353,02	Rp 710.180.973.136,55	Rp 717.282.782.867,91	Rp 724.455.610.696,59	Rp 731.700.166.803,56
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Rp 147.118.883.372,00	Rp 150.075.972.927,78	Rp 151.576.732.657,06	Rp 153.092.499.983,63	Rp 154.623.424.983,46	Rp 156.169.659.233,30
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	Rp 542.175.772.400,00	Rp 553.073.505.425,24	Rp 558.604.240.479,49	Rp 564.190.282.884,29	Rp 569.832.185.713,13	Rp 575.530.507.570,26

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

2.3.6.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025-2030 ditunjukkan pada **Gambar II-173**. Berdasarkan tabel tersebut, Nilai awal Penerimaan Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp 505,56 Miliar dan di akhir periode menjadi Rp 242,87 Miliar, dengan asumsi pengeluaran pembiayaan daerah meningkat dan penerimaan menurun dikarenakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) meningkat untuk digunakan dengan kegiatan yang lebih bermanfaat.



Gambar II-173 Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang Periode 2025 - 2030

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

Secara lebih rinci hasil proyeksi Belanja Daerah Kab Karawang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-112 Rincian Hasil Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 - 2029

URAIAN	Baseline	Proyeksi Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PEMBIAYAAN DAERAH							
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 593.343.446.259,91	Rp 505.559.377.578,00	Rp 518.523.534.892,28	Rp 477.606.526.812,49	Rp 401.592.068.156,13	Rp 309.095.870.985,19	Rp 277.151.062.615,27
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	Rp 593.343.446.259,91	Rp 505.559.377.578,00	Rp 518.523.534.892,28	Rp 477.606.526.812,49	Rp 401.592.068.156,13	Rp 309.095.870.985,19	RP 277.151.062.615,27
Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Kembali Dana Bergulir	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penerimaan Piutang Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp -	Rp -	Rp 51.051.292.271,61	Rp 88.216.633.045,34	Rp 105.859.959.654,41	Rp 127.031.951.585,29	Rp 152.438.341.902,35
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Penyertaan Modal Daerah	Rp -	Rp -	Rp 51.051.292.271,61	Rp 88.216.633.045,34	Rp 105.859.959.654,41	Rp 127.031.951.585,29	Rp 152.438.341.902,35
Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pemberian Pinjaman Daerah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -



URAIAN	Baseline	Proyeksi Tahun					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Pembiayaan Netto	Rp 593.343.446.259,91	Rp 505.559.377.578,00	Rp 467.472.242.620,67	Rp 389.389.893.767,15	Rp 295.732.108.501,72	Rp 182.063.919.399,90	Rp 124.712.720.712,92
SURPLUS/DEFISIT	-Rp 87.784.068.681,91	-Rp 12.964.157.314,28	-Rp 10.134.284.191,82	-Rp 12.202.174.388,98	-Rp 13.363.762.483,47	Rp 95.087.143.215,37	Rp 330.835.868.838,77
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp 505.559.377.578,00	Rp 518.523.534.892,28	Rp 477.606.526.812,49	Rp 401.592.068.156,13	Rp 309.095.870.985,19	Rp 277.151.062.615,27	Rp 455.548.589.551,68
% SILPA dari Pendapatan Daerah	8,89%	8,37%	7,30%	5,74%	4,19%	3,59%	5,68%

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

2.3.6.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Karawang disebut sebagai pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama. Pengeluaran daerah jenis ini biasanya bersifat periodik dan mencakup komponen-komponen berikut:

- Belanja Operasi: Meliputi pengeluaran rutin yang wajib seperti:
- Belanja Pegawai: Gaji dan tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
- Belanja Barang dan Jasa: Pembayaran untuk kebutuhan operasional seperti telepon, air, listrik, dan internet.
- Belanja Hibah: Bantuan keuangan seperti hibah untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan hibah kepada partai politik.
- Belanja Tidak Terduga: Alokasi dana untuk menghadapi situasi darurat atau keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran Pembiayaan: Pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat dalam hal pembiayaan, termasuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembentukan dana cadangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan periode tahun 2020 – 2024 rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Karawang meningkat sebesar 4,97 persen. Proyeksi pengeluaran pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dapat diketahui seperti tabel **Tabel II-113**. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2026 diperkirakan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp 4.708.095.724.451,79,- dan cenderung meningkat terus sampai dengan tahun 2030 menjadi sebesar Rp 5.716.150.823.801,23,-

Tabel II-113 Rincian Hasil Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

NO	Uraian	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
A	BELANJA OPERASI	Rp 4.414.077.550.234,45	Rp 4.700.943.624.299,16	Rp 5.087.141.906.543,54	Rp 5.386.966.781.863,10	Rp 5.586.411.748.621,57
1	Belanja Pegawai	Rp 2.075.922.151.309,84	Rp 2.202.345.810.324,61	Rp 2.406.562.730.278,58	Rp 2.604.940.894.310,94	Rp 2.737.819.059.837,28
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.087.737.797.460,97	Rp 2.199.076.099.483,78	Rp 2.338.008.122.747,19	Rp 2.434.612.889.533,40	Rp 2.484.831.772.121,91
3	Belanja Hibah	Rp 250.417.601.463,64	Rp 299.521.714.490,77	Rp 342.571.053.517,77	Rp 347.412.998.018,77	Rp 363.760.916.662,38
B	BELANJA TIDAK TERDUGA	Rp 7.152.100.152,63	Rp 7.295.142.155,69	Rp 7.441.044.998,80	Rp 7.589.865.898,78	Rp 7.741.663.216,75
C	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp -	Rp 51.051.292.271,61	Rp 88.216.633.045,34	Rp 105.859.959.654,41	Rp 127.031.951.585,29
1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp -	Rp 51.051.292.271,61	Rp 88.216.633.045,34	Rp 105.859.959.654,41	Rp 127.031.951.585,29
JUMLAH		Rp 4.708.095.724.451,79	Rp 5.145.488.340.970,84	Rp 5.482.624.459.907,25	Rp 5.699.861.574.174,76	Rp 5.716.150.823.801,23

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

2.3.6.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan

1. Kapasitas Riil Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten Karawang

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang berakhir pada tahun 2025, serta alokasi untuk Belanja Daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah yang sebenarnya dalam mendanai pembangunan, dengan langkah-langkah: menghitung proyeksi Pendapatan Daerah.

Menambahkan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran untuk mendapatkan proyeksi penerimaan kas riil. Selanjutnya, kurangkan proyeksi total belanja dan pengeluaran wajib, mengikat, serta prioritas utama pada gambar di bawah dari total penerimaan kas riil tersebut.



Gambar II-174 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kab Karawang Periode 2026 - 2029

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 - 2024 diolah, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi kapasitas keuangan riil daerah untuk periode 2025-2030 menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang diperkirakan akan terus meningkat secara bertahap. Hasil perhitungan kapasitas keuangan riil ini akan menjadi dasar dalam menyusun kerangka pendanaan program-program pembangunan lima tahun ke depan yang akan dituangkan dalam RPJMD.

Tabel II-114 Rincian Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029

NO	URAIAN	PROYEKSI				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan Daerah	Rp 6.546.964.108.772,82	Rp 6.995.363.051.519,98	Rp 7.375.629.218.632,47	Rp 7.722.645.118.284,37	Rp 8.027.040.192.799,77
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	Rp 477.606.526.812,49	Rp 401.592.068.156,13	Rp 309.095.870.985,19	Rp 277.151.062.615,27	Rp 455.548.589.551,68
Total Penerimaan		Rp 6.762.660.305.344,78	Rp 7.024.570.635.585,31	Rp 7.396.955.119.676,11	Rp 7.684.725.089.617,67	Rp 7.999.796.180.899,63
Dikurangi:						
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	Rp 4.708.095.724.451,79	Rp 5.145.488.340.970,84	Rp 5.482.624.459.907,25	Rp 5.699.861.574.174,76	Rp 5.716.150.823.801,23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		Rp 2.253.071.045.518,62	Rp 2.316.474.911.133,52	Rp 2.251.466.778.705,27	Rp 2.202.100.629.710,42	Rp 2.299.934.606.724,88

Sumber : LRA Kab Karawang 2020 – 2024 diolah, 2025

2.3.7 Kebutuhan Perencanaan Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

2.3.7.1 Tantangan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Karawang, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dan dihadapi. Berikut adalah tantangan utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.

- **Ketergantungan pada Transfer dari Pusat**

Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Karawang mencapai 32%, angka ini juga merupakan salah satu kelompok tertinggi dalam kemandirian keuangan dari seluruh kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal ini menandakan adanya peningkatan kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Karawang. Akan tetapi Kabupaten Karawang tidak sepenuhnya mandiri karena hampir dari setengah Pendapatan Daerah di Kabupaten Karawang merupakan dana Transfer dari Pusat ke Daerah, hal ini juga menimbulkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini membuat pendapatan daerah sangat tergantung pada kebijakan fiskal nasional dan kemampuan fiskal pusat. Kabupaten Karawang sendiri perlu melakukan diversifikasi sumber pendapatan, terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pemerintah pusat.

- **Pemungutan Pajak yang Belum Optimal**

Beberapa jenis pajak belum dimaksimalkan dalam pemungutannya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Hotel dan Restoran, masih memiliki potensi yang besar.

- **Ketidakstabilan Ekonomi dan Perubahan Kebijakan**

Perubahan kebijakan fiskal, perubahan nilai tukar, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi global dapat berdampak pada pendapatan daerah, terutama yang bergantung pada sektor komoditas dan pajak. Mengingat pendapatan daerah masih bergantung pada Transfer Pusat ke Daerah, sehingga kebijakan fiskal nasional akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah.

- **Kurangnya Pengelolaan Aset dan Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Aset seperti tanah, bangunan, atau infrastruktur publik tidak dimanfaatkan secara optimal, sehingga potensi pendapatan dari sewa atau penjualan aset tidak maksimal. Selain itu, kapasitas administrasi dan SDM di daerah sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan pendapatan. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis dapat menyebabkan inefisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

2.3.7.2 Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama di Kabupaten Karawang, strategi yang diambil harus bersifat holistik dan melibatkan beberapa pendekatan yang mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan potensi lokal hingga pengelolaan pajak yang lebih efektif. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah:

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dapat dilakukan dengan penguatan transformasi digital layanan perpajakan untuk meningkatkan pemungutan pajak
2. Diversifikasi Sumber Pendapatan Daerah
3. Pengelolaan Aset Daerah yang Efisien
4. Meningkatkan Penerimaan dari Retribusi dan Pajak Daerah
5. Pengaturan insentif dan sanksi perpajakan

2.3.7.3 Alternatif Pendanaan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karawang, dilaksanakan dengan pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang. Akan tetapi terdapat peluang untuk sumber pendanaan lainnya yang berkontribusi dalam membiayai pembangunan daerah. Beberapa sumber pendanaan non APBD Kabupaten Karawang antara lain:

a. Meningkatkan Pendanaan melalui Pinjaman dan Obligasi Daerah

Salah satu sumber alternatif pendanaan yang bisa dimanfaatkan adalah pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pinjaman daerah memungkinkan pemerintah daerah mengakses dana dari bank atau lembaga keuangan lain untuk membiayai proyek-proyek strategis. Obligasi daerah juga bisa diterbitkan untuk mendapatkan dana dalam jumlah besar dengan sistem pembayaran jangka panjang. Dengan cara ini, Karawang bisa membiayai pembangunan infrastruktur tanpa harus mengganggu anggaran tahunan. Keuntungan dari pinjaman dan obligasi ini adalah pembayaran yang lebih terjangkau dan dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

Namun, pinjaman dan obligasi harus dikelola dengan hati-hati karena utang yang berlebihan dapat berisiko menambah beban keuangan daerah. Oleh karena itu, proyek yang didanai melalui pinjaman harus menghasilkan dampak yang benar benar bermanfaat bagi masyarakat.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP)

Public Private Partnership (PPP) menawarkan peluang untuk pendanaan bersama antar pemerintah daerah dan sektor swasta. Dengan skema ini proyek-proyek besar, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, dapat didanai oleh pihak swasta dengan imbalan pengelolaan atau keuntungan jangka panjang. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan sangat dibutuhkan pada pendanaan pembangunan sehingga dapat dikombinasikan antara anggaran daerah dan pendanaan sektor swasta.

c. Hibah dari Pemerintah Pusat atau Internasional

Sumber pendanaan lainnya adalah hibah, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun lembaga internasional. Hibah ini bisa digunakan untuk mendanai program sosial atau proyek-proyek pembangunan yang memiliki dampak sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengelolaan lingkungan. Karawang bisa mengajukan proyek-proyek strategis yang sesuai dengan prioritas pemerintah pusat atau lembaga internasional untuk mendapatkan hibah tersebut.

Hibah memiliki keuntungan karena tidak perlu dikembalikan, yang membuatnya menjadi sumber pendanaan yang sangat menguntungkan untuk proyek-proyek yang tidak bisa menghasilkan pendapatan langsung. Namun, persaingan untuk mendapatkan hibah ini seringkali cukup ketat, sehingga perlu memiliki proposal yang kuat dan relevansi proyek yang jelas dengan kebijakan nasional atau internasional.

d. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)

Kabupaten Karawang, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, terutama sektor industri. Dengan hadirnya berbagai perusahaan besar di sektor otomotif, elektronik, dan tekstil, Karawang dapat memanfaatkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan ini untuk mendanai proyek pembangunan daerah. CSR, yang sering kali digunakan perusahaan untuk mendukung inisiatif sosial, dapat dimanfaatkan untuk proyek-proyek yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Dengan kemitraan yang erat antara pemerintah daerah dan sektor swasta, Karawang bisa mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung berbagai program sosial dan pembangunan. Misalnya, program pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar yang relevan dengan kebutuhan industri, program pendidikan

untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, serta pembangunan infrastruktur dasar yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perusahaan-perusahaan besar di Karawang memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui pendanaan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pasar, fasilitas olahraga, dan ruang publik lainnya juga dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi masyarakat maupun bagi perusahaan itu sendiri. Pemerintah daerah Karawang, dengan dukungan CSR dari perusahaan-perusahaan besar, dapat mengurangi beban anggaran APBD dan fokus pada pembangunan sektor-sektor strategis yang membutuhkan dana besar.

Dengan adanya potensi besar dari industri dan CSR, serta kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, Karawang dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian lokal, menciptakan ekosistem yang saling mendukung antara sektor publik dan swasta.

2.4 Permasalahan dan Isu Strategis

2.4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan isu-isu strategis dan tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Secara umum, permasalahan pembangunan daerah meliputi berbagai aspek, antara lain:

1. Aspek Geografi dan Demografi

- **Alih Fungsi Lahan**

Kabupaten Karawang memiliki potensi pertanian yang besar di mana produksi padinya sangat melimpah dengan luas panen terbesar kedua di Jawa Barat. Namun permasalahan serius yang dihadapi adalah penurunan jumlah luas lahan pertanian yang selama 2013 – 2020 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 0,4% dan total penyusutan sebesar 6.240 Ha. Jika dibiarkan, permasalahan ini akan membuat pertanian Kabupaten Karawang tidak lagi seproduktif saat ini.

- **Logistik dan Rantai Pasok**

Hasil pertanian yang besar sebagaimana yang sudah dijelaskan dan hasil perkebunan Kabupaten Karawang terbilang fluktuatif namun memiliki potensi untuk meningkatkan produksinya. Di sektor peternakan, Kabupaten Karawang

memiliki potensi besar di hasil ayam boiler berstatus surplus produksi. Hal yang sama terjadi di sektor produksi perikanan yang secara produksi terus meningkat.

Namun terkendala di bidang logistik dan tidak adanya perjanjian kerja sama penyerapan secara bisnis. Permasalahan logistik dan perjanjian kerja sama untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran barang menjadi masalah yang perlu diselesaikan sebab untuk memperoleh pasar yang lebih luas dan mengembangkan pergerakan perekonomian perlu untuk memiliki *agreement* dan memastikan barang dapat sampai di tempat tujuan tanpa kerusakan dan keterlambatan. Rantai pasok adalah sistem yang mengandalkan transportasi secara penuh, Kabupaten Karawang jelas memiliki akses transportasi yang besar sebab posisinya di pesisir dan memiliki akses jalan yang terhubung ke berbagai lokasi maka pengembangan logistik dan rantai pasok cukup dapat disesuaikan.

- **Kerawanan dan Kerentanan Bencana**

Secara geografis, Kabupaten Karawang memiliki area di kawasan pesisir pantai pada bagian utara, pertanian dan industri pada bagian barat dan timur, serta pegunungan pada bagian selatan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya potensi berbagai jenis bencana di Kabupaten Karawang. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karawang Tahun 2024-2029, bencana di Kabupaten Karawang meliputi bencana banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan kegagalan teknologi. Kerentanan Tinggi terjadi pada bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan serta bencana kegagalan teknologi. Sedangkan untuk bencana kekeringan memiliki kerentanan sedang. Penilaian kerentanan bencana dapat meliputi indeks penduduk terpapar (kerentanan sosial), indeks kerugian fisik (kerentanan fisik), indeks kerugian ekonomi (kerentanan ekonomi) dan indeks kerusakan lingkungan (kerentanan lingkungan).

Secara historis, area pesisir Kabupaten Karawang rawan terhadap musibah banjir rob seperti di Kecamatan Pakisjaya, Kecamatan Batujaya, dan kecamatan Cilamaya Kulon. Kerawanan bencana ini membawa penduduk semakin rentan terhadap kemiskinan dan kondisi prasejahtera lainnya. Di sisi lain pada area lain juga rawan terkena banjir khususnya yang dialiri DAS Citarum akibat luapan air.

- **Ketahanan Pangan**

Capaian angka prevalensi ketidakcukupan pangan atau *Prevalence of Undernourishment* menunjukkan 5,01% di tahun 2024. Meski secara kuantitatif berada di bawah angka Provinsi Jawa Barat namun hal ini justru berkebalikan dengan potensi Kabupaten Karawang yang secara produksi pangan sangat melimpah. Angka ketidakcukupan pangan ini perlu diperbaiki agar asupan pangan sesuai dengan asupan yang dibutuhkan sehingga kondisi tubuh semakin sehat dan dapat lebih produktif.

- **Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk di Kabupaten Karawang meningkat tajam di 2021 dan turun melandai di 2022 – 2024. Kondisi daerah yang padat penduduk dapat membawa hal yang buruk bagi sebuah kota karena kepadatan penduduk identik dengan daerah yang terbatas akses fasilitas hidup dasar seperti sanitasi layak, air minum dan air bersih layak, rasa aman, dan tingginya kejahatan di daerah tersebut. Perlu kontrol terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Karawang misalnya melalui program rencana pemerintah melalui pembatasan angka kelahiran (2 Anak Cukup), untuk menekan angka kelahirannya tinggi. Pemerintah juga dapat memperhatikan birokrasi terkait dengan perpindahan penduduk usia produktif dari luar Kabupaten Karawang ke Kabupaten Karawang akibat semakin berkembangnya industri setempat.

- **Angka Kelahiran**

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Karawang kurang lebih sama seperti di lingkup global dan nasional, di mana pada 2023 *Total Fertility Rate* (TFR) 2021-2023 mengalami penurunan dan pada 2023 TFR Kabupaten Karawang sebesar 2,05 di mana TFR yang seharusnya ialah 2,1. Jika dibiarkan, penurunan angka fertilitas di Kabupaten Karawang dapat mengurangi jumlah usia produktif dan meningkatkan angka rasio ketergantungan.

2. **Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

- **Kontribusi PDRB**

Penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Karawang adalah industri pengolahan sebesar 71% dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan yang secara total menduduki posisi teratas penyumbang PDRB ADHK Kabupaten Karawang di 2020-2024. Setiap sektor yang disebutkan di atas secara langsung berhubungan dan menjadi satu ekosistem yang sama dalam aktivitas industri pengolahan.

Industri pengolahan sebagai kontributor terbesar di PDRB Kabupaten Karawang bukan hal yang mengherankan sebagaimana Kabupaten Karawang adalah kota industri. Namun apabila tidak mengembangkan potensi lainnya maka akan ada permasalahan di sektor perekonomian akibat tidak terdiversifikasinya bidang-bidang lainnya dan akan meningkatkan potensi ketergantungan pada industri yang berisiko menggeser potensi lainnya padahal sektor industri pengolahan adalah sektor yang rentan terhadap dinamika global.

- **Pendidikan**

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Karawang masih di angka 7-8 artinya tidak menyelesaikan pendidikan jenjang SMP. Angka rata-rata lama

sekolah ini jika dibagi berdasarkan gender menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kerentanan pada kaum perempuan yang dapat dipengaruhi oleh kondisi kultur dan budaya setempat khususnya di wilayah perdesaan yang kesulitan mengakses pendidikan salah satunya akibat akses yang kurang.

Harapan lama sekolah Kabupaten Karawang pada 2024 adalah 12,21 tahun yakni setara pendidikan SMA namun jika diproporsi lebih lanjut maka Gap HLS perempuan dan laki-laki di Kabupaten Karawang sebanyak 0,5 tahun, sedangkan gap rata-rata Provinsi Jawa Barat adalah 0,2 tahun.

- **Pengeluaran Penduduk**

Jika dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan pada kelompok makanan, diketahui bahwa pos terbesar adalah makanan dan minuman jadi serta rokok. Struktur pengeluaran ini sejalan dengan statistik yang menunjukkan 40% rumah tangga Kabupaten Karawang mengandalkan makanan dengan kandungan gizi rendah seperti nasi putih dan makanan olahan disisi lain konsumsi terhadap sayur dan buah sedikit.

- **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Rata-rata penduduk belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun, hal ini sejalan dengan jumlah pengangguran berjumlah 100.404 jiwa yang didominasi oleh laki-laki sebesar 60.961 jiwa. Kabupaten Karawang sedang menghadapi kondisi kebutuhan akan *skilled labour*

- **Tenaga Kerja Perempuan**

Meski jumlah pengangguran didominasi oleh laki-laki namun tingkat pengangguran didominasi oleh perempuan sebesar 9,32% dan laki-laki 7,39%. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan gender di pasar kerja yang dapat disebabkan oleh banyak hal misalnya kultur dan budaya, kemampuan bersaing, kondisi pendataan, jumlah angkatan kerja di 2024 yang kurang lebih hanya setengah dari jumlah angkatan kerja laki-laki dan lain sebagainya.

- **Kondisi Gizi**

30% anak di bawah usia 5 tahun di Kabupaten Karawang mengalami stunting yang sering dipicu oleh pola makan kurang bergizi dan praktik pola asuh yang tidak optimal. Di sisi lain, angka kematian bayi meningkat namun kematian ibu justru cenderung turun. Kondisi kesehatan bayi yang lahir dengan berat di bawah 2 kilogram dan bergizi buruk juga masih ada di Kabupaten Karawang dengan jumlah yang cukup besar. Kondisi hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mengontrol kesehatan perempuan sejak remaja (remaja putri) sebab salah satu penyebab stunting adalah kondisi anemia pada saat ibu hamil remaja dan perlu

kontrol rutin terhadap kehamilan serta perlunya menggalakkan pola hidup sehat baik bagi laki-laki maupun perempuan.

- **Perlindungan Sosial**

Masih terdapat jumlah penduduk sebesar 77.618 penduduk yang tidak tercover BPJS sehingga ada kerentanan terhadap kesehatan penduduk setempat. Di sisi lain, hal ini menunjukkan jaring pengaman sosial di aspek kesehatan masih perlu diperhatikan.

3. Aspek Daya Saing Daerah

- **Jumlah Wirausaha**

Jumlah wirausaha di Kabupaten Karawang masih lebih kecil daripada buruh/karyawan/pegawai. Di sisi lain, perlu keseimbangan antara industri pengolahan dan wirausaha sehingga menambah added value bagi daerah, dan mengurangi ketergantungan terhadap investasi dan sektor formal. Kapasitas usaha dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh kapasitas usaha, baik itu teknologi maupun pembiayaan IKM dan UMKM masih terbatas.

- **Kompetensi Penduduk**

Perlu perbaikan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal agar dapat mengoperasikan TIK dan salah satu sub indikator yang diperhitungkan dalam indeks pembangunan TIK adalah rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi.

- **Pembangunan Ekonomi**

Terdapat ketimpangan akses dalam pemerataan pembangunan ekonomi. Investasi besar di sektor industri manufaktur masih belum dapat menumbuhkan dan menarik sektor IKM menjadi bagian dari kesatuan rantai pasok industri.

4. Aspek Pelayanan Umum

Secara indeks reformasi birokrasi Kabupaten Karawang sudah memiliki capaian yang cukup tinggi dengan predikat A- di tahun 2023 sehingga dibutuhkan pemantapan dan perbaikan di hal-hal yang tidak mendasar.

2.4.2 Identifikasi Isu Strategis

2.4.2.1 Isu Internasional

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa isu strategis pada tataran global yang diprediksi akan berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Pertemuan G20 Indonesia Tahun 2022

a. Kebijakan Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Perekonomian global mengalami berbagai guncangan dan tantangan. Inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan dan persisten, kondisi keuangan yang semakin ketat, perang Rusia melawan Ukraina, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, dan ketidaksesuaian penawaran-permintaan semakin memperlambat prospek ekonomi global. Meningkatnya kekhawatiran tentang harga pangan dan energi mengakibatkan tekanan biaya hidup di banyak negara, yang ikut serta menambah tekanan inflasi. Selain itu, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menimbulkan risiko penurunan terhadap prospek ekonomi global, dan kenaikan harga energi juga menghambat jalan menuju transisi hijau. Tantangan global yang berkepanjangan telah menyebabkan meningkatnya kerentanan utang dan menghambat jalan menuju pemulihan, yang selanjutnya berdampak pada kelompok rentan, terutama negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Dalam situasi ekonomi ini, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah berkumpul kembali untuk keempat kalinya tahun ini di Washington D.C., untuk mengambil tindakan nyata guna mengatasi tantangan ekonomi global.

Sejalan dengan tantangan ekonomi global saat ini, anggota G20 menegaskan kembali komitmen mereka terhadap kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung pemulihan berkelanjutan dan untuk mengurangi efek luka pandemi untuk mendukung pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Seiring dengan tantangan yang semakin meningkat, G20 menekankan pentingnya menjaga respon kebijakan fiskal yang mampu bergerak cepat dan fleksibel, serta langkah-langkah pengendalian yang bersifat sementara dan tepat sasaran untuk menghindari tekanan inflasi yang tinggi. Dalam hal ini, G20 menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebijakan makro untuk menjaga stabilitas keuangan, dan kebijakan fiskal jangka panjang yang berkelanjutan, serta melindungi risiko penurunan dan dampak negative effect spillover. G20 juga menegaskan kembali pentingnya kebijakan makroprudensial, kemajuan agenda pembangunan berkelanjutan, dan transisi berkelanjutan. Untuk mencapai stabilitas harga dan menghindari spillover, G20 juga berkomitmen untuk mengkalibrasi laju pengetatan kebijakan moneter secara tepat.

Sehubungan dengan meningkatnya risiko kerawanan pangan dan energi, G20 berkomitmen untuk mempertimbangkan semua alat yang diperlukan untuk mengatasi kerawanan pangan dan energi serta tekanan biaya hidup yang dialami di banyak negara. G20 menyoroti pentingnya kerja sama untuk memastikan respon global yang terkoordinasi untuk mengatasi kerawanan pangan. G20 akan terus mencatatkan kemajuannya melalui koordinasi strategis dengan Presidensi G20 India tahun depan.

Untuk mendukung dunia dalam menghadapi pandemi saat ini dan potensi pandemi di masa depan, G20 revitalisasi arsitektur kesehatan global untuk

meningkatkan tindakan kolektif dan terkoordinasi untuk mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon pandemi atau *Prevention, Preparedness and Response* (PPR). Pada tahun 2022, G20 mengukir sejarah melalui pengumpulan *Financial Intermediary Fund* (FIF) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia untuk memastikan kecukupan dan keberlanjutan pembiayaan untuk pencegahan dan respon pandemi di masa depan. Total komitmen FIF dari donor penggagas adalah sebesar USD 1,4 miliar, dan anggota mendorong tambahan komitmen secara sukarela. G20 juga menyambut baik keanggotaan dan perwakilan inklusif PPR FIF dari negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga donor, di mana WHO memegang peran sentral.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya, G20 terus menyoroti pentingnya memperkuat arsitektur keuangan internasional. Terkait komitmen G20 untuk meningkatkan ketahanan keuangan global jangka panjang, G20 akan terus memantau risiko peningkatan volatilitas arus modal, spillover negatif, dan kondisi pasar tidak merata dengan adanya revisi *Institutional View* (IV) IMF mengenai *Liberalization and Capital Flow Management* dan *BIS Macro-Financial Stability Framework*, yang menuntut kemajuan lebih lanjut dalam operasional *Integrated Policy Framework* dari IMF dan mempertahankan Jaring Pengaman Keuangan Global (GFSN) yang kuat. G20 terus mendukung alokasi penyaluran *Special Drawing Right* (SDR) untuk membantu golongan yang paling rentan serta meningkatkan kapasitas sumber daya *Multilateral Development Banks* melalui tinjauan kerangka kecukupan modal, dan di saat yang sama memastikan penerapan *Common Framework pada Debt Treatment* di luar DSSI.

Selama pandemi, lembaga keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan luar biasa untuk meningkatkan fungsinya sebagai intermediasi dalam mendukung perekonomian. Di saat dukungan kebijakan diperlukan untuk memitigasi dampak negatif dari pandemi, penerapan dukungan kebijakan yang terlalu lama dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Saat pemulihan pandemi sedang berlangsung, G20 menantikan laporan akhir *exit strategies* dan mitigasi *scarring effect* pada sektor keuangan, serta upaya untuk mengatasi kerentanan di Lembaga Keuangan *Non-Bank* (NBFI). Selain itu, G20 terus memperkuat sektor keuangan global melalui peningkatan pemantauan risiko dan melalui optimalisasi manfaat teknologi dan digitalisasi. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik penilaian FSB mengenai pengawasan dan regulasi "*stablecoin*" global, serta aktivitas pasar aset kripto dan menerima panduan akhir oleh BIS CPMI dan IOSCO yang menegaskan bahwa prinsip untuk infrastruktur pasar keuangan berlaku dalam pentingnya pengaturan *stablecoin* yang sistematis.

G20 juga berkomitmen untuk terus mengeksplor implikasi keuangan makro dari Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) karena hal ini dapat dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas sambil menjaga stabilitas sistem moneter dan keuangan internasional. G20 juga menyambut baik keberhasilan penyelesaian

Techsprint G20 2022, inisiatif bersama antara Presidensi G20 Indonesia dengan BIS Innovation Hub, yang telah berkontribusi pada diskusi tentang solusi praktis dan layak untuk menerapkan CBDC. G20 telah mengumumkan pemenang untuk 3 (tiga) kategori dan menghadihkan Rp 770.000.000 bagi setiap pemenang pada G20 Techsprint 2022 Award Ceremony dan Third CBDC Seminar yang diadakan secara *back-to-back* dengan acara 2022 *Annual Meetings of the International Monetary Fund* dan *World Bank Group*.

G20 terus berkomitmen untuk memajukan implemtasi Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara (CBP) untuk mencapai pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif karena hal ini akan memberikan manfaat yang luas bagi ekonomi di seluruh dunia. Dalam hal ini, G20 menyabut eksplorasi lanjutan tentang bagaimana CBDC berpotensi dirancang untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas dan di saat yang sama menjaga stabilitas dan integritas sistem moneter dan keuangan internasional. Dalam konteks ini, G20 menyambut baik diskusi lanjutan tentang sistem pembayaran yang saling terkait dan opsi akses dan interoperabilitas CBDC untuk pembayaran lintas batas. Sebagai wujud implementasi regional dari Peta Jalan G20 pada Pembayaran Lintas Batas Negara, bank sentral pada ASEAN-5 akan menandatangani Perjanjian Umum pada Konektivitas Pembayaran di antara Bank Sentral ASEAN-5 di sela-sela *KTT Leaders' Summit* pada November 2022.

Guna mendukung proses pemulihan ekonomi dunia yang kuat dan berkelanjutan, negara-negara G20 telah berdiskusi untuk pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, mudah diakses dan infrastruktur yang terjangkau. Para anggota mendukung secara sukarela dan tidak terikat *G20/Global Infrastructure (GI) Hub Framework* tentang cara terbaik dalam menjangkau partisipasi pihak swasta guna meningkatkan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, yang mana akan mempertimbangkan situasi negara, serta akan menambahkan investasi dari sumber lain, termasuk investasi publik dan keuangan yang disediakan oleh *Multilateral Development Banks* (MDBs). Selebihnya, dalam mendukung infrastruktur G20 menyokong kebijakan perangkat G20-OECD dalam memobilisasi pendanaan dan keuangan untuk investasi infrastruktur yang inklusif dan berkualitas di berbagai daerah dan kota. Untuk mendukung infrastruktur yang transformatif, G20 juga mendukung InfraTracker 2.0 dan Ringkasan Studi Kasus G20 dalam Infrastruktur Keuangan Digital: Masalah, Praktik dan Inovasi. Anggota G20 juga mendorong kualitas investasi infrastruktur dengan mendiskusikan pembangunan Indikator *Quality Infrastructure Investment* (QII). Sebagai tambahan, G20 juga mendiskusikan penataan masa depan infrastruktur global.

G20 menekankan pentingnya untuk kemajuan yang lebih lagi dalam agenda keuangan yang berkelanjutan dan mendukung transisi ekonomi hijau guna mencapai target bebas karbon. Dalam hal ini, G20 menitikberatkan peran penting dalam pencapaian agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dan target

Penjanjian Paris. Sebuah kemajuan dari peta jalan G20 untuk keuangan berkelanjutan yang dibangun di 2021, pada tahun ini Presidensi G20 Indonesia mendukung Laporan Ekonomi Berkelanjutan G20 yang mana mewujudkan 3 (tiga) agenda utama: (i) pembangunan kerangka transisi keuangan yang menyadari aktivitas transisi iklim, termasuk transisi energi, dan meningkatkan kredibilitas komitmen institusi keuangan, (ii) memperbesar keuangan berkelanjutan dengan berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan, dan (iii) mendiskusikan pengungkit kebijakan yang menginsentifkan keuangan dan investasi serta mendukung transisi.

Negara-negara G20 mendukung hasil kerja yang dibawa Presidensi dan Kerjasama Global untuk Keuangan Inklusif dalam memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan anak muda. Dalam topik keuangan berkelanjutan, negara-negara G20 berdiskusi akan implementasi dari *FSB Roadmap* yang menunjukkan resiko keuangan dari perubahan iklim yang mana menambah Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan G20, dan menyambut implementasi atas peta jalan sejauh ini. Sebagai tambahan, negara-negara G20 mendukung inisiatif dalam mempersempit perbedaan data dan mendukung program kerja atas *New Data Gap Initiatives* guna memastikan ketersediaan akan data yang penting untuk mendukung pembuatan keputusan yang berdasarkan data. G20 meminta IMF, FSB dan IAG untuk mulai bekerja serta mendata perbedaan data dan laporan di baliknya yang berjalan selama setengah tahun berjalan di 2023, dengan catatan target yang ambisius dan penyampaian yang akan membutuhkan penghitungan kapasitas nasional secara terhitung, utama, dan situasi negara yang baik guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi di tingkat internasional.

Melanjutkan komitmen untuk mendukung semua negara rentan untuk pulih bersama, pulih lebih kuat, G20 menyambut penyaluran sukarela *Special Drawing Rights (SDR)* sebesar USD 80,6 milyar dan menyambut kontribusi sukarela kepada *IMF Resilience and Sustainability Trust (RST)*. Fasilitas RST diciptakan sebagai pilihan bagi anggota untuk secara sukarela mengalokasi bagian mereka dalam *Special Drawing Rights (SDR)* yang telah dibagikan untuk mendukung negara rentan dalam mengatasi permasalahan struktural jangka panjang yang memiliki risiko ekonomi makro, termasuk yang berasal dari pandemi dan perubahan iklim. Selanjutnya, G20 sepakat untuk memperkuat *Global Financial Safety Net* dan mendorong Bank Pembangunan Multilateral (*Multilateral Development Banks/MDB*) untuk memperkuat pembiayaan pembangunan guna mendukung pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, G20 menyambut pembahasan awal dan mendorong MBD untuk melanjutkan pembahasan terkait opsi untuk menerapkan rekomendasi Kajian Independen tentang Kerangka Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Framework/CAF*) dari MDB dalam kerangka tata kelola mereka, dan menantikan laporan

perkembangan di Musim Semi 2023. Untuk mengatasi kerentanan utang, khususnya pada negara berpendapatan rendah, G20 mendorong perkembangan lebih lanjut dari implementasi *Common Framework for Debt Treatment* di luar DSSI dalam cara yang terprediksi, tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi, dan menyambut kemajuan yang tercapai, termasuk penyediaan penjaminan pembiayaan untuk Zambia serta menyambut perkembangan dari komite kreditur sejauh ini dan mendorong penyelesaian yang tepat waktu untuk penanganan utang bagi Chad dan Ethiopia.

Para anggota berkomitmen untuk mengimplementasi kesepakatan bersejarah terkait paket pajak internasional 2 (dua) pilar G20/OECD. Para anggota mendukung pekerjaan yang tengah berlangsung pada Pilar Satu dan menyambut penyelesaian dari *Global Anti-Base Erosion (GloBE) Model Rules* pada Pilar Dua, yang membuka jalan bagi implementasi yang konsisten pada level dunia sebagai pendekatan umum, dan menantikan penyelesaian Kerangka Implementasi GloBE. Para anggota menyerukan OECD/G20 *Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) untuk merampungkan Pilar Satu, dan dengan menandatangani Konvensi Multilateral pada paruh pertama 2023, dan untuk menyelesaikan negosiasi Aturan Subjek Pajak (Subject to Tax Rule/STTR) dalam Pilar dua yang akan memungkinkan pembangunan Instrumen Multilateral untuk implementasinya. Para anggota juga menegaskan tujuan G20 untuk memperkuat agenda pajak dan pembangunan sehubungan dengan G20 Ministerial Symposium on Tax and Development pada Juli 2022, dan memperhatikan G20/OECD Roadmap on Developing Countries and International Tax. Para anggota mendukung perkembangan yang dicapai dalam mengimplementasikan standar transparansi pajak yang disetujui secara internasional, termasuk upaya regional dan menyambut penandatanganan Deklarasi Bali terkait Asia Initiative.

b. Ketahanan Pangan

Presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain. Beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan, seperti *the UN Global Crisis Response Group (GCRG)*, *the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS)*, *the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP)*, International Finance Institutions *Action Plan*, dan *Global Development Initiative*. Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan 30 juta USD dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan

perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui *G20 Agricultural Market Information System*.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (policy tools) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan. Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya. Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan. Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing.

2. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), agenda ini merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDG'S terdiri dari 17 goals dan 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's. Adapun 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), meliputi :

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
- 2) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
- 10) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.

- 11) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- 12) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- 14) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
- 15) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- 16) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil bagian secara aktif untuk menerapkan TPB. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya peraturan terkait TPB yang terakhir melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. **Revolusi Industri 4.0**

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama.

Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to- machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence (AI)*, serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

4. **Gigs Economy**

Gigs economy merupakan sistem tenaga kerja bebas di mana perusahaan hanya mengontrak pekerja independen dalam jangka waktu pendek. Menurut BBC, *gigs economy* adalah pasar tenaga kerja yang identik dengan karyawan kontrak jangka pendek atau pekerja lepas (*freelancer*). Ada juga sudut pandang lain yang menyatakan *gigs economy* sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dalam hal jam kerja, tapi minim perlindungan hingga berpotensi menimbulkan eksploitasi.

5. **Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim**

Perubahan iklim masih menjadi fokus dalam pembangunan di dunia internasional, saat ini pemanasan global sudah berdampak pada berbagai aktivitas dan

menimbulkan bencana. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam penanganan permasalahan global, termasuk perubahan iklim dengan mengusung keseimbangan pilar-pilar berkelanjutan, yaitu dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komitmen ini terefleksi dalam Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (*LCDI-Low Carbon Development Indonesia*). Platform yang diperkenalkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2018 ini bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan/sosial, dan keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan pembangunan beremisi gas rumah kaca rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca telah diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca yang menargetkan emisi gas rumah kaca turun sebesar 26 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020. Kemudian, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menyinkronkan berbagai kebijakan, intervensi, dan kebutuhan intervensi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada periode 2015-2019, isu perubahan iklim hanya menjadi salah satu isu yang melandasi pengaturan pada sektor kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, serta kegiatan lainnya.

Posisi pembangunan rendah karbon dalam tatanan kebijakan pembangunan Indonesia semakin menguat pada RPJMN Tahun 2020- 2024. Dokumen tersebut menjadi dokumen perencanaan hijau pertama di Indonesia yang dikembangkan berdasarkan model dinamika sistem pembangunan rendah karbon serta pelibatan berbagai mitra pembangunan, institusi riset, serta Kementerian/Lembaga terkait. Kebijakan ini memberikan perspektif pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya diukur oleh PDB, tapi juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, serta keadilan sosial. Kemudian, setelah payung kebijakan di tingkat nasional telah tersusun, maka target selanjutnya adalah mengintegrasikan dengan tatanan kebijakan di tingkat daerah.

Komitmen untuk pembangunan rendah karbon pada beberapa tahun terakhir juga diikuti dengan pembangunan berketahanan iklim. Peningkatan ketahanan iklim di Indonesia difokuskan pada 4 (empat) sektor terdampak perubahan iklim yaitu Sektor Kelautan dan Pesisir pada potensi bahaya oleh peningkatan tinggi gelombang yang dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran dan peningkatan tinggi muka laut yang mengakibatkan penggenangan atau banjir di wilayah pesisir; Sektor Pertanian pada potensi penurunan produksi tanaman pangan padi; Sektor Air pada potensi peningkatan kejadian kekeringan dan penurunan ketersediaan air; dan Sektor Kesehatan pada peningkatan indikatif kejadian luar biasa penyakit DBD, malaria, dan pneumonia.

6. Modern Warfare (Perang Modern)

Di era disrupsi ini, peperangan tidak lagi semata melibatkan adu fisik dan senjata, melainkan perang multidimensional yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa jenis perang modern adalah:

- a. Perang siber melalui pencurian dan penipuan yang menyerang data-data digital yang bersifat rahasia milik infrastruktur vital misalnya data kependudukan, data keamanan negara, data perbankan, dan lainnya.
- b. Perang ekonomi dengan sistem embargo, sanksi ekonomi, dan permainan pasar untuk melemahkan kekuatan ekonomi lawan tanpa perlawanan fisik dan militer
- c. Perang informasi yang disebar secara digital melalui propaganda kebohongan atau hoaks, penggiringan opini, dan adu domba secara digital yang dimaksudkan untuk menciptakan opini publik yang digunakan untuk menyerang pihak-pihak tertentu atau menggoyang stabilitas negara
- d. Perang dengan peralatan digital elektronik, kimia, dan biologis misalnya dengan penggunaan drone di perang Rusia – Ukraina dan penggunaan senjata kimia oleh NAZI selama Holocaust.

Pada masa kini peperangan tidak lagi menggunakan militer karena beban cost yang lebih tinggi. Namun, perang dengan memanfaatkan IPTEK menunjukkan dampak yang lebih besar. Dampak peperangan juga dapat membuat scarcity di daerah yang tak terlibat konflik di mana kegiatan logistik akan lumpuh yang dapat menaikkan harga bahan atau memperlambat kedatangan stok.

2.4.2.2 Isu Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) adalah tahap pertama implementasi RPJPN pada rentang Tahun 2025 – 2029. Adapun visi Indonesia Emas 2045 tertuang dalam Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang sasaran utama visi tersebut tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029 meliputi:

1. Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju

Sasaran utama pada visi pendapatan per kapita setara negara maju ditargetkan pada tahun 2045 meliputi:

- a. GNI per Capita (USD) senilai 30.300
- b. Kontribusi PDB maritim sebesar 15%
- c. Kontribusi PDB manufaktur sebesar 28%

2. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Sasaran utama pada visi kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang ditargetkan pada 2045 meliputi:

- a. Tingkat kemiskinan sebesar 0,5% - 0,8%
- b. Rasio gini sebesar 0,290 – 0,320
- c. Kontribusi PDRB KTI sebesar 28%

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

Sasaran utama pada visi kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditargetkan pada 2045 meliputi:

- a. Global Power Indeks 2023 ditargetkan menduduki peringkat 15 besar

4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

Sasaran utama pada visi daya saing sumber daya manusia meningkat yang ditargetkan pada 2045 meliputi:

- a. Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,73%

5. Penurunan Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

Sasaran utama pada visi penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission* yang ditargetkan pada 2045 meliputi:

- a. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 93,5%
- b. Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 83

Indonesia memiliki potensi pengembangan berupa:

- a. Resiliensi dan prospek perokomian yang positif melalui pengelolaan fiskal yang baik, kinerja sektor eksternal yang kuat, dan permintaan konsumen yang stabil.
- b. Kenaekaragaman hayati dan potensi lingkungan yang berpotensi secara ekonomi serta berpotensi dalam pemenuhan jasa lingkungan, penghidupan masyarakat, dan potensi penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
- c. Potensi sumber daya manusai dan modal sosial melauli jumlah (kuantitas) sebesar 281 juta jiwa penduduk yang mendatangkan bonus demografi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan dukungan pendidikan dan keterampilan.
- d. Pengembangan teknologi tang dapat mendorong kemajuan berabagi sektor melalui otomatisasi (revolusi 4.0), industri 5.0, pemanfaatan AI dalam memprediksi dan mengelola risiko teknologi dan memprediksi potensi bencana alam dengan memberikan mitigasi risiko yang baik
- e. Sumber-sumber pertumbuhan inovatif pada sektor produktif berupa peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi dan hilirisasi industri berbasis SDA, penerapan ekonomi biru dan hijau, pengembangan pariwisata dan ekraf, pengembangan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, dan pengembangan ekonomi digital.

Pada tahun 2023 terjadi penguatan perekonomian yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% (y-y), peningkatan industri non migas sebesar 4,69%, GNI per kapita meningkat menjadi US\$4.870 yang menggolongkan Indonesia menjadi upper-middle income countries, inflasi terkendali, rata-rata nilai tukar petani dan nelayan untuk smeua subsektor di atas 100 menunjukkan keduanya mendapat keuntungan, jumlah penduduk miskin menurun selama 10 tahun terakhir, Tingkat

pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 5,32% di 2023. Penguatan perekonomian yang terjadi dapat menjadi tidak bermakna ketika tantangan-tantangan pertumbuhan tidak teratasi. Tantangan pertumbuhan di Indonesia meliputi:

a. Rendahnya produktivitas di tengah persaingan global

Besar rata-rata produktivitas Indonesia selama 2015 – 2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 poin dari periode 2010 – 2015 (0,9% ke 0,3%) yang dikarenakan kualitas SDM tertinggal khususnya pada produktivitas perempuan yang dipengaruhi oleh budaya dan peran domestik yang diemban, jam kerja tidak fleksibel, dan minim akses *daycare* berkualitas dan terjangkau. Secara general terjadi produktivitas ekonomi yang masih rendah, kapasitas IPTEK dan inovasi yang tertinggal, serta adanya kelemahan pada kelembagaan dalam hal insentif, regulasi, dan kepastian hukum. Rendahnya produktivitas menyebabkan perlambatan pada laju pertumbuhan ekonomi.

b. Rendahnya kualitas SDM

Produktivitas SDM Indonesia relatif rendah, tergolong \$28.600 per pekerja, hal ini turut diperparah dengan tingkat kemampuan membaca, matematika, dan sains dalam penilaian PISA yang menurun pada 2022 dan tertinggal dibanding negara OECD. Selain itu juga adanya tantangan pada rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja.

c. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Terjadi penambahan kelompok masyarakat calon kelas menengah dan rentan miskin akibat penurunan kelas kelompok kelas menengah yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja yang berimplikasi pada penurunan daya beli.

d. Kebutuhan Hidup Tinggi Pada Usia Produktif

Kelompok usia produktif yang besar di sisi lain terdapat keterbatasan sumber daya alam dan lahan.

e. Krisis Lingkungan

Krisis lingkungan yang mengancam bumi adalah Triple Planetary Crisis yakni perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan yang mengancam bumi dan seisinya dan menimbulkan kerugian ekonomi, kematian-kematian flora dan fauna, menimbulkan gangguan kesehatan.

f. Geopolitik dan Geoekonomi

Terdapat risiko geopolitik yang perlu diantisipasi berupa eskalasi persaingan antar negara adidaya yang dapat meluas dan memunculkan kekuatan baru. Persaingan geopolitik di Indo-Pasifik yang secara posisi dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

g. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Perlunya pemberantasan korupsi dan keidealan tata kelola data meliputi keamanan data privasi dan siber.

Tahapan transformasi dalam RPJPN berdasarkan misi (agenda pembangunan) ialah:

Tabel II-115 Tahapan Transformasi Berdasarkan Misi (Agenda Pembangunan)

No.	MISI (AGENDA PEMBANGUNAN)	TAHAPAN TRANSFORMASI 2025 - 2029 (Penguatan Fondasi Transformasi)
1	2	3
TRANSFORMASI INDONESIA		
1.	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
2.	Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
		Kisaran Pertumbuhan : 5,6 - 6,1 persen
		Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB : 21,9%
		<i>Middle Class Income :</i> 38% Populasi
3.	Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
LANDASAN TRANSFORMASI		
4.	Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memperkuat Supremasi Hukum dan Stabilitas, serta membangun Kekuatan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan dan Ketangguhan Diplomasi sebagai landasan transformasi dan pembangunan
5.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI		
6.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smart grid).
7.	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.
8.	Pesinambungan Pembangunan	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Pembangunan Berkelanjutan dan Tujuan penurunan emisi GRK.

Sumber: RPJPN 2025 - 2045

2.4.2.3 Isu Provinsi Jawa Barat

Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional meliputi:

- Perlu pengoptimalan pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan jasa,
- Indikasi proyek strategis nasional berupa pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia, revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura, pembangunan *Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa, Bioethanol (berbasis tebu), program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut, hilirisasi nikel, timah, bauksit, tembaga, pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan Jakarta Metropolitan *Mass Rapid Transit* (MRT) Koridor Timur – Barat, jalan tol akses Pelabuhan Patimban.

Pulau Jawa diarahkan untuk menjadi “Megapolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”. Isu wilayah Jawa di antaranya:

- Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam pelayanan kota dan daerah sekitarnya
- Rendahnya penggunaan teknologi tinggi dalam industri membuat nilai tambah industri masih rendah
- Belum terintegrasinya infrastruktur logistik antarkawasan dan kesenjangan ketersediaan dan kesenjangan penyediaan infrastruktur fisik dan sosial
- Tingginya kerentanan bencana gempa bumi, tsunami pesisir selatan Jawa, tanah longsor, dan letusan gunung berapi, banjir rob, dan penurunan muka tanah di daerah pesisir utara Jawa.
- Kesenjangan keterampilan dan kelemahan pada mismatching pendidikan – industri
- Prevalensi *stunting*, *wasting*, dan *underweight* relatif tinggi
- Beban penyakit TBC di wilayah padat penduduk
- Tingkat kemiskinan rata-rata Jawa sebesar 8,11% dan belum terpadunya program pengurangan kemiskinan dengan potensi sektor ekonomi unggul dan inovasi pemberdayaan ekonomi di daerah kantong-kantong kemiskinan

Sasaran pembangunan wilayah Jawa di bidang ekonomi dan sumber daya manusia dengan target Jawa Barat sebagai berikut.

Tabel II-116 Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa

Provinsi		DKI Jakarta	Jawa Barat	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
Rata-rata LPE (%)	2025	6,8	6,9	7	6,7	6,9	6,8
	2029	7,9	7,9	8	7,7	8	7,9
PDRB per kapita (Rp. Juta)	2025	373,4	59,6	55,1	51,1	80,7	74,6
	2029	560,8	84,9	78,6	71,8	114,8	106,4

Provinsi		DKI Jakarta	Jawa Barat	DI Yogyakarta	Jawa Tengah	Jawa Timur	Banten
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2025	16,7	12,7	0,9	8,2	14,2	3,9
	2029	16,5	12,3	0,8	7,9	13,7	3,8
Tingkat Kemiskinan (%)	2025	3,55-3,85	5,85-4,46	10,00 - 10,5	9,00 - 9,66	7,58-8,08	4,50 - 5,50
	2029	2,08-3,08	2,86-3,86	6,11 - 7,11	5,21-6,21	4,31-5,31	2,42 - 3,42
Rasio Gini	2025	0,425-0,430	0,383-0,39	0,443-0,447	0,362-0,367	0,381-,3386	0,344 - 0,365
	2029	0,417-0,421	0,381-0,383	0,436-0,440	0,355-0,360	0,369-0,373	0,326 - 0,330
Indeks Modal Manusia	2025	0,65	0,57	0,75	0,62	0,64	0,56
	2029	0,69	0,6	0,79	0,65	0,68	0,59
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2025	14,65	6,61	62,14	0,32	1	43,56
	2029	22,01	8,95	74,36	27,57	2,52	56,65
IKLH Daerah	2025	51,34	64,06	70,49	75,68	74,17	66,92
	2029	51,98	65,07	71,33	75,87	74,5	67,93
TPT (%)	2025	5,54 - 6,40	6,42-6,99	3,12 - 3,51	4,42-4,81	3,90 - 4,49	6,87-7,24
	2029	4,93-5,99	5,94 - 6,65	2,83-3,27	3,73-4,49	3,26 - 4,21	6,39-6,82

Sumber : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam Ringkasan Eksekutif Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2025 – 2045 disebutkan sejumlah isu di antaranya:

- Memiliki populasi terbanyak di Indonesia dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sedikit di atas nasional
- Kerawanan bencana alam
- Angka kemiskinan absolut tinggi di perdesaan dan daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi barang dan jasa. Di sisi lain tingkat pengangguran tinggi dan ada kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar kelompok masyarakat
- Rendahnya kualitas lingkungan hidup, minim RTH, pengelolaan ekosistem pesisir dan wilayah perikanan tangkap di batas wilayah laut 12 mil belum optimal
- Belum optimalnya pengembangan ekowisata terintegrasi dan tingginya ketergantungan energi fosil
- Pelayanan sosial belum inklusif, belum optimalnya pemajuan kebudayaan dan nilai agama, ketimpangan isu gender dan perlindungan anak serta petrempuan, dan belum optimalnya peran pemuda
- Kualitas SDM minim dan kualitas kompetensi tenaga kerja rendah
- infrastruktur belum merata dan infrastruktur dasar perumahan belum menjangkau semua masyarakat termasuk akses listrik.
- Produktivitas dan kualitas sektor ekonomi potensial belum berbanding lurus dengan potensinya
- Disparitas kualitas SDM pada bidang pendidikan, kelemahan link and match antara kualitas pencari kerja dengan pemberi kerja
- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global

2.4.2.4 Hasil Telaah KLHS Kabupaten Karawang

Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Karawang 2025 – 2029 didapatkan capaian indikator TPB yang berhasil mencapai target (SS) adalah 97 indikator TPB (48,02%) dari indikator-indikator yang dilaksanakan, indikator yang belum mencapai target (SB) adalah 68 indikator (33,66 %) dari yang dilaksanakan, dan 37 indikator TPB (18,32%) belum diketahui datanya. Tabel capaian indikator TPB Kabupaten Karawang menggunakan data-data yang memiliki capaian pada tahun 2023 untuk memastikan keterbaruan data.

Tabel II-117 Capaian Indikator TPB Kabupaten Karawang

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
TPB 1	Tanpa Kemiskinan			
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Pada 2023, capaian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 7,87%, sedangkan target penurunan nasional adalah 7-8%	Menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Karawang.	SB
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat sebesar 21,35% dan target nasional 17,12%	Mengakhiri kemiskinan pada penyandang disabilitas	SB
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/program keluarga harapan	Jumlah RT yang mendapatkan bantuan tunai sebesar 72.981 di mana target nasional sebesar 2,8 juta	Banyaknya RT terbantu	SS
1.4.1 (a)	Persentase perempuan pernah kawin 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Jumlah perempuan melahirkan di faskes sebesar 91,73% lebih besar dari target nasional 85%	Banyaknya perempuan melahirkan di faskes	SS
1.4.1 (b)	Persentase anak umur 12 - 23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Jumlah anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap 89,38% dan target nasional 90%	Anak mendapat imunisasi dasar lengkap	SB
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Jumlah yang tercapai 1,69% dan target nasional 100 %	Akses terhadap sumber air minum layak untuk menghindari penyakit	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Jumlah yang tercapai 0,82% dan target nasional 100%	Akses terhadap sanitasi layak untuk terhindar dari penyakit	SB
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Jumlahnya sebesar 28,43 HA dan target nasional 18,6	Menurunnya jumlah lahan yang dihuni rumah tangga kumuh	SS
1.4.1.(g)	Angka partisipasi murni SD/MI sederajat	Jumlah APM SD/MI sederajat sebesar 98,05% dan target nasional 94,78%	Meningkatnya jumlah partisipasi anak sekolah setingkat SD	SS
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat	Ketercapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat mencapai 82,2%, di mana pada tahun 2023 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Sederajat sebesar 88,18	Peningkatan partisipasi masyarakat untuk pendidikan di Kabupaten Karawang.	SS
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Jumlah penduduk memiliki akta sebesar 95,17% dan target nasional sebesar 98%	Penduduk yang taat administratif dan memiliki identitas berupa akta	SB
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	151.606 jiwa pada 2023 dan target nasional adalah menurun namun pada Kab. Karawang mengalami kenaikan di mana pada 2022 sebesar 28.594	Meminimalkan jumlah korban jiwa dari bencana	SB
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus (SMAB=Sekolah/Madrasah aman bencana)	Ada 100 orang yang mendapat layanan dan target nasional meningkat ke 450 orang	Peningkatan akses pendidikan di daerah tertimpa bencana	SS
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	Anggaran bidang sosial 28.294.451 di 2023 dan target nasional meningkat		SS
TPB 2		Tanpa Kelaparan		
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Pada 2023 sebesar 1,54% sedangkan target nasional 19	Ketercukupan pangan penduduk	SB
2.2.2.(c)	Kualitas Konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh	Ketercapaian skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya kualitas konsumsi	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(PPH) belum mencapai 92,5%, di mana pada tahun 2023 skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih sebesar 31.02%.	pangan di Kabupaten Karawang.	
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera			
3.1.2*	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Capaian di 2023 sebesar 91,73% dan target nasional 95%	Pemberian fasilitas kesehatan melahirkan untuk kontrol terhadap kesehatan ibu dan bayi	SB
3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Pada 2023 terdapat 203 bayi AKB dari 1000 kelahiran dan target nasional sebesar 14	Kontrol terhadap penurunan angka kematian bayi	SB
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga yang berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Capaian 2023 sebesar 68,65% dan target nasional 65%	Penurunan jumlah kelahiran dan penggunaan jenis kontrasepsi	SS
3.7.1(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur usia 15-49 tahun berstatus kawin	Capaian 2023 sebesar 68,65% dan target nasional 23,5%	Penurunan jumlah kelahiran baru dan pemanfaatan metode kontrasepsi untuk KB	SS
3.8.1(a)	<i>Unmet Need</i> Pelayanan Kesehatan	Ketercapaian <i>unmet need</i> pelayanan Kesehatan menurun 9,91%, di mana pada tahun 2022 <i>unmet need</i> pelayanan Kesehatan sebesar 14,05%.	Peningkatan dan penguatan program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Karawang.	
3.8.2(a)	Cakupan jaminan kesehatan nasional	Pada 2023 capaian sebesar 96,61% dan target nasional sebesar 98	Memastikan penduduk mendapat jaminan kesehatan	SB
TPB 4	Menjamin pendidikan berkualitas untuk semua			
4.2.2(a)	Angka partisipasi kasar (APK) PAUD	Capaian 2023 sebesar 65,98% dan capaian nasional sebesar 77,2%	Memberikan layanan pendidikan untuk anak usia dini	SB
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB	Capaian pada 2023 sebesar 42,88 dan	Pemastian tenaga pendidik terlatih	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
	yang bersertifikat pendidik	menurun dari 2022 di mana pada 2022 72% dan target nasional adalah meningkat		
TPB 5	Kesetaraan gender di keberlangsungan hidup masyarakat			
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Capaian pada 2023 4 poin sedangkan target nasional sebesar 16	Mengarusutamakan gender dalam dampak dari penyusunan kebijakan	SB
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Capaian pada 2023 sebesar 48 sedangkan pada 2022 sebesar 38 di mana terjadi kenaikan dan target nasional adalah menurun	Penurunan angka korban perempuan dalam tindak kekerasan	SB
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Pada 2023 capaian sebesar 5,39 di mana target nasional 20,48	Penurunan angka kekerasan pada perempuan	SS
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Capaian pada 2023 sebesar 18,06 sedangkan pada 2022 adalah 16,38 artinya terjadi kenaikan sedangkan target nasional adalah menurun	Penurunan angka kekerasan seksual pada perempuan anak dan dewasa oleh selain pasangan	SB
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Capaian pada 2023 adalah 100 dan target nasional 2,7	Pemberian layanan komprehensif pada perempuan korban tindak kekerasan seksual	SS
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin pada 25 – 49 tahun	Capaian pada 2023 sebesar 20,79 dan target nasional sebesar 21	Angka perceraian	SB
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Capaian pada 2023 sebesar 28% dan capaian nasional untuk pemda adalah 17%	Kesempatan kerja pada gender perempuan	SS
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Capaian pada 2023 sebesar 4 target nasional adalah Eselon I: 20,66%, dan Eselon II = 16,39%	Kesempatan kerja pada gender perempuan	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
TPB 6	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua			
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Ketercapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak dan berkelanjutan pada belum mencapai target 100%, di mana capaian pada tahun 2023 sebesar 1,69 %	Terpenuhinya pemerataan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Karawang	SB
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Pada 2023 capaian sebesar 1,69 dari target nasional sebesar 100	Terpenuhinya pemerataan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Karawang	SB
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Ketercapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak pada belum mencapai target 100%, dimana capaian pada tahun 2023 sebesar 0,82%	Terpenuhinya akses sanitasi yang layak bagi masyarakat Kabupaten Karawang	SB
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	Pada 2023 capaian sebesar 0,82 di mana menurun dari 2022 yang mencapai 76,34 dan target nasional adalah meningkat	Terpenuhinya akses pengolahan limbah terpusat	SB
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Pada 2023 capaian sebesar 0,82% di mana belum ada di 2022 dan target nasional adalah meningkat	Tersedianya pengelolaan limbah lumpur tinja	SS
6.3.2(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	Pada 2023 sebesar 51,23 dan pada tahun 2022 sebesar 35,9 terjadi peningkatan dan target nasional adalah meningkat	Terjaganya kualitas air sungai	SS
TPB 8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan	Capaian di 2023 sebesar 35,2 dan 2022 sebesar 8,97 di	Ada peluang untuk mengembangkan kegiatan sektor	SS

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
	jenis kelamin.	mana terjadi peningkatan. Target nasional adalah meningkat	Informal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Capaian di 2023 sebesar 43% dan target nasional 51%	Tersedia lapangan kerja pada berbagai sektor sehingga dapat merekrut tenaga kerja	SB
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Capaian di 2023 sebesar 16,05% dan target nasional 51%	Tersedia lapangan kerja pada berbagai sektor sehingga dapat merekrut tenaga kerja	SB
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	Pada 2023 capaian sebesar 5.176.179/bulan di mana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Target nasional adalah meningkat	Terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja	SS
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	Capaian pada 2023 8,95% terjadi penurunan dari tahun sebelumnya yang menduduki 10,95%. Target nasional adalah menurun	Tersedianya lapangan kerja yang layak bagi masyarakat	SS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Capaian 2023 sebesar 1,27 dan target nasional menjadi 8%	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	SB
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Capaian pada 2023 sebesar 57.355 jiwa dan target nasional sebesar 20 juta untuk skala nasional	Capaian wisatawan	SB
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	2.003.317 jiwa di 2023 dan mengalami peningkatan dari 2022 dan target nasional adalah meningkat	Kontribusi wisatawan domestik ke kunjungan wisata	SS
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Pada 2023 capaian sebesar 180.673.516.484 yang meningkat dari 2022 dan target nasional adalah meningkat	Kontribusi devisa sektor pariwisata	SS
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Capaian 2023 sebesar 77 pekerja menunjukkan peningkatan dari	Penciptaan lapangan kerja dari sektor pariwisata	SS

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
		2022 sebesar 58. Target nasional adalah meningkat		
TPB 9	TPB industri, inovasi, dan manufaktur			
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Capaian di 2023 panjang jalan tol 3,7 km	Kemudahan aksesibilitas kota	Potensi tidak dilaksanakan
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Capaian di 2023 panjang rel kereta api 110,02 km	Ketercapaian dengan angkutan kereta api	Potensi tidak dilaksanakan
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Capaian di 2023 sebesar 71,56% di mana tahun 2022 mencapai 71,38 sehingga terdapat kenaikan dan target nasional adalah meningkat	Dampak perekonomian yang positif dari industri terhadap kota	SS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Capaian tahun 2023 sebesar 5,35% dan target nasional adalah lebih tinggi dari pertumbuhan nilai PDB	Besar kontribusi industri manufaktur	SS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Capaian pada 2022 sebesar 348.050 jiwa yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 298.470 jiwa. Target nasional adalah meningkat	Memastikan serapan tenaga kerja lokal ke dalam industri	SS
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Capaian pada tahun 2023 sebesar 1.635.000.000 merupakan angka yang diperoleh data 2019.	Pinjaman yang digunakan untuk operasional industri kecil	SB
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan			
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Capaian penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional pada 2023 sebesar 7,87% di mana target nasional sebesar 7-8%.	Pengurangan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	SB
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Capaian sebesar 5,3, dan target nasional kini meningkat	Kebebasan sipil dalam bernegara	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
		menjadi 87		
TPB 11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
11.1.2.1(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Pada tahun 2023 capaian sebesar 53,36% di mana target nasional sebesar 32%	Penyerapan penumpang angkutan umum	SS
11.1.2.1(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Target nasional adalah "ada", dan di kabupaten karawang "ada"	Penggunaan angkutan rel untuk moda transportasi umum	SS
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Capaian pada 2023 sebesar 151.600 jiwa, mengalami kenaikan dari 2022 korban jiwa sebesar 28.594 jiwa dan target nasional adalah menurun.	Performa penyelamatan terhadap korban bencana alam	SB
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Capaian pada 2023 sebesar 152,32 dan target nasional adalah 118,6 (menurun) dan terjadi penurunan di mana tahun 2022 sebesar 157,81	Upaya pemda dalam mengelola potensi bencana di daerahnya	SS
1.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kondisi capaian tahun 2023 sebesar 64,36% belum memenuhi target sampah perkotaan tertangani, yakni 80%.	Terciptanya Kabupaten Karawang yang bersih dan bebas sampah	SB
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Target nasional adalah "ada" sedangkan di Kab. Karawang ada rencana kontijensi bencana perda kab. Karawang 31/2016	Pengupayaan strategi pengurangan risiko bencana	SS
TPB 12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab			
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Sejak 2021 - 2023 capaian sebesar 100%, namun target nasional meningkat menjadi 150 juta ton	Pengelolaan limbah B3 yang bertanggungjawab	SS
TPB 13	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab			
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena	Jumlah korban pada 2021 - 2023 fluktuatif	Performa penyelamatan	SB

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
	dampak bencana per 100.000 orang.	namun pada 2023 (151.606) mengalami peningkatan dari 2022 (28.594)	terhadap korban bencana alam	
TPB 15	Ekosistem daratan			
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data <i>time series</i> , pada tahun 2023 tercapai 2 dokumen dan target nasional adalah "meningkat"	Upaya pemanfaatan keanekaragaman hayati	
TPB 16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh			
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Pada data 2021-2023 fluktuatif namun pada 2023 mengalami penurunan di mana data 2023 sebesar 1,57 dan 2022 1,753. Capaian nasional adalah "menurun"	Besar penduduk secara persen yang mengalami kekerasan	SS
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.	Tahun 2021 - 2023 menunjukkan data yang fluktuatif namun pada 2023 mengalami kenaikan di mana data 2023 sebesar 81 dan 2022 sebesar 62 sedangkan target nasional adalah "menurun"	Besar anak laki-laki dan perempuan secara persen yang mengalami kekerasan	SB
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP sejak 2019 - 2023	Laporan keuangan yang wajar secara akuntansi	SS
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Mengalami kenaikan sejak 2018 - 2023 memenuhi target nasional "meningkat"	Kinerja pemerintah yang akuntabel	SS
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Pada 2023 mencapai sebesar 72,70 dan target nasional untuk kabupaten/kota sebesar 45%	Penggunaan e-procurement untuk pengadaan	SS
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi	Mengalami peningkatan sejak 2021 - 2023 dengan	Perbaikan IRB	SS

Target TPB		Gap/ Masalah	Outcome	Capaian Target Nasional 2023
	Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	target nasional untuk kab/kota sebesar 45%		
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sejak 2021 - 2023 jumlahnya stagnan 28% dengan target nasional "meningkat"	Keterlibatan perempuan dalam politik	SB
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Sejak 2021 - 2023 jumlahnya stagnan 3% dengan target nasional "meningkat"	Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	SB
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan			
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Data 2018 - 2023 mengalami penurunan (0,03% sejak 2018 - 2021 dan 0,02 sejak 2022 - 2023) target nasional "meningkat"	Pendapatan pemerintah dalam proporsi PDRB	SB
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Sejak 2017 berada di bawah 12% sebagaimana target nasional	Besar pembayaran pajak terhadap PDB	SB

Sumber : Dokumen Induk Laporan KLHS RPJM Karawang 2025 - 2029

2.4.3 Rumusan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis dirinci dari berbagai sumber dengan memasukkannya ke dalam kertas kerja berikut.

Tabel II-118 Kertas Kerja Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Karawang

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis		
			Global	Nasional	Regional
• Kegiatan perindustrian dan pendidikan tinggi • Simpul pendukung sektor pertanian, industri non polutif dan non ekstraktif pengembangan PKN di sektor • Jumlah penduduk meningkat setiap tahun • Jumlah penduduk meningkat setiap tahun • Struktur usia didominasi penduduk produktif rentang kelahiran 1986-2000 (Gen z dan milenial) • kawasan pembangunan permukiman pengembang swasta • Memiliki rumah sakit terakreditasi seluruhnya	• Terjadinya peningkatan Alih fungsi lahan • Rentan terhadap bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan abrasi, kekeringan • Kekurangan daerah RTH dan hilangnya area resapan • sektor industri pengolahan di perekonomian Karawang • Ketergantungan terhadap penggunaan BBM fosil • Kualitas infrastruktur dasar belum merata • Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman belum menjangkau seluruh lapisan	• Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi, dan penanganan bencana • Belum meratanya akses terhadap infrastruktur lingkungan yang berkualitas • Penurunan kualitas lingkungan hidup • Perlunya optimalisasi upaya peningkatan kualitas SDM • Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan • Belum meratanya akses terhadap infrastruktur ekonomi yang berkualitas	• Kondisi geopolitik dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak terprediksi • Dampak ekonomi pandemi berkepanjangan • Risiko perubahan iklim terhadap supply barang • Risiko kenaikan harga bahan pangan dan kelangkaan • Modern warfare (perang modern) melalui perang siber, ekonomi, hoax, perang digital dan kimia-biologis	• Potensi penggunaan EBT • Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif • Potensi SDM dan modal sosial dengan kuantitas besar yang membutuhkan dukungan pendidikan dan keterampilan • Isu gender • Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM • Penguasaan teknologi minim • Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum • Dampak PHK terhadap jumlah kelompok masyarakat calon	• Disparitas pendidikan akibat keterbatasan akses pendidikan • Kurangnya kemampuan dan kesadaran literasi digital • Ketidaktetapan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat • Ketidaksiapan kompetensi yang dimiliki tenaga kerja/calon tenaga kerja dengan pasar kerja • Angka pengangguran meningkat di sisi lain Laju pertumbuhan Penduduk mengungguli provinsi dan nasional • Tingkat partisipasi angkatan kerja masih 4 terbawah di Provinsi Jawa Barat (2023)

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis		
			Global	Nasional	Regional
• Area pertanian dengan surplus padi serta ayam potong • memiliki SDM usia produktif yang besar • pembangunan akses dan konektivitas berjalan baik • Dekat dengan ibukota • Akses kereta cepat • kawasan industri padat karya	• Angka kemiskinan absolut masih tinggi di perdesaan • Kesenjangan pendapatan di area perkotaan dan perdesaan serta antar kelompok masyarakat • Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi • Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas • Kondisi keuangan daerah defisit dari 2022 – 2024 • struktur pendapatan masih didominasi dana perimbangan atau transfer dari pusat • Keterbatasan regulasi insentif investasi bagi PMA dan PMDN • Penggunaan teknologi belum optimal • Integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum terpadu, sistem meriit belum merata dan	• Peningkatan sistem tata kelola pemerintah		kelas menengah dan rentan miskin	• Tren Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang cenderung menurun, di sisi lain angka kematian bayi saat lahir cenderung meningkat dan 30% bayi di bawah lima tahun mengalami stunting • Infeksi penyakit, kurang pengetahuan, anemia pada remaja putri, dan konsumsi makanan tidak bergizi menyebabkan degradasi pada kesehatan penduduk • Konsumsi makanan olahan jadi masih tinggi di sisi lain konsumsi real food masih lebih rendah dari konsumsi padi/beras • Pos pengeluaran penduduk terbesar adalah untuk makanan olahan dan rokok • Rata-rata lama sekolah masih di bawah 12 tahun, indeks literasi dan numerasi rendah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis		
			Global	Nasional	Regional
	sistem akuntabilitas belum terpadu • Birokrasi belum adaptif dan responsif • Kemampuan literasi dan numerasi siswa perlu didorong • Perhatian terhadap kesehatan remaja putri dan ibu hamil untuk menghindari komplikasi kehamilan dan gizi buruk • Perbaikan pola hidup dan pola pangan penduduk				• Bidang pendidikan dan ketenagakerjaan masih menunjukkan isu gender • Angka migrasi tinggi • Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas • Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa • Terkendala penggalan dan pemanfaatan potensi secara maksimal • Ketergantungan terhadap industri pengolahan yang dapat menciptakan ketidakmandirian dan mudah goyah dengan kondisi pasar global • Belum kuatnya penyediaan infrastruktur dasar berupa sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis		
			Global	Nasional	Regional
					• Problem konektivitas pembangunan infrastruktur dalam menghadapi urbanisasi dan pertumbuhan populasi • Kebutuhan akan penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi dan pengendalian penataan ruang • Belum terciptanya ketahanan kota dan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan • Mendorong perilaku ramah lingkungan • Perlu promosi terhadap hidup sehat untuk menghadapi angka penderita penyakit degeneratif

Sumber : Analisis, Rancangan Teknokratik RPJMD 2025 – 2029, RPJMN 2025 – 2029, KLHS RPJMD 2025 – 2029

Berdasarkan kertas kerja di atas, untuk mendapatkan isu strategis daerah dibuat dengan memecah kertas kerja di atas ke dalam beberapa kelompok bidang sebagai berikut.

Tabel II-119 Kertas Kerja Permasalahan dan Isu Strategis Kabupaten Karawang Per Kelompok Bidang

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
Pembangunan Daerah	- Kegiatan perindustrian dan pendidikan tinggi - Simpul pendukung sektor pertanian, industri non polutif dan non ekstraktif - Kawasan pembangunan permukiman pengembang swasta - Memiliki rumah sakit terakreditasi seluruhnya - Area pertanian dengan surplus padi serta ayam potong	- Terjadinya peningkatan Alih fungsi lahan - Rentan terhadap bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan abrasi, kekeringan - Kekurangan daerah RTH dan hilangnya area resapan - Dominasi sektor industri pengolahan di perekonomian Karawang - Ketergantungan terhadap penggunaan BBM fosil - Kualitas infrastruktur dasar belum merata - Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman belum menjangkau seluruh lapisan	- Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi, dan penanganan bencana - Belum meratanya akses terhadap infrastruktur lingkungan yang berkualitas - Penurunan kualitas lingkungan hidup	- Kondisi geopolitik dunia mengakibatkan perekonomian dunia tidak terprediksi - Belum kuatnya penyediaan infrastruktur dasar berupa sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah - Problem konektivitas pembangunan infrastruktur dalam menghadapi urbanisasi dan pertumbuhan populasi - Kebutuhan akan penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi dan pengendalian penataan ruang - Belum terciptanya ketahanan kota dan optimalisasi	- Potensi pertanian yang dapat diperdagangkan secara luas dengan pemanfaatan kontrak jangka panjang - Lemahnya upaya diversifikasi produk pertanian - Belum optimalnya edukasi kesehatan bagi seluruh lapisan penduduk - Belum optimalnya sistem drainase dan area resapan air - Lemahnya langkah adaptasi dan mitigasi bencana - Belum memadainya penyediaan infrastruktur dasar hunian penduduk - Belum optimalnya transportasi umum untuk terintegrasinya kawasan - Lemahnya pengelolaan



Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
				pengelolaan SDA dan lingkungan • Mendorong perilaku ramah lingkungan	eksternalitas negatif dari industri 6. Kerentanan terhadap alih fungsi lahan yang tidak terkontrol

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
Pembangunan Ekonomi	- Memiliki SDM usia produktif yang besar - Memiliki jalan akses dan konektivitas - Dekat dengan ibukota - Akses kereta cepat - Kawasan industri padat karya	- Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas - Kondisi keuangan daerah defisit dari 2022 – 2024 - Struktur pendapatan masih didominasi dana perimbangan atau transfer dari pusat - Keterbatasan regulasi insentif investasi bagi PMA dan PMDN	- Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan - Belum meratanya akses terhadap infrastruktur ekonomi berkualitas	- Dampak ekonomi akibat pandemi berkepanjangan - Risiko perubahan iklim terhadap supply barang - Risiko kenaikan harga bahan pangan dan kelangkaan - Modern warfare (perang modern) melalui perang siber, ekonomi, hoax, perang digital dan kimia-biologis - Potensi penggunaan EBT - Resiliensi dan prospek perekonomian yang positif - Ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki tenaga kerja/calon tenaga kerja dengan pasar kerja - Angka pengangguran	- Dana pemerintah belum bersumber dari dana yang bersifat kemandirian - Tingginya potensi kuantitas SDM di pasar kerja namun tidak didukung dengan kualitas SDM memadai - Risiko ketergantungan ekonomi terhadap industri pengolahan - Belum adanya pemanfaatan EBT - Rendahnya keahlian dan keterampilan dalam pendidikan SDM

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
				meningkat di sisi lain Laju pertumbuhan Penduduk mengungguli provinsi dan nasional • Tingkat partisipasi angkatan kerja masih 4 terbawah di Provinsi Jawa Barat (2023) • Ketergantungan terhadap industri pengolahan yang dapat menciptakan ketidakmandirian dan mudah goyah dengan kondisi pasar global	

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
Pembangunan penduduk	- Jumlah penduduk meningkat setiap tahun - Struktur usia didominasi penduduk produktif rentang kelahiran 1986-2000 (Gen z dan milenial)	- Angka kemiskinan absolut masih tinggi di perdesaan - Kesenjangan pendapatan di area perkotaan dan perdesaan serta antar kelompok masyarakat - Daya beli masyarakat miskin rentan terhadap inflasi - Kemampuan literasi dan numerasi siswa perlu didorong - Perhatian terhadap kesehatan remaja putri dan ibu hamil untuk menghindari komplikasi kehamilan dan gizi buruk - Perbaikan pola hidup dan pola pangan penduduk - Pendidikan dan pelatihan angkatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan	Perlu optimalisasi upaya peningkatan kualitas SDM	- Potensi SDM dan modal sosial dengan kuantitas besar yang membutuhkan dukungan pendidikan dan keterampilan - Rendahnya kualitas dan produktivitas SDM - Dampak PHK terhadap jumlah kelompok masyarakat calon kelas menengah dan rentan miskin - Disparitas pendidikan akibat keterbatasan akses pendidikan - Kurangnya kemampuan dan kesadaran literasi digital - Ketidakoptimalan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat - Tren Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang cenderung menurun, di sisi	- Kebutuhan pelatihan SDM dan pemenuhan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi - Struktur usia dominan kelompok produktif memengaruhi jenis pekerjaan dan membutuhkan keahlian dan keberagaman tipe angkatan kerja - Kebutuhan perbaikan pendidikan di tingkat paling dasar - Kerentanan terhadap penghematan oleh masyarakat kelas bawah akibat PHK, inflasi, dan kenaikan harga barang - Disparitas kualitas pendidikan - Lemahnya akses dan infrastruktur menuju sekolah di

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
				lain angka kematian bayi saat lahir cenderung meningkat dan 30% bayi di bawah lima tahun mengalami stunting • Infeksi penyakit, kurang pengetahuan, anemia pada remaja putri, dan konsumsi makanan tidak bergizi menyebabkan degradasi pada kesehatan penduduk • Konsumsi makanan olahan jadi masih tinggi, di sisi lain konsumsi real food masih lebih rendah dari konsumsi padi/beras • Pos pengeluaran penduduk terbesar adalah	kawasan perdesaan 7. Angka kelahiran total cenderung turun, angka kematian bayi cenderung meningkat 8. Risiko stunting dan gizi buruk 9. Pola hidup dan pola makan yang buruk memengaruhi kualitas kesehatan penduduk 10. Permasalahan ketidakseimbangan gender di dunia pekerjaan dan pendidikan 11. Kesenjangan dan ketimpangan ekonomi di daerah pedesaan dan perkotaan

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
				untuk makanan olahan dan rokok • Rata-rata lama sekolah masih di bawah 12 tahun, indeks literasi dan numerasi rendah • Bidang pendidikan dan ketenagakerjaan masih menunjukkan isu gender • Angka migrasi tinggi • Perlu promosi terhadap hidup sehat untuk menghadapi angka penderita penyakit degeneratif	

Kelompok Bidang	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Global, Nasional dan Regional	Isu Strategis Daerah
Birokrasi Pemerintahan	Data tertentu milik pemerintahan dibuka dalam <i>website</i> resmi	- Integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum terpadu, sistem meriit belum merata dan sistem akuntabilitas belum terpadu - Birokrasi belum adaptif dan responsif	Peningkatan sistem tata kelola pemerintah	- Kelemahan penataan lembaga dan kepastian hukum - Kebutuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, harmonis, dan berintegritas - Tidak kuatnya kelembagaan tingkat desa - Terkendala penggalan dan pemanfaatan potensi secara maksimal	Kelemahan tata kelola lembaga dan sistem meritokrasi yang belum merata berisiko memperlambat penanganan dan pelayanan

Sumber : Analisis, Rancangan teknis RPJMD 2025 – 2029, RPJMN 2025 – 2029, KLHS RPJMD 2025 – 2029

2.5 Isu Strategis Kabupaten Karawang

Isu Strategis Kabupaten Karawang dirumuskan berdasarkan berbagai macam isu yang terdapat di Isu Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan dikonteksikan kembali di Kabupaten Karawang. Selain itu, dirumuskan isu strategis berdasarkan masing-masing kelompok bidang. Akan tetapi permasalahan kerap saling bersinggungan antar masing-masing kelompok bidang, sehingga perlu dirumuskan isu strategis Kabupaten Karawang yang diintegrasikan dari permasalahan-permasalahan.

Dengan memperhatikan visi misi Bupati Karawang 2025-2029 beserta program prioritas dan tabel permasalahan dan isu strategis KLHS RPJMD 2025-2029, dapat disintesis bahwa ada 4 aspek permasalahan umum daerah Kabupaten Karawang yaitu:

1. Aspek Pembangunan Manusia, dengan masalah pokok: Kualitas Pembangunan Manusia Belum Merata dan Berdaya Saing Global.

Masalah pokok di aspek pembangunan manusia di Kabupaten Karawang terletak pada ketimpangan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata. Walaupun Karawang memiliki potensi besar dalam sektor industri dan pertanian, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan pelatihan keterampilan masih terbatas, terutama di daerah pedesaan dan wilayah pinggiran. Ini menyebabkan kesenjangan kemampuan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta menghambat peningkatan kualitas hidup yang dapat meningkatkan daya saing global. Kualitas kesehatan masyarakat, yang mencakup penanganan stunting, juga masih menjadi masalah penting yang perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa generasi mendatang siap berkompetisi di tingkat internasional.

Berikut ini merupakan potensi dan masalah pada aspek pembangunan manusia:

Tabel II-120 Potensi dan Masalah Aspek Pembangunan Manusia

Potensi	Masalah
1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi: Program wajib belajar 12 tahun dan pengembangan pendidikan vokasi menjadi kunci dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di Karawang, yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat di daerah ini. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di pasar global. 2. Penanganan Stunting dan Jaminan Sosial: Program penurunan stunting dan perluasan jaminan sosial bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong produktivitas tenaga kerja yang lebih sehat.	1. Angka kemiskinan absolut masih tinggi di pedesaan 2. Kesenjangan pendapatan di area perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat 3. Daya beli Masyarakat miskin rentan terhadap inflasi 4. Kemampuan literasi dan numerasi siswa perlu didorong 5. Perhatian terhadap kesehatan remaja putri dan ibu hamil untuk 6. Menghindari komplikasi kehamilan dan gizi buruk 7. Perbaikan pola hidup dan pola pangan penduduk

Potensi	Masalah
3. Pengurangan Kemiskinan: Program pengentasan kemiskinan juga penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi daerah.	8. Pendidikan dan pelatihan angkatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sasaran program untuk mengatasi permasalahan pada aspek pembangunan manusia antara lain: Program wajib belajar 12 tahun, Program penanganan stunting, Program perluasan jaminan sosial, Program pengurangan kemiskinan, Program Pendidikan dan pelatihan vokasi.

2. **Aspek Ekonomi, dengan masalah pokok: Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Stabil, Inklusif, dan Berwawasan Lingkungan.**

Masalah pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Karawang dalam sektor ekonomi adalah ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, kurangnya inklusivitas, dan belum adanya pendekatan yang berwawasan lingkungan dalam pembangunan ekonomi daerah. Masalah ini mencakup beberapa dimensi yang saling terkait dan membutuhkan perhatian serta solusi jangka panjang.

1) **Ketidakstabilan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang, meskipun cukup signifikan berkat kontribusi sektor industri manufaktur dan perdagangan, belum menunjukkan stabilitas yang diinginkan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakstabilan ini termasuk:

- Fluktuasi pasar global yang mempengaruhi permintaan produk manufaktur, serta perubahan kebijakan industri nasional yang terkadang tidak dapat diprediksi.
- Ketergantungan yang tinggi pada sektor industri tertentu, seperti industri manufaktur, yang membuat perekonomian Karawang rentan terhadap penurunan permintaan global atau gangguan dalam rantai pasokan.
- Pengaruh eksternal, seperti krisis ekonomi global atau pandemi COVID-19, yang dapat memperlambat aktivitas ekonomi dan mempengaruhi sektor-sektor utama di Karawang.

Ketidakstabilan ini menghalangi perekonomian Karawang untuk tumbuh secara berkelanjutan dan mengurangi daya saing daerah. Oleh karena itu, penting bagi Karawang untuk menciptakan sektor-sektor ekonomi yang lebih beragam dan lebih resilien terhadap guncangan eksternal.

2) **Kurangnya Inklusivitas dalam Pertumbuhan Ekonomi**

Meskipun pertumbuhan ekonomi Karawang didorong oleh sektor industri dan perdagangan, pertumbuhan yang ada belum bersifat inklusif, yang artinya manfaatnya belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa faktor yang memperburuk inklusivitas adalah:

- Ketimpangan antar sektor: Sebagian besar manfaat pertumbuhan ekonomi Karawang terpusat pada sektor industri besar, sementara sektor lain, seperti pertanian dan UMKM, belum berkembang secara optimal. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan antara kawasan industri dan kawasan pedesaan atau pinggiran.
- Keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi: Masyarakat miskin dan kelompok rentan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan yang relevan, pelatihan keterampilan, atau modal usaha, yang menghambat mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses ekonomi daerah.
- Distribusi pendapatan yang tidak merata: Peningkatan pendapatan yang terjadi cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu, sementara sebagian besar penduduk di Karawang masih hidup di bawah garis kemiskinan atau kesulitan untuk mengakses layanan dasar.

Pembangunan ekonomi yang inklusif memerlukan kebijakan yang memastikan bahwa semua segmen masyarakat, terutama mereka yang berada di luar sektor industri besar, dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut. Ini termasuk pemberdayaan sektor pertanian, UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan.

3) Belum Berwawasan Lingkungan

Karawang, dengan pertumbuhannya yang pesat dalam sektor industri, menghadapi tantangan besar dalam menerapkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sektor industri yang berkembang pesat cenderung meningkatkan dampak lingkungan, seperti polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem alam yang dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Beberapa masalah yang terkait dengan aspek lingkungan ini adalah:

- Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan lahan yang tidak terencana dan pencemaran akibat kegiatan industri.
- Perubahan iklim dan peningkatan intensitas bencana alam, seperti banjir, yang semakin dirasakan di Karawang, mengancam ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang rentan.

- Keterbatasan dalam pengelolaan limbah industri yang berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien. Banyak sektor industri di Karawang yang belum mengimplementasikan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada strategi pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan dan pembangunan hijau, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkuler, penggunaan energi terbarukan, serta upaya konservasi sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan yang lebih baik akan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berikut ini merupakan potensi dan masalah pada aspek ekonomi:

Tabel II-121 Potensi dan Masalah Aspek Ekonomi

Potensi	Masalah
1. Pengembangan Kewirausahaan dan UMKM: Program pengembangan kewirausahaan dan digitalisasi UMKM sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi lokal dan menyebarkan manfaatnya lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk di sektor pertanian dan industri lokal. 2. Pengembangan Pariwisata: Karawang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata, baik itu melalui wisata alam maupun wisata urban, yang dapat menjadi pendorong ekonomi daerah. 3. Pertanian dan Ketahanan Pangan: Meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi tepat guna dan memperkuat ketahanan pangan melalui kebijakan yang mendukung sektor pertanian.	1. Kapasitas dan daya saing IKM/UMKM masih terbatas 2. Kondisi keuangan daerah defisit dari 2022 – 2024 3. Struktur pendapatan masih didominasi Dana perimbangan atau transfer dari pusat 4. Keterbatasan regulasi insentif investasi bagi PMA dan PMDN 5. Pertumbuhan Ekonomi belum memperhatikan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sasaran program untuk mengatasi permasalahan pada aspek ekonomi antara lain: Program pengembangan kewirausahaan, Program pendampingan usaha digitalisasi UMKM, Program pengembangan peningkatan kapasitas tenaga kerja, Program pengembangan wisata urban, Program peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, dan Program pengembangan ekonomi sirkular.

3. Aspek Tata Kelola Pemerintahan, dengan masalah pokok: Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi Berdampak dan Pelayanan Publik yang Berkualitas.

Salah satu masalah utama dalam aspek tata kelola pemerintahan di Karawang adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik. Meskipun sudah ada upaya untuk menyederhanakan proses birokrasi, implementasi reformasi yang belum menyeluruh mengakibatkan terjadinya

ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Proses administrasi yang masih lambat dan tidak efisien menghambat daya saing daerah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, meskipun digitalisasi pemerintahan telah dimulai, masih ada kekurangan dalam hal penerapan teknologi yang dapat mempercepat layanan publik. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat diperlukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berikut ini merupakan potensi dan masalah pada aspek tata kelola pemerintahan:

Tabel II-122 Potensi dan Masalah Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Potensi	Masalah
Digitalisasi Pemerintahan: Program digitalisasi pemerintahan untuk mempermudah akses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi Tematik: Melakukan reformasi birokrasi secara tematik, yang akan menysar peningkatan kinerja aparatur negara dan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Inovasi Layanan Publik: Meningkatkan inovasi dalam pelayanan publik untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dilakukan bisa tercapai dengan tepat waktu dan efektif.	- Integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum terpadu, sistem merit belum merata dan system akuntabilitas belum terpadu - Birokrasi belum adaptif dan responsif

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sasaran program untuk mengatasi permasalahan pada aspek tata kelola pemerintahan antara lain: Program reformasi birokrasi tematik, Program digitalisasi pemerintahan, dan Program pengembangan inovasi layanan publik.

4. Aspek Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur, dengan masalah pokok: Pembangunan Infrastruktur Belum Merata dan Kualitas Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah

Di bidang infrastruktur, masalah pokok yang dihadapi adalah pembangunan yang belum merata dan rendahnya kualitas konektivitas antarwilayah. Meskipun Karawang memiliki posisi strategis yang dekat dengan jalur transportasi utama, seperti tol dan kereta cepat, infrastruktur di daerah terpencil dan pinggiran masih sangat terbatas. Hal ini menyebabkan ketimpangan aksesibilitas antar wilayah, yang menghambat pergerakan barang, jasa, dan orang. Selain itu, infrastruktur penunjang lainnya, seperti sanitasi, perumahan layak, dan jaringan komunikasi, juga perlu diperbaiki. Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian daerah, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur menjadi tantangan utama yang harus diatasi oleh pemerintah daerah.

Berikut ini merupakan potensi dan masalah pada aspek pembangunan kewilayahan dan infrastruktur:

Tabel II-123 Potensi dan Masalah Aspek Pembangunan Kewilayah dan Infrastruktur

Potensi	Masalah
1. Pemerataan Infrastruktur: Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Karawang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah pusat dan pinggiran. Ini termasuk pengembangan akses transportasi, sanitasi, dan fasilitas publik yang lebih baik di daerah perdesaan. 2. Kota Cerdas dan Layak Huni: Program pengembangan kota cerdas yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup warga, sekaligus mengurangi ketimpangan. 3. Pengendalian Banjir dan Ketahanan Iklim: Memperkuat infrastruktur pengendalian banjir dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan dan ketahanan bencana.	1. Terjadinya Peningkatan Alih fungsi lahan 2. Rentan terhadap bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan dan abrasi, kekeringan 3. Kekurangan daerah RTH dan hilangnya area resapan 4. Dominasi sektor industri pengolahan di perekonomian Karawang 5. Ketergantungan terhadap penggunaan BBM fosil 6. Kualitas infrastruktur dasar belum merata 7. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman belum menjangkau seluruh lapisan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

Sasaran program untuk mengatasi permasalahan pada aspek pembangunan kewilayahan dan infrastruktur antara lain: Program pemerataan infrastruktur, Program kota layak huni, Program kota cerdas, Program Kerja sama antardaerah sekitar, Program pengendalian Banjir, Program perluasan RTH, Program peningkatan kualitas lingkungan hidup, Program Penanggulangan bencana, Program peningkatan ketahanan iklim.

Berdasarkan telaah permasalahan diatas distrukturkan kembali isu strategis Kabupaten Karawang antara lain:

Tabel II-124 Identifikasi Permasalahan dalam Isu Strategis

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
1. Angka RLS Kabupaten Karawang 8,05, menunjukkan angka lebih rendah daripada Kab/Kota lain di Prov Jawa Barat, menunjukkan angka partisipasi sekolah yang rendah terutama perempuan. 2. Angka perkawinan anak di Provinsi Jawa Barat sebesar 8 – 10%, menunjukkan 1 dari 10 perempuan di Jawa Barat mengalami pernikahan dini dibawah usia 18 Tahun. 3. Sebanyak 30% anak di Karawang mengalami stunting. 4. Ketercapaian <i>unmet need</i> pelayanan Kesehatan menurun 9,91%, di mana pada tahun 2022 <i>unmet need</i> pelayanan Kesehatan sebesar 14,05%. 5. Pada 2023 capaian sebesar 96,61% dan target nasional sebesar 98, serta sebagai 3% penduduk masih belum mempunyai BPJS. 6. Secara statistik 40% penduduk Karawang mengkonsumsi makanan dengan kandungan gizi rendah. 7. Rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan pada kelompok makanan, diketahui	1. Rendahnya perhatian terhadap kesehatan remaja putri dan ibu hamil untuk menghindari komplikasi kehamilan dan gizi buruk 2. Tingginya tingkat pengangguran perempuan yang dapat diakibatkan dari tidak terdatanya jenis pekerjaan atau pengaruh faktor sosial budaya terhadap perempuan 3. Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh layanan kesehatan yang belum merata, belum menjangkau seluruh siklus kehidupan, serta masih lemahnya upaya promotif dan preventif (Paradigma Sehat) 4. Angka kemiskinan absolut masih tinggi di perdesaan 5. Kesenjangan pendapatan di area perkotaan dan perdesaan serta antar kelompok masyarakat 6. Daya beli Masyarakat miskin rentan terhadap inflasi 7. Kemampuan literasi dan numerasi siswa perlu didorong 8. Lemahnya edukasi pola hidup dan pola pangan sehat penduduk	Kualitas Pembangunan Manusia Belum Merata dan Belum Berdaya Saing Global	Pengembangan SDM masih belum optimal, terutama dalam hal terjadi <i>mismatch</i> antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, serta belum terjadi transformasi yang dibutuhkan untuk menjadi masyarakat yang maju, modern dan inklusif

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
bahwa pos terbesar adalah makanan dan minuman jadi serta rokok. Pengeluaran pangan lebih tinggi mengindikasikan rendahnya penghasilan dan tingginya harga pangan. 8. Laju Inflasi Terjaga di 3,94%. 9. Jumlah penduduk miskin semakin berkurang, dan tingkat kedalaman kemiskinan juga mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, akan tetapi jumlah penduduk miskin masih tinggi sebesar 187 Ribu. 10. Indeks Gini Rasio, stabil di angka 0,364 dalam 5 tahun ke belakang.	9. Pendidikan dan pelatihan angkatan kerja perlu disesuaikan dengan kebutuhan		
1. Dominasi sektor industri pengolahan di perekonomian Karawang 2. PDRB daerah disokong secara positif dan dalam porsi yang besar dari keberadaan industri 3. Tidak seimbang kontribusi PDRB pada sektor lainnya selain industri pengolahan 4. Lemahnya pengelolaan eksternalitas negatif dari keberadaan industri	1. Ketergantungan terhadap industri pengolahan 2. Kesenjangan antarsektor dapat memperlebar <i>gap</i> pendapatan penduduk 3. Tidak maksimalnya penyerapan tenaga kerja selama kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan industri atau sektor lainnya 4. Keterbatasan kapasitas dan daya saing UMKM 5. Kondisi keuangan daerah defisit sejak 2022 – 2024	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Stabil, Inklusif, dan Berwawasan Lingkungan 2. Belum memaksimalkan pemanfaatan kondisi daerah sebagai simpul penting regional dan nasional, yaitu sebagai pusat pengembangan industri nasional, pusat produk pangan nasional (kawasan pertanian), pengembangan kawasan perkotaan baru penyangga Jakarta, serta menjadi titik	1. Laju investasi dan perkembangan industri belum memiliki dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan terhadap masyarakat setempat 2. Terjadi kesenjangan ekonomi antara Karawang bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan 3. Ekosistem ekonomi daerah belum berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. UMKM setempat belum dapat

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
5. Berkembangnya industri secara pesat tidak dibersamai dengan kualitas SDM yang tangguh 6. Belum adanya perkembangan pada kondisi UMKM daerah 7. Struktur pendapatan masih didominasi dana perimbangan atau transfer dari pusat 8. Keterbatasan regulasi insentif investasi PMA dan PMDN 9. Pertumbuhan ekonomi belum memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup 10. Bergantung pada daerah lain untuk pengiriman logistik barang, bergantung pada jalur darat.	6. Kelemahan regulasi dapat <i>mendowngrade</i> kemenarikan investasi di kabupaten Karawang 7. Meningkatnya beban lingkungan dari adanya industri pengolahan	transit jalur logistik dan transportasi nasional (jalur KA antarkota, KCIC, jaringan jalan tol Trans Jawa, dan jaringan jalan arteri nasional)	berperan penting dalam sistem rantai pasok ekonomi dan industri di Karawang
1. Indeks Reformasi Birokrasi terus meningkat pada tahun 2024, 81,87 menunjukkan perbaikan perencanaan dan evaluasi kinerja yang semakin baik, akan tetapi tata Kelola pemerintahan belum terpadu dan merata. 2. Sistem Akuntabilitas masih rendah dengan angka 67,48 tahun 2024. 3. Indek Daya Saing Daerah Tahun 2024 yaitu 3,56 masih	1. Integritas birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum terpadu, sistem merit belum merata dan system akuntabilitas belum terpadu 2. Birokrasi belum adaptif dan responsif	Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi Berdampak dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Birokrasi daerah masih perlu didorong untuk lebih responsif terhadap segala permasalahan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, akuntabel dan <i>agile</i> .

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
berada di Bawah IDSD Prov Jabar yaitu 3,88.			
1. Infrastruktur belum merata dan infrastruktur dasar perumahan belum menjangkau semua masyarakat termasuk akses listrik 2. Belum kuatnya penyediaan infrastruktur dasar berupa sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. 3. Belum terintegrasinya infrastruktur logistik antarkawasan dan kesenjangan ketersediaan dan kesenjangan penyediaan infrastruktur fisik dan sosial 4. Kebutuhan akan penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi dan pengendalian penataan ruang 5. Belum terciptanya ketahanan kota dan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan	1. Kualitas infrastruktur dasar belum merata 2. Infrastruktur dasar perumahan dan permukiman belum menjangkau seluruh lapisan 3. Sarana dan Prasarana persampahan belum optimal 4. Belum meratanya akses terhadap infrastruktur lingkungan yang berkualitas	Pembangunan Infrastruktur Belum Merata dan Kualitas Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah	1. Kabupaten Karawang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk perubahan iklim. Banjir rob, banjir karena luapan DAS Citarum serta kekeringan sudah semakin sering dialami oleh Kabupaten Karawang. 2. Terjadi kesenjangan pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah antara Karawang bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan. 3. Transisi energi di berbagai sektor pembangunan masih belum berjalan dengan optimal
1. Fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah belum optimal 2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	1. Terjadinya peningkatan alih fungsi lahan 2. Lemahnya pengendalian dan penegakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1. Ketidakmampuan Infrastruktur Lingkungan dalam Menopang Laju Pembangunan dan Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	1. Alih fungsi yang semakin sulit dikendalikan, yang akan mengancam ketahanan pangan, kekayaan hayati, bencana hidrologis bagi Karawang sendiri dan wilayah di hulu DAS Citarum

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
3. Pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih open dumping 4. Keterlibatan antar stakeholder pengelolaan sampah baik sektor pemerintahan dan non pemerintahan belum optimal 5. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang belum optimal 6. Sebaran pelayanan pengelolaan sampah pada 30 Kecamatan belum optimal 7. Fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah belum optimal 8. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 9. Pengelolaan sampah di TPA Jalupang masih <i>open dumping</i> 10. Keterlibatan antar stakeholder pengelolaan sampah baik sektor pemerintahan dan non pemerintahan belum optimal 11. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang belum optimal 12. Sebaran pelayanan pengelolaan sampah pada 30 Kecamatan belum optimal 13. Kualitas udara di Kabupaten Karawang, secara konsisten menunjukkan bahwa	3. Rendahnya kesadaran publik masyarakat untuk membuang sampah sembarangan 4. Pengelolaan DAS belum terintegrasi secara holtisik hulu ke hilir 5. Rentan terhadap bencana banjir, cuaca ekstrem, gelombang tinggi dan abrasi, kebakaran hutan, kekeringan 6. Kekurangan daerah RTH dan hilangnya area resapan 7. Ketergantungan terhadap penggunaan BBM fosil 8. Terjadi Polusi Udara dan Polusi Tanah	2. Terjadinya Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup yang Mengancam Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Risiko Bencana	2. Kabupaten Karawang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk perubahan iklim. Banjir rob, banjir karena luapan DAS Citarum serta kekeringan sudah semakin sering dialami oleh Kabupaten Karawang 3. Lingkungan hidup di Karawang terus mendapat tekanan dan berpotensi semakin terdegradasi 4. Transisi energi di berbagai sektor pembangunan masih belum berjalan dengan optimal

Akar Masalah	Masalah	Masalah Pokok	Isu Strategis
konsentrasi PM2.5 tahunan di Karawang berada jauh di atas ambang batas aman yang ditetapkan oleh WHO 14. Kualitas udara melalui stasiun pengukuran milik KLHK dan Swasta menunjukkan Tidak Sehat pada (AQI 151 – 200) 15. Kualitas air sungai terutama sungai Citarum dan Cibeet mempunyai status Tercemar Berat			

Sumber : Hasil Analisis, 2025

2.6 Evaluasi Hasil RPJMD Tahun 2021 – 2026

Visi (tujuan) dan misi (sasaran tahunan) Bupati – Wakil Bupati Kabupaten Karawang periode 5 tahun yang bersifat abstrak dijabarkan dalam bentuk konkrit menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan diwujudkan oleh kepala daerah. angka ketercapaian yang dapat direviu ialah tahun 2021 – 2024.

2.6.1 Indikator Makro

Indikator makro adalah tolok ukur pembangunan yang perlu dievaluasi secara periodik untuk mengetahui kinerja sekaligus masukan bagi perencanaan periode berikutnya. Terdapat 6 indikator makro yang akan dijabarkan dengan menyajikan capaian Kabupaten Karawang.

2.6.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM Kabupaten Karawang mengalami peningkatan setiap tahunnya dan berhasil terealisasi. Kondisi IPM terakhir (2024) menunjukkan posisi 99% menuju target IPM 2025 – 2026. IPM Kabupaten Karawang belum mencapai realisasi IPM Provinsi Jawa Barat.

Tabel II-125 Realisasi IPM Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	IPM Provinsi	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Indeks	70,99	71,84	72,96	101%
2	2022		71,33	72,64	73,63	102%
3	2023		71,67	73,25	74,24	102%
4	2024		73,25	73,82	74,92	101%
5	2025		74,06			
6	2026		74,25			

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.1.2 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan Kabupaten Karawang setiap tahunnya mengalami penurunan namun belum mencapai target kecuali pada 2023. Pada 2024 menunjukkan capaian penurunan angka kemiskinan sebesar 96,82% dan sudah lebih dari 90% dalam memenuhi target 2025 – 2026. Namun realisasi angka kemiskinan masih di atas realisasi angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat.

Tabel II-126 Realisasi Angka Kemiskinan Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Angka Kemiskinan Provinsi	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Persen	8,13	8,95	8,40	90,84%
2	2022		8	8,44	8,06	94,79%
3	2023		7,9	7,87	7,62	100,38%
4	2024		7,61	7,86	7,56	96,82%
5	2025		7,5			
6	2026		7,2			

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi diwakili oleh laju pertumbuhan ekonomi. Besar laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang berhasil memenuhi target setiap tahunnya dengan tingkat ketercapaian tertinggi di 2022 sebesar 106,95%. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang melebihi capaian Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Karawang kini berada di posisi lebih dari 70% untuk mencapai target di 2025 – 2026.

Tabel II-127 Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi LPE Kab. Karawang	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Persen	5,8	5,85	100,86%
2	2022		5,9	6,31	106,95%
3	2023		5,4	5,4	100,00%
4	2024		4,2	4,21	100,24%
5	2025		5,69		
6	2026		6		

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Target indikator kualitas lingkungan hidup di tahun 2023 – 2024 telah mencapai targetnya. IKLH di 2024 telah mencapai target capaian di 2025 – 2026.

Tabel II-128 Realisasi IKLH Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Indeks	47,15	44,8	95,02%
2	2022		47,4	44,92	94,77%
3	2023		47,64	51,4	107,89%
4	2024		47,89	50,34	105,12%
5	2025		48,13		
6	2026		48,38		

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.1.5 Sektor Infrastruktur

Pertumbuhan PDRB di sektor infrastruktur pada pada tahun 2023 – 2023 belum melampaui target yang ditetapkan adapun capaian 2024 sudah 80% dari target 2025 – 2026.

Tabel II-129 Realisasi PDRB Sektor Infrastruktur Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Persen	14,5	5,74	39,59%
2	2022		14,6	-0,47	-3,22%
3	2023		14,7	6,94	47,21%
4	2024		14,8	12,51	84,53%
5	2025		14,9		
6	2026		15		

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.1.6 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks reformasi birokrasi sudah mencapai target pada 2023 – 2024.

Tabel II-130 Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Karawang 2021 - 2024

No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian(%)
1	2021	Persen	63,2	60,16	95,19%
2	2022		64,2	63,36	98,69%
3	2023		65,2	81,14	124,45%
4	2024		81,14	81,87	100,90%
5	2025		81,87		
6	2026		81,87		

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025 dan BPS

2.6.2 Capaian Indikator RPJMD 2021 – 2026

Hasil evaluasi capaian target RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Indikator Kinerja Utama diperoleh sebagai berikut.

Tabel II-131 Capaian Indikator RPJMD 2021 - 2026

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Kinerja Tahun																
							2021			2022			2023			2024			2025		2026		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya Sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan dan literasi	1	Indeks Pendidikan	Indeks	60,08	59,54	99,12%	60,67	60,39	99,54%	61,26	60,69	99,07%	61,85	60,75	98,22%	62,45		63,04		0%
			Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat bidang kesehatan	2	Indeks Kesehatan	Indeks	81,48	80,51	98,81%	81,55	80,95	99,26%	81,63	81,38	99,69%	81,63	84,88	103,98%	84,98		85,08		0%
			Meningkatnya pengarusutamaan gender serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,35	90,29	99,93%	90,58	90,5	99,91%	90,81	91,85	101,15%	91,85	91,98	100,14%	91,27		91,5		0%
		Meningkatnya kesejahteraan dan jaminan perlindungan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat dan daya beli masyarakat serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	11,24	11,83	95,01%	10,95	9,87	110,94%	10,68	8,95	119,33%	8,73	8,04	108,58%	8,04		8,04		0%
				5	Indeks Purchasing Power Parity (PPP)	Indek	74,53	74,47	99,92%	75,15	75,52	100,49%	75,15	76,69	102,05%	76,95	78,02	101,39%	78,02		77,4		0%
2	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif dan berdaya saing serta berbasis pada potensi lokal	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, inovatif dan berbasis pada potensi unggulan daerah	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	6	Pertumbuhan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB	%	4,5	2,32	51,56%	4,6	2,27	49,35%	4,7	-0,19	-4,04%	4,8	1,71	36%	4,9		4,9		0%
			Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul dan pengembangan ekonomi kreatif	7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,36	6,66	90,49%	7,44	9,55	128,36%	7,52	10,17	135,24%	10,48	10,07	96%	10,48		10,48		0%
			Meningkatnya kontribusi industri pengolahan	8	Pertumbuhan kontribusi industri	%	0,39	7,09	1817,95%	1	7,53	753,00%	2,58	5,35	207,36%	2,68	2,91	109%	2,78		2,88		0%



No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Kinerja Tahun																
							2021			2022			2023			2024			2025		2026		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			dalam pertumbuhan ekonomi		pengolahan dalam PDRB																		
3	Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan	Terwujudnya prinsip pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Karawang	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	47,15	44,8	95,02%	47,4	44,92	94,77%	47,64	51,4	107,89%	47,89	50,34	105%	48,13		48,38		0%
			Meningkatnya upaya pengurangan risiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	10	Indeks Risiko Bencana	Indeks	174,33	165,58	105,28%	174,23	157,81	110,40%	174,2	152,32	112,56%	174,5	142,06	122,84%	174,1		174		0%
		Menurunnya kesenjangan antar wilayah khususnya dalam ketersediaan sarana dan prasarana	Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur wilayah	11	Rasio konektivitas	Rasio	0,6297	0,49	77,81%	0,6299	0,68	107,95%	0,6301	0,515	81,73%	0,6303	0,685	109%	0,685		0,685		0%
			Tercapainya universal akses (kumuh, air bersih, pengelolaan sampah dan limbah domestik)	12	Capaian universal akses	%	41,8	43,74	104,64%	43,97	50,25	114,28%	46,14	62,41	135,26%	69,47	70,14	101%	78,02		85		0%
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, koordinatif dan akuntabel serta berorientasi kebutuhan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan kapabel	13	Nilai SAKIP	indeks	66,5	66,86	100,54%	67,5	66,57	98,62%	68,5	66,95	97,74%	69,5	67,48	97,09%	70,5		71,5		0%
				14	Opini audit (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100,00%	WTP	WTP	100,00%	WTP			WTP		WTP		



No	MISI	TUJUAN	SASARAN	No	IKU	Satuan	Kinerja Tahun																
							2021			2022			2023			2024			2025		2026		
							Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Tingkat Capaian (%)	Target	Capaian	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Terwujudnya implementasi teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan bagi masyarakat	15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82,54	101,90%	81,5	82,38	101,08%	82	83,4	101,71%	83,5	84,88	102%	84,88		84,5		0%
				16	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Indeks	2,4	3,39	141,25%	2,6	3,08	118,46%	2,8	4,38	156,43%	4,38	4,4	100,46%	4,4		4,4		0%
			Terwujudnya ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat	17	Persentase penurunan gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban umum	%	5	5	100,00%	5	5	100,00%	5	29,96	599,20%	6	7,13	118,83%	6,38		6,38		0%

Sumber: Bappeda Kabupaten Karawang, 2025



Source : KCIC

Bab III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB III

Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

Visi pembangunan Kabupaten Karawang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang 2025 – 2029 ini merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana yang disampaikan pada saat proses pemilihan kepala daerah sebelumnya. Visi ini akan menggambarkan arah dan juga kondisi yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sesuai dengan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 merupakan rumusan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut. Misi ini kemudian akan dijabarkan menjadi tujuan sasaran pembangunan daerah.

3.1.1 Kerangka Acuan Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Karawang pada periode 5 (lima) tahun pertama RPJPD Kabupaten Karawang 2025 – 2045. Visi dan misi ini juga harus menunjukkan keselarasan dengan RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2025 – 2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025 – 2029.

1. Acuan Visi Jangka Panjang Pembangunan Nasional

Visi jangka panjang pembangunan Indonesia, dikonsepsikan sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Visi ini memiliki 5 (lima) pilar sasaran utama yaitu (1) pendapatan per kapita yang setara negara maju, (2) penurunan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, (3) peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, (4) peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan (5) penurunan intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi yang dapat diringkas menjadi 3 (tiga) transformasi yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi dan transformasi tata kelola. Ketiga transformasi ini memiliki landasan transformasi yang meliputi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dan kemudian terdapat 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi yang meliputi pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan.

Transformasi pembangunan menjadi kata kunci pembangunan nasional hingga 2045. Transformasi ini sendiri melanjutkan reformasi pembangunan yang sudah

dilaksanakan pada periode 20 (dua puluh) tahun sebelumnya. Pada periode 2025 – 2029 ini transformasi pembangunan difokuskan pada penguatan transformasi pembangunan. Penguatan tersebut antara lain mencakup penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas SDM, upaya lanjutan hilirisasi sumber daya alam, produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, transisi energi, perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2. Acuan Transformasi Pembangunan Nasional 2025 – 2029

Penjabaran penguatan transformasi pembangunan tersebut kemudian dapat dipahami pada RPJMN 2025 – 2029, khususnya pada arahan yang terkait dengan pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029. Arahan RPJMN 2025-2029 yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Karawang antara lain adalah (1) penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem), *stunting*, ketimpangan, (2) mendukung pengembangan kawasan industri dan swasembada pangan dan energi, serta (3) Daya saing SDM, Ekonomi Hijau, dan GRK.

3. Acuan Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat 2025 – 2029

RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025 – 2029 telah merumuskan visi yaitu “Jawa Barat Istimewa – Lembur Diurus, Kota Ditata”. Visi ini mengandung makna bahwa pembangunan harus berbasis pada unsur-unsur lokal dan unsur kemajuan pembangunan yang lebih makro yang mendorong kemampuan Jawa Barat untuk bersaing dan unggul segala bidang. Visi ini kemudian dijabarkan menjadi 4 (empat) misi pembangunan dengan unsur sumber daya manusia yang berkarakter unggul, ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis lingkungan, pengurangan disparitas pembangunan, dan terakhir adalah masyarakat dan birokrasi yang adaptif.

Visi tersebut di atas, kemudian dirumuskan menjadi langkah-langkah strategis Misi Pembangunan Jawa Barat 2025 – 2029 yang terdiri dari:

- (1). Mewujudkan sumber daya manusia berkarakter unggul
- (2). Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif
- (3). Mengurangi disparitas pembangunan daerah perkotaan perdesaan serta miskin dan kaya
- (4). Mewujudkan masyarakat dan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan, sesuai dengan prinsip *good governance* dan *clean governance*

4. Acuan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang 2045

Visi pembangunan daerah 2029 merupakan bagian dari pencapaian Visi RPJPD Kabupaten Karawang dan pelaksanaannya pada tahap pertama (2025-2029). Visi RPJPD ini sendiri adalah **“Kabupaten Karawang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”**. Sementara itu fokus pada periode 2025 – 2029 adalah (1) pembangunan yang kokoh dengan mendorong kompetitivitas ekonomi, (2) meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangi kemiskinan, dan (3) memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan sesuai kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia yang terdidik dan sehat.

5. Visi Bupati untuk Pembangunan Daerah 2025 – 2029

Terakhir, visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 -2029 mengacu pada visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang terpilih periode 2025 – 2029. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Karawang merupakan penjabaran dan penerjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dengan memperhatikan kaidah perencanaan pembangunan daerah yang berlaku.

3.1.2 Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 diharapkan akan menjadi pandangan masa depan yang akan dapat menyatukan (konsensus) semua pihak dan *stakeholder* di Kabupaten Karawang untuk bekerja sama dalam rangka mencapainya. Visi Kabupaten Karawang tidak hanya menggambarkan sebuah proyeksi namun juga memperlihatkan tantangan yang akan dihadapi dan diatasi untuk mewujudkan gambaran Kabupaten Karawang pada 2029.

Pada konteks di atas, Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029, dirumuskan sebagai berikut:

“Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan”

Secara filosofis, Karawang yang terus bergerak maju sudah menjadi keharusan untuk menuju ke kemakmuran bersama pada segala aspek. Namun demikian kemajuan tersebut tidak hanya diukur dari peningkatan dari kondisi sebelumnya, tetapi harus berarti bahwa Karawang juga bergerak menjadi daerah yang unggul pada berbagai indikator, tidak hanya di lingkup regional, provinsi tetap hingga ke lingkup nasional. Kabupaten Karawang harus menjadi daerah dengan daya saing tinggi untuk dapat memenangkan persaingan secara nasional dan bahkan global. Terakhir, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien.

Unsur pembentuk visi Kabupaten Karawang tersebut kemudian diuraikan sebagai:

Tabel III-1 Unsur Pembentuk Visi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Visi	Unsur Pembentuk	Uraian
	Maju	Mengandung makna menunjukkan aspirasi untuk mengembangkan potensi

Visi	Unsur Pembentuk	Uraian
Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan		ekonomi dan sosial Karawang sehingga menjadi lebih maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya
	Berdaya Saing Tinggi	Mengandung makna untuk meningkatkan daya saing Karawang di tingkat regional, nasional maupun global dalam hal investasi, industri maupun sumber daya manusia. Ini menunjukkan keinginan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan
	Berkelanjutan	Mengandung komitmen jangka panjang untuk melindungi lingkungan, mempromosi penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Visi tersebut di atas hanya akan tercapai dalam 5 (lima) tahun ke depan jika seluruh birokrasi di Pemerintah Kabupaten Karawang serta dengan didukung oleh masyarakat dan *stakeholder* pembangunan lainnya bekerja secara cepat, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya RPJMD ini diharapkan bisa lebih kreatif, inovatif serta tidak lagi "*business as usual*", serta sekaligus menjadi induk atau acuan bagi perencanaan sektoral serta tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.3 Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

Misi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan industri (terutama manufaktur) dan pertanian yang telah menjadi lokomotif utama perkembangan Kabupaten Karawang. Sektor unggulan ini perlu didukung oleh perkembangan sektor lain seperti pariwisata serta jasa dan perdagangan.

Isu besar atau utama dalam pembangunan Kabupaten Karawang adalah memaksimalkan pemanfaatan kedudukan Kabupaten Karawang sebagai simpul penting dalam ekonomi nasional. Kabupaten Karawang merupakan simpul dalam skala nasional sebagai *hinterland* (penyangga) Jakarta, daerah tujuan utama investasi industri, lumbung pangan nasional (dengan keberadaan lahan pertanian dan sistem irigasi teknis), sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan dengan pelayanan hingga ke skala regional,

serta menjadi titik transit penting dalam sistem transportasi nasional (memiliki stasiun jaringan kereta api jarak jauh, dan titik terjauh dalam sistem kereta api komuter Jabodetabek dan memiliki stasiun KCIC). Di sisi lain pemanfaatan peluang atau potensi pengembangan tersebut harus diselaraskan dengan kapasitas dan daya dukung sosial, budaya dan lingkungan yang ada di Kabupaten Karawang. Keseimbangan antara potensi, daya dukung dan limitasi tersebut akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karawang

Upaya menciptakan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Karawang tersebut, dapat dijabarkan menjadi beberapa permasalahan pembangunan Kabupaten Karawang 5 (lima) tahun ke depan, antara lain seperti:

- Alih fungsi yang semakin sulit dikendalikan, terutama pada lahan untuk pertanian dan kegiatan non perkotaan lainnya. Alih fungsi ini akan mengancam ketahanan pangan hingga tingkat nasional dan kekayaan hayati, serta berpotensi menyebabkan bencana hidrologis bagi Kabupaten Karawang sendiri dan wilayah di hulu DAS Citarum
- Laju investasi dan perkembangan industri di Kabupaten Karawang tampaknya belum memiliki dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan terhadap masyarakat setempat. TPAK di Kabupaten Karawang termasuk yang terendah di Jawa Barat. Di sisi lain, laju dan nilai investasi di Kabupaten Karawang termasuk dalam kelompok daerah dengan investasi tertinggi di Jawa Barat
- Tantangan untuk meningkatkan SDM di Kabupaten Karawang. Perkembangan Karawang membutuhkan adanya transformasi masyarakat setempat, baik secara budaya maupun pendidikan. Rendahnya TPAK seperti sudah dijelaskan di atas menunjukkan adanya *mismatch* dalam sistem pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Karawang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ada. Masyarakat Kabupaten Karawang yang tertinggal dan terpinggirkan dalam pembangunan daerah akan membahayakan perkembangan daerah itu sendiri
- Perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata bagi Kabupaten Karawang. Banjir rob, banjir karena luapan DAS Citarum serta kekeringan sudah semakin sering dialami oleh Kabupaten Karawang. Kerentanan terhadap bencana, kebutuhan meningkatkan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sudah menjadi kebutuhan yang mendesak
- Mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas lingkungan hidup juga sudah menjadi kebutuhan mendesak di Kabupaten Karawang. Lingkungan hidup yang baik tidak saja untuk mengimbangi perkembangan industri dan mengantisipasi perubahan iklim, namun juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk tinggal, berusaha dan kegiatan perkotaan di Kabupaten Karawang. Lingkungan yang baik akan meningkatkan daya tarik Kabupaten Karawang sebagai tujuan untuk berusaha, tinggal, bahkan untuk wisata dan pendidikan

- Kondisi Kabupaten Karawang bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan menunjukkan adanya kesejangan yang besar di Kabupaten Karawang. Kesenjangan tersebut pada spektrum yang luas, yaitu mencakup ekonomi, pelayanan dasar termasuk infrastruktur wilayah
- Isu lain yang lebih *advanced* bagi pembangunan Kabupaten Karawang yang berkelanjutan adalah kebutuhan untuk mendukung upaya transisi energi di Kabupaten Karawang termasuk melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Penerapan EBT ini dapat dilakukan ke berbagai sektor seperti penggunaan bahan bakar, penerangan jalan dan lainnya

Tantangan lain dari pembangunan Karawang 5 (lima) tahun ke depan adalah mengejar beberapa “hutang” pembangunan akibat tidak tercapainya beberapa target pembangunan pada RPJMD sebelumnya. Meskipun demikian, sebenarnya kinerja pembangunan jangka menengah periode sebelumnya sudah cukup. Berikut ini adalah isu terkait dengan kinerja pembangunan selama 2019 – 2024:

- Perlu mempertahankan capaian pada beberapa sektor pembangunan yang telah mencapai atau bahkan melampaui target seperti pembangunan pada sektor pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial), penanggulangan bencana (resiliensi) dan tata kelola pemerintahan
- Perlu upaya untuk meningkatkan kinerja beberapa sektor pembangunan yang cukup baik kinerjanya namun belum mencapai target seperti lingkungan hidup dan infrastruktur wilayah
- Serta perlu upaya yang keras untuk meningkatkan kinerja sektor pembangunan yang relatif jauh capaiannya terhadap target, terutama pada sektor yang terkait dengan ekonomi

Pembangunan ekonomi tersebut di atas diharapkan akan melibatkan UMKM setempat dalam rantai pasok ekonomi dan industri di Karawang. Selanjutnya kegiatan usaha tersebut perlu didukung oleh sistem perizinan, layanan termasuk kepastian hukum, sehingga pada akhirnya akan terbentuk ekosistem usaha yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

Pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Karawang harus bertumpu pada SDM yang berkualitas. Daya saing ekonomi juga perlu didukung oleh sistem infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata sehingga menjamin adanya konektivitas wilayah. Keberlanjutan dipastikan dengan menjadikan Kabupaten Karawang sebagai daerah yang berketahanan pada konteks perlindungan lingkungan, penanggulangan bencana serta kapasitas dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Misi pembangunan Kabupaten Karawang tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2025 – 2029 pada RPJPD Kabupaten Karawang 2025 – 2045, termasuk menjaga konsistensi dengan Asta Cita yang ada di RPJMN 2025-2029.

Berikut ini adalah rumusan lengkap dari misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter

Sumber daya manusia adalah input terbaik bagi pembangunan manusia. Tanpa penyiapan kualitas manusia di daerahnya, maka pembangunan dan kemudian pertumbuhan yang terjadi tidak akan mengikutsertakan masyarakat setempat dan akhirnya justru menimbulkan permasalahan sosial. Sektor-sektor yang akan dikembangkan seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata dan sektor lainnya akan membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia Karawang yang berkualitas.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan investasi yang besar dan berjangka panjang. Namun harus dilakukan karena, keluaran atau hasil dari investasi tersebut adalah SDM yang berkualitas yang menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pembangunan Kabupaten Karawang yang berkelanjutan. Peningkatan kualitas manusia tersebut dapat dicapai dengan menyediakan layanan pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karawang.

Kabupaten Karawang juga memiliki banyak kekhasan sosial dan budaya serta bentuk lokalitas lainnya. Kekhasan tersebut harus perhatian utama saat pembangunan daerah dilaksanakan, sehingga akan terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Di sisi lain, SDM Kabupaten Karawang juga menghadapi tantangan akibat perubahan zaman, globalisasi termasuk perkembangan teknologi (kecerdasan buatan).

2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi

Penyediaan infrastruktur, sarana dan fasilitas kewilayahan yang baik akan berefek luas dan berganda terhadap proses pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana harus dijadikan prasyarat bagi kemajuan daerah, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Karawang juga akan lebih menarik bagi investasi jika memiliki daya dukung prasarana dan sarana yang memadai.

Sistem prasarana dan sarana yang baik, khususnya transportasi secara langsung akan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha maupun rumah tangga. Penurunan pengeluaran ini akan mendorong masyarakat untuk bisa menggunakan anggarannya ke jenis pengeluaran produktif maupun konsumsi lainnya, sehingga secara berantai ekonomi akan hidup dan tumbuh.

Pengembangan ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan lainnya perlu diwadahi dalam sistem perkotaan dan perdesaan yang efisien dan memiliki daya dukung yang memadai. Kegiatan pembangunan tersebut juga perlu didukung oleh

kapasitas prasarana dan sarana wilayah yang mencukupi. Prasarana dan sarana tersebut mencakup energi, telekomunikasi, internet, transportasi, sistem utilitas dan lainnya.

Sistem infrastruktur wilayah di Kabupaten Karawang juga harus didesain secara inklusif agar bisa dimanfaatkan seluas mungkin oleh seluruh masyarakat. Secara fisik, desain infrastruktur harus mudah digunakan oleh kelompok anak, perempuan, masyarakat lanjut usia hingga kelompok disabilitas.

Infrastruktur dan sistem transportasi yang baik juga akan menjamin akses masyarakat ke pusat pelayanan yang ada. Sistem ini diharapkan juga akan mengatasi kesenjangan wilayah serta memperkuat konektivitas antar wilayah di dalam Kabupaten Karawang serta antara Kabupaten Karawang dengan wilayah lain, terutama dengan memanfaatkan KJCB, kereta api dan jalan tol.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif

Pengembangan ekonomi di Karawang tidak hanya menghasilkan ekonomi yang tumbuh dan melibatkan modal serta pelaku usaha besar, namun juga dikembangkan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten Karawang serta memberikan dampak bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan ekonomi di Kabupaten Karawang akan fokus pada 2 (dua) sektor unggulan (yang sudah berkembang dan menjadi basis selama ini), yaitu industri (yang melibatkan investasi besar dan merupakan industri manufaktur) dan pertanian. Sektor-sektor lainnya yang terkait juga harus ikut berkembang agar dapat terjadi keterkaitan usaha (rantai bisnis atau rantai pasok) di Kabupaten Karawang sehingga daerah setempat dapat menikmati nilai tambahnya.

Pengembangan rantai pasok dalam sistem ekonomi lokal menjadi sangat penting. Rantai pasok tersebut dapat berwujud antara industri manufaktur yang ada dengan UMKM atau IKM setempat, sebagai pemasok komponen maupun terlibat dalam kegiatan ikutan lainnya. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata juga harus dikembangkan hingga skala industri dan saling melibatkan dengan UMKM setempat. Diharapkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Karawang akan menjadi sebuah ekosistem dan satu rantai pasok yang lengkap.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga ditentukan adanya keterlibatan UMKM dalam ekonomi daerah. Keberlanjutan juga dapat dibangun jika lingkungan tetap terjaga dan terjadi pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang harus sebanding dengan pembukaan lapangan kerja secara luas dan menurunkan tingkat kemiskinan setempat.

Usaha padat modal dan UMKM perlu dikembangkan sebagai klaster ekonomi yang saling terkait. Oleh sebab itu Kabupaten Karawang harus terbuka dan ramah terhadap investasi. Para investor dan pelaku usaha juga harus dijamin keamanan

dan kepastian hukumnya. Pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari adanya partisipasi kuat dari UMKM serta kepercayaan investor yang kuat sekaligus juga akan menunjukkan daya saing daerah.

4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Karawang memiliki kekhasan karena kondisi fisik lingkungannya. Oleh sebab itu maka pembangunan setempat juga tetap harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi Kabupaten Karawang yang tangguh menghadapi bencana (resilien).

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, pembangunan di Kabupaten Karawang harus dilakukan dengan prinsip-prinsip hijau, ramah lingkungan menuju ke pembangunan yang berkelanjutan dan resilien. Pembangunan di Karawang harus pada konteks melindungi lingkungan, mempromosi penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keseimbangan ekologis dan kualitas hidup masyarakat.

5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah tingkat kepuasan masyarakat dan swasta serta pihak lain atas pelayanan yang diberikan, penilaian yang diberikan oleh lembaga berwenang atas tata kelola keuangan daerah serta tingkat kebocoran keuangan negara yang semakin rendah. Untuk itu maka perlu diciptakan organisasi pemerintahan daerah yang sesuai dengan tantangan, kinerja aparatur yang profesional dan bersih, dengan didukung oleh sistem teknologi informasi yang memadai.

Misi pembangunan Kabupaten Karawang ini diharapkan menjadi upaya dasar dan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Berikut ini adalah gambaran kesesuaian antara isu strategis daerah dengan Misi Pembangunan tersebut.

Tabel III-2 Keterkaitan Misi Pembangunan Daerah dan Isu Strategis

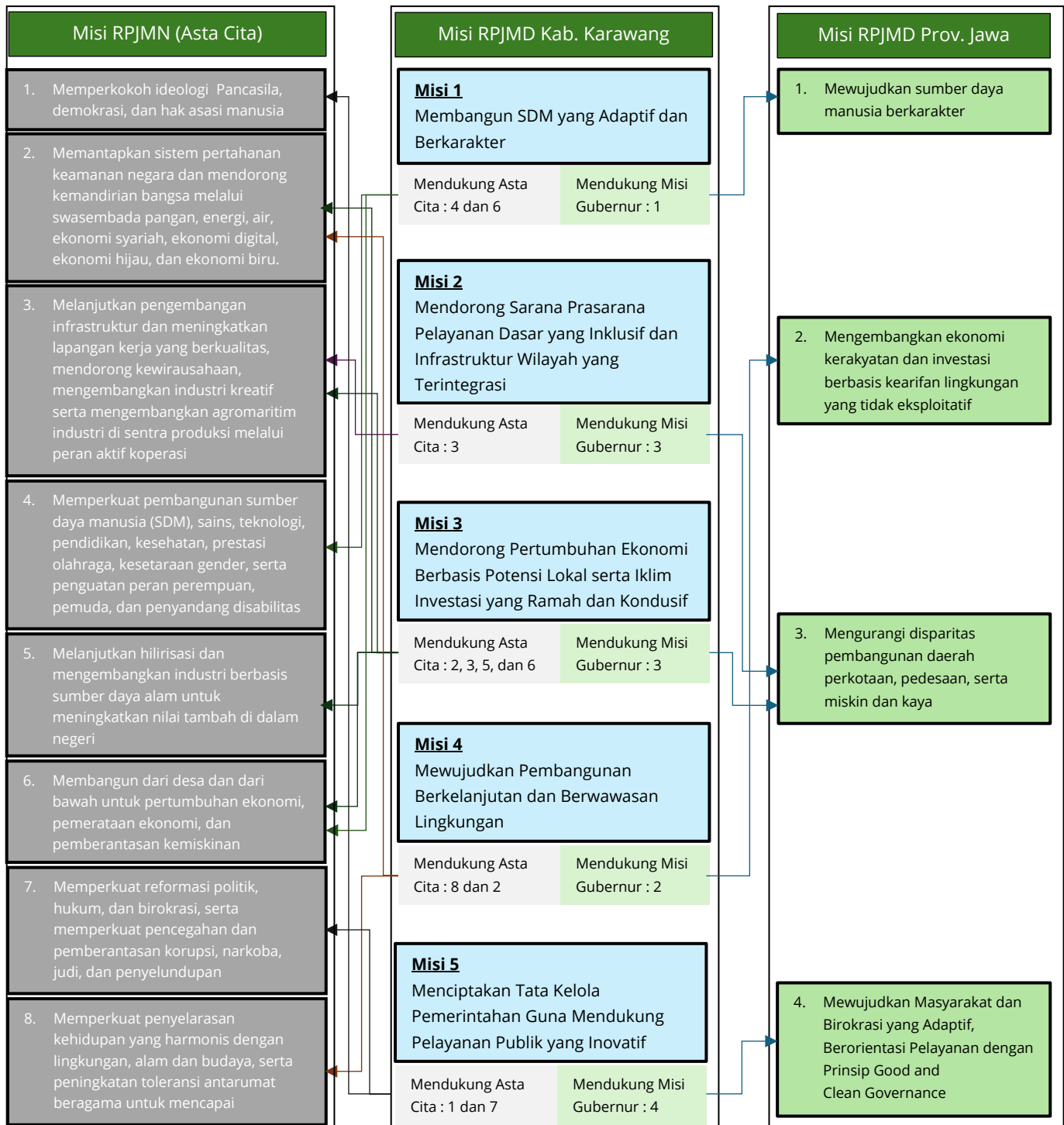
No	Misi Pembangunan	Keterkaitan dengan Isu Strategis Daerah
1	Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter	Pengembangan SDM masih belum optimal, terutama dalam hal terjadi <i>mismatch</i> antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, serta belum terjadi transformasi yang dibutuhkan untuk menjadi masyarakat yang maju, modern dan inklusif
2	Misi 2 : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	Kabupaten Karawang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk perubahan iklim. Banjir rob, banjir karena luapan DAS Citarum serta kekeringan sudah semakin sering dialami oleh Kabupaten Karawang

No	Misi Pembangunan	Keterkaitan dengan Isu Strategis Daerah
		- Terjadi kesenjangan pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah di Kabupaten Karawang antara Karawang bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan - Transisi energi di berbagai sektor pembangunan masih belum berjalan dengan optimal
3	Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	- Laju investasi dan perkembangan industri belum memiliki dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan terhadap masyarakat setempat - Terjadi kesenjangan ekonomi antara Karawang bagian utara, bagian tengah dan bagian selatan - Ekosistem ekonomi daerah belum berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. UMKM setempat belum dapat berperan penting dalam sistem rantai pasok ekonomi dan industri di Kabupaten Karawang
4	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	- Alih fungsi yang semakin sulit dikendalikan, yang akan mengancam ketahanan pangan, kekayaan hayati, bencana hidrologis bagi Karawang sendiri dan wilayah di hulu DAS Citarum - Kabupaten Karawang masih belum memiliki kapasitas yang cukup untuk perubahan iklim. Banjir rob, banjir karena luapan DAS Citarum serta kekeringan sudah semakin sering dialami oleh Kabupaten Karawang - Lingkungan hidup di Kabupaten Karawang terus mendapat tekanan dan berpotensi semakin terdegradasi - Transisi energi di berbagai sektor pembangunan masih belum berjalan dengan optimal
5	Misi 5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	Birokrasi daerah masih perlu didorong untuk lebih responsif terhadap segala permasalahan dan kebutuhan pelayanan masyarakat, akuntabel dan <i>agile</i>

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Selanjutnya visi dan misi pembangunan di level nasional, provinsi dan daerah perlu dijaga keterkaitannya. Berikut ini adalah persandingan antara visi dan misi dalam

RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Karawang sebagai bentuk kesinambungan arah pembangunan di antara ketiganya.



Gambar III-1 Kesinambungan Arah Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029

3.2.1 Dasar Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang merupakan pendefinisian setiap misi pembangunan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Rumusan tentang yang akan dicapai atau diwujudkan dalam misi tersebut merupakan tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini juga harus sejalan dan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2045, khususnya pada periode 2025 – 2045.

Tujuan pada dasarnya menggambarkan “apa” yang hendak diubah atau dicapai dari sebuah pernyataan misi. Tujuan ini kemudian perlu dijabarkan agar menjadi semakin operasional. Setiap tujuan dapat diterjemahkan menjadi satu atau beberapa sasaran. Sasaran ini menggambarkan dampak yang diinginkan dari setiap perubahan yang dihasilkan dalam rumusan tujuan sebelumnya. Selanjutnya tujuan dan sasaran ini merupakan akumulasi dari *outcome* dari beberapa program pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai penjabaran dari setiap sasaran ini.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang Tahap I pada RPJPD Kabupaten Karawang 2025 – 2045 memiliki tema “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah”. Tema ini diterjemahkan lebih lanjut menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Karawang yang kokoh dengan mendorong kompetitivitas ekonomi Kabupaten Karawang, meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengurangi kemiskinan, memperhatikan pendidikan dan kesehatan yang merata, adil, dan sesuai kebutuhan untuk memperkuat sumber daya manusia yang terdidik dan sehat”.

Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang tersebut di atas pada Tahap I kemudian dirinci sebagai berikut:

- Penguatan pelayanan dasar melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat dalam rangka pembentukan sumber daya manusia daerah yang unggul, antara lain mencakup peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan program kesehatan preventif dan promotif kesehatan, penyediaan jaminan kualitas pendidikan yang berkelanjutan, peningkatan kewirausahaan, dukungan bagi mobilitas penduduk dan perlindungan sosial
- Pembentukan dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan fokus pada penguatan tata kelola potensi lokal, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia
- Peningkatan tata kelola pemerintahan dengan layanan berbasis kebutuhan masyarakat, yang mencakup pengembangan kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat, penyediaan platform komunikasi yang transparan dan interaktif

antara pemerintah dan masyarakat, penyediaan akses informasi yang jelas dan mudah, serta optimalisasi pelayanan yang tidak birokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

- Penyelenggaraan penguatan penanaman nilai-nilai ideologi dan integritas dalam pemerintahan, dengan pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada nilai ideologi Pancasila dan *core value* ASN, penciptaan budaya kerja, penyediaan sistem penghargaan dan sanksi, memperkuat sistem pengawasan dan mengembangkan sistem pemantauan yang efektif, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karawang yang berintegritas dan akuntabel dan mampu menjaga iklim ekonomi yang kondusif
- Perlindungan nilai dan tradisi kebudayaan lokal serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memastikan pengelolaan lingkungan yang efektif, dalam rangka mewujudkan yang beradab, berbudaya, maju dan berwawasan lingkungan, dengan memperkuat dokumentasi nilai dan tradisi kebudayaan lokal, edukasi dan pelatihan bagi masyarakat terkait dengan kebudayaan lokal, implementasi kebijakan lingkungan hidup, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup
- Peningkatan pemerataan infrastruktur wilayah yang terintegrasi, dengan memperhatikan kesetaraan, keberlanjutan, dan dampak sosial, melalui pengenalan yang baik tentang kebutuhan infrastruktur di setiap wilayah, penetapan prioritas kebijakan infrastruktur berdasarkan kebutuhan, perencanaan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan terintegrasi, pengembangan integrasi antarinfrastruktur, fokus pada wilayah yang mengalami keterbatasan infrastruktur, serta penerapan prinsip keberlanjutan dan efisiensi biaya dalam pembangunan infrastruktur
- Penyediaan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan upaya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar, menghitung kebutuhan penyediaan sarana dan sarana untuk memenuhi standar minimal, pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan SPM, penyediaan sistem monitoring dan evaluasi, implementasi program khusus untuk penyediaan sarana dan prasarana di daerah yang tertinggal, penerapan kebijakan dan insentif untuk mendorong investasi di bidang penyediaan sarana dan prasarana dasar
- Penyelenggaraan ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan membangun ketahanan sosial dan memperkuat jaringan sosial dan dukungan komunitas, pengembangan program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan strategi untuk mendukung ketahanan ekonomi, menyediakan dukungan bagi UMKM, menyediakan kebijakan untuk mendukung konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem, penerapan praktik pembangunan yang ramah

lingkungan, peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam tata kelola dan adopsi sistem informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang baik

3.2.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karawang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029, dengan memperhatikan Arah Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2045, khususnya pada periode 5 (lima) tahun pertama. Dengan demikian maka rumusan dan tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 5 (lima) tahun ke depan dirumuskan sebagai perwujudan dari misi pembangunan tersebut.

Berikut ini adalah konsep tujuan dan sasaran dalam kerangka perwujudan misi pembangunan daerah tersebut :

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka Perwujudan Misi “Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter”

Dalam kerangka pencapaian misi pembangunan di Karawang yang pertama ini dapat digambarkan rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut.

Tabel III-3 Kerangka Penjabaran Misi 1 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi 1	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter	Peningkatan kualitas pendidikan	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan sasaran: (a). Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan (b). Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	Penyediaan akses pendidikan di seluruh wilayah dan bagi seluruh kelompok masyarakat	
	Peningkatan kualitas pendidikan	
	Perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan untuk seluruh wilayah dan kelompok masyarakat	
	Penyediaan perlindungan sosial dan ketahanan keluarga bagi masyarakat	Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat
	Penguatan budaya, kearifan lokal, kelembagaan masyarakat dan modal sosial lainnya	
	Penegakan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat (termasuk dalam penanggulangan bencana)	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka Perwujudan Misi “Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi”

Penjabaran misi kedua dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel III-4 Kerangka Penjabaran Misi 2 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi 2	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	Menciptakan kawasan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi perdesaan sebagai wadah yang efisien dan efektif untuk kegiatan pembangunan daerah yang inklusif dan terkoneksi dalam satu sistem pergerakan wilayah	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial, dengan sasaran: (a). Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah (b). Meningkatnya Konektivitas Wilayah
	Penyediaan infrastruktur perdesaan, termasuk wilayah sub-urban dan sekitar perkotaan	
	Penyediaan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya berupa jaringan jalan, pengolahan limbah dan air minum	
	Pemenuhan kebutuhan sarana ekonomi dan sistem teknologi informasi	
	Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan sosial, seni dan budaya	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka Perwujudan Misi “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif”

Kerangka penjabaran misi ketiga ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-5 Kerangka Penjabaran Misi 3 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi 3	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	Penyelenggaraan promosi potensi daerah, pelayanan investasi yang prima dan penyediaan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan, dengan sasaran : (a). Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan (b). Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal
	Pengembangan ekonomi lokal, ekonomi skala mikro dan kecil serta kewirausahaan	
	Penyiapan tenaga kerja setempat untuk dapat memasuki pasar kerja. Hal ini untuk memastikan agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih	

Misi 3	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	inklusif dengan keterlibatan tenaga kerja lokal	(c). Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing
	Pengembangan ekonomi pada sektor utama (industri, pertanian, pariwisata dan perdagangan) dan sektor ekonomi lainnya menjadi ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan	(d). Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi
	Pemerataan hasil pembangunan ekonomi dan penurunan kemiskinan	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka Perwujudan Misi “Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”

Berikut ini adalah penjabaran dari misi keempat ini.

Tabel III-6 Kerangka Penjabaran Misi 4 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi 4	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Pengarusutamaan kesadaran dan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampaknya, serta ketahanan kota/daerah	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran: (a). Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (b). Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten
	Peningkatan kualitas lingkungan yang mencakup preservasi, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, serta transformasi menuju ke penggunaan energi hijau (baru dan terbarukan)	
	Penguatan manajemen dan penanggulangan bencana menuju Karawang yang berketahanan	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah dalam rangka Perwujudan Misi “Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif

Pencapaian misi kelima ini memerlukan penjabaran langkah-langkah seperti pada tabel berikut.

Tabel III-7 Kerangka Penjabaran Misi 5 Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi 5	Langkah Penjabaran	Konsep Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah secara berkelanjutan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan
	Penyediaan dan perbaikan standar, mekanisme dan prosedur kerja setiap unit kerja di organisasi pemerintahan daerah	
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan kinerja keuangan daerah	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 dikonsepkan sebagai kerangka logis pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Karawang. Konsep ini dapat diuraikan **Tabel III-9**. Sementara itu secara lebih rinci, rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029, yang dilengkapi dengan indikator dan target capaian indikator, dapat dilihat pada Tabel III-10.

Tabel III-8 Kerangka Pencapaian Misi Pembangunan Kabupaten Karawang

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Apa yang ingin diubah dengan adanya Misi		Dampak apa yang diharapkan dari perubahan yang akan dihasilkan	
Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas pembangunan pendidikanMeningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan
	Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat. <i>Perlindungan sosial prasyarat dasar ini dibutuhkan agar upaya peningkatan kualitas SDM dapat berjalan tanpa ancaman akibat diskriminasi, kemiskinan, kelaparan dan lainnya</i>	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial
Misi 2 Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses
			Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah
Misi 3 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence Under Nourishment</i>)

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	Apa yang ingin diubah dengan adanya Misi		Dampak apa yang diharapkan dari perubahan yang akan dihasilkan	
			Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan
				Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB
			Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
			Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
			Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana
Misi 5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Tabel III-9 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Ket.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan											
Misi 1 Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter	1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	73,82	74,06	74,65	74,67	75,09	75,48	75,88	
		1.1.1 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pendidikan	Indeks Pendidikan	60,75	61,01	61,29	61,54	61,77	62,05	62,31	
		1.1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	84,88	86,04	87,21	88,37	89,53	90,69	91,86	
	1.2	Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	7,86	7,5	7,22	6,16-6,72	5,89-6,45	5,58-6,15	5,2-5,76	
		1.2.1 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial	56,84	57,84	58,84	59,84	60,84	61,84	62,84	
Misi 2 Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	2.1	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Indeks Pembangunan Infrastruktur	62,82	54,45	58,65	64,16	69,84	75,75	82,41	
		2.1.1 Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	Capaian Universal Akses	70,14	36,68	40,28	44,73	51,12	57,94	66,74	
		2.1.2 Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	68,80	73,09	75,76	79,96	84,28	88,74	93,33	
Misi 3 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	3.1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,20	5,28-5,69	6,14	5,47-7,41	5,51-7,56	5,69-7,88	5,74-6,24	
		3.1.1 Meningkatkan Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,71	2,36	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47	
			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	5,10	4,20	4,05	3,86	3,65	3,42	3,13	
		3.1.2 Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	Rasio PDRB Industri Pengolahan	69,91	70,78	70,73	70,68	70,64	70,59	70,55	
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	9,81	10,20	10,61	11,03	11,47	11,93	12,41	



Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun						Ket.
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.1.3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	1,32	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	
		3.1.4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,04	8,04	7,06	7,72-8,43	7,68 - 8,4	7,66-8,37	7,61-8,32	
Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	4.1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup		Penurunan Intensitas Emisi GRK	N/A	3,34	3,53	3,72	3,96	4,21	4,41	
		4.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,34	44,53	44,82	45,11	45,4	45,7	45,99	
		4.1.2	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	Indeks Risiko Bencana	142,06	142,06	142,05	142,04	142,03	142,02	142,01	
Misi 5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	5.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	84,09	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50	
		5.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	73,29	73,50	73,75	74,00	74,25	74,50	74,75	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

3.3 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

3.3.1 Konsep Pengembangan Arah Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029 dikonsepsikan sebagai garis pilihan kebijakan yang menjadi pedoman umum bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk mewujudkan atau mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan. Sebagai pedoman, maka arah kebijakan ini akan (1) bersifat makro, normatif, dan konseptual, kemudian (2) menunjukkan "*ke mana*" pembangunan Kabupaten Karawang akan diarahkan, serta (3) memberikan fokus pada isu prioritas pembangunan.

Isu prioritas tersebut di atas pada dasarnya memberikan lingkungan strategis bagi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pelaksanaan dan pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan ini akan sangat bergantung pada pengenalan dan respon terhadap lingkungan strategisnya.

Lingkungan strategis (peluang dan tantangan) pembangunan Kabupaten Karawang saat ini hingga 5 (lima) tahun ke depan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kabupaten Karawang menghadapi perubahan atau alih fungsi lahan yang sangat besar dan cenderung sulit untuk dikendalikan. Alih fungsi lahan ini terutama mengancam lahan pertanian dan lahan terbuka lainnya, dan berubah menjadi kawasan peruntukan perumahan, industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan perkotaan lainnya. Alih fungsi ini akan mengancam kapasitas Kabupaten Karawang sebagai pusat produksi pangan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga berpotensi meningkatkan ancaman bencana alam dan juga menimbulkan konflik sosial
2. Kabupaten Karawang telah menjadi tujuan investasi yang menarik (peringkat dua di Jawa Barat). Laju dan angka realisasi investasi di Kabupaten Karawang juga menunjukkan angka yang tinggi. Namun di sisi lain, capaian berupa angka realisasi dan pertumbuhan investasi tersebut masih belum linear dengan dampaknya (*multiplier effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Sebagai contoh, angka TPAK di Kabupaten Karawang masih rendah
3. Pengelolaan SDM di Kabupaten Karawang masih memiliki tantangan yang besar. Saat ini masih terjadi *mismatch* antara kualitas SDM (sebagai output dari pembangunan pendidikan dan sektor lain terkait peningkatan kapasitas SDM) dengan kebutuhan tenaga kerja oleh sektor industri, termasuk kebutuhan Kabupaten Karawang untuk bertransformasi menuju ke masyarakat perkotaan dan menjadi unggul dalam persaingan antarwilayah
4. Isu-isu lain yang juga berkaitan dengan isu utama di atas, yaitu:
 - Kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

- Kebutuhan mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan (pada konteks resilien dan daya tarik daerah)
- Disparitas ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur wilayah

Arah kebijakan pembangunan dirumuskan pada kerangka penjabaran arah pembangunan periode 2025 – 2029 pada RPJPD Kabupaten Karawang 2025 – 2045, yaitu penguatan landasan pembangunan daerah Kabupaten Karawang, dalam rangka menuju ke “Kabupaten Karawang Unggul, Maju dan Berkelanjutan”. Terdapat 8 (delapan) aspek yang teridentifikasi dalam kerangka penguatan landasan pembangunan tersebut, yaitu:

1. Pelayanan dasar yang berkualitas, yang mencakup pelayanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial
2. Perluasan lapangan kerja dan penguatan kompetensi SDM
3. Tata kelola pemerintahan dengan kapasitas pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
4. Nilai-nilai ideologis dan integritas dalam pemerintahan
5. Nilai lokal tradisi dan kebudayaan serta lingkungan hidup
6. Infrastruktur wilayah yang merata dan terintegrasi
7. Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang sesuai SPM
8. Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan, yang juga memberikan penekanan pada keberlanjutan

Agar lebih dapat dilaksanakan maka arah kebijakan pembangunan ini kemudian dirumuskan dengan memperhatikan 4 (empat) perspektif berikut:

1. Perspektif masyarakat, di mana kebijakan harus jelas menentukan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, serta yang kebutuhan dan aspirasinya
2. Perspektif internal birokrasi, yaitu kebijakan harus memperhatikan dan mendorong adanya proses inovasi, kreativitas dan pengembangan nilai kerja di dalam organisasi birokrasi pemerintah daerah
3. Perspektif kelembagaan, yaitu kebijakan juga harus berorientasi pada upaya dan manfaat pengembangan kualitas SDM, penyiapan sistem, perbaikan kinerja dan penggunaan teknologi informasi secara luas dan berkelanjutan
4. Perspektif anggaran, di mana kebijakan harus memastikan adanya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan kemudian pengelolaan anggaran secara berkelanjutan

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah diwujudkan dalam langkah-langkah yang lebih operasional serta memberikan jawaban tentang “bagaimana” arah pembangunan dilaksanakan. Perwujudan arah kebijakan pembangunan ini dirumuskan sebagai strategi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan ini merupakan strategi pencapaian dari tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Karawang. Strategi dalam hal ini merupakan rujukan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Karawang dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Secara konseptual strategi ini dirumuskan dengan memandang tujuan dan sasaran pembangunan sebagai sebuah satu kesatuan. Sehingga kemudian rumusan strategi yang dihasilkan juga merupakan satu rangkaian tindakan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah 2025 – 2029. Satu strategi dapat saja terhubung secara spesifik dengan satu tujuan atau sasaran. Namun dapat juga satu strategi terkait dengan beberapa tujuan atau sasaran sekaligus.

Periode pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029, merupakan tahapan pertama dari RPJPD Kabupaten Karawang 2025 – 2045. Tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Karawang ini difokuskan pada penguatan landasan pembangunan daerah. Strategi pembangunan Kabupaten Karawang perlu harus didudukkan pada kerangka fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang jangka panjang tersebut.

Aspek-aspek penguatan landasan pembangunan daerah pada periode 2025 – 2029 tersebut adalah:

- Pelayanan dasar yang berkualitas
- Perluasan lapangan kerja dan penguatan kompetensi SDM
- Tata kelola pemerintahan dengan kapasitas pelayanan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- Nilai-nilai ideologis dan integritas dalam pemerintahan
- Nilai lokal tradisi dan kebudayaan serta lingkungan hidup
- Infrastruktur wilayah yang merata dan terintegrasi
- Sarana dan prasarana pelayanan dasar yang sesuai SPM
- Ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Karawang ini kemudian dapat menjadi acuan atau arahan dalam penentuan program pembangunan Kabupaten Karawang. Program pembangunan ini merupakan dukungan atau penjabaran dari arah kebijakan dan strategi pembangunan tersebut. Rumusan program pembangunan ini mengacu pada nomenklatur sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terakhir strategi pembangunan daerah akan dijabarkan menjadi program pembangunan daerah, sebagai instrumen kebijakan yang berisi upaya atau langkah yang lebih nyata yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai strategi pembangunan daerah. Program ini akan memiliki outcome sebagai capaiannya dan lebih terukur, serta akan dijabarkan menjadi kegiatan dan subkegiatan oleh perangkat yang menjadi pengampu program tersebut.

Rumusan program penjabaran strategi pembangunan daerah ini harus bersifat strategis, memiliki daya ungkit untuk program pembangunan lainnya, menjadi fokus pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta akan menjadi input dalam penyusunan program prioritas daerah.

3.3.2 Rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Karawang

Berikut ini adalah rumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029. serta rincian program pendukung atau penjabarannya.

Tabel III-10 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan		Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan	
Misi 1 : Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter					
1.1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas				
	1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan	(1). Peningkatan penyelenggaraan pendidikan daerah untuk menghasilkan SDM daerah yang berkualitas dan berkompeten	(1). Meningkatkan akses serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan daerah	(1). Program Pengelolaan Pendidikan
				(2). Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang inklusif dan berkelanjutan	
	1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	(1). Peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih tinggi	(1). Mewujudkan budaya hidup sehat dan kecukupan makanan bergizi pada masyarakat	(2). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (3). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				(2). Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan kesehatan pada siklus hidup manusia	
1.2	Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat				
1.2.1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat	(1). Penyediaan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat	(1). Meningkatkan kapasitas sistem jaminan sosial yang luas, merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat	(4). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (5). Program Penanganan Bencana	

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
				(2). Menyediakan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak dasar (kesehatan, pendidikan, hunian layak dan murah serta hak dasar lainnya) bagi berbagai kelompok rentan dan seluruh masyarakat lainnya secara merata dalam rangka pembentukan masyarakat yang sejahtera	
			(2). Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan	(1). Menyediakan fasilitas pemberdayaan pemuda dan perempuan	(6). Program Peningkatan Kualitas Keluarga (7). Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
				(2). Membentuk ketahanan sosial pada masyarakat dan keluarga	
Misi 2 : Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi					
2.1	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial				
	2.1.1	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah	(1). Penyediaan infrastruktur, penataan dan pengelolaan kawasan dalam rangka mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang efisien dan inklusif	(1). Menyediakan infrastruktur wilayah yang terintegrasi, efisien dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan kawasan perkotaan dan perdesaan	(8). Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase (9). Program Pengelolaan dan Pengembangan

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
				(2). Meningkatkan keterpaduan dan tertib tata ruang wilayah	Sistem Penyediaan Air Minum
				(3). Menciptakan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan	(10). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (11). Program Kawasan Permukiman (12). Program Pengembangan Perumahan
	2.1.2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	(1). Peningkatan sistem pergerakan atau distribusi penumpang dan barang secara terintegrasi dan efisien	(1). Membangun jaringan jalan di seluruh wilayah dan terintegrasi dengan sistem jaringan jalan dan rel nasional dan regional	(13). Program Penyelenggaraan Jalan (14). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				(2). Menyediakan sistem transportasi untuk penumpang dan barang yang melayani seluruh wilayah dan terintegrasi dengan sistem transportasi nasional dan regional	
Misi 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif					
3.1	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan				
	3.1.1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna	(1). Pengembangan dan revitalisasi sektor pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan kontribusi	(1). Meningkatkan ekosistem usaha pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan produksi, nilai tambah dan kontribusi sektor	(15). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
		Mendukung Ketahanan Pangan	kedua sektor ke ekonomi daerah dan mendukung ketahanan pangan	pertanian dan perikanan terhadap ekonomi daerah	(16). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (17). Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (18). Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				(2). Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang bersumber pada pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan setempat	
	3.1.2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal	(1). Peningkatan investasi sektor industri, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan dan revitalisasi sektor industri, termasuk pengembangan ekosistem dan rantai pasok usaha industri dan sektor ekonomi lainnya	(1). Meningkatkan kualitas dan efektivitas promosi investasi di bidang industri yang didukung oleh iklim dan layanan investasi untuk industri dan ekosistem pendukungnya, termasuk sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, pariwisata, perdagangan dan pengembangan kawasan perkotaan	(19). Program Promosi Penanaman Modal (20). Program Pengendalian Izin Usaha Industri (21). Program Pengembangan Ekspor (22). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha mikro (UMKM)
				(2). Fasilitasi pengembangan industri yang bernilai tambah tinggi, mendukung ekonomi hijau, serta memiliki multiplier terhadap kesejahteraan masyarakat	

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
				(3). Fasilitas iklim perdagangan daerah terutama untuk mendukung ekspor	
				(4). Mengembangkan potensi UMKM, BUMD, BUMDes, dan koperasi serta wirausaha daerah untuk menjadi bagian rantai pasok kegiatan usaha di daerah	
	3.1.3	Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing	(1). Percepatan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan MICE	(1). Meningkatkan daya tarik dan destinasi pariwisata berbasis alam, warisan sejarah, budaya dan perkotaan dan MICE	(23). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (24). Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif (25). Program Pemasaran Pariwisata
				(2). Mengembangkan nilai budaya dan seni lokal serta kreativitas para pelaku di bidang budaya dan pariwisata	
				(3). Mengembangkan ekosistem pariwisata daerah yang berkelanjutan	
				(4). Memperkuat kapasitas promosi pariwisata daerah	

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan			Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
	3.1.4	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Tersempit dalam Kegiatan Ekonomi	(1). Peningkatan layanan pasar kerja dan akses tenaga kerja lokal ke kesempatan kerja yang adil Kabupaten Karawang	(1). Meningkatkan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja lokal untuk mengakses kesempatan kerja yang ada	(26). Program Penempatan Tenaga Kerja
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan					
4.1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup				
	4.1.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	(1). Peningkatan kapasitas perlindungan lingkungan hidup daerah	(1). Meningkatkan kapasitas perlindungan kualitas udara, ekosistem pesisir, daerah aliran sungai dan kawasan penyangga serta kawasan kritis lainnya (2). Meningkatkan kapasitas pemeliharaan kualitas lingkungan	(27). Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (28). Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (29). Program Pengelolaan Persampahan
	4.1.2	Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten	(1). Penguatan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karawang	(1). Meningkatkan kapasitas teknis dan manajemen penanggulangan bencana	(30). Program Penanggulangan Bencana

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan		Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Pembangunan	Program Penjabaran Strategi Pembangunan
Misi 5 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif				
5.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
5.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan	(1). Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang	(1). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dan manajemen pemerintahan daerah (2). Meningkatkan kualitas pelayanan publik (3). Meningkatkan kapasitas pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (4). Mengembangkan inovasi dalam pembiayaan dan perluasan sumber penerimaan daerah	(31). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (32). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (33). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah (34). Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (35). Program Aplikasi Informatika (36). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

3.3.3 Pentahapan Pembangunan Kabupaten Karawang

Strategi merupakan rangkaian pilihan tindakan yang membentuk skenario pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan. Strategi juga menjadi acuan dalam perumusan tema pembangunan tahunan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan lingkungan strategis dan rumusan strategi pembangunan Kabupaten Karawang 2025 – 2029 di atas, maka pembangunan Kabupaten Karawang dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilaksanakan dengan tema-tema yang berbeda pada setiap tahun di periode tersebut. Tema ini akan ditentukan berdasarkan aspek-aspek dalam kerangka penguatan landasan pembangunan daerah, serta tingkat kebutuhan penanganan isu strategis daerah. Mengingat tahun 2025 sudah berjalan dan RPJMD ini akan efektif berlaku pada 2026, maka penahapan ini sendiri akan dirumuskan untuk tahun 2026 hingga 2030.

Tahun pertama (2026) pada pembangunan jangka menengah Kabupaten Karawang tampaknya perlu difokuskan pada penguatan kualitas dan kapasitas SDM, terutama agar dapat mengakses ke pasar kerja setempat yang saat ini didominasi oleh kebutuhan sektor industri dan perkotaan lainnya. Kabupaten Karawang juga harus segera menyiapkan SDM setempat agar siap menyongsong transformasi Kabupaten Karawang menjadi wilayah perkotaan dan modern. Kesiapan SDM ini menjadi landasan dan sekaligus prasyarat Kabupaten Karawang yang maju dan unggul.

Penguatan kapasitas SDM ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan, dan perlu dilakukan hingga beberapa tahun setelah 2026. Pada tahun 2027 (tahun kedua), tema pembangunan difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas, merata dan terintegrasi. Infrastruktur ini termasuk pengembangan sistem informasi dan digitalisasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan lainnya. Pembangunan infrastruktur yang merata ini akan semakin menurunkan disparitas pembangunan sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah. Konektivitas ini akan menjamin distribusi dan sirkulasi orang, logistik dan hasil produksi masyarakat. Sarana dan prasarana yang perlu disediakan untuk konektivitas ini adalah sistem transportasi yang terintegrasi, baik untuk orang maupun barang, serta pengembangan TOD.

Kemudian pada tahun ketiga dalam 5 (lima) tahun ke depan (tahun 2028), pembangunan di Kabupaten Karawang berfokus pada tema penguatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor unggulan. Pada tahun 2028 ini direncanakan berbagai sektor unggulan dan strategis dapat memberikan kontribusinya ke PDRB secara signifikan dan menjadi dominan dibandingkan dengan sektor lainnya. Peningkatan produktivitas ini perlu disertai dengan *multiplier effect*-nya bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor unggulan ini adalah industri, pariwisata, pertanian (tanaman pangan), perikanan, perdagangan dan jasa, serta sektor perumahan. Kabupaten Karawang memiliki modal besar terkait dengan potensi berkembangnya sektor-sektor tersebut.

Tahun 2029 (tahun keempat), tema pembangunan akan berupa pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah. Pengembangan ekonomi diharapkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, namun juga perluasan pasar kerja, pelibatan usaha setempat (UMKM, IKM dan industri rumah tangga), memastikan adanya hilirisasi berbagai produk komoditas setempat, seperti pertanian dan perikanan. Pengembangan ekonomi daerah diharapkan juga bersifat ramah lingkungan dan bahkan mempromosikan ekonomi sirkular, ekonomi hijau. Sementara itu ketahanan daerah terutama terkait kesiapan daerah untuk mendukung transisi energi menuju energi hijau, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Kabupaten Karawang juga harus memiliki kesiapan untuk menghadapi bencana kegagalan teknologi dan alam lainnya.

Terakhir pada tahun 2030 (tahun keempat), fokus pembangunan di Kabupaten Karawang adalah pada tema pemantapan daya saing daerah. Seluruh landasan yang sudah terbangun sebelumnya, perlu dikelola dengan manajemen dan tata kelola yang baik. Tema ini mencakup penguatan kelembagaan pembangunan, regulasi, integritas serta tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Pembangunan di Kabupaten Karawang diharapkan juga bersifat partisipatif. Pada 2030, diharapkan juga menjadi dasar dan modal untuk masa pembangunan 5 (lima) tahun berikutnya.

Penahapan pembangunan Kabupaten Karawang dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III-11 Penahapan Pembangunan Kabupaten Karawang

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Tabel III-12 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Karawang

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
Misi 1 Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter	- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya - Penguatan pengarusutamaan penuntasan stunting dan pencegahan stunting - Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan	- Integrasi sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan ke dalam sistem kewilayahan - Penyediaan Fasilitas kesehatan bagi pekerja - Penyediaan Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja - Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama <i>Mainstreaming</i> konsep inklusi dan perspektif gender ke dalam pembangunan	- Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama - Pengembangan sistem layanan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya tarik pembangunan ekonomi - Membangun <i>link and match</i> pendidikan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi - Dukungan untuk pengembangan pendidikan vokasi - Melanjutkan peningkatan literasi masyarakat daerah	- Penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan memperhatikan toleransi antar etnis dan umat beragama - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal - Penyediaan sistem layanan kesehatan terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim - Pengembangan kurikulum yang mendukung keberlanjutan dan resiliensi - Penguatan modal sosial dan ketahanan	- Pemantapan sistem kesehatan dan pendidikan yang berstandar unggul dan berdaya saing - Pemantapan modal sosial untuk siap menuju Karawang yang maju dan modern - Penuntasan dan pemantapan upaya pengetasan kemiskinan secara berkelanjutan

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah • Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang inklusif • Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/ vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah,	infrastruktur dan kewilayahan • Penyediaan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja • Penyediaan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja • Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa • Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action</i>)	• Penguatan pengembangan sistem riset dan inovasi daerah • Perluasan penggunaan hasil riset dan inovasi • Penyiapan SDM yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi (<i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>) • Penguatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perkembangan Karawang menuju ke masyarakat yang maju, modern dan unggul	sosial untuk membentuk masyarakat yang resilien • Penguatan kapasitas resolusi konflik di daerah • Penghilangan potensi diskriminasi dan intoleransi	

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling • Peningkatan Keterampilan dan Kapasitas Ekonomi Transmigran dan Pekerja Migran • Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar	<i>Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, <i>trust</i>, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas			

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	• Penataan dan pemenuhan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan • Perlindungan kebudayaan lokal, nilai budaya dan tradisi masyarakat • Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta				

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan • Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang • Peningkatan literasi masyarakat, termasuk melalui pengembangan perpustakaan daerah dan taman bacaan secara merata				

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	• Penguatan penyelenggaraan perlindungan sosial • Penataan dan pemenuhan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan • Penguatan penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan • Penguatan penyelenggaraan pemberdayaan perempuan • Penguatan nilai dan tradisi lokal • Pengentasan kemiskinan di seluruh				

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	wilayah melalui perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses layanan dasar • Pembinaan dan penguatan ketahanan keluarga • Pengelolaan cagar budaya				
Misi 2 Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	• Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Perpustakaan termasuk ruang baca yang nyaman, ruang kegiatan edukatif, dan aksesibilitas bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas • Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman	• Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (<i>global city</i>) • Penataan dan pengembangan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed</i>	• Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Produksi Pertanian • <i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan • Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat	• Penataan dan pengembangan kawasan pusaka sebagai kawasan strategis kota serta pelestarian cagar budaya • Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal, antara lain: green/low- carbon electricity; Penyediaan	Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dan digital, sistem konektivitas yang berkualitas untuk mendukung daya saing dan keunggulan daerah

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	• Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata • Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa • Pengembangan infrastruktur untuk mendukung akses menuju ke fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, memperlancar layanan kesehatan, memperlancar distribusi bantuan sosial, serta menyediakan fasilitas akses yang aman bagi perempuan dan anak	<i>connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> dan <i>blankspot</i> di kawasan perkotaan • Pengembangan sistem transportasi terpadu • Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan • Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang aktivitas industri sains kreatif yang andal, antara lain: <i>green/low- carbon electricity</i> • Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya	pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi • Penyediaan akses dan sistem konektivitas ke wilayah pusat produksi ekonomi • Penyediaan sarana dan prasarana di kawasan pusat ekonomi	air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja • Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel	

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	• Pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, serta ruang terbuka hijau	• Penyediaan akses telekomunikasi dan digital • Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri • Penyediaan infrastruktur dasar di wilayah yang sebelumnya tertinggal • Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi • Perbaikan lingkungan, kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni • Penataan pusat kegiatan dan		dan/atau jalan yang saling terintegrasi • Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah • Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim • Pengembangan infrastruktur hijau • Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem penanggulangan bencana • Pengembangan infrastruktur yang resilien • Pemantapan transisi energi dalam sistem infrastruktur dan konektivitas wilayah	

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
		permukiman perdesaaan • Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi • Pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman • Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata • Pengembangan sistem transportasi terpadu • Pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan perdesaan • Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah		• Pemantapan jangkauan jaringan internet daerah	

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
		• Penataan dan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan			
Misi 3 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	• Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan	• Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Produksi Pertanian • Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa • Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan • Pengembangan sistem pembiayaan kerjasama antara pemerintahan dan swasta, serta mendorong investasi untuk pembiayaan infrastruktur,	• Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak • Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global • Pengembangan konvergensi link antara industri besar dengan	• Pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular • Mendorong partisipasi swasta dalam penguatan modal sosial, perlindungan lingkungan dan pengelolaan kebencanaan	• Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif • Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, media massa dan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan khususnya dalam sains kreatif • Pengembangan kawasan dan pusat kegiatan ekonomi

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i> • Penguatan peran kewirausahaan, terutama generasi muda, terhadap pembangunan ekonomi wilayah melalui pelatihan, program inkubator dan akselerator, hingga insentif ekonomi • Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif • Memperkuat kualitas dan kapasitas usaha mikro dan kecil untuk dapat masuk ke sistem jejaring usaha dengan pelaku usaha menengah dan besar • Mendorong investasi dan peran serta swasta dalam penyediaan	transportasi umum dan sistem konektivitas • Integrasi pengembangan pusat ekonomi dan pengembangan infrastruktur, kewilayahan, transportasi dan sistem konektivitas • Pengembangan perkotaan yang modern, layak huni dan berkelanjutan • Pengembangan pusat-pusat ekonomi di berbagai wilayah secara merata dan berjenjang secara tata ruang • Penyediaan hunian untuk seluruh masyarakat secara bertahap	IKM melalui pembangunan dan pengembangan berbagai kawasan sentra IKM • Peningkatan kemudahan dan akses terhadap permodalan yang bersumber dari bank dan non perbankan • Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif • Pengembangan kebijakan khusus untuk mendorong investasi dan pengembangan usaha pada sektor-sektor ekonomi unggulan • Pengembangan kebijakan hilirisasi komoditas setempat, seperti pertanian dan perikanan		modern dan berkelas nasional • Pemantapan promosi dan layanan investasi berkelas nasional

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	layanan kesehatan dan pendidikan • Mendorong kewirausahaan daerah • Perluasan lapangan kerja untuk masyarakat daerah		• Pengembangan konsep <i>supply chain</i> antara UMKM/IKM dengan pelaku usaha menengah dan besar • Percepatan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif dan MICE • Penyediaan inkubator bisnis, fasilitas pembiayaan mikro dan pendampingan untuk UMKM, IKM dan industri/usaha skala rumah tangga		
Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka	• Penguatan dan penyediaan rencana tata ruang hingga ke skala rinci secara merata • Pengembangan kebijakan infrastruktur hijau	• Pengembangan kebijakan ekonomi hijau • Pengembangan kebijakan ekonomi sirkular	• Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota • Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta konservasi Daerah	• Pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah • Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	• Pengembangan transportasi umum hemat energi • Pengembangan kebijakan transisi energi • Pengembangan RTH dan kawasan hijau • Perlindungan dan perbaikan lingkungan mencakup antara lain kawasan badan air, sempadan dan lainnya		Aliran Sungai Prioritas, tanah dan air • Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis • Penguatan pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan • Pengembangan sistem monitoring kualitas udara, air dan tanah • Pengembangan sistem mitigasi dan adaptasi perubahan iklim • Pengembangan sistem deteksi dini kebencanaan • Penguatan sistem penanggulangan	• Pengembangan kebijakan Karawang Hijau untuk meningkatkan daya tarik dan keunggulan Kabupaten Karawang

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
				bencana kegagalan teknologi dan bencana non alam lainnya	
Misi 5 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	• Pemantapan kelembagaan yang profesional, tepat fungsi dan berbasis meritokrasi • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja • Peningkatan penegakan hukum melalui sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat	• Pengembangan infrastruktur digital dasar dan regulasi daerah yang mendukung pencatatan, penyimpanan, dan akses arsip yang efisien • Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Dasar Pengelolaan Data Statistik termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan server pusat data yang aman dan terintegrasi • Penguatan Infrastruktur Fisik dan Digital untuk Layanan Kependudukan	• Penataan dan restrukturisasi BUMD • Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital • Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah • Peningkatan iklim inovasi daerah • Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi menuju smart government • Percepatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan	• Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/ nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan • Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi	• Penguatan penataan kelembagaan yang lincah dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah • Peningkatan penataan dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah • Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan • Penyempurnaan fondasi penataan

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
	• Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan • Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kualitas SDM di Kabupaten Karawang • Penguatan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan	• Penguatan Infrastruktur dan Teknologi Keamanan Persandian termasuk perangkat keras dan lunak untuk persandian yang mendukung enkripsi data dan proteksi terhadap ancaman siber • Penataan dan pengembangan kawasan perkantoran pemerintahan • Menyiapkan kerangka regulasi, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam upaya penguatan kapasitas infrastruktur wilayah, transportasi umum serta konektivitas yang	pajak daerah, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah, serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional • Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek	masyarakat dan transparansi dalam upaya keberlanjutan dalam pembangunan dan ketahanan daerah	regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman • Penguatan pengendalian inflasi daerah melalui i) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pemngelolaan stok dan distribusi barang, ii) Peningkatan kolaborasi dalam pengembangan infrastruktur dan logistik regional, iii) Penguatan pengawasan dan pemantauan harga khususnya bahan pokok • Percepatan dan perluasan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah

Misi Pembangunan	Tema dan Rincian Tahapan Pembangunan				
	2026	2027	2028	2029	2030
	Tema Penguatan kualitas dan kapasitas SDM	Tema Penyediaan infrastruktur, konektivitas wilayah yang berkualitas, merata dan terintegrasi	Tema Penguatan kapasitas kompetitif daerah	Tema Pengembangan keberlanjutan dalam pembangunan dan penguatan ketahanan daerah	Tema Pemantapan daya saing dan keunggulan daerah
		berkualitas, merata dan terintegrasi	dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas • Penataan regulasi mencakup penyederhanaan dan penyiapan payung regulasi untuk peningkatan kompetitif daerah		• Memantapkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik sebagai landasan untuk periode pembangunan selanjutnya • Diversifikasi dan perluasan alternatif investasi pemerintah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

3.3.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Operasional RPJMD ini berada di level program pembangunan, baik yang merupakan program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Program prioritas pembangunan daerah secara *cascading* merupakan alur logis implementasi dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Program Prioritas Pembangunan Daerah ini dirumuskan antara lain dengan menjabarkan strategi pembangunan daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Rumusan program penjabaran strategi pembangunan daerah ini dapat dilihat pada Tabel III-11 di atas.

Selanjutnya, program prioritas pembangunan daerah juga menjadi penerjemahan dari janji politik Bupati terpilih. Janji politik ini merupakan Program Prioritas Bupati yaitu program yang menjadi janji politik saat pemilihan umum kepala daerah. Program prioritas Bupati ini merupakan bentuk operasional dari visi dan misi sebagai inti dari janji Bupati terpilih terhadap masyarakat Kabupaten Karawang.

Berikut ini adalah rumusan konsep penerjemahan Program Prioritas Bupati ke dalam RPJMD Kabupaten Karawang.

Tabel III-13 Konsep Penjabaran Program Prioritas Bupati Karawang

Janji Bupati		Konsep Penjabaran
Misi	Program Prioritas Bupati	
Membangun SDM yang Adaptif dan Berkarakter	(1). Program wajib belajar 13 tahun	Memastikan seluruh masyarakat dan anak usia sekolah (13 tahun) mendapatkan layanan pendidikan. Penjabaran dari program ini bersifat luas, dari mulai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan lainnya
	(2). Program penanganan <i>stunting</i>	• Penanganan stunting ini setidaknya mencakup intervensi spesifik (jaminan akses ke layanan air bersih, sanitasi dan lingkungan yang sehat), serta intervensi sensitif (peningkatan gizi, asupan pangan). Kedua intervensi ini perlu dilengkapi dengan kemampuan deteksi dini oleh Pemerintah. • Implementasi dari penanganan stunting ini akan bersifat lintas urusan dan sektor, seperti infrastruktur dasar, kesehatan, ketahanan pangan, dan juga pendidikan • Pengampu utama dari penanganan stunting ini adalah program yang terkait dengan intervensi sensitif. Sedangkan intervensi spesifik akan menjadi bagi dari

Janji Bupati		Konsep Penjabaran
Misi	Program Prioritas Bupati	
		penyediaan sarana dan prasarana dasar wilayah
	(3). Program perluasan jaminan sosial	Seluruh masyarakat yang membutuhkan harus memiliki jaminan untuk mendapatkan perlindungan sosial
	(4). Program pengurangan kemiskinan	Penanganan kemiskinan pada dasarnya bersifat multi dimensi, dan akan dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif oleh seluruh OPD dan stateholder lainnya Program Bupati ini difokuskan pada aspek sosialnya tentang perlindungan dan rehabilitasi untuk masyarakat miskin
Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	(5). Program kota layak huni	Kota layak huni diartikan sebagai tersedianya lingkungan hunian yang inklusif, aman, nyaman, maju dan berkelanjutan
	(6). Program pemerataan infrastruktur	Penyediaan infrastruktur diarahkan untuk: • Penyediaan infrastruktur di wilayah yang tertinggal • Pemerataan dan integrasi infrastruktur • Peningkatan kualitas infrastruktur • Pengembangan infrastruktur hijau • Dukungan investasi dan partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyediaan infrastruktur wilayah
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	(7). Program peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan	Peran Kabupaten Karawang sebagai lumbung pangan, tidak hanya terkait dengan ketersediaan lahan, namun juga dengan kapasitas dan kualitas produksi pertanian tanaman pangan yang ada
	(8). Program Pendampingan, Pengembangan, dan Digitalisasi UMKM	Program ini difokuskan pada kelompok usaha mikro dan kecil dengan melalui pendampingan dan fasilitasi digitalisasi usaha mikro dan kecil
	(9). Program pengembangan wisata <i>urban</i>	Wisata urban di Kabupaten Karawang antara lain berupa MICE, taman hiburan, serta bentuk wisata <i>leisure</i> lainnya

Janji Bupati		Konsep Penjabaran
Misi	Program Prioritas Bupati	
	(10). Program pengembangan peningkatan kapasitas tenaga kerja	Program ini secara simultan dilaksanakan bersama dengan program pengembangan pelatihan dan pendidikan vokasu
Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	(11). Program peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan perkotaan perlu disertai dengan kapasitas Kabupaten Karawang dalam mengelola dampaknya
	(12). Program peningkatan ketahanan iklim	Kabupaten Karawang juga perlu memperkuat kapasitasnya dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, terutama pada aspek pengelolaan dampak lingkungan akibat kegiatan manusia dan alam
	(13). Program pengembangan ekonomi sirkular	Program Bupati ini dapat menjadi konsep yang perlu menjadi mainstreaming pada seluruh kegiatan pembangunan, terkait dengan pewujudan pembangunan berkelanjutan di Karawang
	(14). Program Perluasan Ruang Terbuka Hijau	Kabupaten Karawang secara kuantitatif perlu memenuhi kebutuhan RTH hingga 30%. Secara bertahap RTH yang ada perlu ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat menyamai konsep taman kota yang ada di dunia
	(15). Program penanggulangan bencana	Kabupaten Karawang perlu membangun ketahanan daerah, khususnya untuk menangani berbagai jenis bencana (alam dan non alam)
	(16). Program pengendalian banjir	Pengendalian banjir akan dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, antara lain dengan pengelolaan DAS dan sumber air permukaan lainnya (bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) hingga pada pengembangan sistem drainase hijau
	(17). Program reformasi birokrasi	Reformasi birokrasi di Kabupaten Karawang akan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan peringkat reformasi

Janji Bupati		Konsep Penjabaran
Misi	Program Prioritas Bupati	
		birokrasi Kabupaten Karawang secara nasional
Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	(18). Program Pengembangan Kapasitas ASN	Kabupaten Karawang akan memperhatikan kualitas ASN-nya sebagai penggerak utama birokrasi dan pembangunan
	(19). Program digitalisasi pemerintahan	Secara bertahap, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Karawang akan berbasis digital yang lebih mudah, cepat dan murah
	(20). Program kota cerdas	Program kota cerdas difokuskan pada pengembangan perkotaan yang berbasis <i>Artificial Intelligence</i> , teknologi informasi, digital dan manajemen informasi
	(21). Program pengembangan inovasi layanan publik	Pelayanan di Kabupaten Karawang harus terus berinovasi dan memperhatikan dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Program prioritas Bupati sebagai janji Bupati tersebut diterjemahkan ke dalam RPJMD dengan mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 (dan pemutakhirannya), dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama program Prioritas Bupati perlu disesuaikan dengan nomenklatur yang ada di Permendagri 90 Tahun 2019 (dan pemutakhirannya)
- Jika janji Bupati bersifat makro atau strategis maka janji tersebut akan dimasukkan ke dalam kebijakan umum atau strategi
- Jika janji Bupati bersifat sangat teknis, berupa output dan bersifat mikro, maka akan dimasukkan ke dalam kegiatan yang ada dalam Renstra Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya berkaitannya
- Seluruh program prioritas Bupati tersebut akan dilaksanakan sebagai bagian dari RPJMD ini, dalam bentuk strategi atau program sesuai dengan levelnya. Jika karena levelnya teknis dan tidak dapat termuat dalam RPJMD ini, maka akan dipastikan program prioritas Bupati akan masuk ke dalam Renstra Perangkat Daerah

Program prioritas pembangunan daerah juga akan mengacu pada beberapa kegiatan strategis sebagai Proyek Prioritas, yang juga menjadi janji politik Bupati. Selama 5 (lima) tahun ke depan, pembangunan di Kabupaten Karawang akan berfokus pada proyek prioritas tersebut, dengan target capaian yang juga terukur. Berikut ini adalah daftar Proyek Prioritas Kabupaten Karawang pada periode 2025 – 2029.

Tabel III-14 Proyek Strategis Kabupaten Karawang

No	Proyek Strategis Daerah
1	Penyediaan Beasiswa Anak Putus /Tidak Sekolah
2	Rehabilitasi Ruang Kelas di Kabupaten Karawang
3	Pengembangan Puskesmas ILP (Integrasi Layanan Primer)
4	Peningkatan Status Kelas Puskesmas menjadi setara dengan Rumah Sakit Kelas D
5	Pembangunan Rumah Layak Huni
6	Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
7	Peningkatan Jalan Menuju Kawasan Pariwisata
8	Pembangunan BLK dan Pengembangan Kejuruan Pelatihan Baru
9	Fasilitasi UMKM untuk Naik Kelas dan Siap Ekspor
10	Fasilitasi IKM Bermitra dengan Perusahaan dan Siap Ekspor
11	Fasilitasi Pengembangan BUMDes Juara
12	Pengembangan Sentra IKM
13	Pengembangan Destinasi Wisata Unggulan Karawang yang Teintegrasi
14	Pengembangan Desa Wisata Baru
15	Pembangunan Taman Publik
16	Revitalisasi TPA Jalupang

Sumber: BAPPEDA, 2025

Proyek Strategis Daerah ini akan dimasukkan ke dalam sistem perencanaan daerah di Kabupaten Karawang sehingga dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pada dasarnya level kegiatan dan nomenklatur dari Proyek Strategis Daerah ini akan disesuaikan dengan level substansi dari setiap rencana pembangunan daerah. Namun demikian akan dipastikan bahwa setiap Proyek Strategis Daerah tersebut memiliki payung program di RPJMD sesuai dengan level dan nomenklaturannya. Secara lebih teknis Proyek Strategis Daerah akan dimasukkan ke Renstra Perangkat Daerah dan atau di Renja Perangkat Daerah.

Program Prioritas Bupati dan Proyek Strategis Daerah tersebut diterjemahkan dan diakomodasikan ke dalam program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD ini. Jika level operasional dan capaiannya sudah lebih teknis, maka Program Prioritas Bupati dan Proyek Strategis Daerah dipastikan akan diakomodasi ke Renstra dan atau Renja Perangkat Daerah dalam kegiatan dan subkegiatan yang ada pada Renstra Perangkat Daerah.

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karawang periode 2025 – 2029 ini dirancang sejalan dan menjadi bagian dari upaya untuk memberikan dukungan bagi program unggulan nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan

Sekolah Rakyat, serta berbagai program lainnya yang menjadi fokus dari Pemerintah Pusat. Berikut ini adalah rumusan bentuk dukungan Kabupaten Karawang terhadap beberapa program unggulan nasional tersebut, yang akan tertuang dalam RPJMD dan juga Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Karawang.

Tabel III-15 Bentuk Dukungan terhadap Program Unggulan Nasional

No	Program Nasional	Bentuk Dukungan Kabupaten Karawang yang Akan dituangkan ke RPJMD dan Renstra
1	Makan Bergizi Gratis (MBG)	• Penyiapan dan pembinaan petani, nelayan, UMKM di sektor makanan serta pelaku usaha setempat yang terkait dengan produksi makanan agar dapat terlibat sebagai pelaku dalam rantai pasok makanan dan MBG • Berperan serta untuk memastikan kualitas gizi, keamanan pangan, serta keberlanjutan program dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan ketahanan pangan, pertanian, kesehatan dan Koperasi dan UMKM • Berperan serta dalam monitoring dan evaluasi (sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat dan kewenangan daerah yang dimiliki) untuk menjamin agar program tepat sasaran, tepat mutu dan berdampak terhadap peningkatan mutu gizi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM di usia muda • Dukungan lainnya berupa integrasi program antarperangkat daerah sehingga terdapat dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karawang
2	Koperasi Merah Putih (KMP)	• Fasilitasi pembentukan, pemberdayaan dan pembinaan unit usaha koperasi berbasis masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta distribusi faktor usaha kerakyatan yang relevan dengan masyarakat secara umum • Fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, digitalisasi koperasi, serta akses terhadap permodalan koperasi sesuai dengan kewenangan daerah untuk mendukung program (KMP) • Fasilitasi untuk mengembangkan kemitraan koperasi dengan BUMDes dan UMKM lokal untuk meningkatkan rantai nilai produksi dan distribusi produk daerah yang terkait dengan bidang usaha KMP

No	Program Nasional	Bentuk Dukungan Kabupaten Karawang yang Akan dituangkan ke RPJMD dan Renstra
		Peningkatan dukungan regulasi untuk memperkuat peran dan kedudukan koperasi sebagai wadah utama peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung gerakan ekonomi gotong royong
3	Sekolah Rakyat	- Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan alternatif berbasis masyarakat terutama pada kelompok masyarakat dan wilayah dengan keterbatasan akses sekolah formal - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik lokal secara berkelanjutan dan melibatkan potensi masyarakat melalui program pelatihan, sertifikasi, dan dukungan insentif untuk tenaga pengajar di sekolah rakyat - Fasilitasi untuk integrasi kurikulum lokal dan muatan kearifan daerah dalam pendidikan non formal agar relevan dengan kebutuhan masyarakat - Fasilitasi untuk mendorong keterlibatan organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung pembiayaan, fasilitas, serta inovasi pembelajaran di sekolah rakyat
4	Program 3 Juta Rumah Rakyat	- Penyediaan infrastruktur wilayah, termasuk pengintegrasian penyediaan rumah dalam Program Strategis ini dengan sistem kewilayahan dan infrastruktur wilayah - Penyediaan data tentang MBR dan kelompok masyarakat lain yang membutuhkan - Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat lain sebagai calon penerima bantuan Program ini - Penyiapan BUMD, BUMDes dan Koperasi setempat sebagai mitra pembangunan, pembiayaan mikro dan lainnya dalam pelaksanaan Program - Dukungan regulasi daerah termasuk tata ruang wilayah

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

Program Prioritas Pembangunan Daerah ini dirumuskan melalui proses penjabaran arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta penerjemahan dan akomodasi terhadap Program Prioritas Bupati dan Proyek Strategis Daerah. Daftar program prioritas pembangunan daerah ini kemudian dikaitkan kembali ke sasaran pembangunan daerah. Satu program hanya dapat dikaitkan dengan satu sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian antarprogram prioritas akan bersifat *independent*, namun saling *mutual*.

Perumusan program prioritas pembangunan daerah ini mengacu pada *cascading* dari visi hingga sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya. *Cascading* ini tidak pada indikator, melainkan hanya pada pernyataan visi hingga ke sasaran tersebut. Rumusan program pembangunan daerah dan juga indikator kinerjanya (di level *outcome*) kemudian disajikan dalam bentuk *logframe* perencanaan pembangunan Kabupaten Karawang 2025-2029 sebagai berikut.

Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana penyebutannya memiliki nilai strategis dan merupakan prioritas serta fokus pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Prioritas dan fokus ini diharapkan memiliki daya ungkit dan dampak besar untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Program pembangunan lainnya, yang bersifat *mandatory* dan rutin bagi Perangkat Daerah, tetap dapat dilaksanakan dan masuk ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Program-program dalam Renstra tersebut akan diakomodasi dalam RPJMD ini.

Tabel III-16 Rumusan Program Priortas Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang 2025-2029

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Visi : Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan						
1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter	1.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia		
		1.1.1.Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pendidikan		Indeks Pendidikan		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	(1). Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	1). Program Pengelolaan Pendidikan	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 1. Program Wajib Belajar 13 Tahun
				(2). Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar		
				(3). Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama		
	(4). Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama yang Berpartisipasi					

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
				dalam Pendidikan Kesetaraan			
		1.1.2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat			Indeks Kesehatan		
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(1). Persentase Pemenuhan UKP dan UKM	2). Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 2. Program Penanganan Stunting	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(2). Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
	1.2. Mewujudkan Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Masyarakat			Tingkat Kemiskinan			
		1.2.1.Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Material, Spiritual dan Sosial Masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial			
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	(1). Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	4). Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 3. Program Perluasan Jaminan Sosial 4. Program Pengurangan Kemiskinan	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	(1). Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah	5). Program Penanganan Bencana		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	(2). Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	6). Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	(3). Persentase Kelompok PEKKA yang Aktif	7). Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
				(4). Nilai Capaian Standarisasi PUSPAGA		
2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi	2.1. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial			Indeks Pembangunan Infrastruktur		
		2.1.1.Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Wilayah		Capaian Universal Akses		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	(1). Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Terlayani SPAM	8). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 5. Program Kota Layak Huni

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	(2). Persentase Penanganan Luasan Kawasan Kumuh yang Ditangani di Bawah 10 Ha	9). Program Kawasan Permukiman	
				(3). Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni untuk Masyarakat Korban Bencana		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	(4). Persentase Peningkatan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak	10). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	(5). Indeks Kinerja Sistem Drainase Perkotaan	11). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
		2.1.2.Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks konektivitas wilayah		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	(1). Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	12). Program Penyelenggaraan Jalan	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 6. Program Pemerataan Infrastruktur
			Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas yang Lancar pada Jaringan Jalan Prioritas Kabupaten	(2). Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	13). Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	(3). Indeks Kinerja Sistem Irigasi	14. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif	3.1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		
		3.1.1.Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dan Perikanan Guna Mendukung Ketahanan Pangan		(1). Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence Under Nourishment</i>)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	(1). Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Populasi Ternak	15. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 7. Program Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	(2). Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	16. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	(3). Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	17. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	(4). Persentase rata-rata peningkatan produksi olahan hasil perikanan	18). Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		3.1.2.Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan yang Berbasis pada Potensi Lokal		(3). Rasio PDRB Industri Pengolahan (4). Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB		
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	(1). Persentase Usaha Mikro yang Telah Mengikuti Pelatihan	19). Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha mikro (UMKM)	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 8. Program Pendampingan, Pengembangan, dan Digitalisasi UMKM
				(2). Persentase Unit Usaha Mikro yang Difasilitasi Pemasaran		
			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	(3). Persentasi Izin Usaha Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	20). Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
			Meningkatnya jangkuan promosi penanaman modal	(4). Presentase Keterlaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	21). Program Promosi Penanaman Modal	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	(5). Persentase Nilai Ekspor	22). Program Pengembangan Ekspor	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	(6). Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	23). Program Peningkatan Kerja Sama Desa	
		3.1.3.Meningkatnya Produktivitas Sektor Pariwisata yang Berdaya Saing		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum		
			Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	(1). Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	24). Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 9. Program Pengembangan Wisata Urban
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	(2). Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	25). Program Pemasaran Pariwisata	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	(3). Presentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif	26). Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	
		3.1.4.Meningkatnya Kemampuan Masyarakat di Pasar Kerja untuk Terserap dalam Kegiatan Ekonomi		Tingkat Pengangguran Terbuka		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	(1). Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	27). Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 10. Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	(2). Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	28). Program Penempatan Tenaga Kerja	
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	4.1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Penurunan Intensitas Emisi GRK		
		4.1.1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	(1). Penurunan Parameter COD	29). Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 11. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 12. Program Peningkatan Ketahanan Iklim 13. Program Pengembangan Ekonomi Sirkular
				(1). Penurunan Parameter SO ₂		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	(2). Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	30). Program Pengelolaan Persampahan	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang sudah diterbitkan	(3). Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	31). Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	(4). Persentase RTH Wilayah Perkotaan yang Dikelola	32). Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 14. Program Perluasan Ruang Terbuka Hijau	
		Menurunnya Risiko Bencana di Tingkat Kabupaten			Indeks Risiko Bencana		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(5). Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	33). Program Penanggulangan Bencana	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 15. Program Penanggulangan Bencana 16. Program Pengendalian Banjir	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	(6). Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana			
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	(7). Presentase Penanganan Pasca Bencana			
5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif	5.1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			Indeks Reformasi Birokrasi			
		5.1.1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Efektivitas Kinerja Pemerintahan		Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten			
			Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang	(1). Nilai RB Sekretariat Daerah	34). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 17. Program Reformasi Birokrasi	
				(2). Indeks Kepuasan Masyarakat			
				(3). Kepatuhan Standar Pelayanan			

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah	(4). Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi		
				(5). Nilai SAKIP		
				(6). Indeks Pelayanan Publik		
				(7). Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	(8). Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten	35). Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
				(9). Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten		
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	(10). Presentase kematangan inovasi daerah	36). Program Riset dan Inovasi Daerah	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	(11). Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	37). Program Pengelolaan Keuangan Daerah	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(12). Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (13). Presentase Belanja Bidang Pendidikan (14). Presentase Belanja Bidang Kesehatan		
			Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	(15). Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	(16). Persentase laporan keuangan tepat waktu		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	(17). Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	38). Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	(18). Persentase Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah	39). Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Mengoptimalkan pengendalian pajak daerah	(19). Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah		
			Mengoptimalkan inovasi pendapatan pajak daerah	(20). Persentase Inovasi Pendapatan Pajak Daerah		

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	(21). Persentase Hasil Pengawasan Internal yang Dimanfaatkan Objek Pengawasan	40). Program Penyelenggaraan Pengawasan	
				(22). Persentase Kerugian Daerah/Negara yang Diselesaikan		
				(23). Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Diselesaikan		
				(24). Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	(25). Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	41). Program Pengelolaan Arsip	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 18. Program Pengembangan Kapasitas ASN
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	(26). Jumlah Nilai Merit Sistem pada Aspek Perencanaan Kebutuhan	42). Program Kepegawaian Daerah	
				(27). Jumlah Nilai Merit Sistem pada Aspek Pengadaan		
				(28). Jumlah Nilai Merit Sistem pada Aspek Sistem Informasi		
			Meningkatnya kualitas analisis	(29). Jumlah Nilai Merit Sistem pada Aspek	43). Program Pengembangan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			kebutuhan perancangan, pengembangan dan evaluasi	Pengembangan Karier dengan Subaspek Pengembangan Kompetensi	Sumber Daya Manusia	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 19. Program Digitalisasi Pemerintahan 20. Program Kota Cerdas
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	(30). Persentase Orgnisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	44). Program Aplikasi Informatika	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	(31). Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	45). Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	(32). Indeks Kepuasan Masyarakat	46). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	PROGRAM PRIORITAS BUPATI: 21. Program Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2025

IV



Source : photo by Karawang.go.id

Bab IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IV

Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.1 Program Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ini menjabarkan daftar program yang akan dimuat dalam RPJMD. Program-program ini harus sesuai dengan program dan indikator yang ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) setiap Perangkat Daerah (PD). Daftar program perangkat daerah ini meliputi program utama (program prioritas pembangunan daerah yang diampu oleh PD yang bersangkutan) yang terkait langsung dengan visi dan misi di RPJMD serta program lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi PD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program PD adalah daftar program PD untuk setiap urusan pemerintahan yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta pemenuhan urusan pemerintahan wajib. Program PD ini memiliki dua sifat, yaitu strategis dan operasional. Program yang bersifat strategis (program utama) adalah program yang pencapaian indikator kinerjanya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kepala PD, tetapi juga melibatkan peran Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan. Hal ini dikarenakan program strategis dirancang untuk mencapai visi dan misi daerah serta mengakomodasi program unggulan Kepala Daerah terpilih. Sementara itu, program yang bersifat operasional adalah program yang tetap dilaksanakan untuk memenuhi setiap urusan pemerintahan wajib, meskipun tidak secara langsung terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, program PD ini mencakup program strategis yang terkait langsung dengan pencapaian visi dan misi daerah, serta program operasional untuk memenuhi layanan PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Hubungan antara kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan perangkat daerah secara jelas dapat dilihat melalui keterkaitan antara program perangkat daerah dengan visi dan misi pembangunan daerah. Program perangkat daerah ini adalah daftar program per urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah, yang dianggap memiliki keterhubungan secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan pemenuhan urusan pemerintahan (wajib).

Program perangkat daerah beserta indikator kinerjanya akan menjadi landasan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan mandat dalam RPJMD yang direpresentasikan dalam isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran hingga indikator sasaran strategis di RPJMD. Dengan demikian perumusan program perangkat daerah perlu

arahan oleh RPJMD agar program masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan melihat tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Setelah program prioritas ditetapkan, disusunlah perkiraan anggaran untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk melihat ketersediaan dana secara makro untuk membiayai program tersebut. Hal ini bersifat makro dan non-teknis, artinya tujuannya bukan untuk melihat jumlah nominal secara rinci antara kondisi fiskal daerah untuk membiayai setiap program, tetapi untuk melihat kerangka pendanaan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan anggaran.

Berikut ini adalah daftar program perangkat daerah dan pagu indikatifnya yang bersifat strategis dan juga operasional dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran pembangunan dan pemenuhan urusan pemerintahan.

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A.1. Pendidikan

Terdiri dari program:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengendalian Perizinan Kependidikan
5. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

A.2. Kesehatan

Meliputi program:

6. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

A.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Selanjutnya program pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki cakupan program sebagai berikut:

10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
12. Program Penyelenggaraan Jalan
13. Program Penataan Bangunan Gedung
14. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

15. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
16. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- A.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencakup program:
 18. Program Kawasan Permukiman
 19. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 20. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 21. Program Pengembangan Perumahan
- A.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Urusan ini akan diselenggarakan dengan program:
 22. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 23. Program Penanggulangan Bencana
 24. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- A.6. Sosial
Program pada urusan ini adalah:
 25. Program Pemberdayaan Sosial
 26. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
 27. Program Rehabilitasi Sosial
 28. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 29. Program Penanganan Bencana
 30. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
- B.1. Tenaga Kerja
Urusan ketenagakerjaan terdiri dari rencana program:
 31. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 32. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 33. Program Penempatan Tenaga Kerja
 34. Program Hubungan Industrial
- B.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan diselenggarakan melalui program:

35. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
36. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
37. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
38. Program Pemenuhan Hak Anak
39. Program Perlindungan Perempuan
40. Program Perlindungan Khusus Anak

B.3. Pangan

Program pada urusan bidang pangan adalah:

41. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
42. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
43. Program Penanganan Kerawanan Pangan
44. Program Pengawasan Keamanan Pangan

B.4. Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan meliputi:

45. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
46. Program Penatagunaan Tanah
47. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
48. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

B.5. Lingkungan Hidup

Urusan ini mencakup beberapa program berikut:

49. Program Pengelolaan Persampahan
50. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
51. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
52. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)
53. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
54. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- 55. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- 56. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 57. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- B.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Program pada urusan bidang ini meliputi:
 - 58. Program Pendaftaran Penduduk
 - 59. Program Pencatatan Sipil
 - 60. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - 61. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- B.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Terdiri dari program:
 - 62. Program Penataan Desa
 - 63. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 64. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 65. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- B.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Bidang urusan ini direncanakan meliputi beberapa program berikut:
 - 66. Program Pengendalian Penduduk
 - 67. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - 68. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- B.9. Perhubungan
 - Urusan bidang perhubungan meliputi rencana program:
 - 69. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 70. Program Pengelolaan Pelayaran
 - 71. Program Pengelolaan Perkeretaapian
- B.10. Komunikasi dan Informatika
 - Rencana program pada urusan bidang ini adalah:
 - 72. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 73. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- B.11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Meliputi:

- 74. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- 75. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 76. Program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi
- 77. Program pendidikan dan pelatihan Perkoperasian
- 78. Program pemberdayaan dan perlindungan Koperasi
- 79. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- 80. Program Pengembangan UMKM

B.12. Penanaman Modal

Penanaman modal akan terdiri dari:

- 81. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 82. Program Promosi Penanaman Modal
- 83. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 84. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 85. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

B.13. Kepemudaan dan Olahraga

Meliputi program:

- 86. Program pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 87. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 88. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

B.14. Statistik

Dengan rencana program:

- 89. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

B.15. Persendian

Mencakup:

- 90. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

B.16. Kebudayaan

Rencana program untuk urusan bidang kebudayaan terdiri dari:

- 91. Program Pengembangan Kebudayaan
- 92. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

- 93. Program Pembinaan Sejarah
- 94. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 95. Program Pengelolaan Permuseuman

B.17. Perpustakaan

Terdiri dari program:

- 96. Program Pembinaan Perpustakaan
- 97. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

B.18. Kearsipan

Meliputi program:

- 98. Program Pengelolaan Arsip
- 99. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
- 100. Program Perizinan Penggunaan Arsip

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

C.1. Kelautan dan Perikanan

Urusan bidang ini direncanakan memiliki program:

- 101. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 102. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 103. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 104. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

C.2. Pariwisata

Terdiri dari program:

- 105. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 106. Program Pemasaran Pariwisata
- 107. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- 108. Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

C.3. Pertanian

Urusan bidang pertanian akan meliputi rencana program:

- 109. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 110. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 111. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat

112. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

113. Program Perizinan Usaha Pertanian

114. Program Penyuluhan Pertanian

C.4. Perdagangan

Urusan bidang ini terdiri dari program:

115. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

116. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

117. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

118. Program Pengembangan Ekspor

119. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

120. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

C.5. Perindustrian

Program pada urusan ini terdiri dari:

121. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

122. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

123. Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional

C.6. Transmigrasi

Terdiri dari program:

124. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

D.1. Sekretariat Daerah

Program dalam lingkup pelaksanaan urusan ini terdiri dari:

125. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

126. Program Perekonomian dan Pembangunan

127. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten

D.2. Sekretariat DPRD

Program dalam lingkup pelaksanaan urusan ini terdiri dari:

128. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

E.1. Perencanaan

Meliputi:

- 129. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 130. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- E.2. Keuangan
 - Meliputi:
 - 131. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 132. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 133. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- E.3. Kepegawaian
 - Meliputi beberapa program:
 - 134. Program Kepegawaian Daerah
- E.4. Pendidikan dan Pelatihan
 - Terdiri dari:
 - 135. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- E.5. Penelitian dan Pengembangan
 - Meliputi:
 - 136. Program Riset dan Inovasi Daerah
- F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - F.1. Inspektorat Daerah
 - Terdiri dari program:
 - 137. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - 138. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- G. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
 - G.1. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Terdiri dari program:
 - 139. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - 140. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 141. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - 142. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - 143. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

H. Unsur Kewilayahan

H.1. Kewilayahan

Terdiri dari:

- 144. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 145. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 146. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 147. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 148. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 149. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Secara lengkap, berikut ini adalah tabel program perangkat daerah Kabupaten Karawang beserta indikator kinerja dan pagu indikatif tersebut.

Tabel IV-1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 2025 – 2030

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif										Urusan Bidang/Bidang Urusan		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Pendidikan																	
Program Pengelolaan Pendidikan					566.447.050.028	0	1.048.592.714.635	0	1.041.081.220.357	0	1.062.685.419.325	0	1.089.158.940.895	0	1.105.158.621.652	Pendidikan	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.29	100.00	90.894.661.246	100.00	558.196.226.570	100.00	532.239.385.710	100.00	537.822.800.966	100.00	543.577.891.393	100.00	542.515.824.918			
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	92.69	93.58		94.48		95.37		96.26		97.15		98.05				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	73.43	74.58		75.72		76.86		78.01		79.15		80.29				
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	45.24	46.82		48.41		49.99		51.57		53.15		54.73				
Meningkatnya kualitas pembelajaran jenjang pendidikan dasar	Kemampuan Literasi SD	59,11	61,61	376.347.077.200	64,11	390.370.654.415	66,61	404.033.627.319	69,11	418.174.804.275	71,61	432.810.922.425	74,11	447.959.304.710			
	Kemampuan Numerasi SD	54,05	56,95		59,85		62,75		65,65		68,55		71,45				
	Kemampuan Literasi SMP	69,80	70,90		72,00		73,10		74,20		75,30		76,40				
	Kemampuan Numerasi SMP	61,97	63,47		64,97		66,47		67,97		69,47		70,97				
Meningkatnya kualitas pembelajaran jenjang PAUD dan Kesetaraan	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	69,9	70,63	99.205.311.582	71,36	100.025.833.650	72,09	104.808.207.328	72,82	106.687.814.084	73,55	112.770.127.077	74,28	114.683.492.025			
	Proporsi Tutor Pendidikan Kesetaraan dengan Kualifikasi S1/D4	36,65	38,56		40,47		42,38		44,29		46,2		48,11				
Program Pengembangan Kurikulum					105.570.400		255.790.364		264.743.027		274.009.033		283.599.349		293.525.326		
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kurikulum muatan lokal	100.00	100.00	105.570.400	100.00	255.790.364	100.00	264.743.027	100.00	274.009.033	100.00	283.599.349	100.00	293.525.326		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					94.874.300		123.194.901		127.506.722		131.969.457		136.588.388		141.368.982		
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	48.15	49.74	94.874.300	51.33	123.194.901	52.92	127.506.722	54.51	131.969.457	56.10	136.588.388	57.69	141.368.982		
Program Pengendalian Perizinan Pendidik					50.000.000		51.750.000		53.561.250		55.435.894		57.376.150		59.384.315		
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase satuan pendidikan terakreditasi minimal B	84.00	85.01	50.000.000	86.03	51.750.000	87.05	53.561.250	88.07	55.435.894	89.08	57.376.150	90.10	59.384.315		
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra					105.600.000		109.296.000		113.121.360		117.080.608		121.178.429		125.419.674		
	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	100.00	100.00	105.600.000	100.00	109.296.000	100.00	113.121.360	100.00	117.080.608	100.00	121.178.429	100.00	125.419.674		
Kesehatan																	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					613.606.026.095		488.224.874.360		589.723.798.460		748.100.115.532		776.654.206.511		590.370.463.172	Kesehatan	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	331.158.873.488	95,5	300.755.055.676	96	456.523.794.024	96,5	631.692.126.805	97	676.150.759.013	97,5	485.122.303.172		
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	terjangkau di Puskesmas Adiarsa															
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Anggadita	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Balongsari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Batujaya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Bayurlor	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Ciampel	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	534.867.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Cibuaya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Cicinde	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	401.150.000	95,5	353.769.000	96	353.769.000	96,5	353.769.000	97	353.769.000	97,5	353.769.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Cikampek	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	735.442.000	95,5	550.307.000	96	550.307.000	96,5	550.307.000	97	550.307.000	97,5	550.307.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Cikampek Utara	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Cilamaya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	534.867.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	terjangkau di Puskesmas Curug															
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Gempol	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Jatisari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Jayakarta	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Jomin	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Kalangsari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Karawang	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Karawang Kulon	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Kertamukti	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Klari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	735.442.000	95,5	550.307.000	96	550.307.000	96,5	550.307.000	97	550.307.000	97,5	550.307.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Kotabaru	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Kutamukti	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Kutawaluya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	534.867.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Lemahduhur	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	401.150.000	95,5	353.769.000	96	353.769.000	96,5	353.769.000	97	353.769.000	97,5	353.769.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Lemahabang	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Loji	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	534.867.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Majalaya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	534.867.000	95,5	432.384.000	96	432.384.000	96,5	432.384.000	97	432.384.000	97,5	432.384.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Medangasem	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Nagasari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Pacing	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Pakisjaya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Pangkalan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Pasirukem	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Pedes	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Plawad	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Purwasari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	735.441.000	95,5	550.307.000	96	550.307.000	96,5	550.307.000	97	550.307.000	97,5	550.307.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Rawamerta	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Rengasdengklok	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Sukatani	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Sungaibuntu	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	393.077.000	96	393.077.000	96,5	393.077.000	97	393.077.000	97,5	393.077.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Telagasari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Tanjungpura	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	468.008.000	95,5	353.769.000	96	353.769.000	96,5	353.769.000	97	353.769.000	97,5	353.769.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Telukjambe	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Tempuran	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.692.000	96	471.692.000	96,5	471.692.000	97	471.692.000	97,5	471.692.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Tirtajaya	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Tirtamulya	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Tunggakjati	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	401.150.000	95,5	353.769.000	96	353.769.000	96,5	353.769.000	97	353.769.000	97,5	353.769.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Wadas	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	668.583.000	95,5	511.000.000	96	511.000.000	96,5	511.000.000	97	511.000.000	97,5	511.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di Puskesmas Wanakerta	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	601.725.000	95,5	471.708.000	96	471.708.000	96,5	471.708.000	97	471.708.000	97,5	471.708.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di RSUD Karawang	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	198.207.599.583	95,5	79.612.627.928	96	20.000.000.000	96,5	20.000.000.000	97	20.000.000.000	97,5	20.000.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di RSUD Jatisari	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	36.481.924.222	95,5	20.000.000.000	96	18.000.000.000	96,5	15.000.000.000	97	12.500.000.000	97,5	10.000.000.000	
	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau di RSUD Rengasdengklok	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	89,98	95	19.743.993.802	95,5	65.609.030.756	96	72.951.844.436	96,5	59.159.828.727	97	45.755.287.498	97,5	53.000.000.000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					5.249.757.600		723.468.000		5.748.789.380		5.949.997.008		6.158.246.904		6.373.785.545	
	Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	3,4 : 1.000	5,3 : 1.000	5.249.757.600	5,3 : 1.000	723.468.000	5,4 : 1.000	5.748.789.380	5,4 : 1.000	5.949.997.008	5,5 : 1.000	6.158.246.904	5,5 : 1.000	6.373.785.545	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					168.051.000		124.420.700		178.775.425		185.032.564		191.508.704		198.211.509	
	Meningkatnya efektivitas Program Sediaan Farmasi, dan Pangan Olahan di Pemerintah Daerah	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alkes dan pangan olahan sesuai standar	50	55	168.051.000	60	124.420.700	65	178.775.425	70	185.032.564	75	191.508.704	80	198.211.509	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					16.095.071.700		15.494.544.800		16.136.853.868		16.701.643.753		17.286.201.285		17.891.218.330	
	Meningkatnya pengetahuan dan praktik perilaku hidup bersih dan sehat di tingkat individu, keluarga, dan komunitas	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50	55	16.095.071.700	60	15.494.544.800	65	16.136.853.868	70	16.701.643.753	75	17.286.201.285	80	17.891.218.330	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					48.007.957.400		39.689.088.500		41.078.206.600		42.515.943.800		44.004.001.800		45.544.141.900	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	42,85	53	48.007.957.400	63	39.689.088.500	73	41.078.206.600	78	42.515.943.800	83	44.004.001.800	88	45.544.141.900	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				121.904.450.000		126.171.105.750		129.931.363.400		134.290.211.300		139.010.368.800		143.297.481.700		
	Meningkatnya Kinerja Sistem Drainase Perkotaan	Indeks Kinerja Sistem Drainase Perkotaan	51,8	56,80	121.904.450.000	61,80	126.171.105.750	66,80	129.931.363.400	71,80	134.290.211.300	76,80	139.010.368.800	81,80	143.297.481.700	
Program Penyelenggaraan Jalan				349.861.863.463		380.388.996.157		393.702.611.101		407.482.202.505		421.744.079.548		436.505.122.324		
	Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	82,15	84,15	349.861.863.463	86,15	380.388.996.157	88,15	393.702.611.101	90,15	407.482.202.505	92,15	421.744.079.548	94,15	436.505.122.324	
Program Penataan Bangunan Gedung				88.155.702.800		91.241.152.400		94.434.592.700		97.739.803.400		101.160.696.500		104.701.320.800		
	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Dalam Kondisi Baik	90,08	91,08	88.155.702.800	92,08	91.241.152.400	93,08	94.434.592.700	94,08	97.739.803.400	95,08	101.160.696.500	96,08	104.701.320.800	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi				1.524.842.600		1.578.212.100		1.633.449.500		1.690.620.200		1.749.791.900		1.811.034.600		
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	13,71	16,67	1.524.842.600	33,33	1.578.212.100	50,00	1.633.449.500	66,67	1.690.620.200	83,33	1.749.791.900	100	1.811.034.600	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				1.021.511.800		1.057.264.700		1.750.000.000		2.000.000.000		2.050.000.000		2.700.000.000		
	Meningkatnya Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang Terhadap RTRW	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan ruang	89,5	90,00	1.021.511.800	90,70	1.057.264.700	91,30	1.750.000.000	92,00	2.000.000.000	92,70	2.050.000.000	93,30	2.700.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				24.066.836.800		12.495.000.000		17.216.831.683		17.216.831.683		17.216.831.683		17.216.831.683		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan rumah tangga yang terlayani SPAM	19,6	86,47	24.066.836.800	86,76	12.495.000.000	87,08	17.216.831.683	87,4	17.216.831.683	87,73	17.216.831.683	88,05	17.216.831.683	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah				42.925.173.684		32.459.000.200		41.445.525.773		41.445.525.773		41.445.525.773		41.445.525.773		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dan layak	84,1	77,17	42.925.173.684	77,44	32.459.000.200	77,66	41.445.525.773	77,87	41.445.525.773	78,17	41.445.525.773	78,42	41.445.525.773	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																
Program Kawasan Permukiman				141.938.291.600		19.415.000.000		26.144.689.400		24.641.471.260		24.524.905.000		35.618.992.800	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	28,25	3,02	141.938.291.600	8,07	19.415.000.000	13,09	26.144.689.400	22,05	24.641.471.260	30,40	24.524.905.000	42,85		35.618.992.800
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh				0		48.349.859.900		143.222.500.000		157.409.750.000		173.015.725.000		190.182.297.500		
	Meningkatnya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	0	0	0	33,33	48.349.859.900	50,00	143.222.500.000	66,67	157.409.750.000	83,33	173.015.725.000	100		190.182.297.500
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)				121.788.426.216		21.236.500.000		24.112.825.000		27.405.141.250		31.175.074.563		35.493.455.978		
	Meningkatkan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	65,48	12,78	121.788.426.216	17,44	21.236.500.000	17,44	24.112.825.000	17,44	27.405.141.250	17,44	31.175.074.563	17,44		35.493.455.978
Program Pengembangan Perumahan				8.383.273.400		10.230.199.900		12.309.050.000		13.206.650.000		14.015.140.000		14.835.609.000		
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni untuk masyarakat korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	70,77	6,91	8.383.273.400	13,82	10.230.199.900	18,09	12.309.050.000	45,39	13.206.650.000	72,7	14.015.140.000	100	14.835.609.000	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				24.215.265.650	0	27.259.861.955	0	26.460.613.903	0	27.460.721.646	0	28.780.514.279	0	29.146.852.529		
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Presentase Perda dan Perkada yang Ditegakan	80	82	1.523.404.000	85	1.963.838.900	86	2.125.349.500	87	2.220.848.575	88	2.314.326.330	89	2.390.704.945	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94.23	94.5	7.835.667.950	94.75	11.352.905.455	95	10.150.135.768	95.25	10.420.323.156	95.5	10.875.784.362	95.75	11.238.436.882	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Presentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	13.00	13.00	13.528.243.700	12.00	12.561.698.800	12.00	12.920.000.000	12.00	13.480.000.000	12.00	14.030.000.000	12.00	14.170.000.000	
	Meningkatnya kapasitas SDM Pol PP dan PPNS	Presentase Pol PP dan PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	75.27	76.19	1.327.950.000	81.82	1.381.418.800	86.96	1.265.128.635	91.67	1.339.549.915	96	1.560.403.587	100	1.347.710.702	
Program Penanggulangan Bencana					4.671.052.120		5.123.474.433		5.665.032.245		5.253.716.993		5.251.068.430		5.876.636.835	
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	3.585.912.070	100	3.440.529.280	100	3.334.489.806	100	3.497.140.286	100	3.350.688.754	100	3.681.779.370	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	1.469.380.050	100	1.520.808.353	100	1.574.036.643	100	1.629.127.926	100	1.686.147.404	100	1.745.162.564	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Presentase Penanganan Pasca Bencana	100	100	145.969.200	100	162.136.800	100	756.505.796	100	127.448.781	100	214.232.272	100	449.694.901	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					11.882.504.400		12.698.392.055		12.728.835.775		13.174.345.029		13.635.447.103		14.112.687.753	
	Meningkatnya pelayanan pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Indeks pencegahan, penanggulangan, penyelamatan Kebakaran dan non kebakaran	100	100	11.882.504.400	100	12.698.392.055	100	12.728.835.775	100	13.174.345.029	100	13.635.447.103	100	14.112.687.753	Sosial
Sosial																
Program Pemberdayaan Sosial					7.989.112.540		7.743.430.100		8.014.450.154		8.294.955.909		8.585.279.366		8.885.764.143	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	100	100	7.989.112.540	100	7.743.430.100	100	8.014.450.154	100	8.294.955.909	100	8.585.279.366	100	8.885.764.143	
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan					112.433.000		29.784.600		30.827.061		31.906.008		33.022.718		34.178.514	
	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	90	100	112.433.000	100	29.784.600	100	30.827.061	100	31.906.008	100	33.022.718	100	34.178.514	
Program Rehabilitasi Sosial					4.338.673.970		3.940.680.309		4.078.604.120		4.221.355.264		4.369.102.698		4.522.021.293	
	Meningkatnya rehabilitas sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten	100	100	4.338.673.970	100	3.940.680.309	100	4.078.604.120	100	4.221.355.264	100	4.369.102.698	100	4.522.021.293	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					11.100.410.300		10.752.965.900		11.129.319.707		11.518.845.896		11.922.005.503		12.339.275.695	
	Meningkatnya perlindungan jaminan sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	1.950	1.950	11.100.410.300	1.950	10.752.965.900	1.950	11.129.319.707	1.950	11.518.845.896	1.950	11.922.005.503	1.950	12.339.275.695	
Program Penanganan Bencana					748.965.900		723.825.100		749.158.979		775.379.542		802.517.827		830.605.950	
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	100	748.965.900	100	723.825.100	100	749.158.979	100	775.379.542	100	802.517.827	100	830.605.950	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan					542.564.800		489.402.300		506.531.381		524.259.979		542.609.078		561.600.396	
	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik	100	100	542.564.800	100	489.402.300	100	506.531.381	100	524.259.979	100	542.609.078	100	561.600.396	
Tenaga Kerja																
Program Perencanaan Tenaga Kerja					132.429.635		102.620.000		141.615.600		183.215.182		227.553.256		391.506.807	Tenaga Kerja

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	100	132.429.635	100	102.620.000	100	141.615.600	100	183.215.182	100	227.553.256	100	391.506.807	
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				4.817.443.442		5.444.275.717		6.437.070.399		7.225.834.777		8.061.927.249		8.947.694.547		
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	45,65	50,58	4.817.443.442	53,58	5.444.275.717	56,58	6.437.070.399	59,58	7.225.834.777	62,58	8.061.927.249	65,58	8.947.694.547	
Program Penempatan Tenaga Kerja				406.711.200		542.670.009		799.986.762		841.361.678		884.652.855		929.943.747		
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	47,90	48,4	406.711.200	48,9	542.670.009	49,4	799.986.762	49,9	841.361.678	50,4	884.652.855	50,9	929.943.747	
Program Hubungan Industrial				1.605.244.850		1.290.696.133		1.340.261.147		1.387.170.287		1.435.721.247		1.485.971.491		
	Meningkatnya pekerja Kab. Karawannng yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Melaksanakan Sarana Hubungan Industrial	80,08	81,01	1.605.244.850	82,01	1.290.696.133	83,01	1.340.261.147	84,01	1.387.170.287	85,01	1.435.721.247	86,01	1.485.971.491	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				1.446.473.200		1.446.473.200		1.497.099.763		1.549.498.255		1.603.730.694		1.659.861.267		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	5,8	6,0	1.446.473.200	6,05	1.446.473.200	6,1	1.497.099.763	6,15	1.549.498.255	6,2	1.603.730.694	6,25	1.659.861.267	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak				22.413.300		22.413.300		23.197.765		24.009.687		24.850.026		25.719.777		
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	persentase OPD yang terlibat dalam forum data terpilah gender dan anak	100	100	22.413.300	100	22.413.300	100	23.197.765	100	24.009.687	100	24.850.026	100	25.719.777	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				521.855.900		691.222.800		715.415.598		740.455.143		766.371.074		793.194.061		
	Meningkatnya persentase kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang aktif dalam rangka peningkatan kualitas keluarga untuk mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) yang aktif	84	84	340.642.400	84	380.642.400	84	393.964.884	87	407.753.655	87	422.025.033	87	436.795.909	
	Meningkatnya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang terstandarisasi dalam rangka peningkatan kualitas keluarga untuk mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Nilai capaian standarisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	111	111	181.213.500	120	310.580.400	140	321.450.714	150	332.701.488	160	344.346.041	175	356.398.152	
Program Pemenuhan Hak Anak				595.110.800		721.664.700		746.922.965		773.065.268		800.122.553		828.126.842		
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,76	60,76	595.110.800	60,76	721.664.700	60,76	746.922.965	62,00	773.065.268	62,00	800.122.553	62,00	828.126.842	
Program Perlindungan Perempuan				648.882.800		699.213.500		723.685.973		749.014.981		775.230.506		802.363.573		
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan secara komprehensif	96	96	648.882.800	97	699.213.500	98	723.685.973	99	749.014.981	100	775.230.506	100	802.363.573	
Program Perlindungan Khusus Anak				131.141.000		361.141.000		373.780.935		386.863.268		400.403.482		414.417.604		
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi,	Indeks Perlindungan Anak	65,98	65,98	131.141.000	65,98	361.141.000	66,50	373.780.935	66,50	386.863.268	67,00	400.403.482	67,00	414.417.604	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak															
Pangan																
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					0		0		50.000.000		51.750.000		53.561.250		55.435.894	Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Presentase Jumlah Cadangan Pangan	18,40	0	0	0	27,40	50.000.000	30,40	51.750.000	33,40	53.561.250	36,40	55.435.894		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					1.957.777.150		1.165.401.100		1.466.190.138		1.517.506.793		1.570.619.531		1.625.591.214	
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan harapan (Konsumsi)	92,32	92,33	1.957.777.150	92,34	1.165.401.100	92,35	1.466.190.138	92,36	1.517.506.793	92,37	1.570.619.531	92,38	1.625.591.214	
Program Penanganan Kerawanan Pangan					53.312.300		832.976.300		862.130.470,0		892.305.037		923.535.713		955.859.463	
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Dareah Rentan Rawan Pangan	4,53	4,21	53.312.300	3,88	832.976.300	3,56	862.130.470,0	3,24	892.305.037	2,91	923.535.713	2,59	955.859.463	
Program Pengawasan Keamanan Pangan					118.881.700		228.742.600		282.524.791		292.413.159		302.647.619		313.240.286	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	86	87	118.881.700	88	228.742.600	89	282.524.791	90	292.413.159	91	302.647.619	92	313.240.286	
Pertanahan																
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					0		200.000.000		207.000.000		214.245.000		221.743.576		229.504.600	Pertanahan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	0	0	100	200.000.000	100	207.000.000	100	214.245.000	100	221.743.576	100	229.504.600	
Program Penatagunaan Tanah					0		300.000.000		310.500.000		321.367.500		332.615.363		344.256.900	
	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase penatagunaan tanah dalam rangka pemanfaatan tanah	0	0	0	100	300.000.000	100	310.500.000	100	321.367.500	100	332.615.363	100	344.256.900	
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					0		0		250.000.000		258.750.000		267.806.250		277.179.469	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	0	0	0	0	0	100	250.000.000	100	258.750.000	100	267.806.250	100	277.179.469	
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah					0		0		250.000.000		258.750.000		267.806.250		277.179.469	
	Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin membuka Tanah	0	0	0	0	0	100	250.000.000	100	258.750.000	100	267.806.250	100	277.179.469	
Lingkungan Hidup																
Program Pengelolaan Persampahan					93.335.187.600		90.756.923.500		93.933.415.800		97.221.085.350		100.623.823.125		104.145.657.000	Lingkungan Hidup
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	34,70	35,00	93.335.187.600	36,00	90.756.923.500	37,00	93.933.415.800	38,00	97.221.085.350	39,00	100.623.823.125	40,00	104.145.657.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					3.709.099.800		3.640.967.340		5.071.901.197		4.007.417.739		5.447.677.361		4.292.846.065	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penurunan Parameter COD	0	12,00	3.709.099.800	11,90	3.640.967.340	11,80	5.071.901.197	11,70	4.007.417.739	11,60	5.447.677.361	11,50	4.292.846.065	
		Penurunan Parameter SO2	0	18,1		17,6		17,1		16,6		16,1		15,6		
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					24.118.143.929		24.962.278.967		25.835.958.731		26.740.217.286		27.676.124.891		28.644.789.262	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH Wilayah Perkotaan yang Dikelola	15,87	15,87	24.118.143.929	15,94	24.962.278.967	16,01	25.835.958.731	16,08	26.740.217.286	16,15	27.676.124.891	16,22	28.644.789.262	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					336.834.000		351.449.070		363.749.787		376.481.030		389.657.866		403.295.891	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan	PersentaseLimbah B3 yang Terkelola	0	100	336.834.000	100	351.449.070	100	363.749.787	100	376.481.030	100	389.657.866	100	403.295.891	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan		
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)																
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					695.505.200		719.847.882		745.042.557		771.119.047		798.108.214		826.042.002		
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	5	25	695.505.200	30	719.847.882	35	745.042.557	40	771.119.047	45	798.108.214	50	826.042.002		
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					414.099.700		478.593.190		498.593.951		519.119.740		540.188.930		561.820.543		
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Ditingkatkan Kompetensinya	0	100	414.099.700	100	478.593.190	100	498.593.951	100	519.119.740	100	540.188.930	100	561.820.543		
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					102.076.800		105.649.488		109.347.220		113.174.373		117.135.476		121.235.217		
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	102.076.800	100	105.649.488	100	109.347.220	100	113.174.373	100	117.135.476	100	121.235.217		
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					180.830.000		237.159.050		245.459.616		254.050.703		262.942.478		272.145.465		
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Lingkungan Hidup	100	100	180.830.000	100	237.159.050	100	245.459.616	100	254.050.703	100	262.942.478	100	272.145.465		
Program Perencanaan Lingkungan Hidup					145.560.000		1.020.000.000		830.000.000		630.000.000		1.474.350.000		964.273.500		
	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100	100	145.560.000	100	1.020.000.000	100	830.000.000	100	630.000.000	100	1.474.350.000	100	964.273.500		
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
Program Pendaftaran Penduduk					7.561.965.900		7.579.303.176		9.213.026.700		10.226.684.700		11.351.484.623		12.597.938.524	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Presentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	62	65	7.561.965.900	68	7.579.303.176	71	9.213.026.700	74	10.226.684.700	77	11.351.484.623	81	12.597.938.524		
		Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	9	11		13		15		17		19		21			
		Cakupan Perekaman KTP-el	99	99		99		99		99		99		99			
Program Pencatatan Sipil					1.611.633.900		1.611.633.900		2.361.913.700		2.621.724.300		2.910.114.500		3.230.227.700		
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran untuk anak usia 0- 4 tahun	88	90	1.611.633.900	92	1.611.633.900	94	2.361.913.700	96	2.621.724.300	98	2.910.114.500	99	3.230.227.700		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					651.056.100		651.056.100		895.672.400		994.196.400		1.103.558.100		1.224.949.625		
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Presentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	5	8	651.056.100	12	651.056.100	15	895.672.400	19	994.196.400	22	1.103.558.100	25	1.224.949.625		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan					0		0		115.000.000		127.650.000		141.691.500		157.277.600		
	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	1	1	0	1	0	1	115.000.000	1	127.650.000	1	141.691.500	1	157.277.600		
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
Program Penataan Desa					554.542.100		1.635.000.000		1.785.500.000		1.919.650.000		1.997.815.000		2.047.815.000		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100	100	554.542.100	100	1.635.000.000	100	1.785.500.000	100	1.919.650.000	100	1.997.815.000	100	2.047.815.000		
Program Peningkatan Kerjasama Desa					3.155.264.500		2.872.513.900		3.175.765.390		3.507.341.929		3.870.076.121		3.870.076.121		
	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100	100	3.155.264.500	100	2.872.513.900	100	3.175.765.390	100	3.507.341.929	100	3.870.076.121	100	3.870.076.121		
Program Administrasi Pemerintahan Desa					10.204.532.137		11.286.112.212		7.486.738.863		10.999.062.250		14.117.268.474		14.123.923.474		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata kelola Desa	100	100	10.204.532.137	100	11.286.112.212	100	7.486.738.863	100	10.999.062.250	100	14.117.268.474	100	14.123.923.474	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.463.184.200		2.520.550.000		2.673.605.000		2.830.565.500		3.010.622.050		3.043.897.050	
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100	100	1.463.184.200	100	2.520.550.000	100	2.673.605.000	100	2.830.565.500	100	3.010.622.050	100	3.043.897.050	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Program Pengendalian Penduduk					1.872.000.000		2.459.000.000		2.236.000.000		2.206.000.000		2.511.000.000		2.495.000.000	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Terkendalnya pertumbuhan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas dengan klasifikasi berkelanjutan	6,5	16,18	1.872.000.000	25,89	2.459.000.000	35,6	2.236.000.000	45,31	2.206.000.000	55,02	2.511.000.000	64,72	2.495.000.000	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					15.699.658.700		15.074.858.700		7.335.043.000		7.813.343.000		8.160.543.000		8.405.618.000	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyaratkat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Penggunaan KB Modern/mCPR	64,23	64,5	15.699.658.700	65	15.074.858.700	65,5	7.335.043.000	66	7.813.343.000	66,5	8.160.543.000	67	8.405.618.000	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					12.927.865.300		13.193.281.300		13.728.400.000		13.540.900.000		13.649.400.000		13.731.900.000	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB,BKL,BKR, dan UPPKA)	20	30	12.927.865.300	40	13.193.281.300	50	13.728.400.000	60	13.540.900.000	70	13.649.400.000	80	13.731.900.000	
Perhubungan																
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					23.506.609.134		33.178.818.387		35.983.855.736		36.344.834.885		37.707.350.767		39.212.476.879	Perhubungan
	Terwujudnya Kinerja Lalu Lintas yang Optimal pada Jaringan Jalan Prioritas Kabupaten	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,54	0,67	23.506.609.134	0,65	33.178.818.387	0,63	35.983.855.736	0,61	36.344.834.885	0,59	37.707.350.767	0,57	39.212.476.879	
Program Pengelolaan Pelayaran					209.567.428		72.517.363		58.382.530		60.425.919		62.540.826		64.729.755	
	Tercapainya Keselamatan Layanan Penyeberangan Sungai	Persentase Tingkat Keselamatan Layanan Penyeberangan Sungai	100	100	209.567.428	100	72.517.363	100	58.382.530	100	60.425.919	100	62.540.826	100	64.729.755	
Program Pengelolaan Perkeretaapian					430.370.000		520.942.250		539.175.229		558.046.362		577.577.984		597.793.214	
	Terfasilitasinya Pengelolaan Perlintasan Sebidang Kereta Api	Persentase Fasilitas Pengajuan Permohonan Rekomendasi Perlintasan Sebidang Kereta Api	100	100	430.370.000	100	520.942.250	100	539.175.229	100	558.046.362	100	577.577.984	100	597.793.214	
Komunikasi dan Informatika																
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					6.177.037.400		5.728.695.800		5.841.004.500		5.955.004.500		6.060.004.500		6.190.004.500	Komunikasi dan Informatika
	Mewujudkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang berkualitas	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	6.177.037.400	100	5.728.695.800	100	5.841.004.500	100	5.955.004.500	100	6.060.004.500	100	6.190.004.500	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					6.084.073.332		7.234.073.332		7.957.480.665		8.753.228.732		9.628.551.606		10.591.406.765	
	Mewujudkan pengelolaan aplikasi informatika yang berkualitas	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	6.084.073.332	100	7.234.073.332	100	7.957.480.665	100	8.753.228.732	100	9.628.551.606	100	10.591.406.765	
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					64.955.400		69.380.162		73.478.432		78.354.728		83.482.353		88.872.928	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Persentase Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Yang Terbit	95,12	95,24	64.955.400	95.52	69.380.162	96.35	73.478.432	97.14	78.354.728	97.22	83.482.353	97.30	88.872.928	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					217.010.600		280.757.464		348.700.770		421.056.179		498.049.310		579.916.165	
	Meningkatnya pembinaan dan pemngawasan koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	39,88	29,91	217.010.600	61,81	280.757.464	63,11	348.700.770	64,32	421.056.179	65,46	498.049.310	66,53	579.916.165	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					156.048.800		317.559.308		466.006.269		610.614.379		943.843.786		1.114.314.227	
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Presentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Sehat	94	90	156.048.800	92	317.559.308	93	466.006.269	94	610.614.379	95	943.843.786	96	1.114.314.227	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					53.723.600		62.801.845		72.449.756		82.696.089		93.570.913		105.105.673	
	Meningkatnya kualitas SDM perkooperasian	Persentase Pengurus Koperasi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Koperasi	30	30,50	53.723.600	33,24	62.801.845	35,79	72.449.756	38,17	82.696.089	40,40	93.570.913	42,38	105.105.673	
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					1.263.029.700		1.247.868.760		1.332.944.167		1.395.665.587		1.466.688.240		1.535.235.174	
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi yang melaporkan RAT	28,83	5,28	1.263.029.700	5,38	1.247.868.760	5,47	1.332.944.167	5,51	1.395.665.587	5,69	1.466.688.240	5,75	1.535.235.174	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					868.333.400		2.699.916.943		3.085.558.822		3.484.643.597		3.911.432.220		4.419.026.276	
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Unit Usaha UMKM yang Diberdayakan	10,9	12,8	868.333.400	14,63	2.699.916.943	16,37	3.085.558.822	18,05	3.484.643.597	19,66	3.911.432.220	21,21	4.419.026.276	Penanaman Modal
Program Pengembangan UMKM					13.879.714.200		13.154.168.700		13.626.035.855		14.119.869.308		14.631.579.209		15.161.811.963	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Unit Usaha UMKM yang dikembangkan	59,74	64,05	13.879.714.200	67,51	13.154.168.700	70,37	13.626.035.855	72,77	14.119.869.308	74,8	14.631.579.209	76,55	15.161.811.963	
Penanaman Modal																
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					352.766.400		661.716.200		497.249.937		514.653.685		892.206.399		551.309.893	
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Keberadaan Perangkat Pelaksana PPB	20	40	352.766.400	60	661.716.200	80	497.249.937	80	514.653.685	80	892.206.399	80	551.309.893	
Program Promosi Penanaman Modal					227.220.400		447.065.000		512.712.275		530.657.205		549.230.207		568.453.264	
	Meningkatnta jangkuan promosi penanaman modal	Presentase Keterlaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	100	100	227.220.400	100	447.065.000	100	512.712.275	100	530.657.205	100	549.230.207	100	568.453.264	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					316.102.000		479.470.600		550.666.410		608.660.623		668.548.071		730.428.422	
	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100	100	316.102.000	100	479.470.600	100	550.666.410	100	608.660.623	100	668.548.071	100	730.428.422	
Program Pelayanan Penanaman Modal					1.705.837.342		3.040.961.888		3.139.768.713		3.240.250.877		3.347.041.907		3.458.023.939	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	86	87	1.705.837.342	88	3.040.961.888	89	3.139.768.713	90	3.240.250.877	91	3.347.041.907	92	3.458.023.939	Kepemudaan dan Olahraga
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					131.000.000		70.000.000		72.450.000		74.985.750		77.610.251		80.326.610	
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	100	131.000.000	100	70.000.000	100	72.450.000	100	74.985.750	100	77.610.251	100	80.326.610	
Kepemudaan dan Olahraga																
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					2.619.245.900		2.785.833.064		2.846.800.195		2.960.130.429		3.061.979.994		3.195.994.293,00	Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	10,34	10,50	2.619.245.900	10,66	2.785.833.064	10,82	2.846.800.195	10,97	2.960.130.429	11,13	3.061.979.994	11,29	3.195.994.293,00	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					16.788.864.900		23.277.988.200		23.882.122.244		25.055.122.550		25.281.152.377		25.565.093.247,00	
	Meningkatnya pembudataan dan prestasi olah raga	Persentase Perolehan Medali Emas pada Event Provinsi	65,00	70	16.788.864.900	75	23.277.988.200	80	23.882.122.244	85	25.055.122.550	85	25.281.152.377	90	25.565.093.247,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						651.337.600		674.134.416		697.729.121		722.149.640		747.424.877		773.584.748,00	
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	4.52	05.06	651.337.600	5.60	674.134.416	6.14	697.729.121	6.68	722.149.640	7.22	747.424.877	7.76	773.584.748,00		
Statistik																	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral						437.274.400		460.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000		460.000.000	Statistik
	Mewujudkan penyelenggaraan statistik sektoral yang berkualitas	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	90	90	437.274.400	90	460.000.000	90	460.000.000	90	460.000.000	90	460.000.000	90	460.000.000		
Persandian																	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi						366.737.100		403.410.810		443.751.891		488.127.080		536.939.789		590.633.767	Persandian
	Mewujudkan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi yang berkualitas	Tingkat Keamanan Informasi	63,40	65,36	366.737.100	66,45	403.410.810	67,54	443.751.891	68,63	488.127.080	69,72	536.939.789	70,81	590.633.767		
Kebudayaan																	
Program Pengembangan Kebudayaan						3.517.673.400		3.583.908.500		4.823.628.686,59		4.218.567.216,01		4.529.344.997,35		4.856.709.478,55	Kebudayaan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	6,46	7,46	3.517.673.400	8,46	3.583.908.500	9,46	4.823.628.686,59	10,46	4.218.567.216,01	11,46	4.529.344.997,35	12,46	4.856.709.478,55		
Program Pengembangan Kesenian Tradisional						208.214.200		219.657.000		505.211.100,00		522.893.488,50		541.194.760,60		560.136.577,22	
	Meningktanya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	8,33%	8,33%	208.214.200	8,33%	219.657.000	16,67%	505.211.100,00	16,67%	522.893.488,50	16,67%	541.194.760,60	16,67%	560.136.577,22		
Program Pembinaan Sejarah						0		30.000.000		31.050.000,00		32.136.750		33.261.536		34.425.690	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	500	0	0	1.000	30.000.000	1.500	31.050.000,00	2.000	32.136.750	2.500	33.261.536	2.500	34.425.690		
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						1.020.143.500		1.040.216.000		1.075.760.887,50		1.113.412.518,56		1.152.381.956,71		1.192.715.325,20	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase warisan budaya yang dikelola dan dilestarikan	100	100	1.020.143.500	100	1.040.216.000	100	1.075.760.887,50	100	1.113.412.518,56	100	1.152.381.956,71	100	1.192.715.325,20		
Program Pengelolaan Permuseuman						0		1.000.000.000		1.035.000.000,00		1.071.225.000		1.108.717.875,00		1.147.523.000,63	
	Meningkatnya tata kelola museum	Presentase museum yang representatif	0	0	0	100	1.000.000.000	100	1.035.000.000,00	100	1.071.225.000	100	1.108.717.875,00	100	1.147.523.000,63		
Perpustakaan																	
Program Pembinaan Perpustakaan						2.159.701.148		2.172.331.600		2.213.500.000		2.153.700.000		2.187.200.000		2.221.700.000	Perpustakaan
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standart nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SNP	4,3	4,77	2.159.701.148	4,95	2.172.331.600	5,34	2.213.500.000	5,64	2.153.700.000	5,94	2.187.200.000	6,43	2.221.700.000		
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						20.444.200		79.602.900		79.000.000		108.000.000		87.000.000		116.000.000	
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan anskah kuno	Persentase naskah kuno yang dikelola	0	100	20.444.200	100	79.602.900	100	79.000.000	100	108.000.000	100	87.000.000	100	116.000.000		
Kearsipan																	
Program Pengelolaan Arsip						560.315.400		560.314.560		6.440.000.000		6.615.000.000		6.805.000.000		7.015.000.000	Kearsipan
	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip	89,06	89,06	560.315.400	91	560.314.560	91,25	6.440.000.000	91,51	6.615.000.000	91,75	6.805.000.000	92,01	7.015.000.000		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						79.643.000		79.642.800		550.000.000		670.000.000		740.000.000		805.000.000	
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	16,66	16,66	79.643.000	18	79.642.800	18	550.000.000	18	670.000.000	18	740.000.000	18	805.000.000		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome			Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Perizinan Penggunaan Arsip						0		0		60.000.000		80.000.000		90.000.000		100.000.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Pengelolaan arsip tertutup dilakukan dengan baik untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi yang terkandung di dalamnya	0	0	0	0	0	100	60.000.000	100	80.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000		
Kelautan dan Perikanan																	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						2.508.899.960		2.264.980.000		3.295.654.752		2.972.695.893		3.024.311.774		3.094.108.776	Perikanan
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1,04	1,12	2.508.899.960	1,12	2.264.980.000	1,12	3.295.654.752	1,12	2.972.695.893	1,12	3.024.311.774	1,12	3.094.108.776		
Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						0		100.000.000		103.500.000		107.122.500		110.871.788		114.752.300	
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	3,72	-	0	4,37	100.000.000	5,02	103.500.000	5,66	107.122.500	6,31	110.871.788	6,96	114.752.300		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						3.177.079.000		2.860.220.900		2.960.328.632		3.063.940.134		3.171.178.038		3.282.169.270	
	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah prosentase rata-rata peningkatan produksi perikanan budidaya	0,96	1,09	3.177.079.000	1,09	2.860.220.900	1,09	2.960.328.632	1,09	3.063.940.134	1,09	3.171.178.038	1,09	3.282.169.270		
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						1.143.121.000		909.232.350		976.709.278		1.047.824.803		1.122.749.481		1.201.663.801	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Prosentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	1,15	1,26	1.143.121.000	1,26	909.232.350	1,26	976.709.278	1,26	1.047.824.803	1,26	1.122.749.481	1,26	1.201.663.801		
Pariwisata																	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						3.946.036.340		3.834.341.400		2.471.670.705,71		3.244.029.180,41		3.576.812.161,86		3.246.000.587,52	Pariwisata
	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	145%	10%	3.946.036.340	10%	3.834.341.400	10%	2.471.670.705,71	10%	3.244.029.180,41	10%	3.576.812.161,86	10%	3.246.000.587,52		
Program Pemasaran Pariwisata						1.339.360.000		1.549.476.700		1.718.473.224,86		1.975.335.087,54		2.248.072.150,91		2.537.481.023,24	
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0	14,29%	1.339.360.000	37,50%	1.549.476.700	9,09%	1.718.473.224,86	8,33%	1.975.335.087,54	7,69%	2.248.072.150,91	7,14%	2.537.481.023,24		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual						0		308.111.000		682.941.800		689.054.688,75		1.210.529.706,87		267.212.205,93	
	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekakayaan Intelektual	0	0	0	3.71%	308.111.000	4.58%	682.941.800	5.50%	689.054.688,75	6.93%	1.210.529.706,87	7,98%	267.212.205,93		
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						1.628.159.600		1.142.055.900		1.719.404.676		2.022.098.538		2.119.231.385		2.220.686.460	
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif	78,20%	81,09%	1.628.159.600	82,95%	1.142.055.900	83,93%	1.719.404.676	85,53%	2.022.098.538	86,60%	2.119.231.385	87,08%	2.220.686.460		
Pertanian																	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						3.329.887.100		4.042.692.800		4.543.309.593		4.779.223.883		5.040.320.174		5.312.709.833	Pertanian
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produktivitas Padi	0,52%	0,62%	2.549.742.600	0,72%	3.145.888.200	0,82%	3.615.116.833	0,92%	3.818.544.376	1,02%	4.046.016.884	1,12%	4.283.605.928		
		Persentase Peningkatan Populasi Ternak	5,56	0,05%	780.144.500	0,05%	896.804.600	0,06%	928.192.761	0,06%	960.679.508	0,07%	994.303.290	0,07%	1.029.103.906		
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						16.498.875.250		18.312.061.511				21.471.892.805		23.281.465.347		24.959.939.012	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan menjadi LP2B	86,27	86,27	16.498.875.250	90%	18.312.061.511	92%	20.632.417.405	94%	21.471.892.805	96%	23.281.465.347	98%	24.959.939.012		
		Peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	26,4	80		80		82		84,00		86		88,00			
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat						1.197.807.500		1.287.477.300		2.034.632.406		2.099.403.510		2.165.741.603		2.226.701.529	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang dkendalikan	5,5%	6,00%	1.197.807.500	6,5%	1.287.477.300	7%	2.034.632.406	7,5%	2.099.403.510	8%	2.165.741.603	8,5%	2.226.701.529		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					2.673.995.100		11.313.995.100		11.959.984.928		12.389.834.400		12.814.028.605		13.263.069.606	
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	68,76%	100	2.673.995.100	100	11.313.995.100	100	11.959.984.928	100	12.389.834.400	100	12.814.028.605	100	13.263.069.606	
Program Perizinan Usaha Pertanian					0		50.000.000		151.750.000		153.561.250		155.435.893		157.376.150	
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Rekomendasi Usaha Pertanian yang diterbitkan	0	0	0	5%	50.000.000	5%	151.750.000	5%	153.561.250	5%	155.435.893	5%	157.376.150	
Program Penyuluhan Pertanian					2.582.583.000		1.435.156.000		1.665.386.460		1.723.674.986		1.784.003.610		1.846.443.737	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Kelembagaan koperasi Tani yang di bentuk dan beroperasi	8,68	6,46	2.582.583.000	2,03	1.435.156.000	2,07	1.665.386.460	2,12	1.723.674.986	2,16	1.784.003.610	2,21	1.846.443.737	Perdagangan
Perdagangan																
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					158.387.600		158.387.600		187.015.667		193.561.215		200.335.857		207.347.613	
	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan	56,14	56,26	158.387.600	56,38	158.387.600	56,5	187.015.667	56,62	193.561.215	56,74	200.335.857	56,86	207.347.613	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					3.183.646.000		3.283.646.000		3.398.573.610		3.517.523.687		3.640.637.016		3.769.059.311	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	20	20	3.183.646.000	20	3.283.646.000	40	3.398.573.610	60	3.517.523.687	80	3.640.637.016	100	3.769.059.311	
Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					1.068.974.000		1.068.974.000		1.131.388.090		1.170.986.673		1.211.971.207		1.254.390.200	
	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	0,09	0,08	1.068.974.000	0,07	1.068.974.000	0,06	1.131.388.090	0,05	1.170.986.673	0,04	1.211.971.207	0,03	1.254.390.200	
Program Pengembangan Ekspor					62.518.000		137.518.000		142.331.130		147.312.720		152.468.665		157.805.068	
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	10,32	12,8	62.518.000	12,81	137.518.000	12,82	142.331.130	12,83	147.312.720	12,84	152.468.665	12,85	157.805.068	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen					1.255.544.700		1.768.239.712		1.830.128.102		1.894.182.585		1.960.478.977		2.029.095.740	
	Meningkatnya tertib niaga	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	89,86	90,26	1.255.544.700	90,66	1.768.239.712	91,06	1.830.128.102	91,46	1.894.182.585	91,86	1.960.478.977	92,26	2.029.095.740	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					238.425.300		173.625.300		209.702.186		217.041.762		224.638.224		232.500.561	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi atau Dilaksanakan	10,26	10,26	238.425.300	23,08	173.625.300	38,46	209.702.186	56,41	217.041.762	76,92	224.638.224	100	232.500.561	
Perindustrian																
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					350.269.000		442.860.700		978.360.825		1.012.603.454		1.048.044.574		1.084.726.138	Perindustrian
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	13	13,06	350.269.000	13,12	442.860.700	13,18	978.360.825	13,24	1.012.603.454	13,3	1.048.044.574	13,36	1.084.726.138	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri					34.241.600		104.241.600		107.890.056		111.666.208		115.574.526		119.619.634	
	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Kecil dan Menengah yang Diterbitkan	40	50	34.241.600	55	104.241.600	60	107.890.056	70	111.666.208	80	115.574.526	100	119.619.634	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional					54.924.600		184.924.600		191.396.961		198.095.855		205.029.211		212.205.232	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	50	55	54.924.600	60	184.924.600	65	191.396.961	70	198.095.855	75	205.029.211	80	212.205.232	
Transmigrasi																
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					283.840.300		348.774.711		360.981.825		373.616.189		386.692.756		400.227.002	Transmigrasi

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigrasi yang ditempatkan	100	100	283.840.300	100	348.774.711	100	360.981.825	100	373.616.189	100	386.692.756	100	400.227.002	
Sekretariat Daerah																
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					92.570.093.539	0	93.165.475.860	0	96.098.586.260	0	96.860.404.260	0	97.736.481.360	0	98.344.795.060	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas fasilitasi kesejahteraan rakyat yang transparan dan akuntabel	Skor LPPD	3,14	2,61-3,40 (Sedang)	92.570.093.539	2,61-3,40 (Sedang)	93.165.475.860	2,61-3,40 (Sedang)	96.098.586.260	2,61-3,40 (Sedang)	96.860.404.260	2,61-3,40 (Sedang)	97.736.481.360	3.41-4.20 (tinggi)	98.344.795.060	
		Indeks Reformasi Hukum	99,08	94,9		95		95,01		95,02		95,03				
		Persentase pelaksanaan Kerjasama	100	100		100		100		100		100				
		Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,44	0,46		0,48		0,5		0,52		0,54				
Program Perekonomian dan Pembangunan			0	0	1.545.801.100	0	2.045.381.400	0	2.374.464.950	0	2.532.090.550	0	2.865.154.250	0	3.099.758.950	
	Meningkatnya efektifitas koordinasi dan fasilitasi perekonomian serta pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Tingkat Inflasi	1,6	2,5 ±1	1.545.801.100	2,5 ±1	2.045.381.400	2,5 ±1	2.374.464.950	2,5 ±1	2.532.090.550	2,5 ±1	2.865.154.250	2,5 ±1	3.099.758.950	
		Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	4,46	4,51		4,53		4,55		4,57		4,59				
		Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0	1		1		1		1		1				
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	96,75	96,78		96,85		96,95		97,1		97,20				
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	57	58		58.5		59		59.5		60				
Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten			0	0	128.950.923.761	0	123.048.205.501	0	130.842.556.567	0	130.165.033.727	0	133.406.465.510	0	143.987.084.180	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Sekretariat Daerah pada Sekretariat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah	45,43	45,93	128.950.923.761	46,43	123.048.205.501	46,93	130.842.556.567	47,93	130.165.033.727	48,93	133.406.465.510	49,43	143.987.084.180	
Sekretariat DPRD																
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					26.681.210.500		35.988.460.100		56.621.862.055		58.603.627.227		60.654.754.180		62.777.670.577	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Perda Tahun N	100	100	11.559.273.350	100	16.528.040.100	100	17.342.840.148	100	17.949.839.554	100	19.078.083.939	100	19.228.316.876	
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Waktu	Tepat Waktu	15.121.937.150	Tepat Waktu	19.460.420.000	Tepat Waktu	39.279.021.907	Tepat Waktu	40.653.787.673	Tepat Waktu	41.576.670.241	Tepat Waktu	43.549.353.701	
Perencanaan																
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					2.677.908.080		3.143.288.430		3.253.303.527		3.367.169.149		4.478.906.271		4.635.667.993	Perencanaan
	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	12,00		12,05	912.678.669	12,10	944.622.423	12,15	977.684.207	12,20	1.104.568.130	12,25	1.143.228.015	
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	12,00		12,05	185.550.451	12,10	192.044.717	12,15	198.766.282	12,20	205.723.102	12,25	212.923.411	
	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Berdampak pada	Nilai pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup	0	12,00		12,05	828.729.710	12,10	857.735.250	12,15	887.755.984	12,20	1.218.827.444	12,25	1.261.486.404	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Bidang Perekonomian dan SDA														
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	0	12,00		12,05	121.830.000	12,10	126.094.050	12,15	130.507.342	12,20	135.075.098	12,25	139.802.727	
	Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Berdampak pada Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai pemanfaatan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	12,00		12,05	1.024.574.600	12,10	1.060.434.712	12,15	1.097.549.926	12,20	1.737.185.400	12,25	1.797.986.890	
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai pemanfaatan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	12,00		12,05	69.925.000	12,10	72.372.375	12,15	74.905.408	12,20	77.527.097	12,25	80.240.546	
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					1.827.566.800		1.907.447.900		1.974.208.784		2.043.306.093		2.114.821.805		2.188.840.567	
	Perencanaan Pembangunan Daerah Berdampak pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten	0	12,00		12,05	1.763.065.400	12,10	1.824.772.896	12,15	1.888.639.949	12,20	1.954.742.346	12,25	2.023.158.328	
	Pengukuran Kinerja dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten	0	12,00		12,05	144.382.500	12,10	149.435.888	12,15	154.666.144	12,20	160.079.459	12,25	165.682.239	
Keuangan																
Program Pengelolaan Keuangan Daerah					744.943.272.780		754.436.253.984		766.243.124.961		780.285.336.992		794.838.349.233		809.947.485.823	Keuangan
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	289	≤ 30%	1.555.132.100	≤ 30%	1.600.791.249	≤ 30%	1.650.684.879	≤ 30%	1.702.771.733	≤ 30%	1.757.158.456	≤ 30%	1.813.956.995	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	3.879	≥ 38,85%		≥ 38,90%		≥ 40%		≥ 40%		≥ 40%		≥ 40%		
		Presentase Belanja Bidang Pendidikan	2.787	≥ 20%		≥ 20%		≥ 20%		≥ 20%		≥ 20%		≥ 20%		
		Presentase Belanja Bidang Kesehatan	2.835	≥ 10%		≥ 10%		≥ 10%		≥ 10%		≥ 10%		≥ 10%		
	Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	9.322	0,9	742.809.578.900	0,9	752.256.900.955	0,9	763.793.764.282	0,9	777.633.911.759	0,9	791.995.195.077	0,9	806.902.466.428	
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	100	100	578.561.780	100	578.561.780	100	798.675.800	100	948.653.500	100	1.085.995.700	100	1.231.062.400	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.833.441.300		3.059.634.018		3.167.457.506		3.175.222.550		3.892.354.277		3.152.789.847	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	5,2	5	2.833.441.300	5	3.059.634.018	5	3.167.457.506	5	3.175.222.550	5	3.892.354.277	5	3.191.221.646	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					10.369.406.100		9.561.305.000		11.151.504.473		11.577.934.132		12.005.366.801		12.457.886.994	
	Mengoptimalkan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pelayanan, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah	69,16	67,8	1.308.999.100	70,28	1.319.089.100	72,7	1.480.061.635	75,09	1.580.981.067	77,44	1.665.061.700	79,75	1.757.235.062	
	Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah	Persentase Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah	61,52	67,93	5.093.498.000	68,65	5.093.498.000	69,90	5.502.835.782	71,61	5.723.530.786	73,75	5.959.328.001	76,39	6.209.306.324	
	Mengoptimalkan Inovasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Inovasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	89,86	92,42	3.966.909.000	92,98	3.148.717.900	93,54	4.168.607.056	94,11	4.273.422.279	94,69	4.380.977.100	95,28	4.491.345.608	
Kepegawaian																
Program Kepegawaian Daerah					3.575.246.396		3.575.246.396		3.682.501.700		3.792.975.300		3.906.762.500		4.023.969.000	Kepegawaian

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Nilai merit sistem pada aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan, sistem informasi.	107	107	1.422.247.296	108	1.422.247.296	108	1.464.914.900	108	1.508.862.100	108	1.554.127.500	108	1.600.752.100	
	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN dan tata kelola Pengembangan Karir ASN	Jumlah Nilai merit sistem pada aspek Promosi, Mutasi dan Pengembangan Karir. ASN	143.5	150.5	1.800.878.300	153	1.800.878.300	155.5	1.854.903.800	160.5	1.910.550.600	165.5	1.967.866.000	168	2.026.904.000	
	Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Jumlah Nilai merit sistem pada aspek Manajemen Kinerja, Penggajian, Penghargaan, Disiplin, dan Aspek Perlindungan dan Pelayanan	116.5	119	352.120.800	124	352.120.800	124	362.683.000	124	373.562.600	124	384.769.000	124	396.312.900	
Pendidikan dan Pelatihan																
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					3.838.069.700		3.838.069.700		3.953.212.400		4.071.808.100		4.193.961.300		4.319.780.500	Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan ASN	Jumlah Nilai merit sistem pada aspek pengembangan karier dengan sub aspek pengembangan kompetensi.	32,5	37,5	3.838.069.700	37,5	3.838.069.700	37,5	3.953.212.400	37,50	4.071.808.100	37,50	4.193.961.300	37,50	4.319.780.500	
Penelitian dan Pengembangan																
Program Riset dan Inovasi Daerah					0		1.089.512.500		1.147.645.438		1.187.813.028		1.229.386.484		1.472.415.011	Penelitian dan Pengembangan
	Meningkatnya pemanfaatan Riset dalam pembangunan	Presentase hasil riset yang siap untuk didesiminasikan	0	100	0	100	750.756.500	100	777.032.978	100	804.229.132	100	832.377.151	100	1.061.510.352	
	Meningkatkan kapasitas dan kualitas inovasi daerah yang terukur melalui tingkat kematangan inovasi	Presentase kematangan inovasi daerah	44,21	44,88	0	45,55	338.756.000	46,22	370.612.460	46,89	383.583.896	47,56	397.009.333	48,23	410.904.659	
Inspektorat Daerah																
Program Penyelenggaraan Pengawasan					3.534.537.400		3.658.242.000		3.786.275.000		3.918.791.000		4.055.948.400		4.197.906.300	Inspektorat
	Meningkatnya efektivitas fungsi penjaminan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Predikat hasil pengawasan internal yang dimanfaatkan objek pengawasan	75-90% (Baik)	75-90% (Baik)	3.534.537.400	75-90% (Baik)	3.658.242.000	75-90% (Baik)	3.786.275.000	75-90% (Baik)	3.918.791.000	75-90% (Baik)	4.055.948.400	75-90% (Baik)	4.197.906.300	
		Persentase kerugian daerah/negara yang diselesaikan	73,68	70		71		72		73		74		75		
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang diselesaikan	74%	73		74		75		76		77		78		
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					946.894.700		1.170.049.000		1.210.998.800		1.253.381.800		1.297.249.990		1.342.653.550	
	Meningkatnya efektivitas fungsi konsultansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)	92	91	946.894.700	91	1.170.049.000	91	1.210.998.800	92	1.253.381.800	92	1.297.249.990	93	1.342.653.550	
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2	3		3		3		3		3				
		Indeks Integritas Nasional	72,17	73,33 - 73,55		73,55 - 74		74 - 74,5		74,5 - 75		75 - 75,5		75,5 - 76		
		Jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria menuju WBK/WBBM	0	1		1		1		2		2				
		Rata-rata Maturitas Penyelenggaraan Resiko	29,93	28		29		30		31		32		33		
		Rata-rata Nilai SAKIP OPD	76,46	76		76,5		77		77,5		78		78,5		
Kesatuan Bangsa dan Politik																
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					1.569.323.400		4.211.966.900		3.188.977.400		4.211.966.900		3.188.977.400		4.211.966.900	Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Pengembangan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	100	1.569.323.400	100	4.211.966.900	100	3.188.977.400	100	4.211.966.900	100	3.188.977.400	100	4.211.966.900	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					1.217.450.000		5.429.264.200		5.429.264.200		5.429.264.200		5.429.264.200		5.429.264.200	
	Meningkatnya Ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	100	100	1.217.450.000	100	5.429.264.200	100	5.429.264.200	100	5.429.264.200	100	5.429.264.200	100	5.429.264.200	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					6.378.861.000		6.378.861.000		6.378.861.000		6.378.861.000		7.013.695.900		6.378.861.000	
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	100	6.378.861.000	100	6.378.861.000	100	6.378.861.000	100	6.378.861.000	100	7.013.695.900	100	6.378.861.000	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					404.000.400		1.852.594.400		1.852.594.400		1.852.594.400		1.852.594.400		1.852.594.400	
	Meningkatnya Ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100	100	404.000.400	100	1.852.594.400	100	1.852.594.400	100	1.852.594.400	100	1.852.594.400	100	1.852.594.400	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					424.172.800		840.930.100		840.930.100		840.930.100		840.930.100		840.930.100	
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100	100	424.172.800	100	840.930.100	100	840.930.100	100	840.930.100	100	840.930.100	100	840.930.100	
Kewilayahan																
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					10.661.818.000		11.566.625.049		12.455.400.571		12.941.917.926		13.336.545.846		13.722.243.680	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Karawang Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,40	86,00	662.765.300	86,50	701.747.800	87,00	730.215.781	87,50	743.404.425	88,00	749.246.443	88,50	763.213.666	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Pangkalan	Indeks Kepuasan Masyarakat	65,20	65,25	362.872.400	65,30	718.067.850	65,35	743.200.225	65,40	769.212.233	65,45	796.134.661	65,50	823.999.374	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Telukjambe Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	72,10	327.165.000	74,26	464.523.300	76,49	480.781.616	78,79	497.608.972	81,15	515.025.286	83,58	533.051.171	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Ciampel	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	366.704.000	70	338.849.200	75	381.704.000	80	381.704.000	80	381.704.000	80	381.704.000	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Klari	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	392.847.800	75	425.717.700	80	456.007.100	85	471.967.300	85,5	488.486.100	90	505.583.400	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Rengasdengklok	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	75	587.860.000	77	433.159.400	79	482.000.000	81	582.920.000	83	586.020.000	84	560.480.700	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Kutawaluya	Indeks Kepuasan Masyarakat	65.25	70	329,803,400	72	332,227,500	74	372,455,463	76	385,491,405	78	398,983,604	80	412,948,029	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Batujaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	310.235.200	72	333.354.900	75	350.022.266	78	362.273.046	80	374.952.600	82	388.075.939	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Tirtajaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	74,00	492.369.900	78,00	368.968.600	82,00	401.882.501	86,00	415.948.389	90,00	430.506.582	92,00	445.574.313	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Pedes	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	70%	228.618.400	72%	236.620.044	74%	244.901.746	76%	253.473.307	78%	262.344.872	80%	271.526.943	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Cibuaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	100	291.761.800	100	286.894.000	100	296.935.290,5	100	307.328.024,79	100	318.084.505,95	100	329.217.463,33	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Pakisjaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	268.532.900	73	316.485.700	75	327.562.699	77	339.027.393	79	350.893.351	81	363.174.618	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Cikampek	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,56	83,66	358.360.700	84,82	321.772.200	85,98	348.034.227	87,14	360.215.425	88,30	372.822.965	89,46	385.871.769	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Jatisari	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,50	82,08	355.793.000	83,08	370.517.879	84,08	393.785.030	85,08	398.198.156	86,08	402.774.742	87,08	407.493.194	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Cilamaya Wetan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83,66	298.864.200	84,82	324.709.500	85,98	379.074.332,50	87,14	392.341.934,14	88,3	406.073.901,83	89,46	420.286.488,40	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Indeks Kepuasan Masyarakat	65,20	70	364.356.900	70,10	369.205.400	70,15	382.127.589	70,20	395.502.055	70,25	409.344.626	70,30	423.671.689	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Tirtamulya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	340.072.500	74	383.397.200	76	401.477.898	78	417.266.554	80	431.870.885	82	446.986.363	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Telagasari	Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	87.24	372.603.000	87.49	388.209.900	87.74	402.126.248	87.99	416.529.665	88.24	431.437.204	88.49	446.866.506	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Rawamerta	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	88	334.151.800	89	328.447.600	90	361.943.266	91	374.611.280	92	387.722.675	93	401.292.969	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Lemahabang	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	281.074.700	74	308.626.692	76	407.495.977	78	421.758.337	80	436.519.879	82	451.798.075	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Tempuran	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,50	83,66	71.381.900	84,82	367.546.550	85,98	370.668.332	87,14	383.641.724	88,30	397.069.184	89,46	410.966.605	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Majalaya	Indeks Kepuasan Masyarakat	89	89.50	305.268.400	90.50	327.251.250	91.50	341.918.009,75	92.50	353.885.140,09	93.5	366.271.119,99	94.50	379.090.609,19	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Jayakarta	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	72	302.120.700	74	289.020.600	76	308.736.321	78	319.542.092,24	80	330.726.065,46	83	342.301.477,75	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Banyusari	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,18	79,18	263,741,800	79,58	303.741.800	80,08	326.117.484,50	80,58	337.516.776,46	81,08	349.314.539,83	81,58	361.524.703,45	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Kotabaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	100,00	65,30	402.560.400	66,00	447.343.700	67,00	483.000.729,50	68,00	499.205.755,03	68,00	515.977.956,46	70,00	533.337.184,93	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Karawang Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	468.050.000	71	491.629.800	72	620.036.843	73	641.738.133	74	664.198.967	75	687.445.931	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Telukjambe Barat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	433.446.600	85,825	438.615.950	86,65	463.967.508	87,475	480.577.545	88,3	497.397.759	89,125	514.806.681	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Tegalwaru	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70,1	369.503.100	70,2	399.330.389	70,3	430.306.953	70,4	445.467.695	70,5	460.955.564	70,6	477.089.009	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Purwasari	Indeks Kepuasan Masyarakat	70	70	415.293.100	70,1	429.828.359	70,2	444.872.351	70,3	459.896.883	70,4	477.993.274	70,5	494.723.037	
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada Kecamatan Cilebar	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,01	81,57	303.639.100	82,00	320.814.286	83,00	322.042.785	83,00	333.664.283	84,00	345.692.533		358.141.772	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					268.269.700		0		859.658.630		883.647.235		908.475.058		934.170.487	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Karawang Barat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	25.000.000	100	25.875.000	100	26.780.625	100	27.717.947	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	12.480.000	100	12.916.800	100	13.368.888	100	13.836.799	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Pangkalan															
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Telukjambe Timur	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	26.000.000	100	26.910.000	100	27.851.850	100	28.826.665		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Ciampel	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	35.200.000	100	35.200.000	100	35.200.000	100	35.200.000		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Klari	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	31.000.000	100	32.085.000	100	33.208.000	100	34.370.000		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Rengasdengklok	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	31.200.000	100	32.292.000	100	33.422.220	100	34.591.998		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Kutawaluya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	66.520.000	100	68.848.200	100	71.257.887	100	73.751.913		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Batujaya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	65.000.000	100	67.275.000	100	69.629.625	100	72.066.661		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	15.000.000	100	15.525.000	100	16.068.375	100	16.630.768		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kecamatan pada Kecamatan Tirtajaya															
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Pedes	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0%	0	100	121.126.880	100	121.169.274	100	121.211.683	100	121.254.107	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Cibuaya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	20.000.000	100	20.700.000	100	21.424.500	100	22.174.357,50	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Pakisjaya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	13.535.000	100	14.008.725	100	14.499.030	100	15.006.496	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Cikampek	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	10.000.000	100	10.350.000	100	10.712.250	100	11.087.179	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Jatisari	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100%	32.136.750	100%	33.261.536	100%	34.425.690	100%	35.630.589	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Cilamaya Wetan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	25.000.000,00	100	25.875.000,00	100	26.780.625,00	100	27.717.947	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	7.200.000	100	7.452.000	100	7.712.820	100	7.982.769	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Tirtamulya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	48.000.000	100	49.680.000	100	51.418.800	100	53.218.458	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Telagasari	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100%	48.000.000	100%	49.680.000	100%	51.418.800	100%	53.218.458	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Rawamerta	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	10.000.000	100	10.350.000	100	10.712.250	100	11.087.179	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Lemahabang	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	10.500.000	100	10.867.500	100	11.247.863	100	11.641.538	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Tempuran	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	268.269.700	0	0,00	100	25.000.000	100	25.875.000,00	100	26.780.625,00	100	27.717.947	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Majalaya	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	90	91	0	92	0	93	10.000.000	94	10.000.000,00	95	10.000.000,00	96	10.000.000,00	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Jayakarta	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	15.600.000	100	16.146.000	100	16.711.110	100	17.295.998,85	
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	0	100	5.000.000,00	100	5.175.000,00	100	5.356.125,00	100	5.543.589	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Banyusari															
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Kotabaru	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	25.000.000	100	25.875.000	100	26.780.625	100	27.717.947		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Karawang Timur	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Telukjambe Barat	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	0	N/A	100	37.000.000	100	38.324.600	100	39.696.621	100	41.117.760		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Tegalwaru	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	N/A	0	N/A	100%	14.160.000	100%	14.655.600	100%	15.168.546	100%	15.699.445		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Purwasari	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	0	0	0	100	15.000.000	100	15.525.000	100	16.068.375	100	16.630.078		
	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum secara terkoordinasi, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kecamatan pada Kecamatan Cilebar	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0	0	0	0	100	50.000.000	100	51.750.000	100	53.561.250	100	55.435.894		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				20.031.608.256		16.616.384.944		17.727.654.215		18.295.251.702		18.999.988.185		19.758.361.471	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Karawang Barat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	0	0	12.578.148.656	0	12.611.927.556	100	13.198.873.459	100	13.627.000.781	100	14.136.627.621	100		14.630.519.782
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang	100	100	12.520.200	100	21.015.800	100	23.117.380	100	25.429.118	100	27.972.030	100		30.769.233

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Pangkalan	Melibatkan Partisipasi Masyarakat														
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Telukjambe Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100 %	100 %	36.477.800	100 %	42.291.400	100 %	71.771.599	100 %	74.283.605	100 %	76.883.531	100 %	79.574.453	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Ciampel	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	33.000.000	100	35.000.200	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Klari	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	33.483.100	100	32.758.000	100	33.904.500	100	35.091.200	100	36.319.400	100	37.590.600	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Rengasdengklok	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	40.490.500	100	42.038.328	100	59.001.263	100	60.326.307	100	62.206.478	100	65.893.705	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Kutawaluya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	24.272.600	100	24.275.400	100	64.025.039	100	66.265.915	100	68.585.222	100	70.985.705	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Batujaya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	31.448.700	100	31.448.700	100	32.549.404	100	33.688.632	100	34.867.733	100	36.088.103	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Tirtajaya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	8.251.000	100	20.000.000	100	30.700.000	100	31.774.500	100	32.886.608	100	34.037.639	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Pedes	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	42.196.200	100	43.673.067	100	45.201.624	100	46.768.865	100	48.405.775	100	50.099.977	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Cibuaya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	34.877.900	100	37.828.700	100	39.152.705	100	40.523.049	100	41.941.356	100	43.409.303	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Pakisjaya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	77.110.400	100	62.885.400	100	65.086.389	100	67.364.412	100	69.722.166	100	72.162.442	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Cikampek	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	25.408.400	100	25.408.400	100	38.797.694	100	40.155.613	100	41.561.060	100	43.015.697	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Jatisari	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100%	100%	24.371.500	100%	25.224.503	100%	49.674.310	100%	51.412.909	100%	53.212.362	100%	55.074.797	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	26.405.200	100	23.702.100	100	34.531.674	100	35.740.282	100	36.991.192	100	38.285.884	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kelurahan pada Kecamatan Cilamaya Wetan															
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	27.229.900	100	24.244.100	100	25.092.644	100	25.970.886	100	26.879.867	100	27.820.662	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Tirtamulya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	30.250.000	100	30.250.000	100	32.308.750	100	33.717.500	100	34.897.613	100	36.119.028	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Telagasari	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	N/A	100%	31.123.400	100%	31.123.400	100%	32.212.719	100%	33.340.164	100%	34.507.070	100%	35.714.818	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Rawamerta	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100 %	12.936.700	100 %	27.450.300	100 %	39.411.061	100 %	40.790.448	100 %	42.218.115	100 %	43.695.747	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Lemahabang	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	23.065.500	100	23.872.793	100	24.708.341	100	25.573.133	100	40.866.165	100	42.296.481	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Tempuran	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	22,005,900	100	22,100,000	100	102.873.500	100	106.473.073	100	110.200.665	100	114.057.688	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Majalaya	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	90	91	37.038.000	92	35.000.000	93	48.162.934	94	49.498.637	95	50.881.089	96	52.311.927	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Jayakarta	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	28.397.300	100	28.397.300	100	31.991.206	100	33.110.898	100	34.269.779	100	35.469.221	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Banyusari	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	98	98	10.202.000	98	16.162.400	98	37.941.414	98	39.269.363	98	40.643.791	98	42.066.324	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Kotabaru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100,00	100	51.708.000	100	51.708.000	100	53.517.780	100	55.390.902	100	57.329.584	100	59.336.119	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Karawang Timur	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	6.589.110.300	100	3.059.371.800	100	3.209.239.813	100	3.312.898.206	100	3.436.464.644	100	3.548.075.906	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Telukjambe Barat	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	34.726.600	100	46.184.200	100	63.300.647	100	65.554.410	100	67.848.815	100	181.604.135	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Tegalwaru	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100%	21,100,000	100%	21.100.000	100%	71.838.500	100%	74.352.848	100%	76.955.198	100%	79.648.628	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Purwasari	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	56.162.800	100	58.128.498	100	60.162.995	100	62.268.701	100	64.448.106	100	66.703.790	
	Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan pada Kecamatan Cilebar	Persentase Kegiatan Pemberdayaan yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat	100	100	49.189.700	100	61.814.600	100	73.504.873	100	66.217.345	100	78.395.150	100	70.933.676	
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8.140.142.600		6.966.662.245		7.294.780.364		7.526.918.632		7.762.703.409		8.037.063.761	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Karawang Barat	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	205.418.600	100	169.495.400	100	174.580.262	100	179.817.670	100	185.212.200	100	190.768.566	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Pangkalan	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	253.746.600	100	194.745.400	100	201.561.489	100	208.616.141	100	215.917.706	100	223.474.826	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Telukjambe Timur	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	291.592.900	100 %	244.858.800	100 %	253.428.858	100 %	262.298.868	100 %	271.479.328	100 %	280.981.105	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Ciampel	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	213.807.200	100	173.916.400	100	213.807.200	100	213.807.200	100	213.807.200	100	213.807.200	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Klari	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	298.598.000	100	218.235.600	100	225.873.800	100	233.779.400	100	241.961.700	100	250.430.400	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Rengasdengklok	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	289.908.000	100	262.369.000	100	270.000.000	100	265.000.000	100	255.000.000	100	275.000.000	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Kutawaluya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	333.933.700	100	318.178.800	100	329.315.058	100	340.841.085	100	352.770.523	100	365.117.491	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Batujaya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	278.748.400	100	255.610.800	100	264.557.178	100	273.816.679	100	283.400.262	100	293.319.271	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Tirtajaya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	190.577.000	100	145.802.200	100	150.905.277	100	156.186.962	100	161.653.505	100	167.311.378	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Pedes	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	70%	70%	276.741.700	72%	286.427.660	74%	296.452.628	76%	306.477.596	78%	317.204.312	80%	328.306.462	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Cibuaya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	300.652.300	100	263.478.400	100	272.700.144	100	282.244.649	100	292.123.212	100	302.347.524	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Pakisjaya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	271.364.100	100	179.644.100	100	185.931.644	100	192.439.251	100	199.174.625	100	206.145.737	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Cikampek	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	308.046.900	100%	254.609.000	100%	263.520.315	100%	272.743.526	100%	282.289.549	100%	292.169.684	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Jatisari	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	242.285.600	100%	199.232.532	100%	206.205.671	100%	213.422.869	100%	220.892.670	100%	228.623.913	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Cilamaya Wetan	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	291.500.000	100	271.520.000	100	281.023.200	100	290.859.012	100	301.039.077	100	311.575.445	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	298.856.800	100	286.681.600	100	296.715.456	100	307.100.497	100	317.849.014	100	328.973.730	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Tirtamulya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	241.432.800	100	189.416.000	100	190.045.560	100	196.675.120	100	203.558.749	100	210.683.305	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100%	241.718.200	100%	211.377.200	100%	218.775.402	100%	226.432.541	100%	234.357.680	100%	242.560.199	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	umum pada Kecamatan Telagasari															
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Rawamerta	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100 %	274.153.400	100 %	211.950.800	100 %	219.369.078	100 %	227.046.996	100 %	234.993.641	100 %	243.218.418	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Lemahabang	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	313.238.300	100	273.238.300	100	282.801.641	100	292.699.698	100	302.944.187	100	313.547.234	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Tempuran	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	318.007.600	100	253.193.100	100	262.054.859	100	271.226.779	100	280.719.716	100	290.544.906	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Majalaya	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	90	91	208.837.800	92	156.779.200	93	216.147.123	94	223.712.272	95	231.542.202	96	239.646.179	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Jayakarta	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	222.608.800	100	268.320.000	100	277.711.200	100	287.431.092	100	297.491.180	100	307.903.372	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Banyusari	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	304.908.000	100	264.908.000	100	274.179.780	100	283.776.072	100	293.708.234	100	303.988.023	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Kotabaru	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	306.911.500	100	266.911.500	100	276.253.403	100	285.922.272	100	295.929.551	100	306.287.085	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Karawang Timur	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	221.038.000	100	152.219.600	100	162.547.286	100	168.236.441	100	174.124.716	100	180.219.082	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Telukjambe Barat	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	311.773.000	100	223.557.200	100	231.381.702	100	239.480.062	100	247.861.864	100	256.537.029	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Tegalwaru	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100%	297.264.000	100%	257.257.000	100%	266.260.995	100%	275.580.130	100%	285.225.434	100%	295.208.325	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Purwasari	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	287.555.800	100	297.620.253	100	308.036.962	100	318.818.256	100	329.976.845	100	341.526.035	
	Terciptanya kondisi wilayah yang kondusif, aman, tertib, dan responsif terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan Cilebar	Persentase Laporan Kejadian ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang Ditindaklanjuti	100	100	244.917.600	100	215.108.400	100	222.637.194	100	230.429.496	100	238.494.528	100	246.841.837	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					338.778.100		423.704.511		803.658.017		778.503.036		859.373.796		836.457.398	Seluruh Kecamatan di Kabupaten Karawang
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Karawang Barat	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pangkalan	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	26.779.200	100	21.645.336	100	19.351.846	100	23.187.024	100	20.730.181	100	24.838.521	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Telukjambe Timur	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100 %	100 %	19.912.500	100 %	32.016.800	100 %	26.461.676	100 %	17.037.834	100 %	20.634.157	100 %	18.251.354	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Ciampel	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	10.500.000	100	10.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Klari	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	100	56.897.200	100	58.888.600	100	60.949.700	100	63.082.200	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	16.596.500	100	17.961.600	100	18.000.000	100	19.000.000	100	18.000.000	100	20.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Rengasdengklok															
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Kutawaulya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	6.532.800	100	6.533.200	100	11.161.862	100	11.552.527	100	11.956.866	100	12.375.356	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Batujaya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	20.341.000	100	21.052.900	100	21.798.700	100	22.561.700	100	23.351.400	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Tirtajaya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	15.000.000	100	60.525.000	100	52.293.375	100	64.835.893	100	56.017.971	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pedes	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0%	0	72%	39.613.383	74%	40.999.851	76%	42.434.844	78%	43.920.064	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Cibuaya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	15.000.000	100	15.525.000	100	16.068.375	100	16.630.768	100	17.212.845	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Pakisjaya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	38.273.800	100	39.613.383	100	40.999.851	100	42.434.844	100	43.920.064	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Cikampek	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	100	12.838.000	100	33.287.330	100	24.102.387	100	24.945.970	100	25.819.079	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Jatisari	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100%	100%	23.152.100	100%	23.962.424	100%	38.191.421	100%	39.528.120	100%	40.911.605	100%	42.343.511	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Cilamaya Wetan	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	13.366.100	100	13.457.500	100	23.928.513	100	14.416.010	100	14.920.571	100	15.442.791	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	11.748.600	100	11.932.800	100	12.350.448	100	12.782.714	100	13.230.109	100	13.693.162	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Tirtamulya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	10.945.600	100	11.642.000	100	16.049.470	100	16.841.940	100	17.431.408	100	18.041.507	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Telagasari	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100%	9.455.200	100%	9.455.200	100%	9.786.132	100%	10.128.647	100%	10.483.149	100%	10.850.059	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Rawamerta	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100 %	12.370.900	100 %	16.023.900	100 %	46.584.737	100 %	48.215.202	100 %	49.902.734	100 %	51.649.331	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Lemahabang	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	10.018.300	100	10.368.941	100	30.731.854	100	31.807.469	100	32.920.730	100	34.072.956	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Tempuran	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	32.750.000	100	43.896.250	100	60.957.619	100	36.310.510	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Majalaya	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	89.50	8.968.800	90	11.999.800	90.50	12.419.793	91	12.854.486	91.50	13.304.393	92	13.770.047	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100,00	100	32.877.600	100	32.877.600	100	35.179.032	100	36.410.298	100	37.684.659	100	39.003.622	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Jayakarta																
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Banyusari	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	15.081.600	100	15.081.600	100	36.098.800	100	32.936.700	100	23.138.460	100	49.922.656	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Kotabaru	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	17.000.000	100	17.000.000	100	17.595.000	100	18.210.825	100	18.848.204	100	19.507.891	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Karawang Timur	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	0	0	0	0	0	100	21.000.000	100	21.735.000	100	30.495.725	100	23.283.075	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Telukjambe Barat	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	40.185.300	0	0	100	66.591.786	100	48.222.498	100	74.910.285	100	51.657.145	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Tegalwaru	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100%	13.543.000	100%	17.264.500	100%	14.244.444	100%	14.742.999	100%	23.054.281	100%	15.793.069	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Purwasari	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	24.626.000	100	25.487.910	100	26.379.987	100	27.303.287	100	28.258.902	100	29.247.964	
	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa agar akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan pada Kecamatan Cilebar	Persentase Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Dibina di Wilayah Kecamatan	100	100	5.118.000	100	7.040.600	100	7.287.021	100	7.542.067	100	7.806.039	100	8.079.250	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota					2.569.079.753.011		2.678.162.574.156		2.813.175.084.765		2.933.022.612.052		3.047.001.900.583		3.179.581.452.929
Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	44,73	45,85	978.263.658.569	46,97	1.012.059.834.701	48,09	1.048.280.178.914	49,21	1.084.141.985.177	50,33	1.122.086.954.659	51,45	1.161.359.998.071		

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Kesehatan	74,21	>80	328.004.588.272	>80 (A)	326.924.530.002	>80 (A)	357.473.928.554	>80 (A)	362.676.266.053	>80 (A)	375.361.185.365	>80 (A)	388.205.402.584	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Adiarsa	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.828.521.505	>80 (A)	1.865.091.935	>80 (A)	1.902.393.774	>80 (A)	1.940.441.649	>80 (A)	1.979.250.482	>80 (A)	2.018.835.492	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Anggadita	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	767.086.425	>80 (A)	782.339.250	>80 (A)	798.090.300	>80 (A)	813.977.850	>80 (A)	830.219.250	>80 (A)	850.279.500	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Balongsari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.075.092.480	>80 (A)	1.096.594.330	>80 (A)	1.118.526.216	>80 (A)	1.140.896.740	>80 (A)	1.163.714.676	>80 (A)	1.186.988.969	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Batujaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	4.053.690.795	>80 (A)	4.134.764.611	>80 (A)	4.217.459.903	>80 (A)	4.301.809.101	>80 (A)	4.387.845.282	>80 (A)	4.475.602.189	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Bayurlor	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	971.920.781	>80 (A)	1.099.697.550	>80 (A)	1.110.197.550	>80 (A)	1.111.247.550	>80 (A)	1.113.347.550	>80 (A)	1.120.697.550	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Ciampel	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.621.514.056	>80 (A)	1.653.944.337	>80 (A)	1.687.023.225	>80 (A)	1.720.763.689	>80 (A)	1.755.178.963	>80 (A)	1.790.282.542	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Cibuaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	3.180.815.643	>80 (A)	3.189.261.180	>80 (A)	3.196.582.872	>80 (A)	3.205.199.550	>80 (A)	3.238.333.455	>80 (A)	3.298.060.124	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Cicinde	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.829.520.000	>80 (A)	1.874.250.000	>80 (A)	1.911.735.000	>80 (A)	1.969.087.050	>80 (A)	2.047.848.600	>80 (A)	2.150.240.400	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Cikampek	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.935.112.040	>80 (A)	2.993.814.281	>80 (A)	3.053.690.566	>80 (A)	3.114.764.378	>80 (A)	3.177.059.665	>80 (A)	3.240.600.859	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Cikampek Utara	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	722.937.336	>80 (A)	737.396.083	>80 (A)	752.144.005	>80 (A)	767.186.885	>80 (A)	782.530.622	>80 (A)	798.181.235	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Cilamaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.512.823.628	>80 (A)	2.564.105.773	>80 (A)	2.615.387.918	>80 (A)	2.667.695.668	>80 (A)	2.721.049.560	>80 (A)	2.775.469.543	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Curug	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	945.954.486	>80 (A)	972.162.765	>80 (A)	983.370.854	>80 (A)	994.720.702	>80 (A)	1.006.214.460	>80 (A)	1.026.338.749	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.435.962.851	>80 (A)	1.511.006.427	>80 (A)	1.543.284.556	>80 (A)	1.576.124.247	>80 (A)	1.609.536.731	>80 (A)	1.643.533.466	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kesehatan di Puskesmas Gempol															
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Jatisari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.437.383.882	>80 (A)	2.486.130.150	>80 (A)	2.512.441.606	>80 (A)	2.539.045.110	>80 (A)	2.565.944.115	>80 (A)	2.617.262.997	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Jayakarta	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.746.593.517	>80 (A)	1.781.525.387	>80 (A)	1.817.155.895	>80 (A)	1.853.499.013	>80 (A)	1.890.568.993	>80 (A)	1.928.380.373	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Jomin	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.204.101.360	>80 (A)	1.228.183.387	>80 (A)	1.252.747.055	>80 (A)	1.277.801.996	>80 (A)	1.303.358.036	>80 (A)	1.329.425.197	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Kalangsari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.682.520.420	>80 (A)	1.798.020.420	>80 (A)	1.819.020.420	>80 (A)	1.819.020.420	>80 (A)	1.819.020.420	>80 (A)	1.819.020.420	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Karawang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.258.781.867	>80 (A)	1.283.957.504	>80 (A)	1.309.636.654	>80 (A)	1.335.829.387	>80 (A)	1.362.545.976	>80 (A)	1.389.796.895	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Karawang Kulon	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.027.950.000	>80 (A)	1.048.509.000	>80 (A)	1.069.479.180	>80 (A)	1.090.868.764	>80 (A)	1.112.686.139	>80 (A)	1.134.939.861	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Kertamukti	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.221.125.060	>80 (A)	2.265.547.561	>80 (A)	2.310.858.513	>80 (A)	2.357.075.683	>80 (A)	2.404.217.196	>80 (A)	2.452.301.541	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Klari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.155.926.631	>80 (A)	2.199.045.164	>80 (A)	2.243.026.067	>80 (A)	2.287.886.588	>80 (A)	2.333.644.320	>80 (A)	2.380.317.207	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Kotabaru	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.706.553.858	>80 (A)	1.740.684.935	>80 (A)	1.775.498.634	>80 (A)	1.811.008.607	>80 (A)	1.847.228.779	>80 (A)	1.884.173.354	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Kutamukti	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.478.871.240	>80 (A)	1.508.448.665	>80 (A)	1.538.617.638	>80 (A)	1.569.389.991	>80 (A)	1.600.777.791	>80 (A)	1.632.793.346	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Kutawaluya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.835.614.935	>80 (A)	1.872.327.234	>80 (A)	1.909.773.778	>80 (A)	1.947.969.254	>80 (A)	1.986.928.639	>80 (A)	2.026.667.211	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Lemah Duhur	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.355.656.939	>80 (A)	1.382.770.078	>80 (A)	1.410.425.479	>80 (A)	1.438.633.989	>80 (A)	1.467.406.669	>80 (A)	1.496.754.802	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Lemahabang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.890.169.205	>80 (A)	2.947.972.589	>80 (A)	3.006.932.041	>80 (A)	3.067.070.682	>80 (A)	3.128.412.096	>80 (A)	3.190.980.337	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Loji	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.511.363.621	>80 (A)	2.561.590.893	>80 (A)	2.612.822.711	>80 (A)	2.665.079.166	>80 (A)	2.718.380.748	>80 (A)	2.772.748.363	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Majalaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.525.439.751	>80 (A)	1.555.948.545	>80 (A)	1.587.067.515	>80 (A)	1.618.808.864	>80 (A)	1.651.185.040	>80 (A)	1.684.208.740	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Medang Asem	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.932.000.000	>80 (A)	1.970.640.000	>80 (A)	2.010.052.800	>80 (A)	2.050.253.856	>80 (A)	2.091.258.933	>80 (A)	2.133.084.112	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Nagasari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	953.756.361	>80 (A)	972.831.488	>80 (A)	992.288.118	>80 (A)	1.012.133.880	>80 (A)	1.032.376.557	>80 (A)	1.053.024.088	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Pacing	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	703.747.151	>80 (A)	717.822.094	>80 (A)	732.178.537	>80 (A)	746.822.108	>80 (A)	761.758.550	>80 (A)	776.993.720	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Pakisjaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.032.058.595	>80 (A)	2.072.699.767	>80 (A)	2.114.153.763	>80 (A)	2.154.893.314	>80 (A)	2.196.432.223	>80 (A)	2.196.432.223	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Pangkalan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	3.312.623.004	>80 (A)	1.556.520.655	>80 (A)	1.587.651.068	>80 (A)	1.619.404.089	>80 (A)	1.651.792.171	>80 (A)	1.684.828.014	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Pasirukem	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.114.911.212	>80 (A)	2.157.209.436	>80 (A)	2.200.353.624	>80 (A)	2.244.360.697	>80 (A)	2.289.247.911	>80 (A)	2.335.032.869	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Pedes	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.882.855.745	>80 (A)	2.940.512.860	>80 (A)	2.999.323.117	>80 (A)	3.059.309.580	>80 (A)	3.120.495.771	>80 (A)	3.182.905.686	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Plawad	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.067.640.000	>80 (A)	1.089.060.000	>80 (A)	1.110.833.220	>80 (A)	1.133.009.984	>80 (A)	1.155.672.285	>80 (A)	1.178.776.280	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Purwasari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.683.990.000	>80 (A)	1.717.669.800	>80 (A)	1.752.023.196	>80 (A)	1.787.063.660	>80 (A)	1.822.804.933	>80 (A)	1.859.261.032	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Rawamerta	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.453.960.925	>80 (A)	1.483.040.142	>80 (A)	1.512.700.944	>80 (A)	1.542.954.963	>80 (A)	1.573.814.061	>80 (A)	1.605.290.340	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Rengasdengklok	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	3.950.100.000	>80 (A)	4.029.102.000	>80 (A)	4.072.573.890	>80 (A)	4.116.543.585	>80 (A)	4.161.018.225	>80 (A)	4.244.238.590	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.393.738.526	>80 (A)	1.422.395.680	>80 (A)	1.436.931.751	>80 (A)	1.451.619.426	>80 (A)	1.457.010.344	>80 (A)	1.481.456.165	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kesehatan di Puskesmas Sukatani															
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Sungaibuntu	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.069.056.450	>80 (A)	1.090.437.579	>80 (A)	1.112.246.330	>80 (A)	1.134.491.257	>80 (A)	1.157.181.082	>80 (A)	1.180.324.704	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Telagasari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.755.830.000	>80 (A)	2.810.946.600	>80 (A)	2.867.165.532	>80 (A)	2.924.508.843	>80 (A)	2.982.999.020	>80 (A)	3.042.659.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Tanjungpura	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.202.597.550	>80 (A)	1.226.649.501	>80 (A)	1.251.182.491	>80 (A)	1.276.206.141	>80 (A)	1.301.730.263	>80 (A)	1.327.764.868	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Telukjambe	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.581.540.308	>80 (A)	1.613.171.114	>80 (A)	1.645.434.537	>80 (A)	1.678.343.227	>80 (A)	1.711.910.091	>80 (A)	1.746.148.294	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Tempuran	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.867.653.480	>80 (A)	1.905.006.550	>80 (A)	1.943.106.681	>80 (A)	1.981.968.814	>80 (A)	2.021.608.191	>80 (A)	2.062.040.355	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Tirtajaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	3.318.408.555	>80 (A)	3.384.776.726	>80 (A)	3.452.472.260	>80 (A)	3.521.521.706	>80 (A)	3.591.952.140	>80 (A)	3.663.791.183	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Tirtamulya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.891.942.266	>80 (A)	1.893.087.886	>80 (A)	1.893.845.284	>80 (A)	1.894.699.438	>80 (A)	1.895.041.102	>80 (A)	1.896.138.487	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Tunggakjati	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.649.883.761	>80 (A)	1.682.881.436	>80 (A)	1.716.539.065	>80 (A)	1.750.869.847	>80 (A)	1.785.887.244	>80 (A)	1.821.604.989	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Wadas	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	1.176.624.225	>80 (A)	1.200.156.709	>80 (A)	1.224.159.844	>80 (A)	1.248.643.040	>80 (A)	1.273.615.900	>80 (A)	1.299.088.218	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di Puskesmas Wanakerta	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	2.080.675.212	>80 (A)	2.122.288.716	>80 (A)	2.164.734.491	>80 (A)	2.208.029.180	>80 (A)	2.252.189.764	>80 (A)	2.297.233.559	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di RSUD Karawang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	198.207.599.583	>80 (A)	228.000.000.000	>80 (A)	250.650.000.000	>80 (A)	272.940.000.000	>80 (A)	287.860.000.000	>80 (A)	303.770.000.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di RSUD Jatisari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	46.800.000.000	>80 (A)	54.800.000.000	>80 (A)	60.296.600.000	>80 (A)	66.314.860.000	>80 (A)	72.955.146.000	>80 (A)	80.211.260.600	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan di RSUD Rengasdengklok	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,21	>80	0	>80 (A)	11.216.735.742	>80 (A)	15.752.194.478	>80 (A)	31.452.768.189	>80 (A)	48.077.463.608	>80 (A)	52.885.209.969	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	42,17	42,67	58.790.366.050	43,17	52.565.208.800	43,67	54.404.991.100	44,17	56.309.165.700	44,67	58.279.986.500	45,17	60.319.786.100	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Bidang Pertanahan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	43,74	45,24	32.034.909.035	46,74	27.804.167.255	48,24	37.995.950.000	49,74	38.054.572.500	51,24	39.195.859.875	52,74	39.066.439.183	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	77,72	78	24.586.037.238	78,5	24.824.130.288	79	26.418.709.242	79,7	27.523.014.066	80	29.629.759.557	81	31.225.066.141	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang ketenteraman, Keteriban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	70,81	71	16.263.280.160	72	15.518.679.144	73	16.460.242.575	74	15.757.554.355	75	15.893.103.920	76	16.896.288.797	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	70,23	71	10.997.804.600	72	11.040.769.001	73	14.204.811.187	74	18.250.471.526	75	23.464.891.962	76	30.169.146.809	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	84,46	84,56	20.897.237.278	84,66	22.516.899.887	84,76	23.835.776.761	84,86	24.319.851.831	84,96	25.171.046.646	85,06	26.366.356.324	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	75,65	75,8	7.851.997.470	75,8	7.659.063.870	76	7.925.920.739	76	8.202.750.719	76	8.489.846.995	77	8.786.991.639	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	71,47	71,97	54.677.876.682	72,47	58.701.584.242	72,97	59.216.066.078	73,47	58.738.514.806	73,97	53.507.193.799	74,47	54.141.320.081	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	68,83	70	17.089.621.282	71	17.515.442.678	72	17.919.733.171	73	18.545.173.831	74	19.192.504.915	75	19.862.492.588	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	52,06	52,15	19.381.075.381	52,25	19.386.564.981	52,35	21.860.461.900	52,45	24.593.489.540	52,55	27.049.163.600	52,65	30.071.555.042	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	74,17	75	11.956.890.291	76	14.112.432.880	77	14.503.642.500	78	14.925.973.082	79	15.390.536.723	80	15.901.556.726	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	76,04	77	12.111.351.673	78	11.401.681.673	79	11.415.951.673	80	11.339.881.673	81	11.490.471.673	82	11.647.381.673	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	77.18	77,3	29.033.190.202	77,4	27.913.561.465	77,5	30.944.394.876	77,6	29.616.300.595	77,7	32.907.114.975	77,8	31.581.195.810	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	47,48	47,5	13.548.322.208	47,75	15.243.600.000	48	15.243.600.000	48,25	15.243.600.000	48,5	15.243.600.000	48,75	15.243.600.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian															
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	72,3	73,3	10.613.746.700	74.30	11.217.025.822	75,3	11.609.621.722	76,3	12.015.958.483	77,3	12.436.517.028	78,3	12.871.795.122	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	78,05	79	15.361.033.105	80	14.197.833.605	81	14.999.757.783	82	30.915.999.305	83	16.446.709.780	84	47.022.344.626	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	64,87	64,88	14.446.367.421	64,89	13.872.489.401	64,9	15.385.026.530	64,91	14.860.557.459	64,92	15.380.676.970	64,93	15.919.000.664	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	75,24	76,03	10.618.876.660	76,83	10.547.088.548	77,53	13.858.016.300	78,33	14.670.630.300	79,13	13.173.500.000	79,93	14.039.500.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	66,55	68,80	14.297.475.941	71,05	13.997.932.501	73,30	14.487.860.139	75,55	14.994.935.243	77,80	15.519.757.977	80,05	16.062.949.506	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	72,74	73,74	18.387.600.930	74,74	18.364.107.630	75,74	19.336.851.398	76,74	20.013.641.197	77,74	20.714.118.636	78,74	21.453.569.179	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	39,66	92.339.710.291	41,64	101.223.339.290	43,72	91.457.983.461	45,91	92.951.648.058	48,21	97.766.038.003	50,62	98.211.465.385	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Perencanaan dan Unsur Penelitian dan Pengembangan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	80,51	80,75	15.486.062.879	81,00	15.117.197.012	81,05	16.691.298.907	81,10	17.275.494.369	81,15	17.880.136.672	81,20	18.505.941.456	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Keuangan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	77,67	77,8	76.882.378.406	78,00	88.862.849.024	78,2	91.321.470.329	78,5	93.604.507.087	78,75	96.417.133.425	79,00	99.341.460.223	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Keuangan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	78,83	79,58	143.393.441.364	80,33	142.694.071.864	81,08	142.744.367.703	81,83	145.141.649.190	82,58	149.246.186.461	83,33	150.072.201.085	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Kepegawaian dan Unsur Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	51	52	16.186.595.330	53	16.881.595.430	53.5	19.409.536.646	54,00	18.122.968.545	54.3	18.562.668.400	54.5	19.538.083.080	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Penunjang Pemerintahan Unsur Pengawasan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	80,01	80	32.025.289.275	80,5	33.694.913.055	81	34.874.228.767	81,5	36.094.822.110	82	37.358.139.538	82,5	38.665.672.600	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	98,76	100	7.671.254.187	100	7.102.420.187	100	7.102.420.187	100	7.102.420.187	100	7.102.420.187	100	7.102.420.187	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	urusan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik															
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Karawang Barat	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50	52,5	16.717.131.048	55	16.933.345.948	56	17.159.419.548	57	17.759.999.226	58	17.912.756.376	59	17.260.579.934	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Pangkalan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	16,36	16,36	3.312.623.004	30,00	3.456.943.604	30,50	3.567.856.631	40,00	3.692.739.584	45,00	3.821.977.498	50,00	3.955.746.712	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Telukjambe Timur	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	51,01	4.354.357.494	52,03	4.528.509.194	53,07	4.385.346.369	54,13	4.507.608.488	55,22	4.665.199.785	56,32	4.858.306.779	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Ciampel	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	51	3.211.577.772	52	3.949.643.472	52	3.181.521.772	52	3.186.521.772	54	3.186.521.772	55	3.186.521.772	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Klari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	52	4.574.780.013	54	4.951.293.613	56	4.786.119.987	58	4.953.632.254	60	5.127.009.500	62	5.306.455.041	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Rengasdengklok	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	4.623.645.325	39,77	5.118.194.525	40,77	4.434.381.132	41,77	4.590.193.472	42,77	4.750.850.243	43,77	4.917.130.002	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Kutawaluya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3.741.316.200	39,77	4.082.889.800	40,77	3.841.501.975	41,77	3.976.304.544	42,77	4.115.825.202	43,77	4.260.229.084	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Batujaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3.032.457.400	39,77	3.819.371.100	40,77	3.953.049.000	41,77	4.091.405.700	42,77	4.234.604.900	43,77	4.382.816.000	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Tirtajaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,7	38,77	3.855.975.212	39,77	4.175.665.112	40,77	4.083.680.830	41,77	4.226.609.660	42,77	4.374.540.995	43,77	4.527.649.932	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Pedes	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	70	70	3.857.573.054	72	4.263.370.084	74	4.383.322.006	76	4.523.829.448	78	4.682.155.506	80	4.846.030.951	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Cibuaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	100	100	4.212.648.580	100	4.216.648.580	100	4.364.231.280	100	4.516.979.375	100	4.675.073.653	100	4.838.701.231	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Pakisjaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50.01	51	3.578.310.600	52	3.703.542.157	53	3.816.241.249	54	3.949.809.691	55	4.088.053.030	56	4.231.134.886	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Cikampek	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	100,00	100,00	3.920.976.280	100,00	4.326.253.680	100,00	4.137.937.949	100,00	4.282.765.777	100,00	4.432.662.579	100,00	4.587.805.768	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif											Urusan Bidang/Bidang Urusan	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target		Pagu (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Jatisari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37.77%	38.77%	4.372.527.944	39.77%	4.865.447.489	40.77%	5.035.667.655	41.77%	5.211.846.532	42.77%	5.393.291.162	43.77%	5.582.917.852	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Cilamaya Wetan	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3.841.831.000	39,77	4.161.805.000	40,77	3.967.733.565	41,77	4.106.604.240	42,77	4.250.335.388	43,77	4.399.097.127	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Cilamaya Kulon	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	50,01	4.003.399.087	51.00	4.241.773.387	52.00	4.050.500.846	53.00	4.192.268.376	54.00	4.338.997.768	55.00	4.490.862.690	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Tirtamulya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37.77	38.77	3.619.199.500	39.77	3.977.441.600	40.77	3.731.127.448	41.77	3.861.716.907	42.77	3.996.877.000	43.77	4.136.667.695	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Telagasari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50.01	52.00	3.472.659.200	54.00	3.716.269.300	56.00	3.458.088.817	58.00	3.578.792.925	60.00	3.703.721.672	62.00	3.833.022.934	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Rawamerta	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	50,01	3.813.604.160	50,51	4.191.590.360	51,01	3.998.561.414	51,51	4.138.511.064	52,01	4.283.358.950	52,51	4.433.276.511	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Lemahabang	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3.498.744.187	39,77	3.948.749.543	40,77	3.757.221.168	41,77	3.888.723.910	42,77	4.024.829.247	43,77	4.165.698.269	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Tempuran	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	50,01	4.304.982.029	50,51	4.521.926.109	51,01	4.353.170.967	51,51	4.505.531.951	52,01	4.662.849.703	52,51	4.826.049.442	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Majalaya	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	90	91	3.951.466.711	92	4.487.928.111	93	4.660.593.220	94	4.823.713.982	95	4.992.543.972	96	5.167.283.011	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Jayakerta	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3.775.105.365	39,77	4.100.533.615	40,77	3.908.682.682	41,77	4.042.899.075	42,77	4.184.400.544	43,77	4.330.854.562	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Banyusari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37,77	38,77	3,218,090,403	39,77	3.546.336.403	40,77	3.670.458.179	41,77	3.798.924.212	42,77	3.931.886.561	43,77	4,69.502.590	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Kotabaru	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	100	100	3.847.895.490	100	4.063.922.990	100	3.782.998.895	100	3.915.403.856	100	4.052.442.991	100	4.194.278.496	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Karawang Timur	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,1	54	8.645.777.915	57,5	8.963.001.315	59,5	9.247.972.751	52,01	9.580.001.797	64	9.907.371.860	67	10.227.073.668	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome		Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif												Urusan Bidang/Bidang Urusan
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Telukjambe Barat	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	50,01	4.246.308.400	50,51	4.696.973.900	51,51	4.551.633.378	51,51	4.710.940.546	52,51	4.875.823.463	53,15	5.046.477.284	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Tegalwaru	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	37.77	38.77	3.444.308.261	39.77	3.780.981.260	40.77	3.923.315.606	41.77	4.060.631.652	42.77	4.202.753.758	43.77	4.349.850.140	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Purwasari	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50.01	53.00	3.547.031.800	56.00	3.999.423.913	59.00	4.126.221.748	62.01	4.268.559.333	65.01	4.411.951.910	68.00	4.566.370.225	
	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Kewilayahan pada Kecamatan Cilebar	Nilai Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah	50,01	53,01	3.655.741.420	56,01	4.066.499.730	59,01	3.887.592.611	62,01	4.009.010.852	66,01	4.149.168.732	70,01	4.294.232.137	
Total Pagu				6.181.896.148.966		6.536.829.824.581		6.983.160.877.131		7.362.265.456.149		7.627.557.975.069		7.696.204.323.961		

Sumber : Analisis Bappeda dan Perangkat Daerah Terkait, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Indikator Makro

Sejumlah indikator-indikator pencapaian diuraikan berdasarkan sasaran-sasaran makro dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 yang merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum yang disusun berdasarkan pertimbangan target penyelenggaraan pembangunan pada periode 2025 – 2029.

Pencapaian indikator makro menjadi tolok ukur pencapaian beberapa indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut.

Tabel IV-2 Target Indikator Makro Tahun 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.28 - 5.69	6.14	5.47 - 7.41	5.51 - 7.56	5.69 - 7.88	5.74 - 6.24	
2	PDRB Per Kapita	Rp Juta/Kapita	130.4 - 130.76	137.75	143.68 - 145.43	152.17 - 154.97	160.78 - 164.93	169.91 - 176.12	
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	
4	Tingkat Kemiskinan	%	7.5	7.22	6.16 - 6.72	5.89 - 6.45	5.58 - 6.15	5.2 - 5.76	
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.04	7.06	7.72 - 8.43	7.68 - 8.4	7.66 - 8.37	7.61 - 8.32	
6	Rasio Gini	%	0.38 - 0.387	0.342	0.371 - 0.394	0.37 - 0.393	0.369 - 0.392	0.369 - 0.392	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74.06	74.65	74.67	75.09	75.48	75.88	
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2Eq/Miliar	3,34	3,53	3,72	3,96	4,21	4,41	
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	44.53	44.82	45.11	45.4	45.7	45.99	
10	Prevalensi Stunting	%	14.98	14.37	13.23	12.44	11.69	10.99	

Sumber: Analisis Bappeda dan Perangkat Daerah Terkait, 2025

4.2.2 Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator di level dampak (*impact*) yang merupakan akumulasi dari hasil (*outcome*) multi-aspek penyelenggaraan pembangunan di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) diambil dari indikator tujuan/sasaran strategis RPJMD yang kedudukannya lebih ke arah dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan. Capaian pada indikator kinerja utama didukung oleh kinerja *outcome* dan *intermediate outcome* yang pada umumnya hasil *crosscutting* beberapa dari berurusan atau program.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel IV-3 Target Indikator Kinerja Utama 2025 - 2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pendidikan	Indeks	61.01	61,29	61,54	61,77	62,05	62,31	
2	Indeks Kesehatan	Indeks	86.04	87.21	88.37	89.53	90.69	91.86	
3	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,84	58,84	59,84	60,84	61,84	62,84	
4	Capaian Universal Akses	%	36.68	40.28	44.73	51.12	57.94	66.74	
5	Indeks Konektivitas Wilayah	%	73.09	75.76	79.96	84.28	88.74	93.33	
6	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,36	2,38	2,40	2,42	2,45	2,47	
7	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	4,20	4,05	3,86	3,65	3,42	3,13	
8	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	70,78	70,73	70,68	70,64	70,59	70,55	
9	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	%	10,20	10,61	11,03	11,47	11,93	12,41	
10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66	
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,04	7,06	7,72 - 8,43	7,68 - 8,4	7,66 - 8,37	7,61 - 8,32	
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	44.53	44.82	45.11	45.4	45.7	45.99	
13	Indeks Risiko Bencana	Nilai	142.06	142.05	142.04	142.03	142.02	142.01	
14	Nilai Reformasi Birokrasi General Kabupaten	Nilai	73.5	73.75	74	74.25	74.5	74.75	

Sumber: Analisis Bappeda dan Perangkat Daerah Terkait, 2025

4.2.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah menunjukkan gambaran mengenai keberhasilan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang. Indikator kinerja daerah berisikan akumulasi pencapaian indikator-indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga pada akhir periode RPJMD dapat dicapai sesuai yang diinginkan. Indikator kinerja daerah menjadi ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah mencakup indikator makro dan indikator kunci.

Indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah.

Berikut ini adalah tabel indikator kinerja daerah dan indikator kinerja kunci yang disusun berdasarkan setiap urusan pemerintahan di Kabupaten Karawang.

Tabel IV-4 Target Indikator Kinerja Daerah 2025 – 2030

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
INDIKATOR KINERJA DAERAH										
A	Aspek Geografi dan Demografi									
1	Indeks Kualitas Air	Poin	64,76	64,96	65,16	65,36	65,56	65,76		Lingkungan Hidup
2	Indeks Kualitas Udara	Poin	21,56	22,06	22,56	23,06	23,56	24,06		Lingkungan Hidup
3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	52,26	52,33	52,40	52,47	52,54	52,61		Lingkungan Hidup
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	16,33	21,71	27,08	32,46	37,83	43,21		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	33,05	37,46	42,45	48,11	54,52	57,55		Lingkungan Hidup
6	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	81,76	85,55	89,53	93,68	100	100		Lingkungan Hidup
7	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	4,20	4,05	3,86	3,65	3,42	3,13		Pangan
8	Kapasitas Air Baku	m3/detik	5,89	6,67	7,46	8,27	9,10	9,93		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	19,43	23,45	27,48	31,51	35,54	39,57		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52	0,53		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO2eq	1.468.894,64	1.609.851,61	1.758.942,06	1.929.436,20	2.128.825,22	2.345.953,06		Lingkungan Hidup
	a. Sektor Afolu/Penggunaan Lahan	Ton CO2eq	20,6	22,32	24,21	26,19	27,94	29,72		Lingkungan Hidup
	b. Sektor Persampahan	Ton CO2eq	21.867,27	40.295,14	67.265,57	110.667,49	164.896,62	228.508,84		Lingkungan Hidup
	c. Sektor Limbah Cair	Ton CO2eq	4.229,74	7.722,57	12.772,69	20.802,63	30.717,10	42.209,27		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	d. Sektor Pertanian	Ton CO2eq	1.430.256,80	1.545.854,51	1.658.857,69	1.773.069,06	1.889.381,14	2.005.037,03		Pertanian
	e. Sektor Perternakan	Ton CO2eq	3.977,94	4.252,03	4.503,08	4.739,73	4.963,85	5.170,91		Pertanian
	f. Sektor Transportasi	Ton CO2eq	8.547,06	11.709,82	15.523,59	20.135,88	38.843,35	64.997,29		Perhubungan
12	Rasio Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	1370	1360	1350	1340	1330	1320		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Pelayanan Identitas Kependudukan Digital	%	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00		
B	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
14	Usia Harapan Hidup	Tahun		75,43	75,61	75,79	75,97	76,15		Kesehatan
15	Jumlah Kasus Kematian Ibu Per Tahun	Kasus	38	36	35	33	31	30		Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (<i>Treatment Coverage</i>)	%	100	100	100	100	100	100		Kesehatan
17	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (<i>Treatment Success Rate</i>)	%	91	91,35	91,7	92,05	92,4	92,75		Kesehatan
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,68	99,70	99,74	99,76	99,78	99,80		Kesehatan
19	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	95	96	97	98	99	99		Kesehatan
20	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	35	45	55	60	70	75		Kesehatan
21	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,11	8,17	8,23	8,28	8,34	8,40		Pendidikan
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,26	12,28	12,30	12,33	12,35		Pendidikan
23	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	48,40	48,90	49,40	49,90	50,40	50,90		Tenaga Kerja
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	%	51,35	58,45	63,97	69,48	75,00	79,81		Tenaga Kerja

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ketenagakerjaan Kabupaten									
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	9,24	10,24	11,24	12,24	13,24	14,24		Sosial
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	44,98	45,48	46,98	47,48	48,98	50,48		Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
27	Presentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Telah Ditetapkan terhadap Total Pencatatan/Registra si	%	28,12	34,37	40,62	46,87	53,12	59,37		Kebudayaan
28	Presentase Benda, Bangunan, Struktur Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan terhadap Total Pendaftaran/Registrasi	%	28,26	34,78	41,30	47,82	54,34	60,86		Kebudayaan
29	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	61	61,55	62,1	62,65	63,2	63,75		Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,46	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41		Pemberdayaa n Perempuan dan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Perlindungan Anak
31	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Dimensi Kebahagiaan	Persentase	64,48	65,48	66,48	67,48	68,48	69,48		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
32	Indeks Pembangunan Gender	%	91,99	92,00	92,01	92,02	92,03	92,04		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Kelahiran Per 1000 WUS 15-19 Tahun	18	17,5	17	16,5	16	15,5		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
34	Indeks Lansia Berdaya	Persentase	56,5	57	57,5	58	58,5	59		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,46	0,48	0,5	0,52	0,54	0,56		Sekretariat Daerah
C	Aspek Daya Saing Daerah									
36	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	70,78	70,73	70,68	70,64	70,59	70,55		Perindustrian
37	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,37	1,42	1,48	1,54	1,60	1,66		Pariwisata
38	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	65117	68607	72098	75588	79079	82570		Pariwisata

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karawang	%	10,11	10,37	10,67	10,98	11,33	11,70		Pariwisata
40	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	12,83	13,10	13,38	13,65	13,93	14,2		Koperasi dan UMKM
41	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	4,2	4,4	4,6	4,8	5	5,2		Perindustrian
42	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,1	3,27	3,45	3,62	3,79	3,96		Koperasi dan UMKM
43	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,8	1,108	1,416	1,724	2,032	2,34		Koperasi dan UMKM
44	Indeks Inovasi Daerah	Skor	58,88	60,38	61,88	63,38	64,88	65,00		Perencanaan
45	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Skor	56,94	58,14	59,35	60,55	61,75	62,95		
46	Produktivitas Padi atau bahan Pangan Utama Lokal Lainnya	Ton Per Hektar	7,035	7,046	7,057	7,068	7,079	7,090		Pertanian
47	Indeks ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)	Nilai	97,12	97,25	97,37	97,50	97,62	97,75		Keuangan
48	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar	%	6,1	5,96	5,82	5,68	5,54	5,4		Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Waktu Barang Kebutuhan Pokok									
49	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	16,66	16,74	16,82	16,90	16,98	17,06		
50	Ekspor Barang dan Jasa	%	48,46	48.434	48,408	48.382	48.356	48,33		Perdagangan
51	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	%	74,04	75,7	77,36	79,02	80,66	81,86		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	Persentase Desa Mandiri	%	38,72	42,09	45,45	48,82	52,19	55,56		Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
53	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,54	0,55	0,56	0,58	0,61	0,63		Keuangan
54	Tingkat Inflasi	%	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1		Sekretariat Daerah
55	Jumlah Kerjasama Internasional	Kerjasama	0	0	0	0	0	1		Sekretariat Daerah
56	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	50	30	50	30	50	30		Sekretariat Daerah
57	Jumlah <i>Sister Province</i>	Provinsi	0	0	0	0	0	1		Sekretariat Daerah
D	Aspek Pelayanan Umum									
58	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	94,9	95	95,01	95,02	95,03	95,04		Sekretariat Daerah
59	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintah Digital	Indeks	4,4	1,5	1,75	2	2,25	2,5		Komunikasi dan Informatika
60	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,27	4,28	4,29	4,30	4,31	4,32		Sekretariat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61	Indeks Integritas Nasional	Nilai	73,33 - 73,55	73,55-74	74-74,5	74-74,5	75-75,5	75,5-76		Pengawasan
62	Rasio Jumlah Penegakkan Perda terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang	%	0,0271	0,0322	0,0346	0,0369	0,0392	0,0440		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
63	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori/Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi		Kesatuan Bangsa dan Politik
64	Nilai IAKD	%	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,6		Sekretariat Daerah
65	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai	%	100	100	100	100	100	100		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
66	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah	%	100	100	100	100	100	100		
67	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	%	100	100	100	100	100	100		
INDIKATOR KINERJA KUNCI										
A	Pendidikan									
68	Skor Literasi dan Numerasi	%	71,59	72,23	72,88	73,53	74,18	74,83		Pendidikan
69	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
70	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang	%	93,58	94,48	95,37	96,26	97,15	98,05		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama									
71	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	74,58	75,72	76,86	78,01	79,15	80,29		
72	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	46,82	48,41	49,99	51,57	53,15	54,73		
B	Kesehatan									
73	Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000	1:1000		Kesehatan
74	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100		
75	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
76	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	100	100	100	100	100	100		
77	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100		
78	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
79	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
80	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
81	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100		
82	Persentase Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	100		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar									
83	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
84	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
85	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
86	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100		
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
87	Indeks Layanan Infrastruktur	%	74,31	77,96	81,61	84,26	86,91	89,56		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
88	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	%	71,26	75,76	80,26	83,51	86,76	90,01		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
89	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15		
90	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	16,67	33,33	50,00	66,67	83,33	100,00		
91	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
92	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani oleh Jaringan Irigasi	%	60	70	80	85	90	95		
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
93	Indeks Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	28,58	29,03	30,22	30,46	30,72	30,98		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
94	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani	%	3,02	8,07	13,09	22,05	30,40	42,85		
95	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	0,00	0,00	0,00	33,33	66,67	100,00		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
96	Facilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	0,00	28,77	46,58	64,38	82,19	100,00		
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat									
97	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
98	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
99	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
100	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10 1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	66	69	70,25	72	73	75		
10 2	Indeks Pelayanan Trantibumlinmas	Indeks	85,18	87,09	88,83	90,41	91,86	93,18		
10 3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	94,50	94,75	95,00	95,25	95,50	95,75		
10 4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	82,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00		
F	Sosial									
10 5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	60,76	61,76	62,76	63,76	64,76	65,76		Sosial
10 6	Persentase PPKS yang Mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Tepat Sasaran	%	88,72	89,22	89,72	90,22	90,72	91,22		
10 7	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
108	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
G	Tenaga Kerja									
109	Indeks Daya Saing Tenaga Kerja	Poin	76,92	77,92	78,92	79,92	80,92	81,92		Tenaga Kerja
110	Persentase Pencari Kerja yang Diberdayakan dan Ditempatkan	%	74,65	75,65	76,65	77,65	78,65	79,65		
111	Tingkat Perlindungan Tenaga Kerja	%	80,32	81,32	82,32	83,32	84,32	85,32		
112	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
113	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	50,58	53,58	56,58	59,58	62,58	65,58		
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
114	Persentase Implementasi Desa	%	17,48	33,98	50,49	66,99	83,50	100,00		Pemberdayaan Perempuan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Ramah Perempuan dan Peduli Anak									dan Perlindungan Anak
11 5	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	96	97	98	99	100	100		
11 6	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	6,0	6,05	6,1	6,15	6,2	6,25		
11 7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00		
11 8	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00		
I	Pangan									
11 9	Persentase Peningkatan poin Pola Pangan Harapan	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		Pangan
12 0	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Poin	92,58	92,59	92,60	92,61	92,62	92,63		
12 1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya	%	21,40	24,40	27,40	30,40	33,40	36,40		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)									
J	Pertanahan									
12 2	Tersedianya tanah obyek landrefoarm (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	%	N/A	100	100	100	100	100		Pertanahan
K	Lingkungan Hidup									
12 3	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	25	30	35	40	45	50		Lingkungan Hidup
12 4	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	39,00	40,00	41,00	42,00	43,00	45,00		
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
12 5	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan	Poin	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00	91,25		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126	Indeks Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	66,25	68,00	69,75	71,50	73,25	74,75		
127	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	65,00	68,00	71,00	74,00	77,00	80,00		
128	Perekaman KTP elektronik	%	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00		
129	Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun	%	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	99,00		
130	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan jalinan kerjasama	%	8,00	11,00	15,00	19,00	22,00	25,00		
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
131	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	10,20	11,36	11,82	14,71	17,24	20,83		Pemberdayaa Masyarakat dan Desa
132	Persentase BUMDes yang Berkinerja Baik	%	2,69	4,04	5,39	7,07	8,75	10,10		
N	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
133	Angka Kelahiran Total (TFR) Per Wanita Usia Subur 15-49 Tahun	Anak	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13 4	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persentase	64,5	65	65,5	66	66,5	67		
13 5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase	13,00	12,5	12	11,5	11	10,5		
O	Perhubungan									
13 6	Indeks Layanan Perhubungan	%	66,19	68,86	73,97	79,29	84,82	90,57		Perhubungan
13 7	Indeks Infrastruktur Perhubungan	%	62,03	65,37	71,76	78,41	85,32	92,50		
13 8	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Nilai	0,67	0,65	0,63	0,61	0,59	0,57		
P	Komunikasi dan Informatika									
13 9	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang/ Tingkat Kematangan Pemerintah Digital Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang pada Aspek Teknologi Digital	Indeks	60	1,5	1,75	2	2,25	2,5		Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
140	Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	Kategori	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif		
141	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100		
142	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100		
Q	Koperasi dan UMKM									
143	Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	73,93	87,83	88,48	89,07	89,61	90,09		Koperasi dan UMKM
144	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	%	6,26	10,10	13,94	17,78	21,63	25,47		
R	Penanaman Modal									
145	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	1,00%	1,25%	1,50%	1,75%	2,00%	2,25%		Penanaman Modal

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14 6	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)	Triliun Rupiah	69.300	70.166	71.219	72.465	73.914	75.577		
S	Kepemudaan dan Olahraga									
14 7	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Kepemudaan dan Olahraga
14 8	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21,41	22,75	23,42	24,09	24,76	25,43		
14 9	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
15 0	Peringkat Olahraga pada Multievent Provinsi	Peringkat	10 Besar	9 Besar	8 Besar	7 Besar	6 Besar	5 Besar		
15 1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	10,50	10,66	10,82	10,97	11,13	11,29		
T	Statistik									
15 2	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,86	3,01	3,01	3,16	3,16	3,31		Statistik
15 3	Persentase Organisasi	%	90	90	90	90	90	90		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah									
15 4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	90	90	90	90	90	90		
U	Persandian									
15 5	Indeks Keamanan Informasi	Nilai	600	610	620	630	640	650		Persandian
15 6	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	65,36	66,45	67,54	68,63	69,72	70,81		
V	Kebudayaan									
15 7	Terlestarinya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100		Kebudayaan
W	Perpustakaan									
15 8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	63,21	63,46	63,71	63,90	64,15	64,34		Perpustakaan
15 9	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	55,48	56,48	57,48	58,48	59,48	60,48		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
X	Kearsipan									
160	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Indeks	60,22	60,43	60,64	60,85	61,05	61,26		Kearsipan
161	Nilai Tingkat Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	60,13	60,51	60,61	60,81	61,01	61,51		
162	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	34,01	38,01	42,01	46,01	50,01	54,01		
163	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	89,06	91,00	91,25	91,51	91,75	92,01		
Y	Kelautan dan Perikanan									
164	Persentase Rata-Rata Peningkatan Pendapatan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Pengolah Hasil Perikanan	%	1,91	1,97	2,04	2,10	2,17	2,23		Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16 5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	9579,75	9687,01	9795,47	9.905,14	10.016,04	10.128,18		
16 6	Persentase Peningkatan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	%	n/a	17,37	14,80	12,89	11,42	10,25		
16 7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	47.222,35	47.735,12	48.253,46	48.777,43	49.307,09	49.842,50		
16 8	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	57.406,21	58.131,36	58.865,67	59.609,26	60.362,24	61.124,73		
Z	Pariwisata									
16 9	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	9,27	9,46	9,74	10,04	10,33	10,64		Pariwisata
17 0	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
17 1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
AA	Pertanian									
17 2	Peningkatan Produksi Pertanian	%	0,62	0,72	0,82	0,92	1,02	1,12		Pertanian
17 3	Persentase penurunan kejadian	%	6	6,5	7	7,5	8	8,5		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	dan jumlah kasus penyakit hewan menular									
BB	Perdagangan									
17 4	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	90,26	90,66	91,06	91,46	91,86	92,26		Perdagangan
17 5	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	100	100	100	100	100	100		
CC	Perindustrian									
17 6	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	13,06	13,12	13,18	13,24	13,3	13,36		Perindustrian
17 7	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00		
DD	Pengawasan/ Inspektorat Daerah									
17 8	Kategori Capaian Kinerja Program Prioritas Daerah	Kategori / Level	Berhasil (Level 4)	Berhasil (Level 4)	Berhasil (Level 4)	Berhasil (Level 4)	Berhasil (Level 4)	Berhasil (Level 4)		Pengawasan
17 9	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat	3	3	3	3	3	3		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
180	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	3	3	3		
EE	Keuangan									
181	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		Keuangan
182	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3		
183	Manajemen aset	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
184	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
185	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	40,65	39,77	40,55	41,78	44,01	44,22		
186	Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target Pajak Daerah	%	102,82	103,85	104,89	105,93	106,99	108,06		
187	Persentase Realisasi Retribusi Daerah terhadap Retribusi Daerah	%	103,11	104,14	105,18	106,23	107,29	108,37		
FF	Kepegawaian									
188	Indeks Penerapan Sistem Merit Penilaian Mandiri (Asistensi BKN)	Skor	0,92	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98		Kepegawaian
189	Nilai Sistem Merit Penilaian Mandiri	Skor	376,5	385,00	387,5	392,5	397,5	400,00		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
GG	Sekretariat Daerah									
190	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	70,50	83,31	93,86	94,36	95,77	96,27		Sekretariat Daerah
191	Nilai SAKIP	Nilai	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	74,5		
192	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,90	84,92	84,94	84,96	84,98	85,00		
193	Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik	Skala	Cukup dengan potensi maladministrasi (KP 54,00-77,99/ TK 5-9)	Baik dengan potensi maladministrasi (KP 78,00-87,99/ TK 5-9)	Baik dengan potensi maladministrasi (KP 78,00-87,99/ TK 5-9)	Baik dengan potensi maladministrasi (KP 78,00-87,99/ TK 5-9)	Baik dengan potensi maladministrasi (KP 78,00-87,99/ TK 5-9)	Baik tanpa maladministrasi (KP 78,00-87,99/ TK 10)		
194	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Skala	4	4	4	5	5	5		
195	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	%	1	1	1	1	1	1		
196	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	%	96,78	96,85	96,95	97,1	97,2	97,25		
197	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	%	58,00	58,5	59,00	59,5	60,00	62,00		

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket .	Urusan Bidang
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
H H	Sekretariat DPRD									
19 8	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	75	76	77	78	79	79		Sekretariat DPRD
II	Kesatuan Bangsa dan Politik									
19 9	Indeks Ketahanan Politik Daerah	Skor	100	100	100	100	100	100		Kesatuan Bangsa dan Politik
20 0	Indeks Stabilitas Politik dan Keamanan Daerah	Skor	75	80	82,5	85	87,5	90		
JJ	Perencanaan									
20 1	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	%	22,18	22,28	22,39	22,49	22,59	22,69		Perencanaan
20 2	Nilai komponen pengukuran kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten	%	19,98	20,08	20,19	20,29	20,39	20,49		
KK	Penelitian dan Pengembangan									
20 3	Persentase hasil riset yang didiseminasikan dan usulan inovasi daerah perangkat daerah yang terdaftar di indeks inovasi daerah (IID)	%	100	100	100	100	100	100		Penelitian dan Pengembangan

Sumber : Analisis Bappeda dan Perangkat Daerah Terkait, 2025

V



Source: photo by karawang.go.id

Bab

V

PENUTUP

BAB V

Penutup

5.1 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh stakeholder. RPJMD ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka menyusun Rencana Strategis dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kaidah pelaksanaan RPJMD sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas:

1. Pemerintah Kabupaten Karawang, beserta masyarakat, dunia usaha dan stakeholder lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, serta program pembangunan dilengkapi dengan target kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029
3. Pemerintah Kabupaten Karawang akan menjaga konsistensi antara RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta memastikan RPJMD ini adalah pelaksanaan dari tahap pertama (2025 – 2029) dari RPJPD Kabupaten Karawang 2025-2044
4. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang akan memastikan adanya konsistensi antara dokumen RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029
6. Pembiayaan pelaksanaan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029 dimungkinkan menggunakan skema alternatif selain APBD Kabupaten Karawang, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN, seperti partisipasi pembiayaan oleh masyarakat dan badan usaha, dan atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai



sumber pembiayaan tersebut dapat digunakan secara bersama dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5.2 Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 belum dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2025. Oleh sebab itu dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Kabupaten Karawang 2025 yang disusun pada Tahun 2024 masih akan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karawang periode sebelumnya yang juga memiliki target kinerja hingga 2025. Penyusunan RKPD Kabupaten Karawang 2025 tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang untuk periode 2025-2029 adalah sebuah dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai panduan utama bagi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dokumen ini dirancang dengan pendekatan inklusif, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dan stateholder lainnya dapat terlibat aktif dalam proses pembangunan selama lima tahun mendatang. RPJMD Kabupaten Karawang 2025-2029 merangkum visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang terukur, yang kemudian dijabarkan ke dalam program dan kegiatan spesifik untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dengan demikian, dokumen RPJMD ini diharapkan dapat menggerakkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Pemerintah Kabupaten Karawang, untuk bersinergi mencapai tujuan pembangunan bersama. Melalui perencanaan yang partisipatif dan berkelanjutan, Kabupaten Karawang berupaya untuk membangun kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal dan regional, guna mewujudkan visi dan misi daerah serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang



Jl. Jenderal Ahmad Yani No.76, Kel. Nagasari, Kec.
Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41314



(0267) 429833



<https://bappeda.karawangkab.go.id/>